

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul selama tahun 2020. LKPJ Bupati Bantul Tahun 2020 ini disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul.

Hasil pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dapat diukur berdasarkan capaian indikator kinerja utama, indikator kinerja program, yang bermuara pada aspek kesejahteraan dan layanan publik. Pengukuran kinerja terhadap target yang sudah ditetapkan harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul. Sedangkan ruang lingkup LKPJ Bupati Bantul tahun 2020 ini, meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan hasil pelaksanaan penugasan. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, dan tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Mencermati atas hasil penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul, sudah banyak hasil yang telah dicapai, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan untuk tahun-tahun berikutnya, sebagaimana terlihat pada tingkat capaian indikator kinerja tahun 2020. Selain itu, muatan dalam LKPJ ini, juga memberikan deskripsi mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan hasil pembahasan atas dokumen LKPJ ini dimanfaatkan untuk melakukan sejumlah perbaikan penyelenggaraan urusan pembangunan di Kabupaten Bantul yang berorientasi pada pencapaian hasil.

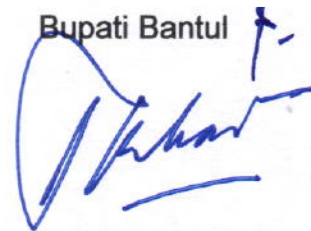
Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dan semua pihak yang telah membantu penyusunan LKPJ akhir tahun 2020 ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran komprehensif atas pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul selama tahun 2020.

Terima Kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bantul, Februari 2021

Bupati Bantul

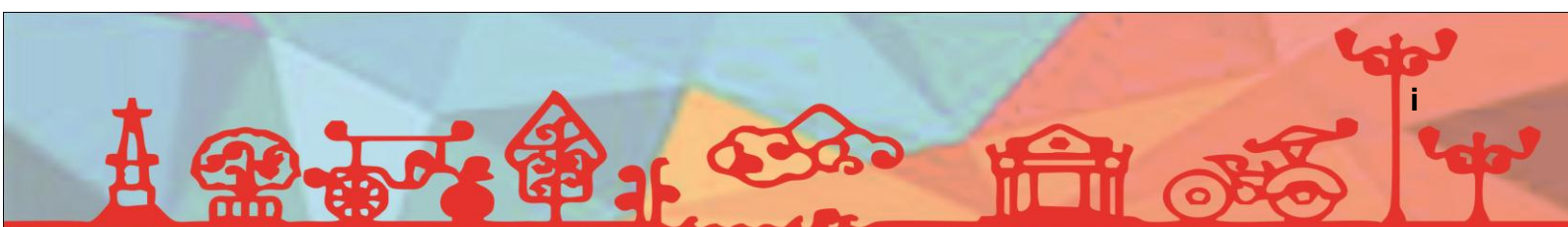


Drs. H. Suharsono



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DASAR HUKUM	1
B. VISI DAN MISI	3
1. Visi	3
2. Misi.....	4
C. TUJUAN DAN SASARAN.....	5
1. Tujuan	5
2. Sasaran.....	5
D. DATA UMUM.....	9
1. Kondisi Geografis.....	9
2. Kondisi Topografi	11
3. Kondisi Geologi	11
4. Kondisi Klimatologi.....	12
5. Kondisi Demografi.....	12
6. Potensi Daerah	17
7. Kondisi Perekonomian Dan Kesejahteraan Daerah	22
BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH	28
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.....	32
1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	32
2. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	33
3. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	37
4. Permasalahan dan Solusi	41
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH	41



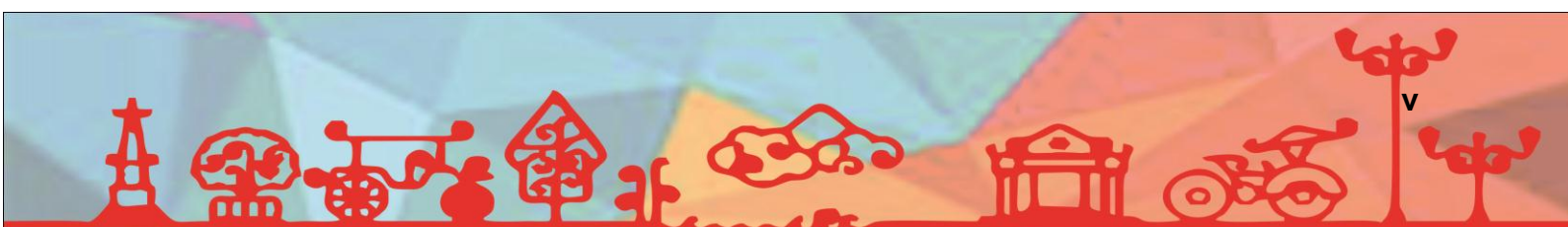
1. Kebijakan Umum Belanja Daerah	41
2. Rencana dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah.....	43
3. Permasalahan dan Solusi	48
C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	49
1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah	49
2. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	49
3. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	50
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERITAHAN DAERAH.....	51
A. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	51
1. Pendidikan	51
2. Kesehatan.....	76
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	122
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	143
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	147
6. Sosial	167
B. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	186
1. Tenaga Kerja.....	186
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	207
3. Pangan.....	217
4. Pertanahan.....	233
5. Lingkungan Hidup	242
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	266
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	283
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	305
9. Perhubungan.....	324
10. Komunikasi dan Informatika	338
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	365
12. Penanaman Modal	382
13. Kepemudaan dan Olahraga	406

14. Statistik.....	415
15. Persandian	418
16. Kebudayaan	425
17. Perpustakaan	446
18. Kearsipan	454
19. Kelautan dan Perikanan.....	458
20. Pariwisata.....	469
21. Pertanian.....	480
22. Kehutanan.....	512
23. Energi dan Sumberdaya Mineral.....	512
24. Perdagangan.....	513
25. Perindustrian	544
26. Transmigrasi	556
C. FUNGSI PENUNJANG	559
1. Perencanaan Pembangunan.....	559
2. Keuangan.....	604
3. Kepegawaian, Kependidikan dan Pelatihan	656
4. Penelitian dan Pengembangan	686
5. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	687
6. Pengawasan	695
7. Pemerintahan Umum	707
D. TINDAK LANJUT CATATAN STRATEGIS DPRD TAHUN 2019.....	770
E. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020	790
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	792
A. Program Program Bantuan Keuangan Khusus.....	792
B. Realisasi Program Bantuan Keuangan Khusus	792
BAB V PENUTUP.....	796
LAMPIRAN	798

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Kabupaten Bantul.....	7
Tabel 1. 2 Penggunaan Lahan Tahun 2020 (Ha).....	10
Tabel 1. 3 Keberadaan Stasiun Pencatat Hujan Tahun 2020	12
Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2020	13
Tabel 1. 5 Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pendidikan Tahun 2020	15
Tabel 1. 6 Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan.....	16
Tabel 1. 7 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas	17
Tabel 1. 8 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	18
Tabel 1. 9 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan.....	19
Tabel 1. 10 Jumlah Rumah Tangga Perikanan dan Produksi Perikanan Budidaya	20
Tabel 1. 11 Data Event Tahun 2020	20
Tabel 1. 12 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata Tahun 2020	20
Tabel 1. 13 Realisasi Investasi Per Triwulan Tahun 2020	21
Tabel 1. 14 Realisasi Ekspor per Bulan di Kabupaten Bantul tahun 2019 & 2020.....	22
Tabel 1. 15 PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan	23
Tabel 1. 16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....	23
Tabel 1. 17 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2016-2020.....	24
Tabel 1. 18 Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	25
Tabel 1. 19 Gini Rasio Kabupaten Bantul 2016-2020	25
Tabel 1. 20 Data Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020	26
Tabel 1. 21 Rekapitulasi Bantuan Sosial Terdampak Covid-19 Tahun 2020	27
Tabel 2. 1 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	37
Tabel 2. 2 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2020	44
Tabel 2. 3 Permasalahan dan Solusi dalam Aspek Belanja Daerah	48
Tabel 3. 1 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2016 – 2020	68

Tabel 3. 2 Kondisi Pendidikan Dasar Tahun 2016 – 2020	69
Tabel 3. 3 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2016 – 2020.....	70
Tabel 3. 4 Kondisi Data Lembaga PNF Tahun 2020.....	72
Tabel 3. 5 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pendidikan	75
Tabel 3. 6 Umur Harapan Hidup	76
Tabel 3. 7 Capaian Indikator IKS Tahun 2020	84
Tabel 3. 8 Capaian Tatanan Phbs Tahun 2016 – 2020	89
Tabel 3. 9 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan.....	113
Tabel 3. 10 Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020	118
Tabel 3. 11 Permasalahan Dan Solusi Dalam Urusan Kesehatan.....	120
Tabel 3. 12 Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2016-2020	125
Tabel 3. 13 Lokasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 2020	128
Tabel 3. 14 Lokasi Pemasangan Papan Larangan Tahun 2020	130
Tabel 3. 15 Lokasi Pembangunan saluran drainase/air hujan Tahun 2020.....	132
Tabel 3. 16 Lokasi Pemeliharaan Saluran Drainase Tahun 2020	133
Tabel 3. 17 Lokasi Peningkatan Afvour Tahun 2020	136
Tabel 3. 18 Data Pelaksanaan Pekerjaan Bersumber dana Biaya tak Terduga.....	138
Tabel 3. 19 Permasalahan Dan Solusi dalam Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	142
Tabel 3. 20 Data Kondisi Jalan Desa Tahun 2020.....	144
Tabel 3. 21 Data Penanganan RTLH Tahun 2020.....	145
Tabel 3. 22 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	147
Tabel 3. 23 Kejadian dan lokasi bencana yang terjadi di Kabupaten Bantul.....	151
Tabel 3. 24 Wilayah yang terdampak bencana kekeringan dan jumlah droping air bersih di tahun 2020.....	160
Tabel 3. 25 Data Jumlah Kejadian per Bencana di Kabupaten Bantul...	164
Tabel 3. 26 Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bantul.....	165
Tabel 3. 27 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Ketentraman,Ketertiban, Dan Perlindungan Masyarakat	166
Tabel 3. 28 Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat.....	175
Tabel 3. 29 Pelaksanaan WKSBM.....	178
Tabel 3. 30 Hasil Evaluasi WKSBM.....	179
Tabel 3. 31 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Sosial	185



Tabel 3. 32 Uji Kompetensi Peserta Pelatihan BLK	190
Tabel 3. 33 Penanggulangan Masalah Ketenagakerjaan	195
Tabel 3. 34 Realisasi Penempatan Melalui AKL, AKAD, dan AKAN (Berdasarkan Jumlah Orang)	203
Tabel 3. 35 Kegiatan Terapan Teknologi Tepat Guna	205
Tabel 3. 36 Kegiatan Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat	206
Tabel 3. 37 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Tenaga Kerja.....	207
Tabel 3. 38 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	217
Tabel 3. 39 Daftar KWT Peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan..	219
Tabel 3. 40 Daftar KWT Penerima Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan.....	220
Tabel 3. 41 Daftar Gapoktan Pelaksana Program LDPM	223
Tabel 3. 42 Gapoktan Pelaksana Program PUPM.....	224
Tabel 3. 43 Ketersediaan Energi, Protein & Lemak Berdasarkan Jenis Bahan Makanan	226
Tabel 3. 44 Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020	229
Tabel 3. 45 Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....	231
Tabel 3. 46 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pangan.....	233
Tabel 3. 47 Permohonan Penggunaan Tanah Kasultanan / SG Tahun 2020	236
Tabel 3. 48 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pertanahan.....	241
Tabel 3. 49 Daftar Lokasi Wisata Penerima Tong Sampah	244
Tabel 3. 50 Pelatihan Pengelolaan Sampah	249
Tabel 3. 51 Workshop pengelolaan sampah.....	250
Tabel 3. 52 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Lingkungan Hidup	265
Tabel 3. 53 Sinkronisasi Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTPCR)	276
Tabel 3. 54 Permasalahan Besar Kabupaten Dalam RENSTRA	282
Tabel 3. 55 Permasalahan dan solusi pemberdayaan masyarakat dan desa	305
Tabel 3. 56 Permasalahan dan Solusi pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	323
Tabel 3. 57 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Perhubungan.....	337
Tabel 3. 58 Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020	351
Tabel 3. 59 Badan publik yang termasuk kualifikasi “Menuju Informatif”	352

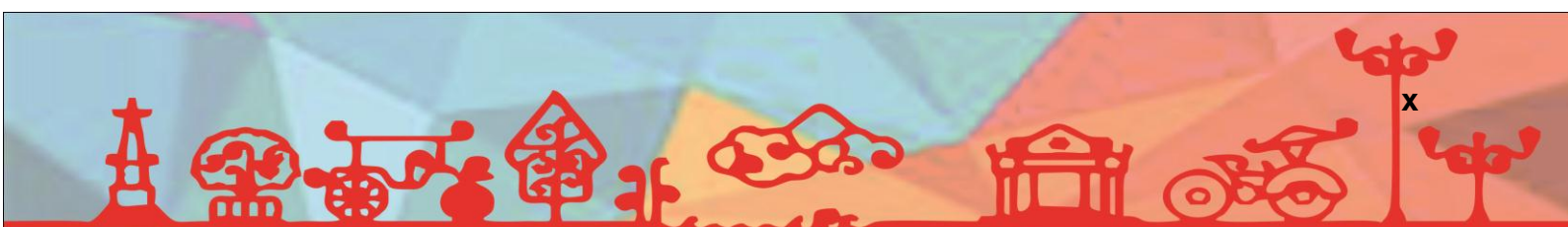
Tabel 3. 60 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Komunikasi dan Informatika	364
Tabel 3. 61 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Koperasi Tahun 2016-2020.....	377
Tabel 3. 62 Jumlah Koperasi Menurut Bentuk Koperasi Tahun 2016-2020.....	378
Tabel 3. 63 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Tahun 2016-2020.....	378
Tabel 3. 64 Keragaan Koperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2020.....	379
Tabel 3. 65 Koperasi Berbadan Hukum Tahun 2016-2020.....	379
Tabel 3. 66 Pertumbuhan UMKM Tahun 2017-2020	380
Tabel 3. 67 Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM Tahun 2017-2020	380
Tabel 3. 68 Data Penerbitan IUMK Tahun 2015-2020	381
Tabel 3. 69 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2020	381
Tabel 3. 70 Data Capaian Target Tahun 2016 – 2020.....	404
Tabel 3. 71 Permasalahan dan Solusi Urusan Penanaman Modal.....	406
Tabel 3. 72 Program yang dilaksanakan dalam urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2020	406
Tabel 3. 73 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.....	414
Tabel 3. 74 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Statistik	417
Tabel 3. 75 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Persandian	425
Tabel 3. 76 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Kebudayaan	444
Tabel 3. 77 Jumlah Perpustakaan	452
Tabel 3. 78 Jumlah Pojok Baca	452
Tabel 3. 79 Jumlah Pengunjung Layanan Perpustakaan.....	452
Tabel 3. 80 Jumlah Perpustakaan yang Terakreditasi.....	453
Tabel 3. 81 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Perpustakaan	453
Tabel 3. 82 Data Hasil Pengawasan Kearsipan.....	455
Tabel 3. 83 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Kearsipan.....	457
Tabel 3. 84 Produksi Perikanan Tangkap	459
Tabel 3. 85 Daftar Peserta Pelatihan Budidaya Ikan Lele.....	463
Tabel 3. 86 Produksi Benih, Ikan Konsumsi dan Nilai Produksi di UPTD BBI.....	467
Tabel 3. 87 Produksi Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (Ton)	468
Tabel 3. 88 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Kelautan dan Perikanan.....	469
Tabel 3. 89 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata	470

Tabel 3. 90 Desa Wisata Tahun 2020.....	477
Tabel 3. 91 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016-2020 dalam Urusan Pariwisata	479
Tabel 3. 92 Permasalahan dan solusi dalam urusan pariwisata	480
Tabel 3. 93 Hasil keluaran yang dihasilkan dari program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.....	482
Tabel 3. 94 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Bawang Merah,Cabai Merah,dan PisangTahun 2019-2020	485
Tabel 3. 95 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tembakau,.....	486
Tabel 3. 96 Daftar Kelompok Penangkar Benih Padi.....	489
Tabel 3. 97 Produksi Benih Padi Tahun 2020.....	490
Tabel 3. 98 Data Peningkatan Kelas Kelompok Tani Tahun 2020.....	494
Tabel 3. 99 Daftar Pembangunan Irigasi Air tanah dangkal (DAK Cadangan)	505
Tabel 3. 100 Daftar Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	506
Tabel 3. 101 Produksi Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020	508
Tabel 3. 102 Populasi Ternak di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020..	510
Tabel 3. 103 Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....	511
Tabel 3. 104 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pertanian.....	512
Tabel 3. 105 Realisasi PAD TA 2020.....	529
Tabel 3. 106 Jumlah Kawasan PKL 2016-2020 (kumulatif)	537
Tabel 3. 107 Cakupan Jumlah Pasar Kondisi Baik	538
Tabel 3. 108 Jumlah Pasar di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....	538
Tabel 3. 109 Data Kondisi Pasar Tahun 2020 Di Kabupaten Bantul....	538
Tabel 3. 110 Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	539
Tabel 3. 111 Pelatihan Industri Tahun 2020	546
Tabel 3. 112 Data Pelatihan Bisnis Online Tahun 2020.....	547
Tabel 3. 113 Data Pelatihan Pada Sentra Tahun 2020.....	552
Tabel 3. 114 Data – Data Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (data sementara).....	554
Tabel 3. 115 Capaian Cakupan Industri Kreatif Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (data sementara).....	555
Tabel 3. 116 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Perindustrian Tahun 2020	555
Tabel 3. 117 Daftar Kuota Penempatan Transmigrasi Tahun 2020	558
Tabel 3. 118 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Transmigrasi	559
Tabel 3. 119 Anggaran dan Realisasi Tahun 2016-2020.....	601
Tabel 3. 120 Jumlah Piutang dari Tanah Kas Desa dan Pelungguh.....	628

Tabel 3. 121 Realisasi Pembayaran PBB-P2 atas Tanah Kas Desa dan Pelungguh.....	628
Tabel 3. 122 Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2020	633
Tabel 3. 123 Realisasi Pembayaran melalui melalui Mobil Keliling.....	639
Tabel 3. 124 Realisasi Penyetoran PFK Gaji Tahun 2020.....	645
Tabel 3. 125 Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2016-2020	652
Tabel 3. 126 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2016-2020.....	653
Tabel 3. 127 Permasalahan Dan Solusi urusan penunjang keuangan ..	655
Tabel 3. 128 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKPP.....	684
Tabel 3. 129 Permasalahan dan Solusi dalam Fungsi Penunjang Kepegawaian	686
Tabel 3. 130 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.....	694
Tabel 3. 131 Permasalahan dan Solusi Bagian Administrasi Pemerintahan 2020	713
Tabel 3. 132 Permasalahan dan Solusi kesejahteraan Rakyat.....	745
Tabel 3. 133 Permasalahan dan Solusi kapasitas pemberdayaan	754
Tabel 3. 134 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Administrasi Pemerintahan.....	761
Tabel 3. 135 Permasalahan dan Solusi Pengadaan Barang dan Jasa ..	762
Tabel 3. 136 Permasalahan dan Solusi Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Bantul.....	765
Tabel 3. 137 Tindak Lanjut Catatan Strategis DPRD Tahun 2019.....	770

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Pembangunan IPAL Komunal di Kal. Tamanan	132
Gambar 3. 2 Peningkatan SPAM Argomulyo	134
Gambar 3. 3 Buku Panduan Destacovid	154
Gambar 3. 4 Pembangunan Konstruksi Jembatan Dzikrul Ghofilin	158
Gambar 3. 5 Kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman	229
Gambar 3. 6 kegiatan di posko covid-19 terminal Palbapang	336
Gambar 3. 7 tugu QR-Code di area makam imogiri	348
Gambar 3. 8 Siaran Langsung Taman Paseban di TVRI Jogja	354
Gambar 3. 9 Dialog Interaktif Generasi Muda	358
Gambar 3. 10 Pelatihan Pasca Panen Perikanan	464
Gambar 3. 11 Pemeriksaan Rutin Ke Kandang Peternak oleh Petugas Puskesmas	499
Gambar 3. 12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Dusun Serayu dan Desa Sumberagung	506
Gambar 3. 13 Pemenang Juara I Lomba Pasar Siaga COVID-19 Tingkat DIY	543
Gambar 3. 14 Pelatihan pembuatan batik kayu	549
Gambar 3. 15 Pelatihan pembuatan minuman tradisional	550
Gambar 3. 16 Dokumentasi pelaksanaan musrenbang kabupaten secara virtual	576
Gambar 3. 17 penerimaan penghargaan dari Men PAN-RB	602
Gambar 3. 18 Penghargaan predikat “Kabupaten Sangat Inovatif”	603
Gambar 3. 19 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Perencanaan Pembangunan	603
Gambar 3. 20 Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	633
Gambar 3. 21 SIMPATDA	635
Gambar 3. 22 Distribusi Piutang PBB P2 ke 75 Desa	636
Gambar 4. 1 Pengerasan Jalan Desa Bawuran	795



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Susunan Struktur Geologi	11
Grafik 1. 2 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul Tahun 2020.....	13
Grafik 1. 3 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan	14
Grafik 3. 1 Tingkat Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2016-2020 ...	71
Grafik 3. 2 Presentase Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020	93
Grafik 3. 3 Angka Kesakitan Dan Angka Kematian DBD Tahun 2016-2020	99
Grafik 3. 4 Angka penemuan Kasus dan Angka Keberhasilan TB Tahun 2016-2020.....	101
Grafik 3. 5 Penemuan Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2020	103
Grafik 3. 6 Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Umur	110
Grafik 3. 7 Pasien Covid-19 yang ditangani PSC 119.....	110
Grafik 3. 8 Angka Kematian Bayi Di Kab. Bantul Dan DIY Tahun 2016-2020	116
Grafik 3. 9 Angka Kematian Ibu dan Target Renstra	118
Grafik 3. 10 Pencapaian IKLH Kabupaten Bantul 2020	242
Grafik 3. 11 Tren Kualitas Air Sungai.....	263
Grafik 3. 12 Tren Kualitas Udara.....	263
Grafik 3. 13 Tren Tutupan Lahan Di Kabupaten Bantul	264
Grafik 3. 14 Nilai Pre Test dan Post Test peserta pelatihan Ekspor	519
Grafik 3. 15 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	533
Grafik 3. 16 SP2D GU Nihil dan SP2D TU Nihil.....	622
Grafik 3. 17 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNSD (Jutaan Rupiah) Tahun 2020.....	644
Grafik 3. 18 Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2020.....	644



BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bantul Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

- a. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
- b. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
- c. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
- d. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
- e. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
- f. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

2. Misi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur;
- c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan;
- d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana;
- e. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan:

- a. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
- b. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
- c. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
- d. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- c. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
- d. Memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic dan Time-based*).

Langkah-langkah perumusan tujuan dan sasaran:

- a. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
- b. Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan isu-isu strategis dalam jangka menengah. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan isu-isu strategis maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;
- c. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
- d. Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- e. Menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN, dan RPJMD Propinsi.

Tabel 1. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup
				Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah
3	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan
			Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi
				Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Gini Ratio
				Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan
				Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Cakupan industri kreatif
					Pertumbuhan produksi tanaman pangan
Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura					
Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan					

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran
					Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)
				Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan
4	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur
				Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
				Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana
				Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
5	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa	Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas
		Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan

Sumber: RPJMD Tahun 2016-2021

D. DATA UMUM

1. Kondisi Geografis

a. Batas Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 14°04'50" 27°50'50" Lintang Selatan dan 110°10'41"-110°34'40" Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Bantul :

Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul sebelah Timur.

Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo di sebelah Barat.

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia.

b. Luas Wilayah dan Pemanfaatan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 km², terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan. Dlingo adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 km², sementara Srandakan adalah kecamatan dengan wilayah paling sempit, yaitu 18,32 km². Jumlah desa dan pedukuhan terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan delapan desa dan 72 pedukuhan dan paling sedikit di Kecamatan Srandakan dengan dua desa dan 43 pedukuhan.

Tabel 1. 2 Penggunaan Lahan Tahun 2020 (Ha)

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)										
		Kampung	Sawah	Tegal	Kebun	Hutan		Tanah	Waduk	Tambak	Lainnya	Total
					Campur	Rakyat	Tandus					
1	Bambanglipuro	186.74	115,176		81,900						11250	227,000
2	Banguntapan	461.49	12862	6.53	65,303						44075	284800
3	Bantul	192.38	11940	2.00	68,484						12176	219500
4	Dlingo	114.69	25,831	170,54	168,12		97,6				85059	558700
5	Imogiri	240.40	91323	212,79	134,78		2,49	2,3			77169	544900
6	Jetis	422.83	13671	8	0			00			3947	244700
7	Kasihan	585.04	81799	10452	51,300						16594	323800
8	Kretek	41.97	81799	10,558	156,34						30,200	267700
9	Pajangan	129.96	94356	20,934	46,942						71071	267700
10	Pandak	99.01	27228	42,413	228,59						21268	332500
11	Piyungan	358.93	97322	4,400	106,14						25231	243000
12	Pleret	240.17	12961	53,564	71,614		1,54				33171	325400
13	Pundong	89.53	86634	57,205	35,599		6,27				35905	229700
14	Sanden	57.23	82,839	45,598	73,350		3,03	11,900			22265	236800
15	Sedayu	304.87	95950	9,269	89,600						29,238	231600
16	Sewon	513.28	13706	6,871	182,49						27,794	343600
17	Srandakan	77.12	47,816	195	64,196		2,61	9,9		3,0	18,814	271600
							2	00		00	40071	183200
		4,115.64	1,568,402	648342	1,694,176		113,619	54,300		3,00	575098	5068500
	Persentase (%)											100

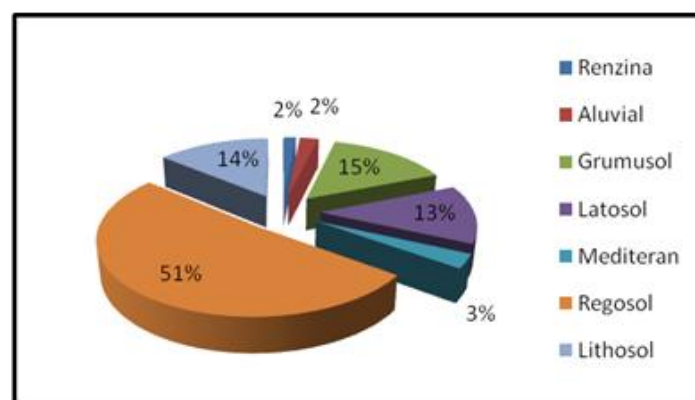
2. Kondisi Topografi

Topografi sebagai dataran rendah 40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari:

- Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km² (17,73 % dari seluruh wilayah).
- Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km² (41,62 %).
- Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km² (40,65%).
- Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

3. Kondisi Geologi

Berdasarkan struktur Geologi, luas tanah di Kabupaten Bantul sebagian besar adalah Jenis Regosol. Jenis tanah di Kabupaten Bantul berdasarkan Struktur Geologi, terdapat beberapa susunan struktur geologi sebagai berikut:



Sumber : DPUPKP, 2020

Grafik 1. 1 Susunan Struktur Geologi

4. Kondisi Klimatologi

Menurut klasifikasi iklim Koppen, Bantul memiliki iklim muson tropis. Sama seperti kabupaten lain di Indonesia, musim hujan di Bantul dimulai bulan Oktober hingga Maret, dan musim kemarau bulan April hingga September. Rata-rata curah hujan di Bantul adalah 89,58 mm, dan bulan paling tinggi curah hujannya adalah Desember, Januari, dan Maret. Suhu udara relatif konsisten sepanjang tahun, dengan suhu rata-rata 30 derajat Celsius.

Tabel 1. 3 Keberadaan Stasiun Pencatat Hujan Tahun 2020

No.	Stasiun	Lokasi
1	Ringinharjo	Ringinharjo, Kasihan (Dinas PUPKP)
2	Nyemengan	Dusun Nyemengan, Tirtonirmolo, Kasihan
3	Gandok	Dusun Gandok Jl. Imogiri Barat Km 5
4	Kotagede	Jalan Wonosari Km 3
5	Pundong	Depan Kantor UPT Pengamatan Opak Hilir
6	Barongan	Dusun Barongan, Sumberagung, Jetis
7	Ngetal	Dusun Ngetal, Karangtalun, Imogiri
8	Kebonongan	Desa Donotirto, Kretek
9	Piyungan	Piyungan
10	Sedayu	Desa Argodadi, Sedayu
11	Ngestiharjo	Desa Ngestiharjo, Kasihan
12	Dlingo	Dlingo
13	Karangploso	Desa Sitimulyo, Piyungan

Sumber: DPUPKP, 2020

5. Kondisi Demografi

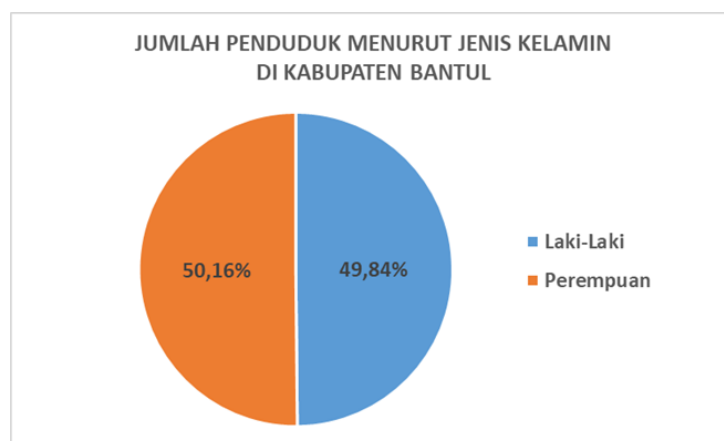
a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada semester II tahun 2020 sebanyak 954.706 jiwa, dengan komposisi laki-laki sebanyak 475.871 jiwa dan Perempuan 478.435 jiwa.

Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SRANDAKAN	15.475	15.607	31.082
2	SANDEN	15.713	16.097	31.810
3	KRETEK	15.076	15.688	30.764
4	PUNDONG	17.587	18.079	35.666
5	BAMBANGLIPURO	20.620	21.086	41.706
6	PANDAK	26.118	25.918	52.036
7	PAJANGAN	18.271	18.280	36.551
8	BANTUL	32.146	32.506	64.652
9	JETIS	29.237	29.394	58.631
10	IMOGIRI	31.730	32.105	63.835
11	DLINGO	19.872	20.126	39.998
12	BANGUNTAPAN	56.476	56.822	113.298
13	PLERET	24.430	24.067	48.497
14	PIYUNGAN	26.320	26.542	52.862
15	SEWON	50.539	50.024	100.563
16	KASIHAN	52.215	52.384	104.599
17	SEDAYU	24.046	24.110	48.156
	JUMLAH	475.871	478.835	954.706

Sumber : Disdukcapil,2020



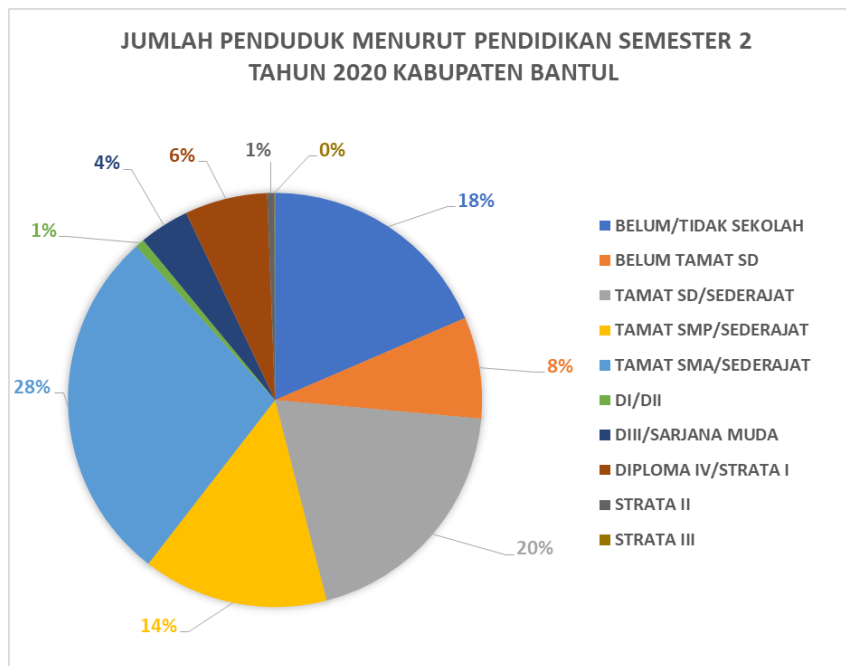
Total: 954.706 jiwa

Sumber : Disdukcapil, 2020

Grafik 1. 2 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul Tahun 2020

Jumlah penduduk menurut Jenjang Pendidikan

Jumlah penduduk menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Bantul paling banyak adalah lulusan SMA/ Sederajat yaitu sebesar 269.908 jiwa atau 27,82%, sedangkan yang paling sedikit adalah Srata III yaitu sebesar 439 atau 0,045% dari jumlah penduduk di Kabupaten Bantul.



Sumber : Disdukcapil, 2020

Grafik 1. 3 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

b. Pendidikan

Tabel 1. 5 Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pendidikan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0.02	0,004	180.00
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.02	0,01	150.00
3	Persentase Kelulusan SD/ MI	100	100	100.00
4	Persentase Kelulusan SMP/ MTs	100	100	100.00
5	Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI	0	0	0
6	Peringkat rata-rata nilai USM SMP/MTs	0	0	0
7	Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	0	0	0
8	APK SD/MI	96,4	92,77	98.92
9	APK SMP/MTs	95,3	97,23	106.44
10	APM SD/MI	84,65	86,55	101.55
11	APM SMP/MTs	68,2	76,31	112.94
12	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100.00
13	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	100	100	100.00
14	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9	9,55	104.59
15	APK PAUD	98.9	98,9	100.00
16	Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	0	0	0
17	Jumlah Pemuda Pelopor	0	0	0

Sumber : Disdikpora, 2020

Misi ke 2 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.

Angka Putus Sekolah SD/MI pada tahun 2020 menargetkan sebesar 0,02% terealisasi sebesar 0,004 %, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 180 % dengan kategori Sangat Tinggi. Realisasi sebesar 0.004 diperoleh dari data Jumlah anak putus sekolah pada jenjang SD/MI sebanyak 3 siswa, sedangkan jumlah siswa SD/MI di jenjang SD/MI sebanyak 80.711 siswa sehingga terealisasi sebesar 0.004.

Angka Putus Sekolah SMP/MTs. Pada tahun 2020 menargetkan sebesar 0,02 % terealisasi sebesar 0,01 %, maka

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 150% dengan kategori sangat baik. Realisasi sebesar 0.01 diperoleh dari data Jumlah anak putus sekolah pada jenjang SMP/MTs sebanyak 4 siswa, sedangkan jumlah siswa di jenjang SMP/MTs sebanyak 38.610 siswa.

c. Kesehatan

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan pada tahun 2020 didasarkan pada sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bidang Kesehatan yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur, dimana indikatornya antara lain:

Tabel 1. 6 Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Angka Kematian Ibu	85 Per 100.000 KH	157,6 Per 100.000 KH	53,93
2	Angka Kematian Bayi	8,2 Per 1.000 KH	8.33 Per 1.000 KH	98.44
3	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,39%	0.47%	82,98
4	Prevalensi HIV AIDS	<0,5%	0.07%	302
5	Angka Kesakitan / Incidence Rate (IR) DBD	120 Per 100.000 penduduk	129 Per 100.000 penduduk	93,02

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Capaian angka kematian ibu pada tahun 2020 sebesar 157,6 per 100.000 kelahiran hidup (20 kasus kematian ibu), melampaui target kematian ibu 85 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi kenaikan. Pada tahun 2019 AKI di Kabupaten Bantul sebanyak 13 orang atau 99,49 per 100.000 kelahiran hidup. Kegiatan yang dilakukan karena adanya kejadian kematian ibu adalah Audit Maternal Perinatal (AMP). AMP dilakukan pada semua kasus kematian ibu untuk mengkaji hal – hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi sejak ibu masih hamil,

penatalaksanaan persalinan dan masa nifas serta kronologis kasus sampai terjadinya kematian.

Pada tahun 2020 status gizi buruk (BB/U) pada Balita sebesar 0,47% yaitu sebanyak 89 balita gizi buruk dari 19.057 balita yang diukur. Capaian ini juga sudah melampaui target DIY sebesar kurang dari 1%. Masih banyaknya kasus gizi buruk disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya asupan, pola asuh yang kurang tepat, sanitasi lingkungan, penyakit infeksi, penyakit bawaan, riwayat BBLR, dan adanya permasalahan sosial di dalam keluarga.

6. Potensi Daerah

a. Pertanian dan Peternakan

Tabel 1. 7 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi, Jagung, dan Kedelai

No.	Komoditas	Uraian	Tahun		Ket.
			2019	2020**	
1	Padi	Luas Panen	29.597	30.077	Ha
		Produktivitas (GKG)	63.55	63,29	ku/ha
		Produksi (GKG)	188.089	190.364,2	Ton
		Produksi beras	120.377		Ton
2	Jagung	Luas Panen	4934	3.452	Ha
		Produksi (pipilan)	34.903	34.583	Ton
		Produktivitas	70,74	10,018	ku/ha
3	Kedelai	Luas Panen	909	616	Ha
		Produksi (wose kering)	1445	1.086	Ton
		Produktivitas	15.90	17,63	ku/ha

Sumber: DPPKP, 2020

**Angka Sementara

Produksi kedelai, pada tahun 2020 ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Penurunan produksi kedelai mencapai 24,84% atau 359 ton. Produksi kedelai menurun karena penurunan luas panen yang disebabkan oleh penurunan luas tanam. Luas tanam yang turun disebabkan oleh minat petani yang rendah untuk budidaya kedelai, hal tersebut dikarenakan

harga jual panen yang rendah hasil produksi kurang diminati pengrajin tahu dan tempe, penanganan panen dan pasca panen yang relatif sulit.

Tabel 1. 8 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								
		Kalori	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Gap Skor AKE dan Skor Maksimal	Skor PPH
1	Padi-padian	1068,4	54,2	50,9	0,5	27,1	25,4	25,0	0,4	25,0
2	Umbi-umbian	84,5	4,3	4,0	0,5	2,1	2,0	2,5	-0,5	2,0
3	Pangan Hewani	235,6	12,0	11,2	2,0	23,9	22,4	24,0	-1,6	22,4
4	Minyak dan Lemak	50,7	2,6	2,4	0,5	1,3	1,2	5,0	-3,8	1,2
5	Buah/Biji Berminyak	19,1	1,0	0,9	0,5	0,5	0,5	1,0	-0,5	0,5
6	Kacang-kacangan	171,4	8,7	8,2	2,0	17,4	16,3	10,0	6,3	10,0
7	Gula	13,4	0,7	0,6	0,5	0,3	0,3	2,5	-2,2	0,3
8	Sayur dan Buah	161,6	8,2	7,7	5,0	41,0	38,5	30,0	8,5	30,0
9	Lain-lain	166,9	8,5	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL	1971,6	100,0	93,9	11,5	113,6	106,7	100,0		91,4

Sumber : DPPKP, 2020

Hasil perhitungan analisis perhitungan PPH sebesar 91,4. Skor tersebut turun dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 93,7. Hal ini diakibatkan oleh berkurangnya penghasilan masyarakat karena pandemi Covid-19. Kurangnya penghasilan masyarakat mengakibatkan berkurangnya daya beli terhadap bahan pangan yang beragam dan berimbang.

b. Perikanan

Tabel 1. 9 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan

No.	Uraian	Produksi (kg)	
		2019	2020**
1	Gurami	1.723.948	1.672.601
2	Lele	7.425.503	7.498.039
3	Nila	2.618.329	2.482.902
4	Patin	42.888	103.535
5	Bawal	218.661	236.653,000
6	Mas	36.828	35.876,000
7	Udang Vaname	374.440	599.444,000
8	Lain-lain	-	-
Jumlah		12.440.597	12.629.050**

Sumber : DPPKP,2020

Ket : ** Angka Sementara

Perikanan budidaya pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,515 % atau 188.450 kg dari 12.440.597 kg pada tahun 2019 menjadi 12.629.050 kg pada tahun 2020. Kenaikan produksi ini relatif sedikit hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 terutama di pertengahan tahun antara Maret-Agustus sempat menyebabkan pemenuhan kebutuhan pakan dan benih di pembudidaya serta serapan pasar akan ikan menurun. Namun setelah itu kondisi mulai berangsur membaik dan tidak menimbulkan masalah di pembudidaya ikan.

Tabel 1. 10 Jumlah Rumah Tangga Perikanan dan Produksi Perikanan Budidaya

No.	Uraian	Jumlah	
		2019	2020
1	Rumah Tangga Perikanan (RTP) budidaya	5.216	5.416
2	Produksi perikanan budidaya (kg)	12.440.597	12.629.050**

Sumber : DPPKP, 2020

Ket : ** Angka Sementara

c. Pariwisata

Tabel 1. 11 Data Event Tahun 2020

No.	Jenis Event	Keterangan
1.	Pentas Besar di destinasi wisata	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik Wisata (APBD)
2.	Pentas Kecil di destinasi wisata	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik wisata (APBD)
3.	Pentas Seni di Desa Wisata	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik Wisata (APBD)
4.	Pentas Malam Tahun Baru Secara Virtual	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik Wisata (APBD)
5.	Festival Desa Wisata Secara Virtual	Kegiatan Penigkatan Daya Tarik Wisata (APBD)
6.	Festival Digital Desa Wisata	Kegiatan Pengembangan Atraksi Budaya wisata (Dais)
7.	Event Berbasis Budaya di Destinasi Wisata (Cemoro Sewu, Goa Cemara da Goa Selarong)	
8.	Festival Coast to Coast	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri (APBD)

Sumber: Dinas Pariwisata, 2020

Tabel 1. 12 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata Tahun 2020

No.	Daya Tarik Wisata	2019	2020	Satuan	Keterangan
1	Alam	32	55	Unit	
2	Buatan	84	129	Unit	
No.	Usaha Pariwisata			Satuan	
1	Hotel bintang	3	3	Unit	Sudah mempunyai ijin
2	Hotel non-bintang	56	56	Unit	Sudah mempunyai ijin
3	Restoran/rumah makan	142	142	Unit	
4	Jasa perjalanan wisata	33	33	Unit	Sudah mempunyai ijin

Sumber: Dinas Pariwisata, 2020

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2020 mencapai 2.348.313 orang melebihi 648.313 orang dari target 1.700.000 orang atau 38,14% dari target RPJMD yang telah direvisi. Jumlah tersebut meliputi seluruh obyek wisata, yang bertribusi maupun yang tidak bertribusi termasuk di desa wisata, yang dikelola pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya dari jumlah realisasi kunjungan wisatawan yang bertribusi perolehan PAD sebesar Rp. 16.954.700.250,-

d. Potensi Investasi

Tabel 1. 13 Realisasi Investasi Per Triwulan Tahun 2020

No	Triwulan	PMDN			PMA		
		Proyek	Investasi (Rp)	Tki	Proyek	Investasi (Rp)	Tki
1	I	56	12,451,100,000	67	19	1,555,200,000	25
2	II	92	2,922,500,000	19	25	1,645,920,000	105
3	III	70	1,652,200,000	98	27	22,515,840,000	100
4	IV	120	14.402.500.000	50	25	355.680.000	9

Sumber : LKPM Online, DPMPT 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi per Triwulan di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 untuk PMDN penambahan investasi terbesar terjadi di Triwulan I dengan nilai investasi sebesar Rp. 12,451,100,000. Sedangkan untuk PMA penambahan investasi terbesar terjadi di Triwulan III dengan nilai investasi sebesar Rp.2.173.500.000,00. Kegiatan pemantauan terhadap 115 PMA/ PMDN mengacu pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, di mana ruang

lingkup kegiatan ini adalah pemantauan dan pengawasan. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi dan menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal.

Tabel 1. 14 Realisasi Ekspor per Bulan di Kabupaten Bantul tahun 2019 & 2020

Bulan	Jumlah Eksportir		Volume Ekspor (ton)		Nilai (US\$)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1. Januari	50	59	1.442,2	1.284,5	14.347.340,13	16.312.752,98
2. Februari	59	64	1.264,4	1.181,6	14.531.118,74	12.274.355,85
3. Maret	54	56	1.158,8	1.491,1	11.037.306,50	11.989.333,48
4. April	61	55	1.575,8	1.373,4	12.897.820,82	7.568.183,05
5. Mei	64	47	1.874,8	1.118,0	13.425.203,67	5.631.007,97
6. Juni	50	48	934,1	769,1	8.681.213,88	6.556.169,34
7. Juli	69	54	1.662,9	1.463,5	14.258.660,54	9.273.278,80
8. Agustus	66	52	1.359,5	1.223,3	12.832.277,46	10.178.200,43
9. September	64	54	1.467,1	2.046,0	13.137.510,02	12.538.464,34
10. Oktober	58	51	1.389,8	1.065,0	10.890.817,73	6.201.075,89
11. November	63	57	1.279,8	1.456,0	13.091.699,15	8.732.516,02
12. Desember	64	57	1.236,5	1.376,6	11.909.913,74	15.078.739,19
Jumlah	722	654	16.645,7	15.848,1	151.040.882	122.334.077,34

Sumber : Dinas Perdagangan, 2020

7. Kondisi Perekonomian Dan Kesejahteraan Daerah

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kinerja pembangunan daerah salah satunya diukur dari pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menggunakan pengamatan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2020 PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai sebesar Rp.19,25 triliun sedangkan untuk PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan nilai sebesar Rp.26,59 triliun.

Tabel 1. 15 PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan

No.	Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan
1	2016	20,913,085.87	8.22	16,375,513.12	5.09
2	2017	22,611,706.76	8.12	17,209,871.55	5.10
3	2018	24,443,273.98	8.10	18,150,877.00	5.47
4	2019	26,345,477.41	7.78	19,154,769.08	5.53
5	2020*)	26,588,571.54	0.92	19,248,827.17	0.49

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020 *) angka proyeksi BAPPEDA

Tabel 1. 16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**	2020*)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,12	1,52	2,50	2,00	0,13	8.54
B	Pertambangan dan Penggalian	0,61	0,35	0,06	1,57	-0,27	-8.69
C	Industri Pengolahan	2,67	5,43	6,39	5,52	5,38	-2.54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,08	15,58	3,99	4,85	4,73	-4.65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,95	2,96	3,18	5,16	8,25	16.85
F	Konstruksi	4,05	4,07	5,93	7,24	5,17	-11.06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,77	6,54	5,79	5,64	5,19	-1.12
H	Transportasi dan Pergudangan	3,80	4,23	3,88	5,51	6,46	-13.69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,89	6,19	5,70	6,75	8,68	-10.40
J	Informasi dan Komunikasi	5,65	8,41	5,87	6,18	7,29	20.93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,55	4,65	2,82	6,59	9,97	11.72
L	Real Estate	6,87	5,82	4,97	5,41	6,43	8.99
M,N	Jasa Perusahaan	7,06	4,26	4,27	5,37	7,38	-2.01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,26	5,84	4,98	4,55	3,42	-7.30
P	Jasa Pendidikan	7,80	2,95	5,16	6,08	6,65	6.36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,51	5,20	5,13	4,62	7,02	16.80
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,41	6,02	5,61	7,14	6,09	-19.15
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,97	5,05	5,10	5,47	5,53	0.49

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020 *) angka proyeksi BAPPEDA

b. Inflasi

Kondisi tingkat inflasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 2,71. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan angka inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan angka nasional. Pencapaian inflasi di Kabupaten Bantul dari tahun 2016-2019 menunjukkan angka yang selalu lebih rendah dari inflasi DIY dan nasional, hal ini menandakan tingkat tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam upaya penendalian inflasi daerah.

Tabel 1. 17 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Laju Inflasi Kab. Bantul	Laju Inflasi Prov. Yogyakarta	Laju Inflasi Nasional
1	2016	2,26	2,29	3,02
2	2017	3,96	4,20	3,61
3	2018	2,61	2,66	3,13
4	2019	2,71	2,77	2,72
5	2020	-	1,40	1,68

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah hendaknya tidak hanya berorientasi kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata (*growth oriented*), namun setidaknya pencapaian pembangunan juga harus mampu dirasakan manfaatnya dan menjawab kebutuhan masyarakat (*people need oriented*). Salah satu indikator keberhasilan pembangunan terhadap masyarakat adalah indikator indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Pencapaian IPM Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebesar 80,01 tidak ada perubahan dibandingkan dengan tahun 2019. Kondisi IPM Kabupaten Bantul mulai tahun 2016-2020 memperlihatkan tren yang meningkat, artinya kinerja pembangunan daerah semakin dirasakan dan memiliki manfaat bagi masyarakat di dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Tabel 1. 18 Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Tahun	NILAI IPM Kab. Bantul	NILAI IPM DIY
1	2016	78,42	78,38
2	2017	78,67	78,89
3	2018	79,45	79,53
4	2019	80,01	79,99
5	2020	80,01	79,97

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

d. Gini Rasio

Tabel 1. 19 Gini Rasio Kabupaten Bantul 2016-2020

TAHUN	Gini Rasio Kabupaten Bantul
2016	0,3967
2017	0,4126
2018	0,4480
2019	0,4280*
2020	0,3810**

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

Ket : ** Proyeksi Bappeda

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan di masyarakat adalah penghitungan gini rasio. Pada tahun 2019 Gini Ratio Kabupaten Bantul menyentuh angka 0,42 sedangkan berdasarkan proyeksi pada tahun 2020 sebesar 0,381. Berdasarkan kriteria Oshima kategori ketimpangan rendah (kurang dari 0,4).

e. Kemiskinan

Tabel 1. 20 Data Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020

Tahun	Tingkat Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)
2016	14,55	2,02	0,41	332.057
2017	14,07	2,21	0,56	347.476
2018	13,43	2,17	0,46	369.480
2019	12,92	1,87	0,43	381.538
2020	13,50	1,85	0,43	405.613

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

Angka kemiskinan Pada Tahun 2020 target perubahan karena Pandemi Covid-19 sebesar 13,94%. Untuk realisasi menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Bantul sebesar 13,50 %.

Pada tahun 2020 melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul adalah dengan melakukan persiapan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2021.

Selain itu konsentrasi pada perbaikan data pada program :

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD
2. Perbaikan NIK penerima Bantuan Sosial Pangan dan Bantuan Sosial Tunai (BST)

Konsentrasi kegiatan penanggulangan Kemiskinan selama Tanggap Darurat Covid-19 di Kabupaten Bantul adalah:

1. Pemberian Tambahan Makanan Boga Sehat
2. Pendampingan dan Penyaluran Bantuan Sosial

Tabel 1. 21 Rekapitulasi Bantuan Sosial Terdampak Covid-19 Tahun 2020

NO	Nama Bantuan Sosial	Jumlah (KK)	Sumber Anggaran
1	Bantuan Sosial (BST)	17.328	Kementerian Sosial RI
2	Sembako (BPNT)	106.419	Kementerian Sosial RI
3	Top Up DIY	36.858	APBD DIY
4	BLT APBD	5.340	APBD Bantul
5	BLT DD	17.886	APBDES

Data dari penerima bantuan sosial merupakan data sasaran yang sudah melewati proses Musyawarah Desa (Musdes). Untuk pendampingan dan penyaluran Bansos dilaksanakan oleh semua lini dari tingkat kabupaten, kecamatan dan Desa. Pendampingan dan distribusi dilaksanakan oleh pendamping TKPK, PKH, TSKK dan Pendamping Desa.



BANK  BPD DIY



BAB II PENJABARAN APBD



BAB II

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, salah satu komponen utama adalah tata pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah melingkupi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan pemerintah daerah. Perkembangan informasi dan teknologi pemerintah harus dapat dioptimalkan dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan agar mempermudah akses data informasi yang dibutuhkan oleh setiap unsur stakeholder. Pelaksanaan pemerintahan secara terintegrasi mensyaratkan penilaian dan pertanggungjawaban yang dipresentasikan dengan satuan ukuran uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari pengelolaan penerimaan dan pengelolaan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Penerimaan terdiri atas pendapatan dan penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran terbagi atas belanja dan pengeluaran pembiayaan.

Struktur APBD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 meliputi komponen Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Secara terperinci jenis Pendapatan terdiri: (1) pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) pendapatan transfer yang bersumber dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak/SDA, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik, dana penyesuaian, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan; serta (3) lain-lain pendapatan yang sah yang berasal dari pendapatan hibah.

Komponen belanja terdiri atas: (1) belanja operasional, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah,

dan belanja bantuan sosial; (2) belanja modal yang meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan bangunan, belanja modal aset tetap lainnya, serta belanja modal aset lainnya dan (3) belanja tak terduga, yang merupakan belanja yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Transfer terdiri atas transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan. Sementara komponen pembiayaan terdiri atas: (1) penerimaan daerah, yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dalam negeri, dan penerimaan kembali investasi non permanen; dan (2) pengeluaran daerah, yang terdiri dari, penyertaan modal /investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, dan pengeluaran investasi non permanen lainnya.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB dan perluasan daya saing investasi.

Beberapa upaya strategis untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, ditempuh dengan:

1. Menyamakan penerapan kebijakan sesuai dan selaras dengan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah;
2. Mengoptimalkan percepatan penerapan dan peningkatan pemahaman aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan barang daerah yang terintegrasi dengan menjalin kerjasama dengan pihak terkait;

3. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan BPPT untuk asistensi pelaksanaan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah terintegrasi melalui pendampingan atau coaching clinic penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas;
4. Meningkatkan pemahaman teknis mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya untuk aparat yang membidangi;
5. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari pemerintah pusat agar prediksi pendapatan daerah, khususnya dana perimbangan, dalam APBD semakin realistis;
6. Mengoptimalkan pelaksanaan sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi melalui Simpatda;
7. Meningkatkan koordinasi antar OPD penghasil dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-masing OPD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja pendapatan asli daerah;
8. Meningkatkan koordinasi antar OPD untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang menjadi tanggung-jawabnya;
9. Penyebarluasan informasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah melalui media masa, media online, leaflet, dan lain-lain;
10. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memaksimalkan organisasi perangkat daerah yang melakukan pengelolaan keuangan dengan mekanisme Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);

11. Menerapkan tata kelola keuangan berbasis akrual sesuai dengan aturan regulasi yang berlaku yang bertujuan agar dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan pemberian kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian keuangan daerah melalui desentralisasi fiskal dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah khususnya potensi pendapatan asli daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi kewenangan dan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi pendapatan asli daerah terutama bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu dibutuhkan adanya tata kelola pajak daerah dan retribusi daerah yang baik oleh pemerintah daerah, yang memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan asli daerah terutama pajak daerah dan retribusi daerah yang diambil adalah pungutan atas pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, memperhatikan aspek keadilan, memperhatikan kemampuan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan tidak menghambat investasi daerah.

Terkait implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mulai tanggal 1 Januari 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2013 seperti tertuang dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang Perdesaan dan Perkotaan.

Berkaitan dengan adanya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 perihal Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah maka dalam pengelolaan pendapatan setiap transaksi harus dilakukan dengan dokumen yang jelas untuk mengetahui keakuratan realisasi dari transaksi pendapatan.

2. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dengan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dasar publik masih banyak bergantung pada penerimaan dari dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Adanya otonomi daerah akan memacu daerah meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang lebih baik yang tercermin dengan semakin meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengoptimalkan sumber-

sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Beberapa strategi yang dilakukan untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal:

a. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi:

1) Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah yang ada. Secara umum, proses ini meliputi:

- a) Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah;
- b) Penyempurnaan landasan hukum serta *law enforcement* bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah;
- c) Peningkatan ketaatan masyarakat dalam kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- e) Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang intensif dan efektif dengan seluruh SKPD pengelola pendapatan;

- f) Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;
- g) Pelayanan pajak terpadu;
- h) Memaksimalkan fungsi mobil pajak yang lebih fleksibel dan menjangkau daerah yang lebih luas;
- i) Web pembayaran PBB yang bisa diakses di desa dan kecamatan.

2) Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak/retribusi daerah. Proses ini meliputi:

- a) Mendata obyek dan wajib pajak yang belum terdata dan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan, sehingga potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dapat diketahui baik secara kuantitatif maupun kualitatif, antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi wajib pajak daerah yang ada khususnya wajib pajak restoran dan wajib pajak hotel.
- b) Optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2015 dengan mengoptimalkan pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan melalui:
 - (1) Pelayanan pendaftaran obyek pajak dan mutasi obyek/subyek PBB P2;
 - (2) Pelayanan pembetulan, pembatalan dan salinan atas SPPT/SKPD/STP PBB P2;

- (3) Permohonan keberatan dan pengurangan atas pajak terutang;
- (4) Restitusi/pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
- (5) Memberikan kemudahan pembayaran pajak daerah khususnya PBB P2 dengan sistem on line bekerjasama denganempat bank yang ditunjuk di wilayah Pemda DIY.

Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD.

Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan. Pada tahun 2020 kontribusi yang disumbangkan dari pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah sebesar 22,46%. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi komponen PAD yang digunakan untuk mengetahui posisi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan.

Besarnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah merupakan salah satu tolok ukur perkembangan ekonomi daerah. Besarnya pendapatan asli daerah secara umum juga menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu, pencapaian target pendapatan asli daerah merupakan faktor penting dalam menilai laju pembangunan di daerah.

3. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pada tahun 2020 pendapatan daerah Kabupaten Bantul ditargetkan Rp2.157.411.830.374,19 terealisasi sebesar Rp2.133.268.422.830,42 terdapat selisih kurang dari target sebesar Rp24.143.407.543,77 atau tercapai 98,88% (karena pengelolaan dana BOS belum masuk datanya) sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Realisasi yang melebihi dari target hanya berasal pada komponen Pendapatan Asli Daerah, sedangkan untuk pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masih belum mencapai nilai yang direncanakan. Adapun target dan realisasi dari sumber-sumber pendapatan daerah ditampilkan pada Tabel berikut :

Tabel 2. 1 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Target	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	Capaian (%)
I	Pendapatan Asli Daerah	420.780.615.321,87	479.041.284.763,42	58.260.669.441,55	113,85
1	Pajak Daerah	175.265.482.000,00	200.826.187.667,73	25.560.705.667,73	114,58
2	Retribusi Daerah	24.354.322.386,00	30.365.630.690,75	6.011.308.304,75	124,68
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.704.142.455,07	25.137.579.049,59	433.436.594,52	101,75
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	196.456.668.480,80	222.968.270.078,35	26.511.601.597,56	113,49
II	Pendapatan Transfer	1.654.413.826.632,32	1.646.775.138.067,00	(7.638.688.565,32)	99,54
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.279.745.464.554,00	1.268.337.753.395,00	(11.407.711.159,00)	99,11
	A Dana Bagi Hasil Pajak	29.672.739.000,00	35.684.047.957,00	6.011.308.957,00	120,26
	B Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	1.424.507.000,00	796.423.668,00	(628.083.332,00)	55,91
	C Dana Alokasi Umum	931.996.005.000,00	923.213.607.000,00	(8.782.398.000,00)	99,06
	D Dana Alokasi Khusus	88.291.007.950,00	80.282.469.166,00	(8.008.538.784,00)	90,93
	E Dana Alokasi Khusus (non fisik)	228.361.205.604,00	228.361.205.604,00	0,00	100,00

No	Uraian	Target	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	Capaian (%)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	191.989.028.000,00	191.989.028.000,00	0,00	100,00
	A Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	B Dana Penyesuaian	191.989.028.000,00	191.989.028.000,00	0,00	100,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	152.621.840.588,32	159.398.655.115,00	6.776.814.526,68	104,44
	A Pendapatan bagi hasil pajak	152.621.840.588,32	159.398.655.115,00	6.776.814.526,68	104,44
	B Pendapatan bagi hasil lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bantuan keuangan	30.057.493.490,00	27.049.701.557,00	(3.007.791.933,00)	89,99
	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya	30.057.493.490,00	27.049.701.557,00	(3.007.791.933,00)	89,99
III	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	82.217.388.420,00	7.452.000.000,00	(74.765.388.420,00)	9,06
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	6.000.000.000,00	7.452.000.000,00	1.452.000.000,00	124,20
2	Pendapatan Hibah Dana BOS	76.217.388.420,00	0,00	(76.217.388.420,00)	0,00
	Pendapatan Daerah	2.157.411.830.374,19	2.133.729.702.074,42	(23.682.128.299,77)	98,90

Sumber: BKAD Kabupaten Bantul, 2020

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa realisasi sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Bantul masih didominasi oleh Pendapatan Transfer yaitu mempunyai kontribusi sebesar 77,18%, diikuti pendapatan asli daerah memberikan kontribusi sebesar 22,47%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,35%. Rincian sumber pendapatan daerah berdasarkan tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp420.780.615.321,87 terealisasi sebesar Rp479.502.564.007,42, terdapat selisih lebih dari target sebesar Rp58.721.948.685,73 atau tercapai 113,96%. perincian realisasi pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp175.265.482.000,00 terealisasi sebesar Rp200.826.187.667,73, terdapat selisih lebih dari target sebesar Rp25.560.705.667,73 atau tercapai 114,58%;
- 2) Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp24.354.322.386,00 terealisasi sebesar Rp30.365.630.690,75, terdapat selisih lebih dari target sebesar Rp6.011.308.304,75 atau tercapai 124,68%;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp24.704.142.455,07 terealisasi sebesar Rp25.137.579.049,59.
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp196.456.668.480,80, terealisasi sebesar Rp223.173.166.599,35, terdapat lebih dari target sebesar Rp26.716.498.118,55 atau tercapai 113,60%.

Kontribusi terbesar dari jenis pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul adalah berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 46,54% dan pajak daerah sebesar 41,88%. Kontribusi lainnya

berasal dari retribusi daerah sebesar 6,33% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 5,24%.

b. Pendapatan Transfer

Pada tahun 2020 pendapatan daerah dari pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp1.654.413.826.632,32 terealisasi sebesar Rp1.646.775.138.067,00, terdapat selisih kurang sebesar Rp7.638.688.565,32 atau mencapai 99,54% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI.

Selisih kurang tersebut bersumber dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp11.407.711.159,00 dari target sebesar Rp1.279.745.464.554,00 terealisasi sebesar Rp1.268.337.753.395,00, dan bantuan keuangan sebesar Rp3.007.791.933,00 dari target sebesar Rp30.057.493.490,00 terealisasi sebesar Rp27.049.701.557,00 atau 89,99%. Sementara pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya dalam bentuk dana penyesuaian terrealisir sesuai rencana sebesar Rp191.989.028.000,00.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah berbentuk pendapatan hibah ditargetkan sebesar Rp82.217.388.420,00 terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah terealisasi sebesar Rp7.452.000.000,00 dari target Rp6.000.000.000,00 atau mencapai 124,20%. Dan Pendapatan Hibah Dana BOS yang dianggarkan sebesar Rp76.217.388.420,00.

4. Permasalahan dan Solusi

Pencapaian target pendapatan pada tahun 2020 tidak terlepas dari pandemi COVID19 yang berimbas pada berbagai sektor riil. Hal ini juga sangat berpengaruh pada pencapaian realisasi pendapatan di Kabupaten Bantul. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus mencari dan mengelola sumber sumber pendapatan dengan melakukan terobosan-terobosan dan upaya optimaliasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, belanja daerah dibagi menurut kelompok belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja operasional, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
- b. Belanja modal, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan arah peningkatan proporsi belanja publik yang didukung oleh efektivitas dan efisiensi belanja aparatur, yang terdiri dari belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja gedung dan bangunan; belanja jalan, irigasi, dan bangunan; dan belanja aset tetap lainnya;

- c. Belanja tak terduga, yaitu belanja yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- d. Transfer, yaitu pengeluaran belanja kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan pemerintah desa.
- e. Kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun berikutnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur jelas untuk setiap indikator kinerjanya diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun strategi yang ditempuh dalam pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk pencapaian visi, misi, dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- b. Pengelolaan belanja daerah harus mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta anggaran berbasis *gender*.
- c. Berdasarkan kondisi proyeksi beban fiskal tersebut, pengelolaan belanja daerah perlu dioptimalkan pada program/kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan/pelayanan dasar masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan penyediaan infrastruktur publik, serta kegiatan yang mendukung revitalisasi perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat.

2. Rencana dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah

Pada tahun 2020 pengeluaran daerah Kabupaten Bantul dianggarkan sebesar Rp2.383.458.652.405,17 terealisasi sebesar Rp2.125.018.561.254,77 atau 89,16%, terdiri dari Belanja Daerah dari rencana Rp2.092.168.606.701,77 terrealisir Rp1.835.218.125.552,99 atau 87,72% dan Transfer Daerah yang direncanakan Rp291.290.045.703,40 terrealisir Rp289.800.435.701,78 atau 99,49%. Perincian Belanja Daerah terbagi menjadi anggaran belanja operasi sebesar Rp1.715.291.480.862,44, terealisasi sebesar Rp1.538.633.480.205,34 atau 89,70%, anggaran belanja modal sebesar Rp234.111.281.876,00 terealisasi sebesar Rp195.012.785.833,65 atau 83,30%; dan anggaran belanja tak terduga sebesar Rp142.765.843.963,33, terealisasi sebesar Rp101.871.859.514,00 atau 71,15%. Sementara itu Transfer Daerah dianggarkan sebesar Rp291.290.045.703,40 terealisasi sebesar Rp289.800.435.701,78 atau 99,49%, yang terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan dianggarkan Rp22.871.517.593,40 terealisasi 100% dan transfer bantuan keuangan dianggarkan Rp268.418.528.110,00 terealisasi Rp266.928.918.110,00 atau 99,45%.

Realisasi belanja pada tahun 2020 mencapai 87,72% disebabkan antara lain adanya efisiensi, beberapa kegiatan yang gagal lelang, beberapa belanja yang tidak maksimal, serta beberapa kali dilakukan refocusing anggaran terkait dengan penanganan pandemi COVID19. Anggaran dan realisasi belanja dan transfer daerah ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 2 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	Capaian (%)
A	Belanja	2.092.168.606.701,77	1.835.218.125.552,99	(256.950.481.148,78)	87,72
I	Belanja Operasi	1.715.291.480.862,44	1.538.633.480.205,34	(176.658.000.657,10)	89,70
1	Belanja Pegawai	994.101.728.747,34	913.831.132.097,00	(80.270.596.650,34)	91,93
2	Belanja Barang dan Jasa	612.575.068.915,10	521.553.510.628,41	(91.021.558.286,69)	85,14
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	106.079.683.200,00	102.534.837.479,93	(3.544.845.720,07)	96,66
6	Belanja Bantuan Sosial	2.535.000.000,00	714.000.000,00	(1.821.000.000,00)	28,17
II	Belanja Modal	234.111.281.876,00	195.012.785.833,65	(39.098.496.042,35)	83,30
1	Belanja Modal Tanah	6.770.845.978,00	6.218.148.953,00	(552.697.025,00)	91,84
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.264.079.869,00	54.625.079.687,00	(25.639.000.182,00)	68,06
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.832.823.095,00	26.972.415.318,25	(1.860.407.776,75)	93,55
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Bangunan	117.250.646.434,00	106.223.050.375,40	(11.027.596.058,60)	90,59
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	912.886.500,00	900.265.500,00	(12.621.000,00)	98,62
6	Belanja Modal Aset Lainnya	80.000.000,00	73.826.000,00	(6.174.000,00)	92,28
III	Belanja Tak Terduga	142.765.843.963,33	101.571.859.514,00	(41.193.984.449,33)	71,15
1	Belanja Tak Terduga	142.765.843.963,33	101.571.859.514,00	(41.193.984.449,33)	71,15
B	Transfer	291.290.045.703,40	289.800.435.701,78	(1.489.610.001,62)	99,49
I	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	22.871.517.593,40	22.871.517.591,78	(1,62)	100,00
II	Transfer Bantuan Keuangan	268.418.528.110,00	266.928.918.110,00	(1.489.610.000,00)	99,45
Belanja dan Transfer Daerah		2.383.458.652.405,17	2.125.018.561.254,77	(258.440.091.150,40)	89,16

Sumber: BKAD Kabupaten Bantul, 2020

a. Belanja Daerah

Jika dilihat dari total realisasi belanja dan transfer daerah Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2020, realisasi belanja memiliki proporsi sebesar 86,36% dan realisasi Transfer memiliki proporsi sebesar 13,64%. Dilihat dari realisasi Belanja, belanja operasi memiliki proporsi sebesar 83,84%, belanja modal memiliki proporsi sebesar 10,63%, belanja tak terduga memiliki proporsi sebesar 5,53%. Sedangkan pada pada jenis Transfer, transfer bagi hasil pendapatan mempunyai proporsi 7,89% sedangkan Transfer

Bantuan Keuangan memiliki proporsi 92,11%. Adapun anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi tahun 2020 direncanakan sebesar Rp1.715.291.480.862,44 dan terrealisir sebesar Rp1.538.633.480.205,34 atau 89,70%. Realisasi belanja operasi didominasi oleh belanja pegawai dengan proporsi terbesar dari pengeluaran belanja operasi yaitu sebesar 59,39%. Rincian dan realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp994.101.728.747,34 terealisasi sebesar Rp913.831.132.097,00 atau 91,93%.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp612.575.068.915,00 terealisasi sebesar Rp521.553.510.628,41 atau 85,14%.

c) Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp106.079.683.200,00 terealisasi sebesar Rp102.534.837.479,93 atau 96,66%.

d) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp2.535.000.000,00 terealisasi sebesar Rp714.000.000,00 atau 28,17%.

2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Belanja modal pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp234.111.281.876,00 dengan realisasi sebesar Rp195.012.785.833,65 atau 83,30%, dengan perincian sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah dianggarkan sebesar Rp6.770.845.978,00 terealisasi sebesar Rp6.218.148.953,00 atau 91,84%.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp80.264.079.869,00 dan terealisasi sebesar Rp54.625.079.687,00 atau 68,06%.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp28.832.823.095,00 dan terealisasi sebesar Rp26.972.415.318,25 atau 93,55%.

d) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan dianggarkan sebesar Rp117.250.646.434,00 dan terealisasi sebesar Rp106.223.050.375,40 atau 90,59%.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp912.886.500,00 dan terealisasi sebesar Rp900.265.500,00 atau 98,62%.

f) Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp73.626.000,00 atau 92,28%.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp142.765.843.963,33 terealisasi sebesar Rp101.571.859,514,00 atau 71,15%.

b. Transfer Daerah

Transfer daerah dianggarkan sebesar Rp291.290.045.703,40 dan terealisasi sebesar Rp289.800.435.701,78 atau 99,49%. Transfer daerah terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan, dengan perincian sebagai berikut:

1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer bagi hasil pendapatan dianggarkan sebesar Rp22.871.517.593,40 dan terealisasi Rp22.871.517.891,78 atau sebesar 100%.

2) Transfer Bantuan Keuangan

Transfer bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp268.418.528.110,00 dan terealisasi sebesar Rp266.928.918.110,00 atau 99,45%.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2020 dalam aspek belanja daerah disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2. 3 Permasalahan dan Solusi dalam Aspek Belanja Daerah

No	Permasalahan	Solusi
1.	Masih kurang optimalnya perencanaan penganggaran sehingga masih terjadi revisi dokumen	Peningkatan pemahaman terhadap alur perencanaan yang jelas terstruktur serta sesuai dengan regulasi.
2	Pemahaman penatausahaan belum merata pada setiap pelaku pengelolaan keuangan di OPD.	1. Mengoptimalkan pelatihan, koordinasi kepada seluruh pelaku pengelolaan keuangan di tingkat OPD
3.	Penerapan transaksi non tunai masih belum optimal	1. Peningkatan sarana dan prasarana serta sistem yang lebih baik 2. Perbaikan dan peningkatan sosialisasi terkait kebijakan dan teknis transaksi non tunai
4	Masih terdapat kekurang tepatan dalam melakukan entry data kedalam sistem sehingga menghasilkan kekeliruan dalam Laporan Keuangan	1. Meningkatkan pelatihan kepada seluruh OPD terkait dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. 2. Mengoptimalkan rekonsiliasi data
5	Pelaksanaan kegiatan masih banyak yang belum tepat waktu sesuai rencana sehingga banyak menumpuk di akhir tahun	1. Meningkatkan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan. 3. Menerapkan reward and punishment yang lebih optimal.

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau menanamkan surplus anggaran sehingga pengelolaan APBD dapat terlaksana secara optimal. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan tahun 2020 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya, Pinjaman Dalam Negeri dan penerimaan kembali investasi non permanen lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan tahun 2019 diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri dan pengeluaran investasi non permanen lainnya.

2. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah

Besarnya penerimaan daerah dalam pembiayaan sebelum audit oleh BPK RI, dianggarkan sebesar Rp263.047.636.293,60 dan dapat direalisasikan sebesar Rp238.047.713.544,60 atau 90,74%. Jumlah penerimaan daerah dalam pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, dan penerimaan kembali investasi non permanen. Dengan demikian

dalam APBD tahun 2020, dapat terlihat bahwa besaran Silpa yang dianggarkan sebesar Rp234.047.636.293,60 terrealisir 100%; Pinjaman dalam negeri dari rencana anggaran Rp18.000.000.000,00 tidak direalisasikan, sementara penerimaan kembali investasi non permanen dianggarkan sebesar Rp11.000.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp3.917.740.046,00 atau 35,62%.

3. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Besarnya pengeluaran pembiayaan daerah dalam pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp37.000.814.262,62 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.598.814.262,62 atau tercapai 31,35%. Jumlah pengeluaran daerah dalam pembiayaan ini merupakan pos dari penyertaan (investasi) Pemerintah Daerah, dianggarkan sebesar Rp8.000.814.262,62 dapat direalisasikan sebesar 100%, pembayaran pokok pinjaman dari rencana anggaran Rp18.000.000.000,00 tidak terrealisir dan pengeluaran investasi non permanen lainnya, dianggarkan sebesar Rp11.000.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp3.598.000.000,00 atau 32,71%.



BAB III PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERITAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

Sejalan dengan Visi Bupati Bantul untuk mewujudkan masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan dalam wadah NKRI, peningkatan kualitas pendidikan menjadi hal yang diprioritaskan. Komitmen ini tercermin dari meningkatnya BOP jenjang PAUD, SD, dan SMP yang signifikan. Selain itu alokasi BOP juga diberikan untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yang ikut berperan dalam melayani dan mencerdaskan anak-anak Bantul.

Program dan kegiatan urusan pendidikan yang dilaksanakan terurai sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan dalam urusan pendidikan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) **Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**
 - a) Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur.
- 2) **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);**
 - a) Kegiatan Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PAUD.
 - b) Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - c) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD.
 - d) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

3) Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP.
- b) Kegiatan Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar.
- c) Kegiatan Perijinan SD dan SMP Baru .
- d) Kegiatan Pengembangan Pendidikan Dasar SMP .
- e) Kegiatan Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan Dasar.
- f) Kegiatan Pengembangan kompetensi siswa pendidikan Dasar .
- g) Kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar.
- h) Kegiatan Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD .
- i) Kegiatan Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal .
- j) Kegiatan Pengembangan pendidikan dasar SD.
- k) Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD.
- l) Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD.
- m) Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD.
- n) penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI.
- o) Monitoring, evaluasi dan pelaporan siswa.
- p) Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP.
- q) Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP.
- r) Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS.

4) Pendidikan non formal;

- a) Penyelenggaraan pendidikan non formal
- b) Pengembangan Pendidikan non formal
- c) Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B
- d) Penyelenggaraan Paket C setara SMU

5) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;

- a) Evaluasi standar pelayanan minimal.
- b) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan.
- c) Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- d) Pembinaan Muatan Lokal

6) Manajemen pelayanan pendidikan;

- a) Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan.
- b) Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru (PPDB).
- c) Pembinaan dan operasional dewan pendidikan.
- d) Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk mendukung pelayanan Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pendidikan, pelatihan, sosialisasi, Bimtek, dan peningkatan kapasitas aparatur dengan anggaran sebesar Rp455.164.500,00 dan realisasi sebesar Rp418.970.500,00 atau 90,97%. Hasil yang dicapai adalah:

- a) Melaksanakan penilaian angka kredit sebanyak 4.000 guru;
- b) Melaksanakan seminar/workshop peningkatan kompetensi pengawas TK sebanyak 20 orang;
- c) Melaksanakan seminar/workshop peningkatan kompetensi guru sebanyak 50 orang;
- d) Melaksanakan diklat bagi pengawas sekolah sebanyak 50 orang;
- e) Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dinas sebanyak 100 orang;
- f) Melaksanakan sosialisasi tunjangan profesi guru kepada 4500 guru TK, SD, SMP.

2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Maksud dan tujuan program ini adalah mengemban amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab 1, Pasal 1, Butir 14 dinyatakan bahwa "pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut". Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal meliputi TK dan RA. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal meliputi KB, TPA, dan satuan PAUD sejenis.

Penyelenggaraan PAUD didukung dana APBD melalui program pendidikan anak usia dini sebesar Rp2.371.351.000,00 dengan realisasi Rp2.308.567.000,00 atau 97,35 %. Pada program Pendidikan Anak Usia Dini terdapat 4 kegiatan, adapun kegiatan tersebut :

a) Kegiatan Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PAUD

Kegiatan Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PAUD merupakan kegiatan untuk mendukung pembelajaran PAUD, baik ditingkat kabupaten, korwil dan gugus. Menyasar pada peningkatan model pembelajaran di lembaga PAUD.

Kegiatan ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp83.295.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 83.045.000,00 atau 99.70%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Lomba Gugus PAUD.
- (2) Pemetaan Kurikulum bahan pembelajaran PAUD.

- (3) Fasilitasi kegiatan organisasi mitra antara lain GOPTKI yang mengadakan seminar pendidikan dan Muscab GOPTKI.

b) Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan lembaga PAUD dan Guru PAUD melalui peningkatan kompetensi untuk peningkatan peserta didik PAUD.

Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp86.425.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp81.025.000,00 atau 93,75%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- (1) Workshop Kurikulum 13 PAUD bagi 50 (lima puluh) orang pendidik PAUD.
- (2) Workshop penilaian kurikulum bagi 50 (lima puluh) orang pendidik PAUD.
- (3) Workshop pengelolaan Lembaga PAUD bagi 7 TK Negeri
- (4) Lomba bagi Satuan PAUD di tingkat kecamatan.

c) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran di lembaga PAUD, baik lembaga negeri maupun swasta untuk pemenuhan standar pelayanan minimal PAUD dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus dan APBD.

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp1.672.181.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.656.747.000,00 atau 99,08%.

d) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini adalah kegiatan utama dalam penyelenggaraan pendidikan Anak Usia dini, program ini menyalurkan biaya operasional pendidikan PAUD yang berasal dari Dana Alokasi Khusus untuk lembaga PAUD Negeri.

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp529.450.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp487.750.000,00 atau 92,12%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- (1) Sosialisasi DAK Non Fisik BOP PAUD bagi 1.300 lembaga PAUD
- (2) Workshop pengelolaan keuangan PAUD bagi 1.300 lembaga PAUD
- (3) Monitoring pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD

3) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program ini merupakan program utama dalam penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, program ini merupakan komitmen dari pemerintah daerah untuk mewujudkan pendidikan wajib belajar sembilan tahun yang bermutu dan dituntaskan melalui jalur pendidikan dasar jenjang SD dan SMP. Untuk penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun dilaksanakan dengan dukungan dana APBD sebesar Rp138.067.807.700,00 dengan realisasi sebesar Rp132.191.576.383,00 atau 95,49%. Pada program wajib belajar sembilan tahun terdapat 15 kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP

Kegiatan ini didukung dengan dana dari APBN dan APBD sebesar Rp47.649.340.551,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp45.499.200.00,00 atau 95,49%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- (1) Penyaluran biaya operasional pendidikan SMP yang berasal dari APBD dan pengelolaan biaya operasional sekolah yang berasal dari APBN untuk SMP negeri dengan rincian Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMP Negeri Rp.650.000,00/siswa/tahun dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri Rp1.100.000,00/siswa/tahun yang bersumber dari APBN.
- (2) Penguatan kelembagaan untuk akreditasi sekolah

b) Kegiatan Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar

Sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease, secara resmi UN untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs dibatalkan dan diganti dengan evaluasi hasil belajar, mekanisme dan aturan tertuang dalam surat edaran.

Untuk selanjutnya Kegiatan ini lebih mengarah kepada teknis pelaksanaan evaluasi hasil belajar untuk jenjang SD dan SMP, seperti pendaftaran peserta dan rekapitulasi hasil oleh operator sekolah penyelenggara evaluasi hasil belajar SD dan SMP. Dengan maksud penyelenggaraan evaluasi hasil belajar SD dan SMP di kabupaten Bantul dapat terselenggara.

Kegiatan Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.36.00.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp36.00.000,00 atau 100,00%. Adapun

bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan yaitu melaksanakan sosialisasi ke sekolah tentang juknis, melakukan pendataan peserta evaluasi belajar SD dan SMP Negeri dan swasta.

c) Kegiatan Perijinan SD dan SMP Baru

Merupakan kegiatan untuk memverifikasi usulan pendirian sekolah, secara fisik dan administrasi serta merkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan surat izin, dalam rangka perluasan akses pendidikan wajib belajar Sembilan tahun.

Kegiatan Perijinan SD dan SMP Baru ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp5.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp3.350.000,00 atau 67,00%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Pembentukan Tim Verivikasi Tingkat Kabupaten
- (2) Pencermatan dokumen dari sekolah, dan
- (3) Survey/pembuktian fisik di lokasi sekolah baru.

d) Kegiatan Pengembangan kompetensi siswa pendidikan Dasar

Pengembangan kompetensi siswa untuk penguatan pembelajaran, dengan maksud untuk mempertajam life skill siswa secara akademik dan non akademik.

Kegiatan Pengembangan kompetensi siswa pendidikan Dasar ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp113.690.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp91.510.000,00 atau 80,49%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan pembinaan yang dilaksanakan sebagai berikut : Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) dan Olimpiade Olahraga Nasional (OOSN). Pelaksanaan kegiatan lomba berjenjang tingkat provinsi dan nasional dilakukan secara online untuk Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festifal Lomba Seni

Siswa Nasional (FLSSN). Sedangkan untuk Olimpiade Olahraga Nasional (OOSN) hanya dilakukan pembinaan tingkat daerah.

e) Kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yaitu penyusunan buku data informasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2020, yang bertujuan sebagai sarana untuk sosialisasi Informasi Pendidikan kepada masyarakat umum dan pihak-pihak terkait. Kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp99.550.000,00 atau 99,55%.

f) Kegiatan Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD

Kegiatan Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran SD merupakan kegiatan untuk mendukung pembelajaran SD, baik ditingkat kabupaten dan korwil. Menyasar pada peningkatan model pembelajaran di sekolah dan penajaman kisi-kisi .

Kegiatan Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp49.625.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp48.400.000,00 atau 97,53%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan kegiatan penguatan Mata pelajaran bagi sekolah SD Negeri dan swasta. Disamping itu juga penguatan kurikulum baru untuk semua guru SD.

g) Kegiatan Pengembangan pendidikan dasar SD

Pengembangan kompetensi siswa untuk penguatan pembelajaran, dengan maksud untuk mempertajam life *skill* siswa secara akademik dan non akademik.

Kegiatan Pengembangan pendidikan dasar SD ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp245.400.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp245.400.000,00 atau 100,00%.

h) Kegiatan Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana dari APBD sebesar Rp225.225.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.223.896.00,00 atau 98,18%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Rehabilitasi Bangunan terdampak bencana pada SD Payungan dan SD Pandak.
- (2) Pembangunan 5 Ruang Kelas Baru pada 4 SD

i) Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD

Merupakan kegiatan yang khusus untuk melaksanakan kegiatan Dana alokasi khusus Fisik bidang SD. Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD ini di didukung dengan dana dari APBN sebesar Rp4.587.648.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp4.587.568.000,00 atau 99,99%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (8 ruang kelas pada 6 SD)
- (2) Rehabilitasi Ruang Kelas SD (40 ruang kelas pada 24 SD);
- (3) Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.

j) Kegiatan Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD

Kegiatan Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp432.315.630,00 dan

realisasi anggaran sebesar Rp398.798.383,00 atau 95,59%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa pembinaan dan seleksi untuk tingkat daerah, untuk OSN SD, Dokter Kecil, OOSN SD, FLSSN SD, budaya Kearifan lokal (Gladhi Kawruh dan Ngudhar Tembang), Workshop Budaya Karakter, Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Matematika, Pemetaan Kompetensi Siswa SD/MI, OGN (Olimpiade Guru Nasional).

k) Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI

Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Dasar SD adalah kegiatan utama dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar, program ini menyalurkan biaya operasional pendidikan SD yang berasal dari APBD untuk sekolah negeri. Selain itu untuk penguatan kelembagaan, seperti akreditasi sekolah dan subsidi siswa.

Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI ini di didukung dengan dana dari APBD dan APBN sebesar Rp81.652.836.519,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp78.050.920.000,00 atau 95,5%.

l) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Siswa

Kegiatan ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp73.125.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp68.650.000,00 atau 93,88%. Bentuk kegiatan ini berupa pendampingan perencanaan, penggunaan dan pelaporan dana bantuan sekolah untuk jenjang SD negeri dan swasta.

m) Kegiatan Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP

Kegiatan Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp118.130.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp112.870.000,00 atau 95,55%.

n) Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP

Merupakan kegiatan yang khusus untuk melaksanakan kegiatan Dana alokasi khusus Fisik bidang SMP. Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP ini di didukung dengan dana dari APBN dan APBD sebesar Rp2.766.347.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp2.715.489.000,00 atau 98,16%. Untuk peningkatan prasarana Pendidikan SMP baik Negeri maupun Swasta telah dilaksanakan Pembangunan / Rehabilitasi ruang kelas yang anggarannya bersumber dari Dana APBN (Bantuan Pemerintah/Blockgrand, Rehabilitasi/perbaikan ruang kelas.

o) Kegiatan Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan ialah melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan dan peleporan dana BOS tahun 2019. Disamping itu juga pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan ke sekolah tentang penggunaan dana BOS agar sesuai dengan juknis yang berlaku. Kegiatan Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS ini di didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp13.125.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp9.975.000,00 atau 76,00%.

4) Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Non Formal merupakan salah satu program pendukung Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan, program ini berisi kegiatan dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun, mengurangi angka anak tidak sekolah dan memberantas buta aksara/meningkatkan melek huruf.

Program pendidikan non formal didukung dana APBD sebesar Rp1.116.084.000,00 dengan realisasi sebesar Rp905.059.000,00 atau 81,09% dilaksanakan melalui empat kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal merupakan kegiatan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pada lembaga non formal seperti PKBM untuk menyelenggarakan pendidikan kejar Paket A, B dan C, kegiatan ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp858.140.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp647.990.000,00 atau 75,51%.

b) Kegiatan Pengembangan Pendidikan Non Formal

Kegiatan Pengembangan Pendidikan Non Formal ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp210.334.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp210.334.000,00 atau 100,00%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- (1) Pendidikan Kecakapan Hidup bagi 160 warga belajar di 8 PKBM
- (2) Apresiasi GTK PAUD Dikmas dari Tingkat Kabupaten sampai Tingkat Nasional
- (3) Pendampingan akreditasi lembaga PNF
- (4) Fasilitasi warga belajar keaksaraan dasar

c) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp23.750.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp23.750.000,00 atau 100,00%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- (1) Fasilitasi untuk berbagai kegiatan Kejar Paket A dan B yang diselenggarakan oleh PKBM, meliputi honor tutor, pengelola dan penyusun soal ujian Paket A dan B, rapat koordinasi, serta pengadaan soal ujian Paket A dan B.

d) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C setara SMU

Merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan kejar Paket C setara SMU, untuk mendukung fasilitas dalam penyelenggaraan. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C setara SMU ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp.23.850.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.22.975.000,00 atau 96,33%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- (1) Fasilitasi untuk berbagai kegiatan Kejar Paket C yang diselenggarakan oleh PKBM, meliputi honor tutor, pengelola dan penyusun soal ujian Paket A dan B, rapat koordinasi, serta penggandaan soal ujian Paket A dan B.

5) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini berisi kegiatan-kegiatan yang mencakup peningkatan kompetensi guru, kesejahteraan GTT/PTT, pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan pada semua jenjang kelembagaan PAUD, SD, dan SMP.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan anggaran Rp49.347.541.000,00 dengan realisasi sebesar Rp47.922.246.500,00 atau 97,11% dilaksanakan melalui empat kegiatan.

a) Kegiatan Evaluasi standar pelayanan minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan). SPM dirancang sebagai tahapan awal untuk mencapai SNP dan standar lainnya. Hasil pendataan dari SPM tentang analisis gap/kesenjangan serta perhitungan kebutuhan investasi tingkat kabupaten selanjutnya digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pemenuhan SPM Dikdas oleh tim SPM Dikdas. Evaluasi standar pelayanan minimal dilaksanakan

dengan anggaran sebesar Rp37.841.000,00 dan realisasi sebesar Rp37.650.000,00 atau 97,08%.

b) Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan

Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan merupakan kegiatan yang menysasar khusus Guru dan Tenaga Kependidikan, berisi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

c) Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan ini mencakup pendataan PAUD, SD, SMP dan Non Formal. Pelaksanaan, bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan meliputi sosialisasi pendataan Dapodik yang dilakukan per semester dan juga pendataan laporan individu sekolah baik PAUD, SD/MI dan SMP/MTs negeri dan swasta.

Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran sebesar Rp177.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp169.725.000,00 atau 95,73%.

d) Kegiatan Pembinaan Muatan Lokal

Kegiatan ini bersumber dari Dana Keistimewaan (DANAIS) Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pengembangan dan peningkatan wawasan Pendidikan tentang kearifan lokal.

Kegiatan ini berupa pengembangan kurikulum, pelatihan dan pengadaan alat peraga Pendidikan kearifan lokal. Kegiatan Pembinaan Muatan Lokal dengan anggaran sebesar Rp620.520.000,00 dan realiasi sebesar Rp618.57.500,00 atau 99,68%.

6) Manajemen Pelayanan Pendidikan

Maksud dan tujuan Program manajemen pelayanan pendidikan dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi secara lengkap tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bantul. Program manajemen pelayanan pendidikan didukung dana APBD sebesar Rp316.080.000,00 dengan realisasi sebesar Rp310.140.000,00 atau 98,12%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain:

a) Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyusunan Kalender pendidikan tahun ajaran 2019/2020 sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Bantul. Penyusunan kalender pendidikan sangat penting dilaksanakan karena berguna sebagai pedoman jadwal penyelenggaraan pendidikan selama satu tahun ajaran, mulai penerimaan peserta didik baru sampai kelulusan. Kalender pendidikan tersebut memuat beberapa kegiatan dan alokasi waktu antara lain kegiatan PPDB, kegiatan belajar mengajar efektif, ujian tengah semester, ujian akhir semester, UNAS, praktek kerja lapangan/Praktek Kerja Industri (Prakerin), libur semester, dan lain-lain. Kegiatan PPDB berpedoman pada peraturan gubernur dan peraturan bupati tentang PPDB. Kegiatan penerimaan peserta didik baru sistem *Real Time Online* (RTO) bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru dengan dana APBD sebesar Rp242.575.000,00 dengan realisasi sebesar Rp239.040.000,00 atau 98,54%.

b) Pembinaan dan Operasional Dewan Pendidikan

Kegiatan Operasional Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul, merupakan koordinasi dewan pendidikan di tingkat kabupaten, untuk mewadahi dewan sekolah pada tingkat sekolah, sebagai wujud amanah permendikbud sebagai salah satu pilar pendidikan. Kegiatan ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp58.200.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp56.300.000,00 atau 96,74%.

c) Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi.

Kegiatan ini berupa penyelenggaraan dan pendampingan pendidikan inklusi bagi lembaga PAUD, sebagai wujud upaya pemerintah daerah sebagai daerah

Kegiatan Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi dengan dana APBD sebesar Rp15.305.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.800.000,00 atau 96.70%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa *workshop* bagi 200 (tujuh puluh) pengelola lembaga PAUD se Kabupaten Bantul, yang dilaksanakan pada masing-masing kecamatan.

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2016 – 2020**1) Pendidikan Anak Usia Dini**

Sampai akhir tahun 2020 sudah berdiri sebanyak 7 lembaga TK negeri dan 1293 lembaga swasta, pelaksanaan program PAUD telah menjangkau seluruh pedukuhan (933 pedukuhan) di Kabupaten Bantul, yang pelaksanaannya bekerjasama dengan tim penggerak PKK dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya perluasan akses dan jangkauan pelayanan PAUD bagi masyarakat Bantul.

Dalam rangka mendukung pemenuhan sarana prasarana PAUD secara bertahap Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) dan bantuan operasional kepada

kelompok PAUD. Di samping itu dalam rangka membantu kesejahteraan bagi pendidik diberikan honorarium kepada pendidik PAUD.

Hasil penyelenggaraan PAUD formal dan PAUD nonformal di Kabupaten Bantul tahun 2020 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3. 1 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2016 – 2020

No.	Nama Lembaga dan Keterangan	Jumlah Perkembangan Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Taman Kanak-kanak					
	- Negeri	1	1	1	2	7
	- Swasta	509	515	507	507	509
	- Peserta Didik	26157	26673	25110	24361	23204
	- Guru	2113	2134	2109	2108	2604
	- Guru Bersertifikasi	1122	1131	1100	1149	1611
2	Kelompok Bermain					
	- Swasta	474	482	484	485	492
	- Peserta Didik	10300	10080	10460	10780	8263
	- Guru	1347	1306	1447	1379	1605
3	Taman Penitipan Anak					
	- Swasta	55	56	56	57	56
	- Peserta Didik	1055	1100	1155	1119	811
	- Guru	203	198	203	180	214
4	Satuan PAUD Sejenis					
	- Swasta	247	239	247	239	237
	- Peserta Didik	4023	4174	4523	4474	3604
	- Guru	638	690	738	688	778

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2020

Pada tahun 2020 sejumlah 4.013 pendidik PAUD non formal telah menerima insentif dari Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Adapun upaya untuk penguatan lembaga ditempuh melalui akreditasi lembaga PAUD, sedangkan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan bakat dan kreatifitas guru dan siswa diselenggarakan lomba peningkatan minat, bakat, dan kreatifitas.

2) Pendidikan Dasar

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, merupakan program Pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan jaman. Berdasarkan Undang-undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7- 12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP secara merata. Tidak relevan bila di jaman modern ini masih ada anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah dan ada pula yang masih buta huruf. Oleh karena itu pemerintah berusaha meningkatkan kualitas manusia melalui jenjang pendidikan dasar.

Gambaran situasi dan kondisi yang mendukung keberhasilan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Bantul dapat terlihat dari tingkat kompetensi guru dan tingkat kompetensi lulusan peserta didik. Pencapaian secara kualitas dan kuantitas dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 3. 2 Kondisi Pendidikan Dasar Tahun 2016 – 2020

No.	Nama Lembaga dan Keterangan	Jumlah Perkembangan Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sekolah Dasar					
	- Negeri	281	281	281	281	281
	- Swasta	80	80	82	82	83
	- Peserta Didik	75186	75339	75893	75099	73523
	- Guru	4845	4942	4939	5006	5033
	- Guru Bersertifikasi	1796	2444	2446	2552	2552
2	Madrasah Ibtidaiyah					
	- Negeri	3	3	3	3	3
	- Swasta	29	28	29	29	30
	- Peserta Didik	4890	5360	5821	6195	6584
	- Guru	391	397	433	450	492
	- Guru Bersertifikasi	188	202	194	186	215
3	Sekolah Menengah Pertama					
	- Negeri	47	47	47	47	47
	- Swasta	41	42	43	45	46
	- Peserta Didik	31018	30920	30897	31552	31618
	- Guru	2443	2470	2479	2488	2268
	- Guru Bersertifikasi	1386	1722	1681	1568	1460
4	Madrasah Tsanawiyah					
	- Negeri	9	9	9	9	9
	- Swasta	15	15	15	15	16
	- Peserta Didik	7573	7754	7713	8026	8273
	- Guru	648	676	681	717	735
	- Guru Bersertifikasi	375	375	367	368	368

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2020

Data pada Tabel tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan di Kabupaten Bantul dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun secara kuantitas telah cukup memadai. Jumlah guru SD yang telah bersertifikat pendidik profesional mengalami peningkatan. Sementara itu, guru SMP yang telah bersertifikat pendidik profesional dari total guru PNS, GTY, dan GTT juga mengalami peningkatan. Banyaknya guru yang telah bersertifikat pendidik profesional menunjukkan bahwa profesionalitas kinerja dan kesejahteraan pendidik di Kabupaten Bantul semakin meningkat.

Untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun, dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 3. 3 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2016 – 2020

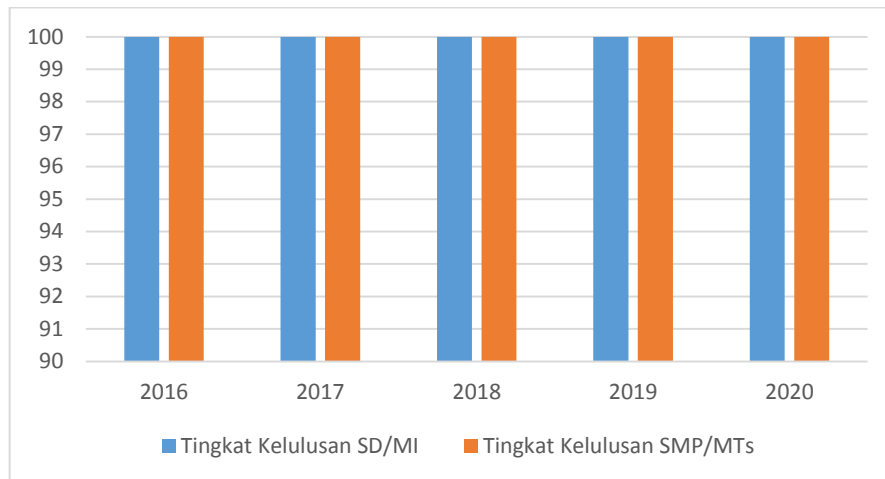
	2016	2017	2018	2019	2020
APK SD/MI	96,12 %	107,63 %	107,66 %	101,78 %	92,77 %
APM SD/MI	84,10 %	96,82 %	97,83 %	92,96 %	86,55 %
APK SMP/MTs	95,00 %	110,72 %	113,20 %	102,86 %	97,23 %
APM SMP/MTs	71,09 %	84,61 %	86,82 %	79,01 %	76,31 %

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2020

Penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) terjadi pada tahun 2019 dan 2020, hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari Menteri Pendidikan dengan penerapan sistem zonasi.

Ukuran mutu sekolah salah satunya adalah akreditasi sekolah yang meliputi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hasil pelaksanaan akreditasi Kabupaten Bantul hingga akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut: jenjang SMP/MTs, dengan nilai A sebanyak 84 sekolah dan nilai B sebanyak 22 sekolah. Untuk jenjang SD dengan nilai A sebanyak 305 sekolah, nilai B sebanyak 61 sekolah.

Tingkat kelulusan jenjang SD/MI dan SMP/MTs tahun 2016 - 2020 mencapai 100%, sesuai dengan target yang dicanangkan.



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2020

Grafik 3. 1 Tingkat Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2016-2020

3) Pendidikan Non Formal

Penyelenggaraan program pendidikan non formal diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melengkapi pendidikan formal. Lembaga pendidikan non formal yang ada di Kabupaten Bantul meliputi:

- a) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
- b) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- c) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- d) Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
- e) Rumah Pintar (Rumpin);
- f) *Homeschooling*.

Adapun data pendidikan non formal dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Kondisi Data Lembaga PNF Tahun 2020

No.	Nama Lembaga dan Keterangan	Jumlah Perkembangan Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SKB					
	- Jumlah Lembaga	1	1	1	1	1
	- Jumlah Warga Belajar	143	296	170	317	379
	- Jumlah Tutor	9	36	36	36	35
2	PKBM					
	- Jumlah Lembaga	33	27	31	31	27
	- Jumlah Warga Belajar	1762	1768	2570	3115	3009
	- Jumlah Tutor	210	423	135	226	155
3	LKP					
	- Jumlah Lembaga	62	44	44	34	42
	- Jumlah Warga Belajar	3276	3452	2272	2296	
	- Jumlah Tutor	210	423	518	315	
4	TBM					
	- Jumlah Lembaga	35	47	53	62	66
	- Jumlah Warga Belajar					
	- Jumlah Tutor					
5	Rumah Pintar					
	- Jumlah Lembaga	2	2	2		
	- Jumlah Warga Belajar					
	- Jumlah Tutor					
6	Homechooling					
	- Jumlah Lembaga	2	2	2		
	- Jumlah Warga Belajar	21	21	25		
	- Jumlah Tutor	10	10	10		

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2020

a) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang belum mampu menamatkan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) dilakukan melalui program pendidikan kesetaraan yaitu Kelompok Belajar

(Kejar) paket. Kejar paket A setara dengan SD, Kejar paket B setara dengan SMP, dan Kejar paket C setara dengan SMA.

b) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program yang diselenggarakan oleh LKP meliputi pemberian layanan pendidikan dan kursus secara khusus untuk meningkatkan kualitas peserta didik seperti bimbingan belajar SD, SMP, SMA/SMK, kursus bahasa asing, kursus setir mobil, montir, rias pengantin, menjahit, komputer, tata boga, tata busana, pengobatan tradisonal, dan lain-lain.

c) Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Taman Bacaan Masyarakat merupakan salah satu penyokong peningkatan minat baca. Salah satu program pembangunan pendidikan adalah program pengembangan budaya baca dan perpustakaan. Program ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat melalui peningkatan budaya baca serta penyediaan bahan bacaan yang berguna bagi aksarawan baru, maupun anggota masyarakat pada umumnya yang membutuhkan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan demi peningkatan wawasan serta produktivitas masyarakat.

d) Rumah Pintar

Rumpin sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dapat mewadahi berbagai kegiatan dimulai dari pendidikan anak usia dini, remaja, kaum perempuan juga kelompok lanjut usia.

Melalui rumah pintar terbangun masyarakat cerdas, inovatif, kreatif, mandiri yang sejahtera. Rumah pintar memiliki minimal lima buah sentra kegiatan, yakni sentra buku, sentra bermain, sentra komputer, sentra panggung, dan sentra kriya.

Di Bantul terdapat dua rumah pintar yaitu rumah pintar “*Luru Ilmu*” di Kecamatan Bambanglipuro dan rumah pintar “*Pijoengan*” di Kecamatan Piyungan. Rumpin “*Pijoengan*” pernah mendapat penghargaan sebagai Rumpin terbaik di Indonesia dalam kategori pengembangan sentra. Sentra unggulan Rumpin adalah pertanian dan ketrampilan produktif dengan ikon “Sejengkal Lahan Seluas Harapan”, rumah pintar menumbuhkan kembali minat warga dalam bidang pertanian sayuran organik dimulai dari pekarangan warga.

e) **Homeschooling**

Sekolah rumah (*homeschooling*) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah rumah. Sekolah rumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orangtua/keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas dimana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal.

Tujuan diselenggarakannya Sekolah rumah :

- (1) Pemenuhan layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang menentukan pendidikan anaknya melalui Sekolah rumah;
- (2) Melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel untuk meningkatkan mutu kehidupan; dan

- (3) Pemenuhan layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah dengan mengutamakan untuk menumbuhkan dan menerapkan kemandirian dalam belajar, yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk pembelajaran mandiri dimana pembelajaran dapat berlangsung di rumah atau tempat-tempat lain dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi anak yang unik dapat berkembang secara maksimal.
- (4) Hasil pendidikan Sekolah rumah diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

d. Keberhasilan Pelaksanaan Urusan Pendidikan

Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari berbagai program kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik.
- 2) Meningkatnya prosentase kelulusan serta rata-rata nilai tingkat pendidikan dasar
- 3) Menurunnya angka putus sekolah.

e. Permasalahan Dan Solusi

Tabel 3. 5 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pendidikan

No.	Permasalahan	Solusi
1	Pembatasan tatap muka kegiatan belajar mengajar	Pembelajaran jarak jauh dengan program Guru Kunjung Siswa [GKS] khusus PAUD dan GKS untuk konsultasi pelajaran khusus jenjang SD/MI serta SMP/MTS.
2	Perlu peningkatan Kesejahteraan bagi GTT dan PTT	Diupayakan penambahan insentif secara bertahap.
3	Masih kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	Dibutuhkan peran aktif dari semua pihak untuk memberikan motivasi agar warga belajar memiliki kesadaran untuk belajar secara aktif di PKBM masing-masing

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2020

2. Kesehatan

Pada tahun 2020 tantangan pembangunan kesehatan sangat besar dengan munculnya pandemi Corona virus disease (Covid) 19 yang sangat membutuhkan sumber daya manusia maupun anggaran yang tidak sedikit. Sampai dengan akhir tahun 2020 pandemi ini belum dapat diatasi.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

. Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul diwujudkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati yaitu Umur Harapan Hidup (UHH).

Tabel 3. 6 Umur Harapan Hidup

No	Tahun	Usia Harapan Hidup (Tahun)	
		Bantul	DIY
1	2014	73,24	74,50
2	2015	73,44	74,58
3.	2016	73,50	74,71
4.	2017	73,56	74,74
5.	2018	73,66	74,82
6	2019	73,77	74,92
7	2020	73,86	74,99

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2020

Umur Harapan Hidup Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor kesehatan. Dari tabel diatas, UHH Kabupaten Bantul pada tahun 2020 yaitu 73,86 tahun, meningkat dari tahun 2019 yaitu 73,77 tahun. Sedangkan Umur Harapan Hidup tingkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 sebesar 74,92 tahun meningkat menjadi 74,92 pada tahun 2020.

Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan yang menjadi salah satu faktor yang berperan

penting di dalamnya. Secara berjenjang indikator UHH di dukung oleh Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yaitu :

- Angka Kematian Ibu
- Angka Kematian Bayi
- Prevalensi Balita Gizi Buruk
- Prevalensi HIV /AIDS
- Angka Kesakitan (*Incidence Rate/ IR*) DBD

a. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul diuraikan dalam berbagai program dan kegiatan. Program dalam urusan kesehatan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Program Obat dan perbekalan kesehatan;

- a) Kegiatan Pengadaan obat dan peningkatan layanan farma

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

- a) Kegiatan Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
- b) Kegiatan Peningkatan kesehatan masyarakat
- c) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- d) Kegiatan Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan
- e) Kegiatan Pelaksanaan BLUD di Puskesmas
- f) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
- g) Kegiatan Operasional Rumah Sakit
- h) Pelayanan Kesehatan Tradisional

3) Program Pengawasan Obat dan Makanan;

- a) Kegiatan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

- a) Kegiatan Promosi Kesehatan
- b) Kegiatan Pemberdayaan masyarakat sehat

- 5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;**
 - a) Kegiatan Peningkatan status gizi
- 6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;**
 - a) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan
- 7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;**
 - a) Kegiatan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
 - b) Kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
 - c) Kegiatan Peningkatan surveilans Epidemiologi dan penanggulangan wabah
- 8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;**
 - a) Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
 - b) Kegiatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
 - c) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**
 - a) Kegiatan Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda
- 10) Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya;**
 - a) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
 - b) Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
 - c) Kegiatan Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya
- 11) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;**
 - a) Kegiatan Pendampingan Jamkesda
 - b) Kegiatan Kemitraan pelayanan kesehatan
- 12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;**
 - a) Kegiatan Pelayanan kesehatan anak dan Balita

13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;

- a) Kegiatan Pelayanan kesehatan Lansia

14) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;

- a) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

15) Program Peningkatan Pencegahan Penyakit tidak Menular;

- a) Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan program dan Kegiatan urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Maksud dan tujuan dari program ini adalah meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan didukung dengan kegiatan:

a) Pengadaan Obat dan Peningkatan Layanan Farmasi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan layanan kefarmasian. Kegiatan ini didukung dana dari APBD dan DAK sebesar Rp.6.417.225.000,- Anggaran ini dipergunakan untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. Realisasi keuangan tahun 2020 adalah sebesar Rp.5.109.341.317,- atau sebesar 79,62%.

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Maksud dan tujuan dari program ini adalah meningkatkan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat. Dilaksanakan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.104.256.025.202,- dengan realisasi Rp.96.852.979,- atau sebesar 92,90%. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

a) Pemeliharaan dan pemulihan Kesehatan

Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan kesehatan mempunyai maksud dan tujuan untuk Peningkatan pelayanan kesehatan dasar. Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp.612.252.500,- yang bersumber dari DAK dan APBD. Dari anggaran tersebut realisasi yang dapat di capai pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.593.874.100,- atau sekitar 97%.

Gangguan jiwa dan perilaku dialami oleh 25% dari seluruh penduduk pada suatu saat dalam kehidupannya dan lebih dari 40% diantaranya didiagnosis secara tidak tepat sehingga menghabiskan biaya untuk pemeriksaan diagnostik dan pengobatan yang tidak tepat. Sebanyak 69% dari pasien tersebut datang dengan keluhan fisik dan banyak diantaranya yang ternyata tidak ditemukan keluhan fisik. Gambaran di Kabupaten Bantul, berdasarkan survei Riskesdas data gangguan jiwa berat sebanyak 4 permil atau 3.875 orang, sedangkan untuk gangguan mental emosional sebanyak 8,3 permil atau 5.628 orang. Dari jumlah penderita di atas belum semua mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan khususnya puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan tingkat pertama di masyarakat dan memberikan pelayanan berkesinambungan dan terhadap seluruh siklus hidup (*continuum of care*).

b) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini di dukung dengan pagu anggaran Rp23.833.482.885,-. Capaian realisasi di tahun 2020 sebesar Rp23.780.609.914,- atau sekitar 99,78%. Salah satu sub kegiatan yang ada didalam

kegiatan ini adalah Koordinasi Perbup ASI Eksklusif. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengawal Peraturan Bupati no 82 tentang ASI Eksklusif. Kegiatan ini sedianya dilaksanakan bulan Agustus 2020 bersamaan dengan peringatan Pekan ASI Sedunia, namun karena kondisi pandemi akhirnya dilaksanakan pada bulan Oktober 2020.

Sub Kegiatan lain yang dilaksanakan dalam program ini adalah Belanja Jasa Tenaga Kesehatan. Anggaran bersumber dari dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Tambahan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan persetujuan Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-239/MK.02/2020 tentang insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19. Untuk Kabupaten Bantul, insentif diberikan kepada tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di Puskesmas, Dinas Kesehatan, RSUD Panembahan Senopati.

c) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah tercapainya target pengelolaan keuangan dan kepegawaian serta terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan. Anggaran kegiatan ini berasal dari anggaran APBD sebesar Rp58.875.000,- dengan realisasi sebesar Rp52.312.000,- atau sekitar 88,85%. Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan pertemuan pengelola kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan dan aset seluruh puskesmas se-kabupaten Bantul. Pertemuan dilaksanakan untuk memastikan keuangan dan aset berjalan dengan lancar sehingga potensi terjadi kesalahan pelaporan dapat

diminimalkan. Keluaran kegiatan ini adalah tersusunnya pelaporan aset dan persediaan, pelaporan BLUD dan entry neraca pada aplikasi dengan benar.

d) Perijinan dan pengawasan Praktek Tenaga dan Sarana Kesehatan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan. Kegiatan ini anggarannya mengalami *refocusing budget* dari anggaran sebesar Rp108.092.500,- menjadi Rp69.917.500,- (setelah anggaran perubahan) dengan realisasi sebesar Rp59.368.500 atau sekitar 84,91%. Dengan pengurangan anggaran, ada sub kegiatan yang tetap dapat terlaksana dan ada sub kegiatan yang dengan terpaksa tidak dilaksanakan.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

(1) *Update Knowledge* Petugas Pelayanan Perizinan

Pertemuan *Update Knowledge* Petugas Pelayanan Perizinan diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi aparat pelayanan perizinan. Output dari *Update Knowledge* ini adalah sebanyak 15 orang petugas pelayanan perizinan mengikuti pertemuan *update knowledge*. Dengan pelaksanaan *update knowledge* petugas perizinan ini pemahaman petugas pelayanan perizinan tentang pelayanan prima meningkat dan dapat diterapkan dalam praktik pelayanannya kepada masyarakat, yang bermuara pada kepuasan pelanggan.

(2) Pengembangan *Software* Pelayanan Peizinan (SIMPERKES).

Pengembangan SIMPERKES yanga telah dibangun sejak tahun 2017, diupayakan dengan menjalin kerjasama dengan

Pihak III. Out put yang diharapkan dari aplikasi ini adalah bertambahnya fungsi dan kegunaan SIMPERKES, berupa layanan Izin Elektronik. Dengan pengembangan *software* ini dapat semakin memudahkan petugas dalam menyelenggarakan layanan perizinan sektor kesehatan serta memberikan jaminan kepastian waktu penerbitan izin bagi pemohon

e) Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas

Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan yaitu terselenggaranya kegiatan UKM di Puskesmas sesuai target dan berkualitas serta menjadi acuan untuk perencanaan kegiatan UKM diperiode berikutnya. Kegiatan ini dilaksanakan di 27 Puskesmas. Adapun total pagu anggaran sebesar Rp19.010.302.000,- dan terealisasi sebesar Rp17.503.890.997,- atau 92,08%.

Dalam rangka pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat, semua Puskesmas melaksanakan kegiatan inovasi untuk mempercepat tercapainya tujuan pelayanan UKM di Puskesmas. Selama Tahun 2020 kita memasuki masa pandemi Covid-19, ada beberapa kegiatan inovasi Puskesmas yang dilaksanakan namun dengan modifikasi, sedangkan untuk inovasi yang mengharuskan tatap muka memang ditiadakan.

Pada Tahun 2020 seluruh puskesmas telah melaksanakan PIS-PK di wilayah kerja masing-masing. Untuk Hasil capaian IKS di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 per indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 7 Capaian Indikator IKS Tahun 2020

No	Indikator IKS	Capaian
1	Keluarga mengikuti program KB	0,512
2	Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	0,974
3	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	0,971
4	Bayi mendapat ASI eksklusif	0,917
5	Balita yang dipantau pertumbuhannya	0,945
6	Penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai standar	0,263
7	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	0,187
8	Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan	0,300
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	0,557
10	Keluarga sudah menjadi anggota JKN/Jaminan Kesehatan	0,707
11	Keluarga mempunyai akses/menggunakan sarana air bersih	0,935
12	Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat	0,975

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

f) Pelaksanaan BLUD Puskesmas

Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas ini dilaksanakan di 27 Puskesmas dimana 16 Puskesmas diantaranya merupakan puskesmas dengan pelayanan rawat inap. Seluruh puskesmas di Kabupaten Bantul sudah berstatus BLUD) penuh sejak tanggal 2 Januari 2016, sehingga pengelolaan keuangan lebih fleksibel sehingga dapat mengikuti kebutuhan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp.53.806.903.120,-.

g) Operasional Rumah Sakit

Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan dan bencana yang sesuai dengan standar. Pelaksanaan kegiatan di dukung oleh pagu anggaran sebesar Rp6.439.292.197,- dengan realisasi sebesar Rp5.516.175.308,- atau sekitar 85,66%. Untuk Bangunan fisik Rumah Sakit yang telah ada selama masa pandemi Covid-19

sementara dipergunakan sebagai Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid (RSLKC) dengan kapasitas 50 TT. Pelayanan diperuntukkan untuk merawat pasien terkonfirmasi Covid -19 dengan gejala ringan sampai sedang. Sedangkan untuk Operasional RSLKC menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga Covid-19. Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam anggaran APBD adalah belanja jasa appraisal, pengadaan tanah untuk rumah sakit daerah tipe D, pengadaan alat-alat kedokteran umum dan belanja bahan medis (obat-obatan) habis pakai. Pengadaan dilaksanakan untuk menambah luas lahan RS, sedangkan pengadaan alat kedokteran umum dan BMHP diperuntukkan mendukung operasional Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid (RSLKC).

h) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan kesehatan tradisional di Puskesmas. Kegiatan ini di dukung dengan anggaran Dana Keistimewaan sebesar Rp425.000.000,-. Sampai dengan Desember 2020 realisasi sebesar Rp425.000.000,- (100%). Sub Kegiatan yang dilaksanakan membentuk 5 Puskesmas dengan pelayanan tradisional komplementar yaitu Puskesmas Kasihan I, Puskesmas Jetis II, Puskesmas Sedayu I, Puskesmas Banguntapan II dan Puskesmas Imogiri I. Dari setiap puskesmas masing-masing membentuk 1 asuhan mandiri kesehatan tradisional.

3) Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini mempunyai maksud dan tujuan untuk Meningkatkan pengawasan obat dan makanan. Didukung anggaran APBD sebesar Rp324.015.000,-. Realisasi dari kegiatan tersebut sebesar Rp176.639.000,- atau 54,52%. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program tersebut adalah :

a) Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan.

Sub kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- (1) Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (PKP-IRT).
- (2) Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (PKP-IRT) dilaksanakan dengan menyelenggarakan pertemuan PKP-IRT sebanyak 6 kali/angkatan dengan peserta sebanyak 50 orang/angkatan (untuk anggaran dari APBD Murni) dan sebanyak 5 angkatan dengan peserta sebanyak 30 orang/angkatan (untuk anggaran dari DAK POM). Pertemuan PKP-IRT per angkatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Output dari penyelenggaraan PKP-IRT 11 angkatan adalah sebanyak 300 orang mendapatkan Sertifikat PKP-IRT yang dapat digunakan untuk mengurus Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
- (3) Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PP-IRT) bagi pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan. Proses sertifikasi PP-IRT dilaksanakan dari survei lokasi ke Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang mengajukan permohonan Sertifikat PP-IRT. Sebanyak 250 unit IRTP berhasil memperoleh rekomendasi penerbitan sertifikat PP-IRT yang dapat digunakan untuk memproses Sertifikat PP-IRT melalui Aplikasi Online Single Submission di DPMPPT Bantul. Dengan Sertifikasi PP-IRT ini produk pangan IRTP yang berlokasi di Bantul telah dijamin keamanannya oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

- (4) Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan dengan sasaran tokoh masyarakat, kader, mahasiswa dan anak sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 5 kali dengan jumlah peserta 250 orang. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Bahan Tambah Pangan (BTP) berbahaya dan Keamanan Pangan.
- (5) Pemeriksaan sampel makanan dan minuman produk IRTP yang beredar di Kabupaten Bantul untuk pemeriksaan mikrobiologi dan kandungan BTP dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 31 sampel.
- (6) Inspeksi sarana kefarmasian (Apotek) guna peningkatan layanan farmasi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar. Kegiatan inspeksi ini dilakukan dengan cara kunjungan/sidak ke sarana apotek untuk melihat kesesuaian sarana, prasarana, SDM dan aspek pelayanan di apotek dengan standar. Dari hasil inspeksi petugas Dinas Kesehatan (Farmakmin) akan memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari hasil temuan. Jumlah sarana yang dilakukan inspeksi sejumlah 38 sarana
- (7) Pembinaan sarana pelayanan kefarmasian, dilakukan dengan pertemuan dengan mengundang narasumber yang kompeten dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan *refresing/udgrading* perundang-undangan yang berkaitan dengan standar pelayanan kefarmasian di Apotek kepada Apoteker pengelola Apotek.

4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam

kehidupan sehari-hari. Penyelenggaraan program promosi kesehatan dengan didukung oleh anggaran APBD sebesar Rp588.941.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp551.648.500 (93,67%). Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 antara lain:

a) Kegiatan Promosi Kesehatan

Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai ajang promosi atau mensosialisasikan berbagai macam isu dan permasalahan tentang kesehatan yang menjadi prioritas utama, dengan kegiatan forum koordinasi, advokasi, workshop, pendampingan, kampanye, media cetak dan elektronik. Kegiatan ini didukung oleh anggaran APBD sebesar Rp532.979.000,-. Capaian realisasi sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp512.223.500,- atau sebesar 96,11%. Sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

(1) Pengembangan Media dan Teknologi Promosi Kesehatan

Dasar pelaksanaan kegiatan pengembangan media dan teknologi promosi kesehatan adalah Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Nomor 800/3752 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Kreatif Multimedia Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Tim kreatif ini diberi tugas untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring, evaluasi serta melaksanakan penelitian maupun pengembangan model dan media promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

(2) Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga

Pembinaan PHBS dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, institusi tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-

tempat umum. Data capaian PHBS tahun 2020 di Kabupaten Bantul pada semua tatanan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 8 Capaian Tatanan Phbs Tahun 2016 – 2020

No.	Tatanan PHBS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tangga	41,21%	47,14%	50,27%	53%	53,1%
2	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	88,31%	83,82%	83,82%	91,67%	91,70%
3	Institusi Pendidikan	44,38%	54,77%	54,77%	61%	62,20%
4	Tempat Kerja	26,15%	39,15%	39,15%	41,21%	41,21%
5	Tempat-tempat Umum	63,18%	58,52%	58,52%	59%	59,15%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

(3) Kesehatan Anak Sekolah

Kegiatan pembinaan kesehatan anak sekolah ini bertujuan untuk mewujudkan tercapainya PHBS pada warga sekolah. Kegiatan yang menjadi indikator kinerja Dinas Kesehatan adalah pelaksanaan kegiatan penjangkaran kesehatan siswa yang dilakukan di SD, SMP, dan SMA, dengan pelaksana dari Puskesmas dan pihak sekolah. Pada tahun 2020 dikarenakan terjadi pandemi Covid-19, kegiatan pendataan kesehatan siswa dilaksanakan melalui Online berbasis aplikasi mobscreen Penjarkes. Dengan aplikasi ini orang tua dapat mengentry data anaknya melalui www.penjarkesdiy.web.id. Dengan penggunaan aplikasi ini manfaat yang dirasakan adalah mengurangi waktu petugas untuk proses rekapitulasi hasil penjangkaran kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk siswa kelas I untuk SD/MI, kelas VII untuk SMP/MTs dan Kelas X untuk SMA/MA/SMK. Penjangkaran dilaksanakan dengan seminimal mungkin bertatap muka

berinteraksi dengan siswa. Sasaran kegiatan penjangkaran kesehatan di Kabupaten Bantul sebanyak 123.148 siswa. Hasil Data penjangkaran kesehatan sementara di tingkat SD sebesar 61,01% siswa kelas satu setingkat SD, 60,24% siswa kelas satu setingkat SMP dan 15,81% siswa kelas satu setingkat SMA. * (data masih proses validasi).

b) Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehat. Di dukung dengan anggaran APBD sebesar Rp55.962.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp39.425.000,- atau 70,45%. Indikator untuk menunjukkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan adalah desa siaga. Di Kabupaten Bantul terdapat 43 desa siaga yang termasuk dalam kategori baik, yaitu memiliki strata purnama dan mandiri. Kegiatan inovatif untuk menunjukkan peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan adalah Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK), yang sudah dimulai sejak tahun 2007. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh *stakeholder*, termasuk juga para pejabat dan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan utama, yaitu menurunkan kematian ibu maternal, menurunkan kematian bayi, menurunkan jumlah penderita gizi buruk, menekan kasus DBD, dan meningkatkan penemuan kasus TB. Unit analisis DB4MK telah diubah dari desa bebas 4 masalah kesehatan menjadi dusun bebas 4 masalah kesehatan.

Hal ini berdasarkan aspirasi kepala desa dan masyarakat karena peluang masyarakat untuk mendapatkan *reward* lebih besar dengan unit analisis yang lebih kecil yaitu pedukuhan

dan masyarakat mempunyai harapan yang lebih besar untuk mengupayakan daerahnya bebas empat masalah kesehatan. *Reward* diberikan bagi dusun dengan kriteria bebas kematian ibu, kematian bayi, gizi buruk, dan DBD.

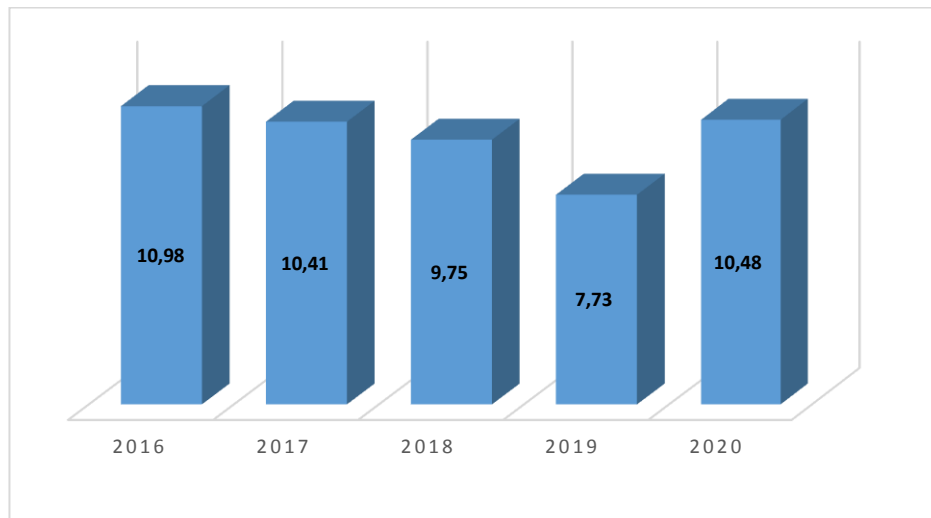
Khusus untuk tahun 2020, tidak diberikan *reward* dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga anggaran DB4MK dialihkan untuk kegiatan tanggap darurat Covid-19.

5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program ini mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu peningkatan status gizi yang didukung pagu anggaran APBD dan DAK sebesar Rp2.191.181.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.820.126.074,- atau sebesar 83,07%. Anggaran pada program dan kegiatan ini digunakan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, menanggulangi kasus gizi buruk dan stunting, menekan angka kesakitan bayi balita, mencegah kematian bayi baru lahir, mencegah balita stunting dan gizi buruk, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang bagi keluarga dan penanggulangan permasalahan gizi sehingga tercipta generasi sehat dan berkualitas. Berbagai program perbaikan gizi telah diupayakan untuk meningkatkan status gizi. Kegiatan tersebut mencakup beberapa kegiatan yaitu surveilans gizi, penanggulangan masalah gizi melalui pelatihan dan sosialisasi Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), sosialisasi pedoman gizi seimbang, penanggulangan anemia pada remaja melalui program sepekan, penanggulangan anemia pada remaja karang taruna, Bimtek dan peningkatan kapasitas petugas gizi, audit gizi buruk, dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi.

Upaya lain yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita KEP/kurus berupa bantuan makanan tambahan selama 180 hari makan anak bagi 600 Balita. Selain itu, upaya perbaikan gizi juga dilakukan dengan PMT bagi 300 ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) untuk 90 hari makan ibu. Selain program yang dilaksanakan langsung pada sasaran juga dilakukan kegiatan untuk menggalang komitmen dengan lintas sektor terkait dalam penanggulangan masalah gizi terutama penanggulangan stunting karena pada tahun 2019 Kabupaten Bantul ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai Lokasi khusus (LOKUS) dalam penanggulangan Stunting Tahap 2. Stunting adalah adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun.

Prevalensi balita stunting pada tahun 2020 sebesar 10,48 % meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 7,73 %. Persentase balita stunting di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Grafik 3. 2 Presentase Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020

Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa presentase balita stunting mengalami peningkatan pada tahun 2020. Upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan prevalensi balita stunting diantaranya adalah penyusunan peraturan bupati tentang Stunting, pelaksanaan RAD Stunting, peningkatan kapasitas kader dalam pemantauan pertumbuhan, konsultasi dan pemeriksaan dokter spesialis anak pada balita stunting, dan pendampingan balita stunting oleh kader. Namun demikian untuk tahun 2020, untuk pelaksanaan kegiatan penurunan stunting terkendala Pandemi Covid-19.

Beberapa hasil Pelaksanaan program perbaikan gizi antara lain:

a) Pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi

Pencapaian hasil distribusi vitamin A pada Balita pada tahun 2020 sebesar 99,94% meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 99,79%. Peningkatan distribusi vitamin A pada Balita dapat disebabkan oleh adanya kesadaran dan dukungan dari masyarakat terkait kesehatan balita khususnya terhadap berbagai imunisasi lengkap yang harus didapatkan anak.

b) Rumah Tangga mengkonsumsi garam Yodium

Capaian Survei Rumah Tangga mengkonsumsi garam yodium tahun 2020 sebesar 99,4% menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 99,60%. Walaupun menurun, tetapi cakupan ini masih di atas target. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran keluarga menggunakan garam beryodium masih baik. Kesadaran keluarga dapat disebabkan oleh seringnya mereka terpapar oleh informasi terkait pentingnya mengkonsumsi garam beryodium baik dari pemberi layanan kesehatan maupun dari tokoh masyarakat seperti kader.

c) Pemantauan Penimbangan Balita

Hasil capaian pemantauan penimbangan Balita tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- (1) Partisipasi masyarakat diketahui melalui jumlah Balita yang ditimbang dibandingkan dengan seluruh Balita (D/S) sebesar 42,60% (menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 81,47%) tetapi belum sesuai target sebesar 82%.
- (2) Kondisi kesehatan balita diketahui melalui jumlah Balita yang naik berat badannya dibandingkan dengan Balita yang ditimbang (N/D) sebesar 53,49% (menurun dibanding tahun 2019 sebesar 58,81%). Penurunan disebabkan adanya pandemi Covid -19 yang berimbas pada penurunan partisipasi masyarakat menurun.
- (3) Potensi masalah gizi diketahui melalui jumlah Balita yang memiliki berat badan di bawah garis merah dibandingkan dengan Balita yang ditimbang (BGM/D) dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 0,45%

menurun dibanding tahun 2019 sebesar 0,56%. Penurunan terjadi karena adanya pandemi Covid-19.

- (4) Pada tahun 2020 status gizi buruk (BB/U) pada Balita sebesar 0,47% yaitu sebanyak 89 balita gizi buruk dari 19.057 balita yang diukur. Capaian ini juga sudah melampaui target DIY sebesar kurang dari 1%. Masih banyaknya kasus gizi buruk disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya asupan, pola asuh yang kurang tepat, sanitasi lingkungan, penyakit infeksi, penyakit bawaan, riwayat BBLR, dan adanya permasalahan sosial di dalam keluarga.

6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini mempunyai maksud dan tujuan meningkatkan Kesehatan Lingkungan Masyarakat. Kegiatan pada program pengembangan lingkungan sehat adalah pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan yang didukung pagu anggaran APBD dan DAK sebesar Rp672.822.500,-. Dengan realisasi sebesar Rp662.755.760,- atau sebesar 98,50%. Sub kegiatan ini antara lain :

a) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

STBM merupakan pendekatan dan paradigma pembangunan sanitasi di Indonesia yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku. Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), mencakup lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga. Untuk tahun 2020, Capaian kegiatan adalah desa yang telah mengimplementasikan 5 (lima) pilar STBM. Dari target

27 desa yang mendeklarasikan sebagai desa STBM mengalami kemajuan pesat yaitu sebanyak 58 desa.

b) Kabupaten Sehat

Kegiatan berupa pembinaan lokasi tatanan, pembinaan kelompok kerja (Pokja) desa sehat dan rapat koordinasi antar OPD. Pembinaan dilakukan untuk mempersiapkan lokasi tatanan menuju verifikasi di tahun 2021.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah pada tahun 2020 Kabupaten Bantul mempertahankan penghargaan tertinggi yaitu Penghargaan Kabupaten Sehat Swasti Saba Wistara Klasifikasi Pengembangan untuk keempat kalinya.

c) Pengawasan dan Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

Kegiatan berupa pelatihan laik sehat bagi 160 pelaku jasa boga (katering), restoran, rumah makan, kantin sekolah serta sertifikasi LAIK Hygiene Sanitasi untuk jasa boga yang sudah memenuhi standart sanitasi jasa boga.

d) Pembinaan Kesehatan Kerja

Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Kabupaten Bantul semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah industri dan usaha kerajinan. Kegiatan UKK berupa orientasi peningkatan pekerja perempuan.

e) Pembinaan Kesehatan Olahraga

Kegiatan berupa tes kebugaran bagi calon jamaah haji. Capaian kegiatan berupa pemeriksaan kebugaran bagi 1.000 orang calon jamaah haji. Kegiatan kesehatan olahraga di Puskesmas meliputi pendataan kelompok olahraga, pembinaan kelompok olahraga (pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan olahraga) dan pelayanan kesehatan olahraga dengan kegiatan

konsultasi kesehatan olahraga, pengukuran kebugaran jasmani, penanganan cedera olahraga akut dan pelayanan pada event olahraga.

f) Pembinaan Tempat Fasilitas Umum

Kegiatan berupa implementasi pasar sehat dengan tujuan pembinaan kepada pedagang pasar dapat mengetahui resiko pencemaran penyakit serta pengendalian resiko pencemaran yang menyebabkan penyakit berbasis lingkungan.

g) Pengawasan Kualitas Air

Pengawasan kualitas air yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan anggaran APBD, mencakup sejumlah 3.166 sampel, yang terdiri dari 5 sampel air minum yang bersumber dari PDAM, 5 sampel tiap kecamatan dan 5 sampel air bersih tiap desa.

Cakupan air bersih pada tahun 2020 sudah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa semua masyarakat Kabupaten Bantul sudah dapat mengakses air bersih, walaupun akses air bersih ini masih mengalami kendala dari segi kualitas, kontinuitas, dan kuantitas.

Dalam rangka mendukung pencapaian kualitas air, dilakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok pengelola air minum pedesaan (Pamaskarta). Kegiatan pembinaan berupa pelatihan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) dan *workshop* peningkatan kualitas air Pamsimas. Kegiatan diikuti oleh 45 orang dari Pamaskarta.

h) Bantuan Jamban

Jambanisasi adalah suatu program dari pemerintah untuk pengadaan jamban bersama-sama. Tujuan jambanisasi yaitu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat tidak mampu yang diawali dari kesehatan sebagai

modal dasar menuju kesejahteraan. Kegiatan ini berupa dana stimulan yang diberikan kepada masyarakat untuk pembangunan jamban. Anggaran untuk kegiatan didukung oleh APBD dan BKK. Untuk pencarian sasaran penerima bantuan melibatkan puskesmas setempat dan selanjutnya seluruh penerima bantuan di buat Surat Keputusan Bupati Terkait Daftar Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Jamban. Tahun 2020 di Kabupaten Bantul terdapat 314 KK yang mendapat bantuan Jamban di beberapa lokasi yang terdapat di kalurahan Jatimulyo, Muntuk, Terong, Temuwuh, Dlingo, dan Mangunan yang berada di kapanewon Dlingo.

7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular bertujuan untuk mengendalikan penularan penyakit dan menurunkan angka kesakitan dan kematian karena penyakit menular. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular ini didukung oleh Anggaran APBD dan DAK sebesar Rp5.349.119.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.935.333.210,- (54,88%) Kegiatan yang dilaksanakan di program ini meliputi:

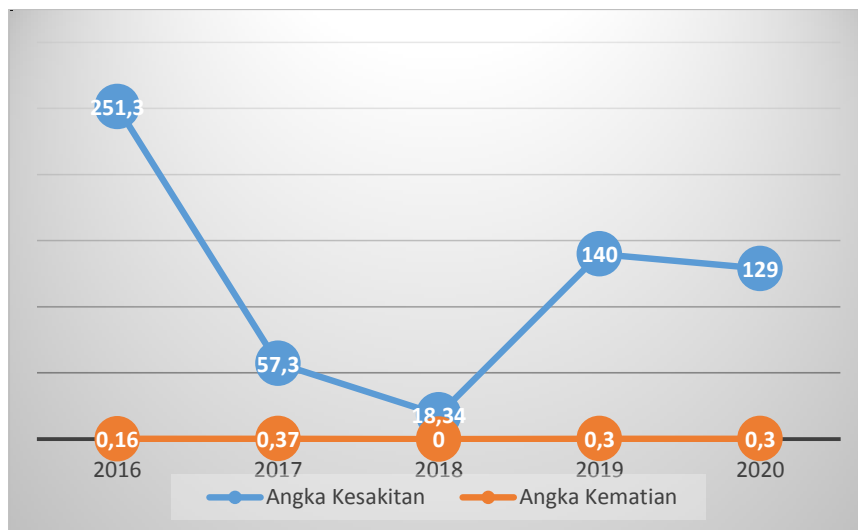
a) Penyemprotan /Fogging Sarang Nyamuk

Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit , pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) dan menurunkan angka kematian (*Case Fatality Rate*). Kegiatan ini di dukung oleh pagu anggaran APBD sebesar Rp267.183.000,- dengan realisasi sebesar Rp214.927.755,-(80,44%).

Angka kesakitan DBD pada tahun 2020 sebesar 129 per 100.000 penduduk (1222 kasus) lebih rendah dibanding tahun

2019 140 per 100.000 penduduk (1424 kasus). Pada tahun 2020 terdapat 4 kasus kematian penderita DBD (Case Fatality Rate) sebesar 0,3%, sama dengan tahun 2019 di mana di tahun tersebut terjadi 4 kasus kematian akibat DBD.

Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit infeksi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* yang banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan terhadap penyebaran kasus DBD di daerah urban dan semi urban, sehingga hal tersebut menjadi perhatian utama kesehatan masyarakat internasional.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Grafik 3. 3 Angka Kesakitan Dan Angka Kematian DBD Tahun 2016-2020

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa angka penemuan DBD mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengendalian kasus DBD antara lain :

- (1) Faktor Lingkungan
 - (a) Kepadatan penduduk
 - (b) Mobilitas penduduk antar wilayah

- (c) Tata bangunan & lingkungan yang kurang sehingga menyebabkan sumbatan saluran air
 - (d) Iklim yang berubah
- (2) Faktor Perilaku Masyarakat
- (a) PSN 3 M belum membudaya di keluarga
 - (b) Penumpukan benda yang bisa menjadi tempat perindukan nyamuk
 - (c) Pembuangan sampah yg belum pada tempatnya,
 - (d) Sebagian masyarakat masih memilih fogging sebagai upaya utama
 - (e) Kegiatan PE (penyelidikan Epidemiologi) dan gertak PSN terkendala adanya pandemi covid-19.
- (3) Faktor Pelayanan Kesehatan:
- (a) Kendala dalam hal prosedur rujukan (BPJS)
 - (b) Surat keterangan diagnosis rumah sakit (KDRS) terlambat diterima oleh puskesmas wilayah dan Dinas kesehatan

Untuk Fogging Fokus pada tahun 2020 direncanakan sebanyak 353 titik, namun terealisasi 238 titik karena dari hasil penyelidikan epidemiologi hanya 238 titik yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan fogging focus.

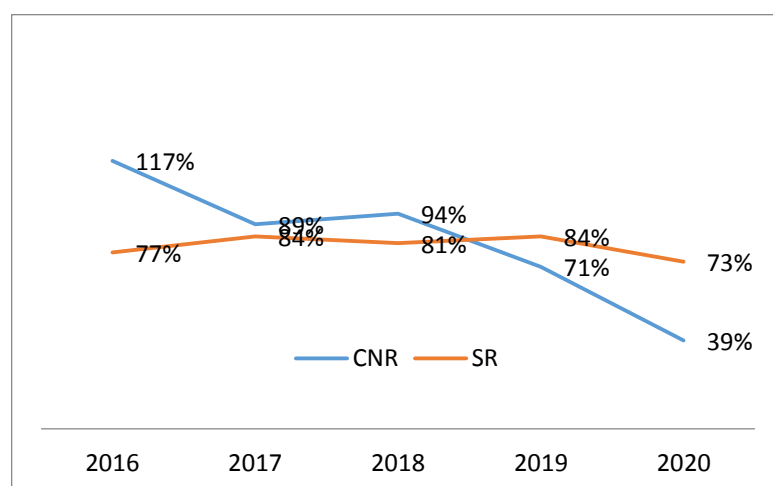
b) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular

Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyakit menular di Kabupaten Bantul dengan tolok ukur kinerja meningkatkan angka bebas jentik, meningkatkan penemuan kasus HIV dan AIDS, pelayanan kesehatan orang dengan TBC. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, dengan didanai oleh anggaran DAK dan APBD

sebesar Rp2.517.498.500,-. Realisasi yang dapat dicapai selama tahun 2020 sebesar Rp2.425.780.302 (96,36%). Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

(1) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular Tuberkulosis (TB)

Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh *mycobacterium*, yang berkembang biak di dalam bagian tubuh dimana terdapat banyak aliran darah dan oksigen. Infeksi bakteri ini biasanya menyebar melewati pembuluh darah dan kelenjar getah bening, tetapi secara utama menyerang paru-paru. Tuberkulosis adalah penyakit yang paling umum yang dialami oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena masyarakat kurang bisa menjaga kebersihan yang ada dilingkungannya. Masalah yang dihadapi terkait penyakit TB adalah penemuan kasus dan kesembuhan penderita TBC Adapun grafik penemuan kasus (*Case Notification Rate/CNR*) dan Angka Keberhasilan TB (*Success Rate/SR*) dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2020

Grafik 3. 4 Angka penemuan Kasus dan Angka Keberhasilan TB Tahun 2016-2020

Angka penemuan kasus TB (*Case Notification Rate/CNR*) dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan dan menurun pada tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemi Covid-19. Penemuan kasus secara pasif melalui penemuan suspek TB pada pasien yang berkunjung di fasilitas pelayanan kesehatan menurun seiring dengan menurunnya kunjungan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya pemerintah bersama masyarakat dalam menemukan kasus TB secara aktif dan selektif (*Active Selective Case Finding*) tidak semua terlaksana karena kondisi pandemi Covid-19. Angka keberhasilan (*Success rate*) tampak fluktuatif, kendala dalam keberhasilan pengobatan ini disebabkan antara lain karena tingginya angka putus obat dan meninggal.

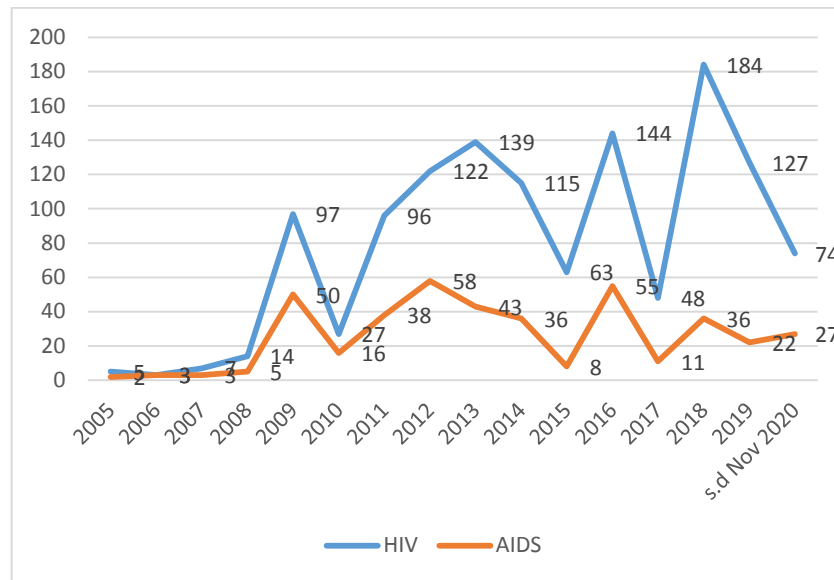
c) Pencegahan dan Penanggulangan Leptospirosis

Pada tahun 2020 telah ditemukan kasus leptospirosis sebanyak 79 kasus dengan 4 kasus dugaan kematian. Angka kesakitan leptospirosis pada tahun 2020 sebesar 8,61 per 100.000 penduduk, menurun dibandingkan tahun 2019 yaitu 9,79 per 100.000 penduduk (92 kasus dengan 1 kematian). Upaya-upaya komprehensif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan leptospirosis telah dilakukan.

d) Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS

Penyebaran HIV-AIDS memang sangat sulit terdeteksi. Data yang didapatkan saat ini hanya sebagian kecil dari besarnya jumlah orang yang sebenarnya mengidap HIV-AIDS. Banyak orang yang tidak memeriksakan dirinya sehingga angka pasti jumlah ODHA hingga saat ini tidak dapat diketahui. Inilah yang dinamakan fenomena gunung es. Masih banyak ODHA yang

tidak terdeteksi hingga hari ini. Lebih dari itu, banyak ODHA yang tidak sadar bahwa saat ini dirinya terjangkit HIV. Berikut kami sajikan grafik penemuan HIV AIDS tahun 2005 – 2020.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Grafik 3. 5 Penemuan Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2020

Angka prevalensi HIV-AIDS sampai tahun 2020 sebesar 0,07% dari target <0,5%. Angka prevalensi ini masih termasuk dalam kategori endemis rendah (<0,5%). Bila di dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi penurunan kasus dari 127 kasus menjadi 74 kasus. Angka ini menunjukkan endemisitas kasus HIV termasuk baik, jauh lebih rendah dibandingkan target sebesar 0,5%.

Akselerasi pengendalian HIV-AIDS pada tahun 2020 dilakukan melalui kegiatan berikut ini :

- (1) Peningkatan akses pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko (Bumil, TBC dan IMS) dengan pengadaan rapid HIV 1 dan Sifilis yang didistribusikan ke seluruh fasyankes yang sudah mampu melaksanakan pemeriksaan HIV (27 Puskesmas dan 8 Rumah Sakit)

- (2) Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok kunci dan pada kelompok potensial serta kelompok berisiko rendah (Bumil dan penderita TB) dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan pengobatan kasus melalui VCT di Puskesmas
- (3) Klinik layanan Infeksi Menular Seksual (IMS) di 6 (enam) puskesmas yaitu Puskesmas Kretek, Imogiri I, Srandakan, Kasihan II, Dlingo I dan Sedayu I yang intensif melaksanakan penyuluhan, pelayanan *Voluntary Counseling and Testing* (VCT).
- (4) Klinik layanan *Harm Reduction* di Puskesmas Banguntapan II. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Program Terapi Rumatan *Metadon* (PTRM) yang ditujukan bagi Pengguna Narkoba Suntik (Penasun). Sedangkan bagi penasun yang sulit untuk terapi *metadone*, akan diberikan Layanan Alat Suntik Steril (LASS).
- (5) Klinik pelayanan *Voluntary Consulting and Testing* (VCT) di 27 Puskesmas dan 8 RS (RS PKU, RS Elizabeth, RS Nur Hidayah, RS Rahma Husada, RS Rajawali Citra, RSK Paru Respira, RSPAU Harjolutito, RS Panembahan Senopati). Layanan *Care Support and Treatment* (CST) atau Pengobatan Dukungan Perawatan (PDP) di dua (2) RS dan 1 Puskesmas, yaitu RSUD Panembahan Senopati, RSPAU Hardjo Lukitodan Puskesmas Kretek.
- (6) Penambahan layanan PDP dengan melatih puskesmas (Puskesmas Kasihan II, Puskesmas Banguntapan I, Puskesmas Srandakan, Puskesmas Piyungan dan Puskesmas Sedayu II) untuk memudahkan akses pengobatan Orang dengan HIV AIDS (ODHA).

- (7) Peningkatan penemuan penderita melalui Pengendalian Penularan Ibu dan Anak (PPIA) dengan cara tes HIV pada semua ibu hamil.

Tantangan pelaksanaan program HIV Tahun 2020:

- (1) Adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi pelaksanaan program HIV AIDS, kegiatan penjangkauan dan mobile VCT terhambat sehingga penemuan kasus menurun
- (2) Sumber daya di puskesmas dan RS difokuskan ke penanganan Covid.
- (3) Beberapa nakes yang terlibat di pengendalian HIV banyak yang terdampak covid termasuk di layanan PDP dan KT HIV.
- (4) Ketersediaan ARV yang terbatas, menyebabkan beberapa layanan tidak bisa memberikan ARV untuk 1 bulan dan layanan PDP baru yang belum memiliki pasien belum bisa di beri ARV sebagai stok.
- (5) Lost follow up (LFU) masih cukup tinggi, upaya yang sudah dilakukan dengan pengumpulan data individu ODHA LFU, koordinasi dengan LSM pendamping dengan melakukan validasi data ODHA LFU berikutnya akan ditindaklanjuti dengan pencarian ODHA LFU.

e) Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk Meningkatkan Kapasitas Petugas Surveilans, Imunisasi dan Haji serta Meningkatnya Jejaring Surveilans dengan Lintas Sektoral di dukung oleh pagu anggaran APBD dan DAK sebesar Rp2.564.437.500,- dengan capaian realisasi sebesar Rp294.625.153,- (11,49%).

Kendala capaian yang besar ini sebagian besar terjadi pada APBD Perubahan 2020. Saat APBD Perubahan 2020 ditetapkan, kegiatan ini merencanakan pengadaan bahan medis habis pakai berupa reagen laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19. Dalam pelaksanaannya, didapatkan kendala pengadaan barang (lelang) tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan waktu yang tersedia, sehingga kebutuhan tersebut dipenuhi dengan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) 2020.

Pada tahun 2020, Kabupaten Bantul sekali lagi meraih *Universal Child Immunizations* (UCI) nasional sebesar 100%, yaitu seluruh desa di Kabupaten Bantul telah mencapai standar imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0-11 bulan. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kesehatan melaksanakan pencanangan bulan imunisasi anak sekolah (BIAS). BIAS adalah pemberian imunisasi rutin lanjutan bagi anak usia sekolah kelas 1, 2, 5 dan 6 SD/MI atau sedrajat.

Imunisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, kecacatan, dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) yaitu, Tuberculoosis, Difteri, Pertussis, Campak, Polio, Tetanus, dan Hepatitis B serta Kanker Serviks.

Cakupan BIAS sampai dengan 15 Januari 2021 sebagai berikut :

- (1) Imunisasi MR untuk mencegah penyakit campak dan rubella pada anak diberikan pada siswa kelas 1 SD capaian 96,34 %.
- (2) Imunisasi HPV berperan penting dalam mencegah penyakit akibat infeksi virus HPV, misalnya kanker serviks, kanker penis, kanker anus, kanker tenggorokan, dan kutil kelamin diberikan pada siswa kelas 5 dan 6 SD capaian 97,44%

(3) Imunisasi DT (diphtheriatetanus) adalah imunisasi yang diberikan untuk mencegah beberapa penyakit infeksi seperti difteri, tetanus, dan batuk rejan (pertusis) diberikan kepada siswa kelas 1 SD dengan capaian 95,12%

(4) Imunisasi TD (tetanus diphtheria) merupakan imunisasi lanjutan dari imunisasi DT agar anak semakin kebal dengan ketiga penyakit infeksi tersebut diberikan kepada siswa kelas 2 SD dengan capaian 94,85% dan siswa kelas 5 SD dengan capaian 95,57%.

8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Maksud dan tujuan dari program ini adalah meningkatkan mutu dan standar pelayanan kesehatan. Program ini didukung oleh anggaran APBD dan DAK sebesar Rp1.432.949.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp788.182.100,-,- (55%). Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini terdiri atas :

a) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan di puskesmas sesuai standar pelayanan kesehatan. Kegiatan ini didukung pagu anggaran sebesar Rp990.647.500,- dengan realisasi sebesar Rp358.837.500,- atau sebesar 36,22%. Sub kegiatan yang dilaksanakan adalah:

(1) Pendampingan Paska Akreditasi

Pendampingan Paska Akreditasi direncanakan dilaksanakan oleh Pendamping Akreditasi FKTP di 12 puskesmas yang melaksanakan reakreditasi di tahun 2020. Namun, karena terjadinya pandemi COVID-19, pendampingan hanya bisa dilaksanakan di 7 puskesmas. Dengan pendampingan pasakreditasi ini diharapkan dapat dipersiapkan dengan sebaik mungkin kesiapan masing-masing puskesmas untuk melaksanakan survei reakreditasi,

sehingga diharapkan paling tidak dapat mempertahankan atau bahkan meningkat status akreditasinya.

(2) *Update Knowledge* Pendamping Akreditasi FKTP

Update Knowledge Pendamping dilaksanakan dengan menggelar Pertemuan *Update Knowledge* Pendamping FKTP yang narasumber dari Dinas Kesehatan DIY dan Forum Komunikasi Surveior Mataram Yogyakarta (Forum KOSUMAYO). Kegiatan yang diikuti oleh 60 orang ini dapat menyegarkan lagi pemahaman pendamping akreditasi FKTP terhadap standar dan instrument akreditasi, sehingga pendamping dapat menjalankan tugas pendampingannya ke masing-masing puskesmas dengan baik.

(3) *Workshop* Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas

Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas diselenggarakan dengan melaksanakan 3 (tiga) macam *workshop*.

Masing-masing *workshop* diikuti oleh Pendamping Terlatih Akreditasi FKTP Kabupaten Bantul, Penanggung Jawab Mutu Puskesmas dan Tim Terpadu Pembina Mutu FKTP Kabupaten Bantul. Dengan *workshop* ini, kompetensi pendamping terupdate sesuai dengan yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan.

(4) Survei Ulang Akreditasi Puskesmas

Survei ulang akreditasi puskesmas direncanakan dilaksanakan di 12 puskesmas. Namun, dengan terjadinya pandemic COVID-19, Survei Akreditasi ditiadakan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga sub kegiatan Survei Akreditasi tidak dilaksanakan.

Selain Puskesmas di Kabupaten Bantul juga terdapat beberapa Rumah Sakit milik pemerintah dan swasta serta klinik yang telah terakreditasi.

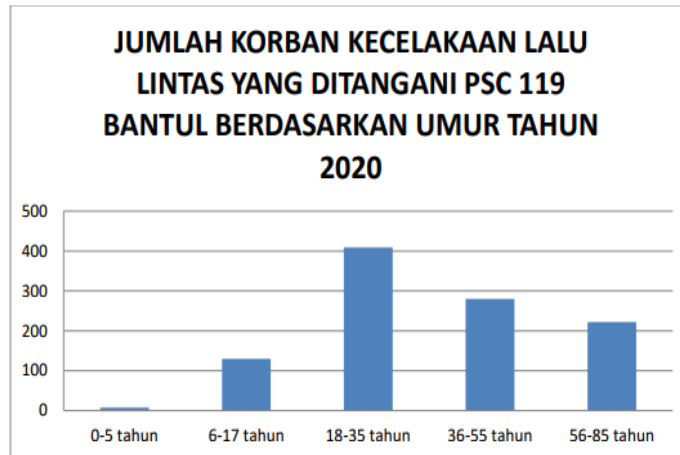
b) Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk Meningkatkan pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana. Kegiatan ini di dukung oleh pagu anggaran APBD sebesar Rp.398.066.500,-dengan capaian realisasi sebesar Rp385.146.00,-atau sebesar 96,75%. Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

(1) Belanja Sewa Alat Komunikasi

PSC 119 di bentuk pada tanggal 1 November 2018 oleh Pemerintah daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kesehatan, sebagai salah satu solusi penanganan kegawat daruratan medik di Kabupaten Bantul. PSC 119 adalah unit penanganan pertama kasus kegawatdaruratan sehari-hari di masyarakat yang diharapkan menjamin respon cepat dan tepat, menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan korban gawat darurat. Inti kegiatan PSC 119 adalah penyediaan call center menggunakan nomer 119 dan tim tenaga kesehatan yang selalu siap (tanpa ada hari libur). Operator call center merupakan tenaga kesehatan sehingga dapat memandu penanganan awal kasus sebelum tim tenaga kesehatan datang. Dalam menanggulangi Kegawatdaruratan medis di Kabupaten Bantul diperlukan sistem komunikasi yang terintegrasi, terpadu dan cepat, yaitu melalui call center 119 yang terintegrasi secara nasional di National command center (NCC) Kementerian Kesehatan. Tahun 2020 dilakukan kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan NCC dalam hal integrasi SPGDT call

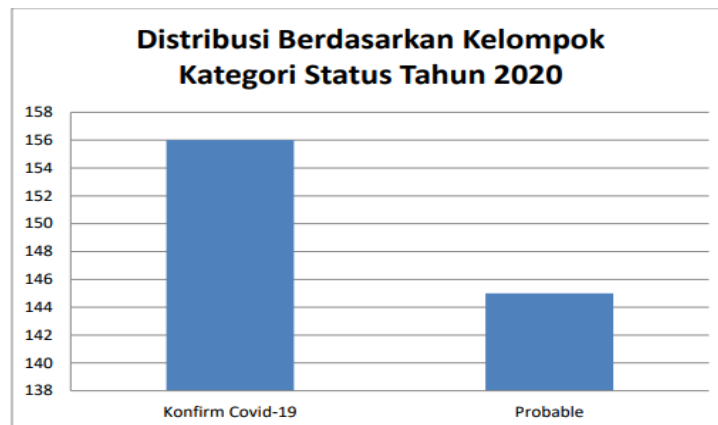
center untuk mendukung pelayanan di PSC 119. Dalam masa pandemi Covid-19, PSC 119 merupakan salah satu garda terdepan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Berikut hasil yang dicapai oleh PSC 119 selama tahun 2020:



Sumber: Dinas Kesehatan Kab Bantul 2020

Grafik 3. 6 Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Umur

Selama masa Pandemi Covid-19, PSC 119 juga melakukan pelayanan kepada pasien Covid-19 baik pasien suspect maupun pasien terkonfirmasi. Berikut kami sajikan data pasien Covid-19 yang ditangani PSC 119.



Sumber: Dinas Kesehatan Kab Bantul 2020

Grafik 3. 7 Pasien Covid-19 yang ditangani PSC 119

(2) Bimbingan teknis SPGDT

SPGDT adalah suatu Sistem Penanggulangan Pasien Gawat Darurat yang terdiri dari unsur, pelayanan pra rumah sakit, pelayanan di rumah sakit dan pelayanan antar rumah sakit. SPGDT harus berjalan terpadu, baik pra, intra, dan inter rumah sakit. SPGDT diperlukan untuk mengawal sistem rujukan. Menangani angka kejadian gawat darurat di masyarakat yang meningkat, dan mencegah kecacatan dan angka kematian di masyarakat. Dinas Kesehatan melakukan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan knowledge yang dilaksanakan untuk 27 Puskesmas di Kabupaten Bantul pada tanggal 28 Mei 2020 dan tanggal 14 Oktober 2020.

(3) Kesiapsiagaan Event tertentu

Selama Tahun 2020, pelayanan kesiapsiagaan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

c) Pembangunan dan pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan kesehatan

Kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk pengembangan data kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Kegiatan ini di dukung dengan pagu anggaran Rp44.235.500,- dengan capaian realisasi sebesar Rp44.198.000,- (99,92%). Pada tahun 2020 ada beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) untuk pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan. Sistem Informasi Kesehatan (SIK). SIK adalah kegiatan untuk menuju integrasi sistem informasi puskesmas, sehingga proses dan alur pelaporan secara berjenjang mulai

dari tingkat terbawah sampai ke pusat (Kementerian Kesehatan) akan dapat direalisasikan. Kementerian Kesehatan melalui Pusdatin juga sudah menyampaikan program Satu Data Kesehatan.

Pengembangan SIK berbasis komputerisasi telah dilakukan di semua Puskesmas, dilengkapi dengan perangkat keras berupa komputer *server*, komputer *client*, dan jaringan, serta perangkat lunak yang digunakan yaitu *Digital Government System (DGS)* di 27 Puskesmas. Beberapa Puskesmas juga mengembangkan anjungan pendaftaran mandiri, sehingga makin mempercepat antri pendaftaran pasien. Saat ini Laporan Bulanan (LB1) puskesmas mampu diakses melewati DGS secara *up to date* setiap harinya sehingga LB 1 tidak perlu dilaporkan manual ke Dinas Kesehatan oleh Puskesmas.

9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Tujuan dan maksud program ini adalah terlaksananya pembiayaan kesehatan masyarakat kurang mampu. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin ini didukung oleh anggaran APBD sebesar Rp35.035.515.371,- dengan realisasi sebesar Rp25.607.177.343,- (73,09 %). Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelayanan Jamkesda pada UPT JAMKESDA bertujuan untuk memenuhi hak setiap penduduk Kabupaten Bantul (masyarakat miskin) dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembayaran premi asuransi kesehatan bagi peserta JKN PBI APBD, pembayaran jaminan pemeliharaan kesehatan (pengganti pembayaran klaim dan pembayaran klaim PSC (*Public Safety Centre*), dan pembayaran klaim perawatan pengobatan pasien Covid 19. Dengan adanya pembayaran premi asuransi kesehatan bagi

peserta JKN PBI APBD merupakan salah satu wujud nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya menjamin semua warganya agar menjadi peserta jaminan kesehatan sehingga masyarakat Kabupaten Bantul dapat memenuhi kebutuhan kesehatannya. Permasalahan yang ada di tahun 2020 adalah :

- a) Penurunan cakupan UHC (*Universal Health Coverage*) di Kabupaten Bantul.
- b) Penonaktifan peserta JKN PBI APBN. Penonaktifan peserta JKN PBI APBD yang akan dilakukan pemindahan segmen PBI APBN.
- c) Kurang optimalnya pendataan penduduk miskin.

Solusi yang dilaksanakan untuk mengurangi permasalahan adalah koordinasi lintas sektor terkait dalam rangka peningkatan cakupan UHC terutama selain segmen PBI APBD dengan membantu pembiayaan kesehatan bagi peserta JKN PBI APBD yang dinonaktifkan.

Tabel 3. 9 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan

No.	Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan	2018	2019	2020
1.	Jaminan Kesehatan Nasional			
1.1.	Penerima Bantuan Iur (PBI) APBN	499.511	443.462	442.505
1.2	Penerima Bantuan Iur (PBI) APBD	61.280	46.674	50.887
1.3	Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah dan Badan Usaha	199.542	216.212	224.980
1.4	Bukan Pekerja	35.842	32.340	31.048
1.5	Mandiri/PBPU	87.849	88.543	88.688
	<i>Jumlah penduduk yang terdaftar JKN</i>	884.024	827.231	838.108
	<i>Total Jumlah penduduk Kab Bantul</i>	927.181	945.441	952.980
	<i>Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN</i>	43.157	118.210	114.872
	<i>Persentase</i>	95.35 %	87.50 %	87,95 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

10) Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

Maksud dan tujuan dari program ini adalah terpenuhinya sarana prasarana puskesmas sesuai standar. Program ini di dukung oleh pagu anggaran sebesar Rp5.676.408.000,- dengan realisasi Rp4.963.536.926,- (87,44%). Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

a) Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

Kegiatan ini di dukung dengan pagu anggaran APBD dan DAK sebesar Rp2.419.350.000,- dengan realisasi Rp2.334.249.378 (96,48%).

b) Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan

Kegiatan dengan pagu anggaran DAU dan DAK Rp1.046.842.000,- ini dilaksanakan pada tahun 2020. Capaian untuk kegiatan ini sebesar Rp908.355.230,- (86,77%). Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- (1) Pengadaan Electric Generating Set (genset) untuk Puskesmas Kretek
- (2) Rehab bangunan Puskesmas Kretek

c) Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya

Kegiatan ini di dukung dengan pagu anggaran dari dana DAK dan DAU sebesar Rp2.210.216.000,- Realisasi sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp1.720.932.318,- (77,86%) fokus kegiatan ini adalah Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas Srandakan dan Pandak II.

11) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan bertujuan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan memperluas mitra kerjasama untuk dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan, promosi kesehatan dan penanganan masalah kesehatandan didukung oleh anggaran APBD dan DAK sebesar Rp.244.436.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp242.454.206,- (99,19%). Anggaran tersebut untuk penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut:

a) Pendampingan Jamkesda

Kegiatan pendampingan Jamkesda didukung anggaran Rp137.562.500,- bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan program Jamkesda. Realisasi kegiatan sampai dengan triwulan IV 2020 sebesar Rp136.080.206,- (98,92%). Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah operasional UPTD Jamkesda, rapat koordinasi dengan lintas sektor dan pemberi pelayanan kesehatan.

b) Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

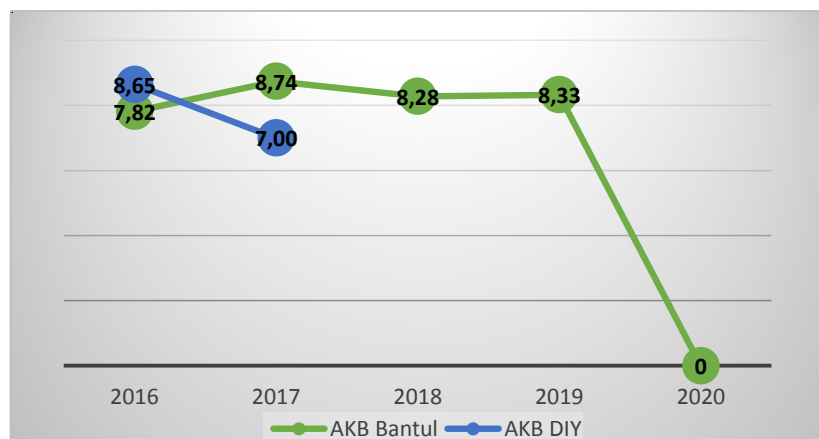
Kegiatan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan mempunyai maksud dan tujuan untuk peningkatan pelayanan mitra institusi didukung oleh dana APBD dan DAK sebesar Rp106.874.000,- dengan realisasi sebesar Rp106.374.000,- (99,53%).

12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) serta pelayanan dan penyuluhan kesehatan anak Balita. Program ini didukung pagu anggaran APBD sebesar Rp9.950.000,- Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah kegiatanPelayanan

kesehatan anak dan Balita. Pada tahun 2020 realisasi kegiatan Pelayanan kesehatan anak dan Balita adalah sebesar Rp8.950.000,-, atau sebesar 89,95%. Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan kapasitas petugas KIA (puskesmas pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) dan Pelayanan Kekerasan terhadap perempuan dan Anak (KtPA) . Pada tahun 2020 jumlah absolut kematian bayi sebesar 88 kasus menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 109 kasus. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2020 sebesar 6,93% terjadi penurunan dibanding tahun 2019 sebesar 8,33 per 1.000 kelahiran hidup, lebih rendah dari target renstra sebesar 8,2 per 1.000 kelahiran.

Keterpaduan program perbaikan gizi meliputi peningkatan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif bagi bayi sampai umur enam bulan dan pemberian PMT bagi Balita gizi buruk. Berbagai kegiatan diupayakan untuk meningkatkan capaian ASI eksklusif diantaranya dengan Kelas Ibu Hamil, pengaktifan KP Ibu. Kelas ibu hamil maupun KP-Ibu bertujuan untuk memotivasi ibu hamil dalam melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada saat melahirkan sehingga mendorong peningkatan pemberian ASI eksklusif.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2020

Grafik 3. 8 Angka Kematian Bayi Di Kab. Bantul Dan DIY Tahun 2016-2020

13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Maksud dan tujuan dari program ini adalah Meningkatkan kesehatan Lanjut Usia. Program ini didukung pagu anggaran APBD sebesar Rp25.950.000,-. Realisasi kegiatan sampai dengan triwulan IV 2020 adalah sebesar Rp25.950.000,- atau sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan mempunyai maksud dan tujuan meningkatkan Pelayanan Kesehatan Lansia. Sub kegiatan yang dilaksanakan mempunyai tujuan untuk mendukung pemenuhan standar pelayanan kesehatan lansia sesuai standar (SPM) yang meliputi rapat koordinasi lansia dan Workshop lansia.

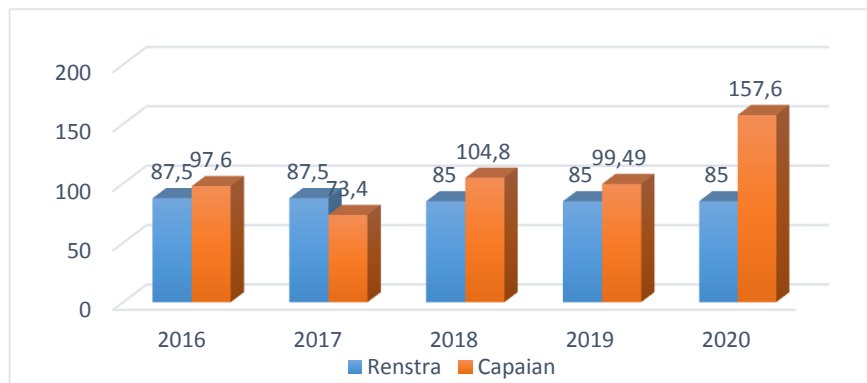
14) Program Peningkatan dan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program ini mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang didukung anggaran sebesar Rp4.963.663.000,- yang terdiri dari DAK dan APBD Realisasi Keuangan sampai dengan Desember 2020 adalah sebesar Rp4.491.703.369,- atau sebesar (90,49%).

Program Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Jampersal diperuntukkan bagi seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan.

Capaian angka kematian ibu pada tahun 2020 sebesar 157,6 per 100.000 kelahiran hidup (20 kasus kematian ibu), melampaui target kematian ibu 85 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi kenaikan. Pada tahun 2019 AKI di Kabupaten Bantul sebanyak 13 orang atau 99,49 per

100.000 kelahiran hidup. Kecenderungan AKI pada lima tahun terakhir disajikan pada grafik berikut :



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Grafik 3. 9 Angka Kematian Ibu dan Target Renstra

Kegiatan yang dilakukan karena adanya kejadian kematian ibu adalah Audit Maternal Perinatal (AMP). AMP dilakukan pada semua kasus kematian ibu untuk mengkaji hal – hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi sejak ibu masih hamil, penatalaksanaan persalinan dan masa nifas serta kronologis kasus sampai terjadinya kematian. Setelah dilakukan kegiatan tersebut dapat dipetakan penyebab kematian ibu di Kabupaten Bantul yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 10 Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bantul
Tahun 2016 – 2020

No	Penyebab Kematian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perdarahan	2	2	5	4	1
2	PER/PEB/Eklampsi	4	2	2	4	5
3	Emboli air ketuban	0	0	0	-	0
4	Infeksi/sepsis	2	2	0	-	3
5	Lain2/Penyakit penyerta	2	2	7	2	0
6	Penyakit Jantung	0	0	0	2	5
7	Psikosis post partum dengan acute coronary syndrome	2	1	0	-	0

No	Penyebab Kematian	2016	2017	2018	2019	2020
8	Ileus paralitik	0	0	0	1	0
9	Kanker	0	0	0	0	2
10	Syok septik/Hypovolemik	0	0	0	0	2
11	Covid-19	0	0	0	0	2
	Jumlah	12	9	14	13	20

Sumber: Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Penyebab kematian ibu di kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 yang tinggi adalah perdarahan (20,58%), PEB/Eklamsi (25%), Infeksi/Sepsis (10,29%), Lain-lain Penyakit penyerta (19,11%), Ileus paralitik (1,47%), Kanker (2,94%), Syok Septik/Hypovolemik (2,94%), Covid-19 (2,94%).

Capaian indikator proses dalam program ini antara lain:

- a) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 86,44% yaitu sebanyak 12.088 ibu hamil melakukan kunjungan minimal empat kali ke pelayanan kesehatan dan mendapat pelayanan sesuai standar dari seluruh sasaran yang ada sejumlah 13.985 ibu hamil;
- b) Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 99,98% yaitu sejumlah 12.705 ibu dari seluruh persalinan tahun 2019 sebanyak 12.708 ibu bersalin;
- c) Cakupan pelayanan ibu nifas sebesar 99,91% yaitu 12.697 dari sasaran ibu nifas sebanyak 12.708 ibu bersalin;

15) Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa

Program ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mencegah dan mengendalikan kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular serta mencegah dan mengendalikan masalah kesehatan jiwa. Program ini didukung anggaran sebesar Rp204.308.000,-. Realisasi yang di capai pada tahun 2020 adalah sebesar Rp186.830.000,- atau sebesar 89,82%.

c. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan dan solusi terkait dengan pelaksanaan program dalam urusan kesehatan disajikan pada Tabel berikut

Tabel 3. 11 Permasalahan Dan Solusi Dalam Urusan Kesehatan

No.	Permasalahan	Solusi
1	Munculnya Pandemi Covid 19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan melalui media leaflet, baliho, spanduk, media elektronik 2. Skrining rapid di lokasi pasar, populasi pelaku perjalanan, tenaga kesehatan, petugas yang melayani masyarakat. 3. Skrining swab / RT-PCR secara langsung pada karyawan di puskesmas, RS dan Dinas Kesehatan, serta swab massal pada populasi beresiko (pelaku perjalanan dan kontak erat pasien positif) yang dijanging melalui aplikasi 4. Penguatan Laboratorium untuk COVID : yaitu E. Clia dan Skrining RDT dan Mobile PCR 5. Desinfektan di lingkungan rumah penderita confirm positif oleh petugas BPBD, PMI dan FPRB 6. Penegakaan disiplin protokol kesehatan di masyarakat oleh satgas penegkan hukum 7. Sosialisasi protokol kesehatan kepada instusi perguruan tinggi dan pengelola pondok pesantren 8. Rujukan pasien dari rumah domisili ke RS oleh PSC 119 9. Isolasi pasien terkonfirmasi/positip di shelter 10. Pemulasaran jenazah terduga COVID dan jenazah COVID sesuai dengan protokol COVID oleh RS 11. Pendirian Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid.
2	Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Masih di atas target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan / <i>update knowledge</i> EKG untuk dokter (sudah dilaksanakan) baru 1 dokter per puskesmas 2. Pemeriksaan EKG untuk ibu hamil DIWAJIBKAN minimal 1 kali atau sesuai indikasi 3. Pendampingan puskesmas oleh SpOG sesuai regio puskesmas 4. Pengadaan USG untuk Puskesmas 5. Rujukan ibu hamil ke Puskesmas yang mempunyai USG (rujukan horizontal), pembiayaan direncanakan oleh Jamkesda sesuai Perda yang baru 6. Binwasdal praktik PMB oleh Dinkes dioptimalkan, gunakan SPO dan check list

No.	Permasalahan	Solusi
		<p>binwasdal yang telah disusun, SPO punishment nakes yang bermasalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Pembinaan PMB dan nakes agar kejadian kematian ibu tidak berulang 8. Penyusunan SOP pemantauan bumil berisiko 9. Penyusunan SOP pendampingan rujukan (follow up) 10. Kepastian pembiayaan bumil, koordinasi pembiayaan oleh Jampersal, Jamkesda, RS dan BPJS kesehatan
2.	Angka kesakitan DBD masih tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengendalian bekerjasama dengan Yayasan Tahija dalam Eliminate Dengue Project (EDP), yaitu dengan melepas nyamuk Wolbacia 2. Kewaspadaan Dengue 3. Peningkatan penyuluhan oleh petugas DBD 4. Pemberdayaan kader-kader dusun, remaja dan siswa SD untuk PSN 5. Melakukan dan koordinasi di tingkat kecamatan 6. Melaksanakan foging sesuai Standar Prosedur yang telah ditetapkan. 7. Pelaksanaan pelayanan deteksi dini DB di puskesmas pada semua kasus demam yang sudah ≥ 2 hari, dengan cara pemeriksaan menggunakan antigen dengue 8. Promosi kesehatan tentang kewaspadaan DB melalui media elektronik. 9. Pembagian Larvasida di wilayah endemik pada saat PE 10. KIE dan kerjasama Lintas program dan lintas sektor 11. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui gertak PSN
4	Peningkatan Kasus Penyakit Tidak Menular dan ODGJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skrining faktor risiko penyakit tidak menular pada OPD di Kab Bantul 2. Skrining kepada masyarakat umum yang dilakukan puskesmas 3. Deteksi dini pada penderita retardasi mental 4. Pengobatan dan pemantaun 5. keteraturan minum obat.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program dan kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
- b) Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
- c) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
- b) Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor ;
- c) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- d) Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- a) Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan;
- b) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan;

4) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

- a) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat;

5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

- a) Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- b) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- c) Kegiatan Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

6) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

- a) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku;

7) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

- a) Kegiatan Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya;
- b) Kegiatan Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air;

8) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

- a) Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah
- b) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah

9) Program Pengendalian Banjir

- a) Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai

10) Program Pembangunan Gedung

- a) Kegiatan Pembangunan Gedung

11) Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- a) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- b) Kegiatan Peningkatan jalan

12) Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan

- a) Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong

13) Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

- a) Kegiatan Pembangunan infrastruktur perdesaan

14) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- a) Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi
- b) Kegiatan Peningkatan Teknologi Informasi

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Maksud program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan, sedangkan tujuannya adalah untuk rehabilitasi dan pemeliharaan alat berat dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan.

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dilaksanakan melalui Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat dengan output berupa operasional dan pemeliharaan alat besar sebanyak 16 unit. Data alat besar seperti pada Tabel ...

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp293.696.000,- terealisasi sebesar Rp292.323.500,- atau tercapai 99,53% dengan efisiensi sebesar Rp1.372.500,-.

2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Maksud program ini adalah untuk melakukan optimalisasi fungsi saluran irigasi agar dapat bermanfaat dalam penyediaan air irigasi, sedangkan tujuannya adalah untuk merencanakan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan dan peningkatan jaringan irigasi. Anggaran program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya sebesar Rp9.687.210,- dengan realisasi Rp8.412.225.826,- atau 86,84%

Program ini mendukung dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu kecukupan air irigasi.

Target kondisi luas sawah DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik sebesar 82,66% (7.136,86Ha) dan terealisasi sebesar 80,01% (6.908,06Ha) atau tercapai sebesar 96,79%. Data target dan capaian DI kewenangan

Kabupaten Bantul yang terlayani air irigasi selama empat tahun terakhir dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3. 12 Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2016-2020

Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
	Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
2016	6.820,86	79,00	7.004,00	81,12
2017	6.907,20	80,00	7.007,35	81,16
2018	7.050,52	81,16	6.945,19	80,44
2019	7.093,69	82,16	7.096,28	82,19
2020	7.136,86	82,66	6.908,06	80,01

Sumber: DPUPKP, 2020

Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan :

a) Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pengembangan dan perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp433.255.000,- terealisasi sebesar Rp390.319.000,- atau tercapai 90,09% dengan efisiensi sebesar Rp42.936.000,

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Penyusunan DED Talang DI Tegal Kiri di Sungai Oyo
- (2) Penyusunan Indek Kinerja Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul
- (3) Pengelolaan Aset Irigasi tahap II di Kabupaten Bantul
- (4) Pembuatan Pemetaan Daerah Rawan Banjir Kabupaten Bantul
- (5) Update data daerah irigasi Kabupaten Bantul pada aplikasi ePaksi
- (6) Kajian Analisis Standar Harga Konstruksi Bidang Sumber Daya Air

b) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp8.899.495.000,- terealisasi sebesar Rp7.674.614.726,- atau tercapai 86,24% dengan efisiensi sebesar Rp1.224.880.274,-

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Peningkatan/rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) :

(a) Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) sebanyak 6 DI (DI. Karang, DI. Klegen, DI. Pacar, DI. Jotawang Kanan, DI. Sumberan dan DI. Balong).

(b) Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada 6 Daerah Irigasi melalui sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) (DI. Tegal, DI. Mojo, DI. Sambeng, DI. Pranti II, DI. Sorogenen, DI. Titang)

(c) Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada 6 DI yaitu DI. Karangjati, DI Wonosari, DI. Ngaglik, DI. Ngreboh, DI. Talok, dan DI. Colo



Foto 0% Rehabilitasi Jaringan Irigasi
DI Tegal



Foto 100% Rehabilitasi Jaringan Irigasi
DI Tegal

- (2) Rehabilitasi dan Pembangunan Bangunan Pelengkap Irigasi Bangunan Ukur dan Pielschale di DI. Pacar Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu
- (3) Rehabilitasi Gorong-Gorong pada lokasi:
 - (a) Gorong-Gorong Kali Putih, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon
 - (b) Gorong-Gorong DI. Jotawang, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon
 - (c) Gorong-Gorong Jetis Tempel, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro
 - (d) Gorong-Gorong DI. Kepuh Kulon, Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan
- (4) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pintu Air pada lokasi:
 - (a) Pintu Bagi Afvour Buntung Kanan
 - (b) Pintu Penguras Bendung Kemiri
 - (c) Pintu Intake Bendung Kemiri
 - (d) Pintu Intake Bendung Timbulsari
 - (e) Pintu Intake Bendung Bibis Donoloyo
 - (f) Pintu Intake Bendung Sindet
 - (g) Pintu Penguras Bendung Ketonggo Bibis
 - (h) Pintu Penguras Bendung Sikluwih no. 2
 - (i) Pintu Penguras Bendung Sikluwih No. 6
 - (j) Pintu Penguras Bendung Pranti II
- (5) Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi seperti pada tabel berikut :

Tabel 3. 13 Lokasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 2020

No	Kapanewon	Lokasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1	Pundong	Daerah Irigasi Klegen Kal. Panjangrejo, Daerah Irigasi Tegal Kal. Panjangrejo
2	Bambanglipuro	Daerah Irigasi Mejing Kal. Sumbermulyo
3	Pandak	Daerah Irigasi Ewon Kal. Gilangharjo, Daerah Irigasi Kadisono Kal. Gilangharjo
4	Pajangan	Daerah Irigasi Widodo Kal. Triwidadi
5	Bantul	Daerah Irigasi Merdiko Kal. Bantul
6	Dlingo	Daerah Irigasi Sambeng Kal. Jatimulyo
7	Banguntapan	Daerah Irigasi Donoloyo Kal. Tamanan
8	Piyungan	Daerah Irigasi Kertopaten Kal. Baturetno
9	Sewon	Daerah Irigasi Timbulsari Kal. Timbulharjo, Daerah Irigasi Kemiri Kal. Timbulharjo Daerah Irigasi Miri Kal. Panggunharjo
10	Kasih	Daerah Irigasi Bayem Kal. Ngestiharjo

Sumber: DPUPKP, 2020

c) Kegiatan Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya pada UPTD Pengamatan Pengairan Bedog dan Winongo Kecil, Opak Oyo, dan Winongo. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp354.460.000,- terealisasi sebesar Rp347.292.100,- atau tercapai 97,98% dengan efisiensi sebesar Rp7.167.900,-

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan saluran irigasi berupa gali sedimen, pembersihan rumput dan tanaman liar pada saluran irigasi.
- (2) Pengelolaan bendung untuk penyediaan air irigasi bagi petani dilakukan pada 100 Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Bantul .
- (3) Pengelolaan dan kesiapsiagaan bendung air pada musim hujan pada :
 - (a) Bendung Klegen
 - (b) Bendung Mejing
 - (c) Bendung Ketonggo Bibis

3) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk menyediakan dan mengelola sumber air baku bagi masyarakat. Adapun tujuan program adalah melakukan pemeliharaan terhadap prasarana air baku berupa sumur bor. Anggaran program ini Rp55.125.000,- terealisasi sebesar Rp50.657.000,- atau tercapai 91,89%.

a) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku.

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pemeliharaan prasarana penyediaan air baku yaitu pemeliharaan sumur bor Kal. Jatimulyo dan Kal. Terong, Kapanewon Dlingo. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp55.125.000,- terealisasi sebesar Rp50.657.000,- atau tercapai 91,89% dengan efisiensi sebesar Rp4.468.000,-

4) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Maksud program ini adalah untuk melakukan pengembangan, pengelolaan dan konservasi sumber daya air, sedangkan tujuan dari program ini adalah untuk melakukan pemeliharaan bangunan penampung air serta melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber day air. Anggaran program ini sebesar Rp1.071.455.000,- terealisasi sebesar Rp1.047.505.500,- atau tercapai 97,76%.

Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan :

a) Kegiatan Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pembangunan, rehabilitasi dan/atau pemeliharaan embung dan bak penampung air lainnya. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.037.825.000,- terealisasi sebesar Rp1.015.097.500,- atau tercapai 97,81% dengan efisiensi sebesar Rp22.727.500,-

b) Kegiatan Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp33.630.000,- terealisasi sebesar Rp32.408.000,- atau tercapai 96,37%.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air dengan output kegiatan berupa pengadaan dan pemasangan rambu larangan sebanyak 28 unit, dengan rincian lokasi seperti pada Tabel ..

Tabel 3. 14 Lokasi Pemasangan Papan Larangan Tahun 2020

No	Kapanewon	Lokasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1	Kretek	Dusun Gadingharjo dan Tegalsari, Kal. Donotirto
2	Pundong	Dusun Klegen, Kal. Panjangrejo 2 lokasi di Dusun Piring, Dusun Klisat Kal. Srihardono
3	Bambanglipuro	Dusun Mejing, Kal. Mulyodadi
4	Pandak	Dusun Banyudono dan Bajang, Kal. Gilangharjo Kal. Wijirejo
5	Bantul	Kal. Ringinharjo Dusun Code, Kal. Sabdodadi
6	Jetis	Dusun Bakulan Wetan dan Sulang Kidul Kal. Patalan Dusun Gaten, Kal. Canden
7	Pleret	Dusun Karangnom dan Jati, Kal. Wonokromo
8	Piyungan	Dusun Nganyang, Kal. Sitimulyo
9	Banguntapan	Dusun Glondong, Kal. Wiroketen
10	Sewon	2 lokasi di Dusun Gatak, Kal. Timbulharjo Dusun Geneng, Kal. Panggunharjo Dusun Semail, Kal. Bangunharjo
11	Kasih	Dusun Gedongan, Bangunjiwo Dusun Sonosewu, Cobongan, Cungkuk dan Sonopakis Kidul Kal. Ngestiharjo

Sumber: DPUPKP, 2020

5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Maksud ini adalah untuk optimalisasi kinerja dalam penyelenggaraan dan pengelolaan air minum dan air limbah. Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan dan memperluas cakupan pelayanan air bersih, air limbah, dan drainase sehingga dapat menanggulangi kerawanan air, pencemaran lingkungan dan genangan air hujan. Anggaran program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah sebesar Rp15.900.248.000,- dengan realisasi Rp15.457.148.750,- atau 98,24% dengan efisiensi sebesar Rp443.099.250,-

Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan :

a) Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp7.982.890.000,- terealisasi sebesar Rp7.842.543.300,- atau tercapai 98,24% dengan efisiensi sebesar Rp140.346.700,-.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah penyediaan prasarana pengelolaan air limbah dan drainase dengan output kegiatan berupa :

- (a) Pembangunan IPAL Komunal pada 6 lokasi yaitu di Kal. Trimurti Kapanewon Srandakan, Kal. Sumber Agung Kapanewon Jetis, Kal. Wukirsari Kapanewon Imogiri, Kal. Wonokromo Kapanewon Pleret, Kal. Tamanan Kapanewon Banguntapan, dan Kal. Panggungharjo Kapanewon Sewon



Gambar 3. 1 Pembangunan IPAL Komunal di Kal. Tamanan

(b) Pembangunan saluran drainase/air hujan di 22 lokasi tersebar di Kabupaten Bantul seperti pada Tabel berikut ini :

Tabel 3. 15 Lokasi Pembangunan saluran drainase/air hujan Tahun 2020

No	Kapanewon	Volume Kegiatan	Keterangan
1	Banguntapan	3 Lokasi	Drainase Sarirejo 2 Banguntapan, Drainase dan Paving Tegalkopen RT 20 Wonocatur Banguntapan, Drainase Jambidan Banguntapan
2	Sedayu	1 Lokasi	Drainase Argodadi Sedayu
3	Kasih	5 Lokasi	Drainase Ngestiharjo Kasihan, Drainase Tamantirto, Drainase Jetis RT 3 Tamantirto Kasihan, Drainase Janten Ngestiharjo Kasihan, Drainase Cebongan Kadipiro Pedukuhan 5
4	Sanden	2 Lokasi	Drainase Murtigading, Drainase Srigading Sanden
5	Srandakan	2 Lokasi	Drainase Poncosari, Bangket & Drainase Ds Sawahan Trimurti Srandakan
6	Imogiri	2 Lokasi	Drainase Imogiri, Drainase Wukirsari Imogiri
7	Kretek	2 Lokasi	Drainase Tirtosari Kretek, Drainase Donotirto Kretek

No	Kapanewon	Volume Kegiatan	Keterangan
8	Piyungan	1 Lokasi	Drainase Monggang Sitimulyo
9	Sewon	2 Lokasi	Drainase Dusun Sudimoro RT 02 Timbulharjo, Drainase / Bangket jl Ds Bakung RT 01 Bangunharjo
10	Pleret	1 Lokasi	Drainase Pleret
11	Bantul	1 Lokasi	Drainase Bantul, Bantul

Sumber: DPUPKP, 2020

(c) Operasi dan pemeliharaan saluran drainase dengan lokasi seperti pada tabel berikut :

Tabel 3. 16 Lokasi Pemeliharaan Saluran Drainase Tahun 2020

No	Kapanewon	Volume Pekerjaan (m)	Keterangan
1	Bantul	530	Komplek Perkantoran Manding; Puskesmas Bantul II; Lapangan Paseban; Simpang lima Bejen
2	Sanden	150	Dusun Piring, Murtigading; Kecamatan Sanden
3	Jetis	300	Perempatan Kecamatan Jetis; Dusun Paker, Patalan
4	Pleret	370	Segoroyoso, Pleret; Komplek Pasar Pleret
5	Kasih	200	Dusun Karangjati, Bangunjiwo, Kasihan; Dusun Kembaran, Ngestiharjo
6	Imogiri	80	Pasar Imogiri baru
7	Srandakan	250	Lapangan Trimurti
8	Banguntapan	50	Kecamatan Banguntapan
Total		1.940	

Sumber: DPUPKP, 2020

b) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan penyediaan, peningkatan dan perluasan sarana dan prasarana air minum

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp7.917.358.000,- terealisasi sebesar Rp7.614.605.450,- atau tercapai 96,18% dengan efisiensi sebesar Rp302.752.550,-

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Peningkatan dan Perluasan SPAM Perdesaan melalui dana DAK yaitu meliputi Peningkatan SPAM Seloharjo, Peningkatan SPAM Mangunan, Peningkatan SPAM Srimulyo, Perluasan SPAM Girirejo.
- (2) Peningkatan dan Perluasan SPAM Perkotaan melalui dana DAK yaitu meliputi Perluasan SPAM Banguntapan, Perluasan SPAM Bangunharjo, Perluasan SPAM Tamantirto, Perluasan SPAM Ngestiharjo dan Perluasan SPAM Argomulyo.



Gambar 3. 2 Peningkatan SPAM Argomulyo

6) Program Pengendalian Banjir

Program pengendalian banjir mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Indikator kinerja dari program ini adalah cakupan lokasi penanganan banjir baik dari sungai maupun afvour akibat curah hujan yang tinggi. Anggaran program

Pengendalian Banjir sebesar Rp7.836.875.000,- dengan realisasi Rp7.622.246.497,- atau tercapai 97,26% dengan efisiensi sebesar Rp214.628.503,-

Realisasi penanganan lokasi banjir pada Tahun ini meliputi 39 lokasi.

Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai.

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp7.836.875.000,- dengan realisasi Rp7.622.246.497,- atau tercapai 97,26% dengan efisiensi sebesar Rp214.628.503,-

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pembangunan atau perkuatan tebing sungai dan peningkatan afvour dengan output kegiatan berupa :

- a) Perkuatan tebing sungai sebanyak 6 paket yaitu :
 - (1) Tebing Sungai Widuri, Kal. Ngestiharjo Kapanewon Kasihan
 - (2) Tebing Sungai Kontheng, Kal. Argorejo Kapanewon Sedayu
 - (3) Tebing Sungai Celeng, Kal. Wukirsari Kapanewon Imogiri
 - (4) Tebing Sungai Pesing, Kal. Bawuran Kapanewon Pleret
 - (5) Tebing Sungai Krinjing, Kal. Selopamioro Kapanewon Imogiri dan
 - (6) Tebing Sungai Winongo Kal. Panggungharjo Kapanewon Sewon

- b) Peningkatan afvour sebanyak 33 paket pekerjaan seperti pada Tabel berikut :

Tabel 3. 17 Lokasi Peningkatan Afvour Tahun 2020

No	Kapanewon	Lokasi Peningkatan Afvour
1	Kretek	Afvour Sital Afvour Blantik Afvour Blado
2	Pundong	Afvour Tangkil Afvour Jetis Panjangrejo Afvour Dempet Afvour Bobok Tempel
3	Bambanglipuro	Afvour Cangkring Afvour Kedungpring Afvour Plumutan Afvour Kembangan
4	Pajangan	Afvour Dukuh Guwosari
5	Bantul	Afvour Bogoran Afvour Sutran Sabdodadi
6	Jetis	Afvour Jetis Patalan
7	Imogiri	Afvour Nogosari 1 Wukirsari Afvour Karangkulon
8	Banguntapan	Afvour Tamanan Afvour Kepuh Wetan Afvour Nitiprayan Afvour Glagah Tamanan
9	Pleret	Afvour Pungkuran Pleret
10	Piyungan	Afvour Kabrekan Srimulyo Afvour Bebekan Srimulyo
11	Sewon	Afvour Prancak Afvour Ngimbang Afvour Bangeran Afvour Ngasem Afvour Sorogenen Timbulharjo Afvour Kagrokan Afvour Mredo Afvour Mrisi Afvour Ngireng - Ireng

Sumber: DPUPKP, 2020

7) Program Pembangunan Gedung

Maksud program ini adalah untuk meningkatkan kualitas gedung pemerintah dalam upaya mendukung pelayanan prima kepada masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah untuk

melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung pemerintah di Kabupaten Bantul. Anggaran program Pembangunan Gedung sebesar Rp3.238.900.000,- terealisasi sebesar Rp3.042.859.800,- atau tercapai 93,95%.

Kinerja yang dicapai pada program ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Target berupa kondisi gedung pemerintah dalam kondisi baik sebesar 84%, terealisasi sebesar 84%, atau tercapai 100%. Dari 53 (lima puluh tiga) gedung kantor OPD di Kabupaten Bantul sebagai sasaran indikator terdapat 9 (sembilan) gedung dengan kondisi sedang dan 44 (empat puluh empat) atau 84% gedung kantor dengan kondisi baik.

a) Kegiatan Pembangunan Gedung

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung pemerintah. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp3.238.900.000,- terealisasi sebesar Rp3.042.859.800,- atau tercapai 93,95% dengan efisiensi sebesar Rp196.040.200,-

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan dan rehabilitasi gedung dan fasilitas umum lainnya dengan output kegiatan berupa :

- (1) Pembangunan Ruang Pertemuan Dinas Kebudayaan
- (2) Rehabilitasi Kantor UPTD KP2 (DPTR Lama)
- (3) Pemeliharaan atap PTS III
- (4) Rehab Kantor DPUPKP

Dalam rangka penanganan Covid-19, DPUPKP melalui dana Biaya tak Terduga (BTT) melaksanakan beberapa pembangunan infrastruktur untuk menunjang penanganan Covid-19. Data pelaksanaan kegiatan bersumber dana BTT seperti pada tabel berikut :

Tabel 3. 18 Data Pelaksanaan Pekerjaan Bersumber dana Biaya tak Terduga

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Setor Kembali (Rp)
1	Rehabilitasi Puskesmas Bambanglipuro menjadi Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid-19 dan Rehabilitasi Rumah Dinas BLK	199,785,000	196,384,000	3,401,000
2	Penyempurnaan infrastruktur TPU meliputi pelebaran jalan lingkungan, talud, liang lahat dan kelengkapan TPU Imogiri	197,962,000	194,906,000	3,056,000
3	Operasional pemakaman jenazah Covid-19 di TPU Imogiri			
a	Honorarium Petugas Pemakaman	9,600,000	-	9,600,000
b	Extra Fooding Pemakaman	2,720,000	-	2,720,000
c	BBM	1,000,000	-	1,000,000
4	Rehabilitasi Puskesmas Bambanglipuro menjadi Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid-19 (Tahap II)	121,977,000	119,779,000	2,198,000
Jumlah		533,044,000	511,069,000	21,975,000

8) Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Maksud program ini adalah untuk melakukan optimalisasi penyelenggaraan jalan dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) jalan kabupaten dalam kondisi mantap. Adapun tujuan dari program ini adalah untuk melakukan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta peningkatan jalan. Pagu anggaran program ini sebesar Rp25.546.023.978,- terealisasi sebesar Rp20.801.775.843,- atau tercapai 81,43% dengan efisiensi sebesar Rp4.744.248.135,-

Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan :

a) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp3.846.720.000,- terealisasi sebesar Rp3.799.500.450,- atau tercapai 98,77% dengan efisiensi sebesar Rp47.219.550,-

b) Kegiatan Peningkatan jalan

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan peningkatan jalan / rehabilitasi jalan / pemeliharaan berkala jalan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp21.699.303.978,- terealisasi sebesar Rp17.002.275.393,- atau tercapai 78,35% dengan efisiensi sebesar Rp4.697.028.585,-

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- a) Proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Cinomati.

Pada tahun 2020 ini, proses pengadaan tanah sudah sampai pada tahapan pelaksanaan pengadaan tanah Cinomati oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Yogyakarta berdasarkan Ijin Penetapan Lokasi yang telah terbit melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 345/KEP/20219 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Cinomati di Kabupaten Bantul.

b) Peningkatan jalan kabupaten sebanyak 19 ruas

Program ini mendukung dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yaitu Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 75,58%, realisasi sebesar 75,42%, tercapai 99,78% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Data kondisi jalan kabupaten beraspal pada tahun 2020 sepanjang 471km atau 75,42% berada dalam kondisi mantap, sedangkan 153,47km atau 24,58% dalam kondisi belum mantap dari panjang total panjang jalan kabupaten sepanjang 624,47km.

9) Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong

Maksud program ini adalah untuk melakukan optimalisasi penyelenggaraan dan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan drainase dan gorong-gorong. Sedangkan tujuannya adalah untuk melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan drainase dan gorong-gorong Anggaran program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong sebesar sebesar Rp4.181.050.000,- terealisasi sebesar Rp4.107.190.950,- atau tercapai 98,23%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan drainase dan gorong-gorong.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp4.181.050.000,- terealisasi sebesar Rp4.107.190.950,- atau tercapai 98,23% dengan efisiensi sebesar Rp73.859.050,-

10) Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

Maksud dari program ini adalah untuk melakukan optimalisasi penyelenggaraan dan pembangunan rehabilitasi, pemeliharaan infrastruktur jalan desa. Sedangkan tujuannya adalah untuk melakukan pembangunan infrastruktur perdesaan khususnya jalan desa. Anggaran program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan sebesar Rp10.311.740.000,- terealisasi sebesar Rp10.190.126.700,- atau tercapai 98,82%.

a) Kegiatan Pembangunan infrastruktur perdesaan

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pembangunan dan rehabilitasi jalan desa. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp10.311.740.000,- terealisasi sebesar Rp10.190.126.700,- atau tercapai 98,82% dengan efisiensi sebesar Rp121.613.300,-

11) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Maksud program ini adalah untuk meningkatkan kompetensi usaha jasa konstruksi sedangkan tujuannya adalah untuk melakukan pengembangan usaha jasa konstruksi dan peningkatan teknologi informasi. Anggaran program Pengembangan Jasa Konstruksi sebesar Rp684.277.500,- dengan realisasi Rp566.356.500,- atau 82,77%

Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan :

a) Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan peningkatan kompetensi tukang serta usaha jasa konstruksi lainnya.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp562.027.500,- terealisasi sebesar Rp444.776.500,- atau tercapai 79,14%.

b) Kegiatan Peningkatan Teknologi Informasi

Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan teknologi informasi. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp122.250.000,- terealisasi sebesar Rp121.580.000,- atau tercapai 99,45%.

c. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan dan solusi terkait dengan pelaksanaan program dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang disajikan pada Tabel berikut

Tabel 3. 19 Permasalahan Dan Solusi dalam Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Semakin besarnya potensi kerusakan jalan kabupaten, akibat banyaknya kendaraan tonase besar yang melewati jalan kabupaten	Peningkatan struktur jalan pada jalur yang dilalui angkutan penambangan galian C.
2	Belum optimalnya sarana dan prasarana air bersih	Mengoptimalkan sarana dan prasarana air bersih
3	Rendahnya cakupan akses sanitasi layak	Meningkatkan cakupan layanan sanitasi layak
4	Kondisi Bangunan Gedung Pemerintah belum 100% baik	Merehabilitasi bangunan gedung Pemerintah
5	Belum optimal koordinasi bidang air bersih	Peningkatan koordinasi bidang air bersih
6	Kendala teknis pelaksanaan pembangunan prasarana air bersih seperti pembangunan sumur bor dan dan jaringan perpipaan	Perlunya dilakukan kajian atau studi ketersediaan air dan koordinasi lintas sektor
7	Pelaksanaan kegiatan yang menumpulkan massa seperti pelatihan, sosialisasi, FGD terkendala Covid-19 .	Pembatasan peserta kegiatan dan penerapan protokol kesehatan

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a. Program dan kegiatan

1) Program Pengembangan Perumahan

- a) Kegiatan Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan;
- b) Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan perumahan;
- c) Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
- d) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

2) Program Lingkungan Sehat Perumahan

- a) Penanganan Kawasan Kumuh;

3) Program pengelolaan areal pemakaman

- a) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman;

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan perumahan dan pemukiman rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Perumahan

Maksud program ini adalah untuk melakukan optimalisasi penyelenggaraan perumahan di Kabupaten Bantul. Sedangkan tujuannya adalah untuk melakukan penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan, pengembangan perumahan, fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat. Anggaran Program Pengembangan Perumahan adalah sebesar Rp4.039.249.022,- dengan realisasi sebesar Rp3.945.725.822,- atau tercapai sebesar 97,68%

Indikator kinerja program ini adalah Persentase penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH). Dari 52% target yang ditetapkan pada tahun 2020 tercapai 100% atau 192,31% dari target atau 5.703 unit.

Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan :

a) Kegiatan Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan;

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan penyusunan kebijakan program perumahan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp207.380.000,- terealisasi sebesar Rp206.025.000,- atau tercapai 99,35%.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Identifikasi Kondisi Kekumuhan
- (2) Update data kondisi Jalan Desa dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3. 20 Data Kondisi Jalan Desa Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (km)	Persentase
1	Kondisi Mantap	457.943	80.62
	Baik	372.436	65.57
	Sedang	85.507	15.05
2	Kondisi Tidak Mantap	110.097	19.38
	Rusak Ringan	48.19	8.48
	Rusak Berat	61.907	10.90
Total		568.04	100

b) Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan perumahan;

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan fasilitasi terhadap penerbitan rekomendasi dan izin pengembangan perumahan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp10.750.000,- terealisasi sebesar Rp10.330.800,- atau tercapai 96,10%.

c) Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu. Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp2.711.232.000,- terealisasi sebesar Rp2.663.571.250,- atau tercapai 98,24%.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa fasilitasi terhadap penerima manfaat bantuan stimulasi pembangunan rumah swadaya melalui sumber Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebesar 138 unit Rumah Tidak Layak Huni dientaskan menjadi Rumah Layak Huni dengan rincian seperti pada Tabel 3.21.

Tabel 3. 21 Data Penanganan RTLH Tahun 2020

No	Kapanewon	Kal.	Jumlah Penanganan (Unit)
1	Pleret	Bawuran	23
		Segoroyoso	58
		Wonokromo	24
		Wonolelo	33
Jumlah			138

d) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Tujuan kegiatan ini adalah operasional UPTD Rusunawa Sanitasi dan Permakaman (RSP). Anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.109.887.022,- terealisasi sebesar Rp1.065.798.772,- atau tercapai 96,03%.

2) Program Lingkungan Sehat Perumahan

Maksud program ini adalah untuk meningkatkan lingkungan sehat perumahan. Sedangkan tujuannya adalah untuk melakukan penanganan pada Kawasan kumuh. Anggaran program ini

sebanyak Rp78.300.000,- terealisasi sebesar Rp77.725.000,-, atau tercapai 99,27% dengan efisiensi sebesar Rp156.025.000,-

a) Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penanganan Kawasan kumuh. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp78.300.000,- terealisasi sebesar Rp77.725.000,-, atau tercapai 99,27% dengan efisiensi sebesar Rp156.025.000,-

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan DED Penataan Kawasan Kumuh, sedangkan fisik konstruksi dianggarkan pada Tahun Anggaran 2020, akan tetapi mengalami refocusing anggaran. Lokasi Kawasan kumuh di 2 (dua) dusun :

- (1) Dusun Kweden, Trirenggo, Kec. Bantul (0,91 Ha)
Rabat Beton 89 Meter; drainase 90 meter
- (2) Dusun Deresan, ringinharjo, Kec. Bantul (2,47 Ha)
Rabat Beton 51 Meter; paving block beton 95 M2

3) Program pengelolaan areal pemakaman

Maksud program ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan areal pemakaman di wilayah TPU Imogiri. Sedangkan tujuannya adalah untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman. Anggaran program ini sebesar Rp55.800.000,- terealisasi sebesar Rp54.480.000,- atau tercapai 97,63%.

b) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah pembangunan sarana dan prasarana pemakaman pada TPU Imogiri. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp55.800.000,- terealisasi sebesar Rp54.480.000,- atau tercapai 97,63%.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa pembangunan liang lahat di TPU Imogiri sebanyak 20 unit liang lahat.

c. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 22 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Belum optimalnya pola pembiayaan rumah sehat bagi masyarakat yang kurang mampu	Optimalisasi dan pengembangan pola pembiayaan rumah sehat bagi masyarakat yang kurang mampu
2	Belum optimalnya pelibatan peran serta kelompok masyarakat dan perusahaan dalam pembangunan rumah layak huni bagi warga yang kurang mampu	Optimalisasi pelibatan peran serta kelompok masyarakat dan perusahaan dalam pembangunan rumah layak huni bagi warga yang kurang mampu
3	Belum optimalnya pengendalian pembangunan perumahan rakyat, khususnya tentang fasilitas umum dan rumah sederhana.	Pengendalian pembangunan perumahan rakyat, khususnya tentang fasilitas umum dan rumah sederhana.
4	Belum optimalnya sinergi kebijakan rumah layak huni.	Optimalisasi dan koordinasi sinergi kebijakan rumah layak huni.
5	Permasalahan dalam perubahan nama calon penerima bantuan fasilitasi rumah layak huni jika terdapat calon penerima yang meninggal atau mengundurkan diri.	Peningkatan koordinasi dalam proses identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan
6	Pelaksanaan kegiatan yang menumpulkan massa seperti pelatihan, sosialisasi, FGD terkendala Covid-19 .	Pembatasan peserta kegiatan dan penerapan protocol kesehatan

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Program peningkatan ketertiban dan keamanan

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatnya ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten Bantul. Program ini didukung oleh kegiatan:

1) Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan rasa aman dan tertib di wilayah Kabupaten Bantul, dengan Pagu

murni anggaran kegiatan ini sebesar Rp364.935.000,-. Dikarenakan adanya pandemi covid-19 maka anggaran difocusing untuk penanganan pandemi ini menjadi Rp214.136.000,- dan ada penambahan pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp 226.136.000,00 dan realisasi sebesar Rp223.767.000 atau 98,95%. Bentuk dari Kegiatan digunakan jika terdapat konflik, seperti demonstrasi atau kerusuhan. Indikator kinerja program ini adalah cakupan kawasan tertib dengan target capaian sampai tahun 2020 adalah 19 kawasan. Target ini tercapai 100%. Peningkatan ketertiban dan keamanan, dengan indikator indikator kinerja program ini adalah cakupan kawasan tertib dengan target capaian sampai tahun 2020 adalah 21 kawasan.

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, telah dilaksanakan penanganan ketentraman dan ketertiban melalui beberapa program dan kegiatan yang melibatkan beberapa instansi terkait dan komponen masyarakat. Hal ini cukup menyulitkan bagi petugas untuk melaksanakan operasi yustisi. Namun dengan upaya yang telah dilaksanakan, antara lain dengan intensitas kerjasama lintas sektoral yang semakin solid serta diimbangi dengan penambahan jaringan intelijen, kinerja pemberantasan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya di tahun 2020 memberikan hasil yang baik. Hal ini ditandai dengan semakin kondusifnya situasi di daerah-daerah rawan dan marak perdagangan minuman beralkohol dan prostitusi serta semakin terciptanya ketertiban di kawasan maraknya PKL maupun reklame. Pada tahun 2020, Satpol PP Kabupaten Bantul telah melaksanakan penertiban PKL sebanyak 27 kali dan Anak Jalanan (Anjal) sebanyak 36 kali. Adapun jumlah aduan yang masuk sebanyak 101 aduan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satpol PP. Penertiban PKL

dilaksanakan dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku. Untuk kegiatan penertiban Anjal dilakukan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Anjal yang terjaring diberikan pengarahannya dan diminta kembali ke keluarga masing-masing. Dalam hal pengaduan pelanggaran yang terjadi semua dapat ditindaklanjuti baik dengan pembinaan, pemanggilan, maupun dengan penyidikan. Dengan demikian persentase penyelesaian pelanggaran K3 tercapai 100%.

b. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada sub Urusan Bencana mengacu pada Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan pada Sub Urusan Kebakaran, mengacu Permendagri No 114 Tahun 2018 yaitu SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran,

Capaian tahun 2020 terdapat 75 Desa Tangguh Bencana yang terbentuk adalah sebanyak 35 desa. Pada tahun 2020 baik pembentukan maupun pengembangan desa tangguh bencana tidak bisa dilaksanakan dikarenakan anggaran dialihkan untuk penanganan percepatan corona virus 19, begitu pula pembentukan dan pengembangan sekolah siaga bencana, disamping menghindari kerumunan juga adanya refofusing anggaran, namun demikian untuk desa tangguh bencana sudah mencapai lebih dari 100% dari target yang ditetapkan yaitu 45,33% terealisasi sebesar 46,67%. Capaian Sekolah Siaga Bencana juga sudah memenuhi target yaitu 100% dari target 4,7% terealisasi 4,12%, Sedangkan untuk capaian layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran adalah 100% dari target 100% terealisasi 100%.

Sepanjang tahun 2020 Kabupaten Bantul mencatat 530 kejadian bencana yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul, hampir semua desa di wilayah Kabupaten Bantul terdampak. Kejadian bencana terbesar adalah kejadian kebakaran, pohon tumbang dan tanah longsor, dengan trend yang cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir. Kejadian kebakaran, terjadi dari awal musim kemarau sampai mendekati musim penghujan (awal musim hujan).

Dengan mempertimbangkan kala ulang kejadian bencana dan kala ulang musim penghujan, maka ancaman potensi bencana yang akan meningkat di bulan Oktober – November yaitu bencana hidrometeorologi antara lain banjir, longsor, angin ribut, dan pohon tumbang. Adapun kejadian dan lokasi bencana yang terjadi di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 3.23

Tabel 3. 23 Kejadian dan lokasi bencana yang terjadi di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Kebakaran	Tanah Longsor	Tanah retak	Erosi	Angin Kencang		Tersambar Petir	Pohon Tumbang	Dahan Patah	Abrasi & Gelombang Pasang	Laka Sungai	Laka Sumur	Bangunan Roboh (Kegagalan Teknologi)	Banjir	Gempa di		
						Dampak (Titik)	Jumlah Kejadian									Jumlah gempa di DIY	Gempa dirasakan di Bantul	
1	BANTUL	11	0	0	1	96	Januari : 5 Februari : 3 Maret : 5 April : 2 Oktober : 1 November : 4 Desember : 2	0	12	4	0	0	0	0	0	141	13	
2	BANGUNTAPAN	25	0	0	0	40		0	7	1	0	0	1	0	1			0
3	PIYUNGAN	5	19	0	0	142		0	1	0	0	0	0	0	0			0
4	SRANDAKAN	1	1	0	0	16		0	13	0	0	0	0	0	0			0
5	SANDEN	3	0	0	1	14		0	9	0	0	0	0	0	0			0
6	KRETEK	5	3	0	0	18		0	4	0	1	0	0	0	0			0
7	PUNDONG	4	4	0	1	20		0	2	1	0	0	1	0	0			0
8	JETIS	7	0	0	1	81		0	10	0	0	1	0	0	0			0
9	SEWON	19	3	0	3	59		1	13	3	0	0	0	1	0			0
10	KASIHAN	16	3	0	2	42		0	7	0	0	0	0	0	0			0
11	DLINGO	3	15	0	0	31		0	5	0	0	0	0	0	0			0
12	PAJANGAN	3	1	0	0	17		0	2	0	0	0	0	0	0			0
13	PANDAK	5	0	0	1	39		0	1	0	0	1	0	0	0			0
14	SEDAYU	4	1	0	0	11		1	3	0	0	0	0	0	0			0
15	PLERET	7	7	0	0	35		0	8	0	0	0	0	1	0			0
16	IMOGIRI	6	28	1	4	43		1	11	1	0	1	0	0	0			0
17	BAMBANGLIPURO	6	0	0	0	84		0	7	0	0	0	0	0	0			0
	JUMLAH	130	85	1	14	788	22	3	115	10	1	4	1	3	0	141		
Total		530																

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

c. Program dan Kegiatan

- 1) **Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam**
 - a) Pengurangan Resiko dan Pencegahan Bencana
 - b) Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana
- 2) **Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran**
 - a) Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
- 3) **Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana**
 - a) Rehabilitasi Pasca Bencana
 - b) Rekonstruksi Pasca Bencana
- 4) **Program Penanganan Kedaruratan Bencana**
 - a) Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bencana
 - b) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik dan Perbekalan

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) **Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.**

Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam pengurangan resiko bencana dan meminimalis dampak terjadinya bencana serta mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi, publikasi dan edukasi mitigasi bencana baik bencana alam maupun non alam. Selanjutnya diharapkan terciptanya pencegahan dan

kesiapan daerah dalam menghadapi bencana. Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp2.172.812.500,00 dan terealisasi sebesar Rp2.095.495.945,00 atau sebesar 96,44%.

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Pengurangan Resiko dan Pencegahan Bencana

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah tercapainya pengurangan risiko yang timbul akibat bencana dan mencegah terjadinya dampak dari bencana baik bencana alam maupun non alam. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.016.700.000,00 terealisasi sebesar Rp972.354.205,00 atau sebesar 95,64%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Sosialisasi-sosialisasi kebencanaan dengan pemasangan rambu-rambu evakuasi dan baliho kebencanaan.
- (2) Pembuatan buku panduan destacovid

Terlaksananya edukasi mitigasi bencana non alam, yaitu bencana pandemi corona virus 19 melalui buku panduan destacovid, diharapkan buku ini dapat mengedukasi masyarakat terkait apa, siapa dan bagaimana menyikapi situasi pendemi covid 19 serta penanggulangannya.



Gambar 3. 3 Buku Panduan Destacovid

(3) Sosialisasi lewat media elektronik

Sosialisasi dilaksanakan melalui media televisi yaitu dengan diadakannya talk show, diharapkan masyarakat dapat secara langsung berinteraksi lewat media televisi dan dapat mengedukasi masyarakat lewat visual.

(4) Pemasangan instalasi dan perpipaan air bersih untuk mencegah bencana kekeringan di desa Wukirsari dan Srimartani.

b) Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah tercapainya kesiapsiagaan dan meningkatkannya kapasitas BPBD dalam penanggulangan bencana. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.155.112.500,00 terealisasi sebesar Rp1.123.141.740,00 atau sebesar 97,15%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa **Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Relawan**. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa : pelatihan penanganan bencana non alam yaitu bencana pandemi virus corona 19 yaitu pelatihan desinfektan dan pelatihan pemulasaran/pemakaman jenazah covid 19 dengan sasaran

pelatihan relawan Kabupaten Bantul. Diharapkan masyarakat yang tergabung dalam Relawan Kabupaten Bantul paham bagaimana menangani bencana non alam yaitu pandemi covid 19 terlebih dapat membantu pemerintah Kabupaten Bantul dalam percepatan penanganan bencana non alam yaitu pandemi covid 19.

2) Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

Maksud dan tujuan dari Program ini adalah meningkatnya pemahaman, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana kebakaran. Targetnya adalah pemenuhan SPM di sub bidang kebakaran dapat mencapai 100%. Cakupan pelayanan kebakaran tahun 2020 mengacu pada Permendagri Nomor 114 tahun 2018 yaitu :

a) Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Satgas PBK BPBD Kabupaten Bantul dengan formula :

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan} \\
 & \text{dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran} \\
 & \text{di Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 dalam} \\
 & \text{tingkat waktu tanggap (respon time) oleh Satgas} \\
 = & \frac{\text{PBK BPBD Kabupaten Bantul}}{\text{Jumlah kasus kebakaran di Kabupaten Bantul}} \times 100\% \\
 & \text{pada tahun 2020} \\
 = & \frac{115}{130} \times 100\% \\
 = & 88,46\%
 \end{aligned}$$

b) Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan (balakar dan atau lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan BPBD Kabupaten Bantul dengan formula :

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan} \\
 & \text{evakuasi korban dan terdampak kebakaran di} \\
 & \text{Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 dalam tingkat} \\
 & \text{waktu tanggap (respon time) oleh relawan kebakaran} \\
 & \text{yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan BPBD} \\
 = & \frac{\text{Kabupaten Bantul}}{\text{Jumlah kasus kebakaran di Kabupaten Bantul}} \times 100\% \\
 & \text{pada} \\
 & \text{tahun 2020} \\
 = & \frac{15}{130} \times 100\% \\
 = & 11,54\%
 \end{aligned}$$

Sumber: BPBD, 2020

Capaian layanan SPM Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Bantul pada tahun 2020 adalah 88,46% + 11,54% = 100%.

Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp1.505.042.400,00 dan terealisasi sebesar Rp1.483.021.995,00 atau 98,54%. Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dilaksanakan melalui kegiatan **Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.**

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya SPM dibidang kebakaran dan meningkatnya kapasitas BPBD dibidang bencana kebakaran. Alokasi

anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.505.042.400,00 terealisasi sebesar Rp1.483.021.995,00 atau sebesar 98,54.

3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana.

Maksud dan tujuan dari Program ini adalah terciptanya pemulihan dan perbaikan infrastruktur dan masyarakat pasca bencana. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp61.643.889.434,00 dan terealisasi sebesar Rp56.666.769.503,00 atau 91,93%. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Rehabilitasi Pasca Bencana

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya bantuan stimulan untuk relokasi korban bencana. Diharapkan kegiatan ini dapat memulihkan ekonomi dan rumah layak huni bagi korban bencana alam. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp289.700.000,00 terealisasi sebesar Rp284.313.000,00 atau sebesar 98,14%. Untuk tahun 2020 sasaran bantuan stimulan diberikan untuk 3 Kepala Keluarga yaitu Bapak Pujiyo, Bapak yatin, dan Bapak Untung.

b) Rekonstruksi Pasca Bencana

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah merekonstruksi jembatan dan jalan akibat bencana badai cempaka di tahun 2017. Kegiatan ini dibiayai oleh dana Hibah dari Pusat. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp61.354.189.434,00 terealisasi sebesar Rp56.382.457.503,00 atau sebesar 91,90%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Pembangunan jembatan yang rusak akibat bencana badai cempaka 2017. Ada 5 jembatan yang dikonstruksi di tahun 2020 yaitu :

(a) Pembangunan Konstruksi Jembatan Dzikrul Ghofilin



Gambar 3. 4 Pembangunan Konstruksi Jembatan Dzikrul Ghofilin

(2) Pengadaan Jalan Khusus berupa :

(a) Pembangunan bangket dan jalan akses masuk relokasi

(b) Pembangunan jalan lingkungan dan drainase relokasi

(c) Pembangunan talud

(3) Belanja Barang yang akan diserahkan ke masyarakat

Bantuan yang diserahkan di masyarakat berupa Bantuan Dana Lingkungan atau BDL dan Bantuan Dana Rumah atau BDR. BDR berlokasi di Sompok, Karangrejek, Selopamioro.

4) Program Penanganan Kedaruratan Bencana

Maksud dan tujuan dari Program ini adalah tercapainya penanganan evakuasi dan logistik bencana. Selanjutnya diharapkan korban bencana segera tertanggulangi baik evakuasi maupun logistik bagi korban bencana. Alokasi anggaran dari program ini sebesar Rp940.048.248,00 dan terealisasi sebesar Rp925.125.810,00 atau 98,41%. Program Penanganan Kedaruratan Bencana dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Bencana

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemantauan dan bantuan evakuasi terhadap korban bencana serta pengadaan pos darurat bencana. Alokasi anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp718.409.000 terealisasi Rp705.479.500 atau sebesar 98.20%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Belanja Bahan Medis untuk pos siaga darurat bencana

Belanja bahan medis / PPGD disini untuk mencukupi keperluan pertolongan pertama yang diperlukan selama pengadaan pos darurat bencana berupa : Plester, Aseptik, Kassa, Verband, dll

(2) Belanja bahan baku bangunan untuk penanganan darurat kebencanaan

Belanja bahan baku bangunan berupa pengadaan bronjong untuk penanganan darurat bencana longsor

(3) Belanja perlengkapan untuk penanganan darurat bencana

Belanja perlengkapan disini terdiri dari belanja terpal, tali tambang, karung pasir, dan APD.

(4) Dropping air bersih

Pengadaan air bersih guna untuk dropping air bersih di daerah rawan kekeringan. Adapun wilayah yang terdampak bencana kekeringan dan jumlah dropping air bersih di sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 24 Wilayah yang terdampak bencana kekeringan dan jumlah dropping air bersih di tahun 2020

No	Tanggal	Lokasi	Jumlah Liter	Keterangan
1	15 Agustus 2020	Srunggo I, RT, Selopamioro	5.000	1 kali dropping
2	14 September 2020	Jaten, RT 4, Triharjo	10.000	2 kali dropping
3		Ngrancah, RT 4, Sriharjo	10.000	
4	22 September 2020	Semuten, RT 3, Jatimulyo	20.000	1 kali dropping
5	23 September 2020	Semuten, RT 3, Jatimulyo	30.000	4 kali dropping
6		Gunung cilik, RT 6, Muntuk	20.000	
7		Sukorame, RT 45, Manguna	10.000	
8		Sukorame, RT 46, Mangunan	10.000	
9	24 September 2020	Ngrancah, RT 4, Sriharjo	10.000	1 kali dropping
10	28 September 2020	Semuten, RT 3, Jatimulyo	20.000	1 kali dropping
11	30 September 2020	Semuten, RT 3, Jatimulyo	10.000	1 kali dropping
12	1 Oktober 2020	Pancuran, RT 4, Terong	20.000	4 kali dropping
13		Plesedan, RT 6, Srimulyo	10.000	
14		Terong I, RT 1, Terong	20.000	
15		Terong II, RT 4, Terong	20.000	
16	2 Oktober 2020	Tirto, RT 5, Triharjo	40.000	2 kali dropping
17		Jaten, RT 4, Triharjo	40.000	
18	5 Oktober 2020	Kalidadap II, RT 2, Selopamioro	40.000	1 kali dropping
19	6 Oktober 2020	Ngenep, RT 2, Terong	10000	2 kali dropping
20		Jaten, RT 3, Triharjo	10.000	

No	Tanggal	Lokasi	Jumlah Liter	Keterangan
21	7 Oktober 2020	Karangasem, RT 3, Wukirsari	10.000	4 kali droping
22		Karangasem, RT 4, Wukirsari	5.000	
23		Karangasem, RT 1, Wukirsari	5.000	
24		Jaten, RT 4, Triharjo	40.000	
25	8 Oktober 2020	Karangtalun, RT 4, Wukirsari	5.000	6 kali droping
26		Karangtalun, RT 6, Wukirsari	5.000	
27		Dengkeng, RT 2, Wukirsari	5.000	
28		Dengkeng, RT 4, Wukirsari	5.000	
29		Kalidadap II, RT 2, Selopamioro	30.000	
30		Ketos, RT 4, Sriharjo	10.000	
31	12 Oktober 2020	Jaten, RT 4, Triharjo	20.000	1 kali droping
32	13 Oktober 2020	Karangasem, RT 1, Wukirsari	20.000	3 kali droping
33		Karangasem, RT 3, Wukirsari	10.000	
34		Karangasem, RT 4, Wukirsari	10.000	
35	14 Oktober 2020	Kalidadap II, RT 2, Selopamioro	30.000	1 kali droping
36	15 Oktober 2020	Tirto, RT 5, Triharjo	20.000	2 kali droping
37		Karangtalun, RT 5, Wukirsari	20.000	
38	19 Oktober 2020	Karangasem, RT 3, Wukirsari	10.000	2 kali droping
39		Jaten, RT 4, Triharjo	20.000	
40	20 Oktober 2020	Tirto, RT 5, Triharjo	20.000	1 kali droping
41	21 Oktober 2020	Karangasem, RT 4, Wukirsari	15.000	1 kali droping
42	23 Oktober 2020	Jaten, RT 4, Triharjo	15.000	1 kali droping
43	26 Oktober 2020	Kalidadap II, RT 2, Selopamioro	40.000	1 kali droping
	JUMLAH		735.000	

(5) Pengadaan alat bengkel (chainsaw)

Pengadaan chainsaw atau gergaji mesin sebanyak 20 unit yang akan dipergunakan untuk penanggulangan bencana pohon tumbang.

(6) Pengadaan alat komunikasi (HT)

Pengadaan HT di tahun 2020 sebanyak 20 unit hal ini dilakukan untuk mempercepat komunikasi antar

personil dan relawan yang tergabung dalam relawan Kabupaten Bantul

b) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik dan Perbekalan.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan logistik dan perbekalan untuk korban bencana. Alokasi anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp221.639.284,00 terealisasi Rp219.646.310,00 atau sebesar 99.10%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

(1) Belanja bahan baku bangunan

Belanja bahan baku bangunan disini untuk persediaan jika ada bencana bisa disalurkan. Pada tahun 2020 penyaluran bahan baku bangunan belum dilaksanakan penyalurannya dikarenakan belum ada bencana yang masif, sehingga persediaan bahan bangunan masih tersedia.

(2) Belanja persediaan bahan makanan pokok

Belanja persediaan bahan makanan pokok disini untuk persediaan jika ada bencana bisa disalurkan. Bahan makanan pokok disini terdiri dari mie instan, gula pasir, beras, minyak goreng, sarden, kecap, makanan siap saji. Pada tahun 2020 penyaluran bahan makanan pokok belum dilaksanakan penyalurannya dikarenakan belum ada bencana yang masif, sehingga persediaan bahan bangunan masih tersedia.

(3) Belanja alat-alat perlengkapan

Belanja alat-alat perlengkapan disini untuk persediaan jika ada bencana bisa digunakan. Alat-alat perlengkapan berupa peralatan kerja bakti yaitu cangkul, sekop, mata garu, angkong, linggis, sabit parang, pelampung. Pada tahun 2020 penyaluran alat-alat perlengkapan belum dilaksanakan penyalurannya dikarenakan belum ada bencana yang masif, sehingga persediaan bahan bangunan masih tersedia.

d. Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Penanganan Covid-19

Tahun 2020 BPBD menganggarkan dana belanja tidak terduga sebesar Rp1.411.411.425 terdiri dari 2 kegiatan yaitu kegiatan Penanganan Darurat Covid 19 (Desinfeksi) sebesar Rp979.538.500 dan kegiatan Penanganan Jenazah non Yankes sebesar Rp431.902.925.

Anggaran Penanganan Darurat Covid – 19 terealisasi sebesar Rp962.333.711 atau sebesar 98,24% dari pagu anggaran Rp979.538.500 sedangkan Anggaran Penanganan Jenazah non Yankes terealisasi sebesar Rp422.272.811 atau sebesar 97,77% dari pagu anggaran sebesar Rp431.902.925.

Realisasi keuangan pada Dana Belanja Tidak Terduga Penanganan Covid 19 sebesar 98% namun secara fisik mencapai 100%. Ada penghematan atau efisiensi anggaran pada belanja pengadaan alat desinfeksi dan pengadaan alat pelindung diri serta pelatihan dan dekontaminasi petugas sedangkan untuk anggaran swakelola tidak terserap 100% dikarenakan adanya pengurangan kegiatan dan personil yang menyesuaikan SK tanggap darurat.

e. Keberhasilan Pelaksanaan Urusan Tahun 2016 - 2020

Di dalam Dokumen RPB terdapat 9 (Sembilan) ancaman bencana dengan berbagai tingkat resiko. Capaian indeks nilai resiko bencana tahun 2020 adalah 132 (kategori tinggi).

Tabel 3. 25 Data Jumlah Kejadian per Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020

Bencana	Jumlah Kejadian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tanah Longsor	77	345	23	174	85
Cuaca Ekstrem/Angin Kencang	4	22	0	24	22
Kebakaran	48	111	208	227	130
Erosi	36	27	8	11	1
Abrasi	1	2	3	0	0
Laka Sungai	5	12	16	6	4
Banjir	20	22	0	8	0
Gempa	11	27	97	0	13

Sumber : BPBD Kab. Bantul, 2021

Indikator Desa tangguh bencana yang terealisasi sampai dengan tahun 2020 sebanyak 35 (tiga puluh lima) desa dari 75 (tujuh puluh lima) desa yang ada di Kabupaten Bantul, yaitu Desa Wonolelo, Mulyodadi, Tirtoharjo, Gadingharjo, Gadingsari, Poncosari, Srimulyo, Mangunan, Jatimulyo, Wukirsari, Kebonagung, Parangtritis, Srigading, Seloharjo, Selopamioro, Munthuk, Karangtengah, Girirejo, Imogiri, Trimulyo, Sriharjo, Srimartani, Srihardono, Bangunjiwo, Donotirto, Panjangrejo, Sidomulyo, Wonokromo, Terong, Temuwuh, Guwosari, Dlingo, Trirenggo, Triwidadi, dan Trimurti. Tahun 2019 Desa yang dibentuk melalui APBD II ada 4 desa yaitu Terong, Temuwuh, Guwosari dan Dlingo sedangkan desa yang dibentuk sebagai desa tangguh bencana melalui APBD I ada 3 desa yaitu desa Trirenggo, Triwidadi, dan Trimurti.

Indikator Sekolah Siaga Bencana dengan target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 4,7%, realisasi sebesar 4,12%, tercapai 87,65% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Capaian tahun

2020 ini telah menyumbangkan 79% dari target akhir Renstra tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 5,2%.

Indikator penanganan bencana kebakaran berupa layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, dengan data sebagai berikut:

Tabel 3. 26 Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap.	39	93	175	203	114
2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	39	93	175	193	114
3	Jumlah total terjadi kebakaran	48	111	208	227	130
4	Jumlah kebakaran di luar jangkauan WMK	9	18	34	34	16
5	Tingkat waktu tanggap	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2021

Tingkat waktu tanggap (response time rate) merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK. Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten dapat dinyatakan dengan perbandingan jumlah luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terhadap jumlah luas potensi kebakaran. Pada tahun 2020 jumlah luas WMK adalah 176,62 Ha. Sementara jumlah luas potensi kebakaran tercatat sebesar 506,85 Ha.

Cakupan pelayanan kebakaran sangat tergantung dengan jumlah mobil pemadam kebakaran yang dimiliki. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter yang dimiliki pada tahun 2020 sebanyak delapan unit. Mengingat luasnya WMK dan potensi terjadinya musibah kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul ini, pada tahun 2020 sudah terdapat 7 pos pemadam yaitu pos Induk di BPBD, pos di Kecamatan Kasihan, Banguntapan, Imogiri, Piyungan, Pundong dan Sedayu.

f. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 27 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Ketentraman, Ketertiban, Dan Perlindungan Masyarakat

No.	Permasalahan	Solusi
Sub Urusan Bencana		
1	Belum Optimalnya pelayanan informasi rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan dan mengaktifkan jaringan informasi dan komunikasi yang ada, baik secara verbal (komunikasi lewat radio, Whatshapp, aplikasi, dll) maupun non verbal (sosialisasi, simulasi, publikasi lewat media baliho atau slogan dll) sehingga informasi dapat sampai pada masyarakat - Meningkatkan publikasi informasi rawan bencana melalui media apapun diantaranya sosialisasi seperti sarasehan, media kesenian/budaya, olahraga, seminar, CFD, dll
2	Belum Optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dengan meningkatkan pelatihan dan simulasi - Meningkatkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah dalam proses pencegahan dan penanganan bencana di Kabupaten Bantul - Mengoptimalkan fungsi EWS dan TES
3	Belum Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan cara pelatihan – pelatihan baik petugas, instansi terkait (Basarnas, TNI, Polri) maupun masyarakat
Sub Urusan Kebakaran		
1	Belum Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan sering dilakukannya pelatihan penanganan penyelamatan dan evakuasi khususnya korban kebakaran
2	Kepedulian terhadap pencegahan kebakaran belum menjadi prioritas	Mempersiapkan Naskah Akademis dan mendorong DPR RI mensahkan UU Keselamatan Terhadap Bahaya Kebakaran
3	Sistem Proteksi Kebakaran di seluruh lingkungan (hutan, lahan, dll) maupun karya Konstruksi di Indonesia belum optimal	Pemerintah perlu terjun langsung ke seluruh lingkungan Pemda utk cek, evaluasi dan mengambil sikap tegas dalam rangka memastikan seluruh lingkungan lebih "perduli" mengantisipasi bahaya kebakaran
4	Institusi Pemadam Kebakaran Indonesia belum mendapat perhatian yang maksimal.	Pendidikan, kompetensi dan kesejahteraan tim/petugas Pemadam kebakaran harus prioritas diperhatikan dan ditindaklanjuti secara benar dan tepat
5	Persyaratan Keselamatan Kebakaran belum diaplikasikan seluruh masyarakat secara prioritas dan mutlak	Dimulai dari DESAIN, IMB, sampai dengan PERSYARATAN OPERASIONAL, bahaya kebakaran harus diantisipasi secara profesional, detail, terstruktur dan

No.	Permasalahan	Solusi
		berkelanjutan

6. Sosial

a. Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan dalam urusan sosial selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial meliputi berbagai kegiatan sebagai berikut :

- a) Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b) Peningkatan Kualitas Kampanye Sosial Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS;
- c) Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- d) Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras (Miras) dan Narkotika dan Bahan Adiktif Lainnya (Narkoba) serta berkembangnya praktik prostitusi..

2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya :

- a) Kegiatan Pemberdayaan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin
- b) Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Bantuan bagi Warga Miskin
- c) Kegiatan Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran bantuan

3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

- a) Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.
- b) Kegiatan Peningkatan kualitas kesetiakawanan sosial nasional.
- c) Kegiatan Pendampingan Kegiatan Karang Taruna.

4) Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial.

- a) Kegiatan Updating Keluarga Miskin
- b) Kegiatan Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Maksud dan tujuan Program ini adalah menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan melaksanakan rehabilitasi kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :

a) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial bagi PMKS

Maksud kegiatan ini adalah untuk memberikan pelayanan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pagu anggaran kegiatan Tahun 2020 setelah refocusing adalah sebesar Rp27.320.000 dengan

capaian realisasi sebesar 69,78 atau Rp19.065.000,-
Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) *Case Conference* / Pembahasan kasus perlindungan anak
- (2) Pelayanan Rujukan bagi Penyandang Disabilitas rujukan ke Bapeljamkesos sebanyak 7 orang
- (3) Pelayanan Permohonan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas
Pemberian dan peminjaman alat bantu sejumlah 17 alat bantu untuk 17 orang dengan rincian kursi roda 9 (pemberian 7 kursi roda, peminjaman 2 kursi roda, 1 sudah dikembalikan), kruk sebanyak 2, kaki 4 sebanyak 2 ,kaki 3 sebanyak 1 , walker sebanyak 1.

b) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kampanye sosial pelayanan sarana dan prasarana Rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Program ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Adapun pelaksanaan program kegiatan ini bertujuan untuk :

- (1) mengurangi penyandang masalah kesejahteraan sosial di masyarakat.
- (2) menangani jenazah terlantar.
- (3) meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap PMKS.

(4) pelayanan jamkesus bagi penyandang disabilitas.

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini tahun 2020 adalah Rp150.548.000,- dengan capaian realisasi sebesar 74% atau Rp 111.403.000,- Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Penjangkauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Tim reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Bantul

Penjangkauan PMKS yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Bantul, berupa mengantar dan menjemput klien ke/dari rumah sakit/panti rehab, seperti RSJ Ghrasia Pakem, RSJD Dr.Soedjarwadi Klaten, Panti Margo Laras Pati dll. Selama tahun 2020 Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Bantul telah mengantar dan menjemput klien (mayoritas psikotik) sebanyak 30 kali. TRC Kab Bantul mendapatkan honor Rp250.000/per bulan selama 12 bulan penuh.

(2) Pemakaman Jenazah terlantar.

Untuk pemakaman jenazah terlantar tahun 2020, Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul menyiapkan dana untuk 30 jenazah (Rp1.650.000,00 per jenazah), untuk

perawatan dan pemakamannya. Tahun 2020 melaksanakan pemakaman sebanyak 10 orang jenazah terlantar di Makam Tegaldowo Desa Bantul.

c) Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Maksud Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui kegiatan Pemberdayaan/Pelatihan Ketrampilan. Pagu anggaran kegiatan ini Tahun 2020 adalah sebesar Rp20.590.000,- dengan capaian realisasi sebesar 95,14% atau Rp19.590.000,-. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :Kegiatan Pelatihan Ketrampilan dengan diberikan bahan praktek bagi Lanjut Usia Potensial dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang dan dilaksanakan pada tanggal Februari 2020 di Dusun Menden Kalurahan Bantul Kecamatan Bantul dengan jumlah peserta 60 orannng/lansia.

d) Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba serta berkembangnya praktik prostitusi.

Maksud kegiatan ini dilaksnakan dengan maksud untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pagu anggaran kegiatan ini tahun 2020

setelah refocusing adalah sebesar Rp23.200.000,- dengan capaian realisasi sebesar 89.66 % atau Rp 20.800.000,- Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Sosialisasi P4GN

(2) Fasilitas Konsumsi untuk kegiatan penyuluhan/sosialisasi narkoba tahun 2020 ini dimanfaatkan oleh warga masyarakat di kabupaten Bantul sebanyak 500 snack.

2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Maksud dan tujuan program ini adalah melakukan penanganan dan pendampingan fakir miskin dalam mendapatkan perlindungan, jaminan dan bantuan secara optimal. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :

a) Pemberdayaan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin

Maksud dari Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengembangan usaha bagi kelompok usaha untuk dapat pengentaskan kemiskinan di daerah.

Pada Kegiatan Pemberdayaan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin jumlah anggaran pada Tahun 2020 sebelum refocusing sebesar Rp77.515.000,- dan setelah refocusing tinggal

sebesar Rp725.000,- dengan capaian realisasi sebesar 100% atau Rp725.000,- untuk biaya penggandaan.

b) Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Bantuan bagi Warga Miskin

Kegiatan ini dimaksudkan untuk Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan. Adapun pelaksanaan program kegiatan ini bertujuan untuk :

- (1) mengurangi tingkat warga miskin yang ada di Bantul
- (2) menangani bayi/anak/orang terlantar
- (3) meningkatkan pendapatan bagi KPM PKH
- (4) pelayanan bagi keluarga penerima manfaat
- (5) memberikan pendampingan kepada KPM PKH agar nantinya dapat meng-graduasi mandiri

Kegiatan ini dengan APBD sebelum refocusing Rp 433.552.500,00 dan setelah refocusing tinggal Rp 174.047.500,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp173.717.500,00 atau dengan persentase capaian 99,7%. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

- (1) Honorarium Koordinator Kecamatan
- (2) Pembinaan Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) di Kabupaten Bantul sebanyak 250 orang Pendamping

- (3) Rapat Koordinasi terkait Bansos PKH dan Bansos Sembako yang dilaksanakan di Th. 2020
- (4) Workshop Peningkatan SDM PKH KAbupaten Bantul Th. 2020 yang diikuti 110 orang Pendamping

c) Pendampingan, pemantauan dan penyaluran bantuan

Program ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan sarana dan prasarana serta pendampingan bagi korban bencana alam maupun sosial. Adapun pelaksanaan program kegiatan ini bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana sosial dan alam;
- (2) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Bencana;
- (3) Pemberian bantuan logistic kepada Korban Bencana;
- (4) Peningkatan kapasitas kepada Anggota TAGANA

Pada Kegiatan Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan jumlah anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp627.590.000 dengan capaian realisasi sebesar 99,9% atau Rp627.377.500,-

3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Maksud program ini adalah memberdayakan mitra kerja kelembagaan sosial yang meliputi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Kesejahteraan Sosial

(LKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), dan Karang Taruna. Tujuan program adalah :

- a) Menguatnya kapasitas kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial.
- b) Meningkatnya partisipasi dan kinerja mitra kerja dalam menangani PMKS di Kabupaten Bantul

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan melalui kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.

Kegiatan dalam program ini dimaksudkan untuk pemberdayaan Organisasi Sosial (Orsos) dan PSM di Kabupaten Bantul. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah melalui pembinaan dan mekanisme lomba/evaluasi, mereka dituntut peran maksimal sehingga *outputnya* dapat dirasakan oleh masyarakat.

Kegiatan ini didukung APBD sebesar Rp343.564.350,00 anggaran yang terserap Rp343.409.350,00 (99,95%) dengan capaian fisik 100%. Kegiatan ini meliputi :

- (1) Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat` (PSM)

Tabel 3. 28 Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat

No	Lokasi Pembinaan	Tanggal Pembinaan	Jumlah Peserta	Materi
1	Pendopo Kapanewon Kretek	18 Februari 2020	25 orang	Peran PSM dalam Penanganan PMKS
2	Pendopo Kapanewon Pundong	19 Maret 2020	25 orang	Sertifikat Bimtek Dasar PSM
3	Dinas Sosial P3A	13 Oktober 2020	25 orang	Sertifikasi Bagi PSM

(2) Evaluasi PSM berprestasi

Evaluasi PSM berprestasi tingkat Kabupaten dilaksanakan pada mulai bulan Februari sampai akhir Maret 2020 di ikuti oleh perwakilan perwakilan PSM yang sudah dipilih oleh kecamatan.

(3) Pembinaan LKS

Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dilaksanakan secara rutin setiap 35 hari sekali, dengan mengambil lokasi berpindah pindah dari dimulai dari Dinas Sosial P3A Kab. Bantul dilanjutkan dari LKS satu ke LKS yang lain. Peserta yang diundang semua LKS se-Kabupaten Bantul.

(4) Evaluasi LKS berprestasi

Evaluasi Orsos/LKS berprestasi tingkat Kabupaten dilaksanakan pada bulan Februari sampai akhir Maret 2020 diikuti oleh perwakilan Orsos yang sudah dipilih oleh kecamatan.

Evaluasi Orsos/ LKS berprestasi tingkat Kabupaten Bantul tahun 2020 dilaksanakan mulai bulan Februari dengan 3 tahapan, yaitu :

- (a) Seleksi administrasi meliputi kegiatan bidang :Bidang Organisasi, Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), Bidang Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- (b) Seleksi paparan presentasi di hadapan Tim penilai tentang kegiatan dilaksanakan.
- (c) Seleksi kunjungan lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di bawah sebagai upaya pembuktian.

b) Pembinaan dan Evaluasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Berprestasi.

Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dilaksanakan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali, dengan mengambil lokasi berpindah pindah, dimulai dari Dinas Sosial P3A Kab. Bantul dilanjutkan dari Kecamatan satu ke Kecamatan yang lain. Peserta yang diundang semua TKSK se-Kabupaten Bantul dan pihak pihak terkait yang menjadi mitra kerja TKSK.

Diketahui bahwa dari hasil pembinaan TKSK :

- (1) Sinergitas TKSK dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan PSKS yang lain masih perlu ditingkatkan
- (2) Untuk meningkatkan tugas dan fungsi TKSK diperlukan Bimtek yang dilaksanakan secara berkelanjutan
- (3) Belum semua TKSK mengikuti sertifikasi TKSK.

Selain itu dilakukan Evaluasi TKSK berprestasi di tahun 2020 tingkat Kabupaten Bantul yang dilaksanakan mulai bulan Februari sampai Maret dengan 3 tahapan seleksi, yaitu :

- (a) Seleksi administrasi
- (b) Seleksi paparan presentasi di hadapan Tim penilai tentang kegiatan dilaksanakan.
- (c) Seleksi kunjungan lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya

c) Pembinaan dan Evaluasi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)

Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan mengambil lokasi berpindah pindah, dimulai dari WKSBM satu ke WKSBM yang lain. Peserta yang diundang semua WKSBM se-Kabupaten Bantul. Pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel 3. 29 Pelaksanaan WKSBM

No	Lokasi	Tanggal	Jumlah Peserta
1	Dinas Sosial P3A	20 Februari 2020	30 orang
2	Dinas Sosial P3A	15 Oktober 2020	30 orang
3	WKSBM Mugi Barokah Pajangan	21 Oktober 2020	30 orang
4	33 WKSBM Ngudi Lestari	5 Nopember 2020	30 orang

Dari hasil pembinaan diketahui bahwa :

- (1) Belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk operasional WKSBM.
- (2) Kegiatan WKSBM dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial tergantung adanya donasi dari masyarakat/ pelaku usaha.
- (3) WKSBM belum dapat menyampaikan laporan kegiatan secara rutin.

Evaluasi WKSBM berprestasi tingkat Kabupaten merupakan tahun ketiga dilaksanakan pada bulan Februari sampai akhir Maret 2020 di ikuti

oleh WKSBM di Kabupaten Bantul dengan 3 tahapan seleksi yaitu :

- (1) Seleksi administrasi
- (2) Seleksi paparan presentasi di hadapan Tim penilai tentang kegiatan dilaksanakan.
- (3) Seleksi kunjungan lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Hasil Evaluasi Tingkat Kabupaten Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3. 30 Hasil Evaluasi WKSBM

NO	NAMA	ALAMAT	NOMINASI	REWARD
1	Ngudi Lestari	Jragan II, Poncosari, Srandakan	I	6.000.000
2	Tulus Iklas	Jetis RT.03, Sendangsari Pajangan	II	4.000.000
3	Mugi Barokah	Dadapbong, Sendangsari, Pajangan	III	3.000.000

d) Kegiatan Peningkatan kualitas kesetiakawanan sosial nasional.

Maksud kegiatan adalah meningkatkan kualitas kesetiakawanan sosial di masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan rasa kesetiakawanan sosial dan kesadaran untuk ikut serta dengan pemerintah dalam penanganan kesejahteraan sosial. Tujuan kegiatan adalah :

- (1) Memperkuat nilai – nilai kesetiakawan sosial di masyarakat.
- (2) Memupuk nilai – nilai keberagaman/ kebhinekaan di masyarakat.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp59.286.650,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp59.286.650,00 (100 %)

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kesetiakwaan Sosial Nasional terinci dalam sub kegiatan sebagai berikut :

(1) Pemeliharaan TMP Kusuma Bangsa

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa, dilaksanakan dalam rangka memelihara area taman makam pahlawan meliputi perawatan rumput, perawatan makam, perawatan kebersihan halaman, dan lain-lain. Dalam tahun 2020 juga dilaksanakan pengecatan tugu monumen. Jumlah anggaran Rp18.223.500 terserap Rp18.223.500

e) Sosialisasi Penanaman nilai-nilai K-5

Kegiatan sosialisasi penanaman nilai – nilai K5 yang terdiri dari : kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesadaran kebangsaan, dan kepeloporan dilaksanakan dalam rangka memupuk semangat jiwa nasionalisme dan meningkatkan generasi muda untuk lebih menghargai terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang demi NKRI. Kegiatan ini disingkat dengan “Sosialisasi PNK-5” untuk peserta ditujukan kepada siswa/murid SMP di Kabupaten Bantul. Kegiatan dilaksanakan di aula Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa. Sosialisasi dilakukan dua kali pada bulan Januari dan Februari dengan peserta anak-anak siswa SMP sejumlah 30 anak per kegiatan dengan narsumber

dari Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan jajaran Kodim 0729 Bantul.

f) Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN)

Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional merupakan upaya untuk mengenang, menghayati dan meneladani semangat persatuan dan kesatuan, kegotong royongan dan kekeluargaan rakyat Indonesia yang secara bahu membahu mengatasi permasalahan dalam mempertahankan kedaulatan bangsa atas pendudukan kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia oleh tentara Belanda pada tahun 1948. Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2020 di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa dengan mengambil tema “ **Kesetiakawanan Nasional Melawan Covid-19**”.

Pelaksanaan peringatan HKSAN Kab. Bantul tahun 2020, di tengah masa pandemi Covid-19 dikemas lebih sederhana dengan mengedepankan protokol Kesehatan sebagaimana telah diamanatkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul, dengan tanpa mengurangi substansi dari semangat Kesetiakawanan Sosial Nasional itu sendiri. Substansi kegiatan peringatan HKSAN tahun 2020 adalah mengimplementasikan nilai-nilai dan semangat kesetiakawanan sosial bagi sesama warga, terlebih di saat warga Kabupaten Bantul berada dalam situasi pandemi Covid-19.

g) Kegiatan Pendampingan Kegiatan Karang Taruna.

Maksud kegiatan adalah memberikan pendampingan dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna Kabupaten Bantul

Program ini didukung anggaran sebesar Rp41.355.000,00 pada kegiatan ini telah terserap anggaran sebesar Rp41.355.000,00 dan capaian fisik 100%, serta telah menghasilkan keluaran berupa pemberdayaan karang taruna.

4) Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial.**a) Updating Keluarga Miskin**

Maksud kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah melaksanakan pendataan dan memperoleh basis data yang akurat dan valid sesuai keadaan rumah tangga yang sebenarnya yang dapat digunakan untuk penentuan prioritas sasaran bantuan program perlindungan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan. Tujuan dari kegiatan Updating Keluarga Miskin

- (1) Memperbaiki inclusion dan exclusion error pada DTKS.
- (2) Memperoleh data tingkat kesejahteraan rumah tangga.
- (3) Memperoleh data identitas rumah tangga di daerah.
- (4) Tersedianya data dari indicator instrument pendataan sebagai kriteria untuk memperoleh program perlindungan sosial.

Pada Program Kegiatan Updating Keluarga Miskin pada tahun 2020 ini anggaran sejumlah Rp440.459.738,- kemudian di refocusing menjadi sejumlah Rp298.240.500,- dengan capaian realisasi sebesar 99,86 % atau Rp297.810.500,-

Terkait adanya refocusing anggaran untuk dialokasikan pada penanganan Covid-19 berdampak pada Kegiatan dalam updating data yaitu kinerja dalam pendataan data terhambat karena tidak bisa mengadakan pertemuan langsung dengan warga yang akan didata karena harus menghindari tatap muka dengan warga pencari informasi tentang jaminan kesehatan, DTKS maupun informasi lain yang terkait dengan data. Juga kegiatan untuk mengumpulkan operator SIKS dan fasilitator dari desa jadi terhambat karena pembatasan kita untuk mengumpulkan orang cдеми menghindari penyebaran COVID19.

b) Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan

Maksud kegiatan ini adalah membantu dalam penyusunan rencana untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi keraguan dalam menyalurkan bantuan terutama pada lokasi-lokasi Rumah Tangga Miskin yang jauh dan tersebar, sehingga diharapkan penurunan angka kemiskinan akan lebih mudah dicapai karena mudahnya mengidentifikasi masyarakat miskin sehingga bantuan yang disalurkan tepat pada sasaran yang diinginkan. Tujuan dari kegiatan Penyusunan data base KK miskin penerima bantuan :

- (1) Mengidentifikasi jumlah RTM (RumahTangga Miskin) di Kabupaten Bantul berdasarkanvariabel miskin
- (2) Mengetahuipotensi Desa untuk penurunan RumahTangga Miskin
- (3) Terlaksananya Verifali data penduduk miskin dan rumah tangga miskin

Kegiatan dilakukan dalam bentuk Pra Musyawarah Desa yang di 40 Desa atau sebanyak 40 kali yang dilaksanakan pada bulan Maret Th. 2020 namun belum semua Desa melaksanakan Pra Musdes dikarenakan Pandemi Covid-19 di bulan berikutnya sehingga Musdes dihentikan. Hasil updating DTKS berhasil membenahi data inclusion error 3.424 Ruta dan eksklusion 3.650 Ruta. Penetapan SK DTKS ditetapkan sebanyak 2 kali dengan SK Menteri Sosial RI No. 19/HUK/2020 bulan Januari 2020 dan No. 146/HUK/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

Pada Progam Kegiatan Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan pada tahun 2020 ini anggaran sejumlah Rp1.127.460.350,- kemudian di refocusing menjadi Rp847.192.000,- dengan capaian realisasi sebesar 99,97 % atau Rp846.905.000,-

c. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 31 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Sosial

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Rujukan dan pengambilan pasien atau klien baik ke RSJ maupun ke panti tidak bisa diprediksi, begitu juga dengan pemakaman jenazah terlantar karena berupa layanan kepada masyarakat sesuai dengan kejadian/kasus di lapangan.	<p>Dalam upaya pemecahan permasalahan tersebut, Pelaksana teknis Kegiatan berkoordinasi dengan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dengan</p> <p>Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap keberadaan PMKS di wilayahnya.</p>
2	Terkait adanya refocusing anggaran untuk dialokasikan pada penanganan Covid-19 berdampak pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.	Memberlakukan koordinasi lintas sektor serta bekerjasama dengan Dinas Sosial Daerah istimewa yogyakarta serta Satuan Bakti Pekerja Sosial
3	Kegiatan dalam updating data yaitu kinerja dalam pendataan data terhambat karena tidak bisa mengadakan jumpa langsung dengan warga yang akan didata karena harus menghindari tatap muka dengan warga pencari informasi tentang jaminan kesehatan, DTKS maupun informasi lain yang terkait dengan data. Juga kegiatan untuk mengumpulkan operator SIKS dan fasilitator dari desa jadi terhambat karena pembatasan kita untuk mengumpulkan orang cdemi menghindari penyebaran COVID19.	Untuk mengatasi masalah tersebut ,maka kami mengoptimalkan penggunaan HP dengan melayani lewat online atau Aplikasi Whatsapps supaya pelayanan bias maksimal dan tetap bisa mengatasi permasalahan yang ada.

B. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja

Pada tahun 2020, angka pengangguran Kabupaten Bantul sebesar 4.06% (sumber: BPS Sakernas 2020). Masalah utama ketenagakerjaan yang dihadapi Kabupaten Bantul adalah kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang kurang optimal. Selain itu kesempatan kerja yang ada masih terbatas terutama di sektor formal, dan tambahan pada perlindungan tenaga kerja masih kurang. Pembangunan ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah, bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Ada indikasi bahwa ketersediaan lapangan kerja yang layak terutama di sektor informal masih terbatas.

Di sisi lain, kondisi dunia usaha yang belum kondusif, minimnya informasi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri juga merupakan salah satu kendala dalam upaya untuk menangani masalah pengangguran. Di satu sisi pencari kerja tidak mudah untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, di sisi lain para pengguna juga sulit mendapatkan pekerja sesuai dengan *job/jabatan* yang dibutuhkan.

a. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

- a) Kegiatan Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
- b) Kegiatan Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan
- c) Kegiatan Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan
- d) Kegiatan Uji kompetensi peserta latihan di BLK

- e) Kegiatan Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja
- f) Kegiatan Pelatihan Menjahit
- g) Kegiatan Pelatihan Mekanik
- h) Kegiatan Pelatihan Teknisi
- i) Kegiatan Pelaltihan Meubelair
- j) Kegiatan Pelatihan Juru Las
- k) Kegiatan Pelatihan Software
- l) Kegiatan Pelatihan Tata Boga
- m) Kegiatan Pelatihan Batik Tulis
- n) Kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris
- o) Kegiatan Pelatihan dari Anggaran APBN

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- a) Kegiatan Penanggulangan permasalahan ketenagakerjaan
- b) Kegiatan Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

3) Program Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

- a) Kegiatan penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- b) Kegiatan penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
- c) Kegiatan Pendampingan dewan pengupahan
- d) Kegiatan Pemberdayaan lembaga kerjasama tripartit daerah
- e) Kegiatan bimbingan teknis penyelesaian perselisihan industrial
- f) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
- g) Kegiatan Pendampingan Pembuatan Persyaratan kerja
- h) Kegiatan Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan Kerja

4) Program Penempatan Tenaga Kerja

- a) Kegiatan Penyuluhan ketenagakerjaan
- b) Kegiatan Penempatan tenaga kerja

5) Program Perluasan Kerja

- a) Kegiatan terapan teknologi tepat guna
- b) Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur
- c) Kegiatan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja lansia dan penyandang cacat
- d) Kegiatan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Maksud dan Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas, produktivitas, dan ketrampilan bagi tenaga kerja supaya mampu berwirausaha dan bekerja di perusahaan.

Implementasi program ini didanai dengan anggaran daerah sebesar Rp 2.071.405.900,00, setelah *refocusing* untuk penanganan covid-19 anggaran berubah menjadi Rp824.812.500,00 dan pada anggaran perubahan menjadi Rp 961.421.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp936.142.150,00 atau 97,7%.

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :

a) Kegiatan Pembinaan LPK

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan bimbingan dan pembinaan kepada 36 LPK agar dapat maju dan berkembang serta terakreditasi mengikuti perkembangan zaman atau revolusi industri 4.0. Namun karena adanya *refocusing* di

Seksi Kelembagaan Pelatihan maka kegiatan ini dilaksanakan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 guna meningkatkan keterampilan dan kompetensi masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Kegiatan ini menyerap anggaran murni sebesar Rp149.079.650,00 dan pada refocusing anggaran berubah menjadi Rp13.675.000,00 dan pada anggaran perubahan menjadi Rp267.735.500,00 dengan realisasi Rp256.610.500,00 atau 95.8

b) Kegiatan pemberdayaan wirausaha bagi lulusan pelatihan

Maksud dan tujuan kegiatan ini memberikan bekal kepada pencari kerja untuk mengembangkan keterampilan dalam berwirausaha mandiri.

Anggaran murni kegiatan ini Rp53.500.000,00 kemudian *direfocusing* semua untuk penanganan covid-19 sehingga kegiatan ini ditiadakan.

c) Kegiatan Pemagangan / On The Job Training (OJT) di perusahaan

Maksud dan tujuan kegiatan pemagangan ini adalah menyiapkan tenaga trampil bagi masyarakat dan lulusan pelatihan ketenagakerjaan agar memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja. Kegiatan pemagangan adalah bagian dari pelatihan yang dilaksanakan di perusahaan atau tempat kerja selama 3 bulan (75 hari kerja).

Dilaksanakan dengan sasaran 40 orang dengan anggaran Rp225.612.500,00 namun setelah adanya pandemi Covid-19 kegiatan Pemagangan/ OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan di refocusing sehingga sasaran peserta magang berubah menjadi 20 orang dengan anggaran sebesar

Rp118.275.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp118.275.000,00 atau 100%.

d) Kegiatan Uji Kompetensi Bagi Peserta Pelatihan di BLK

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk memberikan sertifikasi bagi peserta pelatihan, sehingga tenaga kerja dapat diperhitungkan dalam mencari pekerjaan.

Kegiatan ini menggunakan anggaran daerah sebesar Rp32.580.000,00 dengan realisasi Rp30.277.550,00 atau 92,9%, adapun pelatihan yang diujikan disajikan dalam tabel 3.32 berikut :

Tabel 3. 32 Uji Kompetensi Peserta Pelatihan BLK

No.	Jenis Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta yang Lulus Uji
1	Mekanik (Sepeda Motor)	10 s/d 11 Juli 2020	16 Orang
2	Software/Basic Office	16 s/d 17 Juli 2020	16 Orang

Sumber : Disnakertrans 2020

e) Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan pelatihan peningkatan produktivitas bagi 79 tenaga kerja melalui bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM “Emotional Quotient” Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang dilaksanakan 15 Februari 2020 di Hotel Queen Baturaden, Purwokerto, Jawa Tengah. Kegiatan ini menyerap anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp95.200.000,00 dan realisasi Rp91.185.000,00 atau 95.7%

f) Kegiatan Pelatihan Menjahit

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja , supaya mampu berwirausaha atau memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja.

Kegiatan ini menyerap anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp373.498.750,00 dengan sasaran 17 paket pelatihan, namun setelah adanya pandemi covid-19 kegiatan ini *direfocusing* sehingga sasarannya berubah menjadi 3 paket pelatihan dengan anggaran sebesar Rp133.749.400,00 dan realisasi sebesar Rp130.415.400,00 atau 97,5%.

Pelatihan dilaksanakan secara institusional di BLK dengan satu kali pelatihan pada 20 Februari s/d 26 Maret 2020 dengan peserta 16 orang . Selain itu, pelatihan lain dilakukan melalui *Mobile Training Unit* (MTU) dengan dua kali pelatihan pada 19 Februari s/d 12 Maret 2020 di Karangasem dan 10 Oktober s/d 5 November 2020 di Seloharjo, Pundong, Bantul dengan peserta masing-masing 16 orang.

g) Pelatihan Mekanik

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk Menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja , supaya mampu berwirausaha atau memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja.

Kegiatan ini menyerap anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp163.065.000,00 dengan sasaran 4 paket pelatihan, namun setelah adanya pandemi covid-19 kegiatan ini *direfocusing* sehingga sasarannya berubah menjadi 3 paket pelatihan dengan anggaran sebesar Rp123.787.500,00 dan realisasi sebesar Rp121.673.700,00 atau 98,2%.

h) Pelatihan Teknisi

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk Menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja , supaya mampu berwirausaha atau memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja.

Kegiatan ini menyerap anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp129.935.000,00 dengan sasaran 4 paket pelatihan,

namun setelah adanya pandemi covid-19 kegiatan ini *direfocusing* sehingga sasarannya berubah menjadi 1 paket pelatihan dengan anggaran sebesar Rp32.258.600,00 dan realisasi sebesar Rp32.240.000,00 atau 99,9%.

Pelatihan dilaksanakan melalui *Mobile Training Unit* (MTU) dengan satu kali pelatihan pada 20 Februari s/d 13 Maret 2020 di Murtigading, Sanden, Bantul dengan peserta 16 orang.

i) Pelatihan Meubelair

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk Menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja , supaya mampu berwirausaha atau memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja.

Kegiatan ini menyerap anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp92.715.000,00 dengan sasaran 2 paket pelatihan, namun setelah adanya pandemi covid-19 kegiatan ini *direfocusing* sehingga sasarannya berubah menjadi 1 paket pelatihan dengan anggaran sebesar Rp46.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp46.400.000,00 atau 99,39%

Pelatihan dilaksanakan secara institusional di BLK dengan satu kali pelatihan pada 23 Oktober s/d 30 November 2020 dengan peserta 16 orang.

j) Pelatihan Juru Las

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk Menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja , supaya mampu berwirausaha atau memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja.

Kegiatan ini menyerap anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp198.760.000,00 dengan sasaran 5 paket pelatihan, namun setelah adanya pandemi covid-19 kegiatan ini *direfocusing* sehingga sasarannya berubah menjadi 3 paket pelatihan dengan anggaran sebesar Rp73.090.000,00 dan realisasi sebesar Rp71.470.000,00 atau 97.7%.

Pelatihan dilaksanakan secara institusional di BLK dengan tiga kali pelatihan pada 21 Februari s/d 27 Maret dan 24 September s/d 16 oktober 2020 dua kelas sekaligus dengan masing-masing peserta 16 orang .

k) Pelatihan Software

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk Menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja , supaya mampu berwirausaha atau memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja.

Kegiatan ini menyerap anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp174.425.000,00 dengan sasaran 5 paket pelatihan, namun setelah adanya pandemi covid-19 kegiatan ini *direfocusing* semua.

l) Pelatihan Tata Boga

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk Menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja , supaya mampu berwirausaha atau memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja.

Kegiatan ini menyerap anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp74.955.000,00 dengan sasaran 2 paket pelatihan, namun setelah adanya pandemi covid-19 kegiatan ini *direfocusing* dengan sasaran berubah menjadi 1 paket pelatihan dengan anggaran sebesar Rp38.045.000,00 dan realisasi sebesar Rp37.595.000,00 atau 98,8%.

Pelatihan dilaksanakan melalui *Mobile Training Unit* (MTU) dengan satu kali pelatihan pada 19 September s/d 12 Oktober 2020 di Wirokerten, Banguntapan, Bantul dengan peserta 16 orang.

m) Pelatihan Batik Tulis

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk Menyiapkan tenaga terampil bagi pencari kerja , supaya mampu berwirausaha atau memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja.

Kegiatan ini menyerap anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp40.680.000,00 dengan sasaran 1 paket pelatihan, namun setelah adanya pandemi covid-19 anggaran kegiatan ini *direfocusing* semua.

n) Pelatihan Bahasa Inggris

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menyiapkan tenaga terampil bagi pemandu wisata khususnya, supaya biasa berkomunikasi dengan wisata manca.

Kegiatan ini menyerap anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp51.275.000,00 dengan sasaran 1 paket pelatihan, namun setelah adanya pandemi covid-19 anggaran kegiatan ini *direfocusing* semua.

o) Kegiatan Pelatihan dari Dana APBN

Kegiatan pelatihan dari dana APBN sebesar Rp1.743.030.000,00 dengan realisasi Rp1.460.210.000,00 atau 83.77%, dihasilkan pelatihan sebanyak 20 paket (320 orang) untuk pelatihan institusional di BLK.

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Maksud dan tujuan program ini untuk memberikan peluang dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya kepada masyarakat miskin dan pencari kerja. Program ini memberikan kontribusi terhadap menurunnya angka pengangguran.

Program ini menggunakan alokasi anggaran dana daerah sebesar Rp570.450.000,00 namun setelah pandemi covid-19 *direfocusing* berubah menjadi Rp379.825.000,00 dengan realisasi

Rp362.625.000,00 atau 95,4%. Keluaran dari program ini adalah sebagai berikut :

a) Kegiatan Penanggulangan permasalahan ketenagakerjaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan perlindungan kepada TKI Bantul. Untuk itu dibentuk tim penanggulangan permasalahan ketenaga kerjaan yang diketuai Bupati, terdiri dari Kantor Imigrasi Yogyakarta, dinas Tenaga Kerja DIY, BP3TKI, Polres Bantul, Kodim , BKAD, Satpol PP, Kesbangpol, Disdukcapil dengan tugas meminimalkan permasalahan yang berkaitan dengan tenaga kerja.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp13.900.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp12.300.000,00 . atau 88.4%

Pada tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul menangani sepuluh permasalahan penempatan tenaga kerja yang ditempatkan di dalam maupun di luar negeri dengan rincian disajikan pada Tabel 3.33 berikut :

Tabel 3. 33 Penanggulangan Masalah Ketenagakerjaan

No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah yang Terselesaikan
1	Trafficking	0	0
2	Kecelakaan kerja di luar negeri	2	2
3	Penahanan dokumen	1	1
4	Tenaga kerja dalam negeri	7	7

b) Kegiatan Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan pelayanan dan informasi ketenagakerjaan yang cepat dan akurat.

Kegiatan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja dilaksanakan dengan anggaran daerah sebesar Rp556.550.000,00 namun dengan adanya pandemi covid-19 difocusing menjadi

Rp365.925.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp350.325.000,00 (95,7%).

Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan antar kerja melalui peningkatan efektivitas informasi pasar kerja dan bursa kerja online. Realisasi dari kegiatan tersebut adalah:

3) Program perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja swasta, BUMN, BUMD dan meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja di perusahaan melalui pengembangan hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan jumlah tenaga kerja yang semakin sejahtera dan terlindungi hak-hak mereka

Program ini menggunakan dengan dana APBD sebesar Rp1.076.863.000,00, namun setelah pandemi covid-19 mengalami refocusing, sehingga anggaran berubah menjadi Rp551.125.200,00 dan realisasi sebesar Rp533.217.800,00 atau 96,7%.

Adapun keluaran program berupa pelaksanaan hubungan industrial serta pengawasan, perlindungan, dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan pencegahan agar tidak terjadi perselisihan dan melakukan mediasi untuk menyelesaikan semua pengaduan yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Bantul apabila terjadi perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat, dan murah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kegiatan ini menyerap anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp. 224.222.000,00, namun setelah adanya pandemi covid-19 kegiatan ini difocusing sehingga anggaran berubah menjadi Rp 194.177.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 188.637.500,00 atau 97,14%.

b) Kegiatan Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan perlindungan kepada pekerja, dan memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh pekerja/buruh.

Kegiatan ini menyerap anggaran sebanyak Rp297.333.500,00 namun setelah masa pandemi covid-19 kegiatan ini mengalami *refocusing* sehingga anggaran menjadi Rp66.362.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp66.362.500,00 atau 100% dengan rincian kegiatan:

- (1) Kegiatan FGD Peralihan Peserta BPJS Kesehatan dari PBI (Penerima Bantuan Iuran) ke PPU (Pekerja Penerima Upah) maupun sebaliknya bertujuan memberikan pemahaman bagi pekerja, pengusaha, organisasi pengusaha dan Serikat Pekerja (SP) untuk perlindungan hukum dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (**Jamsostek**) serta menekan pelanggaran hukum terkait Jaminan Sosial Tenaga Kerja (**Jamsostek**) di perusahaan.
- (2) Percepatan penanganan dampak covid-19. Dalam rangka percepatan penanganan dampak covid-19 dengan banyaknya pekerja yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan dirumahkan, maka Dinas mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan program pemerintah pusat dalam pemberian kartu prakerja. Kegiatan ini dilaksanakan dengan membentuk Tim Monitoring dan Pendataan kartu Prakerja yang melibatkan

seluruh unsur dinas baik pejabat struktural, fungsional maupun PHL. Adapun tugas dari tim dalah melakukan monitoring dan pendataan terhadap perusahaan terdampak covid-19 serta pendataan pekerja perusahaan sebagai bahan data dalam pemberian program pemerintah pusat terkait kartu Prakerja.

c) Kegiatan pendampingan dewan pengupahan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk merumuskan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Kegiatan pendampingan ini menggunakan anggaran daerah sejumlah Rp 116.925.000,00 namun setelah masa pandemi kegiatan ini mengalami refocusing sehingga anggarannya berubah menjadi 63.135.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 58.326.800,00 atau 92,38%.

Dasar pembentukan Dewan Pengupahan Pabupaten Bantul yaitu SK Bupati Nomor 219 Tahun 2017 Tanggal 14 Juni 2017. Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul (Depekab) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan keanggotaan terdiri dari unsur Tripartit yaitu wakil dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bantul, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bantul, pakar ekonomi makro dari perguruan tinggi (UMY), serta unsur pemerintah yaitu BPS Bantul, Disperindagkop, Bagian Hukum, dan Disnakertrans. Depekab bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) ke Gubernur.

d) Kegiatan pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di daerah demi kepentingan

bersama yang dilandasi oleh semangat musyawarah untuk mencapai mufakat.

Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp. 57.900.000,00 namun setelah masa pandemi kegiatan ini mengalami refocusing sehingga anggarannya berubah menjadi Rp 27.107.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 25.482.500,00 atau 94,05% meliputi dua kegiatan yaitu pemberdayaan lembaga kerjasama tripartit daerah dan pemberdayaan kerjasama Bipartit. Kegiatan ini terdiri dari :

(1) Sosialisasi Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit

Sosialisasi Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit hanya sekali pelaksanaan dan telah dilaksanakan pada tgl. 10 September 2020 di Radja Resto & Meeting Jalan Ring Road Selatan Bangunharjo, Sewon Bantul, dengan menghadirkan 30 orang dari unsur pengusaha dan pekerja yang mempunyai jumlah tenaga kerja diatas 50 orang yang ada di Kabupaten Bantul.

(2) Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kerja Bipartit di perusahaan ini langsung kami laksanakan ke Perusahaan-perusahaan dengan memberikan pengetahuan tentang perusahaan yang telah memiliki karyawan atau pekerja lebih dari 50 (lima puluh) orang wajib membentuk LKS Bipartit di perusahaan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 32/MEN/XII/2008 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit.

e) Kegiatan bimbingan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan bimbingan teknis kepada perusahaan supaya dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp 86.700.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 86.700.000,00 atau 100% dengan sasaran 300 orang peserta petugas HRD di Kabupaten Bantul yang berasal dari HRD, Pengusaha, dan Asosiasi Pengusaha. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali.

f) Kegiatan peningkatan kesejahteraan pekerja

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan wadah kegiatan kepada buruh dikabupaten Bantul pada saat memperingati hari buruh, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya : demo.

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 129.350.000,00 namun setelah masa pandemi anggaran kegiatan ini mengalami refocusing sehingga anggaran berubah menjadi Rp 10.460.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.937.500,00 atau 85,44%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), dengan tujuan agar para buruh (karyawan perusahaan) dapat saling berkomunikasi dan saling berkoordinasi antar karyawan perusahaan yang ada di Kabupaten Bantul.

g) Kegiatan pendampingan pembuatan persyaratan kerja

Kegiatan ini dibiayai oleh APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp. 91.632.500,00 namun setelah masa pandemi anggaran

kegiatan ini mengalami refocusing sehingga anggaran berubah menjadi Rp 68.607.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 65.975.000,00 atau 96,16%. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan pendampingan kepada perusahaan-perusahaan tentang persyaratan kerja bagi perusahaan yang belum menerapkan syarat-syarat kerja, upah minimum dan lain-lain.

Kegiatan ini mempunyai 2 (Dua) sub. Kegiatan yaitu Sosialisasi Sinergitas Sarana Persyaratan Kerja dan sosialisasi Berbagai Peraturan tentang Ketenagakerjaan.

(1) Sosialisasi Sinergitas Sarana Persyaratan Kerja

Sosialisasi Sinergitas Sarana Persyaratan Kerja dalam satu tahun Anggaran 2020 melaksanakan sosialisasi 3 (Tiga) kali dengan sasaran bagi Pengusaha atau Usaha Kecil menengah ketas dan pelaku usaha perusahaan – perusahaan yang masih baru atau jumlah tenaga kerjanya masih 50 orang kebawah. Dengan tujuan untuk memberikan Sinergitas antar pengusaha dan Pekerja agar terjadi sinergi yang baik dan mengurangi atau menekan akan terjadinya perselesihan hubungan Industrial di dalam perusahaan tersebut. Perusahaan bisa mengetahui dan memahami Aturan dan Regulasi yang sesuai dengan Undang-Undang KetenagaKerjaan.

(2) Sosialisasi Berbagai Peraturan tentang Ketenagakerjaan

Sosialisasi Berbagai Peraturan tentang Ketenagakerjaan dilaksanakan selama 2 (dua) kali dengan sasaran atau tujuan perusahaan – perusahaan yang masih baru atau perusahaan yang peraturan perusahaannya sudah mati atau belum diperpanjang atau diperbarui.

Setelah diadakan sosialisasi Berbagai Peraturan tentang Ketenagakerjaan perusahaan kemudian menindak lanjuti dari sosialisasi tersebut.

h) Kegiatan pemberdayaan sarana kesejahteraan kerja

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan pekerja, kepastian hak dan kewajiban pekerja, pengusaha, juga perbaikan kesejahteraan pekerja, serta untuk memotivasi peningkatan kinerja.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran APBD sebesar Rp. 67.800.000,00 namun setelah masa pandemi difocusing sehingga anggaran berubah menjadi Rp 34.575.000,00 dengan realisasi Rp 32.796.000,00 atau 94,85%. Selama tahun 2020 terlaksana 2 kali sosialisasi ke perusahaan secara klasikal pada tanggal 22 Maret 2020 di Ruang Rapat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Bantul dan tanggal 22 September 2020 di omah kampung yang masing-masing diikuti 60 peserta dan 2 kali pendampingan SP/SB pada tanggal 7 Februari 2020 di Ruang Rapat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Bantul dan Tanggal 24 Februari di PT. Samitex Sewon yang masing-masing diikuti 20 peserta.

4) Program Penempatan Tenaga Kerja

Maksud dan tujuan program ini adalah mempeberikan peluang kepada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki.

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan penempatan pencari kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dengan anggaran sebesar Rp253.339.500,00 namun setelah masa pandemi covid-19 mengalami refocusing sehingga anggaran berubah menjadi Rp201.176.000,00 dengan realisasi sebesar Rp187.875.500,00 atau 93,3%.

Keluaran dari program ini adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan penyuluhan ketenagakerjaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang peraturan ketenagakerjaan, sehingga apabila masyarakat ingin menjadi TKI melalui jalur yang legal.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp. 196.989.500,00 namun setelah masa pandemi mengalami refocusing sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 171.095.000,00 dengan realisasi Rp. 160.769.500,00 (93.9%).

b) Kegiatan penempatan tenaga kerja melalui (AKL, AKAD,AKAN)

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah. mempertemukan antra pemberi kerja dan pencari kerja.

Pada tahun 2020,Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp. 56.350.000,00 namun setelah masa pandemic mengalami refocusing sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 30.081.000,00 dengan realisasi Rp. 27.106.000,00 (90,11%).

Tabel 3. 34 Realisasi Penempatan Melalui AKL, AKAD, dan AKAN
(Berdasarkan Jumlah Orang)

No.	Bulan	AKL		AKAD		AKAN		JML		JML Total	Tujuan Penempatan
		L	P	L	P	L	P	L	P		
1	Januari	5	49		23	4	9	9	81	90	Bantul, Batam, Malaysia
2	Februari	27	113		29	1	5	28	147	175	Bantul, Batam, Malaysia
3	Maret	50	144			1	1	51	145	196	Bantul, Malaysia
4	April	8	60					8	60	68	Bantul
5	Mei	14	113					14	113	127	Bantul
6	Juni	15	41					15	41	56	Bantul
7	Juli	32	113					32	113	145	Bantul
8	Agustus	90	204					90	204	294	Bantul
9	September	113	258					113	258	371	Bantul
10	Oktober	35	385					35	385	420	Bantul
11	November	80	301			2			301	383	Bantul, Korea, Jepang
12	Desember	88	143							231	Bantul
	Jumlah	557	1924	-	52	8	15	395	1991	2556	

Sumber : Disnakertrans 2020

Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah pembinaan dan pembekalan kepada tenaga kerja dengan sasaran pencari kerja

AKAD pada bulan Januari dan Februari 2020 di Disnakertrans Kabupaten Bantul sebanyak 52 orang perempuan. Tenaga kerja yang akan diberangkatkan dengan tujuan antar daerah diutamakan ke Batam. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penipuan yang dialami tenaga kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memfasilitasi dari proses seleksi, mempertemukan pencari kerja dan perusahaan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, serta penanggulangan permasalahan penempatan tenaga kerja yang tujuannya adalah menciptakan situasi yang kondusif untuk bekerja terhindar dari berbagai permasalahan. Selain itu juga mengadakan koordinasi dan pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja dengan dua lembaga.

5) Program Perluasan Kerja

Maksud dan tujuan Program perluasan kerja upaya penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan usaha produktif yang berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya alam, sumberdaya manusia, serta terapan teknologi yang tepat guna sehingga tercipta dan terbentuk wirausaha baru.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran APBD sebanyak Rp 18.667.964.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 18.108.836.492,00 atau 97.04% Program ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan terapan teknologi tepat guna

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk membantu tenaga kerja meningkatkan produksinya sehingga produk yang dihasilkan lebih bagus dan banyak.

Kegiatan ini mendapatkan anggaran dari APBD sebesar Rp. 91.070.000,00 dengan realisasi Rp 90.670.000,00 atau 99.5 %.Kegiatan ini dilaksanakan di dua desa sasaran yang disajikan dalam Tabel 3.35

Tabel 3. 35 Kegiatan Terapan Teknologi Tepat Guna

No.	Kegiatan	Desa Sasaran	Jumlah Peserta	Sumber Dana
1	Pelatihan Olahsan Makanan	Kalangan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul	20 Orang	APBD
2	Pelatihan Pengolahan daur ulang limbah plastik	Desa Argorejo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul	20 Orang	APBD

Sumber : Disnakertrans 2020

b) Kegiatan padat karya produktif dan infrastruktur

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah upaya dalam menunjang perekonomian daerah dan nasional dibutuhkan beberapa unsur penunjang, yang salah satunya yaitu ketersediaan prasarana infrastruktur. Prasarana infrastruktur tersebut dianggap memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mobilisasi masyarakat maupun barang dari maupun menuju sentra social ekonomi. Diharapkan dengan adanya pembangunan prasarana infrastruktur dapat memiliki dampak positif di berbagai bidang.

Selain itu dilakukan pengembangan kebijakan perluasan kesempatan kerja, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat dengan system padat karya.

Pada tahun anggaran 2020, Kabupaten Bantul memperoleh 142 paket/lokasi melibatkan 26 orang/paket dan dari Bantuan Keuangan Khusus APBD DIY 29 paket melibatkan 52 orang/paket. Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran APBD sebesar Rp 18.448.287.000,00 dengan realisasi Rp. 17.889.559.492,00 (96,9%).

c) Kegiatan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang mampu bekerja secara mandiri menjadi wirausaha

baru atau pengusaha kecil, meningkatkan kemampuan managerial, dan ketrampilan teknis pemula usaha dan usaha mikro. Sasaran kegiatan adalah pencari kerja terutama angkatan kerja muda lulusan minimal SLTA yang memiliki rintisan usaha. Kegiatan ini diikuti oleh 80 peserta.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran APBD sebesar Rp. 377.548.000,00 namun setelah masa pandemi kegiatan tersebut mengalami refocusing sehingga anggaran berubah menjadi Rp 74.057.000,00 dengan realisasi Rp. 74.057.000,00 atau 100%.

d) Kegiatan Pemanduan pembinaan usaha tenaga kerja lansia dan penyandang cacat

Maksud dan tujuan Pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja lansia dan penyandang cacat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu tenaga kerja khusus lansia meningkatkan bakat dan minat mereka sehingga mereka dapat mandiri serta mampu membiayai diri sendiri maupun keluarganya.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran APBD sebesar Rp 54.550.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 54.550.000,00 realisasi (100%).

Tabel 3. 36 Kegiatan Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat

No.	Kegiatan	Desa Sasaran	Jumlah Peserta	Sumber Dana
1.	Pengolahan daur ulang limbah plastik	Gesikan, Panggunharjo, Sewon	20 orang	APBD
2.	Pengolahan Anyaman bambu	Karang asem, Munthuk, Dlingo	20 orang	APBD
3.	Pengolahan Anyaman bambu	Desa Wonolelo, Pleret	20 orang	APBD

Sumber : Disnakertrans 2020

c. Permasalahan Dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan tenaga kerja

Tabel 3. 37 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Tenaga Kerja

No.	Permasalahan	Solusi
1	Kesempatan kerja yang masih terbatas.	Intensifikasi pencarian lowongan pekerjaan melalui <i>job canvassing</i> dan informasi pasar kerja melalui bursa kerja <i>on-line</i> lebih ditingkatkan.
2	Kualitas tenaga kerja tidak memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.	Melaksanakan jenis pelatihan yang dibutuhkan pasar kerja
3	Produktivitas tenaga kerja masih sangat rendah.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan tingkat lanjut. • Memperbanyak dan mengintensifkan pelatihan kewirausahaan.
4	Inkonsistensi antar peraturan/perundangan terkait ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Intensifkan konsultasi ke K/L baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sumber: *Disnakertrans, 2020*

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

- a) Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi dan KIE Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
- b) Pengembangan Kabupaten Layak Anak
- c) Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul

2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

- a) Penyusunan Pilah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- b) Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- c) Operasional Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
- d) Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP)

3) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

- a) Pendampingan Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
- b) Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- c) Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Maksud dari program ini adalah untuk mewujudkan kabupaten layak anak di Kab. Bantul melalui kegiatan Pemberdayaan/Pelatihan Ketrampilan. Pembangunan nasional ditujukan untuk seluruh warga negara tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Sampai saat ini telah banyak kemajuan pembangunan yang dicapai, namun demikian kesenjangan gender masih terjadi di berbagai bidang pembangunan. Kesenjangan gender tentu merugikan kaum perempuan. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan perempuan mutlak diperlukan untuk meningkatkan status dan kedudukan perempuan di berbagai bidang pembangunan, namun demikian implementasinya di tingkat daerah, terutama yang terkait dengan anggaran responsif gender belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Tujuan pelaksanaan program ini adalah :

- a) Terbentuknya kecamatan dan desa yang layak anak
- b) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Konvensi Hak Anak
- c) Terbentuknya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia di Kabupaten Bantul

Pada program ini di Tahun 2020 semula mendapat anggaran sebesar Rp161.535.825,- kemudian ter-refokusing sebesar 69% atau Rp 111.343.045,- menjadi Rp50.192.780,- dengan capaian realisasi sebesar 100% atau Rp50.192.780,-.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan meliputi 3 Kegiatan :

(1) Kegiatan Pelaksanaan sosialisasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kesetaraan gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Sosialisasi KIE Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah diselenggarakan dengan peserta kegiatan meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan forum anak-anak di enam desa se-Kabupaten Bantul. Dengan upaya sosialisasi ini diharapkan pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan semakin meningkat. Karena Anggaran Kegiatan ini sebagian besar difokusing sehingga hanya dapat dilaksanakan dengan mengundang sebanyak 27 orang dari semula perencanaan 150 orang. Sosialisasi KIE dilaksanakan 1 kali dengan jumlah peserta 27 orang dilaksanakan bulan oktober di Dinas Sosial P3A Kab. Bantul.

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan Anak dengan pagu dengan pagu anggaran Rp2.361.500 sudah terealisasi sebesar Rp2.361.500 atau 100%.

(2) Kegiatan Pengembangan Kabupaten layak anak

Sosialisasi Kecamatan Layak, Aman dan Ramah Anak. Maksud dari sosialisasi ini karena untuk mewujudkan Bantul sebagai kabupaten layak anak dengan tujuan Kecamatan

setelah tersosialisasi diharapkan segera menindaklanjuti untuk membentuk Forum Layak Anak.

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan pagu anggaran Rp27.568.638 sudah terealisasi sebesar Rp27.568.638 atau 100%.

(3) Kegiatan Operasional sekretariat anak Bantul

(1) Konggres Anak Bantul

Maksud dan tujuan konggres: menjembatani suara/apresiasi anak dalam hal kepentingan anak; sebagai wadah untuk memenuhi hak anak dalam berpartisipasi mewujudkan KLA. Kongres Anak Bantul yang diikuti perwakilan Fonaba/SMP-SMA fasilitator Fonaba merupakan kongres ke-11 dan terselenggara tanggal 15 Februari 2020 di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bantul dengan peserta 150 anak.

Pelaksanaan Kegiatan Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul dengan pagu anggaran Rp20.262.642 sudah terealisasi sebesar Rp20.262.642 atau 100%.

2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Program ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan berupa konsolidasi penguatan Lembaga yang konsern terhadap pengarusutamaan gender.

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak meliputi 4 Kegiatan :

a) Kegiatan Penyusunan Pilah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Kegiatan ini diselenggarakan bulan Februari sampai dengan Maret 2020 (rapat koordinasi rutin tim penyusun buku

yang dilaksanakan perbulan di bulan februari dan maret) berupa penyusunan buku data pilah gender dan anak, sosialisasi data terpilah berdasarkan gender yang menjadi Tim adalah perwakilan dari semua OPD se Kabupaten Bantul. bulan februari dan maret, di Ruang Rapat Dinsos P3A Kab. Bantul dengan peserta semua OPD di kab. Bantul.

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Pilah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan pagu anggaran Rp16.950.393 sudah terealisasi sebesar Rp16.950.393 atau 100% .

b) Kegiatan Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Kegiatan ini dilaksanakan bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020 yaitu berupa bimbingan teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dengan peserta semua Kasubag Program OPD se-Kabupaten Bantul. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan pagu anggaran Rp20.835.500 sudah terealisasi sebesar Rp20.835.500 atau 100% pada bulan Februari di RR Dinsos P3A Kab. Bantu dengan peserta 40 orang selama 3 hari.

c) Kegiatan Operasional Gabungan Organisasi Wanita

Kegiatan ini berupa sosialisasi program GOW dengan peserta organisasi Wanita anggota GOM yang dilaksanakan pada bulan Februari Tahun 2020. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dengan pagu anggaran Rp9.063.750 sudah terealisasi sebesar Rp9.063.750 atau 100% di Omah Kampung dengan peserta anggota GOW yang berjumlah 50 orang.

d) Kegiatan Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan

Kegiatan ini berupa pengajian rutin anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang sudah terlaksana di bulan Februari-Maret 2020 dengan peserta anggota DWP. Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) dengan pagu anggaran Rp11.845.000 sudah terealisasi sebesar Rp11.845.000 atau 100%. di Bangsal Rumah Dinas Bupati Bantul dengan peserta 100 orang anggota DWP, narasumber oleh Ustadzah Tri Sulistyarini.

3) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak terutama pada keamanan terhadap tindak kriminal terhadap mereka. Adapun pelaksanaan program kegiatan ini bertujuan untuk :

- Memberikan rasa aman dan nyaman kepada kaum perempuan dan anak untuk hidup di Kab. Bantul.
- Meningkatkan kapasitas SDM Lembaga-lembaga penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Terciptanya koordinasi dan kolaborasi Lembaga dan mitra kerja penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak.

a) Kegiatan Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang P3A pada program ini hanya pada Kegiatan Peningkatan SDM Forum

Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan rincian sebagai berikut :

Pelatihan Penanganan, Pencatatan dan Pelaporan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, dilaksanakan 2 angkatan masing-masing 2 hari dengan peserta 33 orang dari unsur perangkat desa di kecamatan imogiri dan bambanglipuro pada bulan november..

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan pagu anggaran Rp29.080.750 sudah terealisasi sebesar Rp29.080.750 atau 100%

Pelaksanaan kegiatan ini mengalami refocusing untuk penanganan pandemic Covid-19. Dan upaya pemecahan permasalahan tersebut, Pelaksana teknis Kegiatan memaksimalkan anggaran yang tersisa untuk memadatkan materi yang disampaikan dengan sumber daya yang ada.

b) Kegiatan Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap perempuan tindak kekerasan

Maksud dari kegiatan pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan adalah memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Tujuan dari kegiatan pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan ini adalah memberikan pelayanan sebagai berikut:

(1) Pengaduan Masyarakat;

Bidang pelayanan pengaduan atau laporan merupakan langkah awal bagi korban kekerasan untuk mendapatkan pelayanan di UPTD PPA. Di bagian pelayanan pengaduan

ini korban yang datang baik datang sendiri maupun ditemani.

Yang meliputi 131 kasus aduan, terkait aduan kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pencabulan, perkosaan, kekerasan psikis, kekerasan fisik, penelantaran dan kekerasan dalam pacaran.

(2) Penjangkauan korban

Tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan permasalahan perempuan dan anak di wilayah yang perlu dibuktikan serta untuk ditindaklanjuti.

50 penjangkaun korban, meliputi pelecehan seksual, pencabulan dan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kecamatan Bantul, Sewon, Kasihan, Pandak, Pajangan, Sanden, Dlingo, Srandakan, Banguntapan, Kretek dan Pandak.

(3) Pengelolaan kasus;

Proses menganalisa kasus sesuai dengan kebutuhannya, apakah perlu pendampingan hukum, psikologi atau rehab sosial. Kasus kekerasan psikis, kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pencabulan dan gugat cerai.

(4) Penampungan sementara

Apabila korban terancam keselamatannya bisa ditampung sementara di shelter di UPTD PPA. 10 orang korban dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran dan kekerasan fisik.

(5) Mediasi;

Penanganan/penyelesaian kasus persengketaan atau konflik yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Pendekatan bijak yang mengaktualisasikan nilai-nilai musyawarah mufakat secara optimal.

(6) Pendampingan korban.

Pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak antara lain pendampingan hukum, psikologi, kesehatan, rohani, rehabilitasi sosial.

Penerima manfaat dari program ini adalah Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, pelecehan seksual, pencabulan, kehamilan tidak diinginkan, *trafficking*, maupun penelantaran. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah keterbatasan anggaran karena refocusing untuk penanganan pandemic Covid-19. Dalam upaya pemecahan permasalahan tersebut, Pelaksana teknis Kegiatan memaksimalkan anggaran yang tersisa untuk memadatkan materi yang disampaikan dengan sumber daya yang ada.

Kegiatan pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan ini sudah terlaksana sesuai dengan kegiatan diatas berjumlah 57 kegiatan rapat kasus diantaranya kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pencabulan, perkosaan, kekerasan psikis, kekerasan fisik, penelantaran dan kekerasan dalam pacaran. dan 3 pelaksanaan pelayanan *Shelter/Rumah* aman sementara. Kegiatan Pendampingan Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan dengan pagu anggaran Rp235,300,000 sudah terealisasi sebesar Rp233,315,000 atau 99% dengan sisa Rp1.985.000,- karena adanya efisiensi.

c) Kegiatan Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

Maksud dari kegiatan pelaksanaan pemulihan dan penjangkauan lingkungan korban kekerasan perempuan dan anak adalah memberikan edukasi atau pemahaman kepada

lingkungan masyarakat di sekitar korban untuk memiliki kesadaran melapor dan mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tujuan dari kegiatan pelaksanaan pemulihan dan penjangkauan lingkungan korban kekerasan perempuan dan anak adalah meningkatkan kesadaran (awareness) masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya terkait adanya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, diharapkan masyarakat dapat membangun lingkungan yang kondusif dan nyaman bagi korban serta mendukung pemulihan kondisi korban.

Penerima dari Kegiatan ini adalah Korban, keluarga korban dan masyarakat di lingkungan sekitar terjadinya tindak kekerasan. Adapun ditahun 2020 ada beberapa kendala dalam pelaksanaan program ini antara lain: Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah keterbatasan anggaran karena refocusing untuk penanganan pandemic Covid-19. Dalam upaya pemecahan permasalahan tersebut, Pelaksana teknis Kegiatan memaksimalkan anggaran yang tersisa untuk memadatkan materi yang disampaikan dengan sumber daya yang ada.

Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak dengan pagu anggaran Rp50,840,220 sudah terealisasi sebesar Rp50,840,220 atau 100%.

c. Permasalahan Dan Solusi

Tabel 3. 38 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi.	- mewujudkan lingkungan yang ramah , aman dan layak untuk Perempuan dan anak. - mensosialisasikannya di tingkat Kecamatan dan Desa se Kabupaten Bantul.
2	Masih rendah tingkat kesadaran melapor dan mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan kesadaran (<i>awareness</i>) masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya terkait adanya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
3	Masa pandemi covid 19 anggaran difokuskan sehingga beberapa kegiatan tidak maksimal dan tidak sesuai perencanaan dalam penyelenggaraannya.	memaksimalkan anggaran yang tersisa untuk memadatkan materi yang disampaikan dengan sumber daya yang ada.

3. Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman.

Pangan dalam bentuk ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sementara subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola

pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan, dan kehalalannya.

a. Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan dalam urusan Pangan selama tahun 2020 adalah **Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan**. Adapun kegiatan yang terlaksana adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
- 2) Kegiatan Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan
- 3) Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan
- 4) Kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Maksud dan tujuan adalah untuk meningkatkan ketersediaan pangan, memperkecil kesenjangan harga antara sentra produksi dan bukan sentra produksi, dan agar konsumsi pangan masyarakat semakin beragam, bergizi, seimbang, dan aman. *Output* program adalah Angka Ketersediaan Pangan Pokok dan Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi. Capaian indikator program pada Tahun 2020 adalah Angka Ketersediaan Pangan Pokok sebesar 470 Ton dan Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi adalah sebanyak 9 kelompok bahan pangan.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dilaksanakan melalui kegiatan yaitu:

a) Kegiatan Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Maksud dan tujuan kegiatan Peningkatan Penganekaragaman konsumsi dan Keamanan Pangan adalah untuk meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta meningkatkan konsumsi pangan masyarakat sehingga semakin beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kegiatan Peningkatan Penganekaragaman konsumsi dan Keamanan Pangan telah dilaksanakan dengan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp280.030.500,00 dengan realisasisebesar Rp277.851.500,00 atau 99.22%. Keluaran dari kegiatan ini yaitu :

(1) Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan bagi KWT

Pada tahun 2020 terdapat 5 KWT yang diberikan kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan bagi KWT. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari dengan diikuti oleh 100 peserta dari 5 (lima) KWT penerima kegiatan dengan jumlah anggota masing-masing 20 orang. Daftar KWT penerima kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.39

Tabel 3. 39 Daftar KWT Peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan

No.	KWT	Alamat	Pendamping
1.	KWT Mekar Sari	Mojosari, Wonolelo, Pleret	Budi Riyanto
2.	KWT GuyubRukun	Kalimundu, Gadingharjo, Sanden	Teja Kumala
3.	KWT Nusa Indah	Bongsren, Gilangharjo, Pandak	Kiswanto
4.	KWT Kersan Mandiri	Kersan, Triwidadi, Pajangan	Zeny
5.	KWT PantiWicoro	Tlogo, Sumberagung, Imogiri	Amjad

Selain itu, dengan anggaran APBD Perubahan dilaksanakan pula Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk 17 KWT dari 17 kecamatan di Kabupaten Bantul mulai tanggal 30 November 2020 s.d. 14 Desember 2020. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari di setiap KWT dengan peserta 15 orang. Pada pelatihan ini, setiap KWT

mendapatkan bahan percontohan dan saprodi berupa: benih cabai rawit, cabai merah, terong, tomat, seledri, kangkung, kacang panjang, pare, gambas, loncang, sawi sendok, sawi caisim, bayam unggul, pepaya california, benih lele, polybag, kotak nampan bambu dan kayu, pupuk organik, pelet lele, starter EM4, tetes tebu, dan PGPR.

Tabel 3. 40 Daftar KWT Penerima Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan

No	Nama KWT	Alamat
1.	KWT DEWI SRI	Daraman Srimartani Kec. Piyungan Bantul
2.	KWT MAJU MAKMUR	Singosaren 1 Singosaren Kec. Banguntapan
3.	KWT SAFA MARWA	Wonokromo 1 Pleret Kec. Pleret
4.	KWT MELATI	Ngenep Terong Kec. Dlingo
5.	KWT NGUDI RAHAYU	Butuh Patalan Kec. Jetis
6.	KWT BERSEMI	Dukuh Imogiri Kec.Imogiri
7.	KWT SRIKANDI	Tangkil Srihardono Kec. Pundong
8.	KWT SUMBER REJEKI	Pandes Panggunharjo Kec. Sewon
9.	KWT SRI REJEKI	Sutran Kadibeso Sabdodadi Kec. Bantul
10.	KWT KEBON REJO	Dayu Gadingsari Kec.Sanden
11.	KWT SARI DEWI	Gubug Argosari Kec. Sedayu
12.	KWT MEKARSARI	Santan Guwosari Kec. Pajangan
13.	KWT BANGKIT	Gesikan Wijirejo Kec. Pandak
14.	KWT SRI REJEKI	Donotirto Bangunjiwo Kec. Kasihan
15.	KWT MULTISARI	Jopaten Poncosari Kec. Srandakan
16.	KWT EKOWATI	Jebugan Tirtomulyo Kec. Kretek
17.	KWT SUKA MAJU	Palihan Sidomulyo Kec. Bambanglipuro

(2)Pemanfaatan Pekarangan bagi Sekolah Dasar

Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan Bagi SD dilaksanakan di SD yang lokasinya berdekatan dengan wilayah KWT penerima kegiatanPelatihan Pemanfaatan Pekarangan. Pelaksanaan pelatihan bekerjasama dengan KWT. Pelatihan ini diikuti oleh 50 siswa dari 2 Sekolah Dasar (SD) yaitu SDN Wonolelo, Pleret dan SDN Gadingharjo, Sanden. Bahan

praktek berupa bibit dan saprodi juga digunakan dalam pelatihan ini untuk diaplikasikan di pekarangan sekolah.

(2) Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, mutu, dan gizi pangan, Kementerian Pertanian berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pangan segar (belum diolah). Pangan segar produk pertanian meliputi pangan segar asal tumbuhan dan pangan segar asal hewan. Jika diturunkan ke tingkat kabupaten, maka pengawasan PSAT berada di Bidang Ketahanan Pangan, sedangkan PSAH berada di Bidang Peternakan.

Pengujian dilaksanakan terhadap 40 sampel sampel pangan segar dan sampel pangan olahan yang diambil dari beberapa pasar dan kantin SD. Berdasarkan tabel hasil pengujian terdapat 3 sampel positif pada pengujian formalin yaitu pada sampel Teri Nasi dan Pethek.

(3) Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH yang dimaksud dalam kegiatan ini merupakan PPH pada konsumsi pangan. PPH merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kualitas konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Bantul. Tahapan dalam perhitungan skor PPH adalah petugas lapangan 17 kecamatan melakukan survey ke rumah tangga sampel untuk mengambil data. Setiap desa diambil 10 rumah tangga sampel sehingga

terdapat 750 sampel dari 75 desa di Kabupaten Bantul. Hasil survey diolah dianalisis skor PPH nya.

Hasil perhitungan analisis PPH tahun 2020 sebesar 91,4. Skor tersebut lebih rendah dibanding tahun 2019 yaitu sebesar 93,7. Hasil tersebut mengindikasikan kualitas konsumsi pangan masyarakat Bantul menurun. Hal ini diakibatkan oleh berkurangnya penghasilan masyarakat karena pandemi Covid-19 sehingga mengurangi daya beli terhadap bahan pangan yang beragam dan berimbang.

b) Kegiatan Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan

Maksud dan tujuan kegiatan Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan adalah pemantauan harga dan pasokan pangan, pengembangan lumbung/cadangan pangan baik pemerintah maupun masyarakat, serta analisa akses pangan pokok baik di penggilingan dan pedagang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp42.363.000,00 dengan realisasi sebesar Rp42.363.000,00 atau 100%. Adapun output kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- (1) Pemantauan harga dan pasokan pangan di 17 kecamatan selama 12 bulan

Kegiatan Pemantauan Harga ini bertujuan untuk memantau harga 16 komoditas pangan beserta pasokannya di tiap-tiap kecamatan se-kabupaten Bantul. Sasaran pendataan harga dilakukan setiap minggu di pasar yang ada di masing - masing kecamatan dan direkapitulasi setiap bulannya. Pendataan dilakukan oleh petugas pemantau harga dan pasokan (THL) yang berada di masing masing BPP kecamatan. Adapun ke - 16 komoditas yang dipantau adalah sebagai berikut: Gabah (GKP dan GKG), Beras, Jagung,

Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Jalar, Ubi Kayu, Cabe Merah, Bawang Merah, Bawang Putih, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung Terigu, Daging Sapi, Daging Ayam, Telur Ayam.

(2) Pelaksanaan pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia (PUPM/TTI) dan Lumbung Pangan

(a) LDPM bertujuan untuk stabilisasi harga pangan pokok (gabah/ beras) di tingkat produsen/ petani. Sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Bantul terdapat 18 Gapoktan pelaksana program penguatan LDPM. , sebagaimana tercantum pada Tabel 3.41

Tabel 3. 41 Daftar Gapoktan Pelaksana Program LDPM

No	GAPOKTAN	ALAMAT (Desa, Kecamatan)	KETUA
Gapoktan LDPM dari dana APBD DIY (tahun 2015 dan 2019)			
1.	Gap. Sedyo Makmur	Desa Gilangharjo, Kec. Pandak	Mulyono
1.	Gap. Tamanan Makmur	Desa Tamanan, Kec. Banguntapan	Suharno
2.	Gap.Tani Makmur	Desa Timbulharjo, Kec. Sewon	H.M. Jaelani
3.	Gap. Tani Mulyo	Desa Sriharjo, Kec. Imogiri	Waridjo
Gapoktan LDPM dari dana APBN			
TAHAP MANDIRI (ditumbuhkan tahun 2015)			
1.	Gap. Patalan	Desa Patalan, Kec. Jetis	Slamet HP
2.	Gap. Argomulyo	Desa Argomulyo, Kec. Sedayu	Gito Paryatno
TAHAP PASCA KEMANDIRIAN (ditumbuhkan tahun 2013)			
1	Gap. Sumber Rejeki	Desa Canden, Kec. Jetis	Sumijan
TAHAP PASCA KEMANDIRIAN (ditumbuhkan Tahun 2012)			
1	Gap. Tri Manunggal	Desa Karangtalun, Kec. Imogiri	Ponidi
2.	Gap. Tani Mulyo	Desa Bangunharjo, Kec. Sewon	BejoHadi Raharjo
3.	Gap. Rukun	Desa Srimulyo, Kec. Piyungan	Hasroyo
TAHAP PASCA KEMANDIRIAN (ditumbuhkan Tahun 2011)			
1	Gap. Sumberagung	Desa Sumberagung, Kec. Jetis	Sujono
2.	Gap. Tri Manunggal Sedyo	Desa Triharjo, Kec. Pandak	Suwahyo
TAHAP PASCA KEMANDIRIAN (ditumbuhkan Tahun 2009)			
1.	Gap. Mayar	Desa Donotirto, Kec. Kretek	Maryanta,
2.	Gap. Intan Berseri	Desa Sidomulyo, Kec. Bambanglipuro	Suwarji, SPd
3.	Gap.Sumber Harapan	Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro	Buang Haryanto
4.	Gap. Mitra Usaha tani	Desa Wijirejo, Kec. Pandak	Sumarjana
5.	Gap. Tri manunggal	Desa Bantul. Kec. Bantul	Rohadi
6.	Gap. Gemah Ripah	Desa Pendowoharjo, Kec. Sewon	Mardiyo

Sumber: Diperpautkan, 2020

(b) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) merupakan pemberdayaan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) dalam melayani Toko Tani Indonesia untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Program PUPM/TTI ini diluncurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian sejak tahun 2016 dengan tujuan sebagai berikut :

- Menyerap produk pertanian nasional khususnya bahan pangan pokok dan strategis
- Mendukung stabilisasi harga dan pasokan pangan
- Memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis

Sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Bantul terdapat 14 Gapoktan pelaksana program PUPM, sebagaimana tercantum pada Tabel 3.42

Tabel 3. 42 Gapoktan Pelaksana Program PUPM

No	Tahun	Gapoktan	Alamat	Komoditas
1	2016	Gapoktan Sumberagung	Desa Sumberagung, Kec. Jetis	Beras
2	2016	Gapoktan Tri Manunggal	Desa Bantul, Kec. Bantul	Beras
3	2018	Gapoktan Patalan	Desa Patalan, Jetis	Beras
4	2018	Gapoktan Sumber Harapan	Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro	Beras
5	2019	Gapoktan Tamanan Makmur	Desa Tamanan, Banguntapan	Beras
6	2019	Gapoktan Intan Berseri	Desa Sidomulyo, Bambanglipuro	Beras
7	2019	Gapoktan Tani Makmur	Desa Timbulharjo, Bambanglipuro	Beras
8	2019	Gapoktan Gemah Ripah	Desa Pendowoharjo, Sewon	Beras
9	2019	Gapoktan Sumber Rejeki	Desa Canden, Jetis	Beras
10	2020	Gapoktan Mitra Usaha Tani	Desa Wijirejo Pandak	Beras
11	2020	Gapoktan Sri Rejeki	Desa Palbapang Bantul	Beras
12	2020	Kelompok Tani Samiran	Desa Samiran Kretek	Bawang Merah
13	2020	Gapoktan Sri Gading	Kretek	Cabe
14	2020	Kelompok Tani Munggur	Desa Srimartani Piyungan	Cabe

Toko Tani Indonesia (TTI) yang bekerja sama dengan 12 gapoktan PUPM ada sekitar 65 toko.

(3) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Bantul juga mengembangkan dan mengelola cadangan pangan pemerintah Kabupaten.

Hal ini sesuai dengan UU no. 18 tahun 2012 tentang pangan dan Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dimana pemerintah bertanggungjawab dalam peningkatan ketahanan pangan, termasuk penyelenggaraan cadangan pangan.

Untuk penyimpanan dan pengelolaan cadangan pangan, Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan lembaga/ mitra kerja. Sebagai mitra kerja dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Bantul adalah Koperasi Beras Sehat Makmur, Wijirejo, Pandak. Sampai dengan tahun 2020 ini, jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantul besarnya adalah 5,036 ton beras.

c) Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan subsistem ketersediaan sekaligus mengurangi kerawanan pangan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp69.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp69.400.000,00 atau 100%. Output kegiatan ini adalah pendataan dan penyusunan NBM dan SKPG. Rincian kegiatan tersebut meliputi

(1) Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Kegiatan yang dilakukan berupa rapat koordinasi untuk penyusunan SKPG dengan peserta petugas pendata SKPG 17 Kecamatan dan Tim SKPG Kabupaten. SKPG disusun dengan menggunakan data yang dikumpulkan oleh 17 THL di 17 BPP/Kecamatan dan 6 anggota Tim SKPG terdiri dari petugas Non ASN Bappeda, Dinas Sosial, Dispendukcapil, DPPKP, Dinkes Kabupaten Bantul.

(2) Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Neraca bahan makanan (NBM) adalah suatu tabel yang terdiri atas kolom-kolom yang memuat berbagai info berupa data tentang situasi dan kondisi penyediaan bahan makanan bagi penduduk suatu negara/daerah, dalam suatu kurun waktu tertentu. Kegiatan yang dilakukan berupapenyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) berdasarkan data ketersediaan bahan makanan yang dikumpulkan oleh petugas data.

Pengolahan dan analisa data hingga penyelesaian akhir, dilaksanakan oleh tim penyusun neraca bahan makanan (NBM), yang koordinasi pelaksanaannya oleh Dinas Pertanian, Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dan bekerjasama dengan Tim Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil analisa selengkapnya pada Tabel berikut:

Tabel 3. 43 Ketersediaan Energi, Protein & Lemak Berdasarkan Jenis Bahan Makanan

No	Kelompok Pangan	Kalori		Protein	
		Kalori	%	Gram	%
1	Padi-padian	1.883	60,91	46,86	56,52
2	Makanan berpati	43	1,4	0,31	0,37
3	G u l a	226	7,3	0,01	0,01
4	Buah / Biji berminyak	234	7,56	10,09	12,17
5	Buah-buahan	254	8,22	2,79	3,36
6	Sayur-sayuran	185	5,99	11,07	13,35
7	Daging	43	1,4	3,6	4,34
8	T e l u r	28	0,9	2,13	2,56
9	S u s u	0	0	0,01	0,01
10	I k a n	31	1	5,88	7,09
11	Minyak / Lemak	158	5,11	0,16	0,20
12	L e m a k	7	0,21	0,01	0,01
	NABATI :	2.984	96,49	71,28	85,98
	HEWANI :	109	3,51	11,62	14,02
	JUMLAH :	3.092	100	82,90	100

Dari analisis NBM didapatkan capaian Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein. Berdasarkan Tabel di atas dapat

dilihat bahwa Ketersediaan Protein pada tahun 2020 adalah sebesar 82,90 gram per kapita per hari sementara Ketersediaan Energi sebesar 3.092 kilo kalori per kapita per hari. Pencapaian ini juga sudah melebihi standar yang ditetapkan yaitu 2.400 kalori/kapita/hari untuk ketersediaan energi dan 63 gram per kapita per hari. Walaupun ketersediaan energi sudah di atas dari standar Nasional, namun ketersediaan per kapita per hari untuk beberapa jenis bahan makanan seperti susu, ikan, buah-buahan masih perlu ditingkatkan. Sementara ini untuk jenis bahan makanan susu hanya susu sapi, padahal susu kambing juga ada dan perlu ditingkatkan.

Untuk jenis bahan makanan sayur – sayuran, buah-buahan, telur, dan ikan dapat ditingkatkan melalui optimalisasi peningkatan pekarangan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Instruksi Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2012 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan. Walaupun ketersediaan protein juga sudah di atas dari standar Nasional (63 gram/kapita/hari), namun ketersediaan per kapita per hari untuk beberapa jenis bahan makanan seperti ikan dan daging masih perlu ditingkatkan. Hal ini sangat diperlukan karena dengan ketersediaan bahan pangan yang melimpah maka harga jual akan menjadi stabil. Stabilitasnya harga jual akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat akan bahan pangan.

d) Kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman

Maksud dan tujuan kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman adalah memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta masyarakat melalui budidaya pertanian terpadu berbasis lahan pekarangan rumah tangga. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp208.381.500,00 dengan realisasi sebesar

Rp208.381.500,00 atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai pendukung untuk pemulihan ekonomi karena adanya pandemi covid-19. Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran yang berasal dari Dana Keistimewaan. Kegiatan meliputi pemberian bantuan untuk 4 (empat) kelompok tani/wanita tani, yang berada di 4 kecamatan se Kabupaten Bantul.





Gambar 3. 5 Kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016-2020

Perkembangan Skor PPH Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.44

Tabel 3. 44 Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan					Skor Maks
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Padi-padian	25,0	21,7	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	1,5	1,7	1,4	1,3	2,0	2,5
3	Pangan hewani	24,0	24,0	24,0	24,0	22,4	24,0
4	Minyak dan lemak	2,8	3,1	1,5	1,8	1,2	5,0
5	Buah/biji berlemak	0,7	0,9	0,6	1,0	0,5	1,0
6	Kacang-kacangan	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7	Gula	1,1	1,4	0,4	0,6	0,3	2,5
8	Sayur dan buah	27,5	28,1	28,8	30,0	30,0	30,0
9	Lain-lain	-	-	0,0	-	0,0	0,0
Total		92,8	93,10	91,7	93,7	91,4	100

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2020

PPH merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kualitas konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Bantul. Capaian PPH Tahun 2016 – 2019 secara umum mengalami peningkatan dimana skor tertinggi dicapai pada tahun 2019. Akan tetapi, Capaian Skor PPH pada tahun 2020 mengalami penurunan dimana skor PPH adalah sebesar 91,4. Skor tersebut lebih rendah

dibanding tahun 2019 yaitu sebesar 93,7. Dari Tabel diatas terlihat bahwa penurunan yang cukup signifikan ini terjadi pada Kelompok Pangan jenis Pangan Hewani, Minyak dan lemak, Buah/biji berlemak, dan Gula. Hal ini diakibatkan oleh berkurangnya penghasilan masyarakat karena pandemi Covid-19. Kurangnya penghasilan masyarakat mengakibatkan berkurangnya daya beli terhadap bahan pangan yang beragam dan berimbang.

Tabel 3. 45 Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Kelompok Pangan	Ketersediaan Energi					Ketersediaan Protein				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi-padian	1.588	2.025	2.028	2.049	1.883	39.40	50.09	50.21	50.78	46,86
2	Makanan berpati	108	176	94	97	43	0.73	1.19	0.66	0.66	0,31
3	G u l a	87	76	88	97	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0,01
4	Buah / Biji berminyak	284	212	233	230	234	8.74	7.76	9.27	10.00	10,09
5	Buah-buahan	330	198	235	242	254	3.63	2.20	2.66	2.65	2,79
6	Sayur-sayuran	58	54	135	181	185	3.95	5.34	9.30	10.94	11,07
7	Daging	120	39	85	76	43	8.38	3.66	7.08	6.68	3,6
8	T e l u r	26	30	27	28	28	1.86	2.27	2.02	2.14	2,13
9	S u s u	1	1	0	0	0	0.06	0.03	0.01	0.01	0,01
10	Ikan	44	29	30	31	31	8.48	5.65	5.84	6.00	5,88
11	Minyak / Lemak	427	142	149	72	158	0.48	0.15	0.15	0.06	0,16
12	L e m a k	7	11	17	19	7	0.01	0.02	0.03	0.03	0,01
TOTAL		3.079	2.993	3.121	3.123	3.092	75.73	78.36	87.23	89.95	82.90

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2020

Berdasarkan Tabel Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 dapat dilihat bahwa Capaian Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein secara umum mengalami peningkatan. Capaian Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein pada tahun 2017 mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh menurunnya ketersediaan pangan dari jenis hewani terutama pada kelompok pangan Daging dan Ikan. Walaupun begitu, tahun 2017-2019 Capaian telah meningkat terutama didukung oleh peningkatan ketersediaan secara signifikan pada bahan pangan dari jenis Padi-padian, Buah – buahan dan Sayur-sayuran. Walaupun begitu, pada tahun 2020, Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal ini terutama terjadi pada ketersediaan bahan pangan jenis Padi-padian dan Makanan berpati. Menurunnya ketersediaan bahan pangan Padi-padian diakibatkan oleh menurunnya produksi padi. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan luas panen yang berpindah ke komoditas lain. Selain itu, ketersediaan pangan pada jenis Makanan berpati juga menurun. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya produksi ubi kayu sebagai penyumbang terbesar ketersediaan pada jenis kelompok pangan Makanan berpati.

d. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan pangan (lihat Tabel 3.46).

Tabel 3. 46 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pangan

No.	Permasalahan	Solusi
1	Masih terbatasnya informasi harga dan pasokan pangan yang sangat dibutuhkan untuk pengendalian stabilitas harga dan pasokan pangan guna menunjang distribusi dan akses pangan masyarakat yang terjangkau dan terjangkau.	Pemantauan Distribusi Harga dan Pasokan Pangan yang rutin dan informatif
2	Belum optimalnya pengelolaan distribusi pangan oleh masyarakat guna mewujudkan distribusi pangan yang merata dan terjangkau	Pengembangan dan Pemberdayaan Distribusi Pangan Masyarakat
3	Belum optimalnya cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Pemberdayaan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat
4	Belum semua pekarangan dimanfaatkan secara baik	Peningkatan pemanfaatan pekarangan untuk mendukung pola konsumsi B2SA
5	Masih adanya Desa Rentan Pangan dari hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	Perlunya dukungan program/kegiatan dari beberapa OPD untuk intervensi menangani desa rawan pangan

Sumber: DPPKP, 2020

4. Pertanahan

Urusan pertanahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul diarahkan untuk koordinasi dalam aspek penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah dan penanganan konflik pertanahan. Upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan sasaran utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, yaitu meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan. Berdasarkan hal tersebut dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 96% dengan realisasi sebesar 100% tercapai 104,17% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Jumlah sertifikat hak Milik yang terbit sebanyak 637.682. Pendaftaran Tanah

Sistematis Langsung (PTSL) yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan faktor utama keberhasilan proses sertifikasi di Kabupaten Bantul.

a. Program dan Kegiatan

1) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

- a) Kegiatan Inventarisasi Tanah Kas Desa
- b) Kegiatan Persertifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY
- c) Kegiatan Pemanfaatan Tanah SG
- d) Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
- e) Kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
- f) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan

2) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

- a) Kegiatan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
- b) Kegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Maksud dan tujuan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah adalah mewujudkan penatausahaan pertanahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya tentang penatausahaan pertanahan tanah

kasultanan, tanah desa dan tanah pemerintah yang berada dalam cakupan administratif Kabupaten Bantul. Alokasi anggaran pelaksanaan program ini sebesar Rp3.759.761.900,00 dengan realisasi Rp. 3.310.630.695,00 atau 88,05%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

a) Kegiatan Inventarisasi Tanah Kas Desa

Maksud dan tujuan kegiatan inventarisasi tanah kas desa ini adalah tersedianya data inventarisasi tanah desa yang ada pada tiap kecamatan sehingga mendukung penatausahaan pertanahan kasultanan yang baik di Kabupaten Bantul. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp5.300.000,00 dengan realisasi Rp 5.300.000,00 atau 100 %. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa rapat koordinasi dan sosialisasi tentang updating *database* tanah desa.

Dari data hasil inventarisasi jumlah tanah desa di Kabupaten Bantul adalah sejumlah 18.577 bidang. Namun, data ini masih memerlukan validasi keabsahan data yang dilakukan melalui Peraturan Desa (Perdes) pemanfaatan tanah desa.

b) Kegiatan Persertifikatan dan Sewa Tanah Pemerintah DIY

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya pemberkasan, pendaftaran dan pensertifikatan tanah milik Pemda Bantul yang belum bersertifikat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.225.000,00, terealisasi Rp 6.554.120,00 atau 90,71%. Keluaran kegiatan ini ditargetkan 5 bidang dan tercapai 4 bidang pemberkasan, dan 1 bidang pendaftaran persertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

c) Kegiatan Pemanfaatan Tanah SG

Maksud kegiatan adalah untuk memberikan rekomendasi bagi pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten oleh

masyarakat atau pemerintah. Kegiatan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp62.148.000,00 dengan realisasi Keuangan sebesar Rp62.148.000,00 atau 100%. Keluaran kegiatan sebanyak lima rekomendasi Penggunaan Tanah Kasultanan / SG. Adapun Data Permohonan Penggunaan Tanah Kasultanan / SG disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 47 Permohonan Penggunaan Tanah Kasultanan / SG Tahun 2020

No	Lokasi	Peruntukan	Luas tanah (m ²)	Keterangan
1	Parangtritis, Kretek	Radar Tsunami	1.425	Rekomendasi Kepala Dinas
2	Poncosari, Srandakan	Tempat Pelelangan Ikan Pantai Kuwaru	800	Rekomendasi Kepala Dinas
3	Trimulyo, Jetis	Sesar Opak Bukit Mengger	160.000	Rekomendasi Kepala Dinas
4	Poncosari, Srandakan	Rest Area/Tempat Parkir/Terminal dan Pos Pengawasan LLAJ	11.911	Rekomendasi Kepala Dinas
5	Bantul, Bantul	Ruang Terbuka Hijau / RTH	1.587	Rekomendasi kepala dinas

Sumber: DPTR, 2020

d) Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Maksud dan tujuan kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten adalah mewujudkan penatausahaan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian kinerja dari Program kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dicapai melalui anggaran sebesar Rp. 3.453.159.000,00 dengan realisasi Rp. 3.004.697.075,00 atau 87,01%. Program Pengelolaan Tanah

Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

(1) Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten

Maksud dari kegiatan pendaftaran tanah Kasultanan dan Kadipaten adalah mendapatkan kepastian hukum atas hak kepemilikan dan menjamin kepastian pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten oleh masyarakat dan pemerintah. Sehingga diharapkan dengan pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang baik dapat secara maksimal memberikan daya dukung dan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan menggunakan anggaran sebesar Rp1.926.002.900,00 dengan realisasi sebesar Rp1.631.0086.000,00 atau 85%. Keluaran adalah didaftarkan 395 bidang Tanah Kasultanan dan Pemberkasan Tanah Kasultanan 500 bidang, dan baru tercapai sebesar 95%.

(2) Pematokan Tanah Desa

Kegiatan pematokan bertujuan untuk mengetahui kepastian batas Tanah Desa/Kalurahan, mengetahui luas Tanah Desa/Kalurahan serta memberikan gambaran bentuk Tanah Desa/Kalurahan Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp.787.319.000,- dengan realisasi keuangan Rp.776.231.675 atau 99% dengan capaian fisik sebesar 100%.

(3) Pengukuran Tanah desa

Kegiatan Pengukuran Tanah Desa/Kalurahan untuk mengetahui keluasan secara presisi, peruntukan dan pemanfaatannya di 11 Kalurahan se Kabupaten Bantul sebanyak 1.000 bidang.

Kegiatan Pengukuran ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran Rp.672.952.500, dengan relasasi keuangan sebesar Rp. 579.812.500 atau 86% dengan keluaran Pemberkasan Peta Bidang sebanyak 1.000 Bidang Tanah desa, Rekapitulasi hasil ukur 1.000 bidang dan Sket bidang sebanyak 1.000

(4) Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertifikat Tanah Desa

Tanah Desa/Kalurahan yang telah disertifikatkan dengan status hak pakai harus dilakukan penyesuaian status hak pakainya diatas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten, sesuai asal usul Tanah Desa berdasarkan Pasal 38 huruf C Perdais No. 1 Tahun 2017.Tanah Desa/ Kalurahan disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa/ Kalurahan dengan status hak pakai di atas tanah milik Kasultanan untuk Tanah Desa/ Kalurahan yang Hak Anggaduhnya dari Kasultanan atau status hak pakai di atas tanah milik Kadipaten untuk Tanah Desa yang Hak Anggaduhnya dari Kadipaten berdasarkan Pergub No. 34 Tahun 2017.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 66.882.500 dengan realisasi sebesar Rp.29.092.500 atau 43% dengan capaian fisik 100%, dengan keluaran kegiatan berupa Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertifikat Tanah Desa sebanyak 50 (lima puluh) sertifikat tanah Kalurahan Guwosari.

e) Kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah fasilitasi pemberian Rekomendasi dalam pemberian Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa sehingga pada akhirnya Masyarakat atau Instansi pengguna memperoleh Ijin

Gubernur dan Serat Kekancingan untuk pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di wilayah Kabupaten Bantul serta Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan Draft Raperdes Pemanfaatan Tanah Desa.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 214.107.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 214.106.500,- atau 100% dengan keluaran kegiatan berupa Rekomendasi Penggunaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa sebanyak 20 Rekomendasi dari 20 rekomendasi Pemanfaatan Tanah yang di targetkan dan Penyusunan Draft Raperdes tentang Pemanfaatan Tanah Desa sebanyak 43 Draft Raperdes dari 43 Draft Raperdes yang ditargetkan.

f) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk penyediaan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa pembelian 1 buah scanner. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 17.825.000, terealisasi sebesar Rp 17.825.000 (100%).

2) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Maksud dan tujuan program adalah fasilitasi penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan pada tanah desa, tanah perorangan, dan tanah pemda Program ini terdiri dari satu kegiatan yaitu kegiatan Penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang dilaksanakan dengan anggaran Rp 186.162.500,- dengan realisasi sebesar Rp 185.937.500,- atau 99,88%. Berikut ini kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan program, yakni :

a) Kegiatan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Bentuk kegiatan berupa fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan. Target kegiatan pada tahun 2020 sebanyak 5 kasus, dan realisasinya sebanyak 16, 2 masih dalam proses.

b) Kegiatan Penanganan keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa

Tujuan penanganan keberatan dan sengketa tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa adalah memfasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga dengan baik dan benar, secara administrasi pertanahan, sehingga masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum untuk menjamin kepastian hak kepemilikan tanah masing-masing pihak. Sumber dana yang digunakan berasal dari anggaran dana keistimewaan sebesar Rp.172.612.500,- dan realisasinya sebesar Rp.172.387.500,- (99,87%).

Bentuk kegiatan berupa fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan, khusus untuk tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa. Target kegiatan pada tahun 2020 ini sebanyak 5 desa dan realisasinya sebanyak 5 desa. Berikut ini tabel Rekapitulasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Tahun 2020

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan pertanahan.

Tabel 3. 48 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pertanahan

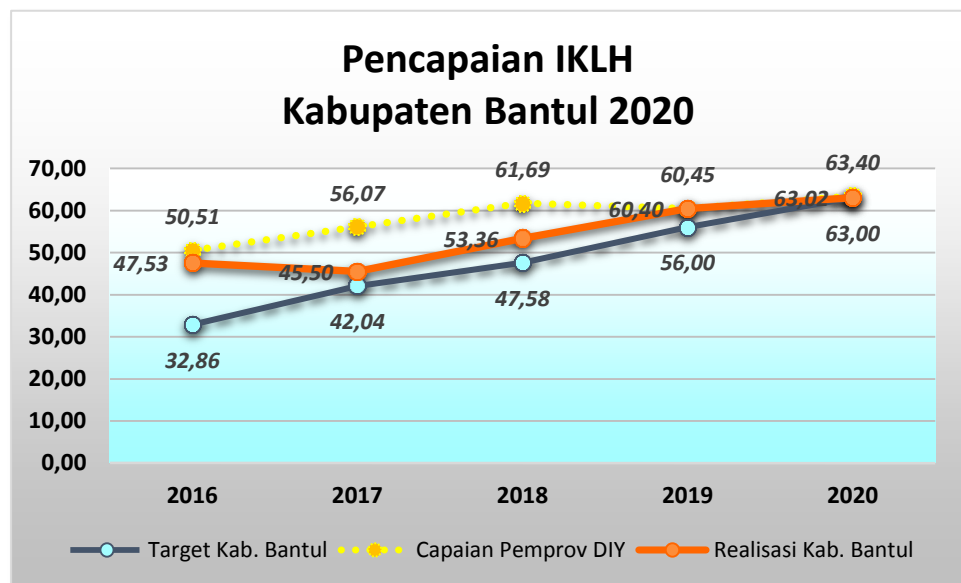
NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Beberapa Tanah Kasultanan sudah dikuasai masyarakat/ organisasi berpuluh-puluh tahun hingga turun temurun dan muncul Letter C	Ada Kebijakan dan langkah-langkah dari Panitikismo terkait kondisi tersebut.
2.	Permohonan Pemanfaatan Tanah belum keseluruhan sesuai dengan Peraturan yang ada (Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Nomer 34 Tahun 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi aturan terkait pemanfaatan tanah kepada masyarakat - Mengintensifkan pengendalian pemanfaatan tanah dengan melibatkan pihak Desa dan Stakeholder terkait
3.	Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa di 75 Desa di Kabupaten Bantul belum semua selesai menjadi produk Peraturan Desa sehingga mengakibatkan terkendalanya permohonan pemanfaatan tanah dikarenakan Perdes merupakan salah satu diantara Dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan pemanfaatan tanah	Fasilitasi dan pendampingan terkait dengan penyelesaian penyusunan Draf Raperdes sampai menjadi Produk Perdes
4.	Belum semua desa menyampaikan data inventarisasi permasalahan pertanahan	Tindakan proaktif dari DPTR Bantul dalam mengumpulkan data inventarisasi permasalahan pertanahan
5.	Ada desa yang tidak memiliki data pertanahan seperti buku legger yang hilang	Pendampingan desa agar segera memulai kembali pembuatan legger bukan sebagai pengganti legger yang hilang, tetapi sebagai dokumen pertanahan desa untuk melanjutkan legger yang hilang, yang bisa digunakan nantinya apabila terjadi tukar menukar sehingga warga dapat mensertifikatkan tanah yang menjadi hak nya.
6.	Tidak tercapainya pendaftaran 105 bidang tanah kasultanan dan 200 pendaftaran peta bidang tanah desa	Koordinasi yang baik antara Dinas/Instansi terkait sehingga permasalahan anggaran tidak menjadi kendala capaian target kegiatan.

Sumber: DPTR, 2020

5. Lingkungan Hidup

Dalam konteks pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan, satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan kegiatan yang penting dan harus dilakukan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, melainkan tanggung jawab semua pihak.

Pada tahun 2020 capaian IKLH Kab Bantul sebesar 63,02 melebihi dari target sebesar 63 atau pencapaiannya 100,04%. Capaian tersebut lebih baik dari pencapaian tahun 2019 sebesar 60,4. Namun capaian IKLH Kabupaten Bantul dibawah capaian IKLH DIY sebesar 63,40.



Grafik 3. 10 Pencapaian IKLH Kabupaten Bantul 2020

Program dan kegiatan urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- a) Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan;
- b) Kegiatan Kerjasama pengelolaan persampahan;
- c) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e) Kegiatan evaluasi adipura;
- f) Operasional Kebersihan, Tata Lingkungan dan Pertamanan.

2) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- a) Kegiatan pengkajian dampak lingkungan.
- b) Kegiatan Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup.
- c) Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan alami dan buatan.

3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- a) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air.
- b) Kegiatan Koordinasi pengelolaan konservasi SDA.
- c) Kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem.

4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

- a) Kegiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan.
- b) Kegiatan Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah.
- c) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- d) Kegiatan Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup.
- e) Kegiatan Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan di Kabupaten Bantul melalui penambahan pada kelompok-kelompok pengelola sampah dan jejaring persampahan. Selanjutnya diharapkan mampu mendorong manajemen pengelolaan persampahan secara lebih baik dan bisa mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah serta meningkatkan nilai guna dari sampah. Adapun target indikator program yaitu jumlah penambahan kelompok pengelola sampah sebanyak 139 kelompok bisa tercapai sebanyak 162 kelompok.

Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

a) Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana untuk pengelolaan sampah. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.1.414.321.000 dengan realisasi sebesar Rp.1.406.363.500 atau 99,44%.

Tabel 3. 49 Daftar Lokasi Wisata Penerima Tong Sampah

No	Nama Penerima	Jumlah (set)
1	Objek Wisata Alas Literasi, Munthuk, Dlingo	2
2	Objek Wisata Bukit Panguk Mangunan, Dlingo	3
3	Objek Wisata Bukit Wojo, Mangunan, Dlingo	3
4	Objek Wisata Goa Selarong, Guwosari, Pajangan	2
5	Objek Wisata Kebun Buah Mangunan, Dlingo	2
6	Objek Wisata Lintang Sewu, Munthuk, Dlingo	3
7	Objek Wisata Pantai Baru	3
8	Objek Wisata Pantai Depok	3
9	Objek Wisata Pantai Goa Cemara	3
10	Objek Wisata Pantai Parangtritis	4
11	Objek Wisata Pinus Pengger, Terong, Dlingo	3

No	Nama Penerima	Jumlah (set)
12	Objek Wisata Pinus Sari, Munthuk, Dlingo	3
13	Objek Wisata Puncak Becici, Munthuk, Dlingo	3
14	Objek Wisata Seribu Batu Songgo Langit, Mangunan, Dlingo	3
15	Pemerintah Desa Bantul (Taman Kuliner Desa Bantul)	2
16	Pengelola Terminal Makam- Makam Raja Imogiri	3
Total		45

Adapun sisa barang sebanyak 10 set untuk Persediaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

(1) Pengadaan Roda Tiga Pengangkut Sampah

Pada tahun 2020 pengadaan motor roda tiga sebanyak 2 buah yang diserahkan kepada:

- (a) Kelompok Mudhi Resik Wanujoyo Lor, Dusun Wanujoyo Lor, Srimartani Piyungan, Bantul.
- (b) Kelompok Mutsih Sampah, Dusun Mutihan, Srimartani, Piyungan, Bantul.

(2) Pengadaan Tas Belanja

Pengadaan tas belanja sebanyak 1.000 unit. Tas belanja berbahan kain untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai percontohan dengan tujuan masyarakat dapat melakukan pengurangan sampah plastik terutama kantong belanja.

b) Kegiatan Kerjasama pengelolaan Persampahan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kerjasama/peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.963.710.000 dengan realisasi sebesar Rp.958.317.875 atau 99,44 %. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- (1) Partisipasi *Stakeholder* dalam Implementasi Regulasi Persampahan

(2) Tim percepatan Bantul Bersih Sampah 2020 dan Pembangunan Lingkungan Hidup

Launching Tim Percepatan Bantul Bersih Sampah 2020 dan Pembangunan Lingkungan Hidup dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2020 oleh Bupati Bantul yang dihadiri Wakil bupati Bantul, Kapolres Bantul, Komandan Kodim 0274/Bantul, Kepala DLHK DIY, Sekda Bantul, Asisten II, Kepala Kejari Bantul dan perwakilan dari Bappenas. Tim ini merupakan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Kodim 0729 dan Polres Bantul.

(3) Sosialisasi Kader Lingkungan Hidup dan Satgas Lingkungan Hidup

Sosialisasi dan launching Kader Lingkungan Hidup dan satgas Lingkungan Hidup dilaksanakan pada 24 Februari 2020 bertempat di aula Perpustakaan Bantul dihadiri oleh 75 kader lingkungan hidup dan 75 satgas lingkungan hidup. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi kader dan satgas lingkungan hidup sehingga mereka mempunyai bekal pada saat melakukan sosialisasi di masyarakat.

(4) Patroli Lingkungan dalam rangka Sosialisasi Sampah dan Penanganan COVID-19.

Pelaksanaan patroli lingkungan dilaksanakan di sepanjang jalan protokol pada 17 Kecamatan di Kabupaten Bantul. Pelaksanaan Patroli ini berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata terutama pada objek pariwisata.

(5) Kegiatan Gropyok Sampah

Kegiatan gropyok sampah dilaksanakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya pengelolaan sampah

pada fasilitas umum yaitu Terminal Palbapang, Pasar Bantul, Pasar Niten, Pasar Pijenan. Gropyok sampah melibatkan masyarakat sekitar fasilitas umum, masyarakat pemanfaat fasilitas umum dan dinas instansi terkait.

(6) Kajian Persampahan

Penyusunan Penelitian Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul Untuk Mengatasi Permasalahan TPA Piyungan.

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menyusun kebijakan pengelolaan sampah yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul apabila terjadi permasalahan di TPA/TPST Regional Piyungan, sehingga tidak menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah untuk:

- (a) Menyediakan acuan dalam rangka menentukan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul untuk mengatasi permasalahan TPA/TPST Regional Piyungan yang sudah *overload*.
- (b) Menyusun alternatif lokasi yang potensial sebagai tempat fasilitas pengolah sampah yang berupa *Intermediate Treatment Facility* (ITF) untuk mengurangi beban TPA/TPST Regional Piyungan
- (c) Menyusun alternatif teknologi, perkiraan pembiayaan, dan kelembagaan pengelolaan fasilitas pengolah sampah untuk mengurangi beban TPA/TPST Regional Piyungan.
- (d) Dari hasil penelitian terhadap tiga lokasi alternatif ITF diperoleh lokasi yang paling potensial digunakan sebagai ITF adalah di Dusun Watugedug, Guwosari, Pajangan.

(7) Penyusunan Peraturan Bupati Turunan dari Peraturan Daerah No.2 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 mengamanatkan 14 peraturan bupati. Peraturan bupati ini dikelompokkan menjadi dua peraturan bupati dengan judul:

- (a) Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
- (b) Lembaga Pengelola Sampah

(8) Pendampingan Pengelolaan Lingkungan

Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terhadap 18 Rumah Pilah Sampah di Kabupaten Bantul yang dibangun pada tahun 2019.

Adapun hasil pendampingan dari 18 rumah pilah sampah ditemukan tingkat pelaksanaan yang beragam, berdasarkan kesiapan masyarakat dalam melaksanakan program pilah sampah dan kesiapan lembaga yang mengelola program pilah sampah tersebut sehingga bisa di kelompokkan menjadi 3 kategori yaitu berkembang, berjalan dan mulai.

(9) Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Laporan Jakstrada

Penyusunan laporan Jakstrada harus dilakukan setiap tahunnya. Laporan Jakstrada akan menggambarkan tentang Neraca Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul yang meliputi prosentase hasil pengurangan sampah dan penanganan sampah di Kabupaten Bantul dibandingkan dengan timbulan sampah yang ada di Kabupaten Bantul.

Dengan laporan Jakstrada ini akan dapat disusun rencana pengelolaan sampah yang akan dilaksanakan pada tahun – tahun sesudahnya.

(10) Pelatihan Pengelolaan Sampah

(a) Pelatihan Penanganan Sampah di Desa Sidomulyo

Pelatihan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 di rumah Bapak dukuh Turi, Sidomulyo, Bambanglipuro, Dengan jumlah peserta 100 orang.

(b) Sosialisasi Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah

Sosialisasi Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah ini dilaksanakan dengan mengundang perwakilan dari desa – desa yang ada di Kabupaten Bantul. Belum semua desa di Kabupaten Bantul telah memiliki Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah. Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019, bahwa desa diwajibkan melakukan pengelolaan sampah. Untuk dapat menjalankan amanat tersebut diharapkan desa telah memiliki peraturan desa tentang pengelolaan sampah.

(c) Pelatihan Pengelolaan sampah

Pelatihan pengelolaan sampah yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 50 Pelatihan Pengelolaan Sampah

No	Nama Pelatihan	Materi Pelatihan	Lokasi Pelatihan	Jumlah Peserta
1	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Pelatihan administrasi bank Sampah dan pembuatan lilin dari minyak jelantah	Pedukuhan Wanujoyo	25
2	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Pelatihan administrasi bank Sampah dan pembuatan lilin dari minyak jelantah	KB Majulancar, Desa Caturharjo	25
3	Pelatihan Pengelolaan	Praktek pengelolaan administrasi bank sampah (pembuatan	Pedukuhan Wanujoyo	25

No	Nama Pelatihan	Materi Pelatihan	Lokasi Pelatihan	Jumlah Peserta
	Sampah	buku administrasi)		
4	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah integrasi dengan Bumdes	UPT KP2 DLH Bantul	25

(d) Workshop Pengelolaan Sampah

Workshop pengelolaan sampah yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 51 Workshop pengelolaan sampah

No	Nama Workshop	Lokasi Workshop	Jumlah Peserta
1	Workshop Pengelolaan Sampah dan Rakerda JPSM 2020	Bank Sampah Rukun Agawe Santosa, Dayu, Sri Gading, Sanden	40
2	Workshop Pembuatan Pot dari Kain Bekas	UPTKP2 DLH Bantul	30
3	Workshop Pengisian Aplikasi Simba.id	UPTKP2 DLH Bantul	30

c) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka pemantauan pengelolaan limbah B3 baik limbah pabrik maupun limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis yang salah satunya dilakukan oleh Puskesmas. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.14.430.000 terealisasi sebesar Rp.13.550.000 atau 93,90%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Monitoring pengelolaan limbah B3 untuk Puskesmas dan pelaku usaha.
 - (a) PT. KOOC Kreasi Jetis,
 - (b) Puskesmas Dlingo II,
 - (c) PT Adi Satria Abadi Piyungan,
 - (d) Klinik Pratama Basuki Amalia Sewon,
 - (e) Puskesmas Banguntapan I,

- (f) PT. Cahaya Mulia Persada Nusa Bantul,
- (g) PT. Nasmoco Bahtera Motor Banguntapan,
- (h) CV. Jogja Foamindo Sewon,
- (i) PT. Out Of Asia Pajangan dan
- (j) Klinik Cahaya Husada Pajangan

(2) Sosialisasi serta pendampingan pengelolaan limbah B3.

Dilakukan di RS Rajawali Citra Banguntapan, RS Santa Elisabeth Bambanglipuro, Klinik Mitra Husada Dlingo dan Klinik PKU Muhammadiyah Srandakan

d) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.261.180.000 terealisasi sebesar Rp.259.770.000 atau 99,46%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Evaluasi sekolah adiwiyata
- (2) Pelatihan ECO Enzim

Lokasi Pelaksanaan Pelatihan ECO Enzim berada di Perum Puri Sewon Asri, SD N Kreet Pajangan.

(3) Pelatihan pembuatan pot dari kain bekas berlokasi di:

- (a) SD N Kembangan Bambanglipuro
- (b) SD N 1 Srandakan
- (c) MTS N 5 Bantul
- (d) SD N Jomblangan Banguntapan
- (e) SMA N 1 Imogiri
- (f) SD Muhammadiyah Bantul Kota.

(4) Pelatihan budidaya pertanian organik yang diadakan di dusun

Singosaren Banguntapan

- (5) Pelatihan pengolahan sampah organik dengan *maggot* yang berlokasi pada:
 - (a) Perum Perak
 - (b) Bank Sampah Lestari Turi
- (6) Pelatihan pembuatan ember tumpuk untuk sekolah adiwiyata, Perumahan dan Pasar.
- (7) Pelatihan pembuatan sabun minyak jelantah untuk sekolah adiwiyata.
- (8) Pelatihan Hidroponik yang bertempat di:
 - (a) Dusun dlingo
 - (b) SD N Bakalan
- (9) Rapat koordinasi kegiatan di pondok pesantren selama pandemi Covid-19.
- (10) Peringatan hari peduli sampah tingkat nasional di kampung batik Giriloyo imogiri.
- (11) Pengarahan pengisian form untuk kampung iklim oleh KLHK.
- (12) Gerakan bersih sampah di pasar Niten oleh saka kalpataru.
- (13) Penilaian kebersihan desa.

e) Kegiatan Evaluasi Adipura

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka mendorong pencapaian Penilaian Adipura yang lebih baik. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.156.855.000 terealisasi sebesar Rp.155.360.000 atau 99,04%.

f) Operasional Kebersihan, Tata Lingkungan dan Pertamanan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan persampahan di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Kerjasama pengelolaan tersebut melalui Sekretariat Bersama Kota Yogyakarta, Kabupaten

Sleman, Kabupaten Bantul (Sekber Kartamantul) dan Pemda DIY. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.2.237.727.200 terealisasi sebesar Rp.2.203.356.434 atau 98,46 %.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa kontribusi pendanaan operasional pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan masing-masing kabupaten/kota dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemda DIY. Mekanisme ini diberlakukan sejak tahun 2015, di mana pengelolaan TPST Piyungan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY.

Selain itu juga untuk meningkatkan pengelolaan taman serta ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Bantul terutama pada *area public* perkotaan.

2) Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup khususnya pada upaya-upaya secara berkesinambungan untuk mengurangi tingkat pencemaran udara, air dan tanah. Adapun parameter yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan adalah melalui peningkatan konsentrasi DO (*Dissolved Oxygen*) di Sungai Winongo, sebagai salah satu sungai dengan pemanfaatan yang besar oleh masyarakat. Dimana target indikator program ini sebesar 7.45 mg/l tercapai 7.56 mg/l

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Bantul. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.666.006.500 terealisasi sebesar Rp.645.067.300 atau 96,86%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang

dilaksanakan berupa:

- (1) Pemantauan kualitas air sungai (Prokasih-Program Kali Bersih) dengan Pengambilan sampel dan uji analisa laboratorium kualitas air sungai di 5 (lima) sungai; Bedog, Winongo, Code, Gajahwong, dan Opak Oyo. Pengambilan sampel air sungai dan uji laboratorium dilakukan pada 3 (tiga) titik lokasi di setiap sungai yaitu hulu, tengah dan hilir. Pengambilan samel air dilakukan 2 (dua) periode musim Kemarau (30 sampel), dan 2(dua) periode pada musim Penghujan (30 Sampel).
- (2) Pemantauan Kualitas Udara Ambient (Prolabir-Program Langit Biru) dengan pengambilan sampel kualitas udara ambient dilaksanakan di enam titik pantau yaitu (a) *Perempatan Jejeran*, Jl. Imogiri Timur, (b) *Pertigaan Pasar Piyungan*, Jl. Wonosari, (c) *Perempatan Ketandan*, Jl. Wonosari, (d) *Perempatan depan BRIMOB*, Jl. Imogiri Timur, (e) *Perempatan Klodran*, Jl. Bantul, dan (f) *Perempatan Madukismo*, Jl. Ringroad Selatan. Pengambilan sampel udara *ambient* dilakukan satu tahun dua kali pada musim penghujan dan musim kemarau.
- (3) Pelayanan publik berupa perijinan lingkungan terkait dengan rekomendasi teknis ijin pembuangan air limbah. Rekomendasi teknis ijin pembuangan air limbah yang sudah dikeluarkan untuk tahun 2020 yaitu (1) Rekomtek ijin pembuangan air limbah RS. Nurhidayah, di Jln.Imogiri Timur Pleret. (2) Rekomtek ijin pembuangan air limbah RS. Santa Elizabeth di Ganjuran Bambanglipuro. (3) Rekomtek ijin pembuangan air limbah RS. UII di Jl. Srandakan Pandak.
- (4) Penyusunan Dokumen Inventarisasi Sumber-sumber Pencemar Limbah Domestik.

b) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan fungsi laboratorium lingkungan untuk pengujian kualitas lingkungan hidup yang mencakup air permukaan dan air limbah. Sebagai laboratorium yang sudah terakreditasi oleh Komisi Akreditasi Nasional (KAN) dapat menjadi laboratorium rujukan yang dapat melayani masyarakat; serta ke depan dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.291.564.000 terealisasi sebesar Rp.289.919.755 atau 99,44 %.

c) Kegiatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Alami Dan Buatan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan baik secara alami maupun buatan di Kabupaten Bantul, serta peningkatan pengetahuan SDM pelaku tambang dan masyarakat umum tentang pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.762.789.000 terealisasi sebesar Rp.762.718.500 atau 99.99.%.

3) Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan untuk menambah luas tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis) sehingga diharapkan capaian Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul dapat lebih baik. Indikator dari program ini adalah penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis) dengan target 1 ha/th dan terealisasi sebesar 2.91 ha/th.

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber sumber air dalam upaya pengurangan resiko bencana dan perlindungan lahan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.1.087.874.600 terealisasi sebesar Rp.1.087.532.883 atau 99,97%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Terlaksananya Pengadaan SPAH Pengadaan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) sebanyak 149 Unit tersebar di 17 Kecamatan
- (2) Terlaksananya Pengadaan Biopori sebanyak 100 Unit dan Casing sebanyak 1.000 Unit yang disebar di 17 Kecamatan
- (3) Terlaksananya Penataan sumber air (Bangunan Irigasi) di Tegaldowo sebanyak 1 unit.
- (4) Penyusunan kajian Konservasi Sungai Winongo sebanyak 1 dokumen
- (5) Penyusunan DED Telaga Desa Banyusumurup Kec Imogiri 1 dokumen
- (6) Penyusunan DED Telaga Desa di Kec Dlingo 1 dokumen
- (7) Terlaksananya pengadaan truck tangki penyiram sebanyak 1 unit

b) Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkat pengelolaan konservasi SDA melalui penanaman dan penghargaan bagi masyarakat peduli lingkungan di Kabupaten Bantul. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.921.455.000 terealisasi sebesar Rp.907.285.500 atau 98.46%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Terlaksananya Seleksi Kalpataru Untuk seleksi kalpataru tingkat Kabupaten Bantul terdiri dari kategori yaitu perintis lingkungan, penyelamat lingkungan dan pembina lingkungan dengan hasil

sebagai berikut: (a) Purwo Harsono SP Ekowisata Hutan Mangunan Mangunan Dlingo (Perintis Lingkungan) (b) Kelompok Tani Hutan Ngudi Mulyo Pendul (Penyelamat Lingkungan) (c) Dr. H. Muh Habib, Mag Guwasari Guwasari Pajangan (Pembina Lingkungan) dan (d) Daviq Darmawan Gua Jepang Poyahan Seloharjo Pundong (Pengabdi Lingkungan). Hasil dari Seleksi Kalpataru Tingkat Nasional Kabupaten Bantul mendapatkan penghargaan pada kategori perintis lingkungan yakni : Sarwidi Pelestarian Penyu di Pantai Pelangi Grogol VII Parangtritis Kretek (Perintis Lingkungan).

- (2) Terlaksananya Pengadaan Bibit Tanaman Pengadaan bibit tanaman yang terlaksana meliputi: (a) Pengadaan bibit tanaman untuk penghijauan lingkungan yang diadakan meliputi asam jawa, 257anjong, mahoni, akasia, ketepeng kencono, jati, sengon, mahoni, duku. Jumlah bibit tanaman sebesar 14.000 batang. (b) Pengadaan tanaman untuk konservasi SDA. Bibit yang diadakan adalah bibit *mangrove* untuk lokasi lahan *Mangrove* Kretek. Jumlah bibit yang diadakan sebanyak 10.000 batang. (c) pengadaan bibit tanaman penghijauan di Kecamatan Bantul sebanyak 10.000 batang dan *mangrove* sebanyak 10.000 batang, (d) pengadaan bibit tanaman sempadan sungai dan sempadan mata sungai sebanyak 5.000 batang yang di tanam di sempadan sungai bedog, opak dan code.
- (3) Terlaksananya Pelatihan Konservasi dan Pemberdayaan Ekonomi Lingkungan. Pelatihan ini diperuntukkan kelompok masyarakat di Kecamatan Sanden, Pundong, Dlingo, Pyungan, Sedayu, Bantul, Sewon, Kasihan dan Banguntapan. Masing – masing kelompok (Kecamatan) diikuti oleh 30 peserta dengan tiga narasumber. Materi yang dilatih adalah Penanaman bibit tanaman Anggur. Setiap peserta pelatihan memperoleh 2 bibit anggur yang ditanam di lingkungan peserta.

c) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan keanekaragamanhayati melalui penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga diharapkan ada peningkatan terhadap pencapaian indeks tutupan lahan/vegetasi.

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.2.897.180.664 terealisasi sebesar Rp.2.852.558.284 atau 98.46%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Terbangunnya Taman/RTH Pembangunan taman/RTH bertujuan untuk meningkatkan pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan dan pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara.
- (2) Terlaksananya Perencanaan dan DED Penataan RTH dan Gerbang Masuk sebanyak 3 dokumen
Dokumen pada kegiatan ini terdiri dari:
 - (a) DED Gerbang Sedayu.
 - (b) DED Gerbang Srandakan.
 - (c) DED Gerbang Masuk Pemda II.
- (3) Terlaksananya Kajian Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan Hidup sebanyak 5 dokumen
Dokumen tersebut terdiri dari:
 - (a) Penelitian Penyusunan Review Data RTH.
 - (b) Penelitian Perencanaan DED Penataan RTH Penyangga Kota Bantul.
 - (c) Penelitian Inventarisasi Kebutuhan Pemeliharaan Taman.
 - (d) Peneitian Kajian Pemanfaatan Potensi Lingkungan di Sempadan Sungai Opak Wilayah Kecamatan Piyungan dan Kecamatan Pleret.

- (e) Penelitian Kajian Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Kecamatan Banguntapan dan Sewon.
- (4) Terlaksananya Penyusunan Perbup Kebijakan dan Pelayanan Lingkungan Hidup sebanyak 2 dokumen
Dokumen tersebut:
 - (a) Penyusunan Perbup Kebijakan Penghijauan RTH.
 - (b) Penyusunan Perbup Penebangan Pohon.
- (5) Terlaksananya gerakan penghijauan 2 kegiatan :
Kegiatan terdiri dari:
 - (a) Penanaman pohon di jalan Klodran.
 - (b) Pemasangan Rambu taman.
- (6) Terlaksananya informasi dan promosi keanekaragaman hayati dan konservasi lingkungan
3 Jenis Kegiatan ini terdiri dari:
 - (a) Cetak Profil Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Lingkungan.
 - (b) Cetak Poster Keanekaragaman hayati dan konservasi lingkungan.
 - (c) Cetak Pedoman Pengelolaan Lingkungan Bersih dan Sehat.
- (7) Terlaksananya Penyusunan Perbup Kebijakan dan Pelayanan Lingkungan Hidup sebanyak 2 dokumen.
- (8) Terlaksananya gerakan penghijauan 2 kegiatan.
- (9) Terlaksananya informasi dan promosi keanekaragaman hayati dan konservasi lingkungan.

4) Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk mewujudkan kinerja penataan dan pentaatan lingkungan hidup yang lebih baik melalui upaya-upaya peningkatan pada pelaku-pelaku usaha yang memiliki ijin

lingkungan dengan mengedepankan pada aspek pelayanan prima dan mudah. Indikator program ini adalah jumlah usaha/kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan dengan target 732 dokumen dengan realisasi sebanyak 1.159 dokumen.

Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi lingkungan hidup dalam upaya penyampaian informasi publik yang komprehensif. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.133.240.000 terealisasi sebesar Rp.131.937.000 atau 99,02 %.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Pelaksanaan Sosialisasi Penyusunan Dokumen Lingkungan.
Sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan secara online diikuti oleh warga masyarakat sebanyak 50 orang.
- (2) Pembangan aplikasi Sistem DOKLH (doklh.bantulkab.go.id) untuk pelaporan pengelolaan lingkungan secara online
- (3) Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul.

b) Kegiatan Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan informasi perencanaan lingkungan hidup. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.71.775.000 terealisasi sebesar Rp.71.025.000 atau 98,95%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Bantul yang berisi informasi tentang lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Dokumen ini memuat 65 jenis data terkait kondisi dan kualitas lingkungan hidup Kabupaten

Bantul. IKPLHD bermanfaat sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan prioritas masalah, rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan

(2) Terlaksananya workshop penyusunan IKPLHD untuk 50 orang peserta dari OPD terkait, kecamatan dan LSM.

c) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan fungsi pengawasan terhadap implementasi perijinan lingkungan hidup secara benar dan tepat serta meningkatkan ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan dan menyampaikan pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan hidupnya. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.3.500.000 terealisasi sebesar Rp.3.500.000 atau 100%.

d) Kegiatan Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk dapat menyelesaikan aduan masyarakat terkait dugaan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengaduan kasus lingkungan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.31.250.000 terealisasi sebesar Rp.30.250.000 atau 96.8 %.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa: penyelesaian pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebanyak 33 aduan.

e) Kegiatan Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mempersiapkan bahan penyusunan Raperda Lingkungan Hidup berupa Naskah Akademik

(NA) RPPLH Kabupaten Bantul. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang diikuti 100 pelaku usaha.

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.15.080.000 terealisasi sebesar Rp.10.400.000 atau 68.96 %. Ketercapaian kegiatan kurang dari 75 % dikarenakan penyusunan Perda RPPLH tidak dilaksanakan karena belum adanya Perda RPPLH di tingkat DIY.

c. Keberhasilan Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup

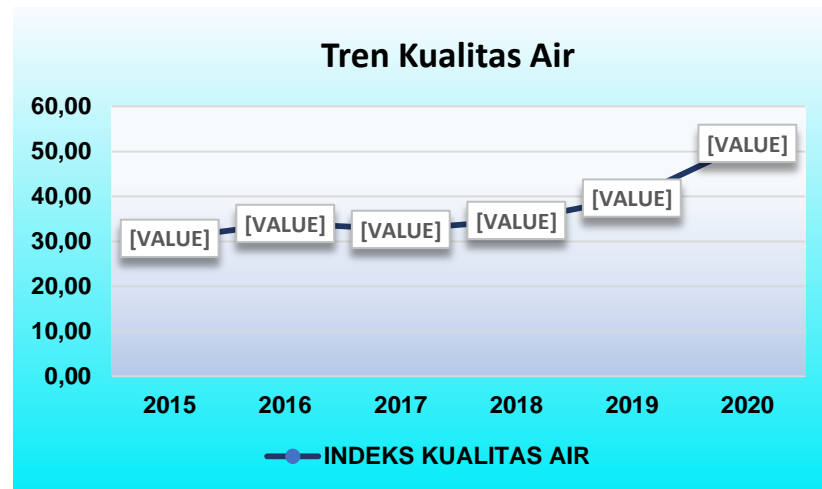
Keberhasilan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dari berbagai program kegiatan sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- a) Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan berdasarkan Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpadu dan berkelanjutan) dengan capaian sebagai berikut:
 - (1) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 77.628,73 ton/tahun.
 - (2) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 39.814,91 ton/tahun.
- b) Meningkatnya jumlah kelompok pengelola sampah sebanyak 162 Kelompok di 75 Desa
- c) Meningkatnya sarana dan prasarana persampahan yang meliputi Gerobak Sampah dan Tempat Sampah

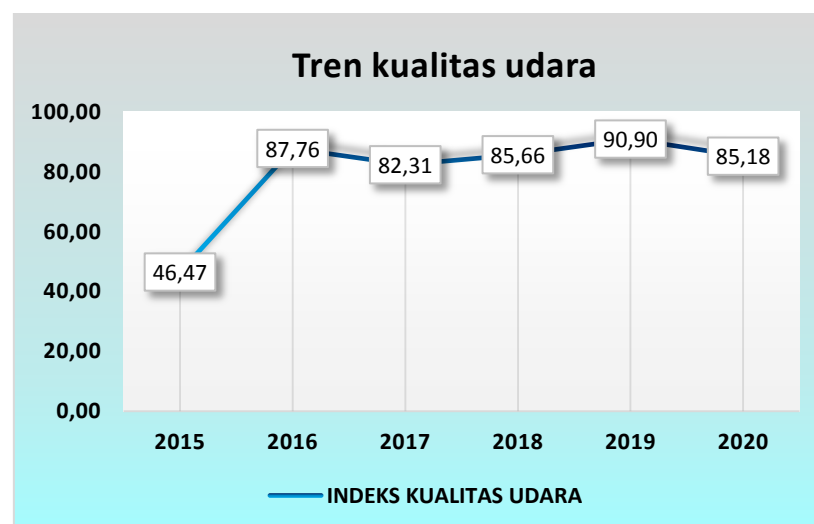
2) Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

- a) Meningkatnya rata-rata kualitas air sungai yang mencapai nilai 51,80 pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 39,63.



Grafik 3. 11 Tren Kualitas Air Sungai

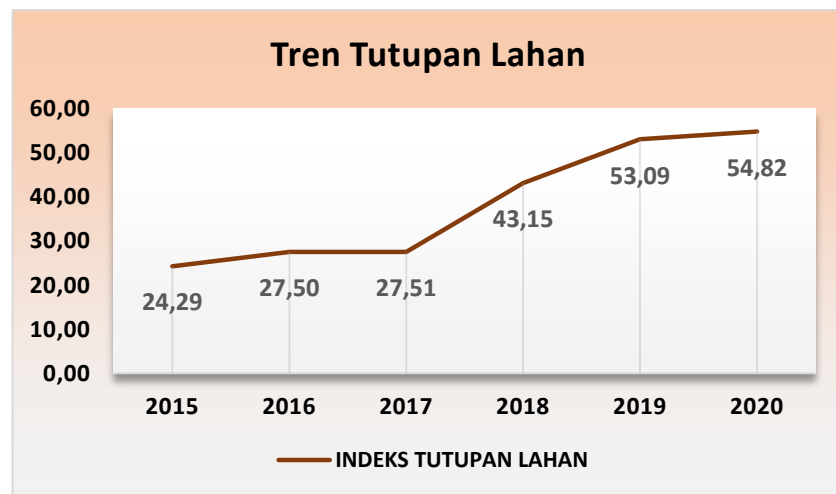
- b) Meningkatnya rata-rata kualitas air sungai di Kabupaten Bantul yang diukur dari peningkatan konsentrasi DO (Dissolved Oxygen) di Sungai Winongo sebesar 7.56 mg/L.
- c) Menurunnya rata-rata kualitas udara yang mencapai angka 85,18 pada tahun 2020 turun dari rata-rata kualitas udara pada tahun 2019 sebesar 90,90 namun masih melebihi target RPJMD sebesar 80,00.



Grafik 3. 12 Tren Kualitas Udara

3) Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

- a) Meningkatnya luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan, pantai, mata air, lahan kritis) seluas 1,15 Ha. Hal ini mendorong meningkatnya Indeks Tutupan Lahan di Kabupaten Bantul yang mencapai 54,82 naik dari tahun 2019 yang mencapai 53,09.



Grafik 3. 13 Tren Tutupan Lahan Di Kabupaten Bantul

- b) Meningkatnya jumlah RTH Publik yang mencapai sebesar 13% di Kawasan Perkotaan, dan merupakan salah satu upaya secara berkelanjutan untuk memenuhi ketersediaan minimal RTH di Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul sebesar 20%.

4) Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup

- a) Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam upaya pengelolaan lingkungan yang terlihat dengan adanya peningkatan jumlah usaha/kegiatan di Kab. Bantul Sepanjang tahun 2020 terdapat penambahan sebanyak 86 usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan berupa UKL UPL

dan rekom DELH sebanyak 1 usaha/kegiatan, sehingga total usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan (UKL UPL dan AMDAL) sebanyak 1.157 dokumen.

- b) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kondisi lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
- c) Meningkatnya kualitas pelayanan lingkungan hidup, baik pada aspek *respon time* maupun pada aspek prosedurnya. Keberadaan aplikasi penyusunan dokumen lingkungan secara online melalui Sistem DOKLH telah memberikan kemudahan akses pelayanan.

d. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 52 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Lingkungan Hidup

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Tingkat pencemaran yang masih relatif tinggi khususnya pada air sungai di Kabupaten Bantul	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Sekber Kartamantul dalam upaya peningkatan kualitas air sungai ➢ Pendampingan, sosialisasi, promosi dan penguatan kelembagaan forum/komunitas peduli sungai ➢ Pembinaan terhadap penataan ijin usaha pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh industri/pelaku usaha
2	Kecenderungan alih fungsi lahan yang masih relatif tinggi sehingga berpotensi menurunkan luas tutupan lahan	Penambahan luasan hutan kota, taman kota dan hutan rakyat
3	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (membuang sampah di sembarang tempat bahkan di sungai)	➢ Merubah <i>mindset</i> cara pandang masyarakat terhadap sampah (penyadaran masyarakat akan tanggung jawabnya untuk mengelola setiap sampah yang

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
		<p>dihasilkan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menggiatkan dan menguatkan kelembagaan kelompok pengelola sampah di tiap desa ➤ Peningkatan peran BUMDes dalam unit usaha penanganan sampah ➤ Penguatan sinergitas antar pemangku wilayah dalam pengelolaan lingkungan hidup

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang dilaksanakan selama tahun 2020 terurai sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
- b) Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
- b) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
- c) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan

4) Program Penataan Administrasi Kependudukan

- a) Kegiatan Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)
- b) Kegiatan Pelayanan Mutasi Penduduk

- c) Kegiatan Peningkatan Kebijakan Mutu Publik Dalam Bidang SDM
 - d) Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen Administrasi Kependudukan
 - e) Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan
- 5) Program Keserasian Kebijakan Kependudukan**
- a) Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil
 - b) Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan
 - c) Kegiatan Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian
- 6) Program Pengelolaan Data Kependudukan**
- a) Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan
 - b) Kegiatan Publikasi Kebijakan Kependudukan
 - c) Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kependudukan
 - d) Kegiatan Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
 - e) Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan mewujudkan tata kelola administrasi perkantoran yang baik dan terukur. Pagu anggaran dari program ini adalah Rp. 1.671.679.700,- terealisasi sebesar Rp. 1.663.125.416,- atau 99,49%.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :

a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Kegiatan ini terdiri dari 13 (tiga belas) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 584.290.260,- terealisasi sebesar Rp.578.458.701,- atau 99 %.

b) Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah mendukung pelaksanaan kegiatan rapat-rapat, koordinas dan konsultasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, menyediakan prasarana dalam menanggapi tamu dinas dan kegiatan perjalanan dinas yang dilaksanakan baik dalam maupun luar daerah dapat terlaksana dengan baik dan terukur. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.157.550.000,- terealisasi sebesar Rp. 156.987.500,- atau 99,64 %.

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam melayani masyarakat dengan jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja melalui asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.929.839.440,- terealisasi sebesar Rp. 927.679.215,- atau 99,77%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur penyelenggara pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga dapat mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang nyaman di lingkungan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Pagu anggaran dari program ini adalah Rp. 425.906.000,- terealisasi sebesar Rp.425.612.274,- atau 99,93%.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain

a) Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan ruang pelayanan dan ruang kerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga mewujudkan lingkungan pelayanan yang tertata, bersih dan nyaman. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 91.050.000,- terealisasi sebesar Rp. 90.758.000,- atau 99,68%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

b) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memelihara kendaraan dinas dan kendaraan operasional untuk melayani masyarakat sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih dekat dan dapat mencapai sektor bawah. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 234.492.000,- terealisasi sebesar Rp. 234.490.274,- atau 100%.

c) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan dengan baik sehingga memiliki masa pakai yang panjang. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 100.364.000,- terealisasi sebesar Rp. 100.364.000,- atau 100 %. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa belanja pemeliharaan perlengkapan kantor.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dalam mempertanggungjawabkan atas semua anggaran yang dibebankan kepada instansi dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas di tahun berikutnya, serta sebagai bahan informasi terhadap tingkat keberhasilan/ kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati. Pagu anggaran dari program ini adalah Rp. 43.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 43.500.000,- atau 100%.

4) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (KK, KTP, dan KIA), mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi kependudukan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen pendaftaran penduduk. Pagu anggaran dari program ini adalah Rp.3.611.703.500,- terealisasi sebesar Rp. 3.581.347.434,- atau 99,16%.

Program Penataan Administrasi Kependudukan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya dokumen kependudukan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi penduduk serta mewujudkan pemerintah yang baik dengan cakupan kegiatan pelaksanaan prinsip efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 405.209.000,- terealisasi sebesar Rp.385.734.000,- atau 95,19 %.

Untuk mendukung pencapaian target kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk, dilakukan juga monitoring dan evaluasi ke desa-desa. Dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dilakukan beberapa kegiatan diantaranya :

- (1) Distribusi KTP-el ke desa-desa dan kecamatan sebanyak 213.928 keping.
- (2) Perekaman KTP-el sebanyak 717.939 dari target 719.139 per 31 Desember 2019. Target perekaman belum mencapai 100% dikarenakan masih rendahnya kesadaran penduduk akan arti pentingnya dokumen identitas penduduk.
- (3) Pencetakan Suket pengganti KTP el sebanyak 61.644 lembar.
- (4) Perekaman KTP-EL dengan menggunakan mobil keliling (Mobile) dari rumah ke rumah atas permintaan warga.
- (5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat 102.500 keping blangko KTP-EL dari Kementrian Dalam Negeri.

- (6) Pembelian ribbon KTP-el dengan rincian Avansia Ribbon (89 buah), Fargo Film (89 buah), Cleaning Kit (14 buah).
- (7) Pembelian ribbon KIA jumlah Ribbon KIA (150) buah dan Cleaning Kit (75 buah).
- (8) Sosialisasi dengan Masyarakat melalui “Dukcapil Menyapa Masyarakat” melalui zoom, instagram dan youtube serta melakukan publikasi lewat media brosur, leaflet dan banner dan video animasi untuk dipublikasikan lewat media facebook dan Instagram dinas dukcapil.

b) Kegiatan Pelayanan Mutasi Penduduk

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik serta mewujudkan “Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan” melalui pindah/pindah datang secara online yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 47.288.000,- terealisasi sebesar Rp. 47.288.000,- atau 100%.

Pada kegiatan pelayanan mutasi penduduk hanya 1 (satu) sub kegiatan yang dapat terealisasi dikarenakan beberapa anggaran pada kegiatan ini terdampak refocusing untuk penanganan covid-19. Kegiatan yang tidak terealisasi adalah Forum Komunikasi Pindah Datang WNI / WNA dengan target sasaran 17 kecamatan, 75 desa dan beberapa perwakilan perusahaan yang mempekerjakan orang asing pemegang Ijin Tinggal Terbatas (ITAS) / Ijin Tinggal Tetap (ITAP). Dengan adanya refocusing anggaran pada kegiatan ini berdampak Seksi Pindah Datang Penduduk kurang optimal pada sosialisasi regulasi yang baru. Untuk mengantisipasi hal tersebut akan diadakan

ditahun 2021 dan telah dibuat SOP baru terkait regulasi tersebut. Kegiatan yang terealisasi adalah Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG. Berikut data pelayan pindah datang penduduk.

c) Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen Administrasi Kependudukan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pendataan penduduk non permanen di lingkungan Kabupaten Bantul dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan untuk memberikan gambaran kondisi perkembangan penduduk non permanen di Kabupaten Bantul.

Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data penduduk nonpermanen dapat digunakan dalam perancangan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.66.091.500,- terealisasi sebesar Rp. 66.091.500,- atau 100%.

Pada Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen Administrasi Kependudukan terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak terealisasi yaitu Honorarium Tim Non PNS dan Jasa Narasumber dikarenakan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19.

d) Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi kepemilikan identitas penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan demi terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan berbasis NIK (nomor Induk Kependudukan) yang merupakan *single Identity Number*.

Kegiatan ini terdiri dari 19 (sembilan belas) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 2.980.909.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.970.027.934,- atau 99,63%.

Pada kegiatan ini yang tidak terealisasi adalah Belanja sewa Gedung/ Kantor/ Tempat dikarenakan terdampak refocusing anggaran penanganan covid-19.

e) Kegiatan Peningkatan Kebijakan Mutu Publik Dalam Bidang SDM

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya dokumen kependudukan KK dan KTPel bagi penduduk, keakuratan data kependudukan, SDM yang berkualitas serta untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 112.206.000,- terealisasi sebesar Rp.112.206.000,- atau 100%.

5) Program Keserasian Kebijakan Kependudukan

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan mendekatkan pelayanan pencatatan sipil kepada masyarakat. Pagu anggaran dari program ini adalah Rp. 843.632.500,- terealisasi sebesar Rp. 836.448.500,- atau 99,15%.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah melindungi dan mengamankan elemen data terkait pentingnya informasi yang terkandung di dalam arsip vital tersebut, melindungi fisik dokumen pencatatan sipil dari kerusakan, kehilangan dan

kemusnahan serta mempermudah dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan lembaga lain guna pemanfaatan data.

Kegiatan ini terdiri dari 10 (sepuluh) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 188.382.500,- terealisasi sebesar Rp.188.382.500,- atau 100%.

Dalam upaya meningkatkan kepemilikan akta kelahiran dan kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung tujuan tersebut antara lain :

- (1) Melaksanakan jemput bola pelayanan akta kelahiran dan kematian yang bekerja sama dengan 75 desa.
- (2) Koordinasi dengan petugas registrasi desa untuk pelaksanaan proses percepatan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian.
- (3) Kerjasama penerbitan akta kelahiran dengan mengintegrasikan SIAK dengan pelayanan rumah sakit/ rumah sakit bersalin/ puskesmas.
- (4) Mengintegrasikan data hasil pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk ke dalam database kependudukan.
- (5) Mensinkronkan data skala Kabupaten mengenai perkawinan, perceraian, talak, rujuk yang akurat, mutakhir dan mudah diakses.

Dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan terdapat peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil diantaranya adalah :

- (1) Penerbitan akta kelahiran sebanyak 13.373 akta dan akta kematian sebanyak 10.006 akta yang bekerja sama dengan Petugas Register Desa se Kabupaten Bantul.
- (2) Mencetuskan inovasi-inovasi :
 - (a) Go Akta
 - (b) Aksi SIMPATI Pelayanan Cepat Akta Kematian

- (c) Telah dilakukan pelayanan jemput bola di 75 desa di 17 Kecamatan di Kabupaten Bantul (Moro Lego)
- (d) Aksi Mesra
- (e) Dukcapil Smart

b) Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah mewujudkan sinkronisasi data dan integrasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) untuk data nikah dan rujuk dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk perubahan status perkawinan dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi pengantin baru penduduk Kabupaten Bantul.

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan. Pagu anggaran ini sebesar Rp. 20.350.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.316.000,- atau 99,83%

Jumlah sinkronisasi data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) yang bekerjasama dengan KUA se Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 3.53

Tabel 3. 53 Sinkronisasi Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR)

NO	Nama Pelayanan	Total
1	Jumlah Pernikahan secara agama Islam	2.504
2	Jumlah Perkawinan yang dicatatkan Di Disdukcapil	227
3	Jumlah Perceraian yang dicatatkan Di Disdukcapil	50
4	Cerai Talak	625
5	Cerai Gugat	22

c) Kegiatan Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian sesuai dengan target yang telah disusun dalam RPJMD.

Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kerjasama dengan pemerintah desa dengan kegiatan jemput bola dan kerjasama dengan rumah sakit swasta serta praktek bidan se Kabupaten Bantul. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 634.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 627.750.000,- atau 98,87%.

6) Program Pengelolaan Data Kependudukan

Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk menyajikan data yang akurat serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan. Pagu anggaran dari program ini adalah Rp.288.562.500,- terealisasi sebesar Rp. 287.870.500,- atau 99,76%.

Program Pengelolaan Data Kependudukan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan database kependudukan yang akurat dan mutakhir. Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.288.562.500,- terealisasi sebesar Rp. 287.870.500,- atau 99,76%.

b) Kegiatan Publikasi Kebijakan Kependudukan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan.

Adapun tujuan dari publikasi kependudukan yaitu terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan sehingga menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat.

Kegiatan ini terdiri dari 11 (sebelas) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 85.686.000,- terealisasi sebesar Rp. 85.678.000,- atau 99,99%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Sosialisasi kebijakan kependudukan dan sosialisasi Kaperu dengan Kementerian Agama dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya tentang Program Perubahan Identitas di Kartu Keluarga dan KTP-el bagi pengantin baru melalui sinkronisasi data dan integrasi sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) dan Sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Kabupaten Bantul yang dilaksanakan sebanyak 2 kali.

Pada kegiatan ini yang tidak terealisasi adalah Belanja sewa Gedung/ Kantor/ Tempat, Belanja sewa peralatan display untuk Bantul Expo, Jasa Tenaga Harian Lepas penjaga Stand Bantul Expo, dan Belanja Jasa Transport Petugas Bantul Expo dikarenakan terdampak refocusing anggaran penanganan covid-19. Dengan tidak terlaksannya kegiatan Bantul Expo membuat target penyampaian informasi dan pelayanan adminduk di Bantul Expo tidak terealisasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih mengencarkan pelayanan jemput bola door to door.

c) Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kependudukan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyajikan data dan informasi perkembangan kependudukan di Kabupaten Bantul yang bermanfaat untuk pengembangan pembangunan daerah, dan perumusan kebijakan.

Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 38.762.500,- terealisasi sebesar Rp. 38.762.500,- atau 100%.

d) Kegiatan Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sarana untuk memberikan solusi terkait masalah kependudukan. Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.11.750.500,- terealisasi sebesar Rp. 11.750.000,- atau 100%.

e) Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah agar Dinas/ Instansi yang melaksanakan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 87.300.000,- terealisasi sebesar Rp.87.050.000,- atau 99,71%.

Pada kegiatan ini yang tidak terealisasi adalah Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Honorarium Peserta Sosialisasi dikarenakan terdampak refocusing anggaran penanganan covid-19. Kegiatan Sosialisasi direncanakan diadakan pada tahun 2021. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

- (1) Pengumuman tentang himbauan pemanfaatan aplikasi Dukcapil Smart lewat radio.
- (2) Publikasi melalui Koran Jogja.
- (3) Sosialisasi di bidang kerjasama pemanfaatan data. Sosialisasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Akta Kelahiran Online dengan RSKIA Sadewa pada bulan Agustus 2020, RSKIA PKU Muhammadiyah Kotagedhe, RSU Rajawali , RS Ull pada bulan Oktober 2020.

c. Keberhasilan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016-2020

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul telah berupaya keras dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bantul. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul telah melakukan integrasi kerjasama dengan instansi/ lembaga lain dengan inovasi yang menggunakan data kependudukan sebagai sumber data, adapun Kerjasama yang memunculkan inovasi baru ini adalah:

1) KAPERU (KTP dan KK Baru Untuk Pengantin Baru)

Merupakan inovasi untuk menerbitkan KK dan KTP-el baru bagi pasangan pengantin baru. Inovasi ini ada karena kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Bantul, dimana bentuk kerjasamanya adalah mengintegrasikan antara Aplikasi SIAK dan Aplikasi SIMKAH. Pada awalnya kerjasama ini melibatkan 2 (dua) KUA selanjutnya menjadi 8 (delapan) KUA dan sekarang sudah 17 (tujuh belas) KUA di Kabupaten Bantul. Inovasi KAPERU ini juga sudah berkembang yang awalnya semua cetak KK dan KTP-el oleh petugas cetak dinas saat ini sudah ada 6 (enam) kecamatan yang diberi alat cetak KTP-el, sehingga lebih mempercepat pelayanan KAPERU.

Instansi yang terlibat: Kemenag Kabupaten, KUA 17 Kecamatan, Dinas Dukcapil, Operator 17 Kecamatan.

2) PAGODA (Perekaman KTP-el Plus Tes Golongan Darah)

Tidak hanya pemanfaatan data saja, dari kerjasama ini lahirlah inovasi baru yang melibatkan instansi/ lembaga lain. Inovasi tersebut adalah Inovasi PAGODA (Perekaman KTP-el Plus Tes Golongan Darah). Inovasi ini bekerja sama dengan PMI Kabupaten Bantul dan Dinas Kesehatan, dimana pemohon yang akan melakukan perekaman jika tidak diketahui golongan

darahnya akan difasilitasi dalam pengecekan golongan darah baik di PMI maupun di Puskesmas se Kabupaten Bantul.

Sesuai dengan Keputusan Bupati No. 566 Tahun 2018 Tentang Pembebasan Tarif Layanan Kesehatan pada Pelayanan Tes Golongan Darah, sehingga meringankan beban pemohon yang ingin melakukan tes golongan darah dan diperkuat dengan Peraturan Bupati No. 116 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2020 Tentang Pendampingan Pembinaan Kesehatan.

Instansi yang terlibat: Dinas Kesehatan, Bagian hukum, Bagian administrasi pembangunan, 17 Puskesmas, Dinas Dukcapil, 17 Operator Kecamatan.

3) Pelayanan Sidang Terpadu

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul telah melaksanakan sidang terpadu yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Bantul. Dimana tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mempermudah layanan Penerbitan Akta Kematian bagi Penduduk Kabupaten Bantul yang tidak memiliki Dokumen Kependudukan dan tidak tercatat di database kependudukan. Hal ini bersamaan dengan adanya program dari Badan Pertanahan Nasional yaitu program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Sidang terpadu telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali di Pengadilan Negeri Bantul dan di Desa Panggunharjo, Sewon, Bantul. Adapun pelaksanaan sidang ini menghadirkan saksi-saksi dan surat pernyataan dari ahli waris yang mengajukan.

Untuk pemanfaatan database Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul telah memberikan layanan terintegrasi untuk data yang akurat dan valid dengan memberikan hak akses untuk pelayanan publik seperti BPJS, Dinas Sosial untuk pendaftaran Jamkesda, Dinas Pendidikan

untuk Pendaftaran Siswa Baru Secara Online, DPMPPT untuk Pendaftaran Perijinan, Puskesmas dan Rumah Sakit untuk Layanan. Layanan dipuskesmas telah memanfaatkan NIK sehingga mempercepat pelayanan dan data akurat.

4) Aksi Simpati

Inovasi aksi simpati merupakan inovasi dalam penerbitan dan penyampaian Akta Kematian, KK dan KTP ahli waris sebelum jenazah dikebumikan, terdapat beberapa instansi yang terlibat antara lain Dinas Dukcapil dengan 75 Lurah Desa, 933 Dukuh, RT dan 75 petugas register desa.

5) Go Akta/KIA/KTP

Inovasi Go AKta dan Go KIA merupakan inovasi pengiriman Akta/ KIA/ KTP kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan PT POS.

6) Go Akta dg RSU Negeri Swasta

Inovasi Go Akta merupakan penerbitan dan pengiriman Akta dan KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul bekerja sama dengan 7 RSU Negeri Swasta, Puskesmas se Kabupaten Bantul dan 21 Bidan Praktek Mandiri.

e. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 54 Permasalahan Besar Kabupaten Dalam RENSTRA

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Cakupan kepemilikan KIA anak usia 0 – 16 tahun belum tercapai	Kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk penerbitan KIA secara kolektif
		Distribusi KIA yang bekerjasama dengan PT. POS
2	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0 – 18 tahun belum optimal	Melakukan kerjasama dengan rumah sakit dan puskesmas untuk melakukan kegiatan jemput bola akta kelahiran
		Membangun pola pikir masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran melalui sosialisasi

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
		Melakukan kerjasama dengan praktik bidan se Kabupaten Bantul
3	Pemutahiran data kependudukan belum optimal	Mengoptimalkan penggunaan layanan online dengan aplikasi Dukcapil Smart
4	Kesadaran masyarakat untuk segera merubah status perkawinan akibat dari peristiwa penting (pernikahan) yang dialami masih rendah yang mengakibatkan data kependudukan yang disajikan tidak valid dan akurat	Menerbitkan KTP baru (ktp dengan status baru) bagi penduduk bantul yang melangsungkan pernikahan tersebut. Sebagai instansi pelaksana yang berhadapan langsung dengan masyarakat yaitu seluruh KUA di Kabupaten bantul
5	Kesadaran masyarakat untuk segera mengurus akta kematian masih rendah masyarakat hanya mengurus akta kematian jika akan dibutuhkan	Sosialisasi dan menciptakan inovasi Aksi Simpati (Pembuatan akta kematian sehari jadi)

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- a) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
- b) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
- c) Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
- d) Kegiatan Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan

2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

- a) Kegiatan Pelatihan ketrampilan usaha Ekonomi Perdesaan
- b) Kegiatan Pemberdayaan usaha Ekonomi pedesaan
- c) Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna

3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

- a) Kegiatan Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
- b) Kegiatan Penyelenggaraan lomba desa
- c) Kegiatan Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD
- d) Kegiatan Pendampingan kegiatan TMMD
- e) Kegiatan Bantul Ekspo dan karnaval
- f) Kegiatan Pengembangan desa siaga
- g) Kegiatan Pengembangan Kerjasama Desa

4) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera (P2WKSS)

5) Program Pemberdayaan Masyarakat

- a) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
- b) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan Sumber Daya Alam dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar. Pagu anggaran dari program ini sebesar Rp350.196.000 dan sudah terealisasi sejumlah Rp350.166.000 atau 99.99%.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

a) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk operasional pendampingan/fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Keuangan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Desa (P2MD) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Pagu anggaran ini sebesar Rp270.590.000 dan sudah terealisasi sejumlah Rp270.560.000 atau 99.989%.

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan.

b) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pelaksanaan bimbingan teknis kepada pemerintah desa tentang pengawasan, perencanaan pembangunan desa, serta pengkajian potensi desa agar *stakeholders* di pemerintah desa dapat melaksanakan fungsi dengan baik dalam melaksanakan pembangunan di tingkat desa. Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp7.500.000 terealisasi sejumlah Rp7.500.000 atau 100%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa koordinasi persiapan pendampingan pembangunan desa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2020.

Koordinasi ini menjadi awal dari pelaksanaan pendampingan terhadap seluruh desa di Kabupaten Bantul dalam rangka pembangunan desa.

c) Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk operasional pendampingan/fasilitasi pelaksanaan

pengumpulan hasil *updating* profil desa oleh pemerintah desa di wilayah Kabupaten Bantul. Pagu anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar Rp35.500.000 terealisasi sebesar Rp35.500.000 atau 100%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa Evaluasi Profil Desa pada 75 desa di 17 kecamatan di Kabupaten Bantul sebanyak 1 kali. Evaluasi kegiatan profil desa dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2020 dengan peserta petugas profil desa sebanyak 75 orang dari 75 desa ditambah dengan petugas profil desa dari unsur DPPKBPM 9 orang yang bertempat di Bangsal Rumah Dinas Bupati Bantul, Trirenggo.

d) Kegiatan Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk operasional penyaluran dan pendampingan bantuan Pembangunan Pengelolaan Air Bersih (PPAB). Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp 36.606.000,- terealisasi sebesar Rp 36.606.000,- atau 100%

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih secara mudah, murah, merata dan berkelanjutan dimasyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan air di daerah perbukitan dan daerah-daerah yang kesulitan air bersih, salah satu program Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu mengalokasikan untuk Bantuan PPAB melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) PPAB ke Pemerintah Desa. Alokasi anggaran BKK PPAB tahun anggaran 2020 sebesar Rp.2.000.000.000. Namun karena untuk menangani dampak akibat COVID-19 bantuan keuangan tersebut di refocusing, sehingga alokasi anggaran untuk operasional PPAB

dipergunakan untuk memverifikasi proposal PPAB yang masuk sebanyak 53 proposal.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Verifikasi proposal permohonan Bantuan Keuangan PPAB bagi kelompok pengaju di seluruh Kabupaten Bantul. Proposal permohonan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih yang masuk sebanyak 53 kelompok Pengelola Air Bersih (PAB), dan yang disetujui untuk diberikan bantuan sebanyak 17 kelompok PAB di 12 desa 6 kecamatan. Verifikasi proposal PAB dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2020 s.d 6 Februari 2020.
- (2) Monitoring, check lokasi kegiatan PPAB untuk kelompok pengaju proposal bantuan keuangan PPAB dari 53 kelompok Pengelola Air Bersih (PAB) di 12 desa 6 kecamatan di Kabupaten Bantul.

2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi Desa dan pemberdayaan masyarakat miskin. Pagu anggaran dari program ini adalah sebesar Rp821.240.250 dan sudah terealisasi sejumlah Rp820.790.250 atau 99.955%. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

a) Kegiatan Pelatihan ketrampilan usaha Ekonomi Pedesaan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan ketrampilan untuk menjalankan usaha

ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Kegiatan ini di dukung anggaran daerah Rp671.712.750 terealisasi Rp671.262.750 atau 99.933%.

Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Ekonomi Pedesaan terdiri dari 4 sub kegiatan, diantaranya adalah :

(1) Sub Kegiatan Bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola UP2K-PKK

Maksud dari diadakannya kegiatan ini adalah sebagai acuan bagi TP-PKK dan Kader UP2K-PKK dalam mengelola dan menumbuhkan kembangkan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Sedangkan tujuannya adalah sebagai sarana untuk mengetahui lebih dekat kegiatan UP2K-PKK khususnya dalam pengelolaan kegiatan beserta administrasinya.

Bimtek peningkatan kapasitas pengelola UP2K-PKK dilaksanakan

(a) Hari/tanggal, Kamis dan Jumat 19 dan 20 Nopember 2020, pukul 8.30-Selesai bertempat di Balai Desa Jambidan dan Ringinharjo, dengan jumlah peserta masing masing 30 orang pengelola UP2K-PKK,.

(b) Hari/tanggal, Senin dan Selasa 23 dan 24 Nopember 2020, pukul 8.30 - selesai bertempat di Balai Desa Argomulyo, Srihardono dan Gadingsari dengan jumlah peserta 30 orang pengelola UP2K-PKK,.

(2) Sub Kegiatan : Peningkatan ketahanan keluarga berbasis pada program pemberdayaan ekonomi dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola UP2K-PKK.

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk acuan bagi TP-PKK dan Kader UP2K-PKK dalam mengelola dan mengembangkan usaha ekonomi serta

meningkatkan pendapatan & kesejahteraan keluarga. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data & informasi tentang progress kemajuan, hambatan dan permasalahan yang berkaitan dengan UPK.

(3) Sub Kegiatan Fasilitas Pembentukan Bumdes

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat lebih terbuka bahwa perubahan kehidupan harus dimulai dari diri sendiri serta mengubah sikap masyarakat desa dalam berwirausaha.

(4) Sub Kegiatan : Pelatihan BUMDES

Maksud dan tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan teknis & administrasi Bumdes supaya masing masing Bumdes dalam menjalankan usahanya tidak menemui hambatan.

b) Kegiatan Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah upaya pengalokasian sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat guna meningkatkan produktifitas masyarakat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Kegiatan ini di didukung dengan anggaran sebesar Rp 41.180.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp 41.180.000,- atau 100%. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

(1) Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Pasar Desa

Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan tambahan pengetahuan dan kemampuan pada Lurah



Desa pengelola pasar desa dalam pengelolaan pasar tradisional. Sedangkan tujuannya adalah Memberikan pengertian bahwa pasar desa memberikan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat.

(2) Sub Kegiatan : Mobile Training Pelaku Pasar Desa

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan dan kemampuan pada Lurah Desa dan Pengelola Pasar Desa dalam pengelolaan sebuah Pasar Tradisional. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengertian bahwa Pasar Desa memberi manfaat yaitu Tersedianya tempat bagi masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, memberikan pemahaman bahwa pasar desa akan memberikan tambahan Pendapatan Asli Desa sehingga mampu menjadi sumber pendapatan bagi Pemerintah Desa.

c) Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan apresiasi serta mewadahi masyarakat baik pelaku maupun penemu teknologi tepat guna dan memasyarakatkan teknologi serta merupakan metode untuk menumbuhkan budaya *entrepreneur*. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp108.347.500 dan sudah terealisasi sejumlah Rp.108.347.500 atau 100%. Terdapat 2 sub kegiatan dalam kegiatan ini, diantaranya adalah :

(1) Sub Kegiatan : Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Hasil Pertanian & Peternakan Berbasis TTG

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pengolahan hasil pertanian berbasis TTG. Tujuan dari

kegiatan ini adalah untuk meningkatkan tingkat pengetahuan dalam bidang TTG melalui program & diseminasi atau sosialisasi hasil pertanian.

(2) Sub Kegiatan : Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)

Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk menyamakan persepsi, bahasa dan sikap serta upaya peningkatan kapasitas baik pemahaman, pengetahuan maupun keterampilan bagi para penemu Inovasi Teknologi Tepat Guna Kabupaten Bantul. Memberikan apresiasi untuk pelaku/pencipta Teknologi Tepat Guna & Menambah pengetahuan dan wawasan bagi Pemerintah, para pelaku TTG sendiri maupun masyarakat tentang perkembangan teknologi serta manfaatnya dalam rangka peningkatan mutu dan kuantitas produksi diberbagai sektor usaha. Memasyarakatkan teknologi dan metode untuk menumbuhkan budaya *entrepreneur*.

3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan adat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Program ini memiliki anggaran sebesar Rp855.196.500 terealisasi 100%.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan diantaranya adalah:

a) Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong dan mendampingi pelaksanaan

musyawarah desa (Musrenbangdes) pada pemerintah desa agar dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp 5.333.000 terealisasi sebesar Rp 5.333.000 atau 100%.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu fasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes dalam bentuk pendampingan pelaksanaan Musrenbangdes dan pelaksanaan bimbingan teknis kapasitas pamong kepada 75 desa di 17 kecamatan di Kabupaten Bantul. Pelaksanaan pendampingan kegiatan musyawarah pembangunan desa bermitra dengan Tim Ahli Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) Kementerian Desa DT dan Transmigrasi pada Kabupaten Bantul.

b) Kegiatan Penyelenggaraan lomba desa

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk operasional pelaksanaan lomba desa di Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 dari tingkat kabupaten, pendampingan lomba desa tingkat provinsi dan lomba desa tingkat nasional/regional. Perlombaan Desa dan kelurahan pada hakekatnya adalah sebagai salah satu upaya untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri yang sekaligus mengevaluasi keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan dengan melihat lonjakan perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan selama 2 (dua) tahun terakhir. Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar

Rp417.565.000 dan sudah terealisasi sejumlah Rp417.565.000 atau 100%.

Kegiatan lomba desa tahun 2020 ini hanya dapat dilaksanakan sampai dengan tingkat kabupaten saja, hal ini dikarenakan kondisi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan lomba desa tingkat selanjutnya, Pelaksanaan lomba desa tingkat provinsi dan regional ditiadakan.

Adapun hasil lomba desa tingkat Kabupaten Tahun 2020:

- (1) Juara I Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri.
- (2) Juara II Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro.
- (3) Juara III Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Pembukaan Lomba Desa dilaksanakan sebagai tanda dimulainya pelaksanaan perlombaan desa yang disampaikan kepada 75 desa di 17 kecamatan dan diikuti oleh bagi 17 desa yang ditunjuk sebagai perwakilan 17 kecamatan untuk mengikuti perlombaan desa.
- (2) Penilaian administrasi dan kunjungan lapangan lomba desa tingkat Kabupaten Bantul kepada 17 desa yang ditunjuk sebagai perwakilan 17 kecamatan.
- (3) Ekpose lomba desa yang dinilai dari hasil penilaian administrasi dan lapangan perlombaan desa.
- (4) Bimtek Lomba Desa bagi desa, kecamatan, dan OPD terkait yang menjadi unsur pelaksana perlombaan desa selama 1 kali.

Workshop Lomba Desa bagi OPD dan unsur terkait perlombaan desa dilaksanakan 1 kali.

c) Kegiatan Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah penancangan BBGRM tingkat kabupaten, serta peningkatan kapasitas bagi pengurus LPMD dan pengurus PKK serta melaksanakan lomba LPMD. Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp33.111.750 dan sudah terealisasi sejumlah Rp33.111.750 atau 100%.

(1) Sub Kegiatan Temu Karya LPMD

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pengurus LPMD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LPMD serta meningkatkan wawasan pengurus tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa. Sasaran Bimtek sejumlah 92 orang terdiri dari 17 Camat se-Kabupaten Bantul, serta 75 Ketua / Pengurus LPMD se-Kabupaten Bantul.

(2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja LPMD

Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan peran dan fungsi LPMD sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan, mengetahui sejauh mana peran LPMD dalam menggerakkan partisipasi gotong-royong masyarakat dalam pembangunan, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kapasitas pengurus LPMD. Kegiatan ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelaksanaan Lomba Desa tingkat Kabupaten Bantul yang dilaksanakan

pada tanggal 18-28 Februari 2020, berupa penilaian administrasi dan kesekretariatan.

Adapun hasil dari Evaluasi Kinerja LPMD Tingkat Kabupaten Bantul tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

- (a) Juara I : LPMD Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis
- (b) Juara II: LPMD Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret
- (c) Juara III: LPMD Desa Selopamiro, Kecamatan Imogiri

Tidak ada hadiah berupa uang pembinaan bagi para pemenang, namun akan diberikan kegiatan melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan BBGRM pada Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Desa Sumberagung, Kec. Jetis : Rp 125.000.000
- (b) Desa Wonolelo, Kec. Pleret :Rp 100.000.000
- (c) Desa Selopamiro, Kec. Imogiri : Rp 75.000.000

Adapun Tim Yuri Evaluasi Kinerja LPMD ini terdiri dari unsur Bappeda Kabupaten Bantul, DPPKBPM Kab. Bantul, Bag. Adpemdes Setda Kab. Bantul, TA P3MD Kab. Bantul serta DPD LPM Kabupaten Bantul.

Sub Kegiatan yang tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dari kegiatan BBGRM dan LKD ini adalah Peningkatan Kapasitas bagi pengurus LPMD Desa di 17 Kecamatan, dengan jumlah anggaran yaitu Rp49.000.000

d) Kegiatan Pendampingan kegiatan TMMD

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemandirian TNI dan masyarakat pedesaan. Pelaksanaan TMMD di Kabupaten Bantul diatur dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017

Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat, Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017. Program tersebut bertujuan untuk:

- (1) Membuka akses wilayah terisolir dan/atau tertinggal;
- (2) Mendorong akselerasi dan pemerataan pembangunan lingkungan, pedukuhan, desa dan daerah;
- (3) Meningkatkan ketahanan dan keamanan bangsa dan Negara;
- (4) Merevitalisasi budaya gotong royong dan swadaya masyarakat sebagai elemen strategis bagi keberhasilan pembangunan desa.
- (5) Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp371.466.750 dan sudah terealisasi sebesar Rp371.466.750 atau 100%.

e) Kegiatan Pengembangan desa siaga

Kegiatan Pengembangan Desa Siaga berupa Optimalisasi Fungsi Pokjanal dan Forum Desa Siaga di tingkat Desa tidak terlaksana karena anggaran terkena refocusing untuk penanganan Covid-19. Dengan adanya refocusing tersebut, pembinaan Pokja Desa Siaga menjadi tidak terlaksana. Untuk tahun 2021 dianggarkan revitalisasi Pokja Desa Siaga sebesar Rp12.626.000.

f) Kegiatan Pengembangan Kerjasama Desa

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan usaha Bersama yang dimiliki desa dalam

upaya peningkatan nilai ekonomi. Kegiatan ini di dukung dengan anggaran Rp27.720.000 dan sudah terealisasi Rp27.720.000 atau 100%.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- (1) Bimtek peningkatan kapasitas UPK, BPUPK dan BKAD yang dilaksanakan pada 27 Januari 2020 di Gedung Pertemuan Pemda II Komplek Perkantoran Manding dengan jumlah peserta sebanyak 102 orang.
- (2) Bimtek Kelompok SPP dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020 di Gedung Pertemuan Pemda II Komplek Perkantoran Manding dengan peserta sebanyak 102 orang

4) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan keberdayaan perempuan sehingga dapat memicu peningkatan kemandirian perempuan, khususnya dari Keluarga Miskin. Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp81.850.000 dan telah terealisasi Rp81.850.000 atau 100% dan terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

- a) Sub Kegiatan Sosialisasi Program dan Pelatihan Keterampilan

Manfaat dan tujuan diadakannya sub kegiatan ini adalah :

- (1) meningkatkan kapasitas, pengetahuan, wawasan dan ketrampilan warga binaan program P2W-KSS.
- (2) Meningkatkan orientasi, sikap dan perilaku warga binaan program P2W-KSS.
- (3) Memberikan bekal ketrampilan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan nilai jual hasil pertanian dan dapat meningkatkan pendapatan

keluarga.

- (4) Mendukung Visi Kabupaten Bantul: Mewujudkan Masyarakat Bantul yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 194 Tahun 2018, tentang Desa Lokasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2020 disebutkan bahwa lokasi program terpadu P2W-KSS tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- (1) Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan
- (2) Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro
- (3) Desa Srigading, Kecamatan Sanden
- (4) Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan

- b) Sub Kegiatan Pembinaan Program Lanjutan P2W-KSS

Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha kelompok warga binaan. Mengetahui pelaksanaan kegiatan P2W-KSS dari 18 Indikator yang ada. Mengetahui pelaksanaan administrasi kegiatan P2W-KSS dan keterpaduan dengan administrasi PKK. Mengetahui dukungan dari Pemerintah Desa dan lintas sektor terkait terhadap pelaksanaan kegiatan P2W-KSS.

Rencananya, pada Sub Kegiatan ini akan diadakan pembinaan lanjutan di 4 (empat) Desa Lokasi Program Terpadu P2W-KSS Tahun 2020 yaitu: Desa Srimulyo, Kec. Piyungan, Desa Potorono, Kec. Banguntapan, Desa Triharjo, Kecamatan Pandak dan Desa Gadingharjo, Kecamatan Sanden, namun karena adanya Refocusing Anggaran Tahun 2020, Sub Kegiatan dengan nominal anggaran Rp14.950.000 ini tidak dapat terlaksana.

5) Program Pemberdayaan Masyarakat

Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di pedesaan dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian desa tersebut. Program Pemberdayaan Masyarakat memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.597.151.750 dan terealisasi Rp1.590.151.750 atau 99.561%. Program ini memiliki kegiatan, diantaranya adalah:

a) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pembinaan bagi kaum perempuan agar menjadi perempuan cerdas, mandiri, dan memiliki ketrampilan. Kegiatan ini di dukung anggaran daerah Rp350.106.750 terealisasi Rp343.106.750 atau 98,001%. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:

- (1) Mengoptimalkan peran perempuan dalam pembangunan melalui Gerakan PKK.
- (2) Memfasilitasi kegiatan operasional TP PKK Kabupaten Bantul dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK.
- (3) Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan wawasan perempuan.

b) Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pembinaan bagi pokjanal, posyandu serta PMT AS, serta penyaluran bantuan untuk makanan tambahan siswa TK. Kegiatan ini di dukung anggaran daerah Rp1.247.045.000 terealisasi Rp.1.247.045.000 atau 100%.

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

(1) Sub Kegiatan Bimtek Pengelola PMT-AS

Tujuan kegiatan ini adalah :

- (a) Menyamakan persepsi mengenai Prinsip Dasar Penyelenggaraan PMT-AS TK di Kabupaten Bantul.
- (b) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pengelola PMT-AS TK.
- (c) Mengetahui pentingnya program PMT-AS TK dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Adapun peserta Bimtek berjumlah 250 orang, dengan pembagian waktu pelaksanaan Bimtek dalam 2 sesi, masing-masing sesi 125 orang, terdiri dari Camat, Ketua TP PKK Kecamatan, Kepala Puskesmas, Koordinator PMT Kecamatan, Lurah Desa dan Ketua TP PKK Desa.

(2) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Posyandu

Maksud dan tujuan ini adalah:

- (a) Untuk menyamakan persepsi tentang pengelolaan Posyandu bagi Pemerintah Desa serta bagi Kader Posyandu.
- (b) Meningkatkan peran dan fungsi Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam Pelaporan kegiatan posyandu pengisian scorecard konvergensi stunting.
- (c) Menyampaikan informasi tentang Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat Kabupaten Bantul.

(3) Sub Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat Kabupaten

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi Pokja dan Pokjanal Posyandu, dukungan penyelenggaraan kegiatan Posyandu serta pengelolaan Posyandu di 17 lokasi Posyandu.

Kegiatan ini dilaksanakan secara terintegrasi dalam Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2020, pada Tahap I, yaitu Penilaian Administrasi dan Kunjungan Lapangan, yang dilaksanakan pada tanggal 18-28 Februari 2020.

Adapun hasil Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat kabupaten Bantul tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

- (a) Juara I : Posyandu Mawar, Padukuhan Nangsri, Desa Srihardono, Kec. Pundong
- (b) Juara II : Posyandu Kuncup Mekar I, Dusun Kembangsari, Desa Srimartani, Kec. Piyungan
- (c) Juara III : Posyandu Menur, Dusun Padokan Lor, Desa Tirtonirmolo, Kec. Kasihan

Selanjutnya masing-masing pemenang mendapatkan:

- Juara I : Piagam dan Uang Pembinaan
Rp. 8.000.000,-
- Juara II : Piagam dan Uang Pembinaan
Rp. 7.000.000,-
- Juara III : Piagam dan Uang pembinaan
Rp. 6.000.000,-

Sedangkan Posyandu Mawar Padukuhan Nangsri, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong

berhak maju dalam Lomba serupa di tingkat DIY tahun 2020, namun dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 sehingga pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menyelenggarakan Lomba Posyandu.

(4) Sub Kegiatan Pemberian PMT-AS TK

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah :

- (a) untuk meningkatkan kecukupan asupan gizi peserta didik dan balita melalui makanan tambahan.
- (b) Meningkatkan ketahanan fisik dan kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar.
- (c) Meningkatkan pengetahuan dan perilaku peserta didik untuk makanan lokal bergizi, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS).
- (d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan pengadaan pangan lokal.
- (e) Mengurangi absensi dan meningkatkan perhatian serta kemampuan anak dalam proses belajar dikelas.
- (f) Mendidik anak untuk selalu menyukai makanan tradisional dan makanan/jajanan lokal.

c. Keberhasilan Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilihat dari berbagai program kegiatan sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- a) Percepatan pembangunan fisik/infrastruktur di pedesaan;
- b) Tumbuhnya ide kreatif dan inovatif dari masyarakat;

- c) Terpeliharanya budaya gotong-royong dimasyarakat;
- d) Peningkatan perekonomian dimasyarakat;
- e) Tumbuh dan berkembangnya potensi desa;
- f) Peningkatan pemahaman pengelola profil desa dan evaluasi updating profil desa;
- g) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kelembagaan PPAB;
- h) Tersalurkannya bantuan PPAB dari APBD dan CSR di 20 lokasi.

2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

- a) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola UP2K-PKK sehingga dapat mengelola & mengembangkan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga;
- b) Peningkatan kemampuan pengelola usaha ekonomi keluarga dalam usaha peningkatan ekonomi keluarga;
- c) Peningkatan kemampuan Lembaga Desa & tokoh masyarakat tentang pentingnya pengembangan potensi wisata;
- d) Peningkatan pengetahuan & kemampuan para pelaku ekonomi dari penentuan bahan baku, sampai dengan menjaga kualitas produk;
- e) Terfasilitasinya pembentukan Bumdes di setiap desa;
- f) Peningkatan kapasitas lembaga keuangan desa, kapasitas pengelola Pasar Desa baik administrasi maupun tata kelola pasar;
- g) Peningkatan kemampuan pelaku pasar desa dalam pengelolaan pasar desa;
- h) Peningkatan kemampuan pelaku pengelola pasar desa khususnya untuk pasar desa yang belum berkembang dengan baik;
- i) Peningkatan pengetahuan tentang perkembangan Teknologi

Tepat Guna serta pemanfaatannya dalam mutu & kualitas produksi di berbagai sektor usaha;

3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

- a) Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan peran serta pengurus LPMD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa.
- b) Pendampingan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- c) Peningkatan peran LPMD dalam menggerakkan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.
- d) Terlaksananya peran dan fungsi LPMD dalam pembangunan desa serta meningkatnya fasilitasi operasional kegiatan LPMD dari Pemerintah Desa.
- e) Penguatan Kelembagaan kelompok simpan Pinjam Perempuan
- f) Peningkatan pengetahuan dan wawasan pengurus PKK dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok PKK.

4) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

- a) Peningkatan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan serta sikap dan perilaku peserta sosialisasi terhadap program P2W-KSS.
- b) Peningkatan kesejahteraan keluarga peserta program P2W-KSS di tahun kedua.

5) Program Pemberdayaan Masyarakat

- a) Optimalnya peran perempuan dalam pembangunan melalui Gerakan PKK
- b) Peningkatan pengetahuan dan wawasan para pengelola PMT AS TK serta peningkatan dukungan dari lintas sektor terkait penyelenggaraan PMT-AS TK di Kabupaten Bantul

- c) Peningkatan dukungan dari lintas sektor dan masyarakat dalam penyelenggaraan PMT-AS TK di Kabupaten Bantul.
- d) Peningkatan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan kader Posyandu dalam pengelolaan Posyandu.
- e) Peningkatan pengetahuan, wawasan dan peran serta Pokjanal dan Pokja Posyandu dalam pembinaan dan pengembangan Posyandu.

d. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 55 Permasalahan dan solusi pemberdayaan masyarakat dan desa

No	Permasalahan	Solusi
1	Belum optimalnya akses air bersih di masyarakat pedesaan terutama pada musim kemarau	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemeliharaan jaringan • Penguatan Kelembagaan (PAB)
2	Belum optimalnya perencanaan pembangunan desa	Bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Desa dalam hal perencanaan pembangunan desa
3	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di desa	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai • Intensifikasi pelatihan
4	Belum optimalnya pengembangan ekonomi desa	<ul style="list-style-type: none"> • Intensifikasi pembentukan bumdes • Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola Bumdes • Pelatihan keterampilan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa(KUEMD) • Optimalisasi pengelola pasar desa

Sumber: DPPKBPMMD Kabupaten Bantul, 2020

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, dan Kepmendagri 50 Tahun 2020, DPPKBPMMD melaksanakan 2 (dua) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pelaksanaan

Program dan kegiatan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten terurai sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
- b) Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
- b) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
- c) Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
- d) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
- e) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan

4) Program Keluarga Berencana

- a) Kegiatan Pelayanan KIE
- b) Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana
- c) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Yandu KB Kesehatan dan Kespro dalam Rangka TNI Manunggal
- d) Kegiatan Pemantapan Mekanisme Operasional
- e) Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten
- f) Kegiatan Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB
- g) Kegiatan Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB

5) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

- a) Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
- b) Kegiatan Lomba forum PIK remaja

- c) Kegiatan KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja
- 6) Program Pelayanan Kontrasepsi**
 - a) Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
- 7) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri**
 - a) Kegiatan Pendampingan Forum IMP
- 8) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga**
 - a) Kegiatan Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan
 - b) Kegiatan Pengembangan ADITUKA (Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)
 - c) Kegiatan Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya
 - d) Kegiatan Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA
 - e) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I
- 9) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**
 - a) Kegiatan Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS
- 10) Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan**
 - b) Kegiatan Analisa Data dan Dampak Kependudukan
 - c) Kegiatan Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah
 - d) Kegiatan Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang baik. Program ini mendapat sokongan anggaran sebesar Rp1.733.757.750 dan terealisasi sebesar Rp1.709.078.909 atau sebesar 98.577%.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor dan menunjang kelancaran pekerjaan. Kegiatan ini mendapatkan sokongan anggaran sebesar Rp1.416.527.750 dan sudah terealisasi sebesar Rp1.392.064.210 atau 98.273%.

b) Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi.

Kegiatan ini mendapatkan sokongan anggaran sebesar Rp317.230.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp317.014.699 atau 99.932%

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kantor, sehingga bermanfaat mendukung pelaksanaan kinerja aparatur. Kegiatan ini disokong dengan anggaran sebesar Rp1.753.748.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp1.739.828.311 atau 98.924%.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

a) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk pembangunan gudang kantor di sebelah timur ruang Sekretariat Dinas. Kegiatan ini disokong dengan anggaran sebesar Rp27.125.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp27.125.000 atau 100%.

b) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan perkantoran. Kegiatan ini disokong dengan anggaran sebesar Rp899.640.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp887.475.000 atau 98.648%.

c) Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memelihara dan merawat bangunan gedung kantor di lingkungan dinas serta memberikan kenyamanan bagi para pegawai dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Kegiatan ini disokong dengan anggaran sebesar Rp252.000.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp250.589.266 atau 99.440%.

d) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Kegiatan ini

disokong dengan anggaran sebesar Rp538.783.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp538.663.245 atau 99.978%.

e) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menjamin kesiapan operasional peralatan dan perlengkapan kantor dan dapat mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Kegiatan ini disokong dengan anggaran sebesar Rp36.200.000 dan sudah terrealisasi sebesar Rp35.975.800 atau 99.381%.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk melaksanakan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap terhadap pelaksanaan dan pencapaian program kegiatan, terutama dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Program ini disokong dengan anggaran Rp16.000.000 dan sudah terrealisasi sebesar Rp16.000.000 atau 100%.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan laporan atas hasil kegiatan dinas yang telah dilaksanakan serta untuk melakukan evaluasi dan menentukan kebijakan pelaksanaan kegiatan kedepannya. Kegiatan ini disokong dengan anggaran Rp16.000.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp16.000.000 atau 100%.

4) Program Keluarga Berencana

Maksud dan tujuan dari Program Keluarga Berencana adalah 1) memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga dan bangsa; 2) mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa; 3) memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan KR yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. Program Keluarga Berencana (KB) mendapat sokongan anggaran sebesar Rp5.697.059.000 dan terealisasi Rp5.652.661.312 atau 99.220%.

Program Keluarga Berencana dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

a) Kegiatan Pelayanan KIE

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang program KB dan meningkatkan kepesertaan KB. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp5.308.034.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp5.264.706.312 atau 99,184%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Rapat koordinasi dan perencanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Bulan, Januari, Februari, April, Juli dan Oktober 2020 bertempat di DPPKBPMMD.

b) Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan dukungan pelaksanaan program KKBPK di lini lapangan dari mitra kerja dalam hal ini adalah Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp351.675.000 terealisasi sebesar Rp351.355.000 atau 99,90%. Tak bisa dipungkiri keberhasilan Program KKBPK di Kabupaten Bantul karena dukungan penuh dari IMP (Kader KB) se Kabupaten Bantul. IMP ini lah yang

setiap bulan membantu PLKB dalam hal pencatatan dan pelaporan, menyebarkan informasi perihal program KKBPB ke masyarakat, mencari peserta KB baru, menjaga kelestarian ber-KB, mendampingi peserta KB saat pelayanan KB. IMP ada di tingkat RT yang disebut Sub Pembantu Petugas KB Desa (PPKBD), di dusun disebut PPKBD dan di desa disebut Koordinator PPKBD.

c) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Yandu KB Kesehatan dan Kespro dalam Rangka TNI Manunggal

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Yandu KB Kesehatan secara Protokoler pengumpulan massa seperti Puncak Acara, KIE KIA, KIE Kesehatan dan Reproduksi, KIE Penggunaan MKJP, Gelar Tribina dan UPPKS tidak dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19.

d) Kegiatan Pemantapan Mekanisme Operasional

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali, mengkaji, mengevaluasi dan mensosialisasikan kebijakan pengendalian penduduk di lini lapangan sehingga *stakeholder* memiliki kepedulian dan kepekaan untuk menyerasikan kebijakan pengendalian penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang sehingga kepersertaan KB baru dan aktif bisa meningkat. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp3.250.000 dan sudah terealisasi sejumlah Rp3.250.000 atau 100%.

e) Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten

Kegiatan ini adalah kegiatan ceremonial yang biasa dilakukan secara berjenjang di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun nasional, tidak dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Bantul.

f) Kegiatan Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB

Sampai dengan tahun 2020, di Kabupaten Bantul telah ada 47 Kampung KB. Kegiatan tidak dilaksanakan di karenakan adanya pemangkasan/pengalihan anggaran untuk COVID 19 sehingga perencanaan Kampung KB terbatas pada upaya dan pembinaan untuk ke 3 Kampung KB yaitu Kampung KB Jasem, Kampung KB Mertosanan Kulon dan Kampung KB Cembing untuk menjadi Kampung KB Percontohan di Bantul. Dampak secara langsung tidak ada karena perencanaan Kampung KB hanya bersifat protokoler. Meskipun kegiatan Perencanaan Kampung KB Tidak dilaksanakan, tetapi kegiatan rutin Kampung KB tetap dapat terlaksana.

g) Kegiatan Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pembinaan, motivasi dan penghargaan kepada PKB, IMP dan Pasangan KB Lestari atas peran baktinya dalam pergerakan Program KKBPK di lini lapangan. Kegiatan ini terdiri dari perlombaan-perlombaan. Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp34.100.000 dan sudah terserap sejumlah Rp33.350.000 atau hampir 97,801%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

Seleksi administrasi untuk menyeleksi profil peserta yang dilakukan di tingkat kecamatan di minggu ke-2 bulan Februari 2020. Selanjutnya di tingkat Kabupaten dilakukan seleksi terhadap beberapa aspek yaitu Aspek wawasan, Aspek Pengabdian Masyarakat dan aspek lainnya (penampilan peserta, bahasa, kelengkapan yang dibawa sebagai inovasi). Jadwal pelaksanaan lomba:

- (1) Lomba Motivator KB Pria, KB Lestari 10 Th, KB Lestari 15 Th, KB Lestari 20 tahun, dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Maret 2020 pukul 08.00 WIB s/d selesai di Aula DPPKBPMDBantul
- (2) Lomba PKB / PLKB dan IMP dilaksanakan hari Kamis, 19 Maret 2020 pukul 08.00 WIB s/d selesai di Aula DPPKBPMDBantul dengan reward berupa uang pembinaan masing-masing sebesar Rp2.000.000 untuk Juara 1, juara 2 Rp1.500.000, dan juara 3 Rp1.000.000.

5) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi remaja maupun pendewasaan usia perkawinan. Kelompok PIK Remaja berbasis sekolah di Kabupaten Bantul sebanyak 20 kelompok dan dan berbasis masyarakat sebanyak 64 kelompok. Pagu anggaran program ini adalah sebesar Rp501.750.000 dan terealisasi Rp500.464.000 atau 99.743% dengan cakupan sosialisasi 2780 orang

Program Kesehatan Reproduksi Remaja dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kesehatan reproduksi remaja dengan sasaran kegiatan ini adalah tokoh masyarakat dan pengambil keputusan di tingkat lapangan seperti Camat, Lurah, Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa, Badan Perwakilan Desa, Kepala Sekolah, Tokoh Agama sejumlah 225 orang. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp490.500.000 terealisasi sebesar Rp489.214.000 atau 99,738%.

b) Kegiatan Lomba Forum PIK Remaja

Kegiatan tidak dilaksanakan karena bersifat mengumpulkan banyak orang. Anggaran difocusing. Dengan tidak dilaksanakannya kegiatan lomba Forum PIK Remaja, maka kegiatan yang dilaksanakan hanya berupa pembinaan dan pendampingan kepada Forum PIK Remaja.

c) Kegiatan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja Bagi Remaja

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahamkan remaja akan pentingnya kesehatan reproduksi dalam rangka pendewasaan usia perkawinan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp11.250.000 dan dapat terserap sebesar Rp11.250.000 atau 100%. Kegiatan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja Bagi Remaja terlaksana 5 kali pada bulan Februari 2020 dengan jumlah peserta 250 siswa.

6) Program Pelayanan Kontrasepsi

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk mendorong masyarakat ikut serta dalam program KB, terutama KB MKJP. Program Pelayanan Kontrasepsi dilaksanakan melalui:

a) Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepesertaan KB di Kabupaten Bantul dengan memberikan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi secara gratis. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp401.775.000 terealisasi sebesar Rp378.506.200 atau 94,208%.

Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi melalui baksos dilaksanakan dari bulan Februari-Desember 2020 dengan peserta MOP sejumlah 60 orang, MOW 50 orang. Kegiatan ini di khususkan untuk mendongkrak Mekanisme

Kontrasepsi Jangka Panjang (**MKJP**). MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang.

7) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan KB/KR melalui Institusi Masyarakat Pedesaan dan Kader KB. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri mendapat sokongan anggaran APBD sebesar Rp6.340.000 terealisasi sebesar Rp6.340.000 atau 100%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri terdiri dari:

a) Kegiatan Pendampingan forum IMP

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka penguatan kelembagaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang berupa fasilitasi pertemuan forum IMP Kabupaten dan peningkatan kapasitas IMP. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan. Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp6.340.000 terealisasi sebesar Rp6.340.000 atau 100%. Forum IMP Kabupaten Bantul yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor: 65 Tahun 2017 ini beranggotakan 34 orang yang merupakan perwakilan IMP dari 17 kecamatan. Setiap bulan Forum IMP Kabupaten melakukan pertemuan rutin dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan Program KKBPK.

Kegiatan pertemuan IMP Kabupaten Bantul tidak terlaksana sampai bulan Desember 2020 karena adanya peraturan pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

(1) Kunjungan lapangan IMP dengan melibatkan 20 pengurus IMP setiap kali kunjungan. Kunjungan ini bertujuan untuk mengunjungi PUS dan juga memberikan motivasi untuk ber-KB. Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari, Februari, Maret 2020.

8) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pembinaan bagi tenaga pendamping kelompok Tribina. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga mendapat sokongan anggaran APBD sebesar Rp128.847.000 terealisasi Rp127.467.000 atau 99.929%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga terdiri dari:

a) Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan Tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan karena semua anggaran kegiatan tersebut dialihkan untuk penanganan covid 19. Pada tahun 2021 juga tidak mendapat anggaran.

b) Kegiatan Pengembangan ADITUKA (Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)

Kegiatan Pengembangan ADITUKA (Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak) Tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan karena semua anggaran kegiatan dialihkan untuk penanganan covid 19. Dengan tidak dilaksanakannya kegiatan pengembangan ADITUKA, maka para Kader BKB tidak mendapatkan tambahan pengetahuan materi pelatihan tentang pola asuh tumbuh kembang anak. 2021 dianggarkan sebesar Rp24.250.000.

c) Kegiatan Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kader POSDAYA. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 2.830.000 terealisasi sebesar Rp2.830.000 atau 100%.

Kegiatan pertemuan Forum Komunikasi Kader Posdaya hanya bisa terlaksana 2 kali pertemuan.

d) Kegiatan Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA

Kegiatan yang dilakukan adalah pengadaan BKB Kit stunting sejumlah 4 unit, berupa peralatan pelatihan/alat peraga untuk kader dalam membantu pemahaman kelompok tentang stunting. BKB Kit didistribusikan ke 4 (empat) Desa, yaitu Desa Tirtosari Kecamatan Kretek, Desa Karangtalun Kecamatan Imogiri, Desa Gadingsari Kecamatan Sanden, dan Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri. Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp34.017.000 terealisasi sebesar Rp33.237.000 atau 97,707%.

e) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau pengelolaan kegiatan UPPKS di lapangan dengan sasaran Kelompok UPPKS yang sedang meminjam bantuan modal. Selain itu juga diadakan pelatihan manajemen keuangan kelompok usaha bagi kelompok UPPKS PEKM dan KUPK. Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp92.000.000 terealisasi sebesar Rp91.400.000 atau 99,348%.

9) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pelatihan peningkatan kapasitas bagi kelompok UPPKS. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial mendapat pagu anggaran sebesar Rp0,00.

Adapun kegiatan dari program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial adalah:

a) Kegiatan Pendampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS

Kegiatan Pendampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS tidak bisa dilaksanakan karena seluruh anggaran *direfocusing* untuk penanganan covid 19. Dengan tidak dilaksanakannya kegiatan ini maka pengembangan kelompok UPPKS menjadi terhambat. Untuk tahun 2021 kembali tidak mendapat anggaran.

10) Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk menyediakan dan menyajikan data KKBPK secara *real time*. Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan memiliki pagu anggaran sebesar sebesar Rp112.900.000 terealisasi 100%.

Teori demografi mengatakan bahwa keberhasilan Keluarga Berencana akan membawa pada keberhasilan pembangunan kependudukan, dan keberhasilan kependudukan akan membawa pada keberhasilan pembangunan ekonomi. Teori lain yang sejalan dengan teori demografi ini adalah jika keluarga berencana berhasil dan dapat bertahan dalam jangka panjang maka keberhasilan tersebut akan merubah struktur penduduk. Keberhasilan program KB secara nyata akan

berdampak pada terciptanya kondisi jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah penduduk usia nonproduktif. Hal tersebut akan memberi peluang bagi suatu negara untuk mencapai *The windows of opportunity* yang merupakan peluang mendapat bonus demografi, dampak selanjutnya kesejahteraan meningkat.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan terdiri dari:

a) Kegiatan Analisa Data dan Dampak Kependudukan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan data dan mengevaluasi data KKBPK. Kegiatan analisa data dan dampak kependudukan terdiri dari Cetak Formulir F1/Dal/Dus, Buku Database Program Dalduk Kecamatan, Desa dan Kabupaten, Formulir Kompilasi Laporan Program KKBPK dusun. Kegiatan selanjutnya adalah Sosialisasi analisa data dan dampak kependudukan yang mengundang perwakilan kader dengan tujuan memberikan informasi tentang kegiatan pendataan. Kegiatan pendataan yang dimaksud meliputi Updating Sistem Informasi Keluarga, Statistik Rutin, dan juga Update Aplikasi Simduk KKBPK. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 106.350.000 terealisasi sebesar Rp106.350.000 atau 100%.

b) Kegiatan Pengolahan Updating Serta Analisa Data dan Statistik Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pelatihan pengisian formulir pencatatan pelaporan bagi poktan. Bimtek dipandu oleh PPKB di wilayah kecamatan tersebut. Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp3.750.000 terserap sebesar Rp3.750.000 atau 100%. Kegiatan Pengolahan Updating Serta Analisa Data dan Statistik

Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Balai Penyuluhan KB Kapanewon.

c) Kegiatan Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi capaian kepesertaan KB sehingga segala permasalahan untuk mencapai target kepesertaan KB dapat teratasi. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp2.800.000 terealisasi sebesar Rp2.800.000 atau 100% yang digunakan untuk Pertemuan Fasilitasi Pencatatan Pelaporan dilaksanakan 2 kali bulan Januari dan Februari 2020.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

Pertemuan Fasilitasi Pencatatan Pelaporan dilaksanakan 2 kali bulan Januari dan Februari 2020, setelah itu anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19. Pertemuan ini membahas capaian kepesertaan KB baru dan KB aktif secara rinci yang diringkaskan dalam laporan Datin. Selain itu juga mengevaluasi capaian bila tidak sesuai target. Keluaran dari pertemuan ini adalah laporan Datin yang memuat data dan informasi capaian Program KKBPK.

Simduk KKBPK merupakan aplikasi inovasi kabupaten bantul yang memuat Informasi dan data capaian Program KKBPK. Aplikasi ini diupdate setiap bulan oleh operator data desa.

Kegiatan Bimtek Aplikasi Simduk KKBPK tidak terlaksana karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19.

c. Keberhasilan Pelaksanaan Urusan Pengendalian

Keberhasilan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dari berbagai program kegiatan sebagai berikut:

1) Program Keluarga Berencana

- a) Meningkatnya pemahaman masyarakat/PUS, remaja, yang memahami pentingnya tentang Program KKBPk dan ikut mendukung Program KKBPk.
- b) Meningkatnya kepesertaan KB aktif dan KB Baru di Kabupaten Bantul.
- c) PPKB dan peserta mampu lebih mengembangkan Kampung KB di wilayahnya.

2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

- a) Masyarakat memahami program KKBPk, memahami pentingnya kesehatan reproduksi remaja.
- b) Keberlangsungan kegiatan PIK remaja di jalur masyarakat dan sekolah tetap ada.
- c) Meningkatnya pemahaman remaja tentang pentingnya kesehatan reproduksi, mampu mengontrol diri untuk tidak melakukan seks pra nikah dan mampu merencanakan kehidupannya di masa mendatang.

3) Program Pelayanan Kontrasepsi

Jumlah peserta KB yang menggunakan KB MKJP yaitu MOP sebanyak 60 orang dan MOW 50 orang

4) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Program KKBPk di lini lapangan.

5) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

- a) Meningkatnya wawasan kader tentang BKB, BKR, BKL serta permasalahannya, sehingga mampu memberikan

penyuluhan dan solusi permasalahan di kelompok BKB, BKR, dan BKL.

- b) Peserta BKB mampu menganalisis permasalahan balita dan mampu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pola asuh.
- c) Terkoordinirnya kegiatan Posdaya di Kabupaten Bantul
- d) Kegiatan Kelompok tribina dan POSDAYA berjalan sesuai fungsi di masyarakat.
- e) Kelompok UPPKS lebih mampu menginovasi produk dan manajemen usaha kelompok dan memajemen keuangan kelompok dengan baik.

6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kelompok UPPKS terutama PEKM dan KUPK lebih mampu mengelola keuangan usaha yang dijalankannya, pencatatan keuangan dalam kelompok lebih rapih dan tertata.

7) Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan

Tersedianya Datin secara tepat waktu dan pengelolaan aplikasi kependudukan berjalan secara optimal.

d. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 56 Permasalahan dan Solusi pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

No.	Permasalahan	Solusi
1	Angka <i>unmetneed</i> masih cukup tinggi 11,54%	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kuantitas maupun kualitas KIE baik individu maupun masa, pemantapan kemitraan dengan pemangku kepentingan • penghargaan/reward bagi peserta KB baru terutama KB Kontrasepsi Mantap (kontap)
2	Data keluarga masih belum optimal	Optimalisasi dan verifikasi data keluarga

9. Perhubungan

Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan umum, khususnya pelayanan urusan perhubungan yang menjangkau masyarakat secara merata dengan kualitas yang baik, Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kebijakan penyediaan pelayanan dasar berupa aksesibilitas transportasi, peningkatan ketertiban, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

a. Program Pelaksanaan

Program yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) **Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);**
 - a) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
 - b) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan
 - c) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
- 2) **Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;**
 - a) Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal
- 3) **Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas;**
 - a) Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
 - b) Kegiatan Pengadaan Flashing Lamp
 - c) Kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
- 4) **Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan;**
 - a) Kegiatan Penciptaan Keamanan Dan Kenyamanan Penumpang Di Lingkungan Terminal
 - b) Kegiatan Pengumpulan Dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan
 - c) Kegiatan Pelayanan Perijinan Di Bidang Perhubungan

d) Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan

5) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;

a) Kegiatan Pengadaan Prasarana Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

6) Program Pengembangan Kelalulintasan.

a) Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Dalam Berlalu-Lintas

b) Kegiatan Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas

c) Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu-Lintas

b. Realisasi Pelaksanaan Program

1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Maksud dari program ini tersedianya fasilitas keselamatan jalan yang berfungsi dengan optimal. Tujuan dari program ini adalah terlaksananya pemeliharaan alat PKB, prasarana lalu lintas yang terdiri dari APILL, rambu, marka dan LPJU. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp2.035.270.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp2.016.047.950 atau 99,06% dengan kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Maksud dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan alat PKB agar dapat berfungsi sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuan dari kegiatan ini adalah pelaksanaan pemeliharaan alat uji yang terdiri dari *diesel smoke tester, gas analyzer, joint play detector, head light*

tester, side slip tester, brake tester, axle load meter, speedometer tester, sound level meter, tint tester, kompresor, dan generator set. Pelaksanaan pemeliharaan alat ini dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp176.175.000,00 terealisasi sebesar Rp175.196.000,00 atau sebesar 99,44 %.

b) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan.

Maksud dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan prasarana jalan agar berfungsi dengan baik. Tujuan kegiatan ini adalah penyediaan suku cadang dan biaya operasional dalam pemeliharaan APILL, rambu, serta *flashing lamp*. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp297.775.000,00 terealisasi sebesar Rp295.595.400,00 atau sebesar 99.60%. Pemeliharaan yang dilaksanakan APILL sebanyak 49 kali dan pemeliharaan rambu 112 kali.

c) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

Maksud dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan LPJU agar berfungsi dengan baik. Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya suku cadang untuk pemeliharaan LPJU, rehabilitasi tiang LPJU, pengecatan tiang LPJU, penggantian armatur dan pemeliharaan LPJU *High Mast*. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.561.320.000,00 terealisasi sebesar Rp1.544.256.550,00 atau sebesar 98,90%. Hasil dari kegiatan ini adalah rehabilitasi/ pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dengan volume pekerjaan sebanyak 3550 unit LPJU.

Indikator kinerja program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ adalah persentase ketersediaan fasilitas keselamatan LLAJ dengan capaian sebesar 100%,

pada akhir tahun kondisi APILL yang berfungsi dengan baik sejumlah 19 lokasi, nilai ini naik dari target yang direncanakan sebesar 93%.

2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Maksud dari program ini adalah peningkatan angkutan umum yang laik jalan. Tujuan dari program ini adalah terciptanya keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal dengan adanya pemeliharaan terminal, penyusunan dokumen study pelayanan angkutan, koordinasi dengan pihak lain terkait pelayanan perijinan di bidang angkutan, dan penyuluhan ketertiban lalu lintas. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp501.225.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp499.115.458,00 atau 99,58%. Kegiatan pada program meliputi:

a) Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal

Maksud kegiatan ini adalah pelaksanaan pemeliharaan terminal agar para penumpang merasa aman dan nyaman berada di lingkungan terminal. Tujuan kegiatan ini adalah pemeliharaan terminal terhadap 5 lokasi terminal tipe C. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp291.650.000,00 terealisasi Rp290.505.458,00 atau 99,61%. Pemeliharaan yang dilaksanakan adalah pemeliharaan rutin terhadap Terminal Imogiri, Terminal Palbapang dan Terminal Parangtritis. Sedangkan pada Terminal Imogiri dilaksanakan pemeliharaan kios terminal yang berupa pekerjaan urug tanah guna menghindari genangan air saat terjadi hujan.

b) Kegiatan Pengumpulan Dan Analisis *Database* Pelayanan Angkutan

Maksud kegiatan ini adalah terlaksananya pengumpulan

dan analisis data base pelayanan angkutan guna perencanaan angkutan yang lebih baik. Tujuan dari kegiatan ini adalah pelaksanaan studi pelayanan angkutan dan survey angkutan. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp126.675.000,00 terealisasi sebesar Rp125.710.000,00 atau sebesar 99,24%

Jumlah penumpang yang melalui Terminal Palbapang sebanyak 122.539 orang per tahun, Terminal Parangtritis sebanyak 100.627 orang per tahun, Terminal Samas sebanyak 20.509 orang per tahun dan Terminal Imogiri sebanyak 78.918 orang per tahun sehingga total jumlah penumpang angkutan orang dalam trayek di Kabupaten Bantul sebesar 322.593 orang per tahun.

c) Kegiatan pelayanan perijinan di bidang perhubungan

Maksud dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi pelayanan perijinan di bidang perhubungan. Tujuan kegiatan ini adalah pembinaan, pengendalian, dan pengawasan manajemen penyelenggaraan kegiatan sumber retribusi sektor perhubungan. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp6.825.000,00 terealisasi sebesar Rp6.825.000,00 atau 100%. Jenis retribusi mencakup retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha terminal, retribusi pengujian kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah. Uji petik pemeriksaan kendaraan angkutan barang dan angkutan umum dilaksanakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan serta izin trayek yang dilaksanakan 24 kali per tahun.

Dalam pengembangan angkutan umum pada tahun 2020 terdapat penambahan trayek angkutan orang dalam trayek dengan rute :

- (1) Terminal Palbapang - Bandara Yogyakarta International Airport

Jumlah armada DAMRI sebanyak empat armada bus ukuran besar yang sudah beroperasi mulai tanggal 4 Juli 2020 dengan titik simpul di Terminal Palbapang yang mempunyai headway 60 menit dan tarif bersubsidi dari pemerintah.

(2) Terminal Parangtritis – Bakulan – Terminal Palbapang – Bantul – Jukteng Kulon – Ngabean – Hotel Limaran Malioboro

Jumlah armada DAMRI sebanyak 13 unit yang beroperasi ai tanggal 15 Oktober 2020 dengan tarif bersubsidi.

d) Kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban LLAJ melalui berbagai kegiatan

Maksud dari kegiatan ini memberikan penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan. Tujuan kegiatan ini adalah dapat memberikan sosialisasi kepada awak angkutan tentang pentingnya kualitas pelayanan angkutan umum. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp76.075.000,00 terealisasi sebesar Rp76.075.000,00 atau sebesar 100%. Kegiatan ini meliputi:

- (1) Sosialisasi kepada awak angkutan dengan peserta 500 orang;
- (2) Media siaran radio dan iklan layanan masyarakat;
- (3) *Ramp check* terhadap angkutan di Kabupaten Bantul.

3) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Maksud program ini adalah tersedianya simpul transportasi yang memadai guna pelayanan angkutan orang dalam trayek yang lebih baik. Tujuan dari program ini adalah terlaksananya pembangunan halte bus guna kenyamanan pengguna angkutan orang dalam trayek. Program ini dilaksanakan menggunakan

anggaran sebesar Rp164.075.000,00 dan terealisasi sebesar Rp136.272.600,00 atau 83,05%. Program ini di laksanakan dengan kegiatan pembangunan halte bus, taxi dan gedung terminal. Maksud dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan halte. Tujuan dari kegiatan ini adalah perencanaan dan pemasangan halte di 4 lokasi yang terpasang di :

- (1) Halte Jigudan Jalan Srandakan Km 5,
- (2) Pasar Hewan Pandak Gedongsari Wijirejo Pandak,
- (3) Halte Jejeran Jalan Imogiri Timur Wonokromo
- (4) SMK 1 Pleret Jalan Imogiri Timur Wonokromo II.

Indikator program ini adalah persentase ketersediaan simpul yang memadai dengan capaian sebanyak 100%, sama dengan target yang direncanakan sebesar 100%.

4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Maksud program ini adalah tersedianya prasarana jalan yang layak guna menurunkan resiko kecelakaan di jalan. Tujuan program ini adalah tersedianya prasarana jalan berupa pagar pengaman jalan, *flashing lamp* dan LPJU. Program ini menggunakan anggaran sebesar Rp1.471.537.000,00 dengan realisasi Rp1.460.697.00,00 atau 99,26% meliputi:

a) Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Maksud dari kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan dan pemasangan prasarana jalan guna menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas. Tujuan dari kegiatan ini adalah memasang prasarana jalan yang berupa pagar pengaman jalan, paku jalan dan delinator. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp569.410,00 terealisasi Rp564.592,000 atau sebesar 99,15%. Pemasangan prasarana lalu lintas pada kegiatan ini terdiri dari:

- (1) Jumlah Pagar Pengaman Jalan yang terpasang 315 meter
- (2) Jumlah Delinator yang terpasang 454 unit yang dipasang di Kecamatan Dlingo.
- (3) Jumlah Paku Jalan yang terpasang 726 unit

b) Kegiatan Pengadaan *Flashing Lamp*

Maksud dari kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan dan pemasangan prasarana jalan guna menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas. Tujuan dari kegiatan ini adalah memasang prasarana jalan yang berupa *flashing lamp* dan cermin tikungan. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi Rp49.982.000,00 atau 99,4%. Pengadaan cermin tikungan sebanyak 10 unit yang dipasang di Dusun Deresan Ringinharjo, Bantul Karang RT 06 Ringinharjo, Ngebel Kasihan, Jeruk Legi Bangunpatan, Ngoto Bangunharjo Sewon, Kalngan Baturetno Banguntapan, Cabean Sewon, Soropatan Ringinharjo.

c) Kegiatan Lampu Penerangan Jalan Umum

Maksud kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan dan pemasangan prasarana jalan guna menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas. Tujuan kegiatan ini adalah memasang prasarana jalan yang berupa lampu penerangan jalan. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp852.127.000,00 terealisasi Rp846.123.000,00 atau 99,30%. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum di jalan kabupaten dan jalan desa sebanyak 28 unit yang berupa 9 unit LPJU LED, 4 unit LPJU Solar Cell dan 5 unit LPJU Jalan desa, LPJU dana BKK 10 unit.

5) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Maksud dari program ini adalah peningkatan kelaikan operasional kendaraan bermotor dengan adanya uji kendaraan bermotor yang dilaksanakan di pengujian kendaraan bermotor. Tujuan dari program ini adalah peningkatan kelaikan pengoperasian pengujian kendaraan bermotor adalah meningkatkan keselamatan berlalu lintas dari sarana atau kendaraan khususnya kendaraan angkutan barang. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp822.595.000,00 dan terealisasi Rp1.815.218,00 atau 99,10%. Kegiatan pada program ini adalah pengadaan prasarana pendukung PKB. Maksud kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan prasarana pendukung PKB untuk kelancaran proses uji kendaraan bermotor. Tujuan kegiatan ini adalah pengadaan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang, pembuatan DED pembangunan gedung PKB, *upgrade software* dan *hardware* pengembangan e-retribusi dan integrasi *smartcard*. Pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara berkala kendaraan terhadap 9.500 unit kendaraan wajib uji. Pengujian berkala ini dilakukan dua kali untuk setiap kendaraan. Total kendaraan yang lulus uji pada tahun 2019 sebanyak 19.431 kendaraan dan tahun 2020 sebanyak 11.765 kendaraan. Indikator kinerja program ini adalah persentase kendaraan bermotor yang wajib uji yang lolos uji dengan capaian sebanyak 61,92% (sejumlah 11.765 kendaraan lolos uji dari 19.000 kendaraan wajib uji). Hasil tersebut lebih kecil dari target yang direncanakan sebesar 86,5%. Hal ini dikarenakan adanya libur 2 bulan dikarenakan adanya COVID-19 dan peralatan pengujian kendaraan bermotor yang rusak yaitu *break tester*.

6) Program Pengembangan Kelalulintasan

Maksud program ini adalah penurunan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Bantul dengan memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas agar lalu lintas aman, selamat dan lancar sehingga dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Tujuan program ini adalah upaya peningkatan disiplin masyarakat dalam berlalulintas, pengembangan manajemen rekayasa lalulintas dan pengembangan perekayasa lalulintas. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp1.620.358.000 dan terealisasi Rp1.597.877.840 atau 98,61%. Kegiatan dari program ini meliputi:

a) Kegiatan Peningkatan disiplin masyarakat dalam berlalulintas

Maksud kegiatan ini adalah meningkatkan disiplin masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat dalam upaya peningkatan keselamatan lalulintas. Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan parkir, kegiatan pelajar pelopor disiplin berlalulintas, safety riding, event simpatik, pembinaan operasional LLAJ. Anggaran kegiatan ini sebanyak Rp330.076.000,00 terealisasi Rp318.940.000,00 atau sebesar 96,63%. Kegiatan pembinaan operasional LLAJ meliputi :

(1) Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) LLAJ

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan pemantauan pada jam sibuk pagi hari pada daerah rawan padat dan rawan kecelakaan. Kegiatan Wasdal LLAJ ini dilaksanakan setiap hari kerja kecuali hari Jumat antara pukul 06.30-08.00 WIB. Kegiatan wasdal LLAJ ini dilakukan sebanyak 192

kali dalam setahun pada 24 titik lokasi rawan kecelakaan dengan jumlah personil 96 personil.

(2) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan parkir sebanyak 75 kali yang bertujuan untuk pelaksanaan manajemen parkir di wilayah Kabupaten Bantul baik *on street* maupun *off street*.

(3) Pengamanan kegiatan kabupaten dan even khusus;

b) Kegiatan pengembangan perencanaan penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas

Maksud kegiatan ini adalah perencanaan manajemen rekayasa lalu lintas dengan adanya survey lalu lintas. Tujuan kegiatan ini adalah pelaksanaan survey lalu lintas pada ruas jalan kabupaten pada kondisi normal dan kondisi situasional khususnya pada perayaan natal dan tahun baru. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp11.135.000,00 terealisasi sebesar Rp11.000.000,00 atau 98,79%.

c) Pengembangan fasilitas perekayasaan lalu lintas

Maksud kegiatan ini adalah perencanaan dan pemasangan prasarana lalu lintas guna memperlancar rekayasa lalu lintas di ruas jalan kabupaten Tujuan kegiatan ini adalah pemasangan prasarana jalan berupa rambu lalu lintas, papan himbauan keselamatan di daerah rawan kecelakaan, marka, *road barrier* dan *traffic cone*. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.279.147.000,00 terealisasi Rp1.267.937.840,00 atau 99,12%. Pengembangan fasilitas perekayasaan lalu lintas berupa pengadaan Fasilitas perekayasaan lalu lintas:

- | | |
|-------------------------|------------|
| (1) Rambu Himbauan | : 36 unit |
| (2) <i>Traffic Cone</i> | : 223 unit |
| (3) Pita Penggaduh | : 605 m2 |

- (4) *Road Barrier* : 84 unit
- (5) Marka Parkir : 500 m2
- (6) Marka Dalam Kota : 949 m2
- (7) Marka Luar Kota : 900 m2
- (8) Tali Pembatas : 2735 m
- (9) *Auto Warning Stopline* : 1 unit

Dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut dan dengan didukung oleh aparaturnya yang mempunyai komitmen, kemampuan dan kompetensi teknis yang memadai diharapkan dapat menekan terjadinya pelanggaran lalu lintas sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan pada akhirnya dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Corona Virus -19 (COVID-19) membawa dampak yang besar terhadap pelayanan jasa transportasi di Kabupaten Bantul. Dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID -19 serta memberikan perlindungan kepada pengguna jasa pada sektor transportasi umum di Kabupaten Bantul, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan posko di terminal Palbapang. Kegiatan posko tersebut dilaksanakan mulai tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 pada pukul 08.00 sampai 15.30 WIB. Sarana dan prasarana yang disediakan meliputi:

- (1) Thermo gun dan thermal scanner
- (2) Tempat untuk melakukan pengecekan suhu tubuh
- (3) Sarung tangan, masker, cairan disinfektan dan cairan antiseptic
- (4) Tempat untuk mencuci tangan

Penumpang angkutan orang dalam trayek yang telah terjaring dalam posko Covid-19 selama kegiatan sebanyak 281 orang yang dinyatakan mempunyai suhu tubuh normal.



Gambar. Posko Covid 19 di Terminal Palbapang



Gambar. Tempat Cuci Tangan di Terminal



Gambar. Penerapan Social Distancing Angkutan Orang Dalam Trayek Di Kabupaten Bantul



Gambar. Pemeriksaan Suhu Badan Oleh Petugas Di Angkutan Orang Dalam Trayek

Sumber: Dishub, 2020

Gambar 3. 6 kegiatan di posko covid-19 terminal Palbapang

Selain itu, pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) juga menerapkan protokol kesehatan dalam operasional yang seperti:

- (1) Pemakaian masker, sarung tangan untuk petugas
- (2) Adanya tempat cuci tangan dan hansanitizer
- (3) Adanya disinfektan kantor secara berkala menggunakan Disinfektan Atomizer.

Pendanaan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor ini menggunakan Pendanaan Anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) dengan anggaran sebanyak Rp. 59.645.456,00 dan ralisasi sebesar Rp. 59.645.456, 00 atau 100%.

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program dalam urusan perhubungan dijelaskan pada tabel 3.57

Tabel 3. 57 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Perhubungan

No.	Permasalahan	Solusi
1	Penurunan kualitas sarana angkutan umum dengan indikasi bawah jumlah angkutan umum yang beroperasi menurun dari tahun 2017 sebanyak 157 unit pada tahun 2020 sebanyak 128 unit, sedangkan jumlah penumpang angkutan umum pada tahun 2020 sebanyak 322.593 orang/tahun meskipun mengalami penurunan dari Tahun 2019 sebanyak 553.480 orang/tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi terhadap awak angkutan umum dan masyarakat. 2. Rehabilitasi sarana dan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum terutama pada penyediaan prasarana halte dan terminal tipe C yang layak.
2	Peningkatan kepadatan lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan koordinasi dengan dinas terkait (Polres, PU) dalam upaya penanganan peningkatan arus yang terjadi pada event tertentu dengan rekayasa manajemen lalu linta. ➤ Melakukan peremajaan prasarana guna melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas berupa <i>traffic cone</i>, <i>road barrier</i>, rambu portable dan tali pembatas
3	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalulintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian parkir 2. Melaksanakan <i>pam insidentil</i> dalam rangka pengamanan lalulintas pada event tertentu. 3. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat melalui berbagai media. Kelompok masyarakat yang akan disosialisasi adalah pelajar dan masyarakat umum.
4	Belum optimalnya prasarana keselamatan lalu lintas	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, APILL, <i>guardrail</i> , <i>flashing lamp</i> dll) serta fasilitas pendukung keselamatan berupa LPJU.
5	Kualitas pelayanan angkutan umum kurang memenuhi standar pelayanan. Keriteria yang digunakan adalah usia kendaraan dan kendaraan laik jalan.	Melaksanakan sosialisasi aturan yang berlaku terkait standar pelayanan angkutan umum kepada penyelenggara angkutan umum. Dinas Perhubungan tidak akan mengeluarkan kartu pengawasan untuk kendaraan yang tidak sesuai dengan pelayanan standar minimal armada angkutan ketika armada tersebut tidak layak beroperasi. Penilaian yang digunakan adalah adanya dokumen KIR layak uji yang masih berlaku dari Dinas Pehubungan yang menyatakan bahwa

No.	Permasalahan	Solusi
		kendaraan laik jalan dan usia kendaran.

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

10. Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika, memegang peranan penting dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati. Hal ini berkaitan dengan tuntutan akan terwujudnya pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan akurat, melalui peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).

Penggunaan Teknologi Informasi di masa sekarang ini sudah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi, bukan sekedar kebutuhan pelengkap, demi peningkatan kualitas hidup masyarakat, maupun demi peningkatan pelayanan publik di berbagai bidang, serta peningkatan desiminasi informasi diberbagai sektor, baik kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, perdagangan, sampai ke pariwisata. Terlebih di masa Pandemi Covid-19 sekarang ini, demi pencegahan penyebaran virus tersebut, perlu protokol kesehatan yang ketat, disamping harus mengurangi kerumunan dan menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Hal ini semakin berimbas pada peningkatan fungsi dan peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjembatani proses aktivitas masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, perniagaan, maupun pelayanan publik lainnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pengembangan teknologi serta penyediaan komunikasi dan informatika di massa pandemic tahun 2020 memiliki total anggaran sebesar Rp 17.044.520.465 terealisasi sebesar 16.151.674.530,25 dengan serapan sebesar 95% dari keseluruhan program dan kegiatan.

Adapun gambaran anggaran dan realisasi Dinas Komunikasi dan Informatika selaku lembaga teknis yang mengampu Urusan Informasi dan Komunikasi, Persandian dan Statistik dapat kami jabarkan sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan

Program kegiatan urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
- b) Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
- b) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- a) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa meliputi:

- a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
- b) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
- c) Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi
- d) Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
- e) Kegiatan Pembangunan Ekosistem Kultural DIY berbasis Digital

5) Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

- a) Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

6) Program Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi;

- a) Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
- b) Kegiatan Pemberdayaan KID dan PPID Pengembangan dan
- c) Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

7) Program Kerjasama informasi dengan media masa;

- a) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
- b) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- c) Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

Realisasi seluruh pelaksanaan program Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 dari anggaran Rp. 17.044.520.465,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 16.151.674.530.,25 atau sebesar 94,76% didalamnya meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapun rincian masing-masing program dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan manajemen dan operasional kantor Dinas komunikasi dan informatika, terutama dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya nilai AKIP.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 1.017.948.220,00 realisasi anggaran 1.008.224.326,00 dengan serapan anggaran dalam 99% Dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menjaga Kelancaran Tugas pokok fungsi Kantor Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 800.248.260,00 dapat terealisasi Rp. 790.582.226,00 dengan serapan anggaran sebesar 99%.

b) Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 217.699.960,00 dapat terealisasi Rp. 217.642.100,00 dengan serapan anggaran sebesar 100%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Maksud dan tujuan Program ini adalah meningkatkan dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur penyelenggara Kantor Dinas Komunikasi dan informatika , terutama dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya terutama dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya nilai AKIP Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 759.099.021,00 dapat terealisasi Rp. 708.121.345,00 dengan serapan anggaran sebesar 93%. Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa :

a) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 560.125.021,00 dapat terealisasi Rp. 535.590.300,00 dengan serapan anggaran sebesar 96%.

b) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan/operasional dinas

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 198.974.000,00 dapat terealisasi Rp. 172.531.045,00 dengan serapan anggaran sebesar 87%.

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kinerja dan melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan di dinas komunikasi dan informatika. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 65.880.000,00 dapat terealisasi Rp. 65.861.000,00 dengan serapan anggaran sebesar 100. Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa : kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah termonitornya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja.

4) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Masa

Maksud dan tujuan program ini adalah penyediaan infrastruktur jaringan serta pembangunan pusat data (*warehouse data*) sebagai penunjang penyelenggaraan Digital Government service di lingkungan pemerintah kabupaten bantul.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 9.363.150.000,00 realisasi anggaran 9.099.096.126,25 dengan serapan anggaran dalam 97%. Dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan fasilitas layanan jasa akses internet secara gratis untuk masyarakat khususnya di OPD, kantor pemerintah desa, Puskesmas dan

kecamatan. Informasi-informasi dapat dengan cepat dan mudah diperoleh masyarakat melalui jaringan internet.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 7.124.925.000 dapat terealisasi Rp. 6.922.798.188,25 dengan serapan anggaran sebesar 97%. Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Pemeliharaan jaringan *Local Area Network* (LAN)

Pengelolaan jaringan internet dan intranet bagi seluruh OPD hingga ke Desa baik sisi LAN untuk klien maupun sisi WAN yang menghubungkan koneksi pusat ke OPD-OPD dan Desa. Saat ini total titik yang terlayani sebanyak 222 titik, yang terdiri atas OPD, Unit Pelaksana Teknis, Desa, Puskesmas dan beberapa Sekolah.

(2) Perancangan dan Pembangunan backbone

Perancangan pembangunan backbone merupakan persiapan sebelum pelaksanaan pembangunan *backbone* sebagai kelanjutan kegiatan tahun 2017, untuk menghubungkan jalur utama yang melewati Kecamatan, Desa dan Puskesmas.

Perancangan ini menghasilkan dokumen rancangan jalur yang harus dibangun untuk kecamatan dan puskesmas yang belum terjangkau di tahun 2020.

(3) Peningkatan kapasitas jaringan internet dan intranet.

Peningkatan kapasitas jaringan dilakukan melalui pengadaan peralatan jaringan internet dan radio wireless yang selesai dilaksanakan pada triwulan II dengan pemilihan penyedia melalui lelang cepat. Peningkatan kapasitas berupa penambahan akses wifi bagi pelayanan kepada masyarakat di 17 kecamatan.

(4) Pembangunan jaringan backbone

Pembangunan *backbone* sampai tahun 2018 adalah sepanjang 135 Km. Sementara itu untuk tahun 2019 telah dibangun sepanjang 53 KM sehingga total backbone yang telah dibangun sampai akhir tahun 2019 adalah 188 KM. Setelah refocusing anggaran penanganan Covid-19 pembangunan backbone 2020 di tiadakan.

(5) Peningkatan kapasitas jaringan *Wide Area Network* (WAN)

Peningkatan kapasitas jaringan WAN dilakukan untuk mengoptimalkan konektivitas di sisi WAN mengingat semakin meningkatnya sisi akses pada klien. Peningkatan kapasitas WAN juga dilakukan untuk optimalisasi pemanfaatan bandwidth di masing-masing titik akses.

(6) Peningkatan kapasitas *warehouse* data

Peningkatan kapasitas warehouse data untuk menampung layanan hosting bagi seluruh OPD di Kabupaten Bantul. Peningkatan kapasitas ini dengan melakukan pengadaan server baik server yang diletakkan di Data Center Kabupaten Bantul maupun pengadaan Server DRC yang akan dimanfaatkan untuk Backup Data. Pengadaan server dilakukan dengan *e-purchasing*. Kapasitas yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2020 sebesar 50 terrabyte.

(7) Layanan *Bandwith* untuk menunjang pelayanan di Pemerintah Kabupaten Bantul

Pelayanan bandwidth bagi seluruh Pemerintah Kabupaten Bantul tersentral di Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan kapasitas saat ini mencapai 850 mbps. Bandwith ini dibagi untuk seluruh titik yang memanfaatkan koneksi internet dan

intranet dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Pembagian bandwidth dilakukan berdasarkan kebutuhan tidak dibagi secara merata.

b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyediakan akses komunikasi public dan pengendalian menara telekomunikasi di kabupaten bantul..

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 272.275.000 dapat terealisasi 270.641.288 dengan serapan anggaran sebesar 99%.

Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Pembuatan Naskah Akademik Raperda menara Telekomunikasi
- (2) Melakukan Assesment layak fungsi menara telekomunikasi

Sebagai bentuk pengendalian menara telekomunikasi, kegiatan pemantauan dilaksanakan sebagai bentuk fungsi kontrol pengawasan penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dari aspek teknis, lingkungan dan kepentingan umum. Selain itu, hal ini juga menunjukkan komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bantul dalam mewujudkan peningkatan PAD serta tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bantul yaitu monitoring dan pengendalian menara telekomunikasi. Sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat 320 menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Bantul.

c) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menunjang layanan *Digital Government Service (DGS)* layanan kesehatan dan pengadaan jaringan *backbone* satu paket pekerjaan.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 874.865.000 dapat terealisasi Rp 826.981.400 dengan serapan anggaran sebesar 95%

Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Peningkatan layanan DGS Kesehatan

Kegiatan dalam rangka peningkatan layanan DGS Kesehatan meliputi pengembangan aplikasi DGS Layanan Kesehatan dan Penambahan Kapasitas Bandwith untuk layanan DGS Kesehatan. Pengembangan aplikasi DGS layanan Kesehatan, mengakomodir usulan dari puskesmas yang menginginkan aplikasi berbasis web dan terintegrasi dengan layanan BPJS Kesehatan.

Tahun 2020, semua puskesmas sudah dilintasi jalur internet dengan koneksi *Fiber Optic* sehingga layanan internet lancar sesuai dengan kebutuhan di puskesmas.

(2) Pelaksanaan workshop pengembangan Sistem Informasi

Workshop yang dilaksanakan oleh Seksi Pengembangan Aplikasi terkait Pengembangan Sistem Informasi untuk tahun 2020 yaitu workshop Layanan DGS Kesehatan dan Workshop Bantul Smart City.

(3) Pembuatan Aplikasi / Software

Merupakan kegiatan pembuatan, pengembangan dan pendampingan aplikasi, baik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri maupun OPD lain yang ada di Kabupaten Bantul. Aplikasi yang dikembangkan pada tahun 2020 yaitu:

- (a) Aplikasi Kampung KB
- (b) Aplikasi Pengelolaan Zakat Daerah
- (c) Aplikasi Autentifikasi terpusat

- (d) Aplikasi Sarana TIK
- (e) Pengembangan Lapor Bantul (e-lapor)
- (f) Pengembangan DGS Layanan Kesehatan
- (g) Soerban (aplikasi E-Surat Bantul)
- (h) Pancoban (Pemantauan Pendetang Dan Kegiatan Di Kabupaten Bantul)

d) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyusunan dan publikasi peraturan Pemerintah Daerah bidang TIK.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 23.310.000 dapat terealisasi 17.885.600 dengan serapan anggaran sebesar 77%.

e) Kegiatan Pembangunan Ekosistem Kultural DIY berbasis Digital

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya infrastruktur komunikasi dan informasi di kompleks makan Raja Imogiri

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 1.067.775.000 dapat terealisasi 1.060.789.650 dengan serapan anggaran sebesar 99%.

Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa: Tersedianya Aplikasi Informasi Publikasi ,Tersedianya CCTV area makam Raja Imogiri, Terbangunnya Infrastruktur Jaringan Internet.



Gambar 3. 7 tugu QR-Code di area makam imogiri

5) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Aparatur Pemerintah di bidang Teknologi dan Informasi.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 45.750.000 dapat terealisasi Rp 45.519.800 dengan serapan anggaran sebesar 99%.

Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi. Melalui kegiatan ini telah dilakukan bimbingan teknis untuk mendukung penerapan aplikasi sistem informasi desa seluruh pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Bantul dengan peserta masing-masing desa mengirimkan dua orang personil aparat pemerintah desa.

6) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan tata kelola sistem informasi dan layanan publik. Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 156.790.000,00 realisasi sebesar Rp 155.436.000,00 dengan serapan anggaran 99% dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

a) Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah upaya penyusunan legitimasi/payung hukum untuk mewujudkan kota cerdas Bantul Smart City.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 85.625.000 realisasi sebesar Rp 84.478.000 dengan serapan anggaran 99%.

Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Monitoring Implementasi Smartcity

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Smart City Kabupaten Bantul tahun 2020, yang meliputi 6 dimensi yakni smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society dan smart environment.

Indeks kematangan dimensi smart city dari enam dimensi tersebut, smart society mendapatkan skor 54%, smart living 54%, smart government 68%, Smart environment 100%, smart economy 42 %, kemudian smart branding 57%.

(2) Monev SPBE

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE

tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

b) Pemberdayaan Komisi Informasi Daerah (KID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Kegiatan Pemberdayaan Komisi Informasi Daerah (KID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka melindungi hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.800.000 dan realisasi sebesar Rp 17.643.000 dengan serapan anggaran sebesar 99%.

Adapun bentuk kegiatan ini berupa :

- (1) pelaksanaan Pelatihan Admin PPID Pembantu untuk 54 OPD (Badan, Dinas, Bagian, dan Kecamatan)
- (2) Forum PPID tingkat kabupaten sebanyak 3 kali,
- (3) Penyusunan Buku Laporan Layanan Informasi Publik sebanyak 1 buah.
- (4) Penyusunan Peraturan Bupati sebanyak 1 buah
- (5) Sosialisasi Peraturan Bupati 1 kali

Peraturan Bupati yang telah disusun yaitu Peraturan Bupati No. 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan.

Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Partisipasi PPID Pembantu kategori OPD meningkat pesat dan begitu juga kategori kecamatan. Hal ini terlihat dari hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 3. 58 Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1	Pemerintah Kabupaten Bantul	92,84
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	98,62
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	98,38
4	Dinas Perdagangan	98,26
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	93,66
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	93,14
7	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	92,97
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan masyarakat dan Desa	90,63

Sumber: Dinas Kominfo, 2020

Berdasarkan kejuaraan badan publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY Pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan peringkat ke-2. Kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul mendapatkan peringkat ke-2. Kategori Lembaga

Legislatif se-DIY DPRD Kabupaten Bantul mendapatkan peringkat 1.

Berdasarkan kualifikasi badan publik ada 8 badan publik yang sudah termasuk kualifikasi “Informatif” yaitu:

Tabel 3. 59 Badan publik yang termasuk kualifikasi “Menuju Informatif”

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	89,90
2	RSUD Panembahan Senopati	88,23
3	Dinas Pariwisata	87,13
4	Satuan Polisi Pamong Praja	85,22
5	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	83,90
6	Dinas Perhubungan	81,42
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	80,88
8	Kecamatan Pajangan	80,59
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80,25

Sumber: Dinas Kominfo, 2020

Kendala yang dihadapi belum semua kecamatan memprioritaskan pelayanan keterbukaan informasi publik. Disamping itu, PPID di badan publik BUMD belum mendapat pendampingan padahal turut dinilai sebagai kategori tersendiri di tingkat provinsi. Untuk mengatasi kendala ini perlu dilakukan upaya memperluas target sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik sampai ke BUMD.

c) Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan Lembaga Komunikasi Perdesaan yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktifitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. KIM dikembangkan dengan membentuk Ruang Milenial KIM di 17 desa yang dapat berfungsi juga sebagai *start up* di desa dengan memberikan fasilitas:

- (1) Akses jaringan internet;
- (2) WiFi gratis;

(3) Pelatihan mengelola media sosial.

Pagu anggaran untuk kegiatan ini Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebesar Rp 53.365.000 dan terealisasi Rp 53.315.000 dengan serapan anggaran sebesar 99,99%.

Pengembangan dan pemberdayaan KIM diarahkan untuk:

- (1) Mewujudkan jejaring diseminasi informasi secara nasional;
- (2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
- (3) Mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi; dan
- (4) Membangun masyarakat informasi.

Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa rapat koordinasi, pertemuan Forum KIM Kabupaten 2 kali, Pelatihan Pengelolaan Media Sosial bagi KIM 1 kali dan workshop pemanfaatan WiFi Publik 1 kali. Jumlah KIM yang saat ini terdaftar di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul ada 31 KIM Per 31 Desember 2020.

7) Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa

Maksud dan tujuan program ini adalah memberikan layanan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Bantul serta mempublikasikan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul kepada masyarakat luar.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 1.502.237.500,00 terealisasi sebesar Rp 1.419.604.524,00 dengan serapan anggaran sebesar 94,5%. dilaksanakan melalui dua kegiatan, yaitu:

a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyebarluaskan informasi tentang segala bentuk pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 571.680.000,00 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 557.049.000,00 atau sebesar 97,44%. Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa:

(1) Siaran Langsung Taman Paseban di TVRI Jogja

Siaran televisi yang dilaksanakan meliputi Siaran Taman Paseban, yang merupakan siaran langsung di TVRI stasiun Yogyakarta, disiarkan secara live Hari Selasa pukul 17.00 – 18.00 terdiri 12 episode. Model siaran adalah *talk show* dengan dialog interaktif dengan pemirsa.



Gambar 3. 8 Siaran Langsung Taman Paseban di TVRI Jogja

(2) Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat

Pada tahun 2020 ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul membuat Video Iklan Layanan layanan masyarakat sejumlah 5 buah yang berisi tentang:

- (a) Iklan pasardesa.id
- (b) Larangan berkendara bagi anak dibawah umur
- (c) Iklan Bantul Smart City
- (d) Iklan potensi kuliner di Kabupaten Bantul
- (e) Iklan potensi kerajinan di Kabupaten Bantul

Adapun video-video iklan tersebut kemudian dipublikasi melalui media sosial Pemkab Bantul, baik Facebook, Instagram, twitter dan youtube.

(3) Penerbitan Buletin Sejada

Kegiatan yang dilakukan adalah menerbitkan Buletin Sejada dengan tujuan sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan masyarakat lewat media cetak yang penyebarannya sampai ke tingkat dusun melalui kecamatan. Dalam tahun 2020 diterbitkan 6 (enam) kali edisi. *Outcome*-nya adalah tersosialisasikannya program kerja dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bantul dampaknya masyarakat bisa mengetahui dan memahami program kerja dan kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul lewat media cetak milik pemerintah ini. Kendala yang dihadapi adalah jumlah cetakannya masih terbatas sehingga belum bisa menjangkau ke tingkat dukuh ataupun RT.

b) Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyebarluaskan informasi yang memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat di Kabupaten Bantul.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 619.720.000,00 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp

618.899.024,00 atau sebesar 99,86%. Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa:

(1) Siaran Saba Desa TVRI Jogja

Selain Taman Paseban, ada juga yang disiarkan secara tunda (taping) yaitu Saba Desa. Program Taping Saba Desa dilaksanakan sebanyak 8 episode adalah kerjasamanya dengan TVRI Stasiun Yogyakarta dengan mengangkat tema-tema kegiatan yg dilaksanakan oleh berbagai OPD di Kabupaten Bantul. Sebagai sarana sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan Kabupaten Bantul. Karena ada wabah Pandemi Covid-19 maka shooting di studio tidak ada audien.

(2) Siaran Leyeh-leyeh RBTB

Kemudian program lain yang melalui televisi adalah bekerjasama dengan RB TV dengan acara Leyeh-leyeh. Sebuah program yang dikemas untuk mempromosikan kelompok atau usaha mikro yang ada di Kabupaten Bantul, sebanyak 12 episode di Tahun 2020.

Secara umum kegiatan yang bekerjasama dengan televisi adalah meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan membangun sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan masyarakat sebagai prasyarat terwujudnya *Good Governance* dan sebagai ajang promosi potensi daerah.

Kendala yang ditemui adalah karena keterlambatan proses lelang acara Taman Paseban dan adanya efisiensi anggaran pada acara siaran televisi swasta luar studio.

Selain itu waktu siaran yang masih tergantung dengan TVRI pusat sehingga belum bisa menentukan waktu siaran sendiri yang sesuai untuk bisa meraih perhatian pemirsa (*prime time*). Untuk mengatasi kendala ini dilakukan upaya penyusunan jadwal

acara dan tema yang konsisten tidak berubah-ubah dan membuat siaran yang cukup menarik untuk bisa menarik perhatian pemirsa.

(3) Dialog Interaktif di Radio

Kegiatan ini merupakan dialog interaktif dalam satu tahun dengan maksud terjalannya interaksi dan komunikasi antara Pemerintah daerah dengan masyarakat Bantul dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun media radio yang menjadi mitra dalam kegiatan ini adalah Radio Sonora, Radio Persatuan, dan Bantul Radio. Kegiatan dialog interaktif pada tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 48 kali/episode. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode jarak jauh atau melalui telepon antara host dan narasumber dikarenakan kondisi wabah Virus Covid-19 yang mulai menyebar. Hasil akhirnya adalah tersosialisasikannya program kerja dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat sehingga meningkatnya aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

(4) Dialog Interaktif Generasi Muda

Dialog generasi muda dilaksanakan dengan menggelar acara di sekolah-sekolah menengah tingkat atas dengan narasumber dari Bupati atau Wakil Bupati, psikolog dan figur entrepreneur. Dialog membahas berbagai hal yang harus dilakukan oleh generasi muda yang saat sedang pada masa mencari jati diri, sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Namun untuk Tahun 2020, dengan adanya wabah Pandemi Covid 19, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara virtual dengan audien di rumah dikarenakan pada saat itu sedang diberlakukan kebijakan belajar mengajar dilakukan secara daring. Kegiatan dialog interaktif generasi muda ini dilaksanakan sebanyak 12 kali kegiatan.



Gambar 3. 9 Dialog Interaktif Generasi Muda

(5) Liputan Dinamika Pembangunan

Liputan dinamika pembangunan desa merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan kerjasama dengan media massa/para wartawan dalam bentuk peliputan kegiatan Usaha/Perekonomian/UMKM masyarakat yang khas atau unik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar secara ekonomi dan perlu mendapatkan dukungan publikasi media massa baik elektronik atau media cetak.

Outcomenya adalah dipublikasikannya potensi masyarakat Bantul lewat media cetak dan elektronik. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan jumlah omzet dan pemesanan pemilik usaha UMKM yang pada gilirannya nanti adanya peningkatan kunjungan ke Kabupaten Bantul. Volume kegiatan dinamika pembangunan sebanyak 12 (dua belas) kali di Tahun 2020.

(6) Pembuatan Konten / Video berita channel Bantul TV

Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan peliputan berita dan pembuatan video yang

akan diunggah di channel Youtube Bantul TV. Volume dari kegiatan ini adalah sebanyak 48 konten/berita.

(7) Pembuatan konten / video cerita iklan berseri

Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membuat konten ringan yang menghibur tetapi mengandung pesan / publikasi informasi yang dibutuhkan masyarakat.

(8) Cetak Leaflet

Dalam rangka menyebarkan informasi yang penting kepada masyarakat juga perlu dilakukan dengan menyebarkan leaflet dan menempel poster-poster di tempat yang strategis. Pada tahun ini poster dan leaflet yang dibuat bertema tentang pencegahan penyebaran virus Covid-19.

(9) Pengadaan Papan Reklame 2 buah

Selain itu untuk menysasar masyarakat yang tidak menggunakan media online, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul mulai tahun 2020 juga membangun 2 buah baliho. Pada tahun 2020 ini baliho di tempatkan di depan Pasar Bantul dan di depan Pasar Seni Gabusan.

c) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diwujudkan dengan pengelolaan *website*, media sosial dan aplikasi Lapor. Dengan sarana atau media tersebut diharapkan dapat terwujudnya proses komunikasi dari pemerintah ke masyarakat ataupun sebaliknya dari masyarakat memberikan masukan, kritik, dan saran kepada pemerintah sehingga terjalin dengan mudah untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 310.837.500,- realisasi keuangan sebesar Rp 304.130.000,- dengan serapan anggaran sebesar 98%.

Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi publik di Kabupaten Bantul.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif proses penyebaran atau distribusi informasi publik kepada masyarakat. Selain itu informasi dan data yang diperoleh juga sangat penting dalam merumuskan strategi komunikasi di tahun-tahun berikutnya. Untuk menyimpulkan disusun sebuah indek yang diberi nama Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi publik di Kabupaten Bantul. Penyusunan indek ini dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga agar didapat nilai yang obyektif dari masyarakat. Untuk tahun 2020 Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi publik di Kabupaten Bantul mencapai 83,02.

- (2) Peliputan

Dalam rangka memberikan informasi tentang upaya-upaya pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, dilakukan peliputan. Hasil peliputan yang berupa berita dan dokumentasi yang berupa foto dan video di upload / dipublikasikan melalui website bantulkab.go.id dan media sosial yaitu facebook Pemkab Bantul, instagram [pemkabbantul](https://www.instagram.com/pemkabbantul), twitter [@pemkabbantul](https://twitter.com/pemkabbantul) dan channel youtube Bantul TV.

- (3) Pengelolaan Aduan melalui aplikasi Lapor Bantul dan Lapor SP4N

Untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan, Kabupaten Bantul telah menyediakan aplikasi online yang dapat diakses setiap saat yang dikenal dengan aplikasi Lapor Bantul. Adapun aduan yang masuk sampai dengan akhir 2020 adalah sebanyak 199 aduan yang telah mendapat tanggapan / jawaban dari

OPD yang terkait dan yang belum ditanggapi 1. Selain aplikasi Laporan Bantul, dari Kementerian PAN dan RB juga mengeluarkan aplikasi Laporan yang wajib dikelola oleh seluruh instansi pemerintah dengan alamat lapor.go.id, dengan jumlah aduan yang masuk sampai dengan akhir 2020 berjumlah 96 aduan yang semuanya sudah mendapat tanggapan dari OPD terkait.

(4) Pengelolaan Videotron milik Pemkab Bantul

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah membangun 1 buah videotron yang terletak di Taman Adipura Kabupaten Bantul. Dalam pelaksanaannya videotron tersebut dikelola untuk menampilkan informasi dan pesan kepada masyarakat.

(5) Publikasi Kegiatan di Media Cetak

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan publikasi berbagai macam kegiatan penting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul agar dapat diketahui oleh masyarakat secara lebih luas yaitu melalui media cetak. Pada tahun 2020 jumlah publikasi kegiatan di media cetak dilakukan sebanyak 16 kali.

(6) Belanja Iklan Media Sosial Pemkab

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam melakukan publikasi informasi kepada masyarakat, salah satunya dilakukan melalui media sosial. Agar pelaksanaan publikasi melalui media sosial ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan media sosial yang memiliki jumlah follower / anggota yang dapat menjangkau sebagian besar masyarakat Kabupaten Bantul. Untuk meningkatkan jumlah follower, engagement dan penetrasi kepada masyarakat dibutuhkan program iklan di masing-masing media sosial yang dikelola.

(7) Publikasi di Media Baliho 8 kali

Dalam rangka memperluas penyebaran informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, serta untuk menjangkau masyarakat yang tidak dapat mengakses informasi secara online, publikasi dilakukan dengan memasang baliho pada papan reklame yang berada di lokasi yang strategis yang dikelola oleh swasta. Kegiatan publikasi ini dilakukan sebanyak 8 paket dengan durasi masing-masing paket selama 1 bulan.

(8) Jasa Konsultasi Pengelolaan Big Data Analisis Media

Salah satu tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah menyajikan data analisis media kepada Pejabat yang berwenang yang akan dipergunakan dalam mengambil kebijakan sesuai dengan data-data media, baik media massa maupun media sosial.

Untuk mempermudah pelaksanaan analisis informasi yang beredar di media, Dinas Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Pihak Ketiga untuk melakukan analisa tersebut melalui aplikasi big data. Dari hasil pengelolaan aplikasi tersebut dihasilkan 365 analisa media harian dan 12 laporan hasil analisa informasi yang beredar di media.

(9) Workshop Pengelola Grup Netizen Lokal Bantul

Dalam pelaksanaan publikasi informasi baik kepada masyarakat Kabupaten Bantul maupun publikasi potensi Kabupaten Bantul kepada masyarakat luar, Dinas Kominfo menggandeng berbagai grup netizen lokal Bantul yang turut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan publikasi tersebut. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan dialog dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang pengelolaan media sosial. Namun demikian dikarenakan Pandemi Covid 19, kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan 1 kali di tahun 2020

c. Keberhasilan Pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika

Keberhasilan komunikasi dan informatika dapat di lihat dari berbagai program kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - a) Semakin meluasnya infrastruktur jaringan internet dan intranet OPD-Kecamatan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan pembangunan jaringan BACKBONE yang menghubungkan 10 kecamatan, 11 Puskesmas, Perpusda dan Pasar Bantul. Jumlah total pembangunan back bone sampai dengan Tahun 2019 mencapai 188 km
 - b) Dan untuk tahun 2020 membangun jaringan fiber optik sepanjang ...km untuk mejangkau Area Makam Imogiri *)
 - c) Terpeliharanya kestabilan konektivitas infrastruktur jaringan internet dan intranet OPD-KECAMATAN DAN DESA DI Kabupaten Bantul.
 - d) Terpeliharanya aplikasi sistem yang mendukung pengolahan data perencanaan pembangunan dan rencana kegiatan dan keuangan, data keuangan dan sampai ke pengendalian pembangunan serta pelaporan pelayanan kesehatan masyarakat.
 - e) Terbangunnya komitmen bersama seluruh pimpinan OPD untuk segera membangun dan mengembangkan teknologi informasi guna mewujudkan E-Government sebagai alah satu pengungkit terlaksananya percepatan reformasi birokrasi.
 - f) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pemerintah khususnya aparat pemerintah desa di bidang komunikasi dan informasi yang berbasis teknologi.

2) Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa

- a) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses desiminasi informasi dan komunikasi (peningkatan jumlah follower dan dialog interaktif di laman media social)
- b) Meningkatnya indeks kualitas layanan informasi dan komunikasi dari tahun 2019 dengan capaian 78,56 meningkat di tahun 2020 menjadi 83,03

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan komunikasi dan informatika (lihat Tabel 3.60).

Tabel 3. 60 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan	Solusi
1. Terbatasnya infrastruktur TIK dan Belum meratanya sistem jaringan komunikasi di Kabupaten Bantul, terutama untuk menjangkau sekolah.	1. Membangun jalur utama jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Bantul dengan teknologi <i>Fiber Optic</i> Sampai Desa yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bantul sebagai sarana implementasi SPBE
2. Belum adanya regulasi pengembangan <i>e-government</i> dan <i>master Plan IT</i> .	2. Menyusun masterplan TIK sebagai dasar pelaksanaan pembangunan TIK di Kabupaten Bantul
3. Belum optimalnya penyajian data/informasi yang seharusnya disajikan untuk masyarakat.	3. Meningkatkan peran PPID badan publik dalam diseminasi informasi publik.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap haknya dalam mengakses dan memperoleh informasi publik.	4. Melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
5. tata kelola data yang belum optimal, Sistem informasi dan data base belum saling terintegrasi	5. Implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia sebagai dasar tata kelola data di Kabupaten Bantul.

Sumber: Dinas Kominfo, 2020

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
- b) Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi, dan Peralatan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b) Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan
- c) Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
- d) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
- e) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a) Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a) Kegiatan dan Koordinasi Program Kegiatan

5) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- a) Pembinaan, Pengawasan dan Perhargaan Koperasi Berprestasi
- b) Peningkatan Manajemen Perkoperasian
- c) Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi
- d) Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA

6) Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif

- a) Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah

7) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

a) Pengembangan Kewirausahaan

8) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

b) Peningkatan Promosi UMKM

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Maksud dan tujuan program adalah untuk menunjang kelancaran tugas kantor. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :

a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran.

Tujuan kegiatan adalah untuk menunjang kelancaran pekerjaan di Sekretariat khususnya dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian pada umumnya. Kegiatan terdiri dari 11 sub kegiatan. Alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp.840.871.991,10 terealisasi sebesar Rp. 822.231.706,- atau 97,78%.

b) Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Tujuan kegiatan adalah untuk menunjang kelancaran pekerjaan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian. Kegiatan terdiri dari 4 sub kegiatan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.328.119.000,- terealisasi sebesar Rp. 204.188.200,- atau 62,21%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Maksud dan tujuan program adalah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Program Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :

a) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tujuan kegiatan adalah untuk pengadaan perlengkapan gedung kantor. Kegiatan terdiri dari 1 sub kegiatan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.85.171.000,- terealisasi sebesar Rp84.978.000,- atau 99,77%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Belanja barang berupa : Kursi kepala, komputer PC, laptop, AC split dan printer

b) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Tujuan kegiatan adalah untuk Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan. Kegiatan terdiri dari 1 sub kegiatan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.23.734.500,- terealisasi sebesar Rp.23.734.500,- atau 100%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Belanja kursi tanpa tangan

c) Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Tujuan kegiatan adalah untuk memelihara gedung kantor. Kegiatan terdiri dari 1 sub kegiatan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.27.001.000,- terealisasi sebesar Rp.26.874.000,- atau 99,52%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Memelihara Gedung Kantor Dinas dan Gedung Dekranasda.

d) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memelihara dan operasional kendaraan dinas. Kegiatan terdiri dari 2 sub kegiatan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.130.000.000,- terealisasi sebesar Rp.129.481.212,- atau 99,60%.

e) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Tujuan kegiatan adalah untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor. Kegiatan terdiri dari 1 sub kegiatan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.33.500.000,- terealisasi sebesar Rp.33.352.000,- atau 99,55%

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Maksud dan tujuan program adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur DKUKMP. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :

a) Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Tujuan kegiatan adalah untuk peningkatan kemampuan SDM aparatur DKUKMP. Kegiatan terdiri dari 1 sub kegiatan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.11.500.000,- terealisasi sebesar Rp.11.100.000,- atau 96,52% Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Senam kesegaran jasmani dan pembinaan/bimtek

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Maksud dan tujuan program adalah untuk perencanaan, pelaporan keuangan dan capaian kinerja DKUKMP. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah untuk menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja DKUKMP. Kegiatan

terdiri dari 2 sub kegiatan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.12.875.000,- terealisasi sebesar Rp.12.848.900,- atau 99,79% Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan
- (2) Penyusunan dokumen laporan capaian dan realisasi kinerja.

5) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Maksud dan tujuan program adalah meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi serta peningkatan kualitas SDM koperasi se Kabupaten Bantul.

Capaian Realisasi Koperasi di Kabupaten Bantul yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada Tutup Buku Tahun 2019 sejumlah 225 Koperasi atau 75,76% dari 299 koperasi. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :

a) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Tujuan kegiatan adalah untuk mendorong peningkatan kesehatan serta prestasi koperasi dan pengawasan koperasi se-Kabupaten Bantul. Kegiatan terdiri dari 2 sub kegiatan. Alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp.69.900.000,- terealisasi sebesar Rp.69.900.000,- atau 100%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Penilaian kesehatan koperasi;

Melaksanakan penilaian kesehatan koperasi kepada seluruh koperasi KSP/KSPPS dan USP/USPPS berbadan

hukum Kabupaten Bantul sebanyak 202 koperasi dengan hasil 93 Koperasi kategori sehat; 106 koperasi kategori cukup sehat; 3 koperasi kategori dalam pengawasan.

(2) Penilaian Koperasi Berprestasi

Koperasi berprestasi, memilih koperasi terbaik di masing-masing jenis koperasi (simpan pinjam, konsumen, produsen, jasa dan pemasaran) bagi koperasi yang telah berbadan hukum di Kabupaten Bantul, yang akan dinilai dari prestasi dan pencapaian kinerjanya dilihat dari aspek organisasi, tatalaksana, produktivitas, manfaat dan dampak koperasi. Penilaian koperasi berprestasi dilaksanakan untuk 20 koperasi pada bulan Februari 2020.

b) Kegiatan Peningkatan Manajemen Perkoperasian

Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan kualitas/kemampuan sumber daya manusia pengurus, pengawas dan anggota koperasi se Kabupaten Bantul. Kegiatan terdiri dari 5 sub kegiatan. Alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp.358.550.200,- terealisasi sebesar Rp.350.189.240,- atau 97,66%.

c) Kegiatan Pengembangan Kerjasama Dan Kemitraan Koperasi

Tujuan kegiatan adalah untuk pemberdayaan koperasi melalui kerjasama dan kemitraan. Kegiatan terdiri dari 2 sub kegiatan. Alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp.213.715.000,- terealisasi sebesar Rp.213.070.000,- atau 99,69% Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Workshop Pengembangan Koperasi;

Workshop Pengembangan Koperasi dilaksanakan sebanyak 2 kali masing 40 peserta dengan tema perencanaan bisnis koperasi dan perijinan melalui OSS pada 25 dan 26 Februari 2020 di RM Tulip Gabusan.

(2) Workshop Temu Bisnis Koperasi dengan Mitra;

Workshop temu bisnis koperasi dilaksanakan untuk 80 peserta yang diselenggarakan pada tanggal 21 November 2020 di hotel Ros In.

(3) Pelatihan Pemberdayaan UMKM Anggota Koperasi

Pelatihan pemberdayaan UMKM anggota koperasi dilaksanakan untuk 180 anggota koperasi di Kabupaten Bantul pada tanggal 16-18 November; 19-21 November; 23-25 November 2020 di hotel Ros In.

d) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA

Tujuan kegiatan adalah untuk mendukung gerakan koperasi di Kabupaten Bantul melalui Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Bantul. Kegiatan terdiri dari 1 sub kegiatan. Alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp.8.600.000,- terealisasi sebesar Rp.8.150.000,- atau 94,76%.

6) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Maksud dan tujuan program adalah untuk pemberdayaan UMKM melalui kemudahan akses permodalan, legalitas usaha dan penyusunan kebijakan yang mendukung iklim usaha. Realisasi capaian program adalah 70 usaha mikro kecil yang mendapatkan kemudahan akses permodalan. Program

Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :

a) Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah

Tujuan kegiatan adalah untuk pemberdayaan UMKM melalui kemudahan akses permodalan, legalitas usaha dan penyusunan kebijakan yang mendukung iklim usaha. Kegiatan terdiri dari 5 sub kegiatan. Alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp.432.855.000,- terealisasi sebesar Rp.421.552.000,- atau 97,38%.

- (1) TOT pendamping UKM
- (2) Pengawasan penggunaan produk lokal / Bazar Seneng Tuku Produk Bantul;

Pandemi Covid 19 membuat banyak segmen bisnis yang terkena dampaknya. Tak terkecuali pada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sebagai tulang punggung perekonomian UMKM itu perlu didorong kembali untuk terus tumbuh dan berkembang yang diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ditengah konsumsi dan daya beli masyarakat rendah.

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong agar UMKM tetap eksis dan tumbuh. Seperti dukungan dari program Pemulihan Ekonomi Daerah bagi UMKM melalui melalui Program “PERISAI Beli Produk Lokal” untuk mendorong promosi pembelian produk lokal Bantul dan memotivasi masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk lokal daerah

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Bazar UMKM Seneng Dengan Produk Bantul diikuti 40 UMKM (kerajinan, makanan kering dan makanan siap saji) di Kabupaten Bantul.



7) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Maksud dan tujuan program adalah untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru dan juga pengembangan UMKM supaya menjadi UMKM yang mandiri dan berdaya saing. Capaian realisasi program adalah Peningkatan jumlah wira usaha baru sebanyak 224 unit usaha. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :

a) Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru dan juga pengembangan UMKM supaya menjadi UMKM yang mandiri dan berdaya saing. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.842.458.000,- terealisasi sebesar Rp.821.404.040,- atau 97,50. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Pelatihan calon wirausaha baru;

Pelatihan calon wira usaha baru terdiri dari :

- (a) Pelatihan Tata Boga dan Aneka Olahan Makanan sebanyak 6 kali pada tanggal 27-30 Januari 2020 berlokasi di Rumah Ibu Tutik Kadarisman / Mas Agra, Perumahan Kharisma, Cepoko Jajar Rt. 03, Sitimulyo, Piyungan, Bantul dan di Gedung TPQ.
- (b) Pelatihan Membuat Batik Nitik sebanyak 1 kali pada tanggal 22-24 Februari 2020 berlokasi di Rumah Bapak Didik Musriyanto, Blawong I Rt. 06, Trimulyo, Jetis, Bantul. Jumlah peserta pelatihan 20 calon wirausaha;
- (c) Pelatihan merajut sebanyak 1 kali pada tanggal 17-20 Februari 2020 berlokasi di Rumah Bapak Tiyas

- Santoso, Sandeyan Rt. 01, Srimulyo, Piyungan, Bantul. Jumlah peserta pelatihan 20 calon wirausaha;
- (d) Pelatihan Membuat Aneka Kue dan Roti sebanyak 1 kali pada tanggal 9 - 13 Maret 2020 berlokasi di Rumah Ibu lin Rofiatun Syofifah, Krobokan Rt. 05, Krobokan, Tamanan, Banguntapa, Bantul. Jumlah peserta pelatihan 20 calon wirausaha;
- (e) Pelatihan Peningkatan Keterampilan Menjahit sebanyak 1 kali pada tanggal 6 - 7 Oktober 2020 berlokasi di Rumah Ibu Erna Iswanti, Bogem Rt. 06 Caturharjo, Pandak, Bantul. Jumlah peserta pelatihan 20 calon wirausaha;
- (f) Pelatihan Peningkatan Keterampilan Olahan Catering sebanyak 1 kali pada tanggal 13 - 14 Oktober 2020 berlokasi di Gedung TPA Al Hidayah'ulum, Dahromo I Rt. 06, Segoroyoso, Pleret, Bantul. Jumlah peserta pelatihan 20 calon wirausaha;
- (g) Pelatihan Peningkatan Keterampilan Olahan Roti sebanyak 2 kali pada tanggal 7-8 Oktober di Rumah Bapak Edi Santosa, Ketalo Rt. 02, Gadingsari, Sanden, Bantul dan tanggal 12 - 13 Oktober 2020 berlokasi di Rumah Ibu Anti Sofiatun, Dahromo I Rt. 02, Segoroyoso, Pleret, Bantul. Jumlah peserta pelatihan 40 calon wirausaha.

(2) Pelatihan Penguatan Pelaku Usaha Mikro;

Dinas KUKMP Kabupaten Bantul kembali menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Keterampilan

bagi Usaha Mikro di Kabupaten Bantul, pada Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Tahun 2020.

Pembukaan Pelatihan dihadiri Jajaran Dinas KUKMP, Kepala Desa Segoroyoso dan Kepala Dusun Dahromo, Segoroyoso, Pleret, Bantul. Tujuan Pelatihan ini adalah meningkatkan keterampilan dan produktifitas pelaku UKM sehingga menjadi pelaku usaha yang tangguh dan berdaya saing.

(3) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro;

Pelatihan ini menggunakan metode pembelajaran klasikal di dalam kelas, praktek dan diskusi serta diberikan pre test sebelum pelatihan dan post test setelah pelatihan, untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan terhadap materi yang diberikan. Materi diberikan oleh motivator bisnis, praktisi olahan frozen food, praktisi digital marketing dan praktisi desain kemasan.

Dengan pelatihan ini diharapkan peserta dapat mendiversifikasi produk olahan makanannya, dan memberikan inovasi bagi produknya, utk meningkatkan penjualan.

(4) Pembuatan Aplikasi UKM

Sebagai tindaklanjut dari hasil pendataan UMKM di Kabupaten Bantul, diperlukan alat berupa teknologi informasi yang dapat menterjemahkan hasil pendataan, sehingga diketahui kondisi pelaku UMKM, dengan dibangunnya software aplikasi yang membantu tatakelola pembinaan pelaku usaha UMKM, Koperasi dan IKM di Kabupaten Bantu agar lebih memiliki daya saing. Pembuatan aplikasi UKM dinamakan SIDAKUI (Sistem Informasi Data Koperasi UKM Dan Industri) dilaksanakan untuk membuat dan meng update data

usaha mikro kecil di Kabupaten Bantul. Sampai dengan Desember 2020 sudah terdaftar 49.801 unit usaha dalam aplikasi SIDAKUI.

8) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Maksud dan tujuan program adalah untuk memperkenalkan produk-produk UMKM Kabupaten Bantul dan juga untuk meningkatkan omset penjualan produk UMKM, namun karena adanya pandemi Covid-19 program ini dialihkan seluruh anggarannya untuk program kegiatan lain yang lebih urgent untuk menanggulangi dampak perekonomian bagi UMKM. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah sedianya dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :

a) Peningkatan Promosi UMKM

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan produk-produk UMKM Kabupaten Bantul dan juga untuk meningkatkan omset penjualan produk UMKM, namun karena adanya pandemi Covid-19 program ini dialihkan seluruh anggarannya untuk program kegiatan lain yang lebih urgent untuk menanggulangi dampak perekonomian bagi UMKM. Di anggaran murni TA 2020 kegiatan ini dianggarkan Rp.15.250.000,- yang sedianya akan melaksanakan pameran Smesco bekerjasama dengan Pemda DIY sebagai penyedia tempat, namun dibatalkan karena dampak Covid-19 sehingga anggaran seluruhnya dialihkan di program kegiatan lain.

c. Keberhasilan Pelaksanaan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Keberhasilan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah dapat dilihat dari program kegiatan sebagai berikut :

Isu strategis di tahun 2020 adalah pandemi covid-19 yang mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi hingga lebih dari 3% sehingga menurunkan omset koperasi dan pelaku usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah. Dampak antara koperasi dan UMKM sangat berkaitan karena sebagian besar anggota koperasi adalah pelaku usaha mikro kecil. Upaya yang dilakukan sebagai penanggulangan dampak tersebut adalah :

1) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya kemampuan koperasi dalam menghadapi penurunan ekonomi dampak pandemi Covid-19 dengan membuat program bantuan modal bagi koperasi yang mempunyai usaha sektor riil. Bantuan permodalan ini dapat mencakup 18 koperasi dengan realisasi anggaran 427 juta rupiah. Penggunaan permodalan ini diarahkan untuk meningkatkan usaha koperasi sehingga dapat menggerakkan ekonomi koperasi.

Tabel 3. 61 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Koperasi Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyerapan Tenaga Kerja	1.188	902	975	843	758

Sumber: DKUKMP, Kabupaten Bantul 2020

Tabel 3. 62 Jumlah Koperasi Menurut Bentuk Koperasi Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Koperasi Primer	489	429	344	346	348
2	Koperasi Sekunder	4	4	3	3	3
	Jumlah	493	433	347	349	351

Sumber: DKUKMP, Kabupaten Bantul 2020

Tabel 3. 63 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Koperasi Simpan Pinjam	191	136	122	121	121
2	Koperasi Produsen	35	52	40	40	40
3	Koperasi Konsumen	241	197	148	150	150
4	Koperasi Jasa	26	43	34	35	37
5	Koperasi Pemasaran	0	5	3	3	3
	Jumlah	493	433	347	349	351

Sumber: DKUKMP, Kabupaten Bantul 2020

Tabel 3. 64 Keragaan Koperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020	Keterangan
Anggota	160.921	160.658	142.908	orang
Modal Sendiri	246.042.269.333	258.292.291.608	331.476.874.701	rupiah
Asset	617.619.689.468	668.640.593.563	652.360.678.099	rupiah
Volume Usaha	421.499.538.845	459.346.775.492	429.146.007.088	rupiah
Jumlah Karyawan	975	843	693	orang

Sumber: DKUKMP, Kabupaten Bantul 2020

Tabel 3. 65 Koperasi Berbadan Hukum Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kasih	10	35	28	28	27
2	Sewon	62	51	43	42	44
3	Banguntapan	42	34	25	25	24
4	Pundong	12	6	8	9	9
5	Dlingo	20	19	16	16	16
6	Piyungan	23	21	17	16	17
7	Pajangan	10	9	8	8	8
8	Bantul	92	86	69	69	70
9	Srandakan	18	16	10	11	11
10	Pandak	17	15	13	13	14
11	Imogiri	31	30	24	25	25
12	Sanden	23	22	19	19	19
13	Kretek	10	9	10	10	10
14	Sedayu	18	16	15	15	15
15	Jetis	31	26	17	18	17
16	Pleret	23	17	10	10	10
17	Bambanglipuro	21	21	15	15	15
Jumlah		493	433	347	349	351

Sumber: Dinas UKMP Kabupaten Bantul 2020

2) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro kecil dalam menghadapi penurunan ekonomi akibat dampak pandemi covid-19 dengan cara mengusulkan nama-nama calon penerima program BPUM (Bantuan Permodalan Usaha Mikro) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Banyak masyarakat yang belum tau cara mendapatkan BPUM tersebut. Pendataan dilakukan secara manual dan online dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang diberi mandat oleh Pemerintah Pusat untuk mengusulkan daftar nama calon penerima bantuan. Pendataan dilakukan dari bulan Agustus sampai dengan November 2020. Jumlah penerima BPUM di Kabupaten Bantul sebanyak 47.574 unit usaha.

Untuk mengembangkan potensi usaha mikro, kecil dan menengah sebagai produsen produk lokal daerah yang

diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, sehingga diperlukan pembinaan secara terpadu, bersinergi dan berkesinambunga, perlu didukung pengaturan mengenai penggunaan produk local daerah dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2020 tentang Penggunaan Produk Lokal Daerah.

Adapun maksud pengaturan penggunaan produk lokal daerah ini adalah memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan produk lokal bagi pemerintah, swasta dan masyarakat, memberikan fasilitas kemudahan bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya, mempromosikan produk lokal daerah dan memberikan perlindungan bagi pelaku UMKM.

Kemudian dilaksanakan mensosialisasikan Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 tahun 2020 tentang Penggunaan Produk Lokal Daerah melalui workshop penggunaan produk lokal daerah, dengan dengan 50 orang peserta, dengan tema : “Penggunaan Produk Lokal Daerah Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Kabupaten Bantul”

Tabel 3. 66 Pertumbuhan UMKM Tahun 2017-2020

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Usaha Mikro	27.828	28.384	29.098	30.486
2.	Usaha Kecil	11.594	11.768	11.992	12.201
3.	Usaha Menengah	6.956	6.991	7.058	7.114
	Jumlah	46.378	47.143	48.148	49.801

Sumber: DKUKMP, Kabupaten Bantul 2020

Tabel 3. 67 Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM Tahun 2017-2020

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Usaha Mikro	55.656	56.768	58.225	59.890
2.	Usaha Kecil	34.782	35.130	36.048	36.925
3.	Usaha Menengah	6.956	111.856	112.977	113.884
	Jumlah	201.734	203.754	207.250	210.699

Sumber: DKUKMP, Kabupaten Bantul 2020

Tabel 3. 68 Data Penerbitan IUMK Tahun 2015-2020

No.	TAHUN	JUMLAH
1	2015	4.531
2	2016	4.674
3	2017	2.749
4	2018	4.996
5	2019	6.864
6	2020	Melalui OSS
Jumlah		

Sumber: DKUKMP, Kabupaten Bantul 2020

d. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 69 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2020

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Masih rendahnya kualitas SDM Koperasi yang kompeten & bersertifikat	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pelatihan kompetensi - Mendorong pendidikan koperasi bagi anggota
2.	Minimnya Pengawas Syariah bersertifikat OSN-MUI	Fasilitasi Pelatihan & Sertifikasi bagi Pengawas Syariah
3.	Masih rendahnya kepemilikan izin usaha dan izin operasional koperasi di OSS	- Pendampingan bagi koperasi dalam mengurus izin di OSS.
4.	Belum optimalnya pemasaran produk usaha mikro	<ul style="list-style-type: none"> -Melakukan inovasi dan penggunaan teknologi yang dapat menunjang perbaikan mutu dan daya saing produk - Beralih ke pemasaran secara digital & melakukan promosi melalui media sosial - Mengikuti pameran untuk mengembangkan jaringan usaha -Memberikan informasi kepada UMKM tatacara pengurusan ijin usaha
5	Kurangnya modal usaha dan akses modal pelaku usaha mikro	Diarahkan untuk mengakses permodalan melalui KUR Mikro

Sumber: DKUKMP, Kabupaten Bantul 2020

12. Penanaman Modal

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan urusan Penanaman Modal dan Fungsi Lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul terurai sebagai berikut:

- 1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - a) Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran
 - b) Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi
 - c) Penyediaan jasa pengelolaan pelayanan perkantoran
- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - a) Pembangunan/rehabilitasi rumah dan gedung kantor
 - b) Pengadaan peralatan dan perlengkapan
 - c) Pemeliharaan rumah dan gedung kantor
 - d) Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
 - e) Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
- 3) **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - a) Pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimtek dan peningkatan kapasitas aparatur
- 4) **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - a) Penyusunan sistem manajemen mutu
 - b) Perencanaan dan koordinasi program kegiatan
 - c) Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
- 5) **Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**
 - a) Peningkatan koordinasi kerjasama di bidang penanaman modal
 - b) Peningkatan promosi penanaman modal
 - c) Pengembangan potensi penanaman modal

6) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- a) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- b) Pengembangan kebijakan penanaman modal

7) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- a) Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

8) Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan

- a) Sosialisasi pengelolaan perijinan
- b) Operasional pelayanan perijinan
- c) Pendataan dan penetapan perijinan
- d) Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan
- e) Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan
- f) Pengelolaan perijinan online
- g) Survei kepuasan masyarakat
- h) Penyampaian informasi perijinan melalui pameran Bantul Ekspo
- i) Lokakarya penanganan pengaduan
- j) Pengawasan dan pengendalian perijinan
- k) Lokakarya pengawasan dan pengendalian perizinan

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan perkantoran. Pagu anggaran pada program ini Rp 1.157.915.168,- terealisasi Rp 1.149.065.892,- atau sebesar 99,236%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan berikut:

a) Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mencukupi penyediaan sarana dan prasarana kantor. Pagu anggaran kegiatan ini Rp333.369.032,- terealisasi Rp330.890.905,- atau sebesar 99,257%. Adapun uraian dari kegiatan ini yaitu berupa:

- (1) Pembayaran honorarium PNS pengelola keuangan
- (2) Penyediaan alat tulis kantor
- (3) Penyediaan alat listrik dan elektronika
- (4) Penyediaan perangko dan materai
- (5) Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- (6) Penyediaan bendera
- (7) Pembiayaan jasa komunikasi (telepon, internet)
- (8) Penyediaan surat kabar/majalah
- (9) Pembiayaan pajak kendaraan dinas/operasional (STNK)
- (10) Penyediaan barang cetak
- (11) Penggandaan

Sebagai salah satu bentuk dukungan dalam pencegahan dan pemutusan rantai penularan Covid 19 di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, pada anggaran penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih digunakan pula untuk menyediakan hand sanitizer yang disediakan di berbagai tempat di lingkungan kantor dan penyediaan bahan disinfektan untuk penyemprotan, masker dan sarung tangan bagi aparatur.

b) Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kegiatan koordinasi, rapat-rapat, survei lokasi dan penerimaan tamu/kunjungan. Pagu anggaran kegiatan ini Rp220.869.436,- terealisasi Rp220.816.934,- atau sebesar 99,976%. Adapun uraian dari kegiatan ini yaitu berupa:

- (1) Penyediaan makanan dan minuman dalam rapat
- (2) Penyediaan makanan dan minuman bagi tamu
- (3) Penyediaan biaya perjalanan untuk konsultasi, koordinasi dan survei lokasi

c) Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk membiayai penyediaan tenaga kontrak yang membantu dalam penyelenggaraan pelayanan. Pada tahun 2020, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul memiliki 18 tenaga kontrak yang terdiri dari 13 tenaga *customer service*, 2 tenaga kebersihan dan 3 tenaga keamanan. Pagu anggaran kegiatan ini Rp603.676.700,- terealisasi Rp597.358.053,- atau sebesar 98,953%. Adapun uraian dari kegiatan ini yaitu berupa:

- (1) Penyediaan honorarium bagi tim pengadaan tenaga kontrak
- (2) Penyediaan honorarium bagi tenaga kontrak
- (3) Pembiayaan asuransi kesehatan bagi tenaga kontrak
- (4) Pembiayaan asuransi ketenagakerjaan bagi tenaga kontrak

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur. Pagu anggaran pada program ini Rp 426.468.098,- terealisasi sebesar Rp414.433.060,- atau sebesar 97,178%.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu:

a) Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah melaksanakan rehabilitasi bangunan/gedung kantor sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat memerlukan pelayanan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Pagu anggaran kegiatan ini Rp40.875.000,- terealisasi sebesar Rp40.630.000,- atau 99,401%. Pelaksanaan kegiatan ini berupa pembiayaan pembangunan ruang arsip.

b) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor sehingga dapat mendorong kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pagu anggaran kegiatan ini Rp126.050.000,- terealisasi sebesar Rp125.746.500,- atau 99,759%.

c) Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk memelihara gedung kantor agar dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat saat memerlukan pelayanan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kabupaten Bantul. Pagu anggaran kegiatan ini Rp40.463.104,- terealisasi sebesar Rp40.462.985,- atau 99,999%.

Sebagai bentuk dukungan dalam upaya pencegahan dan pemutusan penularan Covid-19 di lingkungan kantor, melalui kegiatan ini dilaksanakan pula pembuatan tempat cuci tangan di pintu di beberapa tempat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

d) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk memelihara kendaraan dinas/operasional kantor agar dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat mendorong kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pagu anggaran kegiatan ini Rp189.799.994,- terealisasi sebesar Rp187.616.577,- atau 98,850%.

e) Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memelihara peralatan dan perlengkapan kantor agar dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat mendorong kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pagu anggaran kegiatan ini Rp19.980.000,- terealisasi sebesar Rp19.976.998,- atau 99,985%. Adapun pelaksanaan kegiatan ini berupa pemeliharaan/servis peralatan dan perlengkapan kantor antara lain AC, meubelair dan lain-lain.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk memfasilitasi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kapasitasnya melalui bimbingan teknis yang didalamnya terdapat pemberian materi-materi terkait pelayanan dan peningkatan motivasi agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Pembatasan pengumpulan massa di era new normal (pandemi covid 19) menjadi hambatan sehingga kegiatan ini tidak diselenggarakan di tahun 2020.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelaporan perkantoran. Pagu anggaran program ini Rp9.300.000,- terealisasi Rp9.300.000,- atau sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui tiga kegiatan yaitu:

a) Penyusunan Sistem Manajemen Mutu

Penyusunan sistem manajemen mutu dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan sertifikasi surveillance ISO 9001:2015 yang artinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kabupaten Bantul harus dapat memenuhi bahkan melampaui kepuasan masyarakat, serta dapat memenuhi persyaratan hukum dan aturan yang terkait dengan pelayanan yang diberikan. Pagu anggaran murni tahun 2020 Rp103.000.000,- difocusing menjadi Rp4.200.000,-. Pembatasan pengumpulan massa di era

new normal (pandemi covid 19) menjadi hambatan sehingga kegiatan ini tidak diselenggarakan di tahun 2020, namun penyusunan dokumen yang diperlukan dalam memenuhi sertifikasi ini tetap dilakukan.

b) Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp 2.850.000,- terealisasi Rp2.850.000,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui koordinasi terkait perencanaan maupun evaluasi pelaksanaan program kegiatan.

c) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk memfasilitasi penyusunan laporan capaian kinerja, laporan keuangan, laporan barang/aset, laporan kepegawaian. Pagu anggaran kegiatan ini Rp2.250.000,- terealisasi sebesar Rp2.250.000 atau sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi.

5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Maksud dan tujuan dari program ini adalah sebagai upaya mempromosikan peluang dan promosi Kabupaten Bantul kepada para pemangku kebijakan, masyarakat, para investor dan pelaku usaha sehingga pada akhirnya ada investor yang tertarik untuk mengembangkan usahanya di Bantul. Pagu anggaran pada program ini Rp 58.262.500,- terealisasi Rp 57.987.500,- atau sebesar 99,528%.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan antara lain:

a) Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama kemitraan antara instansi pemerintah dan dunia usaha, khususnya UMKM dengan tujuan meningkatkan kerjasama dalam membangun iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bantul.

Anggaran murni 2020 Rp13.987.500,- difocusing menjadi Rp 200.000,-. Meskipun demikian koordinasi dengan BKPM RI dan OPD terkait mengenai penanaman modal tetap dilaksanakan secara virtual melalui *zoom meeting*. Pembatasan pengumpulan massa di era new normal (pandemi covid 19) menjadi hambatan sehingga Kegiatan Temu Bisnis dan Kegiatan Kajian Kemudahan Berusaha tidak diselenggarakan di tahun 2020.

b) Peningkatan Promosi Penanaman Modal

Maksud kegiatan ini adalah :

Mempromosikan potensi dan peluang investasi sebagai upaya pencapaian target realisasi investasi di Kabupaten Bantul;

Anggaran murni 2020 Rp214.562.500,- difocusing menjadi Rp 187.500,-. Koordinasi mengenai rencana promosi investasi dengan *event organizer* dan OPD terkait dilakukan melalui telepon. Namun, Pembatasan pengumpulan massa di era new normal (pandemi covid 19) menjadi hambatan sehingga promosi ditunda/tidak diselenggarakan di tahun 2020. Kegiatan Promosi diarahkan melalui optimalisasi

pemanfaatan media informasi yang ada seperti visualisasi potensi investasi melalui chanel Youtube.

c) Pengembangan Potensi Penanaman Modal

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

- (1) Tersedianya data dan Informasi yang memberikan gambaran mengenai potensi investasi di Kabupaten Bantul
- (2) Terciptanya kesamaan visi diantara instansi terkait dan stakeholder mengenai arah kebijakan dan strategi pengembangan penanaman modal Kabupaten Bantul
- (3) Peningkatan koordinasi dan konsolidasi antarinstansi dan stakeholder untuk saling tukar informasi, pemikiran, usulan, membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan penanaman modal daerah serta upaya mencari alternatif solusi dan program/tindakan yang konstruktif dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan iklim penanaman Modal Kabupaten Bantul
- (4) Untuk mempercepat proses realisasi penanaman Modal di Kabupaten Bantul;

Sehubungan dengan adanya pengalihan anggaran untuk penanggulangan Covid-19, sub kegiatan penelitian prospektus investasi dan pembuatan infografi atau video tersebut di tahun 2020 tidak dilaksanakan. Dengan demikian, kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu pengembangan website dan portal perizinan yaitu tentang penanaman modal dan perizinan berusaha. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp57.875.000,- terealisasi sebesar Rp57.600.000,- atau 99.525%.

Sub Kegiatan ini diupayakan untuk mengembangkan fungsi dan layanan Portal Perizinan DPMPT Kabupaten Bantul dalam proses penyampaian informasi dan penerimaan informasi dari masyarakat pada umumnya dan pengunjung website pada khususnya. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan fungsionalitas dari aplikasi Portal Perizinan untuk menyajikan informasi kepada masyarakat, meningkatkan fungsionalitas dalam pengelolaan informasi yang akan disampaikan oleh DPMPT Bantul dan mampu meningkatkan layanan dalam hal perizinan dan penanaman modal.

6) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Maksud dan tujuan program ini adalah:

- a) Menyediakan data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal;
- b) Melaksanakan bimbingan dan/atau sosialisasi kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- c) Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi yang terintegrasi antarpemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perusahaan penanaman modal;
- d) Mewujudkan kepastian terhadap pelaksanaan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pagu anggaran pada program ini adalah Rp1.125.000,- terealisasi Rp1.125.000,- atau sebesar 100%. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan antara lain:

a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Maksud kegiatan ini adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan untuk dapat merealisasikan kegiatannya sesuai izin yang dimiliki. Tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- (1) Memperoleh data realisasi penanaman modal;
- (2) Teridentifikasi masalah dan solusi pelaksanaan penanaman modal;
- (3) Melakukan bimbingan & fasilitasi penyelesaian masalah & hambatan yang dihadapi perusahaan;
- (4) Melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu pemantauan terhadap 115 PMA/PMDN. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.125.000,-, terealisasi sebesar Rp. 1.125.000,- atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, di mana ruang lingkup kegiatan ini adalah pemantauan dan pengawasan. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi dan menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal.

Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal, termasuk penggunaan fasilitas penanaman modal.

b) Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal

Maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah sebagai upaya untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di Kabupaten Bantul.

Pembatasan pengumpulan massa di era new normal (pandemi covid 19) menjadi hambatan sehingga pengembangan kebijakan yang semula direncanakan dengan agenda workshop terkait kebijakan di bidang penanaman modal tidak diselenggarakan di tahun 2020.

7) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Maksud dan tujuan dari program ini adalah:

- a) Pengembangan jumlah perizinan online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul agar lebih optimal di sistem perizinan *online* daerah;
- b) Memudahkan, mempercepat masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha khususnya agar dapat melakukan kegiatan usahanya dengan proses perizinan secara *online*.

Pagu anggaran pada program ini adalah sebesar Rp 107.175.000,- terealisasi sebesar Rp 105.753.500,- atau sebesar 98,674%. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dilaksanakan melalui satu kegiatan:

a) Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:

- (1) Melakukan *review* dan pemeriksaan ulang terhadap desain dari sistem yang saat ini telah berjalan

(2) Pemeriksaan ulang terhadap proses bisnis yang menjadi dasar Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem

(3) Peningkatan fitur dari sisi pelaporan dan rekapitulasi

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yakni pemeliharaan aplikasi dan database pelayanan perizinan online. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp107.175.000,- terealisasi sebesar Rp105.753.500,- atau 98,673%.

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa pemeliharaan aplikasi pelayanan perizinan online dengan uraian kegiatan yaitu pembuatan aplikasi sesuai dengan hasil assessment kebutuhan yang diperlukan oleh user dan jadwal yang telah direncanakan dan bebas dari bug (error). Kemudian dilakukan uji coba aplikasi (sistem) yang telah selesai disusun. Proses uji coba ini diperlukan untuk memastikan bahwa system tersebut sudah benar, sesuai karakteristik yang ditetapkan dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang terkandung di dalamnya.

8) Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan

Maksud dan tujuan pelaksanaan program Peningkatan Pengelolaan Perijinan adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui investasi/penanaman modal, peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat,serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat; dan pelayanan konsultasi.

Pagu anggaran pada program ini adalah Rp 137.375.000,- atau sebesar Rp 136.903.000,- atau sebesar 99,656%. Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan :

a) Sosialisasi Pengelolaan Perijinan

Maksud kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Perijinan adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang jenis dan nama izin, persyaratan, dan prosedur untuk mendapatkannya.

Tujuan dari kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Perizinan ini adalah:

- (1) Menyebarluaskan informasi tentang perizinan;
- (2) Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengurus izin sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp54.750.000,- terealisasi sebesar Rp54.625.000,- atau 99.772%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Publikasi melalui radio

Penyampaian informasi perizinan melalui siaran radio berupa Iklan Layanan Masyarakat sebanyak4 (empat)kali tayang

- (2) Publikasi melalui media cetak

Publikasi melalui media cetak5 (lima) kali tayang.

b) Operasional Pelayanan Perizinan

Maksud kegiatan Operasional Pelayanan Perizinan adalah untuk memastikan ketersediaan sarana prasarana dalam memberikan pelayanan izin kepada masyarakat.

Tujuan dari kegiatan Operasional Pelayanan Perizinan ini adalah:

- (1) Menyediakan ATK untuk pelayanan

- (2) Menyediakan formulir permohonan perizinan
- (3) Menyediakan berbagai bahan cetakan seperti map khusus, leaflet, dan booklet sebagai penunjang pelayanan
- (4) Menyediakan makanan dan minuman rapat untuk mengkoordinasikan masalah-masalah dalam pelaksanaan pelayanan perizinan

Kegiatan ini terdiri dari 1(satu) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp7.000.000,-terrealisasi sebesar Rp7.000.000,- atau 100%.

Kegiatan ini mencakup penyediaan sarana prasarana dalam melaksanakan pelayanan perizinan, seperti penyediaan makan minum rapat, ATK, formulir perizinan, map untuk menyimpan berkas permohonan izin, serta leaflet dan booklet yang berisi mekanisme, persyaratan, dan informasi perizinan lainnya.

Penyediaan sarana prasarana pelayanan perizinan tersebut telah terlaksana dengan baik, tepat waktu sesuai perencanaan.

Upaya yang dilakukan agar kegiatan ini berjalan dengan baik, yaitu memperbaharui formulir permohonan izin sesuai aturan yang berlaku, serta memperbaharui informasi melalui leaflet dan booklet yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

c) Pendataan dan Penetapan Perijinan

Maksud dari Kegiatan Pendataan dan Penetapan Perijinan adalah:

- (1) Survey lokasi/Lapangan untuk permohonan perizinan yang diajukan oleh pemohon/masyarakat umum di Kabupaten Bantul

(2) Melaksanakan rapat-rapat dan evaluasi kegiatan dengan Tim Teknis dinas terkait.

Tujuan kegiatan ini adalah menindaklanjuti proses permohonan perizinan agar izin dapat terbit sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp10.325.000,- terealisasi sebesar Rp10.320.000,- atau 99,952%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

Perbaikan pelayanan public melalui cek lokasi/survey lokasi secara akurat dan benar sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai SOP. Setelah itu dilanjutkan dengan kajian hasil survey lokasi dan membuat Berita Acara Penetapan untuk selanjutnya dilakukan penetapan izin.

9) Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perijinan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang menyampaikan aduan agar permasalahan dapat diselesaikan.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp4.225.000,- terealisasi sebesar Rp4.225.000,- atau 100%.

Kegiatan penyelesaian pengaduan dilaksanakan dengan melakukan penanganan/penyelesaian pengaduan dari masyarakat terkait dengan perizinan dalam bentuk penerimaan pengaduan, pencatatan pengaduan, identifikasi permasalahan, penyusunan rencana tindaklanjut, cek lapangan, rapat koordinasi dan pengkajian, penyampaian jawaban.

a) Pengkajian Peraturan Daerah Tentang Perizinan

Maksud kegiatan ini adalah untuk menyesuaikan perubahan regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dengan daerah.

Tujuan Kegiatan:

- (1) Terbitnya regulasi yang sudahsesuai dan sinkron;
- (2) Terwujudnya kepastian, peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp51.300.000,- terealisasi sebesar Rp51.008.000,- atau 99,431%. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2020 adalah rapat intensif dengan OPD teknis terkait jenis – jenis Layanan Perizinan yang dibuat Standar Pelayanan (SP) dengan melibatkan pihak ketiga yakni PT. Inspect untuk mendapatkan data jenis pelayanan perizinan yang sudah dilayani setelah adanya PP 24 /2018 yang dibagi menjadi Perizinan lewat OSS dan Perizinan daerah. Setelah itu, kegiatan berikutnya menjaring masukan terkait draf SP dengan menyelenggarakan FGD secara virtual Karen aadanya pandemi Covid-19. Dilanjutkan penandatanganan Berita Acara hasil SP kita laksanakan dengan mengunjungi perwakilan dari OPD dan masyarakat yang mengikuti FGD.

Regulasi yang terbit di tahun 2020 yakni:

- (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan Dan Pusat

Perbelanjaan.

- (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan.
- (4) SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Nomor 038 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

b) Pengelolaan Perijinan Online

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

- (1) Melaksanakan pelatihan Teknologi Informasi & Komunikasi;
- (2) Melaksanakan pembuatan aplikasi pendukung sistem pelayanan perizinan.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan. Paguanggaran kegiatan ini sebesar Rp4.425.000,- terealisasi sebesar Rp4.375.000,- atau 98,87%.

Sehubungan dengan adanya pandemi Covid 19 demi menghindari berkumpulnya massa maka pelaksanaan pelatihan Teknologi Informasi & Komunikasi batal dilaksanakan sehingga yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah melaksanakan rapat koordinasi terkait evaluasi pelayanan perizinan secara online.

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa pembuatan aplikasi Lantip (Layanan Terpadu Investasi dan Perizinan) yaitu aplikasi perizinan berbasis android yang merupakan inovasi dalam memberikan kemudahan pelayanan serta koordinasi secara intensif untuk perbaikan aplikasi secara terus menerus.

c) Survei Kepuasan Masyarakat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan memberikan pelayanan yang prima guna meningkatkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul secara berkelanjutan.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp2.450.000,- terealisasi sebesar Rp2.450.000,- atau 100%.

Survei kepuasan masyarakat dilakukan secara online maupun melalui kuesioner. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada semester II tahun 2020 adalah 87,89 dengan kategori BAIK.

Nilai rata-rata unsur pelayanan terendah sebagai berikut :

- (1) Unsur biaya/tarif
- (2) Unsur waktu pelayanan
- (3) Unsur prosedur

d) Penyampaian Informasi Perijinan Melalui Pameran Bantul Ekspo

Maksud kegiatan Penyampaian Informasi Perijinan Melalui Pameran Bantul Ekspo adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran berizin serta dan menyebarkan informasi tentang potensi investasi di Kabupaten Bantul.

Pembatasan pengumpulan massa di era new normal (pandemi Covid 19) menjadi hambatan sehingga kegiatan ini tidak diselenggarakan di tahun 2020.

e) Lokakarya Penanganan Pengaduan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai sarana untuk interaksi dan diskusi antara pemohon dan pemberi pelayanan dalam hal ini masyarakat pemohon izin dan instansi terkait. Selain itu juga sebagai sarana untuk evaluasi dalam melayani masyarakat terutama bila ada masalah yang timbul dalam pelayanan perizinan, untuk memberi informasi yang jelas sehingga ketidakpuasan pemohon izin bisa diminimalkan bahkan dihindari.

Anggaran murni 2020 Rp15.650.000,- difocusing menjadi Rp700.000,-. Pembatasan pengumpulan massa di era new normal (pandemi Covid 19) menjadi hambatan sehingga Lokakarya Penanganan Pengaduan tidak diselenggarakan di tahun 2020.

f) Pengawasan dan Pengendalian Perizinan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang dapat diselesaikan sesuai standar pelayanan dan tepat waktu.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp2. 200.000,- terealisasi sebesar Rp2. 200.000,- atau 100%.

Pengawasan dan Pengendalian Perijinan dilaksanakan melalui aktivitas memantau, mengawasi dan mengevaluasi penerapan standar aktivitas penyelenggara pelayanan publik (perizinan dan nonperizinan) yang berpedoman pada SOP dengan cara mengukur prosentase layanan yang dapat diselesaikan tepat waktu.

Selaku instansi penyelenggara PTSP di Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul bertekad untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanannya demi kepuasan masyarakat sesuai dengan standar internasional Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015.

Saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul melayani 54 jenis perizinan dan nonperizinan yang meliputi Perizinan Daerah yaitu 32 jenis dan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik OSS/Online Single Submission yaitu 22 jenis.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam percepatan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah melaksanakan proses layanan izin secara online, sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Pelaksanaan monitoring penyelesaian izin terbit pada SIM Pelayanan Perizinan DPMPT sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terkait implementasi SOP, kinerja aparat pelayanan, maupun teknologi pendukung seperti aplikasi SIM Perizinannya.

Tabel 3. 70 Data Capaian Target Tahun 2016 – 2020

TAHUN	Layanan perizinantepatwaktu		
	Target	Realisasi	Persentase
2016	75	81,60	108,8
2017	77	70,98	92,1
2018	79	83,87	106,16
2019	81	83,80	103,46
2020	83	96,95	116,8

Sumber : DPMPT, Kabupaten Bantul 2020

g) Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk:

- (1) Menyebarluaskan informasi kepada penerima layanan tentang kemudahan mengurus perizinan;
- (2) Meningkatkan pemahaman tentang pengawasan perizinan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- (3) Membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu system pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control);
- (4) Mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control) yang diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan termasuk praktik KKN serta untuk memperbaiki penyimpangan tersebut agar sesuai dengan standar pelayanan.
- (5) Pembatasan pengumpulan massa di era new normal (pandemi covid 19) menjadi hambatan sehingga kegiatan ini tidak diselenggarakan di tahun 2020.

c. Keberhasilan Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal dan Fungsi Lainnya

1) Inovasi Sistem Pelayanan

Jumlah Pemohon Pelayanan Perijinan dan investor yang terus meningkat harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan dan iklim investasi yang mendukung di Kabupaten Bantul. Untuk mengatur jumlah pemohon dan calon investor ini serta guna memberikan pelayanan cepat akurat maka pada tahun ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul memiliki suatu inovasi yang diberi nama Lantip yaitu suatu sistem pelayanan berbasis android. Hal ini seiring dengan Pandemi Covid19 semakin menuntut pelayanan publik yang minim tatap muka, dari jarak jauh dan memanfaatkan teknologi daring se-optimal mungkin. Adapun sistem informasi LANTIP yang dibuat berguna untuk meminimalisir kesalahan yang selama ini terjadi serta meningkatkan kecepatan layanan. Tujuan dan manfaat sistem ini adalah :

- a) Terwujudnya kesadaran pemohon untuk mendaftar terlebih dahulu/ booking/ indent secara online
- b) Terwujudnya peningkatan akurasi pengawasan komitmen yang harus dipenuhi pemohon
- c) Terwujudnya pengendalian dan pengawasan permohonan ijin dan investasi
- d) Terwujudnya peningkatan PAD dari sektor perijinan dan investasi

2) Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Adapun dengan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kabupaten Bantul, pencapaian sasaran yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

e. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 71 Permasalahan dan Solusi Urusan Penanaman Modal

No.	Permasalahan	Solusi
1	Rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Bantul dibandingkan daerah lainnya di DIY	Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui sinkronisasi regulasi pelaksanaan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perijinan di daerah Meningkatkan promosi penanaman modal untuk menarik minat investor/ pelaku usaha agar berinvestasi di Kabupaten Bantul

Sumber : DPMPT, Kabupaten Bantul 2020

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sangat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan sekaligus mendukung keolahragaan nasional yang bertujuan untuk memelihara kesehatan, kebugaran dan meningkatkan prestasi, sportivitas, disiplin, mempererat serta membina persatuan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, kehormatan bangsa, dan *nation character building*.

a. Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan dalam urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 72 Program yang dilaksanakan dalam urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2020

Program	Kegiatan	Wujud Kegiatan
1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	a) Kegiatan Pengembangan Potensi Pemuda	(1) Lomba Wirausaha Muda Bantul; (2) MTQ Pelajar Kecamatan se-Kabupaten Bantul;
2) Program Peningkatan Peran Serta Pemuda	a) Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Seleksi Pemuda Pelopor Kabupaten;
	b) Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Peningkatan Peran Serta Pemuda	(1) Seleksi Paskibraka Kabupaten Bantul; (2) Pelatihan Tallent Mapping; (3) Bhakti Pemuda Kabupaten Bantul; (4) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda; (5) Pelatihan Bela Negara Pemuda; (6) Seminar NAPZA;

Program	Kegiatan	Wujud Kegiatan
3) Program Peningkatan Upaya dan Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	a) Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
4) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	a) Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	(1) Pelatihan Wasit Tenis Lapangan, Badminton, Wood Ball, Gate Ball, Bola Basket. (2) Pelatih Sepak Takraw, Badminton, Wood Ball, Gate Ball, Bola Basket.
5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	a) Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi	(1) Car Free Day; (2) Olahraga Tradisional; (3) Pemassalan Olahraga.
	b) Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	(1) Pekan Olahraga Pelajar Kab. Bantul; (2) Pekan Olahraga Daerah (POPDA) (3) Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah Kab. Bantul (POSPEDA); (4) Pekan Paralimpic Pelajar Daerah Kab. Bantul (PEPARPEDA); (5) Pekan Paralimpic Pelajar Daerah Kab. Bantul (PEPARDA) dan Pembinaan NPC; (6) Tri Lomba Juang Tingkat Kabupaten Bantul; (7) Pembinaan Atlet Berprestasi; (8) Reward / Bonus Atlet Berprestasi POPDA, PEPARPEDA, PEPARDA dan POSPEDA;
6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	a) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	(1) Pengadaan peralatan E Sport (2) Program Perisai, Penambahan fasilitas kebersihan SSA dan Dwi windiu (3) Pemeliharaan rutin/berkala sarpras olahraga

Sumber : Disdikpora Kabupaten Bantul 2020

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Program ini dilaksanakan untuk mengembangkan potensi pemuda/pelajar dengan anggaran sebesar Rp.263.245.000,00 dengan realisasi Rp.263.245.000,00 atau 100%.

2) Program Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Peningkatan Peran Serta Pemuda

Program ini bermaksud untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam kegiatan kepemudaan dan kemasyarakatan. Pelaksanaan program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.820,027,500 dengan realisasi Rp782.692.500 atau 95,45%. Bentuk kegiatan dari program ini adalah :

a) Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp36.125.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp36.125.000,00 atau 100,00%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

(1) Seleksi Pemuda Pelopor

Seleksi pemuda pelopor bertujuan untuk mencari pemuda-pemuda Kabupaten Bantul yang mempunyai jiwa kepeloporan di masyarakat dan lingkungan sekitar, mampu menginspirasi dan menggerakkan pembangunan masyarakat sesuai bidangnya masing-masing. Seleksi ini dilaksanakan dalam lima kategori bidang kepeloporan, yaitu pendidikan; sosial budaya dan pariwisata; pengelolaan SDA dan lingkungan; pangan; dan inovasi teknologi. Dari seleksi yang dilaksanakan, Kabupaten Bantul mengirimkan perwakilan peserta di lima kategori bidang kepeloporan untuk mengikuti seleksi pemuda pelopor tingkat DIY pada tahun 2021.

b) Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Peningkatan Peranserta Pemuda

Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Peningkatan Peranserta Pemuda ini didukung dengan dana

dari APBD sebesar Rp783.902.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp746.567.500,00 atau 95,24%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

(1) Seleksi Paskibraka

Tujuan kegiatan ini adalah memilih putra/putri terbaik Kabupaten Bantul untuk menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka. Dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 14 Maret 2020 di Stadion Sultan Agung. Pada tahun ini sesuai intruksi dari Presiden bahwa pelaksanaan peringatan hari jadi HUT RI dilaksanakan secara terbatas dan perwakilan, pengiriman dan petugas paskibraka kabupaten Bantul tidak dilaksanakan.

(2) Pelatihan Tallent Mapping

Potensi pemuda harus digali dan diarahkan, sehingga perlu adanya pemetaan potensi pemuda. Ini dilakukan agar pemuda Bantul memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk bermasyarakat dan menentukan masa depannya masing-masing. Pemuda Bantul harus yakin atas kemampuan pada dirinya sendiri.

(3) Bhakti Pemuda Kabupaten Bantul 2020

Kegiatan ini dilaksanakan kecamatan Pajangan dan Kecamatan Sedayu, Bantul. Dengan peserta 50 pemuda se-Kabupaten Bantul. Kegiatan ini adalah kegiatan perubahan yang diharapkan bahwa dapat menjadi peran aktif pemuda agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini berupa rehab rumah, fasilitas umum dan tempat ibadah.

(4) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

Pelatihan tingkat dasar kewirausahaan, menyasar pada generasi muda.

(5) Pelatihan Bela Negara Pemuda

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat dan jiwa bela negara, sasaran pelajar-pelajar sekolah menengah atas. Dengan maksud untuk menangkal aliran radikal dan mengembangkan budaya disiplin dan tertib diri.

(6) Seminar NAPZA

Kegiatan rutin, sebagai wujud kepedulian dan keprihatinan tentang penyalahgunaan Napza. Bekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten Bantul dan LSM yang bergerak pada bidang yang sama.

3) Program Peningkatan Upaya dan Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Program ini mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pemuda terlatih dibidang kewirausahaan. Anggaran pelaksanaan program ini sebesar Rp59.280.000,00 dengan realisasi Rp.59.280.000,00 atau 100%. Bentuk kegiatan dari program ini adalah :

a. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda ini didukung dengan dana dari APBD sebesar Rp59.280.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.59.280.000,00 atau 100%. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa pelatihan lanjutan kewirausahaan untuk pemuda termasuk di dalamnya kemampuan *public speaking*.

4) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi dan memberdayakan cabang olahraga tenis lapangan, sepak takraw, badminton, wood ball, gate ball, bola basket dengan

anggaran APBD sebesar Rp.319.489.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.290.689.000,00 atau 90.99%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan dalam bentuk peningkatan kapasitas pelatih dan pelatihan wasit.

5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dilaksanakan untuk memfasilitasi cabang-cabang olahraga yang ikut serta dalam kompetisi baik di tingkat, kabupaten, provinsi maupun nasional dengan anggaran sebesar Rp.1.711.925.315,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.677.333.800,00 . Sisa Anggaran sebesar Rp235.753.624,00 atau 97,98%. Kegiatan ini meliputi :

a) Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp124.137.800,00 dan terealisasi sebesar Rp111.962.800,00 atau 90,19%. Adapun bentuk kegiatan sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan car free day di Jalan Jenderal Sudirman yang dilaksanakan setiap minggu , dengan tujuan memberikan ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga di tempat yang cukup sehat dan nyaman tanpa asap kendaraan bermotor. Kegiatan ini hanya dapat berlangsung pada bulan Januari dan Februari, kemudian kegiatan dihentikan karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemic Covid 19.
- (2) Penyelenggaraan lomba olahraga tradisional dengan tujuan melestarikan Olahraga Tradisional sebagai warisan leluhur. Olahraga Tradisional memiliki nilai-nilai pembentukan karakter Bangsa. Selain warisan

budaya olahraga tersebut merupakan suatu proses transfer nilai-nilai dan ketrampilan hidup yang dilakukan antar generasi.

- (3) Penyelenggaraan Pemassalan Olahraga, yang saat ini baru diminati masyarakat Bantul untuk menciptakan masyarakat sadar berolahraga, untuk menjaga kebugaran masyarakat sehingga masyarakat Bantul bisa menciptakan masyarakat yang gemar berolahraga dan memperpanjang harapan hidup masyarakat sesuai dengan visi misi Bupati Bantul, sehingga Bantul tercipta masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera.

b) Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Kegiatan dilaksanakan dengan APBD sebesar Rp1.587.787.515,00 terealisasi sebesar Rp1.565.371.000,00 atau sebesar 98,59%, meliputi sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan kompetisi olahraga berjenjang atau Pekan Olahraga (POR) Pelajar kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan POSPEDA, untuk tahun ini hanya pada tingkat kecamatan dan kabupaten Bantul, dikarenakan POSPEDA DIY ditiadakan.
- (3) Penyelenggaraan PEPARPEDA, sub kegiatan ini menyeleksi 3 cabang olahraga pelajar SLB dan inklusi pada tingkat Kabupaten.
- (4) Penyelenggaraan Kompetisi Kelas Olahraga, penyelenggara di Kabupaten Bantul.
- (5) Pemberian Penghargaan/Bonus Atlit dan Pelatih POPDA, POSPEDA dan PEPARPEDA 2020 di Kabupaten Bantul sebanyak 549 Atlit dan 95 Pelatih.

(6) Pembinaan Atlet Berprestasi Tingkat Daerah, dengan keluaran pembinaan 90 atlet berprestasi dari 10 (sepuluh) cabang olahraga unggulan di Kabupaten Bantul.

(7) Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga yang berkembang di masyarakat mempertandingkan beberapa cabang olahraga.

6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan prestasi olahraga Kabupaten Bantul melalui kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga dalam bentuk rehabilitasi lapangan tenis, pengadaan alat-alat olahraga, dan pemeliharaan rutin/berkala sarana-prasarana olahraga. Program ini didukung oleh dana APBD sebesar Rp.885.533.280,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.850.315.425,00 atau 96,02%.

Lapangan pacuan kuda Sultan Agung telah memiliki tiga kalender *event* nasional yaitu kejuaraan Bupati Bantul Cup, Paku Alam Cup, dan Hamengku Buwono Cup yang diselenggarakan setiap tahun. Pemenuhan sarana dan prasarana olahraga akan mendukung pelaksanaan latihan masing-masing Cabor, kompetisi baik Kejurkab, Kejurda, maupun Kejurnas yang pada akhirnya bisa meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Bantul.

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2016 – 2020

1) Kepemudaan

Pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bantul merupakan bentuk pelayanan kepemudaan yang berfungsi sebagai sarana

penyadaran kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Program kepemudaan sudah terealisasi dalam bentuk pelatihan dan kepeloporan melalui kegiatan-kegiatan yang mendorong peran serta, kualitas dan daya saing pemuda.

2) Olahraga

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berupa pelatihan, pendampingan, fasilitasi dan pengembangan potensi olahraga di Kabupaten Bantul baik di tataran kompetisi maupun penggalangan kesadaran masyarakat untuk berolahraga.

d. Keberhasilan Pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olahraga

Keberhasilan urusan pemuda dan olahraga dapat dilihat melalui program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan prestasi kepemudaan dan Olahraga
- 2) Kondisi baik sarana dan prasarana olahraga sesuai standar nasional

e. Permasalahan dan solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program kegiatan dalam urusan kepemudaan dan olahraga.

Tabel 3. 73 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No.	Permasalahan	Solusi
1	Sulitnya menemukan pemuda yang memenuhi kriteria sebagai pemuda pelopor pembangunan, yang memiliki kiprah atau pengaruh kepada masyarakat.	Melakukan kerjasama dengan forum pemuda pelopor untuk menemukan calon pemuda pelopor, dan mendampingi mereka agar dapat lolos dan sukses dalam seleksi tingkat nasional.
2	Belum adanya regulasi yang khusus mengatur tentang kepemudaan dan olahraga	Melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai proses penyusunan regulasi kepemudaan dan olahraga.
3	Pelajar berprestasi olahraga Kabupaten Bantul sering kali memilih melanjutkan sekolah ke daerah lain, karena Kabupaten Bantul belum mampu	Perlu dilakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penerimaan siswa baru dari atlet berprestasi dan pemberian beasiswa bagi mereka.

No.	Permasalahan	Solusi
	memberikan fasilitas yang lebih baik kepada atlet berprestasi.	
3	Fasilitas latihan di Kabupaten Bantul masih sangat kurang, terutama belum memiliki Gedung Olahraga dan kolam renang standar nasional.	Diusulkan pembangunan Gedung Olahraga dan kolam renang yang memiliki standar nasional.

Sumber : Disdikpora Kabupaten Bantul 2020

14. Statistik

Urusan statistik mendukung misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi. Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul melalui Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan Kegiatan Pengelolaan Updating Dan Analisis Data dan Statistik Daerah.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, maka diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan pemerintah kabupaten melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Adapun data yang dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan di suatu daerah terdiri dari data statistik serta data dan informasi geospasial. Dalam pengelolaannya, data dan informasi geospasial, sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, diselenggarakan oleh suatu simpul jaringan.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dimulai pada tahun 2019 dengan melibatkan semua perangkat daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. Proses yang telah dilalui mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data

Program keliatan urusan statistik yang dilaksanakan terurai sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah Program Penyajian Data Statistik Daerah dilaksanakan melalui Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

Program ini dilaksanakan dengan anggaran setelah refocusing anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 85.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp85.527.500 dengan serapan anggaran dalam 99,792%.

Kabupaten Bantul telah membangun portal data geospasial (geoportal) dan portal data statistik sektoral yang dapat diakses di <http://data.bantulkab.go.id/> dan telah terhubung ke geoportal nasional <https://tanahair.indonesia.go.id/> dan portal data nasional <https://data.go.id/>.

Data statistik sektoral yang telah dipublikasikan melalui portal data <https://data.bantulkab.go.id/> sejumlah 380 kumpulan data (dataset) dan 739 data (*resource*) yang diunggah oleh 37 perangkat daerah dan satu desa (Desa Panggungharjo). Desa Panggungharjo menjadi pilot project nasional oleh Sekretariat SDI Bappenas untuk integrasi data nasional sampai dengan tingkat desa. Adapun sejumlah 18 kumpulan data (dataset) dan 27 data (*resource*) tidak dipublikasikan karena berstatus privat atas permintaan produsen data. Data geospasial yang telah dipublikasikan melalui portal data <https://data.bantulkab.go.id/> sejumlah 157 layer data spasial.

c. Keberhasilan Pelaksanaan Urusan Statistik

Dalam hal penyelenggaran simpul jaringan, Kabupaten Bantul memperoleh dua penghargaan dalam penganugerahan Bhumandala Award 2020 yaitu Bhumandala Rajasa dalam kategori simpul jaringan terbaik kabupaten dan Bhumandala Kencana dalam kategori

geoportal terbaik kabupaten, diterima pada tanggal 27 November 2020.

Kabupaten Bantul dinilai telah berhasil mengembangkan Simpul Jaringan dalam waktu relatif cepat. Kebijakan Satu Data Indonesia juga telah dimasukkan dalam simpul jaringan Kabupaten Bantul sesuai Perpres 39/2019. Disamping itu Kabupaten Bantul diapresiasi melibatkan seluruh perangkat daerah dalam memperkaya data yang ada di geoportal. Studio untuk pengolahan informasi geospasial dan ruang pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM merupakan nilai lebih simpul jaringan Kabupaten Bantul. Prestasi ini membuktikan komitmen Kabupaten Bantul dalam mewujudkan kebijakan satu peta dan satu data Indonesia.

d. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan statistik (lihat Tabel 3.74).

Tabel 3. 74 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Statistik

Permasalahan	Solusi
Masih terdapat beberapa tim lain yang memiliki ketugasan bersinggungan dengan Tim Penyelenggara SDI sehingga kurang efektif dan rawan duplikasi data pada proses pengumpulan data	Pembaharuan SK Bupati tentang Tim Penyelenggara SDI (penggabungan beberapa tim)
Daftar data statistik sektoral belum ditetapkan oleh Forum SDI	Forum SDI menetapkan Daftar data statistik sektoral
Peta batas desa yang digunakan sebagai peta dasar belum ditindaklanjuti dengan perubahan Perbup batas desa	Penyusunan Perubahan Perbup Batas Desa
Pengumpulan data belum tersentral dalam satu portal data	Integrasi portal data dengan aplikasi Dataku DIY dan aplikasi lain yang memproduksi data, mengusulkan sentralisasi data melalui forum SDI
Belum ada kegiatan statistik yang mendapat rekomendasi dari BPS sehingga mengurangi evaluasi kinerja pemerintah daerah urusan statistik	Mengkoordinasikan proses rekomendasi BPS secara kolektif mulai tahun 2021
Pengumpulan data belum melibatkan kecamatan, desa, dan instansi vertikal	Sosialisasi dan pelatihan, dilibatkan dalam Tim SDI

Sumber: Kominfo Kabupaten Bantul, 2020

15. Persandian

Penerapan urusan persandian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dalam memberikan perlindungan dan jaminan keamanan informasi sudah menjadi kewajiban dan tuntutan di setiap instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota, mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin penting dalam peningkatan kualitas layanan terhadap pengamanan informasi yang merupakan salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ancaman yang dibawa oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah alasan yang kuat sebagai dasar dilakukannya pengelolaan informasi berklasifikasi melalui cara yang modern, holistik, dan sistematis. Sebagai organisasi yang dinamis, unit teknis persandian baik yang berada di daerah maupun yang berada di pusat dituntut tanggap dan siap untuk melakukan reformasi dalam rangka menyikapi segala perubahan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal

a. Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan adalah Pengkajian dan Pengembangan Persandian

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi

b. Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan persandian pada dinas komunikasi dan informatika tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1) Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian

Maksud dan tujuan program ini adalah memberikan layanan terhadap pengamanan informasi yang merupakan salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good*

governance). Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar 883.529.000,00 realisasi anggaran 857.907.654,00 dengan serapan anggaran dalam 97% Dengan kegiatan sebagai berikut:

a) Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian

Maksud dan tujuan program ini adalah mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen di pemerintahan kabupaten Bantul.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.323.900.000 dapat terealisasi Rp. 310.409.977 dengan serapan anggaran sebesar 96%

Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Penyelenggaraan layanan telekomunikasi telepon dan radio komunikasi internal pemda

Penyelenggaraan dan pengelolaan jaringan telepon di Kabupaten Bantul dilaksanakan bagi semua OPD dan 17 kecamatan di Kabupaten Bantul. Sampai dengan tahun anggaran 2020 sambungan telepon extention baik analog maupun IPPhone jumlah total 238 sambungan. Sedangkan untuk layanan komunikasi radio saat ini telah digelar komunikasi radio dengan frekuensi VHF dan UHF sejumlah 4 jalur frekuensi. Pemanfaatan oleh Dinas Sosial, BPBD, SatpolPP, Dinas Perikanan dan kelautan serta Dinas Lingkungan Hidup. Gelar jaring komunikasi radio tersebut dengan memanfaatkan repeater dan link repeater di enam titik lokasi.

- (2) Sterilisasi Ruang Pimpin dan OPD yang Rentan Penyadapan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendeteksi adanya potensi kebocoran informasi dengan cara penanaman

peralatan penyadap di ruang kerja pejabat, atau adanya sinyal luar yang masuk ke ruang kerja pejabat. Kedua hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan untuk mendapatkan informasi berklasifikasi penting dan atau rahasia. Bocornya informasi penting tersebut sangat rawan terhadap kebijakan-kebijakan penting yang diambil maupun stabilitas pemerintahan. Tahun anggaran 2020 kegiatan ini oleh Dinas Kominfo dilaksanakn dengan lokus kegiatan pada ruang kerja Bupati dan Sekpi Bupati, Wakil Bupati dan Sekpri, Sekda dan Ruang Rapat Sekda.

(3) Gelar Jaring Persandian Daerah (Forum Komunikasi Sandi Daerah)

Pelayanan koordinasi persandian dengan jajaran persandianse-DIY diwadahi dengan Forum Komunikasi Sandi Daerah DIY (Forkomsanda DIY) yang masing-masing anggotanya terdiri dari Unit Teknis Persandian (UTP) di Pemda DIY, Polda DIY, Lanal Yogyakarta, Lanud Adisutjipto, Korem 072/Pamungkas, Kejati, dan Kabupaten/Kota se-DIY.

(4) Pengamanan Berita Rahasia

Keluar masuk berita rahasia baik dari pusat maupun propinsi ke Kabupaten Bantul dan sebaliknya melalui persandian. Hal ini menjadi mutlak dilakukan sesuai dengan peraturan Kepala BSSN RI. Proses penyadian harus dilakukan terhadap berita yang akan dikirim dan pembukaan berita sandi menjadi berita terang dilakukan terhadap berita sandi yang masuk sebelum didistribusi ke alamat. Kegiatan ini hanya bisa dilakukan oleh personil sandi, karena hanya petugas sandi yang memiliki akses sandi terhadap peralatan sandi maupun sistem kunci yang

telah ditetapkan secara nasional oleh BSSN RI sebagai lembaga tingkat pusat yang bertanggung jawab atas persandian secara nasional

(5) Pengamanan Sinyal Komunikasi Internal Pemkab. Bantul

Pengamanan sinyal ditujukan untuk mengamankan sinyal pengganggu saat kegiatan penting dilaksanakan dimana dalam acara tersebut dihadiri pejabat tinggi. Dengan pelaksanaan pengamanan sinyal diharapkan acara dapat berjalan lebih lancar dan hikmat. Dalam pelaksanaannya kegiatan pengamanan sinyal tahun anggaran 2020 ditujukan untuk kegiatan Syawalan Gubernur DIY di Kabupaten Bantul dan Upacara Ulang Tahun hari jadi Kabupaten Bantul.

(6) Perancangan Komunikasi Radio Pemkab. Bantul

(7) Penyediaan Filter Repeater RPU

(8) Layanan Call Center 112

Panggilan darurat 112 merupakan layanan untuk memudahkan masyarakat melakukan panggilan secara cepat untuk melaporkan berbagai permasalahan seperti kebakaran, gangguan keamanan, masalah kesehatan dan lain-lain. Dalam pengoperasiannya siap untuk melayani dalam waktu 24 jam dan telah terkoordinasi dengan semua pihak dalam penanganannya termasuk masalah korupsi. Tujuan panggilan darurat 112 diantaranya, mempermudah masyarakat melakukan pelaporan kondisi darurat, mempercepat penanganan kondisi darurat oleh satuan terkait, mengurangi resiko terhadap gangguan dari masing-masing individu maupun masyarakat dan mengurangi dampak bahaya yang ditimbulkan oleh keadaan darurat.

Panggilan Darurat 112 di launching oleh Bupati Bantul bersama Kapolres Bantul dan Direktur Pengembangan Pita lebar Kementerian Kominfo RI dihadiri juga Forkopimda, Kepala OPD bertempat di Gedung Induk Lantai III, Pada Hari Senin, 11 November 2020.

b) Tabel Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keamanan informasi dalam penerapan Digital Government Service di pemerintahan kabupaten Bantul.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 559.629.000 dapat terealisasi Rp 547.497.677 dengan serapan anggaran sebesar 98 %

Adapun bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Penyediaan Frekuensi Radio Internal Pemda. Bantul

Pemanfaatan Radio Komunikasi Internal untuk mendukung komunikasi di beberapa OPD yaitu Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan dan Badan Penanggulangan Bencana daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika memfasilitasi sewa frekuensi untuk komunikasi radio dan pemeliharaan tower serta repeaternya.

(2) Workshop Sosialisasi Kemanan Informasi

Kegiatan sosialisasi Bidang Keamanan Informasi yang dilaksanakan yaitu peningkatan kesadaran keamanan informasi , dengan pemanfaatan tanda tangan digital yang memanfaatkan *cryptografy* / persandian pada algoritmanya. Narasumber kegiatan ini dari Badan Siber dan Sandi Negara serta praktisi IT dari Yogyakarta.

(3) Peserta sosialisasi kepala OPD untuk memberikan pemahaman pemanfaatan tanda tangan digital yang akan diimplementasikan dalam berbagai aplikasi seperti aplikasi perijinan online.

(4) Peningkatan keahlian di bidang Keamanan Informasi

Perkembangan teknologi informasi berdampak pula meningkatnya resiko keamanan atas aplikasi yang ada di server Pemkab. Bantul, oleh karena itu beberapa personil dari Dinas Komunikasi dan *Informatika* diikutkan dalam Bimtek Penetration Testing dengan metode Black Box untuk dapat menemukan celah keamanan dari sudut pandang penyerang (orang di luar system).

(5) Penambahan saluran telepon Pemkab. Bantul

Saluran telepon Pemkab Bantul kini telah dapat memfasilitasi seluruh OPD dan kecamatan di wilayah Kab. Bantul. Perubahan dan penambahan ruangan di masing-masing OPD dan kecamatan berdampak pada meningkatnya kebutuhan titik pemasangan telepon dan hal tersebut yang terus diusahakan untuk dipenuhi oleh Diskominfo Bantul.

(6) Pemeliharaan Jaringan telepon Pemkab. Bantul

Selama 12 bulan penyelenggaraan layanan tentunya tidak lepas dari kendala yang dapat disebabkan oleh faktor alam, aus nya peralatan dan faktor lain yang kadang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu pemantauan dan pemeliharaan terhadap prasarana jaringan telepon harus secara rutin dilakukan.

(7) Terbangunnya repeater radio komunikasi

Penyelenggaraan komunikasi menggunakan radio saat ini masih terkendala dengan adanya beberapa *blind spot* di daerah-daerah tertentu yang tidak dapat dijangkau sinyal

radio atau kualitas sinyal yang kurang baik. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan penambahan repeater di titik-titik strategis sehingga kualitas sinyal radio menjadi lebih baik/ kuat, semakin luasnya area yang dapat dijangkau dan berkurangnya *blind spot*.

(8) Pengamanan sistem elektronik

Berjalanya proses menuju Smart City dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sangat tinggi ketergantungannya dengan kualitas dan stabilitas jaringan internet. Hal ini tidak bisa terpisahkan dengan pengamanan terhadap sistem elektronik yang digunakan. Dimana ketika semua layanan maupun transaksi birokrasi dilakukan melalui sistem elektronik (aplikasi), maka semua hal tersebut akan menjadi keos ketika terjadi insiden terhadap sistem elektronik (aplikasi) yang digunakan.

(9) Penanganan insiden keamanan informasi

Maraknya penggunaan internet di seluruh lapisan masyarakat dunia, sangat berhubungan dengan meningkatnya kerawanan siber. Tak luput dengan jaringan internet yang dikelola Pemkab Bantul. Pada tahun 2020 tercatat sudah 5 insiden siber dengan total obyek serangan sejumlah 61 aplikasi/web, yang meliputi dos, *Defacement*, *SQL Injection* dan *malware*.

c. Keberhasilan Pelaksanaan Urusan Persandian

Keberhasilan komunikasi dan informatika dapat di lihat dari berbagai program kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian

- a) Implementasi tandatangan digital di beberapa OPD di Pemerintah Kab. Bantul seperti Perijinan online (DPMPT),

Simerkes (Dinkes), layanan dokumen kependudukan pada Disdukcapil, Penerbitan SPPT pajak PBB (BKAD), Sigadismentul (Dikpora).

- b) Terasilitasinya komunikasi Radio (frekuensi HT) di beberapa OPD di pemerintah kab. Bantul
- c) Tersedianya komunikasi IP Phone di OPD dan Kecamatan
- d) Memiliki software yang dapat mendeteksi insiden siber yang masuk di wilayah pemerintah kabupaten bantul
- e) Melaksanakan layanan panggilan darurat 112 di di kab. Bantul

d. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan Persandian (lihat Tabel 3.75).

Tabel 3. 75 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Persandian

Permasalahan	Solusi
Peralatan sandi di kabupaten bantul yang ada sudah kurang memenuhi Standart BSSN sehingga kurang maksimal dalam mendukung kegiatan persandian	Pengajuan pemenuhan peralatan sandi kepada TAPD agar sesuai dengan kebutuhan Standart BSSN
Masih terbatasnya personil sandi terutama di bidang TI karena beratnya persyaratan yang ditetapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjadi sandiman.	Peningkatan kualitas dan kompetensi personil melalui diklat, bimtek, dan kursus persandian yang dilaksanakan oleh BSSN selaku Pembina Tunggal Persandian.

Sumber: Kominfo Kabupaten Bantul, 2020

16. Kebudayaan

Kebudayaan telah menjadi akar pendidikan dalam masyarakat, sehingga pembangunan di bidang kebudayaan dilakukan dalam rangka memperkuat jatidiri dan karakter bangsa. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan nilai-nilai budaya diprioritaskan untuk

melestarikan budaya yang telah ada dan meningkatkan potensi budaya, adat-istiadat dan nilai-nilai baru yang berkembang dimasyarakat

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan. Pada tahun 2020 melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
- b) Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

2) Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur

- a) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
- b) Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
- c) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
- d) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a) Kegiatan Pemutakhiran Data
- b) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan, Barang, kepegawaian dan ketatausahaan

4) Program Pengembangan Nilai Budaya

- a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya
- b) Pembinaan Lembaga Penggiat seni
- c) Penghargaan Seniman dan Budayawan
- d) Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya
- e) Festival Kebudayaan Yogyakarta

- f) Gelar Budaya Jogja
- g) Publikasi Seni dan Budaya Daerah
- h) Penyelenggaraan Event Penggiat seni
- i) Pembinaan dan Kelembagaan Adat dan tradisi

5) Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda

- a) Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Kesejarahan
- b) Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan sastra
- c) Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi
- d) Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai Nilai Luhur Dalam Masyarakat

6) Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda

- a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Permuseuman
- b) Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
- c) Pengadaan sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
- d) Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) melaksanakan 6 program kegiatan dengan pembiayaan bersumber dari Dana APBD dan Dana Keistimewaan DIY melalui mekanisme BKK. Ada 3 Program di Sekretariat dengan anggaran APBD dan 3 Program di Bidang-Bidang yang anggarannya bersumber dari Dana Keistimewaan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan kebudayaan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Program Administrasi Perkantoran

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan administrasi perangkat daerah secara efektif dan efisien dilaksanakan dengan 2 kegiatan, yaitu:

a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

Didukung dengan anggaran APBD Murni sebesar Rp.369.993.994,- difocusing untuk penanganan Covid 19 sebesar Rp. 33.167.199,- (Pagu Refocusing Rp.336.826.795,-). Pagu Anggaran Perubahan Rp.339.826.795,- dan realisasi 94,87% sebesar Rp.322.383.818,-

b) Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Didukung anggaran APBD Murni sebesar Rp.304.555.456,- difocusing sebesar Rp. 130.830.456,- (Pagu Refocusing Rp173.725.000,-). Pagu APBD-P sebesar Rp.135.995.000,- dan realisasi Rp.93.654.768,-

2) Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur

Bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kantor, sehingga bermanfaat mendukung pelaksanaan kinerja aparatur

Program ini dilaksanakan dengan 4 kegiatan, yaitu:

a) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Didukung dengan anggaran APBD Murni sebesar Rp.45.870.000,-, Pagu APBD-P sebesar Rp52.370.000,- (Penambahan untuk belanja pendukung protocol Kesehatan) dan realisasi Rp.47.933.500,-

b) Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

APBD Murni sebesar Rp.30.000.000, pagu APBD-P sebesar Rp.57.230.000,- dan realisasi Rp.56.997.390,-

c) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Didukung dengan anggaran APBD Murni sebesar Rp.196.043.716 Pagu APBD-P sebesar Rp.197.043.716,- dan realisasi Rp.181.078.720,-

d) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Didukung anggaran APBD sebesar Rp.20.000.000 dan realisasi Rp.19.175.000,-

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas pertanggungjawaban kinerja Dinas Kebudayaan melaksanakan dengan 2 kegiatan, yaitu:

a) Kegiatan Pemutakhiran Data

Didukung dengan anggaran APBD Murni sebesar Rp.695.180,-, difocusing untuk penanganan Covid 19 sebesar Rp.53.095.180,- (Pagu Refocusing Rp.6.600.000,-). Pagu APBD-P sebesar Rp.500.000,- dan realisasi Rp.500.000,-

b) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan, Barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Didukung dengan anggaran APBD Murni sebesar Rp.30.893.046,- difocusing sebesar Rp.14.668.046,- (Pagu Refocusing Rp.16.600.000,-). Pagu APBD-P sebesar Rp.22.325.000,- dan realisasi Rp.19.557.800,-.

4) Program Pengembangan Nilai Budaya

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai-nilai tradisi dan budaya serta peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya.

Program Pengembangan Nilai Budaya dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan , antara lain:

a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penguatan kapasitas dan kemampuan manajerial Pengelolaan Rintisan Desa Budaya Anggaran bersumber dari Dana Keistimewaan DIY Tahun 2020 dengan pagu sebesar Rp.302.047.500 dan terealisasi sebesar Rp301.822.500 atau 99,93% dengan efisiensi 0,07%. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan Workshop Manajemen Pengelolaan Rintisan Desa Budaya untuk 15 Desa yaitu:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| (1) Desa Girirejo | (9) Desa Baturetno |
| (2) Desa Karangtalun | (10) Desa Potorono |
| (3) Desa Imogiri | (11) Desa Singosaren |
| (4) Desa Wonokromo | (12) Desa Tamanan |
| (5) Desa Srimulyo | (13) Desa Trirenggo |
| (6) Desa Terong | (14) Desa Sendangsari |
| (7) Desa Jambidan | (15) Desa Argodadi |
| (8) Desa Banguntapan | |

b) Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni

Maksud kegiatan ini adalah dalam rangka pembinaan, pengembangan, pemanfaatan potensi serta melestarikan kesenian tradisional di Kabupaten Bantul yang hampir punah dengan mendokumentasikannya dalam bentuk Film Dokumenter. Bersumber dari Dana Keistimewaan DIY, pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 229.448.000 terealisasi Rp. 221.748.000 atau sebesar 96,64% (efisiensi 3,39%). Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Lomba Film Fiksi

(2) Pembuatan Film Dokumenter Tari Langen Mandra Wanara, Nini Thowong dan Srandul

(a) Langen Mandra Wanara merupakan tarian tradisional yang disajikan dalam posisi jongkok dan terdapat dialog berupa Macapat. Tri ini biasanya diadakan pada saat upacara pernikahan atau hari besar lain yang saat ini semakin jarang dipentaskan.

(b) Tari Nini Thowong adalah seni spiritual yang ada di Yogyakarta sejak zaman Mataram pada masa Panembahan Senapati. Berasal dari wilayah Pundong, Nini Thowong bukan sekedar permainan biasa tetapi adalah suatu upacara untuk memanggil hujan, pengobatan, pesugihan atau mencari barang hilang yang sekarang telah bergeser fungsinya. Saat ini Nini Thowong telah diolah menjadi kolaborasi ritual, performansce, komoditas wisata dan pembentukan kampung budaya.

(c) Srandul adalah salah satu seni tradisional kerakyatan termasuk jenis drama tari dari DIY. Penciptanya tidak diketahui, diwariskan turun temurun antar generasi. Selaian sebagai sarana hiburan masyarakat, kesenian ini bertujuan memberikan tuntunan secara tersirat maupun tersurat melalui shalawat dan tembang jawa yang berisi nasehat untuk menjadi orang baik.

c) Kegiatan Misi Kebudayaan Ke dalam dan Keluar Negeri

Kegiatan yang bertujuan untuk menjalin Kerjasama dengan daerah lain dalam bidang pengelolaan kekayaan budaya dan memperkenalkan budaya local agar tercipta ruang apresiasi

bagi masyarakat terhadap seni budaya yang kita miliki. Didukung Dana Keistimewaan DIY dengan pagu sebesar Rp.48.800.000,- terealisasi Rp.44.782.500,- atau sebesar 91,77% (efisiensi 8,23%). Kegiatan yang telah dalam tahap akhir persiapan ini akhirnya dibatalkan (berdasarkan surat dari Badan Penghubung Daerah nomor 430/1689 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pembatalan GSBY tahun 2020).

Misi kebudayaan direncanakan ada 4 di tahun 2020, namun karena masih dalam Pandemi Covid 19 dan pembatasan kegiatan ke luar daerah dan kegiatan yang mengumpulkan masa tidak diperkenankan maka misi ditiadakan.

d) Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan

Maksud kegiatan ini adalah dalam rangka pelestarian budaya dalam berbagai bentuk dan media, bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat yang meliputi: seniman budayawan, pelestari adat tradisi dan pelestari cagar budaya :

- (1) Penerima Penghargaan Kategori Seniman / Budayawan :
 - (a) Murti Raharjo / Sapar (Seniman Kethoprak)
 - (b) Saridal, S.Pd (Seniman Macapat, Langen Carita, Dolanan Anak)
 - (c) Syamsu Setiaji, S.Pd (Seniman Sastra dan Teater)
 - (d) Hadi Suyoyo (Seniman Dalang)
 - (e) Yatini (Seniwati Sinden)
- (2) Penerima Penghargaan Kategori Pelestari Adat / Tradisi
 - (a) Upacara Adat Grebeg Selarong (Pajangan)
 - (b) Upacara Adat Jodhangan Goa Cerme Srunggo (Imogiri)

- (c) Upacara Adat Jumedhuling Mahesa Sura (Sanden)
- (d) Upacara Adat Tirta Giri Agung / Gunung Pasar (Dlingo)
- (e) Upacara Adat Merti Dusun Karen (Kretek)
- (3) Penerima Penghargaan Kategori Pelestari Cagar Budaya
 - (a) Stoomwals (DPUPKP)
 - (b) Masjid Pathok Negoro Dongkelan (Kasihan)
 - (c) Eks. Kantor Sinder Tebu Madugondo (Piyungan)
 - (d) Dalam Bupati Kanjengan Keraton Surakarta (Imogiri
 - (e) Pasar Tradisional Sangkeh (Sanden)

Didukung dari Dana Keistimewaan DIY Tahun 2020 sebesar Rp.338.376.000,- terealisasi Rp.335.373.273,- atau sebesar 99,11% (efisiensi 0,89%).

e) Kegiatan Festival Kebudayaan

Merupakan kegiatan rutin setiap tahun sebagai upaya untuk mendorong masyarakat dan mengapresiasi potensi seni tradisional, modern dan konteporer agar memiliki ruang ekspresi sebagai upaya untuk memperkuat nilai-nilai kearifan lokal. Di masa pandemi covid 19 ini tentu ruang gerak terbatas, sehingga FKY tahun 2020 dilakukan secara daring dalam waktu bersamaan di seluruh kabupaten/kota se DIY. Masyarakat dapat mengakses youtube Taste of Jogja untuk menyaksikan 6 pertunjukan seni FKY Kabupaten Bantul:

- (1) Sendra Tari Dewi Sri Hangrekso Bumi
- (2) Kesenian Wayang Wong "Prahasto Lena"
- (3) Kesenian Jathilan Diponegaran
- (4) Sendra Tari Makarya Mbangun Desa
- (5) Kesenian Reyog Wayang
- (6) Komposisi Karawitan

Didukung dari Dana Keistimewaan DIY Tahun 2020 sebesar Rp.170.862.500,- terealisasi Rp.161.642.500,- atau sebesar 94,60% (efisiensi 5,40%)

f) Kegiatan Gelar Budaya Jogja

Maksud kegiatan ini adalah membangkitkan semangat berkesenian khususnya para seniman yang saat ini kehilangan wadahnya karena pandemic corona-19. Kegiatan yang rutin diselenggarakan di wilayah DIY ini pada tahun 2020 ini dikemas secara daring, dengan mementaskan dan mengirimkan beberapa kesenian ke festival di Propinsi DIY:

- (1) Festival Kethoprak
- (2) Festival Sendra Tari
- (3) Festival Teater

Selain itu dilaksanakan upaya pelestarian dan pengembangan kesenian di Kabupaten Bantul, yaitu:

- (1) Revitalisasi Jathilan Diponegaran, dimana Jathilan merupakan tarian paling tua di Jawa yang dikenal dengan nama Jaran Kepang. Untuk memberi warna dan ciri khusus, Kabupaten Bantul berinisiatif mengemas suatu pertunjukan Jathilan dengan spirit perjuangan Pangeran Diponegaoro, yang disebut Jathilan Diponegaran.
- (2) Revitalisasi Reyog Wayang, sangat populer di wilayah Bantul bagian selatan seperti Srandakan, Sanden, Bambanglipuro, Pandak dan beberapa daerah lainnya. Untuk itu Kabupaten Bantul berinisiatif mengemas Reyog Wayang ini menjadi kesenian tradisional yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul dengan kegiatan Revitalisasi Reog Wayang.

Bersumber dari Dana Keistimewaan DIY, pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.344.083.000,- terealisasi Rp.339.484.000,- atau sebesar 98,66% (efisiensi 1,34%).

g) Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah

Kabupaten Bantul memiliki event dan seni budaya yang banyak. Selain itu ada banyak cagar budaya dan warisan budaya yang tersebar di desa/kecamatan Kabupaten Bantul. Semua itu perlu untuk diketahui oleh masyarakat Bantul atau luar Bantul sehingga menarik mereka untuk datang menikmati seni budaya di Kabupaten Bantul. Melalui media publikasi siaran seni budaya melalui media televisi, diperkenalkan tentang:

- (1) Museum yang ada di wilayah Kabupaten Bantul (Museum Suharto dan Museum Tino Sidin)
- (2) Warisan Budaya Benda di Bantul (Rumah Tradisional Joglo Bapak Kumara di Celep dan Situs Gunung Wingko di Sanden)
- (3) Warisan Budaya Tak Benda (makanan Tradisional Bantul: Adrem)
- (4) Warisan Budaya Seni Tradisional Srandul (di Neco Sabdodadi)
- (5) Museum Tradisional Wayang Beber Sekartaji
- (6) Kampung Dolanan Anak di Panggunharjo
- (7) Desa Budaya Gilangharjo, Pandak

Bersumber dari Dana Keistimewaan DIY, pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.228.949.180,- terealisasi Rp.202.870.850,- atau sebesar 88,61% (efisiensi 11,39%).

h) Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni

Potensi seni budaya di Kabupaten Bantul sangat banyak dan semangat masyarakat untuk melestarikan, mengembangkannya sangat besar, Hal itu tercermin dari

banyaknya kelompok kesenian yang terdaftar. Terdapat 1.156 kelompok seni yang memiliki register kesenian/ Nomor Induk Kesenian (*sumber: *data base seni budaya kabupaten Bantul th 2020*). Di tahun 2020 terfasilitasi 148 pentas yang terbagi pada sebelum pandemic 38 pentas dan 110 pentas dilakukan saat pandemic covid 19. Saat terjadi Pandemi Covid 19 Dinas Kebudayaan melakukan re desain terhadap pelaksanaan kegiatan seni budaya, dibatasi dan sesuai protocol Kesehatan.

Workshop Pemberdayaan dan Penguatan Sanggar:

- (1) Sanggar Seni Padmosono, Gedriyan, Bantul
- (2) Sanggar Seni Amrih Lantip, Argorejo, Sedayu, Bantu
- (3) Sanggar Narendra Plus, Ganjoyo, Imogiri
- (4) Sanggar Shinta Art, Tulasan, Mulyodadi, Bambanglipuro
- (5) Sanggar Sekar Kinanthi, Kojo, Pendowoharjo, Sewon
- (6) Sanggar Puspo Rinonce, Ngasem, Timbulharjo, Sewon
- (7) Sanggar Omah Joged Pramesti, Panggungharjo, Sewon
- (8) Sanggar Tresni Budoyo, Timbulharjo, Sewon
- (9) Sanggar Yoso Budoyo , Dongkelan kauman, Tirtonirmolo, Kasihan
- (10) Sanggar Sekar Laras Iromo, Ngebel, Tirtonirmolo, Kasihan

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi stimulan bagi kelompok seni atau group yang ada di Kabupaten Bantul sehingga semakin bersemangat dalam turut serta melestarikan seni budaya tradisi yang ada. Melalui Dana

Keistimewaan DIY Tahun 2020 sebesar Rp.1.340.506.500,- terealisasi Rp.1.286.000,- atau sebesar 96% (efisiensi 4%).

i) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

Maksud kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi yaitu untuk mengingatkan kembali terhadap kepercayaan tradisi yang ada di masyarakat agar dapat dijaga dan dilestarikan untuk kedepannya melindungi, melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan kesenian tradisional. Bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni budaya. Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- (1) Event Upacara Adat
 - (a) Upacara Adat Ambengan Jagalan
 - (b) Pancuran Terong
 - (c) Labuhan Kraton
- (2) Merti Dusun (tidak dapat terlaksana karena Pandemi Covid 19)

Karena pada bulan Maret terjadi Pandemi Covid 19 dan seluruh kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa tidak diperkenankan maka untuk Upacara Adat yang direncanakan 21 kali hanya terlaksana 4 kali (sebelum pandemic), dan Merti dusun yang rencana awalnya 30 kali tidak dapat terlaksana.

Sehingga kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi di redesain pelaksanaannya dengan:

- (1) Kajian Penyelenggaraan Upacara Adat
 - (a) Jasa Konsultasi Penelitian Nguras Sendang Seliran
 - (b) Jasa Konsultasi Penelitian Labuhan Hondodento
 - (c) Jasa Konsultasi Penelitian Upacara Adat Selikuran
 - (d) Jasa Konsultasi Penelitian Labuhan Kraton
 - (e) Jasa Konsultasi Penelitian Jodangan Goa Cerme

- (f) Jasa Konsultasi Penelitian Upacara Tumuruning Mahesasura
- (g) Jasa Konsultasi Penelitian Nyadran Suracala
- (h) Jasa Konsultasi Penelitian Grebeg Slarong
- (2) Kajian Seni
 - (a) Jasa Konsultasi Penelitian Nini Thowong
 - (b) Jasa Konsultasi Penelitian Seni Srandul
 - (c) Jasa Konsultasi Penelitian Seni Langen Mandrawanara
- (3) Kajian Pengobatan Tradisional : Gurah

Bersumber dari Dana Keistimewaan DIY, pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.972.107.500,- terealisasi Rp.876.113.300,- atau sebesar 90,13% (efisiensi 9,87%).

5) Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan perlindungan , pengembangan, dan pemanfaatan kesenian nilai-nilai tradisi dan budaya serta peningkatan kualitas pelestarian dokumentasi warisan budaya tak benda. Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :

a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk mengenalkan, melestarikan dan mengembangkan sejarah local kepada masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan ditengah pandemic covid 19 sehingga digunakan media pertemuan terbatas maupun darin, yaitu:

- (1) Kompetisi Sejarah Tingkat Kabupaten dan Propinsi DIY
- (2) Dialog Sejarah
- (3) Peningkatan Kapasitas Sejarah Lokal

(4) Sarasehan sejarah

(5) Peringatan Hari Besar Sejarah

Semua kegiatan dilaksanakan dengan protocol Kesehatan, terbatas 30 orang maupun secara daring (dialog interaktif di Radio). Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Kesejarahan didukung pagu anggaran sebesar Rp.532.000.000,- dan terealisasi Rp.529.761.200,- atau 99,58% dan efisiensi sebesar 0,42%

b) Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra

Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan bahasa dan sastra khususnya Bahasa dan Sastra Jawa di kalangan pelajar dan masyarakat umum serta seniman. Kegiatan ini dilaksanakan melalui:

Kompetisi Kebahasaan dan Sastra

(1) Gelar Macapat

(2) Cetak Buku Antologi Geguritan dan Cerkak

(3) Dialig Interaktif Sastra, Bahasa dan Aksara Jawa

(4) Sastrawan Masuk Sekolah

(5) Cetak Buku Antologi Puisi

Kegiatan yang dilaksanakan dengan metode langsung maupun daring ini berpagu anggaran Rp.1.112.773.000,- realisasi anggaran sebesar 885.320.000.

c) Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi

Maksud kegiatan Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi yaitu untuk mengingatkan kembali terhadap kepercayaan tradisi yang ada di masyarakat agar dapat dijaga dan dilestarikan dan tujuan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kepercayaan dan tradisi yang ada di daerah mereka sehingga tumbuh kesadaran untuk menghargai, menjaga dan melestarikan kepercayaan dan tradisi tersebut. Pagu anggaran sebesar Rp. 225.178.000,- terealisasi sebesar Rp

213.328.000,- atau sebesar 94,74%. Dilaksanakan dengan Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan dan Rapat DKB Kabupaten Bantul.

d) Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat

Kegiatan yang merupakan upaya pengembangan dan pelestarian warisan Budaya khususnya Seni Pedalangan Gaya Yogyakarta yang merupakan kesenian dengan nilai-nilai budaya daerah sekaligus memberikan peluang bagi organisasi seni khususnya seni pedalangan di masyarakat untuk lebih mengembangkan bakat dan ketrampilannya demi kemajuan organisasi maupun kesenian tradisonal itu sendiri .

Didukung anggaran dari Dana Keistimewaan Rp.1.811.094.000,- terealisasi Rp1.609.135.446 atau 88,85%, dengan hasil sebagai berikut:

- (1) Pengiriman Dalang Anak dan Remaja Tingkat DIY
- (2) Pentas Wayang Kulit 25 kali
- (3) Pentas Wayang Kolosal 1 kali

6) Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai-nilai tradisi dan budaya serta peningkatan kualitas pelestarian dokumentasi warisan budaya benda. Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman

Kegiatan ini bertujuan untuk meingkatkan pengetahuan, pengelolaan, pemanfaatan cagar budaya dan memahami pentingnya pengetahuan Pengelolaan Warisan Budaya Cagar Budaya untuk kepentingan agama, social, pendidikan, ilmu

pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Sasaran seminar yaitu seluruh pengelola cagar budaya yang ada di Kabupaten Bantul. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.845.000.000 terealisasi sebesar Rp.645.334.960 atau 23,54%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 4 sub kegiatan:

- (1) Kompetisi Permuseuman (LCC Museum Tingkat Kabupaten Bantul dan Pengiriman Tingkat DIY)
- (2) Kajian Pengembangan Museum
- (3) Museum Taman Tino Sidin dan Museum HM Soeharto
 - (a) Promosi Museum Bantul
- (4) Wajib Kunjung Museum

b) Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mempercepat penanganan pelestarian pengembangan pemanfaatan Warisan Budaya Cagar Budaya dengan tujuan agar situs tersebut dapat berada pada posisi yang sebenarnya hingga dapat dikembangkan, sebagai obyek pendidikan, sebagai penanda atau jati diri lokal, maupun sebagai obyek wisata budaya.

Tujuan Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya, yaitu untuk melestarikan kekayaan budaya berupa Warisan Budaya dan Cagar Budaya, baik benda maupun tak benda, Menetapkan Cagar Budaya di Kabupaten Bantul, mengenalkan situs bersejarah di Kabupaten Bantul kepada masyarakat sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam melestarikan warisan budaya cagar budaya yang dimiliki sebagai kearifan lokal dan dapat menarik minat kunjung wisatawan ke Kabupaten Bantul. Pagu anggaran sebesar Rp.1.317.121.710,- terealisasi sebesar Rp.1.287.522.703,- atau 97,75%.

Capaian Fisik Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya adalah sebagai berikut:

- (1) Penetapan 20 Cagar Budaya
- (2) Kajian Warisan Budaya Tak Benda (Nguras Sendang Sumur Surosetiko, Adrem, Lemper dan Abangan
- (3) Kajian Pemutakhiran Data Warisan Budaya Benda dan Tak Benda
- (4) Test Pit Benda Warisan Budaya Klaras, Canden, Jetis, Bantul
- (5) Cetak Buku Cagar Budaya
- (6) Perencanaan Teknis Cagar Budaya

c) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Lembaga Budaya

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Memberikan sarana dan prasarana dalam pelestarian seni yang ada di Kabupaten Bantul khususnya seni karawitan. Pengadaan Gamelan perunggu di tahun 2020 ini menggunakan Dana Keistimewaan DIY anggaran sebesar Rp.397.445.000,- dengan realisasi sebesar Rp.397.445.000,- atau 100%. Seperangkat Gamelan Perunggu Slendro Pelog Gaya Yogyakarta diserahkan kepada kelompok masyarakat.

d) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersusunnya sebuah dokumen ilmiah yang lengkap, akurat, dan akuntabel untuk dijadikan dasar pengadaan lahan untuk Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Bantul, melalui Kajian Studi Kelayakan Pembangunan Taman Budaya Bantul dan Studi Appraisal Pengadaan Tanah untuk Taman Budaya Bantul.

Bersumber dari Dana Keistimewaan DIY, pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.202.100.000,- terealisasi Rp.192.268.500,- atau sebesar 95,14% (efisiensi 4,86%)

c. Keberhasilan Pelaksanaan Urusan Kebudayaan

Pada tahun 2020 Dinas Kebudayaan (*Kunda Kabudayaan*) sesuai amanat Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 mulai melaksanakan mekanisme BKK Dana Keistimewaan DIY. Program Kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar adalah untuk membina dan memberi ruang berekspresi seni dan budaya melalui pentas pertunjukan oleh masyarakat. Saat terjadi pandemic Covid 19 kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa tidak diperkenankan.

Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri agar olah kreasi dan wadah ekspresi pelaku seni tetap tersedia. Media Daring menjadi solusi dalam interaksi seni budaya saat pandemic. Dengan terbatasnya waktu dan ruang gerak di pelaksanaan program Pengembangan Nilai Budaya tersebut mendorong Dinas Kebudayaan untuk lebih mengoptimalkan program kegiatan yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan. Pada Kegiatan Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya target Penetapan Cagar Budaya sejumlah 20 rekomendasi dapat terlampaui, 26 Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya di tahun 2020, dan telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Rumah Demamit Pundong
- 2) Kolam Renang John Kersch
- 3) Kamar Mandi Kolam Renang John Kersch
- 4) Pagar Kolam Renang John Kersch,
- 5) SDN 1 Pundong
- 6) Joglo Setyo Pranoto
- 7) Song Kamal
- 8) Joglo Cokro Subroto
- 9) Makam Sunan Geseng

- 10) Rumah Singgah Soedirman
- 11) Makam Bupati Bantul Pertama
- 12) Arca Agastya BG 1815
- 13) Arca Bodhisattwa Padmapani (BG.575)
- 14) Arca Buddha Wairocana BG.1470b,
- 15) Arca Buddha Wairocana BG. 1470c
- 16) Arca Chandralokeswara
- 17) Arca Jambhala (BG. 1474)
- 18) Cincin Emas (BG.1475
- 19) Siwa Parwati Mantup
- 20) Siwa Payak
- 21) Koleksi Emas Gampingan
- 22) Pasar Sungapan Sedayu
- 23) Rumah Indis Milik Bapak Much. Djajus
- 24) Bangunan SD Kanisius Ganjuran
- 25) Penginapan John Kersch
- 26) Rumah Tradisional Milik Bapak Aditya Wahyu Kumara

d. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 76 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Kebudayaan

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Kurang optimalnya upaya pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya, terkendala aturan dalam perbaikan warisan budaya yang rusak dan belum ditetapkan sebagai CB	Peningkatan upaya pelestarian obyek-obyek kebudayaan di Kabupaten Bantul: nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni dan situs melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi - Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat (Pembinaan Dalang anak/ remaja, pentas wayang) - Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya (Penetapan Cagar Budaya, Perencanaan Teknis Cagar Budaya)
	Belum terdokumentasikannya Warisan Budaya Benda dan	Tersedianya update data Warisan Budaya Benda dan Warisan Budaya

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Warisan Budaya Tak Benda secara lengkap	Tak Benda di Kabupaten Bantul dengan: - Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya (Kajian Warisan Budaya Tak BendaBenda dan , Pemutakhiran data Warisan Budaya)
	Menurunnya minat masyarakat dan generasi penerus dalam pelestarian seni dan budaya lokal	Pemeliharaan dan Pengembangan Nilai Budaya (Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni) melalui : - Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya - Pembinaan Lembaga Penggiat seni - Penyelenggaraan Even Penggiat Seni - Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Pengenalan dan Kerjasama Seni Budaya melalui kegiatan: - Misi Kebudayaan Kedalam dan Keluar Negeri - Publikasi Seni Budaya Daerah Penyelenggaraan pentas, festival atau lomba seni budaya sebagai ajang untuk menunjukkan potensi obyek kebudayaan sekaligus menampung bakat seni budaya masyarakat - Penghargaan Seniman dan Budayawan - FKY - GBY
	Kurangnya daya tarik dan pembinaan terhadap bahasa sastra serta belum optimalnya fungsi museum , situs/ peninggalan sejarah dalam pengembangan dan pemanfaatan budaya	Pembinaan Bahasa Sastra, Kesenian dan Permuseuman yang melibatkan / bersinergi dengan lembaga pendidikan, tokoh seni, masyarakat dan pengelola, melalui kegiatan: - Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra (Kompetisi Kebahasaan, Gelar macapat, Cetak buku sastra , Dialog, Sastrawan Masuk sekolah) - Pembinaan dan Pengembangan Kesenian (Kompetisi Sejarah, Peningkatan Kapasitas Sejarah, Dialog dan Sarasehan Sejarah, Peringatan Hari Besar Sejarah) - Pembinaan Permuseuman (Komperisi Museum, Penelitan Pengembangan Museum, Wajib Kunjung dan Promosi Museum)

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2020

17. Perpustakaan

a. Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan dalam urusan perpustakaan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
- b) Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
- c) Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pembangunan/rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor
- b) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
- c) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
- d) Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a) Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan

4) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

- a) Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan;
- b) Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca;
- c) Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah;
- d) Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan;

5) Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan

- a) Pengembangan Pelayanan Perpustakaan;
- b) Peningkatan Promosi Perpustakaan

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Maksud dan tujuan program ini adalah menunjang kelancaran pekerjaan pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pagu anggaran program Rp. 840,214,443,- terealisasi Rp. 828,332,394,- atau 98,59%. Indikator kinerja program ini adalah nilai AKIP. Target tahun 2020 sebesar 83 terealisasi 80,85.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menunjang kelancaran pekerjaan di Sekretariat maupun di Bidang lain pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pagu anggaran Rp. 169,967,000,- terealisasi Rp. 166.302.672,- atau 97,84%.

b) Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menunjang kelancaran pekerjaan di Sekretariat maupun Bidang lain pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pagu anggaran Rp. 84.411.443,- terealisasi Rp. 84.391.443 atau 99,98%.

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Pekantoran

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menunjang kelancaran pekerjaan di Sekretariat maupun Bidang lain pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pagu anggaran Rp. 585.836.000,- terealisasi Rp. 577.638.279,- atau 98,60%

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Maksud dan tujuan program ini adalah terpenuhinya sarana prasarana yang memadai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pagu anggaran program Rp. 462,207,257,- terealisasi Rp. 461,973,300,- atau 99,95%. Indikator kinerja program ini adalah cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur. Target tahun 2020 sebesar 100 % terealisasi sebesar 100%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana prasarana Gedung kantor. Pagu anggaran Rp. 233.668.257,- terealisasi sebesar Rp. 233.619.000,- atau 99.98%.

b) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya peralatan dan perlengkapan pendukung pekerjaan. Pagu anggaran Rp. 12.475.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.315.000,- atau 98,72%.

c) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas sebagai sarana pendukung kelancaran pekerjaan. Pagu anggaran Rp. 194.854.000,- terealisasi Rp. 194.832.500,- atau 99,99%.

d) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana

pendukung pekerjaan. Pagu anggaran Rp. 21.210.000,- Rp. 21.206.800 atau 99,98%.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Maksud tujuan program ini adalah meningkatkan capaian kinerja OPD sehingga IKU OPD dapat tercapai. Pagu anggaran Rp. 3.454.500,- terealisasi Rp. 3.454.500,- atau 100%. Indikator kinerja proram ini adalah capaian nilai evaluasi kinerja. Target tahun 2020 sebesar 82 tercapai 84,85.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Perencanaan dan koordinasi program kegiatan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah merencanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan yang ada sehingga IKU OPD dapat tercapai. Pagu anggaran Rp. 3.454.500, tercapai Rp. 3.454.500,- atau 100%.

4) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatnya jumlah Perpustakaan sekolah dan desa yang memiliki Akreditasi Nasional. Pagu anggaran program Rp. 61.684.500,- terealisasi sebesar Rp. 60.900.000,- atau 98,73%. Indikator kinerja program ini adalah jumlah perpustakaan sekolah dan desa yang memiliki akreditasi nasional. Target tahun 2020 sejumlah 8 terealisasi 16.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan -kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya Forum Komunikasi Pustakawan, Pengelola Perpustakaan Sekolah/Desa dan TBM. Pagu anggaran Rp. 1.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.650.000,- atau 100%.

Karena adanya Pandemi Covid-19 anggaran untuk kegiatan ini difocusing sehingga kegiatan yang dapat dilaksanakan baru tahap persiapan.

b) Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

Maksud dan tujuan terlaksananya bedah buku, dan penerbitan bulletin. Pagu anggaran Rp. 1.780.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.780.000,- atau 100%.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan baru sampai pada tahap persiapan karena pandemic Covid-19.

c) Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini terlaksananya penyediaan bahan pustaka di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bantul. Pagu anggaran Rp42.729.500,- terealisasi Rp41.945.000,- atau 98,16%. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan buku elektronik (E-Book) sebanyak 67 judul.

d) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melaksanakan pembinaan perpustakaan untuk persiapan akreditasi dan melakukan evaluasi perpustakaan melalui lomba perpustakaan desa. Pagu anggaran Rp15.525.000,- terealisasi sebesar Rp15.525.000,- atau 100%.

e) Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan pelatihan pengelolaan perpustakaan bagi pengelola perpustakaan sekolah, desa dan komunitas . Pagu anggaran Rp0,- terealisasi sebesar Rp0,- atau 0%. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah nihil karena anggaran difocusing untuk penanganan Covid-19.

5) Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat. Pagu anggaran program ini Rp. 122.049.900,- terealisasi Rp. 122.044.500, atau 99,99%. Indikator kinerja dari program ini adalah Indeks kepuasan terhadap layanan masyarakat (IKM). Target tahun 2020 83% terealisasi 90% atau tercapai 108,43%.

a) Kegiatan Pengembangan Pelayanan Perpustakaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan pelayanan dan akses membaca kepada masyarakat melalui layanan di Perpustakaan Daerah dan Layanan Keliling.

Pagu anggaran Rp. 63.009.900,- terealisasi sebesar Rp. 63.009.500,- atau 100%.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- (1) Layanan keliling di sekolah (TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA), tempat ibadah, komunitas.
- (2) Layanan Sabtu-Minggu
- (3) Layanan di Perpustakaan Umum Daerah
- (4) Layanan secara online
- (5) Pelatihan layanan perpustakaan

b) Kegiatan Peningkatan Promosi Perpustakaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengenalkan perpustakaan kepada masyarakat. Pagu anggaran Rp59.040.000,- terealisasi sebesar Rp. 59.035.000,- atau 99,99%. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah :

(1) Lomba Mendongeng untuk siswa SD

Adapun data- data yang berkaitan dengan program kegiatan pada urusan perpustakaan disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 3. 77 Jumlah Perpustakaan

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH
1	Perpustakaan Daerah/Kabupaten	1
2	Perpustakaan Desa	75
3	Perpustakaan SD/MI	395
4	Perpustakaan SMP/MTs	116
5	Perpustakaan SMA/SMK/MA	99
6	Perpustakaan Khusus/Instansi	9
7	Perpustakaan Tempat Ibadah	56
8	Perpustakaan Komunitas	106
9	Perpustakaan Pondok Pesantren	7
	Jumlah	864

Sumber : Dispusip, Kabupaten Bantul 2020

Tabel 3. 78 Jumlah Pojok Baca

No	Tahun	Jumlah
1	2017	3
2	2018	10
3	2019	17
4	2020	0
	Jumlah	30

Sumber : Dispusip, Kabupaten Bantul 2020

Tabel 3. 79 Jumlah Pengunjung Layanan Perpustakaan

No	Tahun	Jumlah Pengunjung
1	2016	345.368
2	2017	518.693
3	2018	732.826
4	2019	841.154
5	2020	140.366

Sumber : Dispusip, Kabupaten Bantul 2020

c. Keberhasilan Urusan Perpustakaan

Keberhasilan urusan perpustakaan pada program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan adalah telah terakreditasinya 10 perpustakaan dengan nilai A.

Tabel 3. 80 Jumlah Perpustakaan yang Terakreditasi

No	Perpustakaan yang Terakreditasi	Jumlah s.d Th. 2020
1	Perpustakaan Desa	2
2	Perpustakaan SD	12
3	Perpustakaan MI	0
4	Perpustakaan SMP	7
5	Perpustakaan MTs	3
7	Perpustakaan Khusus	0

Sumber : *Dispupip, Kabupaten Bantul 2020*

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi pada program dan kegiatan di Urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 81 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Perpustakaan

No.	Permasalahan	Solusi
1	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi dan tempat belajar	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan promosi perpustakaan kepada masyarakat - Mengoptimalkan peran masyarakat/pegiat literasi dalam promosi perpustakaan
2	Belum optimalnya sarana prasarana Perpustakaan Daerah (terbatasnya ruang baca dan koleksi perpustakaan). Belum optimalnya sarana prasarana Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa, Perpustakaan komunitas serta TBM, dan Pojok Baca	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perpustakaan, seperti dengan dibangunnya Pojok Baca, penambahan koleksi perpustakaan

Sumber : *Dispupip, Kabupaten Bantul 2020*

18. Kearsipan

a. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul pada Urusan Kearsipan sebagai berikut

1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

- a) Kegiatan Pengklasifikasian Data;
- b) Kegiatan Pengawasan Kearsipan;

2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

- a) Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
- b) Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
- c) Akuisisi dan Pengolahan Arsip

3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

- a) Peningkatan Pelayanan Kearsipan

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2020 pada Urusan Kearsipan sebagai berikut :

1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan jumlah OPD dan Desa dengan pengelolaan system administrasi kearsipan tertata baik. Pagu anggaran Rp37.520.000,- terealisasi Rp37.519.000,- atau 99,99%. Indikator kinerja program ini adalah jumlah OPD dan desa dengan pengelolaan system administrasi kearsipan tertata baik. Target tahun 2020 adalah 34 terealisasi 35 atau 102,9%. Program Perbaikan Sistem Informasi Kearsipan dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Kegiatan Pengklasifikasian Data

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan penilaian dan penyusutan arsip.

Pagu anggaran kegiatan ini Rp 23.000.000,- terealisasi sebesar Rp 23.000.000 atau tercapai 100%. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah :

Melaksanakan penilaian dan penyusutan arsip dengan maksud untuk mengetahui arsip yang permanen, arsip sementara dan arsip yang akan dimusnahkan. Pada tahun 2020 arsip yang diusulkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk dimusnahkan adalah sebanyak 10.835 nomor berkas.

b) Kegiatan Pengawasan Kearsipan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan arsip di OPD. Pagu anggaran Rp14.520.000,- terealisasi Rp14.519.000,- atau tercapai 99,99%. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah :

Telah dilaksanakan pengawasan dan penilaian arsip pada 54 OPD di Kabupaten Bantul. Unsur penilaian meliputi tata naskah, pengelolaan kearsipan, SDM, dan sarpras yang ada di masing-masing OPD. Dari hasil pengawasan ini diperoleh :

Tabel 3. 82 Data Hasil Pengawasan Kearsipan

NO	KATEGORI NILAI	JUMLAH OPD
1	Memuaskan	2
2	Sangat Baik	3
3	Baik	30
4	Cukup	4
5	Kurang	15

Sumber : Perpustakaan dan Kearsipan

2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Maksud dan tujuan program ini adalah penambah arsip statis yang diakuisisi. Pagu anggaran Rp219.188.300,- terealisasi sebesar Rp218.948.300,- atau tercapai 99,89%. Indikator kinerja dari program ini adalah cakupan arsip statis yang diakuisisi. Pada tahun 2020 menargetkan 24% terealisasi 24% atau tercapai 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

a) Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip. Pagu anggaran Rp17.450.000,- terealisasi sebesar Rp 17.400.000,- atau tercapai 99,71%. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah rak arsip 3 unit dan alat pengatur suhu Depo Arsip 4 unit.

b) Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terdatanya dan tertatanya dokumen arsip . Pagu anggaran Rp122.721.800,- terealisasi sebesar Rp122.706.800,- atau tercapai 99,99%. Adapaun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah :
Dilaksanakan pendataan dan penataan dokumen arsip in aktif sejumlah 3.500 berkas.

c) Kegiatan Akuisisi dan Pengelolaan Arsip

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah khasanah arsip. Pagu anggaran Rp79.016.500,- terealisasi sebesar Rp78.841.500,- atau tercapai 99,78%. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- (1) Akuisisi tokoh “seniman dagelan Ki Ngabdul”
- (2) Melakukan restorasi arsip Desa Canden dengan hasil restorasi leter C sebanyak 50 berkas (400 lembar).

3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Maksud dan tujuan program ini adalah memberikan pelayanan informasi kearsipan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pagu anggaran Rp33.105.000 terealisasi sebesar Rp33.105.000,- atau tercapai sebesar 100%. Indikator kinerja program ini adalah nilai IKM. Pada tahun 2020 mentargetkan 83 terealisasi 90,03 atau 108,5%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

a) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kearsipan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mempromosikan akan pentingnya arsip kepada masyarakat. Pagu anggaran kegiatan ini Rp33.105.000,- terealisasi Rp33.105.000,- atau tercapai 100%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pameran kearsipan dengan tema “Pabrik Gula di Bantul Riwayatmu Dulu”.

c. Keberhasilan Urusan Perpustakaan

Keberhasilan urusan kearsipan pada Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan adalah bertambahnya jumlah OPD yang telah melaksanakan pengelolaan arsip secara baik.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Arsip adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 83 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Kearsipan

No.	Permasalahan	Solusi
1	Belum semua OPD memiliki SDM Kearsipan/ Arsiparis	<ul style="list-style-type: none"> - Rekrutment PHL dan mengusulkan formasi Arsiparis - Bimtek Kearsipan
2	Sarpras untuk pengolahan arsip di OPD masih terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan Sarpras pengelolaan arsip secara bertahap oleh OPD
3	Pengelolaan Arsip di masing-masing OPD belum sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi UU, Perda dan Perbup Kearsipan secara konsisten dan berkesinambungan. - Dilakukan Pendampingan kearsipan, pengawasan kearsipan serta monev penyelenggaraan kearsipan di OPD.

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

19. Kelautan dan Perikanan

Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh dalam meningkatkan produksi kelautan dan perikanan melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan demi mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bantul, sejalan dengan adanya perubahan paradigma yang telah digaungkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu menjadikan pantai selatan sebagai beranda depan DIY dengan paradigma *Among Tani Dagang Layar*.

a. Program yang Dilaksanakan

Program yang dilaksanakan dalam urusan Kelautan dan Perikanan selama tahun 2020 adalah Program Peningkatan Produksi Perikanan. Adapun kegiatan yang terlaksana adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perikanan Tangkap
- 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perikanan Budidaya
- 3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan

b. Realisasi Pelaksanaan Program

1) Program Peningkatan Produksi Perikanan

Maksud dan tujuan dari Program Peningkatan Produksi Perikanan adalah untuk meningkatkan produksi perikanan baik yang berasal dari usaha perikanan budidaya maupun dari usaha perikanan tangkap. Pada tahun 2020, program ini telah dilaksanakan dengan dukungan SDM, teknologi, dan anggaran dari pemerintah sebesar Rp. 1.220.699.000,00. Outcome dari program ini adalah cakupan produksi perikanan. Pada tahun 2020, Produksi perikanan sebesar 13.453,92 ton dari target sebesar 13.383 ton. Capaian ini diperoleh dari capaian produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap.

Produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,515 % atau 188.450 kg dari 12.440.597 kg pada tahun 2019 menjadi 12.629.050 kg pada tahun 2020. Kenaikan produksi ini relatif sedikit hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 terutama di pertengahan tahun antara Maret- Agustus sempat menyebabkan pemenuhan kebutuhan pakan dan benih di pembudidaya serta serapan pasar akan ikan menurun. Namun setelah itu kondisi mulai berangsur membaik dan tidak menimbulkan masalah di pembudidaya ikan. Selain itu didukung oleh adanya penerapan teknologi baru di masyarakat kabupaten Bantul yaitu budidaya lele kolam bulat secara intensif. Teknologi ini menerapkan kolam bulat dengan inlet outlet dan aerasi serta manajemen air secara intensif sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik. Produksi perikanan tangkap Tahun 2019-2020 disajikan pada Tabel 3.84

Tabel 3. 84 Produksi Perikanan Tangkap

No.	Uraian	Produksi (ton)	
		2019	2020**
1	Produksi tangkap laut	450,90	470,14
2	Produksi tangkap perairan umum	351,95	354,73
Jumlah		802,85	824,87

Sumber : Dinas PPKP tahun 2020 , (** Data sementara)

Pada tahun 2020 terjadi kenaikan produksi perikanan tangkap dibanding periode tahun sebelumnya yaitu sebesar 22,02 ton atau 2,67 %. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan produksi dari ikan ekonomis tinggi seperti ikan bawal dan ikan layur. Selain itu, program restocking ikan di perairan umum juga meningkatkan populasi ikan sehingga pada akhirnya meningkatkan produksi ikan tangkap perairan umum. Program Peningkatan Produksi Perikanan dilaksanakan melalui kegiatan yaitu:

a) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perikanan Budidaya

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya melalui peningkatan kapasitas SDM pembudidaya, pengawasan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya serta pembinaan kelembagaan kelompok pembudidaya. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.033.354.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 853.019.444,- atau 82.55%. Keluaran dari kegiatan ini adalah :

(1) Ekspose Pengawasan dan Pemantauan Kesehatan Ikan

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ikan dilaksanakan Ekspose Hasil Pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku utama perikanan budidaya akan pentingnya manajemen perikanan budidaya dan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan secara dini; serta untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan pelaku utama perikanan budidaya tentang penggunaan obat-obatan perikanan baik herbal maupun kimia.

(2) Pelatihan Pakan Alami dan Budidaya Ikan Lokal

Peningkatan kualitas SDM pembudidaya dilakukan dengan menyelenggarakan Pelatihan Perikanan Budidaya, Pelatihan Pakan Alami dan Pelatihan Budidaya Ikan Lokal Gabus. Selain itu juga diberikan fasilitasi pengajuan permohonan sertifikat CBIB-CPIB oleh pelaku utama perikanan budidaya baik pelaku pembesaran ikan maupun pembenihan ikan.

(3) Pengawasan dan Pemantauan Penyakit, Pakan, dan Obat Ikan

Pada tahun 2020, kegiatan monitoring hanya terdiri dari monitoring gabungan dengan BBTPB Cangkringan Dislautkan DIY dan monitoring incidental. Montirong rutin yang biasanya dilaksanakan pada 5 lokasi (Pokdakan Mina Lestari Banguntapan, Pokdakan Mina Agung pandaka, Pokdakan Buana Mina Pandak, UPR Tunas Muda Peduli Sewon, dan Pokdakan Mina Mulya Kretek) untuk tahun 2020 ini tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pemangkasan anggaran untuk COVID. Pengawasan penyakit dan kesehatan ikan gabungan pada tahun 2020 ini dilakukan di 12 lokasi, yaitu dengan melakukan pengecekan kualitas air dan mengambil sampel ikan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui ada tidaknya infeksi penyakit.

(4) Uji Kualitas Air dan Penyakit Ikan

Pengawasan dan pemantauan penyakit dan kesehatan ikan yang bersifat incidental dilakukan dengan mendatangi pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Bantul. Laporan indikasi penyakit dari Pokdakan yang telah masuk akan ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi pembudidaya ikan yang mengalami kasus penyakit. Tim akan mengecek kondisi air dan juga kondisi ikan yang sakit.

Hasil dari pelaksanaan pemantauan selama satu tahun kemudian diekspos ke pembudidaya. Grafik prevalensi penyakit ditampilkan agar pembudidaya dapat melakukan usaha pencegahan penyakit pada masa- masa krusial. Pada tahun 2020, kejadian penyakit meningkat pada bulan Juni, untuk itu diharapkan pada tahun 2020 usaha pencegahan telah

digalakkan sehingga kejadian penyakit menurun. Selain itu, pemetaan penyakit dilakukan untuk mengetahui tingkat penyebaran penyakit di masing-masing kecamatan.

(5) Pembangunan Kolam BBI

Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya dilakukan dengan dukungan pembangunan kolam ikan di Balai benih Ikan Gesikan yang berlokasi di Gesikan, Wijirejo, Pandak. Dimana telah terbangunnya kolam ikan di BBI Gesikan sebanyak 3 unit kolam permanen untuk kegiatan pembenihan ikan. Pembangunan tersebut Didanai dari anggaran Dana Alokasi Khusus tahun 2020.

(6) Pelatihan Budidaya Ikan

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan pelaku utama perikanan budidaya tentang budidaya ikan lele. Pelatihan dilaksanakan sebanyak 15 angkatan dengan total peserta 20 orang per angkatan. Berikut adalah daftar Peserta pelatihan selengkapnya.

Tabel 3. 85 Daftar Peserta Pelatihan Budidaya Ikan Lele

No	Kelompok
1	Mina Berkah Jaya (Jaranan, Panggunharjo, Sewon)
2	Ngudi Rejeki (Pelemsewu, Panggunharjo, Sewon)
3	Banyu Bening (Kaliputih, Pendowoharjo, Sewon)
4	Mina Kedung Cangkring (Banyon, Pendowoharjo, Sewon)
5	Mino Lestari (Widoro, Bangunharjo, Sewon)
6	Tirto Raharjo (Tlukan Gonjen, Tamantirto, Kasihan)
7	Bangkit Mulyo (Piyungan, Srimartani, Piyungan)
8	Bangkit Maju (Munggur, Srimartani, Piyungan)
9	Mino Rukun (Plesedan, Srimulyo, Piyungan)
10	Mina Jaya (Demangan, Jambidan, Banguntapan)
11	Tirtosari Mulyo (Pelemlor, Baturetno, Banguntapan)
12	Gumbregah (Sawahan, Sumberagung, Jetis)
13	Girlidog (Gesikan, Wijirejo, Pandak)
14	Sumber Rezeki (Candi, Srihardono, Pundong)
15	Patil Muda (Wuluhadeg, Srigading, Sanden)

b) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan bertujuan untuk 1) meningkatkan produksi perikanan melalui pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi terhadap pelaku utama perikanan baik dari aspek teknis maupun kelembagaan, 2) meningkatkan peran dan partisipasi pelaku utama perikanan dan stakeholder terkait dalam peningkatan produksi perikanan dan pengembangan perikanan yang lestari dan berkelanjutan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 32.385.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.885.000,- atau 95.37%. Keluaran dalam kegiatan ini adalah :

(1) Pelatihan Pasca Panen Perikanan

Kegiatan Pelatihan Pasca Panen Perikanan. Pelatihan Pasca Panen ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pelaku utama pengolah perikanan di Kabupaten Bantul dalam hal teknik

pengolahannya, kreasi-kreasi produk olahan berbahan dasar ikan dan pangsa pasarnya.

Sasaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pasca Panen Tahun 2020 ini adalah pelaku utama pengolah perikanan dan calon pengolah perikanan di Kabupaten Bantul. Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pasca Panen Tahun 2020 ini dilaksanakan dalam 2 angkatan dimana setiap angkatan jumlah pesertanya adalah 20 orang baik pelaku utama pengolah perikanan maupun calon pengolah perikanan, setiap angkatan terdapat 2 kali pertemuan.



Gambar 3. 10 Pelatihan Pasca Panen Perikanan

Peserta Pelatihan Pasca Panen tahun 2020 merupakan pelaku utama pengolahan dan calon pelaku

yang masih pemula sehingga materi yang perlu disampaikan adalah materi teknis yaitu pengolahan ikan dengan tingkat kesulitan pengolahannya yang masih rendah dan. Mengingat waktu pelatihan hanya 2 hari maka porsi praktek lebih diperbanyak dari pada teori. Adapun materi yang disampaikan pada Pelatihan Pasca Panen tersebut adalah sebagai berikut :

- (a) Teori dan praktek Pengolahan Produk Cordon Blue Tuna dan Martabak Tuna
 - (b) Teori dan praktek Pengolahan Produk Bakso dan Nugget Ikan
 - (c) Teori dan praktek Pengolahan Produk Siomay dan Otak-otak Goreng
- (2) Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Pelaku Utama Perikanan

Pembinaan pelaku utama perikanan budidaya harus dilakukan secara sistemik, komprehensif, berwawasan kedepan dan berkelanjutan. Dalam kaitan ini, kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Utama Perikanan Tingkat Kabupaten Bantul mempunyai peran yang strategis dalam pembinaan pelaku utama perikanan budidaya secara keseluruhan karena dapat dijadikan basis dalam pembinaan aspek lainnya. Tujuan dari kegiatan evaluasi pelaku utama perikanan antara lain :

- (a) Memberikan penghargaan kepada para pelaku utama perikanan budidaya dalam kiprahnya pada dunia usaha dibidang perikanan budidaya;

- (b) Memberi motivasi kepada para pelaku utama perikanan budidaya untuk selalu meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas produksi perikanan;
- (c) Menanamkan kebiasaan menjalankan kelengkapan administrasi/ dokumen-dokumen terkait kegiatan yang dijalankan;
- (d) Mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha dibidang perikanan budidaya yang berdaya saing.

Pembinaan dan pendampingan kelompok pelaku utama perikanan dilaksanakan di masing-masing kelompok pelaku utama perikanan pada saat mengadakan pertemuan rutin. Kegiatan pembinaan dan pendampingan dilaksanakan di 17 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul.

c) Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap

Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan tempat pelelangan ikan serta sumber daya manusia di bidang perikanan tangkap dalam hal ini nelayan dan masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Bantul. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 154.960.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 144.960.000,- atau 93.55%. Dengan adanya pandemi, anggaran kegiatan ini difocusing sehingga tinggal satu output yaitu Pengadaan sarana prasarana TPI.

Kegiatan meliputi pemenuhan sarana prasarana yang digunakan di 5 unit TPI di Kabupaten Bantul yaitu TPI Depok, TPI Ngepet, TPI Patihan, TPI Kuwaru dan TPI Ngentak. Wujud prasarana dan sarana perikanan tangkap yaitu seperti

Alat Tulis Kantor (ATK) dan peralatan penunjang operasional kerja Tempat Pelelangan Ikan.

Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kuwaru yang seharusnya dilaksanakan tahun 2020 menjadi ditunda karena adanya efek Covid - 19 dan direncanakan dilaksanakan di tahun 2022. Calon lokasi pembangunan TPI Kuwaru yang baru masih seperti rencana semula yaitu menempati tanah sultan ground.

d) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan

Kegiatan ini sebagai pendukung operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Budidaya Ikan (UPTD BBI). Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah produksi perikanan budidaya yang telah disesuaikan berdasarkan jenis ikan. Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi dan ketugasan UPTD BBI antara lain adalah produksi benih dan ikan konsumsi yang secara nyata memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 390.892.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 387.721.400,- atau 99,19%.

Perkembangan produksi benih, ikan konsumsi dan nilai produksi dapat dilihat pada tabel 3.86

Tabel 3. 86 Produksi Benih, Ikan Konsumsi dan Nilai Produksi di UPTD BBI

No.	Output	Tahun	
		2019	2020
1	Benih ikan (ekor)	4.530.470	4.118.504
	Ikan konsumsi (kg)	897	684
2	Nilai (Rupiah)	Rp.227.372.000,-	226.622.000

Sumber : Dinas PPKP tahun 2020

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016-2020

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bantul adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.87

Tabel 3. 87 Produksi Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (Ton)

No	Produksi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Perikanan Tangkap	516,50	885,35	768,44	802,85	824,87
2	Produksi Perikanan Budidaya	11.363,72	12.027,24	12.291	12.440,60	12.629,05
TOTAL		11.880,22	12.912,59	13.059,44	13.243,45	13.453,92

Sumber: Dinas PPKP Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2020

Produksi perikanan berasal dari produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Secara umum, produksi perikanan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini terutama didukung oleh peningkatan produksi perikanan budidaya. Dengan adanya teknologi baru yang mendukung tebar tinggi yaitu budidaya lele kolam bulat secara intensif. Teknologi MATLAIR (hemat lahan dan air) ini menerapkan kolam bulat dengan inlet outlet dan aerasi serta manajemen air secara intensif sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik yang menghasilkan peningkatan produksi perikanan budidaya secara signifikan.

d. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program dalam urusan kelautan dan perikanan.

Tabel 3. 88 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Permasalahan	Solusi
1	Kurang maksimalnya produksi perikanan tangkap karena pengaruh cuaca	Pengoptimalan produksi perikanan tangkap melalui aktivitas eret di laut maupun muara
		Diversifikasi usaha perikanan tangkap
		Fasilitasi akses permodalan dan pemberian bantuan kepada pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan
2	Meningkatnya alih fungsi lahan perikanan	Pemanfaatan lahan pekarangan untuk dijadikan tempat budidaya
		Pelatihan teknologi budidaya ikan padat tebar hemat lahan dan air (Matlair) dengan produksi tinggi sehingga dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya
3	Masih adanya kejadian penyakit ikan	Pelatihan budidaya ikan CBIB sehingga dapat mencegah penyakit ikan
		Peningkatan pengawasan dan pemantauan penyakit dan kesehatan ikan secara teratur
4	Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pasca panen perikanan	Pengoptimalan produksi perikanan jenis olahan ikan melalui pelatihan pasca panen
5	Serapan pasar sempit menurun saat terjadi pandemi covid-19 pada Semester II	Pemasaran online dan diversifikasi olahan

Sumber: Dinas PPKP, 2020

20. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor strategis di Kabupaten Bantul karena berperan sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat. Kegiatan sektor pariwisata memberikan dampak luas pada peningkatan sektor lainnya. Oleh karena itu, di masa pandemi Covid-19 saat ini diharapkan sektor pariwisata mampu memberikan dampak positif peningkatan kegiatan ekonomi.

Pada tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2020 mencapai 2.348.313 orang melebihi sebesar 648.313 orang dari target 1.700.000 orang atau 38,14% dari target RPJMD yang telah direvisi. Jumlah tersebut meliputi seluruh obyek wisata, yang bertribusi maupun yang tidak bertribusi termasuk di desa wisata, yang dikelola pemerintah maupun masyarakat.

Selanjutnyadari jumlah realisasi kunjungan wisatawan yang bertribusi perolehan PAD sebesar Rp. 16.954.700.250,-

Pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul didukung oleh keanekaragaman pengembangan daerah tujuan wisata yang meliputi alam, budaya/religius, kerajinan rakyatdan minat khusus/buatan, juga didukung oleh pengembangan desa-desa wisata sebagai *alternative tourism* di Kabupaten Bantul, sehingga dapat memberikan pilihan-pilihan destinasi wisata bagi wisatawan.

Tabel 3. 89 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata
Tahun 2016 - 2020

No.	Daya Tarik Wisata	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan	Keterangan
1	Alam	20	20	25	32	55	Unit	
2	Buatan	54	59	59	84	129	Unit	
No.	Usaha Pariwisata						Satuan	
1	Hotel bintang	1	1	3	3	3	Unit	Sudah mempunyai ijin
2	Hotel non-bintang	94	117	56	56	56	Unit	Sudah mempunyai ijin
3	Restoran/rumah makan	199	225	142	142	142	Unit	
4	Jasa perjalanan wisata	25	67	33	33	33	Unit	Sudah mempunyai ijin

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2020

Pengembangan daerah tujuan wisata dan usaha pariwisata menunjukkan peningkatan yang cukup baik dan terdapat penambahan yang cukup banyak. Oleh karena itu diperlukan upaya yang komprehensif melalui penggalian sumberdaya wisata baru, peningkatan kerjasama pengembangan pariwisata, optimalisasi peran SDM dan kelembagaan kepariwisataan serta peningkatan promosi investasi dan kemitraan. Hal tersebut ditujukan untuk membangun kepariwisataan Kabupaten Bantul yang berkelanjutan di masa mendatang.

a. Program yang Dilaksanakan

Program yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- a) Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
- b) Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- a) Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
- b) Kegiatan Peningkatan Daya Tarik Wisata
- c) Kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata
- d) Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya

3) Program Pengembangan Kemitraan

- a) Kegiatan Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata
- b) Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata
- c) Kegiatan Pemberdayaan Desa Wisata

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pariwisata pada Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Maksud pelaksanaan program ini adalah untuk mempromosikan destinasi wisata melalui pameran yang diselenggarakan di dalam DIY maupun luar DIY, membentuk jaringan kerjasama baik antara akademisi maupun dengan berbagai pihak.

Tujuan untuk peningkatan jumlah kunjungan wisatawan

Anggaran : Rp 803.807.000,-



Realisasi : Rp 800.951.500,-

Prosentase : 99,65%

Pelaksanaan progam dilakukan melalui kegiatan :

a) Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata.

Maksud adalah mempromosikan destinasi wisata melalui bentuk kerjasama dengan berbagai pihak. Tujuan untuk peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 181.250.000,- dengan realisasi Rp. 181.250.000,- atau 100%. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk promosi melalui *famtrip*, *java promo*, *temu pelaku wisata*, *travel patern*, dan Badan Promosi Pariwisata melalui kegiatan tersebut diharapkan informasi tentang obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Bantul dapat dikenal secara lebih luas.

b) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri.

Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini untuk mempromosikan destinasi wisata melalui pameran-pameran yang diselenggarakan baik di DIY maupun di luar DIY.

Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk, penerbitan bahan promosi (cetak buku destinasi wisata, kalender wisata, *booklet*, masker), promosi melalui media, cetak *leaflet*. Anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 622.557.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 619.701.500,-. Melalui kegiatan tersebut diharapkan informasi tentang obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Bantul dapat dikenal secara lebih luas.

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Maksud dan tujuan program pengembangan destinasi pariwisata ini untuk peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui kegiatan penyusunan perencanaan destinasi, pembangunan sarana dan prasarana destinasi, peningkatan daya tarik wisata dan peningkatan pelayanan terhadap usaha jasa pariwisata.

Anggaran : Rp. 5.279.782.800,-

Realisasi : Rp. 5.095.305.908,-

Prosentase : 96,51%

Hasil program ini adalah sebagai berikut:

a) Pengembangan daerah tujuan wisata

Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini agar dalam pengembangan destinasi wisata sudah mempunyai perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga dalam pembangunan destinasi wisata sesuai dengan konsep.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk perencanaan, Feasibility Study dan Detail Engineering Design (DED) dan juga melaksanakan pembangunan-pembangunan di destinasi wisata. Total realisasi kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.586.140.208,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 3.616.920.000,-. Melalui kegiatan ini, daya tarik wisata di lokasi tersebut diharapkan dapat lebih menarik dan optimal.

b) Peningkatan Daya Tarik Wisata

Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sesuai dengan indikator kinerja perangkat daerah.

Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pentas pertunjukan pentas secara virtual seperti malam

tahun baru diadakan pentas secara virtual, festival desa wisata, festival digital desa wisata. Selain itu dengan adanya pandemi COVID-19, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul membentuk Posko Terpadu di Pantai Parangtritis yang terdiri TNI/POLRI dan OPD terkait seperti Dishub, Sat Pol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Desa Parangtritis, Pokdarwis Parangtritis. Anggaran yang terserap untuk sejumlah kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.033.675.600,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.186.543.600,-. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut selain untuk meningkatkan pelayanan dan daya tarik obyek wisata, memberdayakan kelompok seni budaya yang ada di masyarakat Kabupaten Bantul, juga untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 khususnya di daerah tujuan wisata.

c) Pemantauan, pengawasan, dan pembinaan Usaha Jasa Pariwisata

Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini untuk meningkatkan pelayanan Usaha Jasa Pariwisata, agar wisatawan nyaman.

Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk sosialisasi bagi Usaha Jasa Pariwisata. Anggaran yang terserap untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 3.050.000,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 3.050.000,-. Melalui kegiatan tersebut diharapkan pelaku jasa usaha dapat meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Bantul.

d) Pengembangan atraksi wisata budaya

Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk *Feasibility Study* Destinasi Wisata Kawasan Tanah Mataram Guwosari, pentas seni di

kawasan Pantai Parangtritis, pentas seni di Kawasan Goa Selarong dan pentas seni di Kawasan Goa Cemara, semua itu dilaksanakan secara virtual. Anggaran yang terserap untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 472.440.100,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 473.269.200,-. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

3) Program Pengembangan Kemitraan

Mengembangkan dan menggalakan kerja sama kemitraan dalam sektor pariwisata merupakan salah satu cara untuk saling memperkuat dan meningkatkan daya saing. Prinsip dasar kemitraan mengusung kesetaraan, transparansi, formal dan legal, saling memperkuat, saling memahami, saling menguntungkan, alih pengetahuan dan pengalaman, pertukaran informasi, serta kelembagaan.

Anggaran : Rp. 744.760.000,-

Realisasi : Rp. 742.552.500,-

Prosentase : 99,70%

Kegiatan dari program pengembangan kemitraan ini di antaranya adalah:

a) Pengembangan SDM, kelembagaan dan pengendalian pariwisata.

Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini untuk meningkatkan ketrampilan, sikap, dan pengetahuan SDM desa wisata dalam mengelola desa wisata maupun homestaynya sehingga jumlah lama tinggal wisatawan akan meningkat.

Kegiatan pengembangan SDM, kelembagaan dan pengendalian pariwisata berupa penyelenggaraan pelatihan bagi Pokdarwis dan Desa Wisata serta

homestay. Anggaran yang terserap untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 435.827.500,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 437.135.000,-. Melalui kegiatan tersebut kemampuan para pelaku usaha jasa wisata dan pengurus desa wisata di Kabupaten Bantul dapat lebih ditingkatkan.

b) Pengembangan kelembagaan pariwisata

Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini untuk meningkatkan kelembagaan desa wisata maupun pokdarwis dalam meningkatkan kunjungan wisatawan maupun lama tinggal wisatawan.

Kegiatan pengembangan kelembagaan pariwisata berupa penyelenggaraan sarasehan, forum komunikasi Pokdarwis dan saka pariwisata serta penguatan kelembagaan desa wisata. Anggaran yang terealisasi untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 227.800.000,- dari rencana anggaran sebesar Rp 228.700.000,-. Melalui kegiatan tersebut maka kerjasama antar desa wisata di Kabupaten Bantul dan dengan pelaku wisata yang lain dapat lebih dipererat.

c) Pemberdayaan desa wisata

Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini untuk meningkatkan pelayanan desa wisata maupun homestay agar lama tinggal wisatawan meningkat yang merupakan indikator kinerja dari Dinas Pariwisata.

Kegiatan pemberdayaan desa wisata berupa lomba desa wisata se Kabupaten Bantul. Anggaran yang terserap untuk kegiatan ini adalah sebesar R. 78.925.000,- dari rencana anggaran sebesar Rp.

78.925.000,-. Melalui kegiatan tersebut kemampuan para pengurus desa wisata di Kabupaten Bantul dapat lebih ditingkatkan.

Tabel 3. 90 Desa Wisata Tahun 2020

NO.	Nama	Alamat	PotensiWisata	Kategori
1	DesaWisataWukirsari	Wukirsari, Imogiri	Batik pewarnaalami	Maju
2	DesaWisataKakilangit	Mangunan, Dlingo	Alam, Kerajinan, Kuliner	Maju
3	DesaWisataKampungasantan	Guwosari, Pajangan	Kerajinantempurung, Kulineringkung	Maju
4	DesaWisataKrebet	Sendangsari, Pajangan	Kerajinan batik kayu	Maju
5	DesaWisataTembi	Timbulharo, Sewon	Kerajinan, Outbond	Maju
6	DesaWisataKarangtengah	Karangtengah, Imogiri	Alam, Kerajinan	Maju
7	DesaWisata TTSA	Mangunan, Dlingo	Alam, Budaya, Kerajinan	Maju
8	DesaWisataKebonagung	Kebonagung, Imogiri	Wisatapendidikanpe rtanian	Maju
9	DesaWisataManding	Sabdodadi, Bantul	Sentra kerajinankulit	Maju
10	DesaWisataCandran	Kebonagung, Imogiri	Museum Tani, Kesenian	Maju
11	DesaWisataLopati	Trimurti, Srandakan	Kuliner, Kerajinan	Berkembang
12	DesaWisataKarangasem	Munthuk, Dlingo	Alam, Kerajinan	Berkembang
13	DesaWisataJipangan	Bangunjiwo, Kasihan	Budaya, Kerajinan	Berkembang
14	DesaWisataKiringan	Canden, Jetis	Sentra JamuTradisional	Berkembang
15	DesaWisataPuton	Trimulyo, Jetis	Alam	Berkembang
16	DesaWisataKalakijo	Guwosari, Pajangan	Budaya, Kulineringkung	Embrio
17	DesaWisata Mangrove	Tirtohargo, Kretek	Alam, Konservasi Mangrove	Embrio
18	DesaWisata Laguna Depok	Parangtritis, Kretek	Outbond, Kuliner	Embrio
19	DesaWisataNgringinan	Palbapang, Bantul	Museum, Kuliner	Embrio
20	DesaWisataMangir	Sendangsari, Pajangan	WisataSejarahMataram, Kuliner	Embrio
21	DesaWisataTrimulyo	Trimulyo, Jetis	CagarBudaya, Batik	Embrio

22	DesaWisataJagalan	Jagalan, Banguntapan	CagarBudaya, Kuliner	Embrio
23	DesaWisataKampungSurocol o	Seloharjo, Pundong	CagarBudaya, Budaya	Embrio
24	DesaWisataKreganKampung Gurami	Tirtomulyo, Kretek	Pertanian, Perikanan	Embrio
25	DesaWisataJuron	Pendowoharjo, Sewon	Kerajinan	Embrio
26	DesaWisataNgembelMbeji	Sendangsari, Pajangan	Alam, Budaya	Embrio
27	DesaWisataGunungCilik	Munthuk, Dlingo	Alam, Kerajinan, Budaya	Embrio
28	DesaWisataBendo	Wukirsari, Imogiri	Alam, KerajinanGentengTradis ional	Embrio
29	DesaWisataKajigelem	Bangunjiwo, Kasihan	Budaya, Gerabah	Embrio
30	DesaWisataSonggoLangit	Mangunan, Dlingo	Alam, Budaya, Kerajinan	Embrio
31	DesaWisata Goa Gajah (Lemahbang)	Mangunan, Dlingo	Alam, Goa Gajah	Embrio
32	DesaWisataGuwosari	Guwosari, Pajangan	CagarBudaya, Kerajinan	Embrio
33	DesaWisataGilangharjo	Gilangharjo, Pandak	Alam, Budaya	Embrio
34	DesaWisata Goa Cemara	Gadingsari, Sanden	Alam, Outbond, KonservasiPenyu	Embrio
35	DesaWisataPucungrejo	Wukirsari, Imogiri	Kerajinankulit	Embrio
36	DesaWisatalmogiri	Imogiri	Budaya	Embrio
37	DesaWisataSrikemenut (wunut)	Sriharjo, Imogiri	Alam, Budaya	Embrio
38	DesaWisataPanjangrejo	Panjangrejo, Pundong	Alam, Gerabah	Embrio
39	DesaWisataPandansari	Gadingsari, Sanden	Alam, Perkebunan Buah Naga	Embrio
40	Banyu Nibo Rejosari	Terong, Dlingo	Pertanian, Alam	Embrio
41	Dewa Batu	Trimulyo, Jetis	Alam, Budaya	Embrio
42	Kalibuntung	Srihardono, Pundong	Out Bond Pendidikan	Embrio
43	Mulyodadi	Mulyodadi, Bambanglipuro	Kiliner, Seni Budaya	Embrio

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2020

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016-2020

Tabel 3. 91 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016-2020 dalam Urusan Pariwisata

Uraian	TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020
Anggaran	13.998.106.370	21.409.658.270	16.346.321.200	20.264.105.700	9.955.644.450
Realisasi	13.762.155.384	20.163.693.718	13.886.969.517	19.327.011.298	9.630.334.041
Prosentase	98,31	94,18	84,96	95,36	96,73

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2020

Keberhasilan yang dicapai dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun sampai dengan pada tahun ke empat. Sedangkan pada tahun ke lima target kunjungan wisatawan diturunkan dikarenakan adanya pandemi covid-19, namun realisasinya bisa melebihi target.

d. Pemasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan pariwisata dan solusi penyelesaiannya disajikan pada Tabel 3.92.

Tabel 3. 92 Permasalahan dan solusi dalam urusan pariwisata

No.	Permasalahan	Solusi
1	Belum lengkapnya produk perencanaan pengembangan kepariwisataan daerah seperti RDKP, RTOW	Penyusunan RDKP untuk 17 kecamatan dan RTOW untuk setiap obyek wisata sebagai penjabaran RIPPARDA Kabupaten Bantul dalam rangka pembangunan kepariwisataan secara terpadu dan terintegrasi
2	Belum meratanya perwujudan Sapta Pesona di setiap obyek wisata dan pokdarwis di Kabupaten Bantul seperti penyediaan sarana prasarana kebersihan dan pembinaan kelembagaan pengelolaan obyek wisata.	Peningkatan sarana dan prasarana wisata dan penguatan kapasitas SDM serta lembaga pengelolaan obyek wisata
3	Belum optimal sarana dan prasarana obyek wisata seperti penambahan fasilitas untuk wisata edukasi di obyek wisata	Penguasaan lahan perlu dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang membidangnya, sehingga pembangunan destinasi wisata lebih optimal

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2020

21. Pertanian

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, pembangunan sektor pertanian mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Sejalan dengan kebijakan pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan pertanian melalui beberapa program.

a. Program yang Dilaksanakan

Program yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
- 2) Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
- 3) Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- 4) Peningkatan produksi hasil peternakan;
- 5) Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana pertanian.

b. Realisasi Pelaksanaan Program**1) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan**

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan produksi pertanian/perkebunan yang optimal, dengan produktivitas yang tinggi sehingga pendapatan yang diperoleh petani semakin tinggi. Dengan menyediakan berbagai prasarana dan sarana pertanian serta pelatihan dan pendampingan/ pembinaan pada kelompok petani, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 3.445.629.600,00. Walaupun begitu dengan adanya pandemi Covid-19 telah mengalami refocusing sehingga menjadi sebesar Rp. 1.259.652.590,00.

Tabel 3. 93 Hasil keluaran yang dihasilkan dari program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

No	Indikator	Target Kinerja	Realisasi
1	Angka Produktivitas jagung (pipil kering)	59,58 Ton	34.583 Ton
2	Angka Produktivitas kedelai (wose)	15,91 Kuintal/Hektar	17,63 Kuintal/Hektar
3	Angka Produktivitas bawang merah	10,89 Ton/Hektar	11,03 Ton/Hektar
4	Angka Produktivitas pisang	7,3 ku/pohon	
5	Angka Produktivitas cabe merah	2,98 Ton/Ha	2,97 Ton/Ha
6	Angka Produktivitas Tembakau (rajang kering)	7,5 ku/ha (rajang)	7,7 ku/ha (rajang)
7	Angka Produktivitas Tebu (hablur gula)	39,7 ku/ha (hablur)	40,04 ku/ha (hablur)
8	Angka Produktivitas Kelapa (kopra)	12,55 ku/ha (kopra)	14,9 ku/ha (kopra)
9	Cakupan luas tanam kakao	190 Ha	
10	Produktivitas Padi (GKG)	65,67 Ton	63,29 Ton

a) Produksi Tanaman Pangan

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan produksi padi sebesar 1,21 % atau naik sebesar 2.275 ton dibandingkan tahun 2019. Dari produksi padi sebesar 188.089 ton GKG pada tahun 2019 menjadi 190.364 ton GKG pada tahun 2020. Peningkatan produksi padi tahun 2020 ini disebabkan kondisi iklim yang kondusif (curah hujan normal), distribusi pupuk subsidi lancar dan bantuan benih yang tepat waktu dengan mutu baik. Selain itu, organisme pengganggu tanaman (OPT) terkendali dengan adanya Gerakan-gerakan Pengendalian (Gerdal) diberbagai kelompok seluruh Kabupaten Bantul. Peningkatan produksi padi tersebut juga karena dukungan pemerintah berupa bantuan 50.000 kg benih untuk 206 kelompok tani di Kabupaten Bantul dengan luasan lahan 2000 ha.

Produksi jagung pada tahun 2020 adalah 34.583 ton sedangkan tahun 2019 adalah 34.903 ton sehingga bisa dikatakan produksi jagung mengalami penurunan yaitu sebesar 0,9 % atau turun sebesar 320 ton dibandingkan tahun 2019.

Penurunan produksi jagung terjadi akibat musim tanam jagung yang mundur satu bulan, menyebabkan terjadinya serangan penggerek batang (*Spodotera litura/exigua*) pada fase vegetatif. Ditambah lagi dengan mundurnya pemupukan karena mulai bulan September diterapkan Kartu Tani sehingga petani kesulitan mengakses kebutuhan pupuk. Di sisi lain, produktivitas jagung meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 30,06 ku/ha pada tahun 2020. Peningkatan produktivitas tersebut disebabkan oleh penggunaan kualitas unggul benih hibrida bantuan pemerintah dan budidaya yang lebih intensif. Bantuan berupa benih jagung dari pemerintah ini sebesar 15.000 kg diperuntukan kepada 134 kelompok petani di Kabupaten Bantul dengan luasan lahan 1000 ha.

Selain tanaman padi dan jagung, komoditas yang termasuk tanaman pangan unggulan Kabupaten Bantul adalah kedelai. Produksi kedelai, pada tahun 2020 ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Penurunan produksi kedelai mencapai 24,84% atau 359 ton. Produksi kedelai menurun karena penurunan luas panen yang disebabkan oleh penurunan luas tanam. Luas tanam yang turun disebabkan oleh minat petani yang rendah untuk budidaya kedelai, hal tersebut dikarenakan harga jual panen yang rendah hasil produksi kurang diminati pengrajin tahu dan tempe, penanganan panen dan pasca panen yang relatif sulit. Disisi lain, produktivitas kedelai mengalami peningkatan sebesar 1,73 % pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Peningkatan produktivitas ini juga berupa dukungan pemerintah berupa bantuan benih dan pupuk. Bantuan pupuk yang diberikan berupa pupuk hayati sebesar 2.100 liter, rhizobium sebesar 175.000 gram, serta herbisida sebesar 2.100 liter yang diberikan kepada 113 kelompok tani.

b) Produksi Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayuran dan buah-buahan. Tanaman sayuran yang banyak ditanam di Kabupaten Bantul antara lain bawang merah, cabai merah, dan pisang. Produksi Bawang merah mengalami peningkatan sebesar 0,64 % atau 60,6 ton. Kenaikan produksi ini menghasilkan peningkatan produktivitas sebesar 0,47 %. Peningkatan produksi ini karena penerapan sistem tata tanam tepat, musim yang kondusif, OPT terkendali, minat budidaya bawang merah petani tinggi karena harga jual tinggi. Hal ini juga didukung oleh kondisi pandemi covid-19 yang menyebabkan adanya penghentian impor). Sementara itu, produksi Cabai Merah mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 1.166,41 ton pada tahun 2019 menjadi 1.667,70 ton pada tahun 2020. Peningkatan produksi ini karena adanya bantuan benih sebanyak 35.000 *sachet* dari Kementan RI. Sistem tata tanam yang tepat serta pengendalian OPT yang terkendali juga berpengaruh terhadap peningkatan produksi cabai merah. Harga jual cabai merah yang tinggi membuat minat petani untuk menanam cabai merah meningkat hal tersebut ditunjukkan dengan luas panen yang lebih besar dibandingkan tahun 2019, meningkat sebesar 263,5 ha pada tahun 2020.

Data perkembangan produksi tanaman hortikultura selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.94

Tabel 3. 94 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Bawang Merah, Cabai Merah, dan Pisang Tahun 2019-2020

No.	Komoditas	Uraian	Tahun		Ket
			2019	2020**	
1	Bawang	Luas Panen	893	860	Ha
		Produksi	9.427	9.487,6	Ton
		Produktivitas	10,56	11,03	ton/ha
2	Cabai Merah	Luas Panen	298	561,5	Ha
		Produksi	1.166,41	1.667,7	Ton
		Produktivitas	3,91	2,97	Ton/ha
3	Pisang	Produksi	5.211,40	5.109	Ton

Sumber: Diperpautkan, 2020 (**Angka Sementara)

Pada tahun 2020, produksi pisang mengalami penurunan produksi sebesar 1,96 % dari produksi sebesar 5.211,40 ton pada tahun 2019 menjadi 5.109 ton pada tahun 2020. Penurunan pisang ini dipengaruhi oleh cuaca iklim yang kurang mendukung produksi dimana pada tahun 2020 bulan basah lebih panjang dari bulan kering sehingga mengganggu pertumbuhan pohon pisang. Bulan basah yang panjang mengakibatkan pohon pisang kebanyakan air sehingga mengganggu pertumbuhan dan pemasakan buah. Akibatnya produksi pisang juga ikut menurun.

c) Produksi Tanaman Perkebunan

Komoditas perkebunan yang menjadi andalan di Kabupaten Bantul antara lain: tembakau, tebu, dan kelapa. Data perkembangan produksi tanaman perkebunan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.95

Tabel 3. 95 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tembakau, Mete, Tebu, Kakao dan Kelapa Tahun 2019-2020

No.	Komoditas	Uraian	Tahun		Ket.
			2019	2020**	
1	Tembakau Rakyat	Luas Panen	175	174	Ha
		Produksi	1.321,3	1.341,5	ku (rajang kering)
		Produktivitas	7,64	7,7	ku/ha (rajang kering)
2	Tebu	Luas Panen	1.042,67	1.096	Ha
		Produksi	39.971,17	43.881,75	ku (hablur)
		Produktivitas	38,33	40,04	ku/ha (hablur)
3	Kakao	Luas Panen	7,1	18,3	Ha
		Produksi	153,69	162	ku
		Produktivitas	21,65	8,9	Ku/Ha
4	Kelapa	Luas Panen	7.107,81	7120	Ha
		Produksi	104.794,70	105.836,9	ku (kopra)
		Produktivitas	14,74	14,9	ku/ha (kopra)

Sumber: Diperpautkan, 2020(*Angka Sementara)

Pada tahun 2020 produksi tembakau mengalami peningkatan sebesar 2,28 % atau 30,2 ku, dengan penurunan produktivitas sebesar 1,18 ku/ha dibanding tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya luas panen pada tahun 2020 sebanyak 33 Ha. Sementara itu, produksi kelapa juga mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 173 ku. Meningkatnya produksi disebabkan oleh meningkatnya luas panen pada tahun 2020 yaitu sebesar 94,17 ha. Selain itu, jumlah kelapa yang produktif berbuah meningkat pada tahun 2020.

Produksi tebu tahun 2020 meningkat cukup signifikan sebesar 9,78 % atau 3.910,31 ku dibanding tahun 2019. Peningkatan produksi ini didukung oleh adanya program Rawat Ratoon yang lebih intensif. Rawat ratoon adalah pemeliharaan tanaman tebu keprasan secara intensif. Dengan adanya program ini terjadi peningkatan rendemen tebu

sehingga produksi tebu juga meningkat. Selain itu, cuaca cukup kondusif untuk budidaya tebu pada tahun 2020.

Kakao merupakan salah satu tanaman perkebunan baru di Kabupaten Bantul yang mulai dibudidayakan sejak tahun 2016. Produksi Kakao mengalami peningkatan dari 153,69 kwintal menjadi 162 kwintal atau mengalami peningkatan sebesar 5,1 %. Hal ini disebabkan karena bertambahnya luas panen dari 7,1 Ha pada tahun 20219 menjadi 18,3 Ha. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah tanaman kakao yang mulai produktif berbuah.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dilaksanakan melalui 6 kegiatan:

a) Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan memperoleh kesamaan pandangan dalam rangka pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 18.400.000 dengan realisasi sebesar Rp. 18.400.000 atau 100%. Keluaran kegiatan ini ada 1 yaitu: Forum Discussion Group (FGD) Penangkaran Benih Padi. FGD penangkaran benih padi dilaksanakan dengan peserta berjumlah 70 orang dan dilaksanakan untuk updating data penangkar benih, produksi benih dan rencana penangkaran lanjutan di Kabupaten Bantul.

b) Peningkatan produksi pertanian/perkebunan berkelanjutan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah: Meningkatkan Produktivitas di sektor pertanian terutama padi, dan hortikultura. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 35.040.000 dengan realisasi sebesar Rp.

32.035.000 atau sekitar 97%. Keluaran kegiatan ini adalah Pelatihan Pengembangan Kakao, Pelatihan Hortikultura, SL Penerapan Teknologi Tajarwo Padi, Pelatihan Pengembangan Pangan Lokal, Gerakan Tanam dan Panen Lomba kelompok Tani Berprestasi Padi Jagung Kedelai, dan Fasilitasi Kebun – Kebun Dinas. Sehubungan dengan terjadinya wabah pandemi covid19, hampir semua kegiatan direcofusing anggarannya untuk penanganan wabah pandemi covid 19 yang terjadi sehingga tinggal output Fasilitasi Kebun Dinas.

c) Peningkatan kapasitas pengelolaan Balai Benih Pertanian (BBP)

UPTD Balai Benih Pertanian dibentuk berdasar peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Pertanian Kabupaten Bantul. UPTD Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan Balai Benih Pertanian. Hasil kegiatan ini adalah produksi benih padi dan pembelian GKP calon benih padi. Produksi benih padi dari UPTD ini memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan jumlah produksi benih padi yang berkualitas tinggi, serta menjamin ketersediaan benih padi dari beberapa jenis varietas. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 754.611.190 dengan realisasi sebesar Rp. 751.518.791 atau sekitar 99%.

Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Penangkar Benih di UPTD berupa kerjasama dengan para penangkar benih dimana mereka mendapat keuntungan produksi meningkat. Calon benih dibeli UPTD diatas harga umum serta diawasi oleh BP3MBTP DIY sehingga Kelompok Penangkar sudah mendapat keuntungan dibandingkan dengan Petani Konsumsi. Dengan benih yang terjaga mutunya maka petani akan meningkatkan produksi dan produktifitasnya.

Tabel 3. 96 Daftar Kelompok Penangkar Benih Padi

No	Kelompok Penangkar	Alamat	Luas Tanam
1	Kel. Agribisnis Penangkaran Sumber Makmur	KBD, Sumberagung	2.5
2	Kel. Agribisnis Penangkaran Sumber Rejeki	Sumber, Sumberagung	3,5
3	Kel. Agribisnis Penangkaran Ngudyo Makmur	Ponggok, Trimulyo	1,5
4	Kel. Agribisnis Penangkaran Ngudi Makmur	Gulon, Srihardono	2
5	Kel. Agribisnis Penangkaran Rukun Makmur	Ngentak, Sumberagung	4,5
6	Kel. Agribisnis Penangkaran Ngudi Lestari	Pangkah, Tirtosari	0,5
	JUMLAH		14.5

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bantul, 2020

Tahun 2020 bekerjasama dengan 6 Kelompok Penangkar Agribisnis dengan total luasan 22 Ha. Total luasan yang dikelola oleh kelompok penangkar tersebut merupakan total luasan dalam satu kali musim tanam. Kelompok agribisnis penangkar yang bekerjasama dengan UPTD Balai Benih Pertanian melakukan tanam benih padi tiga kali dalam setahun. Produksi benih di UPTD BBP dapat dilihat pada Tabel 3.97

Tabel 3. 97 Produksi Benih Padi Tahun 2020

No.	Varietas	Jumlah Produksi (Ton)		Total (Ton)
		BD	BP	
1	Situ Bagendit	1.725	16.815	18.540
2	Sunggal	-	22.680	22.680
3	Mekongga	1.280	20.380	21.660
4	Ciherang	-	19.160	19.160
5	Pepe	895	8.820	9.715
6	Inpari 19	595	-	595
7	Inpari 24	1.815	-	1.815
8	Inpari 33	-	4.740	4.740
Jumlah		6.310	92.595	98.905

Sumber: Diperpautkan, 2020

Pada tahun 2020, UPTD BBP mampu memproduksi benih padi sebanyak 98,905 ton terdiri dari benih dasar (BD) dan benih pokok (BP), benih yang siap dipasarkan. Target produksi tahun 2020 adalah 80 ton. Sehingga tahun ini produksi tercapai dan melebihi target sebanyak 18,905 ton atau 12,36 %.

d) Pengendalian dan Perlindungan Tanaman

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mengendalikan dan melindungi tanaman dari organisme maupun hal lain yang disebabkan oleh gangguan iklim dan lain hal melalui gerakan pengendalian OPT. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 206.250.000 dengan realisasi sebesar Rp. 202.895.000 atau sekitar 98%.

Gangguan atau ancaman pada tanaman dapat berupa jasad pengganggu atau organisme pengganggu tanaman (OPT), keadaan cuaca/iklim, keadaan tanah, maupun kesalahan dalam budidaya tanaman pertanian. Organisme pengganggu tanaman (OPT) merupakan faktor pembatas produksi tanaman di Indonesia baik tanaman pangan,

hortikultura maupun perkebunan. Organisme pengganggu tanaman secara garis besar dibagi menjadi tiga yaitu : hama, penyakit dan gulma. Kegiatan pengendalian dan perlindungan ini dilaksanakan untuk mengendalikan OPT secara cepat, tepat dan ramah lingkungan agar tidak menurunkan produksi tanaman dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan kapasitas SDM para petani dalam pengenalan dan penerapan teknologi budidaya dan teknologi pengendalian yang terekomendasi dan terkini yang dapat diterapkan untuk melakukan pengamanan produksi.

Gerakan Pengendalian OPT dilaksanakan sebagai upaya preventif dalam pencegahan serangan OPT. Jika sudah terjadi serangan dapat digunakan sebagai upaya untuk pengendalian OPT. Gerakan Pengendalian OPT sebanyak 100 unit melibatkan 3000 orang yang tersebar di 17 kecamatan se Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilakukan secara insidental sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok tani yang membutuhkan gerakan pengendalian. Untuk mendukung Gerakan Pengendalian OPT dilakukan Pengadaan Agensia Hayati meliputi *Beaveria Bassiana*, PGPR, dan Chorin. Selain itu, Regu Pengendali Tanaman (RPT) juga diberikan fasilitasi berupa uang transport setiap 2 bulan sekali.

a) Pengembangan Agribisnis Pertanian

Tujuan kegiatan adalah bahwa untuk meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian dan mendapatkan harga jual yang maksimal sehingga fokus utama kegiatan ini adalah terhadap penanganan pasca panen dan pemasaran dengan melalui pelatihan-pelatihan, pameran,

serta pelaksanaan pasar tani. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 160.875.000 dengan realisasi sebesar Rp. 160.563.465 atau sekitar 99%. Keluaran kegiatan ini meliputi pemeliharaan Kebun Buah Mangunan dan promosi hasil pertanian.

Kebun Buah Mangunan merupakan salah satu tujuan wisata di Bantul yang pembangunan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan dan memberikan kontribusi kepada PAD Kabupaten Bantul. Kebun ini dibangun sejak 2003 dengan melakukan pembukaan lahan, penanaman tanaman buah dan pembuatan bangunan fisik. Fasilitas bagi pengunjung berupa pemandangan alam, fasilitas outbond, perkemahan dan wisata edukasi. Pemeliharaan Kebun Buah Mangunan bertujuan untuk memberi kondisi lingkungan yang menguntungkan sehingga tanaman tetap tumbuh dengan baik dan mampu memberikan hasil yang maksimal.

Dengan adanya pandemi Covid-19, kegiatan Festival Pisang mengalami refocusing dan tidak dilaksanakan untuk menghindari kerumunan massa. Selain itu, Pelatihan Pengolahan Hasil dan Pelatihan Penanganan Pasca Panen pada tahun 2020 tidak jadi dilaksanakan karena adanya Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya pembatasan dalam beraktivitas termasuk kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah besar.

Promosi hasil pertanian dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan peserta pelatihan dalam meningkatkan produk pertanian. Promosi dilakukan melalui kegiatan berupa Pasar Tani yang



diselenggarakan setiap hari Rabu di halaman kantor DPPKP Kabupaten Bantul. Selain itu Asosiasi Pasar Tani sebagai binaan DPPKP Kabupaten Bantul juga mendukung kegiatan Pasar Tani Bantul yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul di Pasar Seni dan Wisata Gabusan.

b) Pengembangan Agribisnis Tembakau

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan kualitas dan pemahaman peserta pelatihan teknologi panen dan pascapanen tembakau. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 84.476.400 dengan realisasi sebesar Rp. 47.400.000 atau sekitar 56%. Keluaran kegiatan ini adalah Pemahaman peserta pelatihan Teknologi Panen dan pasca panen tembakau meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang.

Fokus utama kegiatan ini adalah penanganan panen dan pasca panen tembakau. Kegiatan ini didukung dengan anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun 2020. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pelatihan panen dan pasca panen tembakau dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang. Pelatihan ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 dengan jumlah peserta sesuai anjuran yaitu 20 orang. Pelatihan bertempat di 3 lokasi yaitu di Kelompok Tani Murwat (Jolosutro, Srimulyo, Piyungan) dengan 20 orang peserta pada 19-20 Oktober 2020, Kelompok Tani Rukun Tani (Prayan, Srimulyo, Piyungan) dengan 20 peserta pada 21-22 Oktober 2020, dan Kelompok Tani Ngudi Rejeki (Jasem, Srimulyo, Piyungan) dengan 20 orang peserta pada 10-11 November 2020. Dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan petani dapat meningkatkan

penanganan pasca panen tembakau sehingga meningkatkan pendapatan petani. Selain kegiatan pelatihan sebenarnya juga ada studi lapangan, namun dengan adanya pandemi Covid-19 kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

2) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Dalam upaya memberdayakan petani agar terjadi percepatan pencapaian kesejahteraan maka kegiatan penyuluhan merupakan kegiatan yang sangat strategis guna mentransfer ilmu pengetahuan teknologi untuk merubah sikap perilaku dan ketrampilan. Output program yang dihasilkan adalah Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani sebanyak 36 kelompok. Data peningkatan kelas kelompok tani seperti terlihat pada Tabel 3.98

Tabel 3. 98 Data Peningkatan Kelas Kelompok Tani Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani
1	Srandakan	2
2	Sanden	4
3	Kretek	-
4	Bambanglipuro	-
5	Banguntapan	-
6	Sedayu	-
7	Bantul	-
8	Pleret	-
9	Pandak	3
10	Dlingo	-
11	Kasih	-
12	Jetis	2
13	Piyungan	-
14	Sewon	-
15	Pundong	-
16	Pajangan	1
17	Imogiri	7
Jumlah		

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bantul, 2020 (Diperpautkan)

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/perkebunan dan Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/perkebunan.

a) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/perkebunan

Maksud dan tujuan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/perkebunan adalah terlaksananya peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan melalui Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian. Tersusunnya programa penyuluhan sebagai pedoman penyuluhan pertanian tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten. Sehubungan dengan pandemi Covid 19 pada tahun 2020 ini, kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/perkebunan mengalami refocusing, dan didukung dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 38.975.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 38.975.000,00 atau 100%. Keluaran kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan adalah Penyusunan programa penyuluhan

Maksud dari Program Penyuluhan Pertanian adalah pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis tentang Rencana Kegiatan Penyuluhan Pertanian, yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang akan dicapai, masalah yang dihadapi, dan rencana kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara partisipatif, guna mendukung pencapaian tujuan Program Pembangunan Pertanian.

Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian dilakukan pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat kabupaten diawali dari penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan. Program Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan disusun oleh Penyuluh Pertanian di tingkat Kecamatan, dan Program Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten disusun oleh Penyuluh Pertanian tingkat Kabupaten.

b) Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/perkebunan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas kelompok tani. Dengan adanya pandemi Covid-19, output kegiatan meliputi SL Agribisnis, pembentukan Taruna Tani, Pelatihan Ovop Pisang, Klinik agribisnis keliling dan Lantip trengginas mengalami refocusing. Dengan dukungan anggaran sebesar Rp.108.249.000 dengan realisasi sebesar Rp. 108.219.000 atau sekitar 99%. Keluaran kegiatan ini meliputi :

- (1) Laporan Pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok tani.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini antara lain : Menggali informasi tentang kondisi kemampuan masing-masing kelompok tani sebagai dasar untuk penentuan kelas, dalam rangka pengembangan, penumbuhan dan pembinaan kelembagaan secara berkesinambungan.

- (2) Pemahaman Peserta Pelatihan Perbanyak Tanaman meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang
 Pelatihan Perbanyak Tanaman dengan peserta sebanyak 20 orang; Verifikasi

Kelompok/petani/petugas berprestasi tingkat kabupaten; Lomba Petugas dan Petani Berprestasi; serta Identifikasi dan legalisasi kelompok tingkat kabupaten dan kecamatan.

(3) Lomba Petugas dan Petani Berprestasi

Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk memotivasi kepada petani untuk lebih meningkatkan kinerja dan Produktivitas serta kesejahteraan para petani, sebagaimotivasi dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani untuk terus berbenah baik secara administrasi maupun secara teknis, memberikan Motivasi kepada Penyuluh Pertanian Swadaya untuk lebih meningkatkan Kinerjanya sebagai mitra kerja penyuluh pertanian PNS dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian di pedesaan serta memberikan motivasi kepada Penyuluh pertanian PNS dan THL-TB PP untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya sebaran penyakit ternak. *Input* yang mendukung tercapainya program ini adalah SDM peternakan, sarana dan prasarana peternakan dan anggaran sebesar Rp. 189.720.000,-. *Outcome program* yang dicapai antara lain Cakupan pelayanan kesehatan ternak melalui UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Cakupan pemotongan hewan sesuai kaidah yang benar melalui UPT Rumah Pemotongan Hewan (RPH), Angka kasus penyakit hewan menular strategis

(Rabies, Anthrax, Brucellosis, Hog Cholera). Capaian program di Tahun 2020 yaitu pelayanan kesehatan ternak melalui UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) sebanyak 11.300, Pematangan hewan di RPH dilakukan sebanyak 1.553 ekor dari target sebesar 1.200 ekor, serta Angka kasus penyakit hewan menular strategis sebanyak 0 % kasus.

Program ini dilakukan melalui kegiatan antara lain:

a) Pendukung Kegiatan UPT Poskeswan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan serta menjadikan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan sebagai sarana demi terciptanya kesehatan hewan ternak yang sehat dan terbebas dari penyakit. Keluaran dari kegiatan ini adalah : Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 189.663.000 dengan realisasi sebesar Rp. 183.591.198 atau sebesar 97%. Penggunaan anggaran ini digunakan untuk operasional UPT Puskeswan diantaranya untuk Penanganan kasus penyakit oleh UPT Puskeswan sebanyak 11.300 kasus. Dari penanganan kasus tersebut dapat diketahui bahwa di Kabupaten Bantul terdapat tiga kasus penyakit terbanyak yang secara berurutan disebabkan oleh cacing (helminthosis), avitaminosis, dan scabies. Selain itu, dilakukan Pengadaan obat-obatan medis dan alat perlengkapan pelayanan kesehatan hewan.



Gambar 3. 11 Pemeriksaan Rutin Ke Kandang Peternak oleh Petugas Puskesmas

b) Pendukung kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan (RPH)

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melayani masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 218.363.100 dengan realisasi sebesar Rp. 209.563.100 atau sekitar 97%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Pelayanan pemotongan sapi di RPH. Pada Tahun 2020, Pemotongan hewan ditargetkan sebanyak 2.800 ekor tetapi dengan adanya pandemi COVID 19 diperbaharui menjadi 1.200 ekor dan terealisasi sebanyak 1.553 ekor.

c) Peningkatan Kesehatan Ternak

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peternak dalam upaya pencegahan dan

pengendalian penyakit hewan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 116.300.000 terealisasi sebesar 107.750.000 atau 92%. Keluaran dari kegiatan ini adalah:

(1) Laporan sosialisasi Penyakit Hewan Menular

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar masyarakat lebih memahami dan lebih mewaspadaai tentang jenis dan resiko dari penularan penyakit melalui hewan ternak.

(2) Publikasi Kesehatan Hewan

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai penjamin tersedianya data/informasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang akurat dalam rangka mewujudkan sumberdaya peternakan yang produktif.

(3) Pengadaan vaksin AI ND

Kegiatan ini bertujuan agar ketersediaan vaksin AI ND tetap terjaga. Selain itu, hal ini juga sebagai upaya mencegah penyakit menular. Hal ini karena vaksin dapat memberikan perlindungan dari berbagai penyakit infeksi yang berbahaya.

(4) Pengadaan Disinfektant

Tujuan dari kegiatan pengadaan ini adalah untuk menjamin kegiatan rutin berupa penyemprotan disinfektant terhadap hewan ternak. Sehingga kasus wabah atau hewan yang terjangkit suatu penyakit dapat berkurang.

4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program ini bertujuan agar produksi hasil peternakan berupa daging telur dan susu meningkat setiap tahun nya

melalui kegiatan yang dilaksanakan berupa Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah. Output dari Program ini adalah Angka Produksi Telur sebesar 10.200 ton dengan realisasi sebesar 7.778 ton dan Angka Produksi susu sebesar 470.000 liter dengan realisasi sebesar 82.013 liter. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 536.397.000 terealisasi sebesar Rp. 520.299.750 atau 97%. Keluaran kegiatan ini antara lain :

a) IB Kambing

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan angka kebuntingan pada hewan ternak, sehingga populasi akan terus meningkat yang akan berdampak pada produksi daging dan susu. Pada tahun 2020, dilaksanakan pengadaan IB Kambing sebanyak 3.000 straw. Selanjutnya, dilakukan penyuntikan IB Kambing oleh petugas Medik dan Paramedik Veteriner.

b) Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya Ayam Jowo Super meningkat sebanyak 80 % dari 350 orang

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian dan keterampilan dalam membudidayakan ayam jenis Jowo Super dengan harapan keseimbangan populasi akan tetap terjaga dan dengan harapan dapat menaikkan taraf perekonomian peternak.

5) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran dengan maksud dan tujuan agar pemahaman dan edukasi mengenai keamanan

dan kesehatan dalam bidang peternakan dapat meningkat untuk segala kalangan masyarakat. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.109.940.000 terealisasi sebesar Rp.106.915.000 atau 97%. Output dari Program ini adalah : Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal) sebesar 46%. Untuk itu dilakukan Pengawasan peredaran dan pemeriksaan daging meliputi pemeriksaan daging sapi, daging kambing, dan daging ayam.

Selama Tahun 2020, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan telah memeriksa 76 sampel daging ayam dengan pemeriksaan uji TPC (Total Plate Count) untuk mengetahui jumlah total mikroba pada sampel. Hasil dari TPC teridentifikasi 76 sampel diatas standar SNI 7388:2009 untuk daging ayam segar (batas minimum TPC 1x10⁶ koloni per gram). Kemudian uji Salmonella sp. hasilnya negative untuk semua sampel. Di Kabupaten Bantul terdapat + 10 orang pemelihara sapi perah yang aktif memproduksi telah diambil sampel sejumlah 10 sampel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Baik	: 4 sampel
Cukup	: 6 sampel
Jelek	: 0 sampel

Selain itu, Pengawasan produk pangan asal hewan, yang meliputi pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium terhadap bakso. Pengawasan ini ditujukan untuk mencegah terjadinya pemalsuan bahan yang menyebabkan pangan tersebut kehilangan keutuhannya. Dari 40 sampel yang diambil terdapat 3 sampel bakso yang dinyatakan positif pemalsuan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di BBVet. Selanjutnya, oknum penjual bakso

positif pemalsuan dimohon untuk hadir ke dinas dan diberikan bimbingan serta peringatan.

Keluaran dari kegiatan Peningkatan Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran ini adalah:

a) Laporan Pembekalan Petugas Pemeriksaan Hewan Qurban

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan hewan dan kelayakan hewan qurban saat diperjualbelikan kepada masyarakat ataupun disaat penyembelihan hewan qurban.

b) Laporan Sosialisasi (Peduli ASUH, Pengelolaan RPA) untuk 125 orang

Sosialisasi peduli ASUH, dilaksanakan sebanyak 5 kali dengan total peserta 125 orang dari pelaku usaha pangan asal hewan, peternak, dan ibu rumah tangga yang terlibat langsung dalam penyediaan pangan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih produk pangan asal hewan. (ASUH akronim dari Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).

c) Laporan Sosialisasi Promosi Produk Peternakan

Dalam kegiatan ini disampaikan pengenalan produk peternakan, sosialisasi pentingnya produk peternakan serta promosi produk peternakan. Pemberian bahan percontohan untuk gemar konsumsi produk peternakan berupa pemberian paket produk olahan peternakan. Acara Launching Promosi produk peternakan dilaksanakan di 6 lokasi di Kecamatan Piyungan dan Kecamatan Banguntapan. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 17 November 2020 di Dusun Petir, Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan. Kegiatan promosi dilakukan selama bulan

November – Desember 2020 dengan total 150 paket produk peternakan. Dari kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin gemar mengkonsumsi produk peternakan asli Bantul sehingga tujuan Bantul sehat, cerdas, sejahtera dapat direalisasikan.

6) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana pertanian guna mendukung produksi pertanian. Dalam mencapai tujuan program ini memanfaatkan beberapa input berupa SDM. Output dari Program ini adalah Pengembangan Infrastruktur irigasi sebanyak 22 unit dan Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air seluar 2.000 hektar

Kegiatan yang dilakukan melalui program ini meliputi kegiatan Kegiatan Peningkatan Prasarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 1.232.845.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.220.945.000 atau sekitar 99%, dan Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 268.740.000 dengan realisasi sebesar Rp. 246.752.500 atau sekitar 91%.

a) Kegiatan Peningkatan Prasarana Pertanian

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.232.845.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.220.945.000 atau sekitar 99%. Keluaran kegiatan meliputi :

(1) Laporan Evaluasi LKMA PUAP 1 laporan

Pelaksanaan evaluasi LKMA dilaksanakan di masing-masing BPP Kecamatan. Evaluasi LKMA dilaksanakan untuk memonitoring kinerja LKMA di Kab. Bantul.

- (2) Laporan Pendampingan PSP 1 laporan
 Pendampingan PSP dimaksudkan untuk memberikan pendampingan kepada Kelompok Tani Penerima Kegiatan RJIT dan Embung dari APBN Ditjen PSP TA 2020. Pendampingan dalam bentuk sosialisasi atau rapat koordinasi yang dilaksanakan di DPPKP Kab Bantul. Selain itu juga pertemuan di kelompok tani penerima dalam rangka sosialisasi kegiatan hingga pendampingan pelaporan.
- (3) Pembangunan Irigasi Air tanah dangkal (DAK Cadangan) 6 kelompok

Tabel 3. 99 Daftar Pembangunan Irigasi Air tanah dangkal (DAK Cadangan)

No	Nama Kelompok Tani	Alamat
1.	Ngudi Mulyo	Karang Tengah, Sitimulyo, Piyungan
2.	P3A Cipto JogoTirto	Ciren, Triharjo, Pandak
3.	Pangestu Tani	Ngajaran, Sidomulyo, Bambanglipuro
4.	Murwat	Jolosutro, Srimulyo, Piyungan
5.	Ngudi Bogo	Segoroyoso II, Segoroyoso, Pleret
6.	Akur	Bogem, Caturharjo, Pandak

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bantul, 2020

- (4) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (APBD Perubahan) 10 kelompok
 Kegiatan ini dialokasikan untuk 10 Kelompok Tani di 9 Kecamatan yaitu

Tabel 3. 100 Daftar Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

No.	Nama Kelompok	Alamat
1.	Kelompok Tani Muneng	Muneng, Tirtohargo, Kretek
2.	Kelompok Tani Tani Maju	Semampir, Argorejo, Sedayu
3.	Kelompok Tani Tani Maju I	Pandak, Wijirejo, Pandak
4.	Kelompok Tani Ngudi Rejeki	Paten, Sumberagung, Jetis
5.	Kelompok Tani Sido Luhur	Jogodayoh, Sumbermulyo, Bambanglipuro
6.	Kelompok Tani Ngudi Makmur	Mertosanan Kulon, Potorono, Banguntapan
7.	Kelompok Tani Ngudi Mulyo	Lemahbang, Mangunan, Dlingo
8.	Kelompok Tani Ngudi Makmur	Bangkel, Srimulyo, Piyungan
9.	Kelompok Tani Tri Manunggal	Geblog, Bantul, Bantul
10.	Kelompok Tani Serayu	Serayu, Bantul, Bantul

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bantul, 2020



Gambar 3. 12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Dusun Serayu dan Desa Sumberagung

b) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 268.740.000 dengan realisasi sebesar Rp. 246.752.500 atau sekitar 91%. Keluaran Kegiatan ini meliputi :

(1) Produksi Pabrik pupuk organik

Kegiatan Pengolahan Pupuk Organik yang berkedudukan di Karanganyar Gadingharjo Sanden Bantul yang dikelola oleh UPT Pengolahan Pupuk Organik telah dihapus berdasarkan Keputusan Bupati Bantul No. 19 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang pencabutan beberapa peraturan bupati bantul yang mengatur unit pelaksana teknis (UPT).

Walaupun begitu, pabrik PPO tetap memproduksi pupuk organik sebanyak 100 ton secara mandiri. Hasil produksi tersebut dibantukan kepada wilayah di Kabupaten Bantul yang tingkat kesuburan tanahnya rendah. Untuk Tahun 2020, hasil produksi tersebut juga diperbantukan kepada Kebun Buah Mangunan, Mangunan Dlingo sebanyak 75 ton dan Kebun Buah Nawungan, Selopamioro, Imogiri sebanyak 25 ton.

(2) Penyediaan pestisida bagi kelompok tani

Pengadaan stok perstisida untuk persediaan kebutuhan mendadak bagi petani/kelompok tani yang mengalami serangan hama/penyakit dan produksi pupuk organik. Kegiatan pengadaan pestisida terdiri dari pestisida hayati sebanyak 185 kg dan pestisida kimia sebanyak 70 liter dilaksanakan pada bulan Maret 2020. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Bantul.

(3) Laporan Evaluasi Pemanfaatan Alsintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai hasil kegiatan dari pengembangan dan pengadaan Alsintan yang diberikan kepada kelompok tani.

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016-2020

1) Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020

Tabel 3. 101 Produksi Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Komoditas/Uraian	Tahun					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020*	
Produksi Tanaman Pangan							
1	Padi						
	Produksi (GKG)	183,211.00	190,320.00	188,182	188.089	190.364,2 444	ton
2	Jagung						
	Produksi (pipilan kering)	25,394.06	24,221.97	26,085.84	34.903	34.583	ton
3	Kedelai						
	Produksi (wose kering)	1,261.77	1,324.62	1,883.51	1.445	1.086	ton
Produksi Tanaman Holtikultura							
1	Bawang Merah						
	Produksi	7.859,40	7.910,20	7.979,80	9.427	9.487,6	ton
2	Cabai Merah						
	Produksi	409,25	1.497,60	7.979,80	1.166,40	1.667,70	ton
3	Pisang						
	Produksi	6.095	6.095,90	5.902,90	6.727,80	5.109	ton
Produksi Tanaman Perkebunan							
1	Tembakau Rakyat						
	Produksi (rajang kering)	1.023,50	3.044	2.893,00	1.321,3	1.341,5	ku
2	Tebu						
	Produksi (hablur)	41.021,95	29.186,75	38.430,00	39.971,17	43.881,75	ku
3	Kakao						
	Produksi	N/A	N/A	28,34	65,18	162	ku
4	Kelapa						
	Produksi	91.342,50	112.677	103.931,80	104.794,70	105.836,9	ku

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bantul, 2020 (*Angka sangat sementara)

Produksi Tanaman Pangan secara umum mengalami peningkatan dari Tahun 2016 – 2020. Hal ini didukung oleh kondisi iklim yang kondusif dengan curah hujan normal, distribusi pupuk subsidi lancar dan bantuan benih yang tepat waktu dengan mutu baik. Selain itu, organisme pengganggu tanaman (OPT) terkendali dengan adanya Gerakan-gerakan Pengendalian (Gerdal) diberbagai kelompok seluruh

Kabupaten Bantul. Selain itu, dukungan bantuan benih setiap tahun dari pemerintah juga sangat membantu petani dalam mendapatkan benih berkualitas sehingga produksi tanaman pangan mengalami peningkatan. Walaupun begitu, produksi kedelai, cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2018 - 2020. Hal ini disebabkan menurunnya luas panen yang disebabkan oleh penurunan luas tanam. Luas tanam yang turun disebabkan oleh minat petani yang rendah untuk budidaya kedelai. Turunnya minat disebabkan oleh harga jual panen yang rendah, penanganan panen dan pasca panen yang relatif sulit, serta produksi kedelai lokal yang kurang diminati oleh pengrajin tahu dan tempe.

Produksi Tanaman Hortikultura secara umum mengalami peningkatan dari Tahun 2016 – 2020. Peningkatan ini didukung oleh penerapan sistem tata tanam tepat, musim yang kondusif, serta OPT terkendali. Selain itu, peningkatan produksi Bawang Merah didukung oleh minat petani dalam budidaya bawang merah petani yang cukup tinggi karena harga jual Bawang Merah yang tinggi di pasaran. Sementara itu, peningkatan produksi Cabai Merah didukung oleh bantuan benih setiap tahun dari pemerintah. Selain itu, harga jual yang cukup tinggi juga meningkatkan minat petani sehingga mendukung penambahan luas panen Cabe Merah sehingga meningkatkan produksi. Produksi pisang cenderung dipengaruhi oleh cuaca iklim. Pada cuaca yang kurang mendukung produksi dimana bulan basah lebih panjang dari bulan kering maka pertumbuhan pohon pisang akan terganggu. Bulan basah yang panjang mengakibatkan pohon pisang kebanyakan air sehingga mengganggu pertumbuhan dan pemasakan buah. Akibatnya produksi pisang juga ikut menurun.

Kakao merupakan salah satu tanaman perkebunan baru di Kabupaten Bantul yang mulai dibudidayakan sejak tahun 2016. Produksi Kakao cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena bertambahnya luas panen dan jumlah tanaman kakao yang mulai produktif berbuah yaitu dari 7,1 Ha pada tahun 2018 menjadi 18,3 Ha pada Tahun 2020.

2) Produksi Ternak di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020
Perkembangan populasi ternak di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.102

Tabel 3. 102 Populasi Ternak di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Jenis ternak	2016	2017	2018	2019	2020	Ket.
Ternak Besar							
1	Sapi Potong	56.799	56.139	58.895	62.582	66.098	Ekor
2	Sapi Perah	284	80	72	68	68	Ekor
3	Kerbau	544	248	206	218	217	Ekor
4	Kuda	1.977	1.258	1564	1.631	1.583	Ekor
Ternak Kecil							
1	Kambing	108.199	87.195	94.332	95.467	95.104	Ekor
2	Domba	83.790	74.955	77.197	74.441	74.577	Ekor
3	Babi	5.329	3.544	5.024	5.136	4.512	Ekor
Ternak Unggas							
1	Ayam buras	1.019.461	792.862	829.916	966.371	975.546	Ekor
2	Ayam ras petelur	821.587	712.307	759.199	765.137	765.126	Ekor
3	Ayam ras pedaging	1.068.221	841.103	1.093.222	1.128.489	1.127.715	Ekor
4	Itik	222.265	163.528	184.978	201.805	202.180	Ekor

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bantul, 2020 (Dipertautkan)

Populasi Ternak besar didominasi oleh populasi sapi yang cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2016 - 2020. Peningkatan jumlah populasi sapi didukung keberhasilan program Peningkatan produksi daging ini SIKOMANDAN yang dilaksanakan pada Tahun 2019-2020. Peningkatan populasi ini diharapkan masih akan terus

meningkat mengingat masih berlangsungnya program tersebut. Sementara itu, Populasi ternak kecil di Kabupaten Bantul didominasi oleh ternak kambing. Populasi ternak kecil cenderung mengalami peningkatan terutama didukung oleh adanya program IB Kambing/Domba bersubsidi di Kabupaten Bantul dan adanya bantuan domba 100 ekor.

3) Komoditas Hasil Peternakan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Komoditas hasil peternakan utama yang berasal dari ternak besar, ternak kecil dan unggas tersebut di atas, meliputi daging telur dan susu. Komoditas ini mempunyai nilai gizi tinggi sehingga kebutuhan akan komoditas ini selalu meningkat. Perkembangan Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.103

Tabel 3. 103 Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No.	Komoditas	Tahun					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Daging	14.742.551	14.751.000	14.855.725	15.088.317	15.228.523	Kg
2	Telur	8.072.166	7.184.368	7.329.945	7.789.187	7.782.977	Kg
3	Susu	365.127	184.777	102.484	80.541	82.625	Kg

Dinas Pertanian Kabupaten Bantul, 2020 (Dipertautkan)

Produksi hasil peternakan secara umum mengalami peningkatan dari Tahun 2016 – 2020 terutama pada produksi daging dan telur. Hal ini didukung oleh adanya peningkatan populasi ternak yang dilaksanakan guna mendukung swasembada daging yang dicanangkan Pemerintah Pusat dengan program UPSUS SIWAB (upaya khusus sapi indukan wajib bunting) yang dilaksanakan sejak Tahun 2017. Walaupun begitu, produksi susu mengalami

penurunan dari tahun 2016 - 2019 yang disebabkan yang disebabkan oleh menurunnya jumlah sapi perah betina yang produktif. Walaupun begitu, pada Tahun 2020 produksi susu mengalami peningkatan didukung oleh adanya penggantian sapi perah produktif oleh petani.

d. Pemasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan pertanian (lihat Tabel 3.104).

Tabel 3. 104 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pertanian

No.	Permasalahan	Solusi
1	Lambatnya aplikasi teknologi oleh petani	Perbanyak pelatihan sehingga bisa meningkatkan pengetahuan dan minat petani untuk menerapkan teknologi baru
2	Regenerasi petani yang lambat	Perlu kaderisasi di Gapoktan/ kelompok tani
3	Belum optimalnya pengelolaan hasil pertanian	Pelatihan penanganan pasca panen Promosi Hasil Pertanian
4	Manajemen pengelolaan peternakan belum optimal	Optimalisasi pengelolaan peternakan.

Dinas Pertanian Kabupaten Bantul, 2020 (Dipertautkan)

22. Kehutanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang pemerintahan daerah Kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi. Oleh karena itu, didalam LKPJ ini, urusan kehutanan tidak dibahas lagi.

23. Energi dan Sumberdaya Mineral

Dasar hukum tidak melaksanakan urusan USDM: Perda Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan astas peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bantul

24. Perdagangan

a. Program dan Kegiatan

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kab. Bantul selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**
 - a) Kegiatan Pelayanan Kemetrollogian Daerah
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**
 - a) Kegiatan Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait/ Asosiasi/ Pengusaha
 - b) Kegiatan Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah
- 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**
 - a) Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk;
 - b) Kegiatan Peningkatan pelayanan Perdagangan
- 4) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan**
 - a) Kegiatan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- 5) Program Pemberdayaan Pedagang**
 - a) Kegiatan Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar
- 6) Program Penataan Pasar Rakyat**
 - a) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat
 - b) Kegiatan Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI
 - c) Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat
 - d) Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Pasar

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan perdagangan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

Perkembangan perdagangan telah membentuk sikap konsumen yang lebih kritis terhadap barang-barang yang dibeli, baik terhadap kualitas maupun kuantitas, disisi lain dalam persaingan usaha masih sering ditemukan praktek-praktek curang dari pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dari ukuran, takaran, timbangan atau jumlah barang yang diperjual-belikan. Dengan demikian, Alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya) yang digunakan oleh masyarakat, khususnya dalam dunia perdagangan harus memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga semua pihak dilindungi kepentingannya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal pengukuran serta memberikan kepastian hukum dalam hal pengukuran, Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Pemerintah melaksanakan kegiatan metrologi legal yang meliputi penyuluhan, pengamatan dan pengawasan alat UTTP, BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) SI (Satuan Internasional) disertai dengan penyidikan tindak pidana dibidang metrologi legal, pengelolaan standar dan ukuran laboratorium, pengujian alat UTTP dalam rangka ijin tipe dan ijin tanda pabrik, serta kegiatan tera/tera ulang.

Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 64.716.913,- atau 99.56%. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini:

a) Kegiatan Pelayanan Kemetrolagian Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan pelayanan alat UTTP yang ditera/tera ulang dan sosialisasi untuk menyampaikan pentingnya tertib ukur merupakan tugas bagi Pemerintah Daerah.

Alokasi Anggaran : Rp. 65.000.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 64.716.913,- (99,56%)

Tingkat Capaian :

Akibat adanya pandemi covid-19 ini, target lisensi tera/tera ulang yang semula 12.000 unit hanya terealisasi sebesar 8.996 unit, namun jika dibandingkan dengan jumlah potensi UTTP yang ada di Kabupaten Bantul, cakupan alat UTTP yang telah ditera/tera ulang adalah sebesar 10,11% dari jumlah potensi UTTP yang ada sebesar 23.154 unit. Sasaran UTTP tersebut adaah masyarakat, pedagang, SPBU puskesmas, serta jasa pengiriman.

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan nilai ekspor produk perdagangan yang ada di Kabupaten Bantul. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp. 245.655.000,-dan terealisasi sebesar Rp. 242.505.000,- atau 99,72%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini;

a) Kegiatan Pengembangan Ekspor dengan instansi terkait/Asosiasi/Pengusaha

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan dan memfasilitasi dan pengendalian perijinan bagi para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bantul, Hal ini penting dilakukan karena dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha yang diharapkan dengan kerja

sama tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap kenaikan nilai ekspor.

Alokasi Anggaran : Rp. 12.500.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 12.500.000,- (100%)

Tingkat Capaian :

- (1) Selama tahun 2020, Dinas Perdagangan telah menerbitkan rekomendasi perijinan usaha sebanyak 35 toko swalayan dan satu Tanda Daftar Gudang (1) serta rekomendasi untuk Distributor Pupuk Bersubsidi sebanyak 3 perusahaan
- (2) Telah disusunnya Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan
- (3) Berhasil menyusun Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

b) Kegiatan Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah

- (1) Memfasilitasi pengrajin di Kabupaten Bantul dalam mempromosikan produk unggulannya
- (2) Meningkatkan omset penjualan produk dan jangkauan pemasaran pengrajin di Kabupaten Bantul
- (3) Meningkatkan pertumbuhan ekspor perdagangan daerah Kabupaten Bantul

Alokasi Anggaran : Rp. 233.155.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 230.005.000,-
 (98.65%)

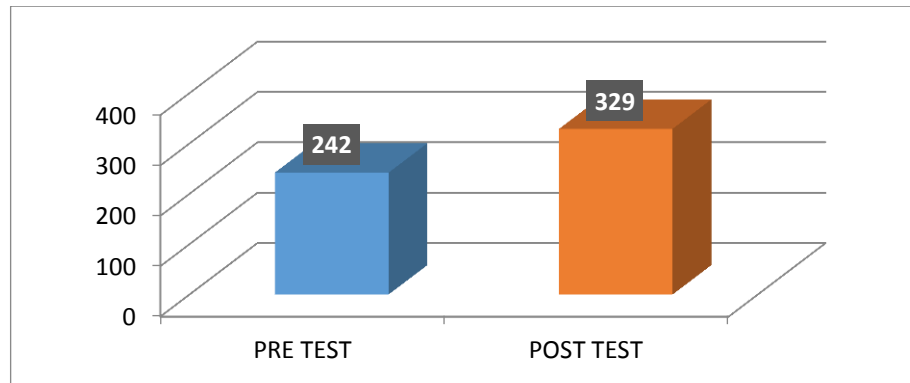
Tingkat Capaian :

- (4) Akibat pandemi covid-19, banyak rencana memfasilitasi UKM dalam pameran ekspor tingkat nasional yang harus *direfocusing*. Tahun 2020 ini hanya ada 2 event pameran yang diikuti, yakni Pameran INDOCRAFT di Jakarta dan Pameran Jogja International Furniture & Craft Fair (JIFFINA). Sebanyak 8 UKM peserta pameran yang difasilitasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul berupa *free* biaya kapling pameran, *free* transportasi barang, dan *free* dekorasi stand.
- (5) Kegiatan Pameran ini memang tidak langsung dapat meningkatkan ekspor Kabupaten Bantul, namun mampu mendongkrak nilai penjualan produk pada saat pameran berlangsung. Untuk omset penjualan berkisar Rp. 74.525.000,- selama 5 hari pameran. Pameran yang bertema *craft* ini juga sangat bermanfaat bagi pelaku usaha Kabupaten Bantul dalam mengembangkan daya saing antar produk dari berbagai wilayah Indonesia.
- (6) Analisa pasar saat pameran berlangsung, komoditi dari Kabupaten Bantul sangat diminati karena mempunyai ciri khas dan model yang unik dari kreatifitas para pengrajin asli Kabupaten Bantul.
- (7) Pameran dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk ajang pengenalan produk ke masyarakat, pengenalan inovasi baru pada produk yang sudah lama dikenal, pengenalan produk atau jasa kepada pengunjung yang tertarget, karena di pameran tentunya pengunjung yang datang merupakan orang orang yang tertarik dengan tema pameran yang diadakan dan

berniat untuk membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa di pameran tersebut.

- (8) Pameran diikuti banyak pelaku bisnis atau usaha. Melalui pameran tersebut, bisa sekaligus menjaring informasi tentang pesaing, seperti harga produk, produk unggulan, peralatan yang digunakan, atau sekedar mengetahui sejauh mana perkembangan bisnis mereka.
- (9) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan terpadu oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul bekerja sama dengan pelaku usaha di Kabupaten Bantul untuk meningkatkan omset penjualan produk dan jangkauan pemasaran di tahun yang akan datang. Monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan untuk menambah jumlah pertumbuhan pelaku, angka, dan nilai ekspor.
- (10) Selain memfasilitasi pameran, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul juga melibatkan 60 orang peserta UKM untuk mengikuti pelatihan ekspor. Narasumber pelatihan tersebut adalah narasumber yang berkompeten dalam tata kelola ekspor, anatar lain dari KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, KPP Pratama Bantul, GPEI DPD DIY, Alltrans Cargowork Asia, dan Ketua ASMINDO DIY.
- (11) Hasil dari pelatihan tersebut adalah adanya penambahan pengetahuan dan keterampilan tentang manajemen perdagangan luar negeri dan tata cara ekspor, memberikan bekal informasi/ pengetahuan dan keterampilan tentang sistem perdagangan luar negeri dan tata cara ekspor yang baik dan benar, pengetahuan dan fasilitas ekspor yang diberikan oleh

kantor Pajak, pengetahuan dan fasilitas ekspor yang diberikan oleh Bea Cukai.



Sumber : Dinas Perdagangan, Kabupaten Bantul 2020

Grafik 3. 14 Nilai Pre Test dan Post Test peserta pelatihan Ekspor

3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk menjamin ketersediaan pasokan, stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting serta untuk menjamin keamanan produk yang diperdagangkan di masyarakat dalam rangka perlindungan konsumen. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp. 69.230.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 68.980.000,- atau 99,64%. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Untuk menjamin ketersediaan pasokan, stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Alokasi Anggaran : Rp. 37.780.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 37.750.000,- (99,92%)

Tingkat Capaian :

- (1) Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dilaksanakan secara rutin setiap hari di 5 pasar rakyat di Kabupaten Bantul yaitu Pasar Niten, Pasar Bantul, Pasar Imogiri, Pasar Piyungan dan Pasar Pijenan. Jenis barang kebutuhan pokok yang dipantau seperti Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Telur Ayam, Daging sapi, Daging ayam, Bawang Merah, Bawang Putih dan Cabe, dll. Sedangkan untuk barang penting yang dipantau ketersediaan dan harganya meliputi bahan bangunan seperti semen, triplek dan baja di toko bangunan. Pemantauan dilaksanakan oleh Tim Pemantau Barang Kebutuhan Pokok yang di bentuk oleh Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dan beranggotakan petugas pasar dan pedagang pasar (APPSI)
- (2) Pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok juga dilakukan pada saat tertentu menjelang hari besar keagamaan nasional seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru yang secara rutin dilaksanakan bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bantul maupun Provinsi DIY ke pasar rakyat maupun distributor/ pelaku usaha. Namun, karena tahun 2020 ini ada pandemi Covid 19 maka untuk kegiatan bersama TPID dilakukan secara terbatas sesuai dengan protokol kesehatan.
- (3) Pelaksanaan Operasi Pasar Murni (OPM) maupun Pasar Murah, bekerjasama dengan Disperindag DIY, Bulog Divre DIY, Distributor barang kebutuhan pokok lainnya untuk menjaga kestabilan harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau, terutama dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN). Pada Tahun 2020

kegiatan Fasilitasi Operasi Pasar Murah (OPM) Barang kebutuhan pokok telah dilaksanakan sebanyak 6 kali.

- (4) Pemantauan ke distributor barang kebutuhan pokok dilaksanakan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) seperti saat Idul Fitri, Idul Adha maupun Natal dan Tahun Baru. Namun demikian, karena tahun 2020 ada pandemi Covid 2019 sehingga pelaksanaan kegiatannya berkurang dan mengacu protokol kesehatan
- (5) Pemantauan pengelolaan dan pemanfaatan gudang SRG yang dilaksanakan sebanyak 6 kali dalam setahun. Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) yang dibangun Bappebti dengan tujuan untuk membantu pemerintah menjaga ketersediaan stok pangan nasional, memberikan alternatif pembiayaan bagi para petani dan UMKM di daerah untuk menyimpan barang kebutuhan pokok di gudang untuk mendapatkan harga terbaik. Gudang SRG Niten di Kabupaten Bantul dibangun pada tahun 2009 seluas 600 m² dengan kapasitas penyimpanan 1.400 ton. Gudang tersebut juga dilengkapi dengan penunjang usaha bisnis berupa Dryer/ pengering dengan kapasitas 8 ton, Rice Milling Unit (RMU/ Mesin Penggilingan Gabah) dengan kapasitas 2 ton/jam, alat transportasi berupa truk dan kendaraan roda tiga. Pengelola gudang SRG sampai saat ini masih dipegang oleh KUD Tani Harjo Pandak, meskipun dalam pengelolaannya masih belum optimal sehingga perlu dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi.

b) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perdagangan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Untuk menjamin keamanan produk yang diperdagangkan di masyarakat dalam rangka perlindungan konsumen

Alokasi Anggaran : Rp. 31.450.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 31.230.000,-
 (99,30%)
 Tingkat Capaian :

- (1) Pembinaan, pemantauan dan pengawasan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 meliputi Distribusi dan HET gas LPG 3 kg, Distribusi dan HET pupuk bersubsidi, Distribusi dan HET barang kebutuhan pokok, Peredaran dan penyalahgunaan bahan berbahaya pada produk pangan, serta Peredaran barang ber Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (2) Dari hasil pemantauan dan pengawasan distribusi dan harga LPG 3 kg di pangkalan didapatkan bahwa secara umum distribusinya cukup lancar dan harganya bervariasi dari Rp.15.500,- sampai Rp. 18.000,-/ tabung, hanya untuk daerah yang medannya sulit seperti Dlingo distribusinya masih kurang merata dan harga cenderung lebih mahal sampai Rp. 20.000,-/tabung. Sedangkan untuk ketersediaan/ stok LPG 3 kg cukup aman, meskipun sempat terjadi kelangkaan menjelang hari besar keagamaan namun sudah dapat teratasi dengan adanya penambahan kuota fakultatif dari Pertamina
- (3) Jenis pupuk bersubsidi yang dipantau meliputi Urea, SP-36, ZA, Phonska dan Petroganik. Dari hasil pantauan di beberapa distributor dan kios pengecer resmi diperoleh

bahwa secara umum distribusi, harga dan mutu pupuk bersubsidi sudah sesuai aturan

- (4) Untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok cukup aman, harga dibawah HET dan distribusi lancar. Meskipun demikian, sempat terjadi kekurangan pasokan dan kenaikan harga yang cukup signifikan untuk komoditas gula pasir dari mulai bulan Januari sampai Juni 2020 yang menembus harga sampai Rp. 18.000,-/kg. Pada bulan Juli 2020 dari hasil pantauan harga sudah mulai stabil sesuai HET yaitu Rp. 12.500,-/kg

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul bersama-sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY melakukan sosialisasi dan pemantauan terhadap peredaran barang ber SNI dilaksanakan ke Toko Bangunan, Toko Sepeda, Toko Elektronik, Toko Mainan Anak, Kios Pupuk dan Pakan Ternak di beberapa kecamatan di Kabupaten Bantul. Dari hasil sosialisasi dan pemantauan masih ada beberapa pelaku usaha yang memperdagangkan barang belum ber SNI.

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul bekerjasama dengan BBPOM Yogyakarta dalam sepekan ini melakukan pengawasan bahan berbahaya pada makanan di beberapa pasar di Kabupaten Bantul.

Pengawasan gas LPG 3 kg. Pada bulan Mei hingga pertengahan Juli 2020 penjualan gas LPG 3 Kg mengalami penurunan dikarenakan banyak para pelaku usaha kuliner dimasa pandemi covid-19 tidak beroperasi. Namun, mulai akhir Juli 2020 penjualan atau pendistribusian gas LPG 3 kg bisa dikatakan

kembali normal sehingga di lingkup pangkalan pun tidak mengalami kelebihan ataupun kekurangan stok.

Pemantauan Ketersediaan dan Harga Barang Kebutuhan Pokok menjelang hari besar keagamaan bersama TPID DIY

4) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan jumlah kawasan pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp. 119.375.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 115.325.000,- atau 96.61%. Program ini hanya dari satu kegiatan, yakni Kegiatan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melengkapi bangunan atau tambahan sarana pendukung fasilitas menjadi lebih lengkap sehingga dapat menjadi daya tarik pembeli

Alokasi Anggaran : Rp. 119.375.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 115.325.000,- (96.61%)

Tingkat Capaian :

- a) Tersedianya 45 unit tenda yang telah dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima.
- b) Untuk penataan PKL yang ada di Kabupaten Bantul, sejak tahun 2018 mulai dibangun sentra kawasan PKL di beberapa tempat untuk penyediaan lahan usaha seperti Lapangan Demi (Imogiri), Lapangan Karangtalun (Imogiri), Bekas pasar Angkrusari (Kretek) dan di Baturetno (Banguntapan). Namun pada tahun 2020 ini pembangunan sentra kuliner di Kecamatan Pundong tidak dapat dilakukan karena anggaran yang difocusing.
- c) Telah dilakukan pembinaan dan pemberdayaan PKL dilakukan monev APKLI ke 9 kecamatan di Kabupaten Bantul.

5) Program Pemberdayaan Pedagang

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan omzet pedagang pasar melalui pelatihan pedagang pasar dan pendampingan APPSI. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 260.625.000,- dan terealisasi sebesar Rp 256.454.500,- atau 98,40%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan SDM, Kelembagaan Dan Promosi Pasar.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan SDM Para Pedagang Rakyat khususnya dalam hal pengelolaan APPSI agar lebih berdaya dalam turut serta mengelola pasar rakyat bersama sama dengan Pengellola pasar dari Dinas Perdagangan. Dengan pelatihan ini diharapkan dapat melatih kemandirian APPSI dalam mengatasi permasalahan permasalahan kecil yang ada di Pasar Rakyat.

Alokasi Anggaran	: Rp 260.625.000,-
Realisasi Anggaran	: Rp 256.454.500,- (98,40%)
Tingkat Capaian	:

Telah dilakukan pelatihan kepada 50 orang pedagang di Pasar Semampir dan Pasar Pleret. Pelatihan tersebut menjadi sarana yang efektif untuk ajang diskusi antar pedagang, pengenalan inovasi baru. Untuk berdagang, pengenalan tata cara berjualan secara online, pengembangan usaha untuk para pedagang, sebagai sarana untuk mendapatkan informasi keadaan pasar lain, pengenalan manajemen keuangan pedagang, pengenalan pasar sehat dan pasar wisata, serta penambahan wawasan terkait produk pangan yang menggunakan pengawet berbahaya.

- a) Promosi melalui Radio Pasar dilakukan oleh Dinas Perdagangan bekerjasama dengan Radio Persatuan sebagai media partner dalam rangka promosi pasar rakyat. Dipilihnya Radio Persatuan menjadi media partner dalam kegiatan

promosi Pasar Rakyat dikarenakan mayoritas masyarakat Kabupaten Bantul adalah pendengar setia radio tersebut dan diharapkan promosi tersebut efektif dan pesan ajakan untuk berkunjung dan berbelanja di Pasar Rakyat dapat tersampaikan kepada para audiens. Kegiatan promosi melalui radio pasar ini dilakukan selama 125 kali tayangan dan disiarkan di jam-jam dimana traffic pendengar radio sedang padat-padatnyanya. Radip masih menjadi salah satu media promosi selain melalui media digital maupun cetak yang dapat mendongkrak kunjungan masyarakat agar mau berbelanja di pasar rakyat.

- b) Untuk mempromosikan pasar, Dinas Perdagangan juga telah membuat Iklan Layanan Masyarakat terkait promosi pasar rakyat melalui Videotron. ILM ini dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk mempromosikan pasar rakyat, menjaga eksistensi Pasar rakyat serta menarik perhatian pengunjung / masyarakat agar mau berkunjung dan berbelanja di Pasar rakyat di Kabupaten Bantul.

6) Program Penataan Pasar Rakyat

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan jumlah kondisi pasar dalam kondisi baik. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp. 426.001.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 417.140.300,- atau 97.92%. Program Penataan Pasar Rakyat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan penataan dan pemeliharaan pasar rakyat di kabupaten Bantul.

Alokasi Anggaran	: Rp. 265.475.000,-
Realisasi Anggaran	: Rp. 263.796.500,- (99,37%)
Tingkat Capaian	:

- (1) Dalam rangka revitalisasi Pasar Bantul pada tahun ini mendapatkan dana dari anggaran perubahan sebesar Rp. 174.325.000,-. Rehabilitasi pasar Bantul akan dilaksanakan sesuai konsep DED pasar Bantul yang telah dibuat pada awal tahun 2019.
- (2) Telah dilakukan juga pemeliharaan rutin untuk beberapa pasar yang sangat perlu segera dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi antara lain Rehabilitasi MCK Pasar Semampir, Rehabilitasi Mushola Pasar Bantul Lantai 2, Rehabilitasi Talang air Pasar Bantul, serta Rehabilitasi Pompa dan Pemasangan Lampu Pasar Bantul

b) Kegiatan Pengembangan Pasar Rakyat ber SNI

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk pendampingan pengembangan Pasar Rakyat ber SNI dengan lokus Pasar Imogiri. Kegiatan ini adalah dalam rangka Mempertahankan predikat SNI 8152:2015 Pasar Imogiri yang telah dicapai di tahun-tahun sebelumnya dan juga sebagai evaluasi akan pelaksanaan operasional Pasar Imogiri terhadap poin-poin SNI Pasar Rakyat seperti yang telah dipersyaratkan oleh LSPRo (Lembaga Sertifikasi).

Alokasi Anggaran : Rp 40.026.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp 36.503.800,- (91,20%)
 Tingkat Capaian :Dapat dipertahankannya sertifikat SNI 8152:2015 untuk Pasar Imogiri

c) Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan penataan dan pemeliharaan pasar rakyat di kabupaten Bantul. Pada awalnya kegiatan ini merupakan kegiatan DAK Pasar Rakyat

untuk Revitalisasi Pasar Turi. Namun karena adanya kebijakan Berdasarkan SE Kementerian Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa DAK Fisik TA 2020, maka tender untuk revitalisasi pasar Turi tidak dapat diproses. Dengan demikian realisasi anggaran pada kegiatan ini hanya untuk membiayai Jasa Perencanaan Pasar Turi dengan alokasi anggaran Alokasi Anggaran Rp. 80.875.000,- dan realisasi Anggaran Rp. 80.515.000,- (99,56%).

d) Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Pasar

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah optimalisasi peningkatan pendapatan pasar.

Alokasi Anggaran : Rp. 39.625.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 36.325.000,- (91,67%)

Tingkat Capaian :

- (1) Target PAD Pasar sebesar Rp. 1.749.672.724,- terealisasi sebesar Rp. 2.875.196.074 atau 164,33%. Kontribusi pencapaian tersebut disumbangkan oleh Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp. 166.661.000,-, Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp. 2.472.404.974,- , Bagi Hasil Pemanfaatan MCK Pasar sebesar Rp. 99.781.000,-, Jasa/ Bunga Dana Bergulir sebesar Rp. 51.000.000,- dan Penerimaan Lain-Lain sebesar Rp. 7.112.200,-.

Tabel 3. 105 Realisasi PAD TA 2020

No	Uraian	Target	Realisasi	Prosentase Realisasi
1	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Rp 78,750,000	Rp 166,661,000	211.63%
2	Retribusi Pelayanan Pasar	Rp 1,517,976,724	Rp 2,472,404,974	162.88%
3	Bagi Hasil Pemanfaatan MCK Pasar	Rp 50,000,000	Rp 99,781,000	199.56%
4	Jasa / Bunga Dana Bergulir	Rp 45,000,000	Rp 51,000,000	113.33%
5	Penerimaan Lain – Lain	Rp 2,946,000	Rp 7,112,200	241.42%

c. Upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan Bantul dalam Rangka Penanganan Dampak Covid - 19

- 1) Penyediaan sarana prasarana protokol kesehatan di Pasar Rakyat dan Taman Kuliner melalui penganggaran Dana Belanja Tak Terduga (BTT) APBN Perubahan serta Bantuan CSR

Melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 189 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberian Ijin Penggunaan Belanja Dana Tidak Terduga (BTT). Anggaran BTT tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19 di Pasar Rakyat sebesar Rp 162.240.000 dan terealisasi sebesar Rp157.877.450 (97,31%). BTT tersebut digunakan untuk penyediaan wastafel sebanyak 114 unit yang tersebar di 31 pasar rakyat, penyediaan alat semprot desinfektan dan cairannya, hand sanitizer, suplemen, kaos tangan, dan masker.

Dilanjutkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 419 Tahun 2020 tanggal 11 September 2020 tentang Pemberian Ijin Penggunaan Belanja Dana Tidak Terduga (BTT). BTT tersebut dimanfaatkan untuk penanganan dampak ekonomi di Pasar Seni Gabusan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penyediaan sarana protokol kesehatan seperti wastafel, sabun cuci tangan, cairan desinfektan, dan

thermogun, serta penyediaan tenda serta waiting line yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha di PSG.

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul juga telah melakukan refocusing anggaran APBD TA 2020 hampir 50%. Salah satu alokasi refocusing tersebut adalah untuk penyediaan sarana protokol kesehatan di Pasar Rakyat dan Taman Kuliner. Sebanyak 79 unit TOA dan 25 Amplifier dipasang di beberapa titik pasar yang dimanfaatkan untuk penyiaran penerapan 3M bagi pedagang dan pengunjung pasar.

Dinas Perdagangan juga banyak menerima bantuan dari CSR terkait penanganan pandemic covid-19 ini. Bantuan tersebut berupa wastafel portable, masker, hand sanitizer, bilik desinfektan, sabun cuci tangan dan sebagainya yang berasal dari Kementerian Perdagangan, BPD DIY, RS Respira, PMI DIY, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Bank BRI, Universitas Alma Ata, REMAIS, PDAM, dan ACT. Melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 189 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberian Ijin Penggunaan Belanja Dana Tidak Terduga (BTT). Anggaran BTT tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19 di Pasar Rakyat sebesar Rp 162.240.000 dan terealisasi sebesar Rp157.877.450 (97,31%). BTT tersebut digunakan untuk penyediaan wastafel sebanyak 114 unit yang tersebar di 31 pasar rakyat, penyediaan alat semprot desinfektan dan cairannya, hand sanitizer, suplemen, kaos tangan, dan masker.

Dilanjutkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 419 Tahun 2020 tanggal 11 September 2020 tentang Pemberian Ijin Penggunaan Belanja Dana Tidak Terduga (BTT). BTT tersebut dimanfaatkan untuk penanganan dampak ekonomi di Pasar Seni Gabusan. Anggaran tersebut

dialokasikan untuk penyediaan sarana protokol kesehatan seperti wastafel, sabun cuci tangan, cairan desinfektan, dan thermogun, serta penyediaan tenda serta waiting line yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha di PSG.

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul juga telah melakukan refocusing anggaran APBD TA 2020 hampir 50%. Salah satu alokasi refocusing tersebut adalah untuk penyediaan sarana protokol kesehatan di Pasar Rakyat dan Taman Kuliner. Sebanyak 79 unit TOA dan 25 Amplifier dipasang di beberapa titik pasar yang dimanfaatkan untuk penyiaran penerapan 3M bagi pedagang dan pengunjung pasar.

Dinas Perdagangan juga banyak menerima bantuan dari CSR terkait penanganan pandemic covid-19 ini. Bantuan tersebut berupa wastafel portable, masker, hand sanitizer, bilik desinfektan, sabun cuci tangan dan sebagainya yang berasal dari Kementerian Perdagangan, BPD DIY, RS Respira, PMI DIY, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Bank BRI, Universitas Alma Ata, REMAIS, PDAM, dan ACT.

- 2) Mengeluarkan kebijakan dan regulasi seperti pembebasan retribusi bagi pedagang pasar rakyat, operasi pasar, pemberian kerja darurat istimewa bagi komunitas pasar (Padat Karya). Serta SOP penerapan protokol kesehatan

Melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 185 Tahun 2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar pada masa tanggap darurat covid-19 dianggap mampu meringankan beban pedagang pasar rakyat, serta menjaga agar kebutuhan pokok tetap tersedia di pasar rakyat pada masa tanggap darurat bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul. Sebagai langkah antisipasi penyebaran virus covid-19, pada Maret 2020

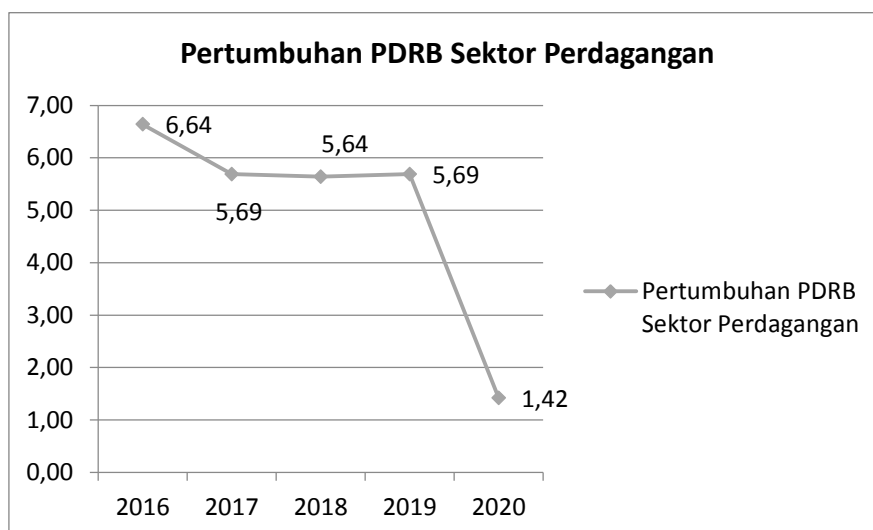
Dinas Perdagangan juga telah mengeluarkan Surat Edaran terkait Pembatasan Jam Operasional Pasar Rakyat. Pembatasan tersebut bertujuan untuk mengurangi kerumuman sehingga dapat mencegah penularan virus. Sebagian besar pasar diminta tutup pada jam 10.00 WIB.

Kegiatan Operasi Pasar dilaksanakan bekerjasama dengan Disperindag DIY, Bulog Divre DIY, Distributor barang kebutuhan pokok lainnya untuk menjaga kestabilan harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau pada masa pandemi ini. Terdapat kuota 200 kg gula pasir dan 2000 paket sembako yang didistribusikan kepada masyarakat Kabupaten Bantul. Selain dengan Disperindag DIY, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul juga bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY untuk mensukseskan program pemberian kerja darurat istimewa bagi komunitas pasar. Hal ini untuk mendukung mitigasi dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19 dalam mengurangi pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Dalam rangka pemberlakuan *new normal* pemulihan aktivitas perdagangan ditengah pandemi Covid-19 untuk memastikan kelancaran perputaran ekonomi dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan masyarakat maka diperlukan Standar Operasional Prosedur Sektor Perdagangan dalam Fase *New Normal*. Melalui SK Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2020 tertanggal 15 Juni 2020 tentang SOP Sektor Perdagangan dalam Fase New Normal, Dinas Perdagangan telah mengatur terkait SOP protokol kesehatan di pasar rakyat, toko swalayan, toko kelontong, pedagang kaki lima, dan layanan publik.

d. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016-2021

Hasil pelaksanaan program urusan perdagangan pada akhirnya akan memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul. Program-program prioritas Dinas Perdagangan Kabupaten Sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan diukur melalui indikator Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan. Capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan yang selama 5 tahun ini sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik.



Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, 2020

Grafik 3. 15 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Perekonomian Bantul di sektor perdagangan mengalami rata-rata pertumbuhan pertahun sekitar 6,08 persen secara riil selama periode 2016-2020. Meskipun tidak seoptimis tahun 2016 yang mencapai 6,64 persen (Gambar 3.4). Namun demikian sub sektor perdagangan di Bantul menunjukkan kondisi yang semakin membaik dimana pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan mengalami pertumbuhan yang positif dan stabil.

Untuk mendukung sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan ini program yang dilaksanakan selama tahun 2016- 2020 sebagai berikut:

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- 3) Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

1) Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal pengukuran serta memberikan kepastian hukum dalam hal pengukuran, Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Pemerintah melaksanakan kegiatan metrologi legal yang meliputi penyuluhan, pengamatan dan pengawasan alat UTTP, BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) SI (Satuan Internasional) disertai dengan penyidikan tindak pidana dibidang metrologi legal, pengelolaan standar dan ukuran laboratorium, pengujian alat UTTP dalam rangka ijin tipe dan ijin tanda pabrik, serta kegiatan tera/tera ulang.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2018 tentang retribusi tera/tera ulang, juga merupakan regulasi yang menjadi payung hukum pelayanan dan pelaksanaan tera/tera ulang di Kabupaten Bantul, disamping peraturan lain yang berkaitan dengan kemetrologian.

Masih ada permasalahan yang ditemui, yakni terkait regulasi pelaksana verifikasi alat standar kemetrologian kelas M2 (Bidur 20kg) yang sudah bisa dilimpahkan ke UML

Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya masih simpang siur. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2021 :

- a) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait kepastian regulasi
- b) Melakukan verifikasi mandiri untuk alat standar kemetrolgion kelas M2
- c) Untuk meningkatkan pelayanan tera/tera ulang, pembangunan gedung metrologi tahap II dilanjutkan dengan dana bersumber APBD/APBN
- d) Dengan semakin terbatasnya jumlah SDM penera, maka pengiriman ASN untuk mengikuti diklat calon penera dioptimalkan
- e) Dengan berlakunya Permendagri 90/2019 dan Kependagri 50/2020, maka untuk tahun 2021 selanjutnya kegiatan kemetrolgion ini juga menyentuh pada pengawasan terhadap BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) yang merupakan amanat dari UU 23/2014.

2) Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Selama 5 tahun ini, untuk menjaga stabilitas harga, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul telah melakukan upaya sebagai berikut:

- a) Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya
- b) Pelaksanaan Operasi Pasar Murni (OPM) dan Pasar Murah barang kebutuhan pokok
- c) Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan HET gas LPG 3 kg
- d) Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Distribusi dan HET barang kebutuhan pokok

- e) Peredaran dan penyalahgunaan bahan berbahaya pada produk pangan
- f) Peredaran barang ber Standar Nasional Indonesia (SNI)

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Peningkatan Efisiensi Dalam Negeri ini antara lain:

- a) Adanya pandemi Covid 19 menyebabkan banyak ada beberapa kegiatan yang belum dapat terlaksana karena terkendala protokol kesehatan
- b) Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mentaati peraturan yang ada.
- c) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran konsumen/ masyarakat untuk membeli barang yang aman baik dari segi kesehatan maupun aturan.
- d) Masih ditemukan penyalahgunaan bahan berbahaya di pasar rakyat

Upaya yang akan dilakukan pada periode mendatang antara lain:

- a) Menjaga stabilitas harga dengan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap HET beberapa jenis barang kebutuhan pokok yang telah ditentukan harganya oleh Pemerintah;
- b) Menjaga ketersediaan stok dengan mengoptimalkan penyampaian laporan dari pelaku usaha/distributor barang kebutuhan pokok;
- c) Memantau stok yang ada di gudang untuk menghindari penimbunan barang kebutuhan pokok;
- d) Mengajak masyarakat agar berbelanja sesuai kebutuhan dan penggunaan produk dalam negeri;

3) Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

Menghadapi pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) saat ini, menjadikan beberapa permasalahan yang cukup signifikan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) disatu sisi merupakan pemenuhan lapangan kerja dan menjadi kekuatan perekonomian rakyat, sedangkan disisi lain kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan dengan munculnya kesan buruk, dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Untuk mengatasi hal tersebut, selama tahun 2016-2021 ini Dinas Perdagangan telah membangun 4 kawasan taman kuliner/PKL untuk memberikan fasilitas bagi PKL untuk berjualan.

Tabel 3. 106 Jumlah Kawasan PKL 2016-2020 (kumulatif)

Rincian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kawasan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	0	1	2	4	4

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2020

Sebagai bagian dalam urat nadi perekonomian nasional, peran pasar rakyat/tradisional sangatlah signifikan untuk menjalankan berbagai fungsinya, antara lain memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD; dan sebagai salah satu sarana pelestarian budaya setempat.

Untuk meningkatnya kualitas pasar rakyat ini berbagai upaya telah dilakukan antara lain:

(1) Penataan Pasar Rakyat

Upaya yang telah dilakukan adalah melengkapi fasilitas – fasilitas yang ada di Pasar Rakyat, Melakukan pemeliharaan/rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana pasar yang mengalami kerusakan, melakukan revitalisasi guna menghidupkan kembali pasar rakyat di jaman yang modern ini, serta memberikan suasana nyaman dan aman pada kegiatan perdagangan yang ada di Pasar Rakyat Kabupaten Bantul.

Tabel 3. 107 Cakupan Jumlah Pasar Kondisi Baik

Rincian	2016	2017	2018	2019	2020
cakupan jumlah kondisi pasar baik (%)	62,5	75,76	78,12	62,5	50

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, 2020

Tabel 3. 108 Jumlah Pasar di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Rincian	2016	2017	2018	2019	2020
cakupan jumlah kondisi pasar baik (%)	32	32	32	32	32

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, 2020

** pasar kabupaten dibawah naungan Dinas Perdagangan Kab. Bantul

Tabel 3. 109 Data Kondisi Pasar Tahun 2020 Di Kabupaten Bantul

No	Nama Pasar	Kondisi Pasar	Keterangan
1	Pasar Bantul	Kurang Baik	Atap, lantai, selasar, hydrant
2	Pasar Niten	Kurang Baik	Atap, lantai, ketersediaan air bersih
3	Pasar Imogiri	Baik	-
4	Pasar Piyungan	kurang baik	Atap, saluran air di los ikan dan daging belum ada, ketersediaan air bersih, hydrant
5	Pasar Sorobayan	kurang baik	Atap dan tempat sampah
6	Pasar Mangiran	rusak	Atap, lantai, drainase, konstruksi bangunan memerlukan rehab total
7	Pasar Gumulan	rusak	Sebagian besar los dalam kondisi rusak dan tidak layak, pagar belum ada
8	Pasar Pijenan	Kurang Baik	Ketersediaan air bersih

No	Nama Pasar	Kondisi Pasar	Keterangan
9	Pasar Sungapan	Baik	Kamar mandi dan TPS
10	Pasar Semampir	Baik	Septiktank
11	Pasar Celep	Baik	Musholla
12	Pasar Jodog	kurang baik	Atap, sirkulasi cahaya dan udara, lantai
13	Pasar Angruksari	Baik	Masih terdapat beberapa tampias air hujan
14	Pasar Turi	kurang baik	Banyak bangunan non permanen yang tidak layak
15	Pasar Pundong	kurang baik	Masih banyak los yang kondisinya tidak layak
16	Pasar Gatak	kurang baik	Atap dan lantai
17	Pasar Barongan	kurang baik	Atap, lantai, pagar
18	Pasar Dlingo	kurang baik	Akses jalan masuk, los hewan belum ada atap
19	Pasar Jejeran	Baik	Masih terdapat tampias dan kurang pagar pasar
20	Pasar Pleret	kurang baik	Diperlukan perbaikan atap dan talang
21	Pasar Ngipik	Baik	-
22	Pasar Panasas	Baik	Perlu rehabilitasi drainase
23	Pasar Klithikan Niten	kurang baik	Rehabilitasi kantor pengelola pasar
24	Pasar Hewan Imogiri	Baik	Kantor dan mck
25	Pasar Hewan Pandak	Baik	-
26	Pasar Janten	Baik	Perlu rehabilitasi sebagian atap yang bocor
27	Pasar Jragan	Baik	-
28	Pasar Koripan	Baik	Tempat sampah sementara dan atap
29	Pasar Grogol	Baik	Penyempurnaan tempat sampah
30	Pasar Bendosari	Baik	-
31	Pasar Sangkeh	Kurang baik	Kantor, pagar, mck, lanscape
32	Pasar Seni Gabusan	Baik	-

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, 2020

(2) Pemberdayaan Pedagang

Tabel 3. 110 Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat

Rincian	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	N/A	3,5	-11,95	0,47	-44.88

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, 2020

Pengambilan data diperoleh dari hasil survey omzet pedagang pasar rakyat dengan sasaran pedagang pasar dengan komoditas bahan makanan, bahan makanan segar, toiletries, sandang, peralatan dapur, dan lainnya. Rencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 untuk meningkatkan pelaksanaan program ini adalah :

- (a) Peningkatan SDM para pedagang Pasar
- (b) Keberadaan pasar rakyat masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat luas merupakan hasil terus menerus dan berkelanjutan dari promosi pasar
- (c) Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat oleh pedagang pasar rakyat
- (d) Beberapa pedagang mulai dengan memasarkan produk dangangnya melalui media online
- (e) Meningkatnya kesadaran pedagang tentang pentingnya memperbaiki organisasi kepengurusan APPSI

Sehingga ke depan program tersebut dapat ditingkatkan agar akses pedagang untuk mendapatkan penguatan modal lebih terbuka dan banyak untuk meningkatkan kemandirian usaha.

Peningkatan ekspor didukung oleh komoditi ekspor unggulan seperti sarung tangan, tekstil, furniture, dan handycraft, sedangkan negara tujuan ekspor utama adalah Australia, USA, Jepang, Perancis, Hongkong, Rusia, Italia, dan Singapura.

Upaya memacu ekspor menghadapi tantangan luar biasa karena ekonomi global yang melambat, namun demikian, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekspor antara lain:

- (a) Mempermudah izin ekspor untuk produk UMKM seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), dan menggratiskan biaya sertifikasi agar harga produk UMKM Indonesia dapat bersaing pada pasar global
- (b) Memberikan insentif pajak ekspor bagi pelaku UMKM. Adapun, insentif lain yang diperlukan adalah penurunan biaya transportasi, perlindungan hukum untuk pasar luar negeri
- (c) Kualitas produk UMKM Indonesia masih kurang untuk menunjang ekspor produk UMKM sehingga perlu dilakukan pelatihan untuk menambah kualitas produk
- (d) UMKM harus bertransformasi ke arah ekonomi hijau. Produk hijau saat ini sedang digandrungi pasar global. Di mana-mana permintaannya adalah produk hijau, dapat dimulai dari penggunaan kemasan ramah lingkungan
- (e) Marketplace sangat potensial untuk menjadi shortcut bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) guna menjangkau pasar yang lebih luas. pelaku UMKM harus memiliki keunikan khusus agar bisa memenangkan persaingan di marketplace. Mereka yang memiliki keunikan produk serta kapasitas dan kontinuitas produksi akan memenangkan persaingan. Semua pelaku UMKM harus segera bertransformasi ke arah digital.

e. Perdagangan Selama Tahun 2020

1) Pelaku Usaha Yang Berhasil Meningkatkan Ekspor di masa Pandemi

Ditengah menurunnya nilai ekspor akibat pandemi Covid-19 ini, salah satu pelaku usaha di Bantul yaitu PT. Indo Risakti malah berhasil mencatatkan kontrak kerja ekspor dengan buyer dari Amerika Serikat.

Sebanyak 1.200 pcs diekspor ke Amerika Serikat, terdiri dari keranjang, wall decor, kotak hias, cermin, dan table top (bowl). Salah satu karyawan PT. Indo Risakti, mengatakan di tengah pandemi Covid-19, penjualan Indo Risakti sampai dengan Oktober 2020 justru meningkat. Kios lantai II Pasar Bantul yang mangkrak kini disulap menjadi pusat kuliner dengan nama Food Corner Kemangi. Puluhan pedagang yang menjajakan kuliner di Food Corner Kemangi menjual beragam makanan khas Kabupaten Bantul seperti ingkung, sate kambing, sambel welut, pempek, bakmi jawa. Selain itu juga tersedia makanan kekinian yang kini diburu oleh kaum millennial dengan harga yang masih terjangkau.

Branding Kemangi Food Corner yang bertempat di lantai 2 Pasar Bantul ini dilakukan sebagai upaya untuk mendongkrak promosi pasar khususnya kawasan lantai 2 Pasar Bantul menjadi pusat kuliner yang bersih dan tertata serta menempati tempat yang strategis di tengah-tengah pusat kota Bantul.

Hasil audit dari tim auditor Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa Pasar Imogiri minor akan temuan dan memenuhi persyaratan SNI 8152:2015 untuk Pasar Rakyat Tipe 1 (lebih dari 750 pedagang).

2) Pemenang Juara I Lomba Pasar Siaga COVID-19 Tingkat DIY



m

Gambar 3. 13 Pemenang Juara I Lomba Pasar Siaga COVID-19 Tingkat DIY

Pasar Peduli Covid 19 yang diarahkan pada pasar-pasar rakyat menunjukkan bagaimana "gas dan rem" itu dipraktekkan pada level ekonomi akar rumput. Dari 16 pasar rakyat sebagai peserta lomba yang ada di kabupaten dan kota se DIY tersebut dinilai dengan 2 klasifikasi, yaitu klasifikasi A adalah pasar kurang dari 500 pedagang dan klasifikasi B adalah pasar dengan 500 lebih pedagang

Hasil penilaian yang dilakukan tim, sebagai 5 pemenang Pasar Siaga Covid 19 adalah untuk klasifikasi A, juara I Pasar I Pasar Imogiri, Kabupaten Bantul dengan nilai 2.918, mendapatkan penghargaan piala dan uang sebesar Rp. 8 juta, sedangkan juara II diraih oleh Pasar Beringharjo, Kota Jogjakarta dengan nilai 2.900 mendapatkan piala dan uang sebesar Rp. 5 juta

3) Penghargaan Pelestari Cagar Budaya untuk Pasar Sangkeh

Penghargaan ini adalah salah satu wujud apresiasi Pemerintah Kabupaten Bantul kepada pihak-pihak yang telah berkomitmen dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal di wilayah Kabupaten Bantul.

Pada tahun 2020 ini terpilih 5 Pelestari Cagar Budaya jatuh pada Pasar Sangkeh (Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul), Stoomwals (DPUPKP Kabupaten Bantul), Masjid Pathok Negoro Dongkelan, Eks Kantor Sinder Tebu Madugondo Sitimulyo, Dalem Bupati Kanjengan.

25. Perindustrian

a. Program dan kegiatan

Program dan kegiatan urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

- a) Kegiatan Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul;
- b) Kegiatan Pengembangan Dan Pemberdayaan IKM;
- c) Kegiatan Pengembangan Dan Pemasaran IKM;
- d) Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif.

2) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

- a) Kegiatan Pengembangan Sistem Dan Inovasi Teknologi Industri.

3) Program Penataan Struktur Industri

- a) Kegiatan Pengembangan Kebijakan Dan Kerjasama Industri.

4) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri potensial

- a) Kegiatan Pemberdayaan IKM Sentra;
- b) Kegiatan Pemetaan Industri Hasil tembakau

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**1) Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah**

Maksud dan tujuan program adalah untuk mempersiapkan IKM dalam menghadapi persaingan global sehingga IKM bisa dan mampu bersaing baik dari kompetensi, kualitas, dan terutama teknologi di era industry 4.0. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :

a) Kegiatan Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul

Tujuan kegiatan adalah sebagai wadah Dekranasda yang memberikan fasilitasi dan pendampingan bagi IKM di Kabupaten Bantul, agar industri di Kabupaten Bantul bisa semakin berkembang dan maju. Kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.176.730.000,- terealisasi sebesar Rp.175.545.500,- atau 99,32%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Bimtek Menjahit;

Bimtek menjahit dilaksanakan sebanyak 2 kali secara online pada tanggal 25-27 November 2020 dan 28-30 November 2020 bertempat di DKUKMP dengan peserta 40 orang

(2) Bimtek Frozen Food ayam dan kemasan;

Bimtek Frozen Food ayam dan kemasan dilaksanakan sebanyak 2 kali secara online pada tanggal 26-28 November 2020 dan 30 November – 2 Desember 2020 bertempat di DKUKMP dengan peserta 40 orang.

(3) Study banding Dekranasda Kab. Bantul.

Study banding Dekranasda diikuti oleh pengurus Dekranasda Kabupaten Bantul berlokasi di Kabupaten

Bandung Barat pada tanggal 12-14 Maret 2020. Dalam study banding disepakati akan berkolaborasi untuk mengembangkan pengrajin Kabupaten Bantul dan kabupaten bandung barat.

b) Kegiatan Pengembangan Dan Pemberdayaan IKM

Tujuan kegiatan adalah untuk mengembangkan IKM non sentra di Kabupaten Bantul. Kegiatan terdiri dari 2 sub kegiatan. Alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp.515.500.000,- terealisasi sebesar Rp.510.617.700,- atau 99,05%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Pelatihan Industri;

Tabel 3. 111 Pelatihan Industri Tahun 2020

No	Nama Kelompok	Jenis Pelatihan	Alamat	Tanggal pelaksanaan	Ket
1	KPKI Pandansari	Olahan Singkong	Ngelosari Srimulyo Piyungan	10 sd 13 Februari 2020	
2	Mekarsari	Aneka Kue Kering	Mrisi Tirtonirmolo Kasihan	11 sd 14 Februari 2020	
3	Upaya Rasa	Olahan Makanan	Tinggen Srigading Sanden	17 sd 20 Februari 2020	
4	Cemani	Olahan makanan	Piring I Murtigading Sanden	18 sd 21 Februari 2020	
5	Dasawisma RT 04	Olahan Makanan	Nyemengan RT 04 Tirtonirmolo Kasihan	2 sd 5 Maret 2020	
6	Lestari Jaya	makanan Tradisional	Jaten Triharjo Pandak	3 sd 6 maret 2020	
7	Tunas Ngrombo	Aneka Kue	Blawong II Trimulyo Jetis	09 sd 12 Maret 2020	
8	Maneka Warna	makanan Tradisional	Jalakan Triharjo Pandak	10 sd 13 Maret 2020	
9	Taman Hasyim Asyhari	Aneka Kue	Bembem Trimulyo Jetis	16 sd 19 Maret 2020	
10	Srikandi Srimartani	Olahan	Wanujoyo Lor	16 sd 19	

No	Nama Kelompok	Jenis Pelatihan	Alamat	Tanggal pelaksanaan	Ket
		Makanan	Srimartani Piyungan	Maret 2020	
11	Wiji Lestari	makanan Tradisional	Gunturan Triharjo Pandak	17 sd 20 Maret 2020	
12	Sedyo Mulyo	makanan Tradisional	Siyangan Triharjo Pandak	20 sd 23 Maret 2020	
REHAT PANDEMI					
13	Nyi Brintik	Modernisasi Legen	Kwalangan Wijirejo Pandak	02 sd 06 November 2020	
14	PKK Pinter	Olahan Pangan	Kanoman Tegal pasar Karangjambe Banguntapan	16 sd 19 November 2020	
15	KUBE Melati Tegallurung	Olahan Makanan	Tegallurung Gilangharjo Pandak	17 sd 20 November 2020	
16	KUBE Bugenvile	Menjahit	Mintoragan Wirokerten Banguntapan Bantul	23 sd 26 November 2020	

Sumber data : Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul

(2) Pelatihan bisnis online bagi IKM.

Tabel 3. 112 Data Pelatihan Bisnis Online Tahun 2020

No	Nama Kelompok	Jenis Pelatihan	Alamat	Tanggal pelaksanaan	Ket
1	Guyub Rukun Migunani	Bisnis Online	Tegalijo RT 13 Ngestiharjo Kasihan Bantul	30 November sd 03 desember 2020	
2	Persatuan Muda Mudi Bajang	Bisnis Online	Bajang Daleman Gilangharjo Pandak	01 sd 03 Desember 2020	
3	Taruna Tani	Bisnis Online	Jipangan Bangunjiwo Kasihan Bantul	04 sd 06 Desember 2020	
4	Bidang	Bisnis Online	Dongkelan Kauman	02 sd 04	

No	Nama Kelompok	Jenis Pelatihan	Alamat	Tanggal pelaksanaan	Ket
	Pemberdayaan Masjid Pathok Negro		Tirtonirmolo Kasihan Bantul	Desember 2020	

Sumber data : Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul

c) Kegiatan Pengembangan Dan Pemasaran IKM

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan produk-produk IKM Kabupaten Bantul dan juga untuk meningkatkan omset penjualan produk UMKM, namun karena adanya pandemi Covid-19 kegiatan ini dialihkan seluruh anggarannya untuk program kegiatan lain yang lebih urgent untuk menanggulangi dampak perekonomian bagi IKM. Di anggaran murni TA 2020 dianggarkan Rp.81.708.000.

d) Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan industri kreatif di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan. Alokasi anggaran sebesar Rp.257.500.000,- terealisasi sebesar Rp.246.270.000,- atau 95,63%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Pelatihan menjahit masker batik;

Pelatihan menjahit masker batik berlokasi di Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul jumlah peserta 40 orang pada tanggal 9-12 September 2020;

(2) Pelatihan pembuatan batik kayu;

Pelatihan pembuatan batik kayu berlokasi di Desa Krebet , sendangsari, Pajangan, Bantul, jumlah peserta 40 orang pada tanggal 15-18 September 2020 dan 21-24 September 2020.



Gambar 3. 14 Pelatihan pembuatan batik kayu

- (3) Pelatihan kerajinan bambu pembuatan panahan tradisional;
Pelatihan kerajinan bambu pembuatan panahan tradisional berlokasi di Desa Muntuk, Dlingo, Bantul, jumlah peserta 20 orang pada tanggal 19-24 Oktober 2020.
- (4) Pelatihan pembuatan blangkon;
Pelatihan pembuatan blangkon berlokasi di Guwosari, pajangan, bantul jumlah peserta 20 orang pada tanggal 22-26 Oktober 2020.
- (5) Pelatihan pembuatan minuman tradisional
Pelatihan pembuatan minuman tradisional berlokasi di Desa Argodadi, Sedayu, Bantul dan Desa Canden, Jetis, Bantul jumlah peserta 40 orang pada tanggal tanggal 21-24 September 2020 dan 22-25 September 2020.



Gambar 3. 15 Pelatihan pembuatan minuman tradisional

2) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Maksud dan tujuan program adalah untuk untuk mengembangkan inovasi dan standarisasi produk IKM di Kabupaten Bantul. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :

a) Kegiatan Pengembangan Sistem Dan Inovasi Teknologi Industri.

Tujuan kegiatan adalah untuk mengembangkan inovasi dan standarisasi produk IKM di Kabupaten Bantul. Kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan. Alokasi anggaran sebesar Rp.134.200.000,- terealisasi sebesar Rp.134.200.000,- atau 100%.

Adapun subkegiatan:

- (1) Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi IKM;
- (2) Promosi produk inovasi IKM.

3) Program Penataan Struktur Industri

Maksud dan tujuan program adalah untuk untuk Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri dalam rangka pengembangan industri di Kabupaten dan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Program Penataan Struktur Industri dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :

a) Kegiatan Pengembangan Kebijakan Dan Kerjasama Industri.

Tujuan kegiatan adalah untuk Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri dalam rangka pengembangan industri di Kabupaten dan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan. Alokasi anggaran sebesar Rp.4.443.182.000,- terealisasi sebesar Rp.4.428.477.860,- atau 99,66%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Kerjasama antara IKM dengan usaha menengah, besar atau BUMN;

Workshop kerjasama antara IKM dengan Usaha Menengah, Besar dan BUMN yang dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2020 di RM Numani Sewon Bantul, jumlah peserta 30 IKM. Hasil dari workshop berbentuk kerjasama antara IKM dengan Usaha menengah, Besar dan BUMN

(2) Pengadaan tanah untuk akses jalan Kawasan Industri Piyungan;

Pengadaan tanah untuk akses jalan Kawasan Industri Piyungan sebanyak 2 bidang tanah seluas 2800 meter persegi.

(3) Koordinasi dan sinkronisasi SIINas.

Koordinasi dan sinkronisasi SIINas tidak dilaksanakan kaera pembatasan bepergian ke luar daerah.

4) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri potensial

Maksud dan tujuan program adalah untuk mengembangkan dan membina sentra-sentra industri di Kabupaten Bantul. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri potensial dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :

a) Kegiatan Pemberdayaan IKM Sentra;

Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk memberdayakan dan mengembangkan IKM yang ada di sentra-sentra IKM. Kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan. Alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp.475.200.000,- terealisasi sebesar Rp.301.723.500,- atau 63,49%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Pelatihan pada sentra dan potensi sentra;

Tabel 3. 113 Data Pelatihan Pada Sentra Tahun 2020

No.	Tanggal	Nama Kelompok	Jenis Bimtek	Lokasi	Ket
1	23-27 Juli 2020	Kelompok Pertukangan Sido Mukti	Meubel Limbah Kayu	Temuwuh, Dlingo	
2	24-28 Juli 2020	Kelompok Pengrajin Bambu Karya Mandiri	Anyaman	Karangasem, Muntuk, Dlingo	
3	07-11 Agustus 2020	Kelompok Usaha Meubel Sekar Jati	Meubel Limbah Kayu	Jambon, Bawuran, Pleret	
4	10-14 Agustus 2020	Kelompok Usaha Anyaman Bambu Pangestu	Anyaman	Paten, Lopati, Srandakan	
5	12-16 Agustus 2020	Kelompok Pengrajin Kayu Amrih Maju	Mebel Finishing Resin	Karangasem, Muntuk, Dlingo	
6	24-28 Agustus 2020	Asmindo Komda DIY	Waldeco	Manding, Sabdodadi, Bantul	

No.	Tanggal	Nama Kelompok	Jenis Bimtek	Lokasi	Ket
7	17-21 November 2020	Kelompok Usaha Benang Emas	Menjahit	Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan	
8	23-27 November 2020	Asmindo Komda DIY	Cetak Resin Berbahan Semen	Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan	

Sumber data : Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul

(2) Promosi produk sentra IKM.

Mengikuti Pameran SAEXPO pada tanggal 27 Oktober – 1 November 2020 di Plaza Ambarukmo Yogyakarta. SAEXPO adalah pameran furniture dan kerajinan, peserta pameran 5 IKM yaitu : Pisau Batik Logam, Bangunjiwo kasihan; Suntosa Leather Panggunharjo, Sewon; Timor Souvenir Singosaren, Banguntapan; Tyas batik, Pendowoharjo, Sewon; dan Batik Kayu Erlangga, Sedangsari, pajangan.

b) Kegiatan Pemetaan Industri Hasil tembakau

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memetakan industri hasil tembakau yang ada di Kabupaten Bantul. Kegiatan terdiri dari 1 sub kegiatan. Alokasi anggaran sebesar Rp.44.800.000,- terealisasi sebesar Rp.43.495.000,- atau 97,08%.

c. Keberhasilan Pelaksanaan Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Keberhasilan Urusan Perindustrian dapat dilihat dari program kegiatan sebagai berikut :

Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada hampir semua sektor. Di sektor ekonomi terjadi penurunan mendekati angka 70%. Demikian pula di sektor Usaka Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

dan Perindustrian hampir seluruh kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) dihentikan. Kondisi ini membuat Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) mengalami kerugian dan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah Daerah Kab. Bantul melalui Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian mengalihkan kegiatan rutin menjadi kegiatan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 di lingkungan tempat usaha, dan kegiatan Pemberdayaan/Padat Karya Diversifikasi Usaha bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) yang terdampak Pandemi Covid-19.

Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri dalam bentuk Pemberdayaan/Padat Karya Diversifikasi Usaha pembuatan masker sebanyak 100 ribu pcs dengan target harga perkiraan Rp6000,-/pcs sehingga total anggaran kurang lebih sebesar Rp600.000.000,-. Pekerjaan dilakukan oleh 200 IKM batik dan penjahit.

Tabel 3. 114 Data – Data Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (data sementara)

No.	Sektor Industri	2016		2017		2018		2019		2020	
		Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga kerja
1.	Pangan	8.754	29.019	9.095	29.783	9.594	30.785	9.712	31.267	9.824	31.375
2.	Sandang dan Kulit	902	7.095	921	7.449	972	8.175	1.092	8.228	1.186	8.295
3.	Kerajinan Umum	7.543	26.159	7.912	28.623	8.346	30.074	8.574	30.875	8.702	30.920
4.	Kimia dan Bahan Bangunan	3.275	29.828	3.286	29.991	3.466	30.057	3.488	30.124	3.520	30.176
5.	Logam dan Jasa	1.093	3.062	1.096	3.162	1.156	3.373	1.493	3.403	1.545	3.456
Jumlah		21.567	95.163	22.310	99.008	23.535	102.464	24.359	103.897	24.777	104.222

Sumber data : Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul

Tabel 3. 115 Capaian Cakupan Industri Kreatif Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (data sementara)

No.	Tahun	Capaian Cakupan Industri Kreatif
1.	2016	39,50 %
2.	2017	41,11%
3.	2018	42.90%
4.	2019	46.20%
5.	2020	46.20%

Sumber data : Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul

d. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 116 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Perindustrian Tahun 2020

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengembangan KPI Piyungan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Sewa tanah warga sebagai jalan akses sementara - Pembangunan akses jalan KPI Piyungan - Mendorong pertumbuhan industri di KPI
2.	Omset IKM menurun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan padat karya pembuatan masker 2. Fasilitasi MoU antara IKM dengan trader
3.	Belum semua terstandarisasi produk IKM	Fasilitasi sertifikasi halal
4.	Pelaku industri masih banyak yang belum terlindungi dari sisi merk dagang	Fasilitasi HKI dan rekomendasi HKI.

26. Transmigrasi

a. Program Transmigrasi Umum

Maksud dan Tujuan Program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pemerataan pembangunan daerah dan mengurangi kemiskinan. Program ini menyerap anggaran Rp. 482.091.500,00, namun setelah masa pandemi kegiatan tersebut mengalami *refocusing*, sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 162.812.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 153.531.250,00 atau 94,2 %. Program transmigrasi umum menghasilkan keluaran sebagai berikut:

1) Kegiatan Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi

Maksud dan Tujuan Kegiatan ini adalah memberikan penyuluhan, pengarahan bagi masyarakat yang ingin bertransmigrasi dan memberikan pelatihan kepada calon transmigrasi yang akan ditempatkan. Rp. 482.091.500,00, namun setelah masa pandemi kegiatan tersebut mengalami *refocusing*, sehingga anggaran berubah menjadi Rp. 162.812.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 153.531.250,00 atau 94,2 %.

Terkait dengan ditetapkannya Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, berdampak besar terhadap kegiatan Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi. Sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan:

Adapun rincian kegiatan dapat dilaksanakan yaitu :

a) Penyuluhan

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Tingkat Kecamatan 2 kali pada tanggal 26 Oktober 2020 di Balai Desa Gadingsari, Kec.Sanden dan 27 Oktober 2020 di

Balai Desa Panjangrejo , Kec.Pundong. Pada tahun 2020 KIE Ketransmigrasian Tingkat Kabupaten tidak dilaksanakan karena situasi belum memungkinkan, Selama Pandemi COVID 19 penyuluhan kelompok dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID 19. Selain itu publikasi program transmigrasi juga dilaksanakan melalui siaran Radio sebanyak 3 kali dan siaran interaktif variety show televisi 1 kali.

b) Pembinaan calon transmigran

Sub Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pemantapan kesiapan calon transmigran dan keluarganya selama waktu menunggu pemberangkatan ke lokasi transmigrasi. Para calon transmigran terus diberikan pembinaan agar motivasi untuk mengikuti program transmigrasi tetap terjaga sampai mereka siap untuk diberangkatkan ke lokasi transmigrasi. Pembinaan calon transmigran untuk tahun 2020 dilaksanakan dengan sistem inclass sebanyak 4 kali dan dikunjungi rumah ke rumah sebanyak 2 kali. Semua kegiatan pembinaan calon transmigran mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid 19.

Sedangkan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan adalah kegiatan yang lokasi pelaksanaannya di luar wilayah Kabupaten Bantul dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberangkatan transmigran. Ini dilaksanakan sebagai dukungan pencegahan penyebaran COVID 19, dengan perincian sebagai berikut;

a) Pelatihan Calon Transmigran

Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena lokasi pelatihan ada di Kebun Praktek Instiper II yang berlokasi di Bawen

Semarang. Selain itu kegiatan pelatihan inclass dikhawatirkan akan menyebabkan penularan Covid 19

b) Penjajagan dan Cheking Lokasi

Penjajagan lokasi transmigrasi dilaksanakan 1 kali yaitu di Kabupaten Wajo dan Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan, kegiatan ini dilaksanakan sebelum adanya Pandemi Covid 19. Cheking lokasi transmigrasi tidak dapat dilaksanakan, karena setelah merebaknya pandemi Covid 19 diterbitkan edaran untuk tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.

c) Pemberangkatan Transmigran

Pada tahun 2020 Kabupaten memperoleh kuota penempatan transmigrasi sebanyak 20 kepala keluarga, dan sudah terpenuhi di 5 lokasi penempatan (Tabel.4138). Tetapi dengan adanya Pandemi Covid 19 kementerian Desa PDT Dan Transmigrasi menunda perpindahan dan penempatan transmigrasi tahun 2020 ke tahun 2021. Sehingga kegiatan yang berkaitan dengan pemberangkatan calon transmigran yakni penampungan pelepasan dan pengawalan tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 3. 117 Daftar Kuota Penempatan Transmigrasi Tahun 2020

No.	Lokasi	Kuota (KK)	Keterangan
1	UPT Keladen Kecamatan Kerang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur	5	
2	UPT Saluandeang Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat	2	
3	UPT Mahalona Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan	5	
4	UPT Bekkae SP 2 Kecamatan Bekkae Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan	3	
5	UPT Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulaesi Tenggara	5	
	Jumlah	20	

Sumber : Disnakertrans, Kabupaten Bantul 2020

b. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan Transmigrasi (lihat Tabel 3.118).

Tabel 3. 118 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Transmigrasi

No.	Permasalahan	Solusi
1	Alokasi penempatan transmigran tidak sesuai dengan animo calon transmigran	Memberikan gambaran lokasi daerah tujuan melalui penyuluhan, dan penjajakan kerja sama ketransmigrasian ke daerah tujuan baru
2	Adanya kebijakan untuk menanggulung pola <i>costsharing</i>	Konsultasi ke pusat untuk membuka kembali peluang keberlanjutan <i>cost sharing</i>
3	Adanya Penundaan pemberangkatan transmigran tahun 2020 mengakibatkan penumpukan daftar tunggu	Konsultasi ke kementerian dan Propinsi untuk penambahan kuota, sesuai animo pendaftar

Sumber : Disnakertrans, Kabupaten Bantul 2020

C. FUNGSI PENUNJANG

1. Perencanaan Pembangunan

a. Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan dalam urusan pendidikan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran;
- b) Kegiatan Penyediaan/Jasa Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Kegiatan Pengembangan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;
- b) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
- c) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- d) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perengkapan.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a) Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan

Peningkatan Kapasitas Aparatur.

- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - a) Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan penatausahaan
- 5) Program Pengembangan Data/Informasi**
 - a) Kegiatan penyusunan dan pengelolaan data daerah;
 - b) Kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).
- 6) Program Kerjasama Pembangunan**
 - ❖ Kegiatan penelitian dan pengembangan
- 7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
 - a) Kegiatan perencanaan penganggaran
 - b) Kegiatan perencanaan pembangunan sektoral;
 - c) Kegiatan perencanaan pembangunan kewilayahan.
- 8) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**
 - a) Kegiatan perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri;
 - b) Kegiatan perencanaan ketahanan pangan dan sumber daya alam.
- 9) Program Perencanaan Sosial Budaya**
 - a) Kegiatan perencanaan pembangunan pemerintahan;
 - b) Kegiatan perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Kegiatan perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat.
- 10) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**
 - a) Kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah.

11) Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah

- a) Kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

12) Program Sistem Inovasi Daerah

- a) Kegiatan pengembangan sistem inovasi daerah.

13) Program Peningkatan Akuntabilitas Sistem Kinerja Pemerintah Daerah

- a) Kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah.

b. Realisasi Program dan Kegiatan**1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran pada Bappeda Kabupaten Bantul dan mewujudkan tata kelola administrasi perkantoran yang baik dan terukur.

Anggaran pada program pelayanan administrasi perkantoran sebelum perubahan (murni) sebesar Rp1.445.136.640,- dan setelah perubahan sebesar Rp848.273.575,- terealisasi sebesar Rp784.296.083,- atau sebesar 92,458%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di lingkungan Bappeda Kabupaten Bantul. Pagu anggaran kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp979.646.640,- dan setelah perubahan sebesar

Rp660.013.575,- terealisasi sebesar Rp. 633.030.183,- atau 95,912 %.

b) Kegiatan Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah mendukung pelaksanaan kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi pada Bappeda Kabupaten Bantul, menyediakan prasarana dalam menanggapi tamu dinas dan kegiatan perjalanan dinas yang dilaksanakan baik dalam maupun luar daerah. Pagu anggaran kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp465.490.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp188.260.000,- terealisasi sebesar Rp151.265.900,- atau 80,349%. Anggaran tidak terealisasi secara maksimal karena pandemi covid 19 sehingga koordinasi dan konsultasi dilakukan secara virtual.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Rapat-rapat;
Target 100 laporan rapat terealisasi 89 laporan rapat dikarenakan adanya pandemi covid 19 sehingga dilakukan secara virtual dan anggaran mengalami refocusing.
- (2) Penerimaan tamu;
Rencana target 20 laporan penerimaan tamu namun karena adanya pandemi dan anggaran mengalami refocusing maka hanya terealisasi 5 laporan tamu.
- (3) Perjalan dinas dalam DIY;

Rencana target 70 op namun karena adanya pandemi dan anggaran mengalami refocusing maka hanya terealisasi 5 op.

(4) Perjalanan dinas dalam Bantul;

Realisasi sesuai target yaitu 40 op.

(5) Perjalanan dinas luar daerah (Jakarta, Jabar, luar Jawa);

Rencana target 50 op terealisasi 13 op karena adanya pandemi sehingga pembatasan perjalanan dinas.

(6) Perjalanan dinas wilayah Jateng.

Realisasi sesuai target yaitu 10 op.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur penyelenggara pelayanan pada Bappeda Kabupaten Bantul sehingga dapat mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang nyaman.

Anggaran pada program ini sebelum perubahan (murni) sebesar Rp472.825.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp358.079.060,- terealisasi sebesar Rp319.083.198,- atau sebesar 99.81%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan ruang pelayanan, ruang kerja pegawai dan sarana prasarana lain pada Bappeda

Kabupaten Bantul sehingga mewujudkan lingkungan pelayanan yang tertata, bersih dan nyaman.

Pagu anggaran kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp101.000.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp13.500.000,- terealisasi sebesar Rp11.806.245,- atau 87.454%.

b) Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor. Pagu anggaran kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp115.875.000 dan setelah perubahan sebesar Rp166.429.060,- terealisasi sebesar Rp165.504.060,- atau 99.444%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa pembelian komputer sebanyak 4 unit, AC sebanyak 2 unit, rak arsip sebanyak 4 unit, Kursi tunggu sebanyak 4 unit, Filling kabinet sebanyak 5 unit, mic meja sebanyak 6 unit, printer sebanyak 3 unit, alat sprayer desinfectan elektrik sebanyak 3 unit, web cam sebanyak 3 unit, mixer computer sebanyak 1 unit, tripot kamera DLSR sebanyak 2 unit.

c) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memelihara kendaraan dinas sehingga tersedia kendaraan dinas siap pakai. Pagu anggaran kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp205.950.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp153.150.000,- terealisasi sebesar Rp117.944.893,- atau 77.013 %. Anggaran

tidak terealisasi secara maksimal , karena pandemi sehingga mobilitas pemakaian kendaraan dinas terbatas/berkurang dan realisasi sesuai dengan biaya perpanjangan STNK masing-masing kendaraan.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Pemeliharaan kendaraan roda empat sebanyak 7 unit
- (2) Pemeliharaan kendaraan roda dua sebanyak 22 unit

Pemeliharaan ini terdiri dari belanja jasa servis, belanja suku cadang, belanja bahan bakar minyak, dan belanja pajak kendaraan bermotor.

d) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan dengan baik sehingga memiliki masa pakai yang panjang. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp25.000.000,-, terealisasi sebesar Rp 23.828.000,- atau 95.312 %. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti AC, Printer, Laptop, PC, dll.

3) Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur. Anggaran pada program ini sebelum perubahan (murni) sebesar Rp156.475.000,-, dan setelah perubahan sebesar Rp25.950.000,- terealisasi sebesar Rp 20.950.000,- atau sebesar 80.732%. Anggaran ini tidak terealisasi secara maksimal karena semula direncanakan

Narasumber Nasional, menjadi Narasumber Regional dan Honor Narasumber yang semula 6 JPL menjadi 3 JPL karena pembatasan waktu pertemuan dalam ruang tertutup.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

a) Kegiatan pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimtek dan peningkatan sumberdaya aparatur.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan kompetensi bagi ASN Bappeda Kabupaten Bantul melalui kediklatan.

Pagu anggaran kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp156.475.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp25.950.000,- terealisasi Rp20.950.000,- atau 80.732%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Kegiatan pengiriman peserta diklat/bimtek

Sehubungan adanya pandemi maka hanya bisa mengirim sebanyak dua orang untuk mengikuti bimtek Sinergitas Program SPBE, Smart City dan Satu Data Indonesia. Hasil/kesimpulan bimtek sebagai berikut:

- (a) Pemerintah daerah dituntut harus melakukan inovasi dan transformasi digital di semua layanan agar tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat;
- (b) Kunci utama suksesnya sinergitas smart city, SPBDE, dan satu data ada pada *digital leadership* yaitu pucuk pimpinan yang sudah memiliki pola pikir/*mindset* digital yang bisa menjadi teladan, dan memiliki komitmen

untuk bertransformasi digital;

- (c) Bappeda berperan untuk mengkoordinasikan perencanaan SPBE dan tata kelola data dan manajemen data;
- (d) Pengelolaan data yang baik menjadi pondasi utama sinregitas *smarcity*-SPBE.

(2) Pendampingan dan audit eksternal (ISO)

Kegiatan ini ditiadakan karena adanya pandemi covid-19 dan anggaran mengalami refocusing untuk penanganan covid-19.

(3) Kegiatan peningkatan kapasitas SDM

Kegiatan peningkatan kapasitas SDM bagi ASN Bappeda dilaksanakan melalui Workshop “Proses Bisnis dan Kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul”.

Adapun tujuan workshop tersebut adalah :

- (a) Meningkatkan kualitas perencanaan dengan mendasarkan pada proses bisnis organisasi perangkat daerah Bappeda selaku perangkat daerah yang mempunyai tugas penunjang urusan perencanaan.
- (b) Menyusun program dan kegiatan sesuai proses bisnis diselaraskan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dalam mempertanggungjawabkan atas semua anggaran yang dibebankan kepada instansi dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas di tahun berikutnya, serta sebagai bahan informasi terhadap tingkat keberhasilan/ kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati.

Anggaran pada program ini sebelum perubahan (murni) sebesar Rp16.300.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp8.300.000,- terealisasi sebesar Rp8.072.500,- atau sebesar 97.259%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah mengukur keberhasilan dalam mempertanggungjawabkan atas semua anggaran tahun 2020, dan menjadi bahan informasi terhadap keberhasilan/ kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan/ program/ kebijakan. Pagu anggaran kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp16.300.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp8.072.500,- atau sebesar 97.259%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Penyusunan Laporan kinerja tahun 2019

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 113.32%. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

(2) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2020;

Rencana Kerja Tahunan Bappeda Tahun 2020 ada 13 program dan 23 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp7.034.809.140,-

(3) Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 2020;

Melalui hasil survey ini, diharapkan mendapatkan gambaran pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggan dalam hal ini perangkat daerah dan hasilnya menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan

publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul agar lebih baik. Adapun hasil pengukuran survey kepuasan Bappeda Kabupaten Bantul sebesar 83.87 (baik).

(4) Renja Tahun 2021 dan Renja Perubahan 2020

Ditetapkan dengan Perbup 94 Tahun 2020 untuk Renja PD 2021 dan Perbup 108 Tahun 2020 tentang perubahan Renja PD 2020

(5) CALK tahun 2019

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Organisasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan.

5) Program Pengembangan Data/Informasi

Maksud dan tujuan program ini adalah tersedianya data dan informasi yang akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan. Anggaran pada program ini sebelum perubahan (murni) sebesar Rp657.827.500,- dan setelah perubahan sebesar Rp301.322.500,- terealisasi sebesar Rp 300.750.000 atau sebesar 99.81%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, yaitu:

a) Kegiatan Penyusunan dan pengelolaan data daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini mengkompilasi dan menganalisis data & informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akurat

Pagu anggaran kegiatan ini sebelum perubahan (murni) sebesar Rp311.482.500 dan setelah perubahan sebesar Rp141.607.500,00 terealisasi sebesar Rp141.402.500 atau 99.855%

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(2) Penyusunan Buku Profil Daerah;

Penyusunan buku Profil Daerah Tahun 2020 merupakan gambaran perwujudan suatu daerah, baik kondisi wilayah, potensi sumberdaya, maupun hasil-hasil pembangunan suatu daerah. Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 merupakan masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Bantul secara terpadu dalam melaksanakan program pembangunan. Buku profil ini tidak hanya sebagai media yang menyajikan data dan keadaan umum Kabupaten Bantul, tetapi diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan dan dapat memberikan informasi keberhasilan pembangunan serta pencapaian program pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bantul.

(3) Penyusunan dokumen SIPD.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Biro Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini memuat informasi pembangunan yang ada di

daerah. Dokumen SIPD ini sebagai database dalam perencanaan pembangunan daerah.

(4) Penyusunan kajian Rencana Aksi Menangkap Peluang YIA

Anggaran mengalami refocusing untuk penanganan covid-19 sehingga tidak dilaksanakan.

b) Kegiatan Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah agar penyelenggaraan program/ kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2020 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya

Pagu anggaran kegiatan ini sebelum perubahan (murni) sebesar Rp346.345.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp159.715.000,- terealisasi sebesar Rp159.347.500,- atau 99,770%

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa : penyusunan LKPJ 2019 dan catatan strategis dari DPRD Kabupaten Bantul.

6) Program Kerjasama Pembangunan

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan persentase kerjasama daerah melalui peluang pembiayaan dana non APBD dan non APBN (pihak ketiga atau Lembaga swasta dan BUMN/BUMD). Anggaran pada program ini sebelum perubahan (murni) sebesar Rp155.600.000,- dan setelah perubahan sejumlah Rp34.412.500,- dan terealisasi sebesar Rp 34.097.500,- atau 99.085%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan penelitian dan pengembangan kerjasama daerah

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah meningkatkan pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan serta hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah

Pagu anggaran kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp155.600.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp34.412.500,- terealisasi sebesar Rp34.097.500,- atau 99.085%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

(1) Laporan CSR membangun Bantul;

Laporan CSR ini adalah bentuk kemitraan antara perusahaan dan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendirian forum multistakeholders sebagai konsorsium pelaksana CSR. Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah berkontribusi dalam inovasi dan pembangunan di Kabupaten Bantul sebanyak 43 perusahaan/Lembaga.

(2) Koordinasi, fasilitasi, dan monev pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

Koordinasi, fasilitasi dan monev pengabdian masyarakat yang dilaksanakan perguruan tinggi, termasuk pelayanan izin penelitian, KKN dan PKL. Surat izin yang diterbitkan mencapai 218 izin. Angka ini tidak mencapai target 800 izin, disebabkan adanya aturan baru perubahan perbup yang semula izin PKL ada di Bappeda dialihkan ke OPD penerima PKL berdasarkan Perbup Nomor 134

tahun 2018 tentang Perubahan Perbup Nomor 108 tahun 2017 tentang Izin Penelitian KKN dan PKL.

Jumlah monev KKN dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan kerjasama daerah hanya dilakukan satu kali karena adanya pandemi covid-19

(3) Penyusunan kajian Studi Kelayakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kabupaten Bantul

Anggaran mengalami refocusing untuk penanganan covid 19 sehingga tidak dilaksanakan/ditiadakan.

7) Program Perencanaan pembangunan daerah

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah. Anggaran pada program ini sebelum perubahan sebesar Rp1.549.165.000,- dan setelah perubahan sejumlah Rp778.560.000,- dan realisasi sebesar Rp 740.437.500,- atau 95,10%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Perencanaan penganggaran;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Pagu anggaran kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp1.343.425.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp632.010.000,- terealisasi sebesar Rp622.710.000,- atau 98.529%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;

Terdiri dari:

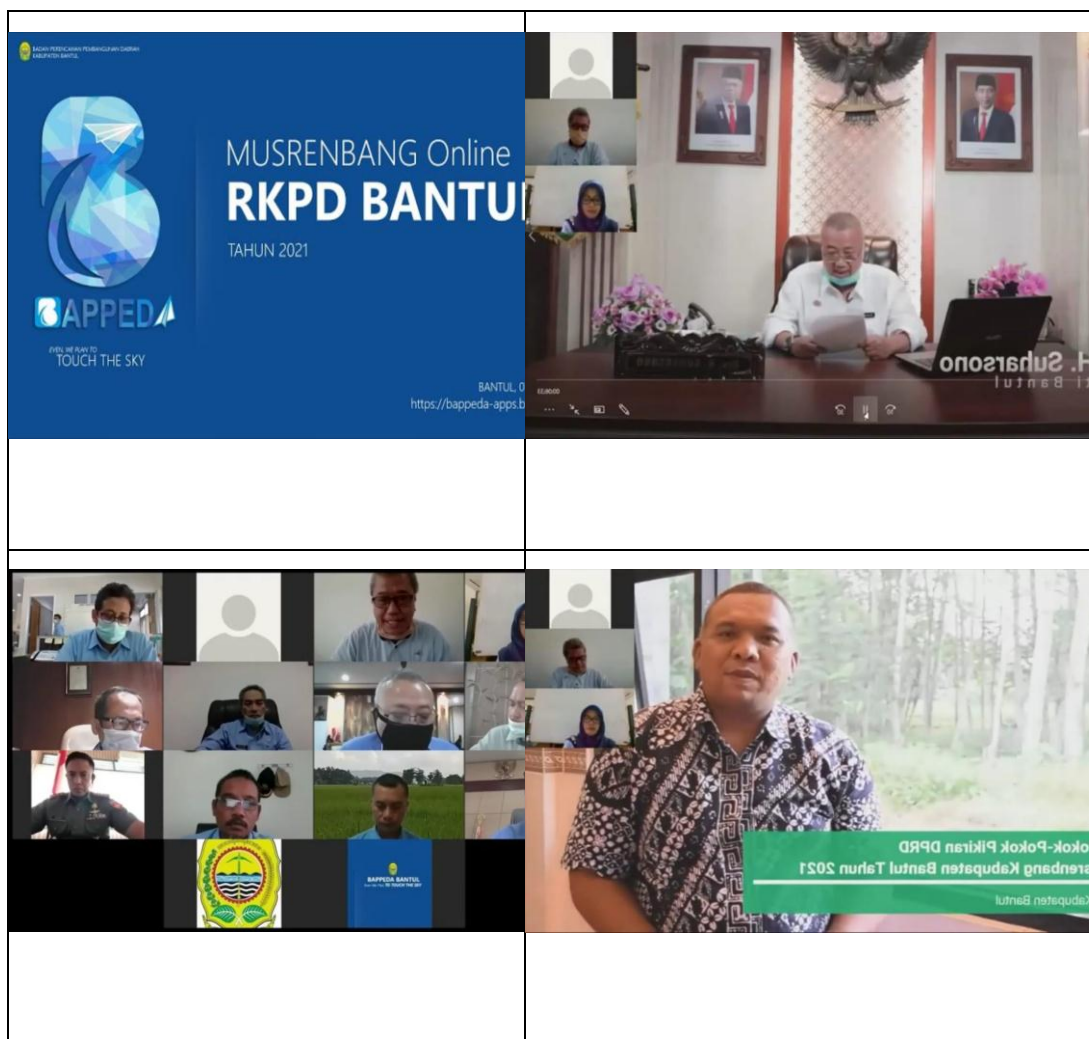
- (a) Penyusunan perubahan RKPD 2020
- (b) Ditetapkan dengan Perbup Nomor 99 Tahun 2020
- (c) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD 2021-2024

Rancangan teknokratik RPJMD merupakan rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disajikan dengan sistematika: 1) Pendahuluan, 2) Gambaran Umum Kondisi Daerah, 3) Gambaran Keuangan Daerah, dan 4) Permasalahan dan Isu Strategis Daerah. Rancangan Teknokratik RPJMD telah dibahas Tim Penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dokumen rancangan Teknokratik RPJMD selanjutnya dikirimkan ke KPU Kab Bantul, untuk disampaikan kepada calon bupati dan wakil bupati sebagai materi penyusunan visi dan misi.

- (d) Penyusunan RKPD 2021
- Ditetapkan dengan Perbup Nomor 75 Tahun 2020

(e) Musrenbang kabupaten

Musrenbang kabupaten untuk menyusun RKPD tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 7 April 2020. Sehubungan adanya pandemi covid-19 maka musrenbang dilaksanakan secara virtual.



Gambar 3. 16 Dokumentasi pelaksanaan musrenbang kabupaten secara virtual

b) Kegiatan perencanaan pembangunan sektoral

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya konsistensi dokumen perencana. Pagu anggaran kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp97.300.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp74.500.000,- terealisasi sebesar Rp62.850.000,- atau 84,362%.

Anggaran tidak terealisasi secara maksimal karena adanya pandemi covid-19 sehingga koordinasi/sosialisasi banyak dilakukan secara virtual. Meskipun anggaran tidak terealisasi secara maksimal namun indikator keluaran dan persentase capaian sasaran daerah bidang perencanaan tercapai sesuai target yaitu 100%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Penyusunan dokumen Renja PD tahun 2021;
Renja 2021 PD ditetapkan dengan Perbup 94 Tahun 2020
- (2) Penyusunan Perubahan Renja PD tahun 2020;
Perubahan Renja 2020 PD ditetapkan dengan Perbup 108 Tahun 2020
- (3) Pendampingan penyusunan program/kegiatan PD:
Pendampingan ini dalam rangka persiapan PD menyusun program/kegiatan yang akan dituangkan ke Renstra PD sesuai dengan proses bisnis PD. Pendampingan diawali dengan overview penyusunan Renstra PD oleh tenaga ahli dari MAP UGM. Selanjutnya disampaikan teknik-teknik dalam menyusun proses bisnis perangkat daerah, cara menggali permasalahan sesuai dengan tugas fungsi PD menggunakan pohon masalah atau metode tulang ikan.

(4) Penyusunan Usulan DAK Fisik Tahun 2021

Usulan DAK Fisik dilakukan melalui Aplikasi Krisna DAK. Beberapa tahapan dalam proses pengusulan DAK sebagai berikut:

- (a) Penyusunan Tim Verifikasi DAK Kabupaten yang terdiri dari Bappeda, BKAD, Bagian Administrasi Pemerintahan dan Inspektorat;
- (b) Perangkat daerah melakukan input usulan DAK Fisik setelah dilakukan sosialisasi dan koordinasi tentang menu-menu kegiatan yang menjadi lokasi prioritas di Kabupaten Bantul. Usulan DAK fisik tahun 2021 dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Kesehatan, DPPKBPM, RSUD Panembahan Senopati, DPUPKP, Dinas Pertanian. Adapun Bidang-bidang yang diusulkan tahun 2021 terdiri dari Bidang Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Permukiman, Jalan, Irigasi, Sanitasi, dan Air Minum.
- (c) Tim Verifikasi Kabupaten melaksanakan verifikasi usulan DAK, dilanjutkan dengan verifikasi oleh DIY dan K/L
- (d) Tahapan berikutnya adalah sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK. Pada tahapan ini usulan Dak ada yang ditolak, diterima dan ada yang perlu didiskusikan. Untuk usulan yang harus didiskusikan maka kabupaten harus melengkapi catatan dari K/L. Kalau catatan K/L tidak dilengkapi maka usulan akan ditolak.

(e) Tahapan terakhir adalah penyusunan Rencana Kegiatan DAK. Rencana Kegiatan DAK yang telah disetujui oleh K/L akan diintegrasikan ke Omspan untuk proses pencairan anggaran DAK.

c) Kegiatan perencanaan pembangunan kewilayahan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kewilayahan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp72.050.000,- terealisasi sebesar Rp54.877.500,- atau 76,166%.

Anggaran kegiatan ini tidak terealisasi secara maksimal, karena adanya aturan pembatasan koordinasi yang semula direncanakan tatap muka dilaksanakan via zoom dan adanya permasalahan teknis terkait aplikasi SIPD yg belum bisa ditindaklanjuti dengan perencanaan 2022 apabila APBD 2021 belum ditetapkan, sehingga kegiatan pelatihan dan input perencanaan 2022 tidak dapat dilaksanakan

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- (1) Verifikasi lapangan terkait usulan kecamatan (pramusrenbang);
- (2) Musrenbang kecamatan
- (3) Penyusunan dokumen usulan prioritas perencanaan kewilayahan desa dan kecamatan,;
- (4) Penyusunan dokumen juknis perencanaan pembangunan kewilayahan dan kamus usulan pagu indikatif kecamatan (PIK) 2022 Kab Bantul.

Dokumen tersebut diinput dalam SIPD, selanjutnya sebagai acuan kalurahan dalam melakukan input usulan kegiatan di aplikasi SIPD.

8) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan ekonomi dalam pembangunan daerah. Anggaran program ini sebelum perubahan sebesar Rp460.325.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp226.675.000,- terealisasi sebesar Rp224.714.175,- atau 99,135%

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya sinkronisasi perencanaan dunia usaha dan industri. Pagu anggaran kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp141.300.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp57.175.000,- terealisasi sebesar Rp55.723.875,- atau 97,462%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Workshop Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL);

Workshop PEL ini bertemakan Pengembangan Produk Lokal dan Pariwisata Berbasis Digital dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantul. Rencana workshop dilaksanakan dua kali , namun hanya bisa terlaksana satu kali karena mengalami refocusing anggaran untuk penanganan covid-19.

Rekomendasi hasil workshop adalah Pemerintah Kabupaten Bantul perlu mendorong penguatan ekonomi dengan memanfaatkan pemasaran digital. Selain itu, diperlukan sinergi antara sektor pertanian,

pariwisata dan UMKM dengan melibatkan masyarakat lokal di desa setempat diperkuat dengan sentuhan inovasi digital akan semakin meningkatkan nilai tambah yang pada akhirnya mengakselerasi pemulihan ekonomi.

(2) Workshop Percepatan Pembangunan Kabupaten Bantul

Pencapaian daya saing daerah yang tangguh guna mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang berkeadilan dan melihat peluang adanya Bandara YIA maka dibutuhkan strategi percepatan pembangunan Kabupaten Bantul yaitu dengan pengembangan JJLS, pengembangan desa wisata dan destinasi wisata baru, dan peningkatan daya saing investasi daerah (Kawasan Industri Piyungan dan Kawasan Peruntukan Industri Sedayu-Pajangan).

(3) FGD Rencana Pengembangan Agrowisata Kebun Buah Nawungan

Persoalan yang ada dalam pengembangan Kebun Buah Nawungan, adalah konsep pengembangan agrowisata yang belum sesuai dengan masterplan yang sudah dibuat, termasuk bagaimana konsep pemberdayaan masyarakat setempat agar potensi-potensi yang dimiliki Desa Selopamiro bisa digali secara optimal, sehingga dapat memberikan hasil maksimal bagi petani, masyarakat desa, pengusaha dan menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Hasil dari FGD ini adalah Pemerintah Kabupaten Bantul perlu untuk melakukan pengembangan agrowisata Kebun Buah Nawungan sebagai salah

satu penghasil pertumbuhan ekonomi pariwisata dan dapat berpeluang untuk menjadi pendorong pertumbuhan sektor pembangunan lainnya, seperti sektor perkebunan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b) Kegiatan perencanaan ketahanan pangan dan sumber daya alam

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya sinkronisasi perencanaan ketahanan pangan dan SDA. Pagu anggaran kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp319.025.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp169.500.000,- terealisasi sebesar Rp168.990.300,- atau 99.699%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Penyusunan KLHAS RPJMD 2021-2024

KLHS tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Menurut UU tersebut, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang, Kebijakan dan Program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko bencana terhadap lingkungan.

Pentingnya KLHS dalam RPJMD diatur dalam Permendagri No 7 Tahun 2018 tentang KLHS dalam

RPJMD. Terdapat beberapa proses yang harus dilalui dalam penyusunan KLHS RPJMD yaitu pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD, pengkajian pembangunan berkelanjutan, perumusan scenario pembangunan berkelanjutan, dan penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS.

Pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam kebijakan, rencana, program RPJMD sangat dibutuhkan agar kelestarian lingkungan tidak berdampak buruk oleh kegiatan pembangunan. Mengingat pentingnya pembangunan berkelanjutan sebagai upaya dalam menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan pembangunan kualitas hidup manusia.

Kegiatan pembuatan KLHS RPJMD Tahun 2021-2024 dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain:

(a) Pembentukan TIM

- *Kick off meeting*
- Pembentukan Tim KLHS RPJMD

(b) Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

- Identifikasi dan pengumpulan data
- Analisis Data
- Uji Publik I

(c) Penyusunan skenario pembangunan berkelanjutan

- Alternatif proyeksi dan penyusunan skenario
- Uji Publik II
- Pembuatan Laporan

(d) Penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi

- Penjaminan kualitas
- Pendokumentasian
- Validasi

(2) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan menanggulangi dampak negatif pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan, perlu diatur mekanisme pemanfaatan kompensasi dampak negatif pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan.

Kegiatan penyusunan Peraturan Bupati dilakukan dengan mengadakan Focus Grup Discussion menghadirkan Akademisi dari PSLH dan Unisa Yogyakarta serta melibatkan sekber kartamantul dan OPD terkait. Perbup ini sudah tersusun dengan ditetapkan Perbup Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan.

9) Program Perencanaan Sosial Budaya

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas perencanaan Sosial dan Budaya.

Anggaran program ini sebelum perubahan sebesar Rp850.325.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp425.685.000,- terealisasi sebesar Rp378.596.500,- atau 88,938%.

Anggaran tidak terealisasi secara maksimal karena adanya pandemi covid 19 sehingga koordinasi/sosialisasi banyak dilakukan secara virtual. Adapun kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yaitu pembinaan kabupaten sehat di lokasi sampel dan koordinasi pengentasan penanggulangan kemiskinan. Meskipun anggaran tidak terealisasi secara maksimal namun indikator keluaran dan persentase capaian sasaran daerah bidang sosial dan budaya tercapai sesuai target yaitu 100%

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan perencanaan pembangunan pemerintahan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya sinkronisasi program/ kegiatan pemerintahan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp77.950.000,- terealisasi sebesar Rp70.775.000 ,- atau 90,795%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Penyusunan dokumen studi IGI;

Studi IGI tidak dilaksanakan karena adanya pandemi covid-19 sehingga anggaran mengalami refocusing untuk penanganan covid-19

(2) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan

Ada dua dokumen yaitu:

- (a) Rencana Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah;
Dokumen Rencana Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah merupakan sebuah dokumen yang berisi rencana pembangunan yang efisien dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan atau biasa disebut dengan *Green Government*.

Green government dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berwawasan lingkungan berkelanjutan, dimana dalam setiap pelaksanaan pembangunan selalu menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan, berpolusi sangat rendah, gedung-gedung bermaterial ramah lingkungan, dan berkontribusi meminimalisir terjadinya *climate change* (perubahan iklim).

Namun demikian konsep ini tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah yang dimiliki, dalam arti pembangunan dapat bersinergi dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan sumberdaya alam yang ada.

- (b) Rencana Pelayanan Pintar

Dokumen Rencana Pelayanan Pintar merupakan sebuah dokumen yang berisi usulan pengembangan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dengan

tujuan untuk semakin memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memanfaatkan layanan pemerintah, khususnya Pemkab Bantul, agar mereka dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan mudah, nyaman, cepat, dan aman. Layanan yang akan disediakan dikhususkan berbasis web, sehingga praktis dan dapat dilakukan dari manapun warga berada. Rencananya berbagai aplikasi yang ada akan diintegrasikan menjadi satu aplikasi saja, sehingga pengguna tidak perlu menginstal aplikasi terlalu banyak.

b) Kegiatan perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pagu anggaran kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp361.475.000 dan setelah perubahan sebesar Rp251.380.000,- terealisasi sebesar Rp225.678.500,- atau 89,776%. Anggaran tidak terealisasi secara maksimal karena adanya pandemi covid-19 yang tidak diperkenankan untuk mengumpulkan banyak orang. Adapun kegiatan tersebut adalah koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

(1) Penyusunan Kajian

Ada dua kajian yaitu:

(a) Perencanaan Pembangunan Kebudayaan

Tujuan kajian ini adalah sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kebijakan, indikasi program dan kegiatan penanganan permasalahan kebudayaan di Kab. Bantul;
- Menyediakan acuan/panduan pengembangan kebudayaan di Kab. Bantul.

Hasil Kajian:

- Pengembangan, pembinaan dan perlindungan Bahasa Jawa.
- Pembuatan Kamus Bahasa Jawa yang dipublikasikan secara luas
- Pembinaan Penutur Bahasa
- Pencanangan ritus sebagai daya tarik wisata budaya
- Pembinaan, perlindungan, dan pemberian bantuan bagi masyarakat yang masih melaksanakan ritus
- Identifikasi dan pendataan cagar budaya
- Perlindungan dan pelestarian untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Perencanaan cagar budaya sebagai objek wisata yang terintegrasi

(b) Perencanaan Pembangunan Sosial Masyarakat

Tujuan kajian ini adalah sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kebijakan, indikasi program dan kegiatan penanganan permasalahan sosial masyarakat di Kab. Bantul;
- Menyediakan acuan/panduan penanganan permasalahan sosial masyarakat di Kab. Bantul..

Hasil Kajian:

Perlunya disusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Bidang Sosial yang terfokus pada Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan agenda aksi dan penekan pada sasaran:

- Mendukung penerapan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan rentan dengan indikator:
 - ❖ Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan;
 - ❖ Meningkatnya persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - ❖ Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat; dan
 - ❖ Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan.
- Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana, dengan indikator:
 - ❖ Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko

- bencana daerah;
- ❖ Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial;
 - ❖ Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial;
 - ❖ Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus;
 - ❖ Penguatan dan peningkatan kapasitas masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan rentan di lokasi pengembangan kawasan strategis: Kawasan Perkotaan Yogya, Bantul Kota Mandiri, GMT-Kajigelem, Kawasan Perindustrian Piyungan-Sedayu, dan Pantai Selatan; dan
 - ❖ Menurunnya Indeks Risiko Bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.

(2) Penyusunan Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD);

Maksud kegiatan ini adalah menyediakan Tenaga Ahli yang memiliki kualifikasi sebagai penyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah menyediakan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2019 sebagai salah satu acuan bagi evaluasi program

maupun kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kab. Bantul.

(3) Buletin Pemberdayaan Masyarakat;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyediakan media informasi berupa buletin yang memuat berbagai informasi tentang program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kab. Bantul. Keluaran dari kegiatan ini adalah penerbitan buletin “Gumregah” sebanyak dua kali pada bulan Juni dan bulan Desember, namun pada Tahun Anggaran 2020 buletin hanya terbit satu kali di bulan Desember akibat *refocusing* anggaran.

(4) Buku TKPK

Maksud dan tujuan disusunnya Buku TKPK adalah menyediakan pedoman pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan sampai tingkat desa. Adapun jumlah buku yang dicetak sebanyak 1049 buku. Buku TKPK ini didistribusikan untuk TKPK Kec. (17), TPK Desa (75) & TPK Dusun (933);

Buku ini bisa dijadikan acuan kegiatan desa yang dianggarkan dlm APBDes (operasional TPK).

(5) Penyusunan Draf Peraturan Bupati Tentang Bantuan Pangan & Sandang Bagi Warga Miskin

Kegiatan ditiadakan karena mengalami *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemic covid-19.

(6) Penyusunan Draf Peraturan Bupati Tentang Bantuan Perumahan Bagi Warga Miskin

Kegiatan ditiadakan karena mengalami *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemic covid-19.

(7) Penyusunan Draf Peraturan Bupati Tentang Bantuan

Peningkatan Ketrampilan Bagi Warga Miskin

Kegiatan ditiadakan karena mengalami refocusing anggaran untuk penanganan pandemic covid-19

c) Kegiatan perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan kesejahteraan rakyat. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 96.355.000,- terealisasi sebesar Rp 82.143.000,- atau 85,250%. Anggaran tidak terealisasi secara maksimal karena adanya pandemi covid-19 yang tidak diperkenankan untuk mengumpulkan banyak orang. Adapun kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan adalah pembinaan kabupaten sehat di lokasi sample.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Penyusunan Laporan Kabupaten Sehat;

Perencanaan, pembinaan teknis, monitoring, evaluasi dan penyusunan dokumen pelaporan Program Kabupaten Sehat atas dasar Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat yang memuat 10 tatanan meliputi:

- (a) Kawasan Permukiman. Sarana dan prasarana umum di lokasi Dusun Sindet, Trimulyo, Jetis;

- (b) Kawasan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri, Ketahanan Pangan dan Gizi, di lokasi Dusun Ngelosari, Srimulyo;
- (c) Kawasan Pasar di lokasi Pasar Semampir, Sedayu;
- (d) Kawasan Pendidikan di lokasi SMP 1 Bantul;
- (e) Kawasan Kehidupan Sosial yang Sehat dan Penanganan Bencana di lokasi Dusun Mertosanan, Potorono;
- (f) Kawasan Transportasi dan Tata Tertib Lalu Lintas Jalan di jalur perempatan Gose sampai dengan terminal Palbapang;
- (g) Kawasan Perkantoran, Perindustrian (IKM) dan UMKM di lokasi Dusun Kajen Kasongan, Bangunjiwo;
- (h) Kawasan Pariwisata di lokasi Becici, Dlingo;
- (i) Kawasan Rumah Ibadah di lokasi Masjid Jamasba Bantul;
- (j) Kawasan Kota Pintar (Smart City) di lokasi Desa Srimulyo dan Guwosari.

(2) Penyusunan Laporan Monev Kesra;

Perencanaan, pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi bidang kesehatan, kebudayaan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

(3) Penyusunan Laporan Monev SDG's;

Perencanaan, monitoring, evaluasi dan penyusunan dokumen pelaporan Sustainable Development Goals (SDGs) atas dasar Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 136) yang memuat 17 tujuan SDGs.
Penyusunan Laporan Monev RAD PG;

Perencanaan, monitoring, evaluasi dan penyusunan dokumen pelaporan Program Pangan dan Gizi atas dasar Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Pangan Dan Gizi yang meliputi aspek:

- (a) Gizi Masyarakat;
 - (b) Akses Pangan;
 - (c) Mutu dan Keamanan Pangan;
 - (d) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan;
 - (e) Kelembagaan.
- (4) Perencanaan, pembinaan teknis dan monitoring, evaluasi dan pelaporan Aksi Konvergensi Penanggulangan Stunting atas dasar Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 HPK yang dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan Aksi Konvergensi Penanggulangan Stunting.

10) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui satu sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp166.200.000,- terealisasi sebesar Rp159.895.000,- atau 96.206 %.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

(1) Penyusunan kajian

Ada 4 (empat) kajian namun adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid 19 maka hanya ada satu kajian yang terlaksana yaitu kajian *Feasibility Studi Underpass* Sedayu.

Kajian tersebut untuk mengetahui layak tidaknya underpass dibangun di Desa Argorejo Sedayu. Underpass itu adalah jalan/terowongan di bawah lintasan kereta api. Masyarakat di Desa Argorejo selama ini kehidupan seolah terputus adanya rel kereta api tersebut. Mereka menginginkan masyarakat tetap bisa melakukan aktifitas yg normal dan baik dengan dibangunnya underpass.

Kelayakan dalam kajian ini tidak hanya mempertimbangkan faktor teknis, namun banyak variable bahwa FS tersebut layak atau tidak. Selain hal teknis, kondisi alam, juga kondisi masyarakat sosial dan

ekonomi. Banyak area potensi wisata seperti kerajinan sangkar burung dan wisata desa lainnya yang lintas desa bisa lebih bagus apabila melewati underpass dan hasil FS ini bisa dilaksanakan /layak dengan beberapa catatan/persyaratan sebagai rekomendasi.

- (2) Fasilitasi koordinasi sekber Kartamnatul;
- (3) Fasilitasi pembentukan forum perumahan dan kawasan permukiman;
- (4) Koordinasi penyiapan rediness kriteria lahan untuk pembangunan fisik bngunan gedung /non gedung.

11) Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah

Maksud dan tujuan program ini adalah pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan.

Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya capaian daerah di RKPD dengan predikat tertinggi . Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp65.750.000,- terealisasi sebesar Rp 63.752.500,- atau 96,962 %.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Penyusunan laporan DAK
- (2) Penyusunan evaluasi hasil RKPD
- (3) Peyusunan hasil evaluasi RPJMD

12) Program Sistem Inovasi Daerah

Maksud dan tujuan program ini adalah mengembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah baik itu dari pemerintah daerah, lembaga (litbang, pendidikan, dunia usaha), dan masyarakat..

Program Sistem Inovasi Daerah dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan pengembangan sistem inovasi daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya IPTEKMAS yang diterapkan di masyarakat . Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 46.907.500,- terealisasi sebesar Rp 46.815.000,- atau 99.803 %.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

(1) Penyusunan Jurnal Riset Daerah;

Penerbitan jurnal riset sebanyak 4 (empat) buku edisi jurnal riset.

(2) Jumlah pengembangan teknologi kerjasama dengan perguruan tinggi sebanyak 2 teknologi

Pengembangan teknologi dengan perguruan tinggi yang diangkat pewarnaan batik alami dengan UPN Veteran Yogyakarta yang bekerjasama dengan pengrajin batik di desa Caturharjo Pandak saat ini sudah masuk tahun ke 5 dan akan berakhir ditahun ini.

Untuk tehnologi terakhir dari pengembangan batik pewarna alami adalah metode pemasaran dan pengenalan produk secara digital.

Selain Caturharjo dikembangkan juga di desa Trimulyo Jetis dengan merangkul perajin batik

Nitik yang diberikan teknologi mesin pelorot otomatis.

(3) Jumlah koordinasi dengan PD terkait dalam pengembangan Slda.

Agenda tahunan yang dilaksanakan bersama PMD dalam hal teknologi tepat guna untuk masyarakat yang dilaksanakan dengan gelar lomba TTG.

13) Program Peningkatan Akuntabilitas Sistem Kinerja Pemerintah Daerah

Maksud dan tujuan program ini adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Program Peningkatan Akuntabilitas Sistem Kinerja Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memfasilitasi dan koordinasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bantul . Kegiatan ini dilaksanakan melalui 4 (empat) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 429.127.500,- terealisasi sebesar Rp 428.505.000,- atau 99.855 %.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten tahun 2019;

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD). Tahun 2019 bagi Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021. RPJMD tersebut sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Sasaran pembangunan daerah merupakan terjemahan dari visi pembangunan Kabupaten Bantul selama lima tahun yaitu “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Sasaran pembangunan daerah merupakan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Terdapat 15 sasaran sebagaimana dimuat dalam RPJMD Kabupaten Bantul, yaitu: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas; Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi; Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas; Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu; Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas; Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul; Terciptanya industri kreatif yang berkualitas; Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat; Terpenuhinya kebutuhan perikanan

masyarakat; Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat; Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas; Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana;

Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang; Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat; Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

Laporan ini memberikan informasi capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul sekaligus bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pembangunan secara berkesinambungan.

(2) Penyusunan dokumen RKT kabupaten;

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah merupakan penjabaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Tahun 2020 berisi materi rencana strategis, yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan memperhitungkan potensi, tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020 ini diharapkan pelaksanaan teknis kegiatan OPD Kabupaten Bantul dapat lebih terencana, terpola, terpadu dan terukur.

(3) Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja kabupaten

(4) Fasilitasi evaluasi kinerja PD

c. Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2016-2020

Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah di bidang perencanaan dan fungsi penunjang daerah di bidang penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan.

Hasil pelaksanaan program urusan perencanaan pada akhirnya akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul. Hasil pelaksanaan program/kegiatan urusan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 3. 119 Anggaran dan Realisasi Tahun 2016-2020

	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Pagu Anggaran					
Sebelum perubahan	8.000.417.000	8.537.441.000	10.563.993.000	9.667.282.000	7.034.809.140
Setelah perubahan	7.752.602.000	8.537.441.000	10.659.993.000	9.718.781.500	3.715.242.635
Realisasi (Rp) / %	6.179.850.387 (79,71%)	7.723.158.924 (90,46%)	9.569.876.078 (89,77%)	8.917.046.482 (91,765%)	3.509.964.956 (94,475%)

d. Keberhasilan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan

Keberhasilan perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai program kegiatan sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Akuntabilitas Sistem Kinerja Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menerima penghargaan dari KemenPAN-RB RI, berkat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat A.

Penghargaan diterima di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Senin (24/2/2020) lalu. Bupati Bantul, Suharsono menandakan, perolehan ini adalah hasil kerja keras, serta komitmen semua pihak sehingga kinerja Pemkab terus meningkat dan lebih baik. Penghargaan ini, diharapkan bisa memotivasi jajarannya, dalam melayani warga masyarakat. Predikat memuaskan yang dicapai ini menunjukkan bahwa seluruh OPD di lingkungan Pemkab Bantul telah bekerja dengan baik, secara efektif, efisien dan akuntabel dalam menggunakan anggaran. Terdapat lima tolok ukur dalam proses penilaian, yakni, dari sisi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelampiran kinerja, evaluasi internal, maupun pencapaian kinerja.

Tambahnya, kelima cakupan itu, memiliki bobot penilaian yang berbeda-beda. Setelah dijumlahkan, Pemkab Bantul mendapat nilai 81,91, dengan interpretasi memuaskan, sekaligus memimpin perubahan berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Semua OPD memberikan kontribusi signifikan atas penghargaan ini.



Gambar 3. 17 penerimaan penghargaan dari Men PAN-RB

Bupati Bantul, Suharsono, menerima penghargaan dari Men PAN-RB, Tjahjo Kumolo, di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Senin (24/2/2020)



Gambar 3. 18 Penghargaan predikat “Kabupaten Sangat Inovatif”.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Litbang menetapkan Bantul dengan predikat “Kabupaten Sangat Inovatif”.

e. Permasalahan dan Solusi

Gambar 3. 19 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Perencanaan Pembangunan

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Adanya aplikasi baru dari Kemendagri yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Aplikasi tersebut masih banyak kendala dalam pengoperasional menyebabkan kesulitan mengimput data ke aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Salah satu kendala adalah SIPD berbasis online yang membutuhkan jaringan internet kuat dan tentunya laptop yang berkapasitas atau spek tinggi. Sistem berbasis online itu diterapkan berdasarkan Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang Implementasi SIPD mewajibkan seluruh pemda pemrov/kab/kota mengadopsi penyusunan APBD (perencanaan anggaran, pembiayaan penganggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan money/evaluasi). Termasuk selaras dengan PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Mewajibkan Penerapan SIPD, apabila tidak dikenakan sanksi penundaan transfer dau (dana perimbangan bersumber pusat). SIPD juga akan menjadi fokus aplikasi yang digunakan pada tahun 2021 mendatang.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman dan niat yang sama agar amanat regulasi ini dapat tercapai dengan baik sebagaimana amanat pemerintah pusat bahwa SIPD ini sebagai perangkat yang diharapkan sebagai instrumen yang dpt mempermudah penyenggaraan APBD dengan berbasis 1 data - Koordinasi dengan Kemendagri secara kontinyu - Aplikasi Sepakat tetap digunakan untuk membackup data yang sudah dientry di SIPD.

2. Keuangan

a. Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan dalam urusan Penunjang Keuangan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran.
 - b) Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi.
 - c) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran.
- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan.
 - b) Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional.
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan.
- 3) **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - a) Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.
- 4) **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, terdiri dari 5 kegiatan yaitu :
 - a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kependidikan dan Ketatausahaan.
 - b) Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Keuangan Daerah.
 - c) Penyaluran Belanja PPKD.
 - d) Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur.
 - e) Pendataan dan Pengelolaan Arsip.
- 5) **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**, terdiri dari 34 Kegiatan, dan terdapat 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan karena refocusing untuk penanganan covid 19, sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyusunan KUA-PPAS.
- b) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- c) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.
- d) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- e) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- f) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- g) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- h) Kegiatan Peningkatan manajemen investasi daerah.
- i) Kegiatan Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD.
- j) Kegiatan Penyusunan anggaran kas.
- k) Kegiatan Penerbitan SPD.
- l) Kegiatan Penerbitan SP2D.
- m) Kegiatan TPTGR.
- n) Kegiatan Penyusunan neraca dinas / instansi.
- o) Kegiatan Penyusunan SPT Tahunan.
- p) Kegiatan Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
- q) Kegiatan Operasional pajak daerah.
- r) Kegiatan Penyusunan laporan semesteran.
- s) Kegiatan Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21).
- t) Kegiatan Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah.
- u) Kegiatan Pengendalian PAD.
- v) Kegiatan Optimalisasi pendapatan daerah.
- w) Kegiatan Pelayanan pajak daerah.

- x) Kegiatan Verifikasi Piutang Pajak Daerah.
- y) Kegiatan Pendataan dan penetapan wajib pajak.
- z) Kegiatan Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.
- aa) Kegiatan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.
- bb) Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai.
- cc) Kegiatan Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi (kegiatan tidak dilaksanakan karena refocusing).
- dd) Kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB P2.
- ee) Kegiatan Pengelolaan Belanja ASN.
- ff) Kegiatan Rekonsiliasi data laporan.
- gg) Kegiatan Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa.
- hh) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD.

6) Program Pengelolaan Barang Daerah

Program ini meliputi 8 kegiatan, terdapat 2 kegiatan yang tidak dilaksanakan karena refocusing , sebagai berikut:

- a) Kegiatan Peningkatan SDM aparatur Pemda (kegiatan tidak dilaksanakan karena refocusing)
- b) Kegiatan Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang.
- c) Kegiatan Penataan aset.
- d) Kegiatan Penghapusan barang daerah.
- e) Kegiatan Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah.
- f) Kegiatan Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah.
- g) Kegiatan Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah.
- h) Kegiatan Penyusunan regulasi pengelolaan BMD (kegiatan tidak dilaksanakan karena refocusing).

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyediakan sarana prasarana operasional perkantoran untuk mendukung kelancaran pelayanan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp33.395.338.000,- terealisasi sebesar Rp30.969.056.510,50,- atau 92,73%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan honor pengelola keuangan dan barang, meterai dan benda pos, buku cek, jasa surat menyurat, pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum, barang cetakan, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bahan dan peralatan kebersihan, alat tulis kantor, komponen instalasi listrik, penggandaan dan langganan surat kabar.

b) Penyediaan Rapat – rapat, Koordinasi dan Konsultasi.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyediakan sarana prasarana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp286.695.000,- terealisasi sebesar Rp193.615.990,- atau 67,53%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi perjalanan dinas dan berkurangnya pelaksanaan makan minum rapat dan tamu karena dampak covid-19. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan fasilitas rapat dan tamu serta penyediaan akomodasi perjalanan dinas.

c) Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyediakan pembayaran honor tenaga PHL dan pembayaran premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.050.912.000,- terealisasi sebesar Rp1.017.484.565,- atau 96,82%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa pembayaran honor tenaga PHL beserta pembayaran premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana penunjang kegiatan kerja. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp538.414.400,- terealisasi sebesar Rp506.708.750,- atau 94,11%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

b) Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyediakan jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp408.097.500,- terealisasi sebesar Rp323.125.659,- atau 79,18%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sejumlah 13 unit dan roda 2 sejumlah 56 unit.

c) Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyediakan jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp39.518.000,- terealisasi sebesar Rp22.635.000,- atau 57,28%. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi perbaikan peralatan dan mesin. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa perbaikan peralatan dan mesin.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan cakupan kapasitas aparatur. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

a) Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyelenggarakan implementasi peraturan perundang-undangan serta mendukung peningkatan disiplin dan kapasitas SDM aparatur ASN. Pagu anggaran kegiatan ini semula dianggarkan sebesar Rp34.508.300,- dan karena adanya pandemi Covid-19 maka kegiatan ini difocusing menjadi sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan cakupan nilai evaluasi kinerja. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyusun dokumen perencanaan, laporan kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp3.500.000,- terealisasi sebesar Rp3.450.000,- atau 98,57%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

b) Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Keuangan Daerah.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyediakan informasi untuk kepentingan publik yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp33.500.000,- terealisasi sebesar Rp33.150.000,- atau 98,96%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa penyebarluasan informasi keuangan daerah melalui media cetak dan media online.

c) Penyaluran Belanja PPKD.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyediakan fasilitas operasional dalam penyaluran belanja PPKD. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp5.250.000,- terealisasi sebesar Rp5.245.000,- atau 99,90%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa koordinasi dan sosialisasi terkait penyaluran belanja PPKD.

d) Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyediakan dokumen SOP. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp2.487.500,- terealisasi sebesar Rp1.260.000,- atau 50,65%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi pelaksanaan rapat selama

pandemi covid-19. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa koordinasi dan penyusunan dokumen SOP.

e) Pendataan dan Pengelolaan Arsip.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mendata, mengelola dan menata arsip kedinasan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp15.000.000,- terealisasi sebesar Rp14.994.000,- atau 99,96%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan sarana penataan arsip.

5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Maksud dan tujuan program ini adalah:

- Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Daerah.
- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis Akrual.
- Meningkatnya kapasitas fiskal daerah.
- Meningkatnya kemampuan keuangan daerah.
- Penyerapan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah sesuai dengan anggaran kas.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Penyusunan KUA-PPAS.

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah Menyusun dokumen KUA-PPAS. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp101.035.000,- terealisasi sebesar Rp89.117.500,- atau 88,20%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

KUPA tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 17 September tahun 2020 nomor 903/03836 atau 903/819 dan PPAS Perubahan pada tanggal 17 September tahun 2020 nomor 903/03837 atau 903/820. KUA tahun 2021 ditetapkan tanggal 10 November 2020 nomor 903/04676 atau 903/1048 dan PPAS ditetapkan tanggal 10 November 2020 nomor 903/03837 atau 903/820.

b) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah Menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat selama periode tahun 2021. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp74.156.250,- terealisasi sebesar Rp58.747.500,- atau 79,22%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

Rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 disusun dan dikoordinator oleh BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Dasar hukum penyusunan APBD Tahun 2021 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada tahun 2021 kode rekening dan nomenklatur kegiatan mengalami pemutakhiran sesuai yang diamanatkan dalam Kepmendagri Nomor 050-

3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, telah dilaksanakan dan dibahas serta disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disepakati, selanjutnya dievaluasi oleh Gubernur DIY kemudian dilakukan penyempurnaan. Raperda tersebut ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020 menjadi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

Selain penyusunan Raperda APBD Tahun 2021, juga dilakukan penggandaan dokumen Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebanyak 55 buku.

c) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah Menyusun rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp74.902.500,- terealisasi sebesar Rp55.660.300,- atau 74,31% . Hal ini disebabkan adanya efisiensi pada uang lembur, makan minum rapat dan makan minum pelatihan. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun oleh BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD). Dasar hukum penyusunan APBD Tahun 2021 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan an Keuangan Daerah. Pada tahun 2021 kode rekening dan nomenklatur kegiatan mengalami pemutakhiran sesuai yang diamanatkan dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2021 sama dengan proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2020. Seperti halnya rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD tahun 2021 sebelum ditetapkan menjadi peraturan KDH juga dilakukan evaluasi oleh Gubernur DIY.

Tujuan dilakukan evaluasi ini adalah tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya. Setelah dilakukan pembenahan rancangan peraturan bupati ini sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur DIY, pada tanggal 30 Desember 2020 ditetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021. Peraturan Bupati tersebut sebagai

landasan operasional OPD dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan pada tahun 2021.

Selain penyusunan Raperbup penjabaran APBD Tahun 2021 juga dilakukan pengandaan Raperbup tentang Penjabaran APBD tahun 2020 dan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sebanyak 55 buku.

d) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah menyusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp37.513.750,- terealisasi sebesar Rp30.827.500,- atau 82,17%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2020. Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2020 disusun oleh BKAD dalam melaksanakan tugas sebagai PPKD bersama TAPD, sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Bantul menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan tersebut berupa perubahan anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu Perangkat Daerah.

Landasan hukum penyusunan rancangan peraturan daerah ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2020 disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara Bupati Bantul dan DPRD

Kabupaten Bantul atas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Rancangan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun 2020 disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan disepakati bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan antara Bupati Bantul dan pimpinan DPRD.

Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dievaluasi oleh Gubernur DIY dan dilakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tersebut sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur DIY. Pada tanggal 19 Oktober 2020, rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. Pada kegiatan ini dilakukan penggandaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2020 sebanyak 55 buku.

e) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Menyusun rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp40.870.000,- terealisasi sebesar Rp33.200.000,- atau 81,23%.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas peraturan daerah Kabupaten Bantul tentang perubahan APBD. Rancangan peraturan bupati mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun anggaran 2020 telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 137 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD dijadikan landasan operasional pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan.

Penyusunan meliputi cetak dan penggandaan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2020 sebanyak 55 buku.

f) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul selama tahun anggaran 2020. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp96.550.000,- terealisasi sebesar Rp91.275.000,00,- atau 94,54%. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD melingkupi kegiatan berupa:

- (1) Konsolidasi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah; dan
- (2) Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

g) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyusun penjelasan lebih rinci dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun 2020. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp50.745.000,- terealisasi sebesar Rp50.152.500,-

atau 98,83%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Koordinasi, konsolidasi dan penyusunan uraian terperinci terkait pelaksanaan APBD di Kabupaten Bantul; dan
- (2) Koordinasi dengan legislatif mengenai informasi pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bantul.

h) Kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah.

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah Pemanfaatan *idle cash*. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp11.112.500,- terealisasi sebesar Rp10.742.500,- atau 96,67%. kegiatan yang dilaksanakan berupa peningkatan manajemen investasi daerah yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 496 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bank Umum Untuk Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito terdapat 9 (sembilan) bank sebagai bank umum yang ditunjuk untuk penempatan deposito yaitu PT. Bank BRI Persero Cabang Utama Yogyakarta, PT. BPD DIY Cabang Bantul, PT. Bank BTN Persero Cabang Yogyakarta, PT. Bank Bukopin Cabang Yogyakarta, PT. Bank MANDIRI, PT. Bank Mandiri Taspen, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Yogyakarta, dan PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. Landasan hukum untuk mengoptimalkan uang daerah yang belum dipergunakan untuk diinvestasikan dalam jangka pendek berbentuk deposito adalah Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun

2017 Tentang Penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito pada Bank Umum.

Selama tahun 2020 dari pemanfaatan uang daerah yang belum digunakan atau pemanfaatan idle cash yang diinvestasikan dalam jangka pendek atau dalam bentuk deposito di 9 bank mitra bank telah diperoleh penerimaan bunga deposito sebesar Rp. 14.803.652.940,92 dengan target Rp. 12.000.000.0000,00 atau tercapai 123%

Pada tanggal 25 November 2020 dilaksanakan Penandatanganan MoU oleh Pjs Bupati Bantul atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul dengan 5 pimpinan mitra perbankan. Dengan penandatanganan MoU tersebut diharapkan akan bersinergi antara kepentingan Pemerintah Kabupaten dengan kepentingan bank yang semuanya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul. Penandatanganan MOu tersebut dilanjutkan dengan acara penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan 5 pimpinan mitra perbankan yaitu Bank BPD DIY Cabang Bantul, Bank BTN, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri.

i) Kegiatan Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD.

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah Pencermatan kesesuaian antara kode rekening dengan kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp4.990.000,- terealisasi sebesar Rp1.239.000,- atau 24,83%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat berkurang selama pandemi covid-19.

Pada Kegiatan ini dilaksanakan pencermatan dan penerbitan atas rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

(DPPA) yang telah disusun oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran. Pada Kegiatan ini telah dilaksanakan pencermatan dan penerbitan DPA/DPPA SKPD sebanyak 58 DPA dan 58 DPPA SKPD. DPA/DPPA SKPD. Pada tahun 2021 sistem Aplikasi Sep@kat akan diganti dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) dari Kemendagri.

j) Kegiatan Penyusunan anggaran kas.

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah mengatur aliran kas masuk dan keluar. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp2.000.000,- terealisasi sebesar Rp325.000,- atau 16,25% Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat berkurang selama pandemi covid-19. Kegiatan penyusunan anggaran kas dilaksanakan oleh BKAD dalam melaksanakan salah satu ketugasan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD). Anggaran kas mengatur ketersediaan dana sebagai perkiraan arus kas masuk dari pendapatan daerah untuk mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan sebagai perkiraan arus kas keluar.

Kegiatan ini telah berhasil menyusun dua buku anggaran kas yaitu buku anggaran kas berdasarkan APBD tahun 2020 dan buku anggaran kas berdasarkan Perubahan APBD tahun 2020, masing-masing digandakan sebanyak 10 eksemplar.

k) Kegiatan Penerbitan SPD.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menerbitkan SPD sesuai alokasi anggaran. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.312.500,- terealisasi sebesar Rp680.000,- atau 51,81%

Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat berkurang selama pandemi covid-19.

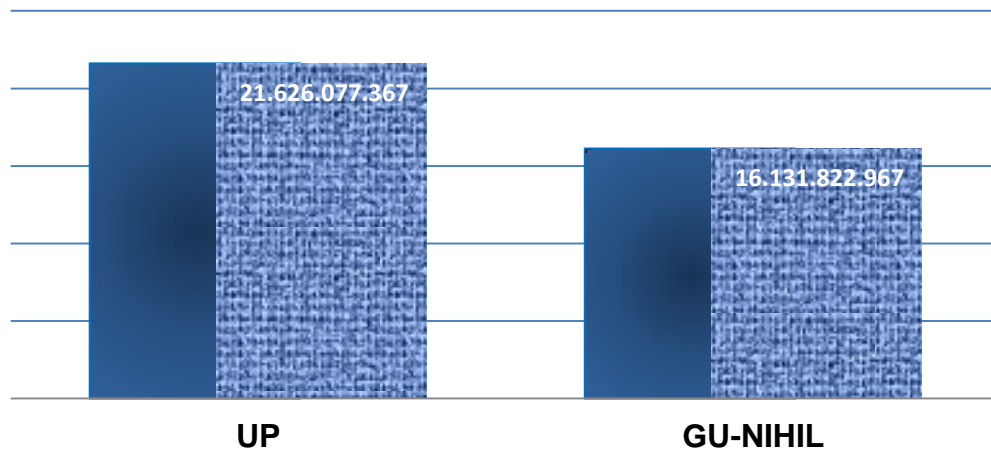
Manajemen kas berdasarkan anggaran kas Pemerintah Kabupaten Bantul tahun anggaran 2020 yang telah ditetapkan didukung dengan terlaksananya kegiatan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD). SPD diterbitkan untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang disiapkan dan diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dan ditandatangani oleh Kepala BKAD selaku PPKD. Selama tahun 2020 telah diterbitkan 811 SPD dengan jumlah dana yang disediakan sebesar Rp2.277.235.871.000,17 untuk 58 Perangkat Daerah dan PPKD.

l) Kegiatan Penerbitan SP2D.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mempercepat penyerapan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp72.712.500,- terealisasi sebesar Rp72.277.500,- atau 99,40%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa Penerbitan SP2D sebagai dasar pencairan dana atas beban pengeluaran DPA/DPPA SKPD dan DPA/DPPA PPKD.

Kegiatan penerbitan SP2D merupakan salah satu ketugasan Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dilimpahkan kepada Bidang Perbendaharaan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 476 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 541 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020. Selama tahun 2020 kegiatan ini telah melaksanakan verifikasi atas kebenaran dokumen SPM dan kelengkapan sesuai dengan persyaratan

yang diatur peraturan yang diajukan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa PA dengan mempergunakan aplikasi Sistem Elektronik Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja Terintegrasi (Sepak@t)-2020.



Grafik 3. 16 SP2D GU Nihil dan SP2D TU Nihil

Uang Persediaan (UP) yang diajukan oleh seluruh perangkat daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2020 tentang Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp21.626.077.367,00 dan pada akhir tahun anggaran perangkat daerah telah mengajukan SPM Nihil sebagai bentuk pertanggungjawaban belanja daerah dengan mempergunakan UP.

Berdasarkan SPM GU Nihil telah diterbitkan SP2D GU Nihil sebesar Rp16.131.822.967,00 atau UP yang diberikan kepada seluruh perangkat daerah pada akhir tahun anggaran telah dipertanggungjawabkan sebesar 75% sedang sisa UP sebesar 25% telah disetor ke Kas Daerah.

Selama tahun 2020 berdasarkan dokumen SPM Tambah Uang yang diajukan Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran ke Kuasa BUD telah diterbitkan SP2D Tambah Uang sebesar Rp26.978.338.139,- dan telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp26.663.967.617,- dengan diterbitkan SP2D TU Nihil atau sebesar 98,83% dari nilai SP2D TU dipertanggungjawabkan serta sisa dana yang disetor ke Kas Daerah sebesar 1,17%.

m) Kegiatan TPTGR.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah pemantauan pemulihan kerugian daerah. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp6.762.500,- terealisasi sebesar Rp1.000.000,- atau 14,47%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat berkurang selama pandemi covid-19. Selain itu terdapat pelaksanaan kegiatan yang tertunda berupa pelaksanaan tagihan kerugian daerah untuk mantan anggota DPRD. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan untuk memperlancar pemulihan kerugian akibat kesalahan bendahara, PNS bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya akibat dari perbuatannya yang secara langsung telah merugikan keuangan daerah maka diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain kegiatan ini telah melakukan Pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

Sebagai tindak lanjut salah satu hasil pemantauan BPK terhadap penyelesaian kerugian daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul telah disusun draf Surat Keputusan Bupati Bantul yang ditetapkan menjadi Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 426 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 542 Tahun 2019 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 427 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 543 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selain dari aspek regulasi kegiatan ini telah menyusun 2 (dua) laporan kerugian daerah yaitu laporan semester I dan semester II, ke-dua laporan tersebut sudah disampaikan kepada BPK RI Kantor Wilayah Yogyakarta dan Gubernur Provinsi DIY. Tahun 2020 berdasarkan pencatatan bendahara penerimaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan telah diverifikasi oleh Tim Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah kerugian daerah yang telah disetor ke Kas Daerah sebanyak Rp69.943.416,-.

n) Kegiatan Penyusunan neraca dinas / instansi.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pelaporannya di seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp5.637.500,- terealisasi sebesar Rp4.872.500,- atau

86,43%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Monitoring dan pendampingan kepada OPD dalam pelaksanaan akuntansi keuangan OPD;
- (2) Koordinasi dan desk terkait penyusunan laporan keuangan di OPD terkait.

Kegiatan ini masih terkendala pada pemahaman dari masing-masing unsur dalam pengelolaan keuangan di OPD yang masih belum memadai, sehingga menjadi menjadi tantangan kedepan untuk lebih meningkatkan sosialisasi, koordinasi dan edukasi kepada OPD.

o) Kegiatan Penyusunan SPT Tahunan.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyusun dan mendistribusikan form 1721-A2. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp70.305.000,- terealisasi sebesar Rp70.305.000,- atau 100%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan SPT masa bulan desember tahun 2019 dan pendistribusian form 1721-A2 sebanyak 11.283 lembar. Formulir 1721-A2 ini telah didistribusikan ke seluruh PNS/CPNS sebagai salah satu dasar dalam penyusunan SPT tahunan (tahun 2019) yang dilaporkan ke Kantor Pajak Pratama dengan pemanfaatan e-filing yaitu penyampaian SPT secara elektronik melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing dilaksanakan agar dapat menghindari antrian yang panjang saat pelaporan, Selain itu sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota

Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia melalui e-filling.

p) Kegiatan Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.500.000,- terealisasi sebesar Rp0,- atau 0%. Kegiatan ini tidak di laksanakan dikarenakan belum ditetapkannya pengganti Permendagri no 13 tahun 2006 sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.

q) Kegiatan Operasional pajak daerah.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemasukan pajak daerah ke kasda. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp72.432.500,- terealisasi sebesar Rp62.453.500,- atau 86,22%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Workshop Peningkatan Kapasitas SDM;

Workshop Peningkatan Kapasitas SDM dilaksanakan dengan peserta petugas pajak daerah BKAD Kab.Bantul Di Omah Cebong pada tanggal 8 Februari 2020 untuk meningkatkan pelayanan pajak kepada masyarakat.

(2) Koordinasi dengan PHRI (Pengusahan Hotel Resto Indonesia).

Koordinasi dengan PHRI (Pengusahan Hotel Resto Indonesia) dilaksanakan di Numani Resto pada tanggal 17

September 2020 Keterkaitan akan diberlakukannya kembali pemungutan pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak parkir yang sebelumnya dengan adanya Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir pada Masa Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Bantul, keempat pajak tersebut mendapat pengurangan pajak 100% atas omset April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober.

(3) Optimalisasi PBB-P2 Tanah Kas Desa dan Pelungguh

Adanya Optimalisasi PBB P2 untuk tanah kas desa dan pelungguh dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2020 Tentang :

Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2020 yang mensyaratkan sebagai berikut :

- (a) Tahap I harus melunasi (PBBP2) untuk Tanah Desa (Kalurahan) yang terdiri atas tanah kas, pelungguh, pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum tahun pajak sebelumnya.
- (b) Tahap II harus melunasi (PBBP2) untuk Tanah Desa (Kalurahan) yang terdiri atas tanah kas, pelungguh, pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum tahun pajak 2020

Hal itu dilakukan dikarenakan jumlah piutang yang berasal dari tanah kas desa dan pelungguh cenderung meningkat selama lima tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 120 Jumlah Piutang dari Tanah Kas Desa dan Pelungguh

TAHUN	JUMLAH NOP	NOMINAL PIUTANG
2015	3.924	1.094.085.904
2016	3.730	1.035.647.736
2017	3.550	1.304.859.984
2018	2.847	1.192.852.167
2019	3.254	2.320.685.199
TOTAL	17.305	6.948.130.990

Sumber : Bidang Penagihan dan Pemeriksaan 2020

Perkembangan saldo realisasi pembayaran PBB-P2 atas tanah kas desa dan pelungguh tahun 2020 setelah dikeluarkan aturan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 121 Realisasi Pembayaran PBB-P2 atas Tanah Kas Desa dan Pelungguh

Total Ketetapan	Faktor Pengurang	Pbb Yang Harus Dibayar	Pembayaran	Saldo Piutang
6.146.638.997	3.942.217.938	2.204.421.059	2.160.722.507	43.698.552

Sumber : Bidang Penagihan dan Pemeriksaan 2020

(4) Pembentukan Data Piutang PBB P2 by Obyek

Data Piutang PBB Per 31 Desember 2019 hanya mampu melaporkan saldo piutang per kecamatan. Secara akuntansi, hal tersebut menyulitkan proses pengelolaan data piutang PBB P2 karena saldo yang ada di pelaporan akuntansi akan berbeda dengan detail by NOP yang ada di SISMIOP.

Sehingga pada awal tahun 2020 dilakukan penataan database piutang Pajak PBB- P2 sehingga bisa disajikan per obyek pajak, dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Dengan terincinya data piutang per objek maka kedepan akan dapat dilakukan verifikasi data dan Analisa atas ketertagihan piutang.

r) Kegiatan Penyusunan laporan semesteran.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyusun laporan realisasi anggaran semester I dan prognosis enam bulan berikutnya guna memberikan informasi capaian pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah sebagai informasi pelaksanaan dan perkiraan keuangan semester berikutnya. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp2.400.000,- terealisasi sebesar Rp2.200.000,00 atau 91,67%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Koordinasi terkait laporan realisasi keuangan OPD semester 1,
- (2) Koordinasi tentang prognosis pelaksanaan APBD enam bulan berikutnya.

s) Kegiatan Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21).

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemasukan dana bagi hasil PPh OP. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp4.650.000,- terealisasi sebesar Rp4.650.000,- atau 100%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Bimtek Bagi Hasil (PPh Pasal 21)

Bimtek Bagi Hasil (PPh Pasal 21) ini dilaksanakan di Aula Bank Bantul pada tanggal 10 Februari 2020 yang diikuti oleh Pegawai Bidang Penagihan dan Pemeriksaan

dan Pegawai Pelayanan dan Penetapan BKAD Kabupaten Bantul sebanyak 80 Orang. Tujuan pelaksanaan diharapkan dengan bimtek ini dapat meningkatkan Dana Bagi Hasil yang masuk ke Kabupaten Bantul.

t) Kegiatan Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah pencermatan dan kajian revisi DPA. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp12.692.500,- terealisasi sebesar Rp7.825.000,- atau 61,65%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat berkurang selama pandemi covid-19. Adapun bentuk dan uraian kegiatan berupa pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu pelaksanaan kewenangan PPKD selaku BUD, sehingga kegiatan yang dilaksanakan seluruh OPD dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini telah menghasilkan pencermatan dan penerbitan 233 revisi DPA/DPPA. Tahun 2020 terdapat banyak revisi DPA/DPPA dari OPD dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk fokus terhadap penanganan wabah covid-19, sesuai dengan amanat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka dari itu banyak anggaran dari kegiatan yang difocusing ke kegiatan yang mendukung percepatan penanganan covid-19.

u) Kegiatan Pengendalian PAD.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kerjasama yang selama ini terjalin antara BKAD, IPPAT, BPN dan KPP Pratama Bantul dan meningkatkan pemahaman SDM pengelola pajak daerah tentang pajak. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp9.987.500,- terealisasi sebesar Rp4.800.000- atau 48,06% . Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat berkurang selama pandemi covid-19. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Sosialisasi Peraturan Bupati No 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan PBB P2 kepada dukuh dan perangkat desa di Gedung Induk Mandala Saba Lantai III pada tanggal 4-5 Maret 2020. Dikeluarkannya Peraturan Bupati tersebut diatas menjadikan jumlah pengajuan pengurangan PBB P2 atas nama kas desa dan tanah lungguh menjadi sangat banyak, tercatat jumlah NOP yang diajukan mencapai sekitar 13.000. Adanya Wabah Covid 19 juga menjadikan jumlah pengajuan pengurangan PBB P2 perseorangan juga meningkat. Adapun SK pengurangan PBB P2 yang dikeluarkan oleh BKAD sebanyak :

- (a) SK Pengurangan PBB P2 Kolektif sebanyak 140

- (b) SK Pengurangan PBB P2 Perseorangan 354

(2) Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan PPAT/Notaris

Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan PPAT/Notaris diselenggarakan di Aula Bank Bantul pada tanggal 11 Februari 2020 yang bertujuan untuk agar BKAD dan PPAT bisa bersinergi lebih baik untuk meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak. Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 97 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Badan Keuangan dan Aset Daerah memproses permohonan pengurangan dan keringanan atas peralihan hak milik, sebagai berikut:

- (a) SK Pengurangan BPHTB (Hibah) 320 SK
- (b) SK Keringanan BPHTB (Waris) 391 SK

v) Kegiatan Optimalisasi pendapatan daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pendapatan asli daerah. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yakni Rekonsiliasi Pajak Daerah, Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bimbingan Teknis kepada Wajib Pajak Daerah. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp17.165.000,- Realisasi sebesar Rp16.990.000,- atau 98,98%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Rekonsiliasi pajak daerah yang dihadiri petugas pengampu pajak daerah dengan koordinator pendapatan kecamatan sebanyak 12 (dua belas) kali kegiatan selama 1 (satu) tahun;
- (2) Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

dihadiri Inspektorat, Bappeda dan Organisasi Perangkat Daerah penghasil PAD sebanyak 12 (dua belas) kali kegiatan selama 1 (satu) tahun;

Gambar 3. 20 Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Sumber : Bidang Pelayanan dan Penetapan 2020

w) Kegiatan Pelayanan pajak daerah.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan pajak daerah yang semakin baik dan sesuai SOP. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp317.174.000,- terealisasi sebesar Rp309.545.500,- atau 97,59%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

Pelayanan Pajak Daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan publik kepada Wajib Pajak di Kabupaten Bantul. Pajak Daerah meliputi 11 jenis pajak dengan rincian:

Tabel 3. 122 Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2020

No	Jenis Pajak	Jumlah	Keterangan
1	PBB P2	7945	Permohonan pelayanan
2	BPHTB	12239	Permohonan pelayanan
3	Pajak Reklame	378	Pendaftaran Obyek Pajak Baru
4	Pajak Restoran	33	Pendaftaran Obyek Pajak

No	Jenis Pajak	Jumlah	Keterangan
			Baru
5	Pajak Hotel	6	Pendaftaran Obyek Pajak Baru
6	Pajak Parkir	3	Pendaftaran Obyek Pajak Baru
7	Pajak MBLB	21	Pendaftaran Obyek Pajak Baru
8	Pajak Air Tanah	14	Pendaftaran Obyek Pajak Baru
9	Pajak Hiburan	2	Pendaftaran Obyek Pajak Baru
10	Pajak Sarang Burung Walet	0	Pendaftaran Obyek Pajak Baru
11	Pajak Penerangan Jalan	0	Pendaftaran Obyek Pajak Baru

Sumber : Bidang Pelayanan dan Penetapan 2020

Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan seperti menyediakan ruangan pelayanan dengan tata ruang yang lebih representatif dan nyaman, kursi tunggu, serta menyediakan berbagai blangko antara lain blangko permohonan pajak daerah, surat setoran pajak daerah, blangko validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dan lain lain.

Selain peningkatan kualitas pelayanan tersebut diatas, terdapat juga beberapa inovasi dalam peningkatan pelayanan prima terhadap wajib pajak, yang terdiri dari sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Aplikasi untuk memudahkan dalam pembukuan pelaporan serta pengarsipan data atas wajib pajak yaitu dengan melakukan pemeliharaan aplikasi SIMPATDA;



Gambar 3. 21 SIMPATDA

Sumber : Bidang Pelayanan dan Penetapan 2020

- (2) Membangun Aplikasi Web Service Pajak Reklame untuk monitoring pelaporan dan pembayaran yang dapat langsung terintegrasi antara BAPPEDA, BKAD , dan DPMPT
- (3) Membangun Aplikasi PBB Online guna menggantikan Aplikasi sebelumnya yaitu SISMIOP, sehingga pengelolaan dapat di ampu secara maksimal menggunakan aplikasi SmartGov PBB.
- (4) Membangun Aplikasi BPHTB Online guna dapat mendukung kegiatan HOST To HOST dengan Kantor Pertanahan. Hal ini sebagai wujud integrasi dan transparansi atas pelaporan dan pembayaran BPHTB.

x) Kegiatan Verifikasi Piutang Pajak Daerah.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemasukan PBB P2 yang terhutang. Kegiatan ini terdiri dari empat sub kegiatan yaitu cetak tagihan piutang PBB P2, distribusi tagihan piutang PBB P2, proses barcode scanner dan stimulan penyampaian piutang PBB P2. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp290.825.000,- terealisasi sebesar

Rp178.469.000,- atau 61,37%. Hal ini disebabkan karena pencairan jasa tim intensifikasi PBB berdasarkan pada surat yang telah disampaikan dukuh kepada setiap Wajib Pajak. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Tercetaknya Tagihan Piutang PBB P2 sebanyak 335.247 lembar.
- (2) Terdistribusinya tagihan Piutang PBB P2 ke 75 Desa di Kabupaten Bantul



Gambar 3. 22 Distribusi Piutang PBB P2 ke 75 Desa

Sumber : Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Tahun 2020

- (3) Proses barcode scanner pengembalian struk tagihan Piutang PBB P2 dari Desa.
- (4) Pengembalian bagi Dukuh dan Desa untuk memastikan tersampaikan Tagihan PBB P2 (Stimulan Penyampaian Piutang PBB P2).

y) Kegiatan Pendataan dan penetapan wajib pajak

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah wajib pajak dan objek pajak baru serta mengoptimalkan wajib pajak yang ada. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp4.750.000,- terealisasi sebesar Rp2.650.000,- atau 55,79%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat berkurang selama

pandemi covid-19. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Pendataan subyek dan obyek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Air Tanah.

Kegiatan pendataan dilakukan dengan mendatangi tempat usaha wajib pajak dan melihat potensi omset usaha wajib pajak dimana setiap kunjungan dilakukan menggunakan form pendataan. Data yang diperoleh dari kegiatan pendataan selanjutnya dikukuhkan sebagai wajib pajak dengan menerbitkan kartu NPWPD

- (2) Sosialisasi kepada wajib pajak mengenai ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pajak daerah, kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, dan hak-hak wajib pajak.

z) Kegiatan Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mempercepat pemasukan PBB P2 dan pajak daerah yang lain ke kasda. Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp3.842.420.000,- terealisasi sebesar Rp2.974.907.600,- atau 77,24%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Pengadaan Penghargaan Kepada Wajib Pajak Lunas PBB berupa 17 unit sepeda motor untuk Desa Lunas PBB P2 100%. Di Tahun 2020 untuk Lunas PBB P2 100% ada 210 Dusun, 17 Desa dan 1 Kecamatan. 17 Desa yang mendapat

(2) Penghargaan Lunas PBB P2 100% yaitu

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1) Desa Dlingo | 10) Desa Tirtomulyo |
| 2) Desa Muntuk | 11) Desa Murtigading |
| 3) Desa Temuwuh | 12) Desa Gading Sari |
| 4) Desa Mangunan | 13) Desa Gadingharjo |
| 5) Desa Jatimulyo | 14) Desa Wonolelo |
| 6) Desa Terong | 15) Desa Bawuran |
| 7) Desa Donotirto | 16) Desa Imogiri |
| 8) Desa Tirtohargo | 17) Desa Girirejo |
| 9) Desa Tirtosari | |

i

h

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa penataan dan perluasan ruang pelayanan (ruang klarifikasi wajib pajak dan ruang tunggu)

(4) Pengadaan Alat Perangkat Lunak untuk posko keliling pembayaran PBB P2

(5) Reward untuk Dukuh, Desa, dan Kecamatan atas Realisasi PBB P2 (Stimulus PBB P2) dan reward Realisasi PBB Pencapaian 90%-100% (Stimulan PBB P2).

(6) Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Pajak Daerah dengan peserta petugas pajak daerah di Hotel Grand Dafam Rohan pada tanggal 21 November 2020

(7) Layanan Mobil Keliling Pajak Daerah

Layanan Mobil keliling menjangkau masyarakat pedesaan yang tidak terjangkau oleh layanan bank, Tidak hanya melayani pada jam kerja, dan Menggunakan pendekatan Citizen Charter,

dimana kebutuhan masyarakat yang akan dilayani menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan jadwal dan lokasi layanan.

Tabel 3. 123 Realisasi Pembayaran melalui melalui Mobil Keliling Pada Tahun 2020

NO	Kecamatan	SPPT	Nominal
1	SRANDAKAN	8.367	504.285.551
2	SANDEN	6.175	437.410.344
3	K R E T E K	14.990	935.433.903
4	PUNDONG	20.429	800.631.117
5	BAMBANGLIPURO	13.212	505.619.468
6	PANDAK	14.067	689.869.878
7	BANTUL	7.496	739.696.884
8	J E T I S	21.364	1.000.747.595
9	IMOGIRI	20.778	968.742.108
10	DLINGO	5.493	251.509.011
11	PLERET	11.235	742.790.771
12	PIYUNGAN	13.604	1.368.175.969
13	BANGUNTAPAN	6.277	1.578.250.398
14	SEWON	10.095	1.148.062.678
15	KASIHAN	10.351	1.223.891.154
16	PAJANGAN	4.104	284.960.373
17	SEDAYU	1.863	171.863.970
Total		189.900,00	13.351.941.172,26

Sumber : Bidang Penagihan dan Pemeriksaan 2020

aa) Kegiatan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan PBB. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.723.578.000,- terealisasi sebesar Rp1.721.942.500,- atau 99,91%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan sesuai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2).

Pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB P2 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain sebagai berikut:

- (1) Cetak masal SPPT PBB pada tanggal 02 Januari 2020 dimulai dengan mencetak Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), dilanjutkan dengan pencetakan SPPT PBB P2 dengan QR Code.

Rekapitulasi ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah:

1. Jumlah Objek Pajak : 646.903
2. Jumlah SPPT : 635.831
3. Luas Bumi : 378.233.695 m²
4. NJOP bumi : 58.640.537.073,-
5. Luas Bangunan : 13.111.358 m²
6. NJOP Bangunan : 7.232.791.872,-
7. Ketetapan PBB : 70.902.092.667,-

Jumlah SPPT PBB tahun pajak 2020 dari yang tercetak sejumlah 635.831 lembar terealisasi sebanyak 505.441 lembar atau 79%.

Penyerahan secara simbolis SPPT PBB dilaksanakan tanggal 03 Maret 2020 bertempat di Gedung induk lantai 3 oleh Bupati Bantul kepada perwakilan desa, pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak Panutan pembayaran PBB awal tahun 2020, Penyerahan secara simbolis dimaksudkan agar masyarakat Bantul dan pemangku kepentingan mengetahui bahwa SPPT PBB P2 tahun 2020 telah disampaikan ke Pemerintah Desa yang dilanjutkan dengan pendistribusian kepada wajib pajak.

- (2) Sosialisasi tentang inovasi dan jadwal pelaksanaan serta perubahan aturan mengenai pengelolaan PBB P2 dilakukan setelah tersampainya SPPT PBB P2 ke seluruh wilayah desa Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilakukan menjadi 4 waktu berdasarkan jatuh tempo pembayaran PBB P2, dengan mengundang Camat, Lurah Desa, Perangkat Desa yang membidangi PBB P2, serta dukuh.
- (3) Monitoring penyampaian SPPT PBB P2 kepada masyarakat, dilaksanakan di gedung induk lantai 3 pada tanggal 9 September 2020.
Selain untuk mengetahui apakah SPPT PBB P2 telah tersampaikan semua ke wajib pajak kegiatan ini juga bertujuan memberikan semangat bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Kemudian dilakukan pengundian hadiah utama sepeda motor sejumlah 22 unit kepada wajib pajak PBB P2 di setiap kecamatan.
- (4) Pelayanan terhadap wajib pajak PBB P2 juga dilaksanakan dengan membuka pelayanan di kantor terkait mutasi, perubahan, pembetulan, penghapusan, keberatan, serta pengurangan atas SPPT PBB P2. Dari semua pelayanan tersebut telah disediakan segala bentuk blangko permohonan PBB P2.

bb) Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemasukan dana bagi hasil cukai. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp205.340.390,- terealisasi sebesar Rp193.632.000,-

atau 94,30%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Covid-19 melalui media Baliho dan Spanduk.
- (2) Sosialisasi Pembrantasan Cukai Ilegal melalui media Baliho, spanduk, Iklan layanan Masyarakat Melalui Media Cetak dan Media Elektronik.

cc) Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyusun pedoman kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan sesuai dengan perundang-undangan. Pagu anggaran kegiatan ini semula dianggarkan sebesar Rp9.112.500,- dan karena adanya pandemi Covid-19 maka kegiatan ini difocusing menjadi sebesar Rp0,- terealisasi sebesar Rp0,- Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak ada rekomendasi dari BPK untuk melakukan koreksi kebijakan akuntansi, sehingga anggaran kegiatan ini difocusing untuk penanganan kasus covid-19.

dd) Kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB P2.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan validitas data subjek dan objek pajak PBB. Pagu anggaran kegiatan ini semula dianggarkan sebesar Rp256.200.000,- dan karena adanya pandemi Covid-19 maka kegiatan ini difocusing menjadi sebesar Rp10.000.000,- terealisasi sebesar Rp10.000.000,- atau 100%. Kegiatan ini hanya melaksanakan penilaian obyek khusus PBB P2 sejumlah 24 (dua puluh empat) Objek Pajak yaitu pencetakan blanko-blanko

yang diperlukan untuk penilaian objek khusus tersebut, dikarenakan adanya refocusing anggaran maka pemeliharaan Basis Data PBB P2 di wilayah desa-desa se Kabupaten Bantul tidak dilaksanakan.

ee) Kegiatan Pengelolaan Belanja ASN.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menertibkan penyaluran belanja gaji dan tunjangan ASN. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp4.267.500,-terrealisasi sebesar Rp3.012.500,- atau 70,59%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat berkurang selama pandemi covid-19. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa Pengelolaan gaji PNS di Kabupaten Bantul meliputi proses pembuatan dan pencetakan daftar gaji induk bulanan dan kekurangan gaji mempergunakan aplikasi SIM Gaji dari PT Taspen (Persero).

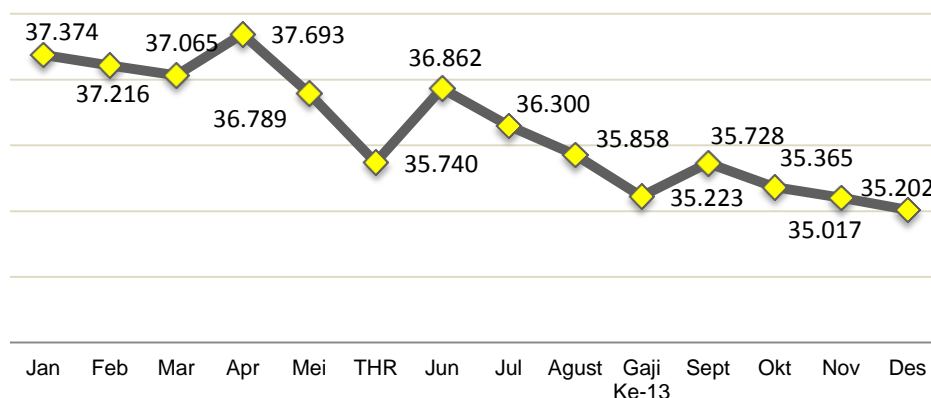
Dengan mempergunakan aplikasi SIM Gaji Taspen maka sistem pengadministrasian gaji dan tunjangan PNSD dilaksanakan dengan lebih mudah, cepat, dan akurat selain itu juga memberi kemudahan penyajian data terkait potongan perhitungan pihak ketiga yang disetor ke Kas Negara dan PT TASPEN (pesero) Cabang Yogyakarta selaku pengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Ketepatan jumlah potongan PFK yang disetor mempermudah pelaksanaan rekonsiliasi luran Wajib Pegawai (IWP) dan penyampaian data base gaji PNSD yang harus dilaporkan secara detail meliputi gaji PNSD dan rekap PNSD sebagai salah satu syarat dalam perhitungan DAU.

Selama tahun 2020 kegiatan pengelolaan gaji ASN telah mencetak daftar penerimaan gaji dan tunjangan per unit kerja

sebanyak 157 daftar gaji setiap bulannya termasuk daftar penerimaan gaji bulan ketigabelas dan daftar gaji Tunjangan Hari Raya (THR). Pencetakan daftar gaji tersebut dilaksanakan satu bulan sebelum gaji PNS/CPNS disalurkan.

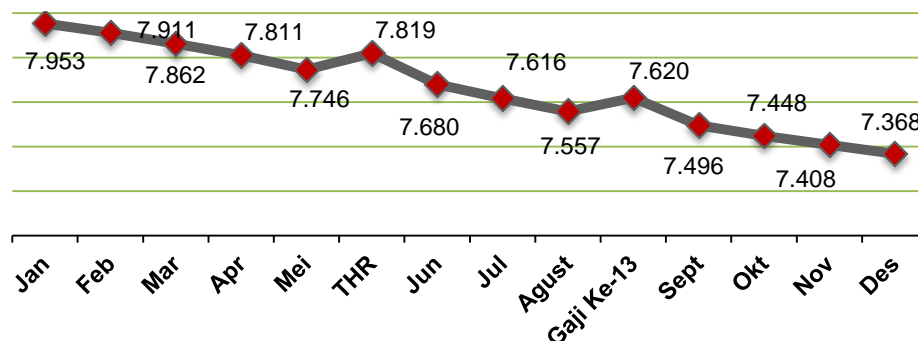
Kegiatan pengelolaan gaji ASN telah menyalurkan gaji induk, gaji bulan ke-tiga belas, gaji Tunjangan Hari Raya, gaji susulan, dan kekurangan gaji setiap bulan kepada PNS/CPNS dengan tepat waktu dan tertib administrasi. Realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2020 sebesar Rp507.433.145.156,- adapun realisasi perbulan adalah sebagai berikut:

Grafik 3. 17 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNSD (Jutaan Rupiah) Tahun 2020



Sumber : Bidang Perbendaharaan 2020

Grafik 3. 18 Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2020



Sumber : Bidang Perbendaharaan 2020

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bantul Selama tahun 2020. kegiatan ini juga melakukan penyetoran atas semua potongan gaji yang melekat di daftar penerimaan gaji PNSD/CPNS berupa Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang dibayarkan ke Kas Negara dan PT TASPEN (PESERO) Cabang Yogyakarta selaku pengelola program JKK dan JKM secara tepat waktu. Rincian penyetoran ke Kas Negara dan PT TASPEN (PESERO) Cabang Yogyakarta atas pemotongan gaji selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 124 Realisasi Penyetoran PFK Gaji Tahun 2020

No	Uraian	Nilai
1	PPh Ps 21	Rp 2.528.799.288,00
2	Taperum	Rp 482.067.000,00
3	Taspen	Rp 27.926.269.086,00
4	Askes	Rp 3.814.462.447,00
5	JKK	Rp 771.164.681,00
6	JKM	Rp 2.313.497.665,00
Total		Rp 37.836.260.167,00

Sumber : Bidang Perbendaharaan 2020

Setiap bulan selama tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengirim data gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan yang diterima seluruh PNSD dalam bentuk Arsip Data Komputer (ADK) yang diambil dari SIM Gaji TASPEN dan rekap gaji dan tunjangan dalam bentuk PDF yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Data yang tersaji dalam ADK meliputi seluruh aktivitas gaji dan tunjangan PNSD pada setiap bulan. Pengiriman data gaji dan tunjangan PNSD lewat aplikasi SIKD setiap bulan sebagai tindak lanjut dari diterbitkan Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2018 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Data Pegawai Sipil Daerah Secara Elektronik Melalui Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Upaya yang telah dilaksanakan oleh BKAD untuk untuk terwujudnya tertib administrasi bagi PNS yang purna tugas, mutasi dan sebagainya sehingga tidak menyebabkan terjadi keterlambatan pembayaran pensiunan bagi PNS yang purna tugas, pembayaran gaji di instansi luar Kabupaten Bantul bagi PNS yang mutasi ke luar daerah dan sebagainya kegiatan ini pada tahun 2020 telah menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran sebanyak 640 dokumen terdiri dari:

- (1) 600 SKPP untuk PNS dengan BUP;
- (2) 16 SKPP untuk PNSD yang meninggal dunia
- (3) 16 SKPP untuk PNSD yang pensiun dini; dan
- (4) 8 SKPP untuk PNSD yang mutasi ke luar Kabupaten Bantul

ff) Kegiatan Rekonsiliasi Data dan Laporan.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan akuntabilitas data dan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dengan melakukan perbandingan data untuk semua OPD dan Pemerintah Daerah mempergunakan sistem yang terpadu. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp17.325.000,- terealisasi sebesar Rp14.117.500,- atau 81,49%. Bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa koordinasi dan rekonsiliasi data dan laporan dari masing masing Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul.

gg) Kegiatan Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan ketersediaan dana transfer. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp5.895.000,- terealisasi sebesar Rp3.545.000,-. atau 60,13%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat

berkurang selama pandemi covid-19. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa Pengelolaan dana Transfer yang merupakan salah satu komponen pendapatan daerah sebagai pemberi kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah. Tujuan dari dana transfer daerah dan dana desa yang disalurkan kepada pemerintah daerah oleh Pemerintah Pusat antara lain:

- (1) Meningkatkan kapasitas fiskal daerah;
- (2) Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah;
- (3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah;
- (4) Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pasca bencana;
- (5) Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar.

hh) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah di masing-masing Perangkat Daerah. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp42.687.500,- terealisasi sebesar Rp41.905.000,- atau 98,16%. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan berupa peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas di lingkungan pengelola keuangan kabupaten Bantul khususnya bendahara pengeluaran yang pelaksanaannya pada tanggal 2 Desember 2020 bertempat di puncak Becici, Dlingo, Kabupaten Bantul. Bertujuan untuk membangun

semangat bekerja bagi tim Pengelola Keuangan BKAD dan seluruh SKPD Kabupaten Bantul.

Selain kegiatan tersebut juga dilaksanakan pendampingan bagi SKPD yang mengalami permasalahan dalam penatausahaan belanja melalui aplikasi Sepak@t.

6) Program Pengelolaan Barang Daerah

Maksud dan tujuan program ini adalah terinventarisasinya aset Perangkat Daerah. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Peningkatan SDM aparatur Pemda.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas SDM pengurus barang. Pagu anggaran kegiatan ini semula dianggarkan sebesar Rp26.050.000,- dan karena adanya pandemi Covid-19 maka kegiatan ini difocusing menjadi sebesar Rp0,- terealisasi sebesar Rp0,-. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya larangan pengumpulan massa selama pandemi covid-19 sehingga pagu anggaran difocusing untuk penanganan covid-19

b) Kegiatan Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyusun dokumen sebagai dasar perencanaan kebutuhan BMD n+1. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp14.977.500,- terealisasi sebesar Rp6.070.000,- atau 40,52%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat berkurang selama pandemi covid-19. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Pengumpulan data perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan data pemeliharaan barang milik daerah tahun 2020 yang digunakan sebagai acuan penganggaran belanja modal dan pemeliharaan di SKPD
- (2) Kompilasi laporan aset dan persediaan minimal per semester di semua pengurus barang SKPD, Puskesmas, Sekolah (450 laporan)

c) Kegiatan Penataan aset.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah pemanfaatan aset sesuai dengan peruntukannya. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp25.500.000,- terealisasi sebesar Rp12.372.500,- atau 48,52%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat berkurang selama pandemi covid-19. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Koordinasi, pencatatan serta rekomendasi atas mutasi dari, ke dan antar SKPD;
- (2) Koordinasi dan pengadministrasian atas barang dari non APBD; dan
- (3) Evaluasi dan tindak lanjut atas pemanfaatan aset (pinjam pakai, sewa dll).

d) Kegiatan Penghapusan barang daerah.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan efisiensi biaya pemeliharaan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp142.250.000,- sebesar Rp78.880.600,- atau 55,45%. Hal ini disebabkan karena efisiensi untuk belanja sewa sarana mobilitas darat, pengumuman lelang dan transportasi akomodasi. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Pengumpulan data aset/persediaan yang akan dihapus;
- (2) Koordinasi dan cek atas aset / persediaan yang akan dihapus berbasis data aplikasi;
- (3) Pengambilan BMD, dilanjutkan penilaian BMD yang akan dihapus;
- (4) Pelelangan aset / persediaan yang akan dihapus;
- (5) Usulan Penghapusan BMD/Persediaan dari Database;
dan
- (6) Monitoring dan pelaporan.

e) Kegiatan Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan akurasi data aset tetap. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp407.700.000,- terealisasi sebesar Rp388.337.000,- atau 95,25%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Inventarisasi atas pengadaan BMD baru.
- (2) Pengadministrasian (usulan penggunaan, usulan pemanfaat dll) atas BMD baru.
- (3) Monitoring dan evaluasi.

f) Kegiatan Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan validitas data aset SKPD. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp163.470.000,- terealisasi sebesar Rp146.090.000,- atau 89,36%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa;

- (1) Rekonsiliasi BMD dan Persediaan di semua pengurus barang (SKPD, Sekolah, Puskesmas);

- (2) Rekonsiliasi dilakukan dengan cek data SPJ dan data yang dientry di SIMAS dan SIMPERSADA.
- (3) Rekonsiliasi cek data penghapusan antara SK Penghapusan dan data di SIMAS dan SIMPERSADA.
- (4) Penerbitan BA (Berita Acara) rekonsiliasi BMD dan Persediaan per semester (900 BA per semester).
- (5) Penyimpanan dan pengadministrasian data
- (6) Monitoring dan Evaluasi.

g) Kegiatan Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan keamanan dokumen BMD. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp7.480.000,- terealisasi sebesar Rp250.000,- atau 3,34%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat berkurang selama pandemi covid-19. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Pengadministrasian dan pengamanan dokumen aset (BPKB, Sertifikat tanah dll);
- (2) Pelayanan pinjam perpanjangan BPKB;
- (3) Monitoring dan pengamanan aset non aset bergerak; dan
- (4) Evaluasi dan pelaporan.

h) Kegiatan Penyusunan regulasi pengelolaan BMD.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyusun peraturan tentang pengelolaan BMD. Pagu anggaran kegiatan ini semula dianggarkan sebesar Rp40.592.500,- dan karena adanya pandemi Covid-19 maka kegiatan ini difocusing menjadi sebesar Rp0,- terealisasi sebesar Rp0,-. Kegiatan ini

ditunda pelaksanaannya karena difocusing untuk penanganan covid-19.

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016-2020

Hasil pelaksanaan program pemerintahan urusan keuangan pada akhirnya akan memberikan dampak positif di Kabupaten Bantul. Dampak ini berupa dapat tercapainya sasaran daerah yang di implementasikan kedalam indikator kinerja bupati yang di laksanakan oleh BKAD Kabupaten Bantul. Hasil pelaksanaan program pemerintahan urusan keuangan tersebut sebagai berikut:

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKAD Kabupaten Bantul selama 5 Tahun ini adalah sebagai berikut:

1) Target dan Realisasi Belanja Langsung

Tabel 3. 125 Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	
			Keuangan	%
1	2016	Rp. 33.013.079.213,00	Rp. 28.355.767.084,00	85,89 %
2	2017	Rp. 40.177.741.847,00	Rp. 37.706.617.068,00	93,84%
3	2018	Rp. 48.198.951.729,25	Rp. 42.745.327.284,00	88.68%
4	2019	Rp. 53.973.347.014,00	Rp. 49.033.329.323,09	90.84%
5	2020	Rp. 43.775.784.790,00	Rp. 39.845.792.474,50	91.02%

Sumber: BKAD 2020

Dilihat dari tabel diatas realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah selama 5 tahun dari 2016-2020 sudah baik. Hal tersebut didukung dengan adanya sumber daya manusia yang profesional, sarana prasarana yang memadai dan penggunaan teknologi informasi.

2) Target dan Realisasi Pendapatan

Sedangkan sebagai OPD penghasil berikut pendapatan yang dihasilkan BKAD selama tahun 2016-2020:

Tabel 3. 126 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	
			Keuangan	
1	2016	Rp. 163.886.963.180,33	Rp. 192.281.257.621,40	117,33%
2	2017	Rp. 173.215.927.489,19	Rp. 214.703.118.266,97	123,95%
3	2018	Rp. 197.518.801.722,00	Rp. 228.142.671.894,75	115,50%
4	2019	Rp. 244.071.368.896,02	Rp. 266.402.858.639,86	109,15%
5	2020	Rp. 215.762.033.703,87	Rp. 245.641.021.686,70	113,85%

Sumber: BKAD 2020

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun selalu memenuhi target yang telah ditetapkan. Pendapatan yang dihasilkan berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kemampuan pelampauan target tersebut karena didukung dengan SDM yang professional, sarana prasarana teknologi informasi dan inovasi yang dilakukan, diantaranya :

- a) Pelayanan mobil keliling pajak, untuk mempermudah pembayaran wajib pajak di pelosok pedesaan.
- b) Aplikasi LAPak Bantul, untuk mempermudah layanan dan informasi pajak daerah berbasis android.
- c) Aplikasi e-SPTPD, untuk monitoring pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara online
- d) Anjungan Pelayanan Mandiri, untuk mencetak bukti print out pembayaran PBB P2 dan untuk memeriksa alur berkas permohonan validasi BPHTB sehingga wajib pajak dapat langsung memperoleh data tersebut tanpa antri di loket.

Selain itu Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKAD Kabupaten Bantul juga dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Dipertahankannya opini WTP atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 8 (delapan) kali sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan.

Diraihnya opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul tahun 2020 merupakan capaian indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya dalam tata kelola keuangan daerah.

Upaya yang telah dilakukan BKAD untuk mempersiapkan LKPD Kabupaten Bantul agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh bidang Anggaran, bidang Akuntansi, dan Sekretariat BKAD. Kegiatan-kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang bersifat fasilitasi dilaksanakan oleh Sekretariat. Sedangkan program pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan oleh bidang Aset.

- a) Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah
- b) Peningkatan capaian pendapatan daerah
- c) Peningkatan kualitas pelayanan wajib pajak

d. Keberhasilan Pelaksanaan Urusan Penunjang Keuangan

Keberhasilan penyelenggaraan urusan penunjang keuangan dapat dilihat dari berbagai program kegiatan sebagai berikut:

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Wajib Pajak
- b) Meningkatnya Capaian Pendapatan Asli Daerah

2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a) Meningkatnya kinerja pengelolaan barang milik daerah dengan aplikasi SIMPERSADA dan SiMas

e. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 127 Permasalahan Dan Solusi urusan penunjang keuangan

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pembayaran PBB P2 melalui mobil keliling pajak daerah belum terhubung dengan sistem pembayaran (payment gateway) yang terdapat pada Bank BPD DIY sehingga harus melalui autodebet atau Mobile Banking	Setelah beberapa kali pertemuan Pada akhir tahun 2020 telah dilakukan koordinasi dengan pihak Bank BPD dan disepakati pada awal tahun 2021 pembayaran PBB P2 melalui mobil keliling pajak daerah akan langsung terhubung dengan payment gateway Bank BPD DIY
2	Permasalahan Pelayanan PBB P2 dan BPHTB terkendala Aplikasi SISMIOP dan SIMPATDA yang tidak mendukung saat pegawai harus work from home saat terjadi pandemi COVID 19	Pengadaan aplikasi SMARTGOV Modul PBB P2 dan BPHTB dengan sistem Web Based sehingga petugas pelayanan dan penelitian sepanjang ada jaringan internet dapat melakukan pelayanan. Penggunaan aplikasi ini akan dipergunakan efektif Mulai tanggal 4 Januari 2021 setelah dilakukan langkah uji coba dan pelatihan pada November s/d Desember 2020
3	Data penyusutan aset tetap dan data persediaan belum optimal;	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara bendahara pengeluaran, pembuat neraca dan penyimpan barang di masing-masing OPD serta diaplikasikannya system baru terkait Aset Tetap dan Persediaan

Sumber : BKAD 2020

3. Kepegawaian, Kependidikan dan Pelatihan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis kepegawaian.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2016. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, dipimpin oleh Kepala Badan, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris dan Kepala Bidang.

a. Program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

- a) Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran
- b) Kegiatan penyediaan makan-minum rapat koordinasi dan konsultasi.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

- a) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
- b) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional
- c) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

- a) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

- a) Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
- b) Kegiatan Uji Kompetensi dan Psikologi
- c) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PNS
- d) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan PNS
- e) Kegiatan Perencanaan dan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara

5) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

- a) Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai
- b) Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
- c) Kegiatan Pelaporan LP2P dan LHKPN
- d) Kegiatan Penilaian PNS
- e) Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kesejahteraan
- f) Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

6) Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS.

- a) Kegiatan Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS
- b) Kegiatan Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional
- c) Kegiatan Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah Kepegawaian Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Maksud dan tujuan ini adalah lancarnya kegiatan administrasi perkantoran sebagai kegiatan pendukung kegiatan-kegiatan

utama pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.

Program pelayanan administrasi perkantoran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

a) Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah lancarnya kegiatan administrasi perkantoran. Pagu murni anggaran kegiatan ini sebesar Rp.427.032.500,-Dikarenakan adanya pandemi covid-19 maka anggaran difocusing untuk penanganan pandemi ini menjadi Rp. 367.232.500,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp 466.825.000,- terealisasi sebesar Rp 391.264.533,- atau 83,81%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Penyediaan Alat tulis kantor, benda pos, barang cetakan, alat kebersihan dan bahan bacaan.
- (2) Pembayaran jasa telekomunikasi, pembayaran listrik selama 1 (satu) semester (Januari s.d. Juni) kemudian untuk selanjutnya pembayaran dialihkan ke BKAD, pembayaran honor non PNS, pembayaran asuransi dan pembayaran honor pengelolaan keuangan.

b) Kegiatan penyediaan makan-minum untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah lancarnya kegiatan rapat-rapat koordinasi, penerimaan tamu dan fasilitas perjalanan dinas. Pagu murni anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 700.193.500,- difocusing menjadi Rp. 343.446.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp 404.053.500,- terealisasi sebesar Rp 216.744.100 atau 53,64%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Penyediaan makan dan minum kegiatan rapat-rapat koordinasi dan penerimaan tamu.
- (2) Fasilitasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

Namun dikarenakan adanya pandemi covid-19, beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, diantaranya yaitu :

- (1) Proses konsultasi kegiatan pengadaan calon ASN ke BKN pusat dan ke KemenPAN-RB yang dijadwalkan 3 (tiga) kali keberangkatan tidak dapat dilaksanakan dan diganti dengan Virtual Meeting.
- (2) Crash Program yang dijadwalkan 2(dua) kali hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali;
- (3) Rakornas Kepegawaian tidak dapat dilaksanakan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Maksud dan tujuan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas.

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

a) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Pagu murni anggaran kegiatan ini sebesar RP. 1.079.225.000,- kemudian difocusing menjadi Rp. 987.513.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp 1.292.209.500,- terealisasi sebesar Rp 1.244.192.760 atau 96,28%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa pembelian buku, AC, printer, almari arsip besi, lemari mekanis, meja komputer, kursi rapat, partisi dan backdrop, komputer dan

laptop, LED, rak koran, layar proyektor, UPS, aplikasi, sound system, dispenser, alat ukur kelembaban udara, Thermogun, wastafel, alat semprot disinfektan kabut, metal detector, TV 75", Karpet, Handycam, Web Cam, Gordyn.

b) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas dan operasional yang siap pakai . Pagu murni anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 242.282.000,- direfocusing menjadi Rp. 224.247.000,- dan di APBD perubahan menjadi Rp 220.120.000,- terealisasi sebesar Rp 197.365.074,- atau 89,66%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Pemeliharaan kendaraan dinas berupa jasa servis dan penggantian suku cadang
- (2) Pembelian BBM untuk kendaraan dinas dan kegiatan operasional BKPP.

c) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang siap pakai. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 75.600.000,- kemudian direfocusing menjadi Rp. 60.600.000,- dan dalam APBD perubahan menjadi Rp 48.300.000,- terealisasi sebesar Rp 33.897.100,- atau 70,18%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa: Pemeliharaan AC, komputer, printer, mebelair berupa servis dan sukucadang.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Maksud dan tujuan ini adalah tercapainya pelaporan capaian kinerja tepat waktu guna kelancaran tugas pemerintahan.

Program pelayanan administrasi perkantoran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

a) Kegiatan penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya penatausahaan keuangan dan barang yang tertib serta pelaporan yang tepat waktu. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 11.500.000,- terealisasi sebesar Rp 8.207.900,- atau 71.37%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa penatausahaan keuangan dan barang, penyusunan laporan keuangan dan barang, penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

a) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya ujian dinas dan penyesuaian ijazah untuk memberikan kesempatan dalam pengembangan karier dan kesejahteraan PNS. Selain itu dalam hal kepangkatan bagi PNS dapat digunakan untuk menduduki pangkat yang lebih tinggi. Pelaksanaan ujian dinas/penyesuaian ijazah diatur dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor

99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002. Pagu murni anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 71.525.000,- kemudian difocusing menjadi Rp. 39.410.000,- dan di APBD perubahan pagu anggaran tetap Rp 39.410.000,- terealisasi Rp 36.270.000,- atau 92,03%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Pengiriman peserta ujian dinas ke Badan Kepegawaian Daerah DIY yang berjumlah 62 orang, dengan peserta yang lulus sebanyak 55 orang, dan yang tidak lulus sebanyak 7 orang.
- (2) Pengiriman peserta penyesuaian ijazah ke Badan Kepegawaian Daerah DIY berjumlah 54 orang dan peserta dinyatakan lulus semua dengan rincian pendidikan peserta Penyesuaian Ijazah sebagai berikut:
 - (a) Dari SMA/D3 ke S1: 46 orang
 - (b) Dari SMP ke SMA/SMK/Paket C: 8 orang.

Sampai akhir tahun 2020 untuk proses penyesuaian ijazah masih dalam tahap verifikasi oleh BKN Kanreg I Yogyakarta sehingga belum dapat diketahui apakah bisa dijadikan untuk dasar menduduki pangkat yang lebih tinggi.

b) Kegiatan Uji Kompetensi dan Psikologi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpetakannya kompetensi pejabat struktural Kabupaten Bantul dan calon PNS yang mengajukan mutasi ke Kabupaten Bantul. Pagu anggaran murni kegiatan ini

sebesar Rp.36.025.000,- kemudian difocusing menjadi Rp. 5.100.000,- dan di APBD perubahan pagu anggaran tetap Rp 5.100.000,- terealisasi Rp 4.040.000 atau 79,22%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Pengiriman peserta uji kompetensi dan psikologi kerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah DIY, namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi covid-19.
- (2) Pelaksanaan test assesmen bagi PNS yang mengajukan mutasi ke Kabupaten Bantul sebanyak 17 orang dan semua mendapat rekomendasi untuk mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten bantul.

c) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PNS

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan kompetensi PNS Kabupaten Bantul melalui bentuk pengembangan kompetensi pelatihan. Pelatihan dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk seorang aparatur yang professional, kompeten dan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatannya secara efektif dan efisien. Pagu anggaran murni kegiatan ini sebesar RP. 3.374.700.500,- dan difocusing menjadi Rp.959.180.300,- kemudian dalam anggaran perubahan menjadi Rp 829.360.800,- terealisasi Rp 587.902.719,- atau 70,89%. Beberapa rencana pelatihan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi covid-19.

Dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), seluruh panitia penyelenggara, narasumber dan peserta diwajibkan untuk mentaati prosedur protokol kesehatan sesuai surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor: 11/K.1/Hkm.02.3/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) dalam Penyelenggaraan Pelatihan Teknis, Fungsional dan Sosial Kultural yaitu tetap menjalankan pelatihan sesuai jadwal dan melaksanakan strategi pembelajaran secara normal dengan mempertimbangkan keadaan di lokus masing-masing, disertai dengan penerapan Protokol Kewaspadaan Pencegahan Covid-19 secara disiplin dan ketat, dengan cara / prosedur :

- (1) Peserta, narasumber dan panitia penyelenggara wajib memakai masker. Panitia penyelenggara akan menyediakan masker medis beserta handsanitizer;
- (2) Peserta, narasumber dan panitia penyelenggara wajib mencuci tangan dengan air mengalir atau handsanitizer yang telah disediakan sebelum mengikuti kegiatan serta setiap dan sesudah beraktivitas;
- (3) Peserta, narasumber dan panitia penyelenggara dilakukan pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer infrared non kontak. Jika pengukuran pertama suhu tubuh diukur $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, maka yang bersangkutan dilakukan pengukuran kedua dengan jeda waktu kurang lebih 5 menit. Bagi mereka dengan pemeriksaan kedua tetap pada

- suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ atau memiliki salah satu kondisi flu (pilek, bersin-bersin, hidung tersumbat, batuk dan gejala lainnya) tidak diperkenankan untuk melanjutkan aktivitas kegiatan dan diminta untuk beristirahat di kediaman masing-masing;
- (4) Peserta, narasumber dan panitia wajib melaksanakan physical distancing, dengan menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan;
 - (5) Dalam proses penandatanganan daftar hadir, peserta wajib mencuci tangan dengan handsanitizer sebelum dan sesudah mengisi, dengan menggunakan ballpoint masing-masing;
 - (6) Peserta mengambil paket seminar kit (ATK, Handout dsb) secara mandiri;
 - (7) Peserta, narasumber dan panitia mengambil konsumsi secara mandiri. Panitia penyelenggara menyediakan konsumsi dalam kemasan box (kardus);
 - (8) Panitia penyelenggara dalam memilih ruangan diusahakan memilih ruangan terbuka, dengan memperhatikan aliran udara yang terbuka.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- (1) Pelatihan Pemrograman Aplikasi Komputer Peningkatan Kompetensi Penyelenggara Satu Data Indonesia (SDI)

Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan (*support*) tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul guna menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 39

tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, maka diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan pemerintah daerah melalui penyelenggaraan SDI Tingkat Daerah. Selain itu dengan telah ditetapkannya penyelenggaraan SDI Kabupaten Bantul melalui Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul perlu adanya peningkatan kompetensi penyelenggaraan SDI di Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tata kelola data melalui portal SDI.

Pelatihan dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja pada tanggal 09 sampai dengan 12 Maret 2020, di Yogyakarta, dengan jumlah peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) PNS. Peserta mendapatkan materi terkait konsep SDI, panduan penyiapan, klasifikasi data dan memasukan data ke portal. Metode yang digunakan meliputi paparan/ceramah umum, praktik, diskusi dan tanya jawab. Mayoritas kegiatan pelatihan diisi dengan kegiatan praktik *inputing* data melalui portal SDI. Data tersebut merupakan data perangkat daerah dengan klasifikasi dapat dipublikasikan (*unprivate*). Pasca pelatihan peserta diminta untuk melanjutkan proses *inputing* data SDI dengan koordinasi dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Data statistik sektoral yang telah dipublikasikan oleh perangkat daerah dapat diakses melalui portal data <https://data.bantulkab.go.id>.

Dengan adanya pelaksanaan pelatihan ini, data SDI Pemerintah Kabupaten Bantul menjadi cukup banyak dan selanjutnya perangkat daerah diteruskan menjadi data geospasial. Pada bulan November 2020, Pemerintah Kabupaten Bantul menerima 2 (dua) penghargaan nasional dari Badan Informasi Geospasial yaitu Bhumandala Rajasa dalam kategori simpul jaringan terbaik kabupaten dan Bhumandala Kencana dalam kategori geoportal terbaik kabupaten.

(2) Pelatihan Pelayanan Prima bagi ASN pendidik

Latar belakang dan tujuan pelaksanaan pelatihan ini adalah untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Selama pandemi, proses pembelajaran harus dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah (BDR). Pada pelaksanaannya, BDR ditemukan banyak hal yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan, diantaranya pengelolaan pembelajaran BDR yang belum terpolakan dan terprogram dengan baik, pemahaman dan peran pendampingan orang tua siswa yang sangat bervariasi serta keterbatasan sumber belajar, fasilitas dan sarana prasarana.

Pelatihan dilaksanakan dalam 2 (dua) angkatan dengan peserta berjumlah 60 (enam puluh) orang, peserta merupakan PNS yang mendapatkan tugas sebagai guru/pendidik di jenjang sekolah dasar dengan mayoritas mengajar pada jenjang kelas bawah (1, 2 dan 3). Durasi pelatihan selama 7 (tujuh) hari kalender dengan rincian 2 (dua) hari dilaksanakan secara luring

(tatap muka) dan 5 (lima) hari dilaksanakan secara daring (*online*). Pelatihan angkatan 1 dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 28 November 2020 dan pelatihan Angkatan 2 dilaksanakan pada tanggal 24 November sampai dengan 01 Desember 2020 di Yogyakarta.

Peserta diberi materi seperti pemetaan potensi diri, strategi mendesain pembelajaran jarak jauh, pengenalan metode asinkron dan sinkron dalam pembelajaran, variasi *game-based learning* dan evaluasi indikator dan efektivitas pembelajaran daring. Secara umum keseluruhan pelatihan dilaksanakan melalui metode ceramah umum/paparan, diskusi, workshop, penugasan dan presentasi.

Hasil dari pelatihan ini adalah seluruh peserta mengalami kenaikan pemahaman materi pelatihan serta terselesaikannya tugas akhir (*final challenge*) berupa penyusunan materi pembelajaran berbasis video pembelajaran dan *game based learning / gamification*.

(3) Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah pejabat struktural yang memiliki Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar. Peran ASN yang telah tersertifikasi, memiliki pemahaman, kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta peningkatan kualitas

pelayanan publik. Selain itu dengan adanya pemahaman tentang aturan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah bertujuan untuk meminimalisir adanya kesalahan di bidang pengadaan barang dan jasa.

Secara garis besar kegiatan ini terbagi dalam 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

(a) Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelatihan dilaksanakan secara *blended learning* yaitu pembelajaran mandiri secara daring (*online*) melalui LMS LKPP dan dilanjutkan dengan pembelajaran secara luring (tatap muka) pada tanggal 25 November – 10 Desember 2020 di Yogyakarta dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Peserta merupakan PNS Kabupaten Bantul yang menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional auditor.

Materi pelatihan merupakan penjelasan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya yang terbagi dalam materi 1 sampai dengan materi 9. Keseluruhan materi disampaikan dengan metode *self learning*, *live chat* dengan fasilitator, ceramah umum/paparan, tanya jawab, kuis dan latihan soal.

Berdasarkan hasil evaluasi, keseluruhan peserta mengalami kenaikan pemahaman materi pelatihan dan dapat mengikuti ujian sertifikasi ahli pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar.

(b) Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar

Peserta ujian berjumlah 60 (enam puluh) PNS yang terdiri atas 30 (tiga puluh) peserta pelatihan tahun 2019 (yang belum lulus) dan 30 (tiga puluh) peserta pelatihan tahun 2020. Ujian ini dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Desember 2020. Dari keseluruhan peserta terdapat 23 (dua puluh tiga) PNS yang dinyatakan lulus dan kompeten sebagai ahli pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar. Adapun tingkat kelulusan peserta ini adalah 36.67 %.

(4) Pengiriman Peserta Pelatihan ke Institusi/Pelatihan

Secara umum pengiriman peserta pelatihan terbagi dalam 2 jenis pelatihan yaitu pelatihan kepemimpinan dan pelatihan teknis fungsional. Pelatihan kepemimpinan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan kepemimpinan serta manajerial untuk pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pejabat pengawas. Selanjutnya pelatihan teknis fungsional dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kompetensi penguasaan substantif bidang kerja dan kompetensi jabatan fungsional.

Pengiriman peserta pelatihan kepemimpinan dilaksanakan ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk :

- (a) Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 6 (enam) orang

- (b) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 10 (sepuluh) orang

Pengiriman peserta pelatihan teknis dan fungsional dilaksanakan ke berbagai macam institusi/lembaga pelatihan yang meliputi :

- (a) Pelatihan Pemrograman - PHP Web Application Framework with Laravel sebanyak 5 (lima) orang;
- (b) Pelatihan dan Sertifikasi Government Chief Information Officer sebanyak 1 (satu) orang;
- (c) Pelatihan Sains Data dengan Python sebanyak 3 (tiga) orang;
- (d) Pelatihan Manajemen Resiko SPBE sebanyak 2 (dua) orang;
- (e) Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana sebanyak 1 (satu) orang.

(5) Penyelenggaraan Pendidikan PNS

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi PNS dalam mengajukan ijin belajar dan tugas belajar guna memberikan kesempatan dalam pengembangan karier dan kesejahteraan PNS. Selain itu dalam hal kepangkatan dapat digunakan untuk menduduki pangkat yang lebih tinggi. Pagu anggaran murni kegiatan ini sebesar Rp. 41.930.000,- dan dalam APBD perubahan menjadi Rp 39.430.000,- terealisasi Rp 39.050.000 atau 99,04%.

(6) Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga ketersediaan PNS dalam jumlah, kualifikasi, komposisi dan kompetensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Adapun anggaran murni kegiatan untuk program ini adalah Rp. 1.228.510.000,- dan difocusing menjadi Rp.1.022.610.000,- kemudian dalam APBD perubahan menjadi Rp.898.410.000,- dengan jumlah serapan Rp 663.979.400,- atau 73,91%.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 578 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019, bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan formasi sebanyak 601.

Tahapan seleksi CPNS formasi tahun 2019 sebanyak 601 formasi yang semula direncanakan selesai pada tahun 2019, ternyata baru mulai pada bulan November 2019, pendaftaran online mulai tanggal 12 s.d. 15 November 2019 dan penyerahan berkas lamaran secara langsung dimulai pada tanggal 14 s.d. 28 November 2019. Sementara itu tahap seleksi hanya sampai pengumuman hasil seleksi administrasi pada 16 Desember 2019.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/188/FP3K/M.SM.01.00/2019 Tanggal 4 Februari 2019 perihal Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019

dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1 Tahun 2019 Tanggal 13 Februari 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I untuk Tenaga Honorer Eks Kategori II yang ada dalam *Database* Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan memenuhi persyaratan perundang-undangan yang akan ditugaskan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Sampai dengan bulan Desember 2020 proses pelaksanaan PPPK sampai dengan tahapan pemberkasan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 722 Tahun 2020 tanggal 6 Nopember 2020 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D 26-30/V 249-2/99 Perihal Usul Penetapan NI PPPK Tahun 2019 Secara Elektronik melalui website <https://s.id/pppkbantul19>. Adapun formasi PPPK tahun 2019 berjumlah 175 formasi yang sampai sekarang masih dalam proses penetapan pengusulan Nomor Identitas PPPK oleh Badan Kepegawaian Negaran, dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ 115 formasi Guru;
- ❖ 2 formasi Tenaga Kesehatan

❖ 58 Formasi Penyuluh Pertanian

(7) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp528.537.400,- dengan realisasi sebesar Rp463.201.400,- atau 87,64%, Adapun kegiatan yang mendukung program pembinaan dan pengembangan aparatur ini adalah sebagai berikut:

(a) Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai

Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dianggarkan sebesar Rp.25.450.000,- kemudian difocusing menjadi Rp. 6.700.000,- dan di APBD perubahan tetap Rp 6.700.000,- dan terealisasi Rp 3.400.000,- atau 50,75%. Di tahun 2020 anggaran untuk pencetakan formulir PUPNS tidak dilaksanakan dikarenakan untuk CPNS formasi tahun 2019 formulirnya sudah online di SAPA ASN. Dan untuk pencetakan profil kepegawaian hanya dicetak untuk 10 Perangkat Daerah saja dan Perangkat Daerah lainnya disampaikan dalam bentuk soft copy.

Indikator dari kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan dokumen pegawai adalah jumlah update data PNS dengan target 8.900 orang tercapai 8.900 orang atau 100%. Pada tahun 2020 ini telah dilakukan penerapan sistem aplikasi online untuk data kepegawaian pada SAPA ASN berupa entry data dan scan data PNS. Selain itu ada pengembangan SAPA ASN berbasis Android,

sehingga kedepannya SAPA ASN bisa diakses dimana saja menggunakan telfon genggam.

(b) Pelaporan LP2P dan LHKPN

LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Dasar hukum LHPKN adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan KPK No:KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Berdasarkan peraturan hukum tersebut diatas, setiap Penyelenggara Negara wajib untuk bersedia diperiksa kekayaannya, baik sebelum menjabat, selama menjabat atau bahkan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan harta kekayaan pda saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, pension dan juga wajib dalam menginformasikan harta kekayaan.

Kegiatan LP2P dan LHKPN pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.26.065.000,- dan terealisasi Rp 23.470.500,- atau 90,05%. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah PNS yang wajib melaporkan LHKPN dengan target 300 PNS dan tercapai 385 PNS yang telah melaporkan. Hal ini menunjukkan ketertiban PNS untuk melaporkan LHKPN sudah baik.

Sedangkan untuk LP2P (Laporan Pajak-pajak Pribadi) mulai dari tahun 2018 kegiatan tersebut tidak lagi dilaksanakan karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I, dan saat ini digantikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dengan pelaporan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Instansi Pemerintah.

(c) Penilaian PNS

Penilaian prestasi kerja PNS dalam PP 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 12 dan Pasal 20. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

Kegiatan penilaian PNS pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.36.200.000,- kemudian difocusing menjadi Rp 29.500.000,- dan dalam APBD perubahan tetap Rp. 29.500.000,- terealisasi Rp 27.975.000,- atau 94,83%. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah PNS yang dinilai kinerjanya dengan target 8.500 orang pada awal tahun dan terealisasi 7.743 PNS. Target fisik tidak dapat 100% terlaksana dikarenakan adanya PNS yang memasuki pensiun tahun 2020 tidak menyusun SKP, dan CPNS formasi tahun 2019 yang diprediksi masuk pada tahun 2020 ternyata mulai masuk per Januari 2021.

(d) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.715.000,- kemudian difocusing menjadi Rp. 27.215.000,- dan di APBD perubahan menjadi

Rp.34.865.000 dan terealisasi sebesar Rp. 19.884.000 atau sebesar 57.03%. Pada tahun 2020 terdapat 36 kasus dari 40 kasus yang diperkirakan yang terdiri dari kasus hukuman disiplin, pengajuan perceraian dan uji kesehatan, hal tersebut berarti ada penurunan kasus pelanggaran disiplin PNS selama tahun 2020. Adapun rincian kasus pelanggaran disiplin tahun 2020 sebanyak 11 orang yang terdiri dari :

- Hukuman disiplin tingkat sedang 4 orang
- Hukuman disiplin tingkat berat 7 orang

Adapun PNS yang melakukan pelanggaran berdasarkan profesinya antara lain adalah dari PNS umum ada 3 orang, PNS dari tenaga pendidik ada 7 orang dan PNS dari tenaga kesehatan ada 1 orang.

Tidak terserapnya semua anggaran dikarenakan 11 kasus yang ada di tahun 2020, 9 diantaranya adalah lanjutan dari proses kasus pada tahun 2019, dan dikarenakan pandemi covid-19 monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan ke Perangkat Daerah diminimalisir.

(e) Pembinaan Aparatur Berprestasi

Kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dan pelaksanaan HUT KORPRI pada tahun 2020, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 350.324.000,- kemudian difocusing menjadi Rp. 32.437.500,- dan dalam APBD perubahan tetap Rp. 32.437.500,- dan terealisasi sebesar Rp 24.617.500,- atau 75,89%,

Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah PNS yang memenuhi syarat mendapatkan penghargaan satya lancana karya satya dengan target 300 PNS. Pada tahun 2020 jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapat penghargaan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden RI sebanyak 115 orang yang merupakan pengajuan dari tahun 2019, terdiri dari 45 orang kategori 10 tahun, 14 orang kategori 20 tahun, dan 56 orang kategori 30 tahun. Sedangkan untuk kegiatan HUT KORPRI sendiri tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya pandemic covid-19.

(f) Pengelolaan Administrasi dan Kesejahteraan

Kegiatan pengelolaan administrasi dan kesejahteraan pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 39.765.000,- kemudian difocusing menjadi Rp.15.790.000,- dan terealisasi Rp 12.706.000,- atau 80,47%. Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang mengajukan Dokumen Kepegawaian dan Dokumen Pencairan TPP tepat waktu. Target dokumen kepegawaian sebanyak 600 PNS dan tercapai 1.086 PNS, karena penambahan pegawai CPNS formasi tahun 2018, dengan rincian PNS mengajukan dokumen kepegawaian Karpeg 600, Karis/Karsu 442 orang dan pengajuan Taspen sebanyak 44 orang. Dan jumlah Dokumen Pencairan TPP tepat waktu sebanyak 1152 dokumen dengan rincian 96 dokumen setiap bulannya.

(8) Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS

Program ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 330.861.500,- dengan realisasi sebesar Rp 251.429.000,- atau 75.99%. Adapun kegiatan yang mendukung program pengelolaan kepegawaian pindah/purna tugas PNS adalah sebagai berikut:

(a) Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS

Kegiatan Kenaikan Pangkat dan Pensiun pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 179.167.500,- kemudian difocusing menjadi Rp.116.930.000,- dan dalam APBD perubahan menjadi Rp. 110.930.000,- dan terealisasi sebesar Rp 81.893.000,- atau 73,82%, Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun dengan target 1.600 orang dan tercapai 1.795 orang atau 114,37% dari target.

. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan kenaikan pangkat periode April-Oktober sejumlah 705 orang baik pejabat struktural, fungsional, maupun staf, Kenaikan pangkat pengabdian sebanyak 530 orang dan penyelesaian Batas Usia Pensiun (BUP) jumlah 543 orang, pensiun janda/duda sebanyak 2 (dua) orang, pensiun dini/permintaan sendiri sebanyak 15.

Keberhasilan kegiatan ini dikarenakan adanya Surat Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta Nomor 552/SB/K/KR.I/5/2019 tanggal 8 Mei 2019 perihal Penunjukan sebagai *Pilot Project* usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun

secara *Paperless* dengan Aplikasi Sistem Elektronik Manajemen ASN ter-Rekonsiliasi (SEMAR), telah disampaikan bahwa Pemerintah Daerah DIY ditunjuk sebagai *Pilot Project* penerapan layanan Kenaikan Pangkat secara *Paperless* untuk periode Oktober 2019 dan layanan Pensiun secara *Paperless* mulai usul masuk bulan Agustus 2019.

Penerapan Kenaikan Pangkat *Paperless* dimaksudkan untuk meningkatkan percepatan layanan kepegawaian, seperti Kenaikan Pangkat (KP) dan Pensiun. Layanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) dengan berbasis *less-paper* dilakukan untuk memangkas dokumen persyaratan administratif yang harus dipenuhi ketika mengajukan usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun. Pengertian *less-paper* diartikan untuk mengurangi persyaratan administratif yang sebelumnya masih memerlukan banyak dokumen, kini diminimalisasi. Upaya ini merupakan terobosan BKN dalam mempermudah dan mempersingkat seluruh layanan kepegawaian, serta mengoptimalkan seluruh sistem informasi kepegawaian yang cepat, tepat, dan akurat. tetapi untuk sementara BKPP yang melaksanakan *scanning* berkas Kenaikan Pangkat, sedang Perangkat Daerah karena keterbatasan sarana prasarana masih mengumpulkan berkas secara dokumentatif.

(b) Pengelolaan Mutasi jabatan Fungsional

Pada pelaksanaan Permenpan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS menyebutkan bahwa Pengelolaan jabatan fungsional tertentu merupakan suatu rangkaian siklus manajemen Pegawai Negeri Sipil yang meliputi perencanaan dan pengadaan pegawai, pengembangan kualitas, mutasi, disiplin, serta pemberhentian dan pensiun pegawai. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil pada hakekatnya adalah pembinaan yang bersifat berjenjang dan berkesinambungan.

Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah PNS jabatan fungsional yang ditempatkan sesuai formasi melalui *Inpassing* Jabatan (Penyesuaian Jabatan) dan Pengangkatan Pertama, dengan target 500 PNS dengan jumlah anggaran murni Rp.128.147.250,- kemudian difocusing menjadi Rp. 26.122.250,-. Dan dalam APBD perubahan tetap Rp. 26.122.250,- Realisasi pada tahun 2020 adalah Rp 17.276.250,- atau sebesar 66.14%, sedangkan jumlah PNS yang ditempatkan sesuai formasi adalah 589 orang atau sebesar 117.8%, hal ini dikarenakan ada penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2018 sebanyak 343 orang.

(c) Pengelolaan Mutasi jabatan Administrasi dan JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi)

Pada dasarnya pelaksanaan mutasi merupakan program pemerintah baik pusat

maupun daerah yang pada awalnya untuk melakukan pemindahan, pengisian jabatan pada aparatur sipil negara yang memiliki kapasitas, kompetensi dan integritas yang memadai untuk mengisi jabatan/posisi tertentu sehingga dapat menjalankan tugas secara efektif dan efisien.

Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural eselon II yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 merupakan peraturan yang baik sebagai langkah untuk melaksanakan mutasi secara terbuka dengan melibatkan pihak dari akademisi dan tokoh masyarakat.

Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah PNS yang mengalami mutasi dan promosi dengan target 570 orang dengan jumlah anggaran murni Rp.431.646.750,- kemudian refocusing menjadi Rp. 405.909.250,- dan dalam APBD perubahan menjadi Rp. 193.809.250,- Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan penataan PNS sebanyak 788 orang atau 138,2% dari target dikarenakan ada penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2018 dengan jumlah realisasi keuangan Rp 152.259.750,- atau 78.56%.

Namun pada tahun 2020, kegiatan promosi terbuka tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sesuai amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dalam pasal 71 ayat 2 bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur,

Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Dan pada ayat 3 menyebutkan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016-2020

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKPP selama 5 Tahun ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 128 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKPP

No	Tahun	Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
1	2016	Rp.5.510.471.550	Rp.4.792.078.993	87 %	92%
2	2017	Rp.11,320,267,165	Rp.9,009,781,358	79.59%	98.6%
3	2018	Rp. 8,716,164,585	Rp.7,689,944,014	85.4%	99.424%
4	2019	Rp.12,232,753,771	Rp.11,114,254,137	90.857%	99.87%.
5	2020	Rp. 4,730,937,800	Rp. 3,786,395,586	80.035%	98.185%

Sumber : BKPP 2020

Dilihat dari tabel diatas realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selama 5 tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sudah baik, hal ini didukung dengan adanya SDM yang profesional dan sarana prasarana teknologi

informasi yaitu SAPA ASN yang memudahkan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan di BKPP.

d. Keberhasilan BKPP Tahun 2020

Pada tahun 2020 BKPP menerima Piagam Penghargaan dari Kanreg I BKN Yogyakarta “Atas Kinerja Terbaik Peringkat 2 Implementasi Laporan E-LAPKIN Tahun 2019 Dengan Capaian Laporan 96%”. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil merupakan elemen penting dalam mendukung penerapan sistem merit di Indonesia. Dalam rangka pemetaan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjamin obyektifitas pembinaan PNS secara nasional diperlukan data yang akurat, terkini, dan terintegrasi dari masing-masing instansi.

Untuk memperoleh data penilaian kinerja PNS, instansi pemerintah perlu didorong untuk melakukan pelaporan penilaian kinerja PNS dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Sistem Pelaporan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Elektronik (E-Lapkin) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Data penilaian kinerja PNS yang dilaporkan instansi pemerintah melalui E-Lapkin BKN akan menjadi acuan data prioritas yang akan digunakan dalam pelayanan kepegawaian.

e. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi terkait dengan fungsi penunjang kepegawaian.

Tabel 3. 129 Permasalahan dan Solusi dalam Fungsi Penunjang Kepegawaian

No	Permasalahan	Solusi
1	Formasi ASN tidak terpenuhi secara optimal	Rekonsiliasi data kepegawaian seluruh OPD di Kabupaten Bantul
2	Ketidaksesuaian penataan PNS dengan formasi terutama pada pendidikan yg linier	Meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat-diklat teknis
3	Penanganan kasus pelanggaran disiplin tidak terselesaikan	Sosialisasi aturan disiplin dan pemantauan secara terus menerus

Sumber: BKPP, 2020

4. Penelitian dan Pengembangan

a. Program dan Kegiatan

1) Urusan Penelitian dan pengembangan kerjasama daerah

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah meningkatkan pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan serta hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah

Pagu anggaran kegiatan ini sebelum perubahan sebesar Rp155.600.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp34.412.500,- terealisasi sebesar Rp34.097.500,- atau 99.085%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

(a) Laporan CSR membangun Bantul;

Laporan CSR ini adalah bentuk kemitraan antara perusahaan dan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendirian forum multistakeholders sebagai konsorsium pelaksana CSR. Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah berkontribusi dalam inovasi dan pembangunan di Kabupaten Bantul sebanyak 43 perusahaan/Lembaga.

(b) Koordinasi, fasilitasi, dan monev pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

Koordinasi, fasilitasi dan monev pengabdian masyarakat yang dilaksanakan perguruan tinggi, termasuk pelayanan izin

penelitian, KKN dan PKL. Surat izin yang diterbitkan mencapai 218 izin. Angka ini tidak mencapai target 800 izin, disebabkan adanya aturan baru perubahan perbup yang semula izin PKL ada di Bappeda dialihkan ke OPD penerima PKL berdasarkan Perbup Nomor 134 tahun 2018 tentang Perubahan Perbup Nomor 108 tahun 2017 tentang Izin Penelitian KKN dan PKL.

Jumlah monev KKN dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan kerjasama daerah hanya dilakukan satu kali karena adanya pandemi covid-19

- (c) Penyusunan kajian Studi Kelayakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kabupaten Bantul
Anggaran mengalami refocusing untuk penanganan covid 19 sehingga tidak dilaksanakan/ditiadakan.

5. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

a. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
- b) Penyediaan rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
- c) Penyediaan jasa pengelolaan pelayanan perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
- b) Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
- c) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

3) Program pengembangan Wawasan Kebangsaan

- a) Pendidikan Wawasan Kebangsaan

4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- a) Pemantauan orang asing
- b) Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis

5) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan

- a) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- b) Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan
- c) Pembinaan Jaga Warga (Danais)

6) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

- a) Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin
- b) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

7) Program Pendidikan Politik Masyarakat

- a) Forkom Ormas, Orsos, dan LSM.
- b) Pendidikan politik di masyarakat.

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk kelancaran administrasi dapat berjalan lancar ;

a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kegiatan ini terdiri dari belanja Honor pengelola Keuangan, ATK, alat listrik, materai, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, rek telepon, air PDAM, dan surat kabar. Dengan Pagu anggaran sebesar Rp 64.478.237,- dengan realisasi Rp 64.055.756; atau 99.3%

b) Penyediaan rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Kegiatan ini terdiri dari Belanja Makan minum Rapat, makan minum jamuan tamu dan perjalanan dinas dalam

daerah dan luar daerah. Dengan anggaran sebesar Rp 36.425.000, dengan realisasi Rp 36.405.000. atau 99,9 %

Karena Pandemi Covid 19 SPPD Luar Daerah di Recofusing untuk penanganan Penderita Covid 19 di Kabupaten Bantul sehingga semua kegiatan SPPD Luar Daerah ditiadakan.

c) Penyediaan jasa pengelolaan pelayanan perkantoran

Kegiatan ini honor petugas kebersihan kantor dan petugas jaga malam kantor sebesar Rp 41.900.000,- dengan realisasi Rp 41.634.102.; atau 96,3 %

d) Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini guna melengkapi Sarana & Prasarana yang belum tercukupi sebesar Rp 33.600.000,- dengan realisasi Rp 33.600.000; atau 100%

e) Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor.

Kegiatan ini untuk pemeliharaan Gedung kantor sebesar Rp 15.000.000; dengan realisasi sebesar Rp14.975.000; atau sebesar RP 99.95%.

f) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional.

Kegiatan ini untuk memelihara Kendaraan Dinas Operasional sebesar Rp 67.260.000; dengan realisasi Rp 67.260.000; atau 100%

2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan.

Program Pendidikan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, anggaran program Rp 150.489.825; dengan realisasi Rp148.489.825,- atau 98.6% antara lain:

a) Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah Meningkatkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 150.489.825,- terealisasi sebesar Rp 148.489.825,- atau 98.6.%.

3) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan kebangsaan

Maksud dan tujuan program ini adalah Untuk memantau keberadaan orang asing yang tinggal di Bantul dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama. anggaran program Rp75.907.425- dengan realisasi Rp75.797.000,- atau 99.8%

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Pemantauan Orang Asing.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memantau keberadaan orang asing yang tinggal di Bantul Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 492.500,- terealisasi sebesar Rp 492.000. atau 99.93%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Rapat koordinasi POA
- (2) Bimtek POA yang biasa dilaksanakan anggaran di Recofusing untuk penanganan Pandemi Covid 19.

b) Kegiatan Pemberdayaan Kerukunan antar umat beragama dan etnis;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan Kerukunan antara umat beragama dan etnis. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan. Pagu anggaran

kegiatan ini sebesar Rp 75.414.925,- terealisasi sebesar Rp75.305.000,00 ,- atau 99.8%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Rapat kerja dan dialog Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- (2) Rapat dan dialog Forum Pembauran Kebangsaan (FPB)

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

Maksud dan Tujuan Program : Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, anggaran program Rp141.188.000,- dengan realisasi Rp140.325.000,-atau 99.38 %

a) Kegiatan Pembinaan Satuan Keamanan di Masyarakat ;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 57.877.500,00 terealisasi sebesar Rp57.877.500,00,-atau 100%.

- (1) Raker & FGD FPK
- (2) Rapat rutin Kominda

b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk kewaspadaan Dini dan menjaga keamanan Lingkungan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Menciptakan kewaspadaan dini dalam menjaga keamanan lingkungan Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp83.310.500,00 ,-. terealisasi sebesar Rp82.447.500,00 atau 98.96.%.

- (1) FGD FKDM
- (2) FGD Pemberdayaan Masyarakat

(3) FGD Jaga Warga

c) Kegiatan Pembinaan Jaga Warga (Daanais)

Maksud dan Tujuan Kegiatan ini untuk membentuk Kelompok Jaga warga di tingkat Dusun sesuai amanat Gubernur sesuai Pergub No 6 Tahun 2019 tentang Jaga Warga. Telah dibentuk sebanyak 10 kelompok Jaga Warga dan dikukuhkan oleh Bupati Bantul di Tahun 2020. Pagu anggaran dari Dana Danais sebesar Rp 279.925.000,- terealisasi Rp 279.925.000,- atau sebanyak 100 %

5) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Maksud dan tujuan dari Program ini: Meningkatkan pemberantasan adanya penyakit masyarakat . anggaran program Rp ,- dengan realisasi Rp ,- atau %

a) Kegiatan Penertiban Pelajar anggaran direcofusing.

Pada Tahun 2020 ini Kegiatan Penertiban Displin Pelajar tidak dapat dilaksanakan karena adanya Pandemi Covid 19 , Karena Sekolah dilaksanakan secara Daring di rumah

b) Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan pemahaman tentang bahaya narkoba . Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 25.350.000,00,- terealisasi sebesar Rp 25.350.000,00,- atau 100 %.

(1) RAKER P4GN

(2) Sosialisasi Bahaya Narkoba

6) Program Pendidikan Politik di Masyarakat

Maksud dan tujuan program ini adalah Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi anggaran program Rp 309.325.000,- dengan realisasi Rp 273.907.000,- atau 88.54 %, adapun kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Pendidikan politik di masyarakat;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu di semua jenjang Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3. sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp302.399.925,00 ,- terealisasi sebesar Rp 281.637.425,00,-. atau 93.13%.

- (1) Bimtek dan Verifikasi Proposal dari Partai politik yang akan mendapatkan bantuan
- (2) Dialog Politik
- (3) Pencermatan persiapan, monitoring evaluasi Pemilukada

b) Kegiatan Forkom ormas,orsos dan LSM

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan pemahaman bagi Ormas,Orsos,dan LSM mengenai Peraturan Perundangan Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 17.260.000,00 terealisasi sebesar Rp 17.255.500,00 atau 100%.

- (1) FGD Ideologi Politik Sosial Budaya
- (2) FGD Ormas
- (3) Rakor Ormas
- (4) Anggaran Desk Pilkada sebagian besar telah direcofusing.

c. Keberhasilan Pelaksanaan

1) Program Pendidikan Politik Masyarakat

a) Keberhasilan Pelaksanaan Pemilukada :

Angka partisipasi dalam pemilu 2020 dari target 75 % , dapat mencapai angka partisipasi untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebesar 81.42 %

d. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 130 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan : Sesuai amanat Permendagri no57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas (SIULA) yang seharusnya sdh dapat dilaksanakan dimasing-masing Kabupaten kita belum dapat melaksanakan karena belum adanya kesiapan dari Pemerintah Kab. Bantul dalam hal ini Dukungan Anggaran dan Sarana Prasaranya yang belum terkondisikan.	Ditahun anggaran 2021 Kita telah mengajukan anggaran ke TAPD tetapi belum mendapatkan respon yang positif, mudahmudahan di ABT 2021 nanti kita bisa mendapatkan tambahan anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
2	Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik semula sebesar Rp 1.927,- per satu suara sah per tahun bagi partai politik yang mempunyai wakil di kursi DPRD,karena terjadi penambahan suara sah pada PEMILU 2019 (577.151) telah dilaksanakan penambahan anggaran per suara sah sebesar Rp 3.400,-	Kekurangan sudah terealisasikan lewat anggaran biaya tambahan (ABT) TA 2020.
3	Dukungan Dana Desk Pilkada karena Pandemi dikurangi sehingga blm optimal dalam Pemantauan Pilkada 2020. Honor yang seharusnya diberikan selama 9 bulan hanya dapat diberikaaan 2 bulan saja.	

6. Pengawasan

a. Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan dalam urusan pemerintahan (pengawasan) selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
 - b) Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur**, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
- 3) **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, terdiri dari kegiatan:
 - a) Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
- 4) **Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
 - b) Kegiatan Penanganan Kasus/ Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus;
 - c) Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kabupaten Bantul;
 - d) Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

a) Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp374.281.835,00 terealisasi sebesar Rp373.372.609,00 atau 99,76%.

b) Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp566.690.000,00 terealisasi sebesar Rp560.844.613,00 atau 99,97%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Maksud dan tujuan program ini adalah terpeliharanya aset tetap bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp25.264.300,00 terealisasi sebesar Rp25.264.300,00 atau 100,00%.

b) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp114.096.000,00 terealisasi sebesar Rp112.522.000,00 atau 98,62%.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk mengirimkan SDA mengikuti diklat sosialisasi bimtek dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:

a) Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp97.300.000,00 terealisasi sebesar Rp87.805.200,00 atau 90,24%.

4) Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Maksud dan tujuan program ini adalah menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, tanggap, profesional, efisien dan efektif transparan.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mendukung pelaksanaan pada program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp47.295.000,00 terealisasi sebesar Rp47.265.000,00 atau 99,94%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

(1) Pemeriksaan kinerja

Pemeriksaan Kinerja dilaksanakan untuk menilai keberhasilan capaian 3 E (Efektifitas, Efisien dan Ekonomis) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Tahun 2020 Pemeriksaan Kinerja dilaksanakan pada 3 (tiga) PD yaitu:

- (a) Dinas Perhubungan Kab. Bantul;
- (b) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul;
- (c) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul.

(2) Probity Audit

Probity audit dilaksanakan untuk memastikan kegiatan pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan meyakinkan hasil pekerjaan baik kualitas dan kuantitas sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar dalam kontrak.

(3) Audit Dana Desa

Audit dana desa dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan sasaran pengelolaan keuangan desa tahun 2020 dan ruang lingkup dana desa tahun 2020.

(4) Reviu atas Laporan Keuangan

Reviu dilaksanakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah direviu disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka pemberian pendapat (opini);

(5) Reviu atas Laporan Kinerja

Review dilaksanakan terhadap laporan kinerja untuk memastikan laporan kinerja sudah disajikan secara akurat dan valid. Hasil reviu disampaikan kepada Gubernur DIY untuk dilakukan evaluasi, selanjutnya disampaikan kepada Menteri PAN dan RB. Untuk mendukung hasil reviu LKJ, dilakukan evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah (LKJ) pada 37 (tiga puluh tujuh) OPD dan 17 (tujuh belas) Kapanewon.

(6) Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dilaksanakan dengan tujuan untuk memberi keyakinan bahwa LPPD Kabupaten Bantul telah disusun berdasarkan pedoman penyusunan LPPD dan memberikan keyakinan bahwa data yang disajikan dalam LPPD telah didukung dengan data perhitungan yang benar dan sah.

(7) Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Reviu atas RKA dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA

telah disusun berdasarkan KUA PPAS, RKPD, Renstra dan Renja serta menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran.

(8) Reviu BOSNAS, BOSDA dan BOP

Reviu dilaksanakan dengan tujuan meyakini pengelolaan BOSNAS, BOSDA dan BOP sesuai dengan ketentuan, memberikan saran perbaikan dan memastikan keakuratan data laporan BOSNAS, BOSDA dan BOP.

(9) Reviu atas penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik

Reviu atas penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik dilaksanakan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi.

(10) Reviu usulan Dana Keistimewaaan DIY

Reviu Dana Keistimewaaan bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan usulan Dana Keistimewaaan DIY, sehingga dapat meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi

(11) Koordinasi Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun pedoman kerja pengawasan yang diharapkan bisa meningkatkan koordinasi antar Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk menghindari tumpang tindih pengawasan. Disamping itu pada kegiatan ini dilaksanakan penilaian risiko bagi audit untuk menghasilkan dokumen PKPT yang berbasis risiko. Kegiatan ini menghasilkan 1 (satu) Dokumen PKPT.

b) Kegiatan Penanganan Kasus/ Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti aduan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun kinerja aparat pemerintah. Selama tahun 2020 terdapat 9 (sembilan) pengaduan dan sudah ditindaklanjuti. Adapun pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp3.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.500.000,00 atau 100%.

c) Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kabupaten Bantul;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi penyelenggaraan pemerintah Daerah, pengamanan aset dan barang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penilaian Tingkat

Maturitas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bantul oleh BPKP Perwakilan DIY Nomor LQA-197/PW12/APD/2018 tanggal 03 Agustus 2018, nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Bantul adalah 3,075.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp9.750.000,00 terealisasi sebesar Rp9.750.000,00 atau 100%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sosialisasi tentang Maturitas SPIP, Sosialisasi e-SPIP, pendampingan penyusunan peta risiko secara berkala ke Perangkat Daerah dan Evaluasi atas Efektifitas Manajemen Risiko Perangkat Daerah. Tahun 2020 semua perangkat daerah telah menyusun register risiko.

d) Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp709.211.200,00 terealisasi sebesar Rp702.259.200,00 atau 99,02%.

Adapun hasil kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- (1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) *Online* dilaksanakan untuk memberikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi secara *on-line*. Penilaian mandiri pada tahun 2020 dilaksanakan di tingkat pemerintah daerah dengan melibatkan asesor penilai mandiri dari masing-masing OPD. Pada

tahun 2020 nilai PMPRB Online pada Kabupaten Bantul mencapai 85,75.

- (2) Evaluasi penetapan zona intergritas menuju wilayah bebas korupsi pada 2 (enam) PD, dan 1 (satu) kapanewon sebagai berikut:
- (a) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - (b) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - (c) Kapanewon Pundong;

Hasil evaluasi dari Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2 perangkat daerah yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu memenuhi kriteria WBBM untuk diajukan untuk penilaian dan evaluasi ke Tim KemenPANRB karena memiliki nilai diatas 85 sedangkan RSUD Panembahan Senopati dan Kapanewon Pundong diajukan ke untuk penilaian WBK karena nilai kurang dari 85 dan diajukan untuk evaluasi dan penilaian Tim KemenPANRB. Hasil penilaian dan evaluasi dari Tim KemenPANRB dari 4 unit kerja yang diajukan yang lolos dan mendapat penghargaan WBBM dari Menteri PAN RB yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan 3 unit kerja lain tidak lolos karena penilaian responden yang diupload dalam aplikasi online shprb.menpan.go.id tidak memenuhi target responden sebanyak 30 orang yang mengisi penilaian tentang persepsi korupsi dan pelayanan secara daring yang dikirim ke email, nomor elepon dan nomor whatsapp responden dan memberikan

feedback positif terhadap pelayanan yang dilakukan oleh 3 unit kerja tersebut

(3) Evaluasi Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah situasi atau kondisi di mana Pegawai/ Aparatur Sipil Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui dan memetakan benturan kepentingan yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan memberikan saran terhadap kelemahan yang dijumpai. Pada tahun 2020 dilaksanakan evaluasi benturan kepentingan dengan sampel 10 (sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul melalui penilaian PMPRB online, sedangkan evaluasi benturan kepentingan baru dilakukan di Inspektorat daerah

kabupaten Bantul. Sebagai tindaklanjut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun Sebagai tindaklanjut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun (a) SK Inspektur Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul (b) Menyusun Buku Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, (c) SK Inspektur Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 Tentang Jenis-Jenis Benturan Kepentingan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

(4) Monitoring LHKASN

Monitoring LHKASN ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui:

- (a) tingkat partisipasi ASN dalam mengisi LHKASN melalui aplikasi Si Harka sebesar 95 %
- (b) melihat kesesuaian data pelapor dalam pengisian laporan LHKASN dengan sasaran ASN wajib lapor LHKASN
- (c) dan ruang lingkup keakuratan Data Pelapor LHKASN.

(5) Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya akselerasi implementasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan KKN. Fasilitasi Forum Pemantau Independen (FORPI) di Kabupaten Bantul

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Instansi Pemerintah. Pada tahun 2016 di Kabupaten Bantul dibentuk Forum Pemantau Independen (FORPI) sebagai lembaga pemantau pelaksanaan pakta integritas. FORPI beranggotakan 5 (lima) orang terdiri dari lembaga swadaya masyarakat anti korupsi, tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.

c. Permasalahan dan Solusi

Masalah :

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia sehingga pelaksanaan pengawasan melibatkan pejabat struktural dan staf.
- 2) Sarana dan prasarana kerja belum memadai.
- 3) Kualitas sumber daya yang ada belum optimal.

Solusi :

- 1) Mengusulkan penambahan sarana mobilitas/operasional yang memadai mengingat kegiatan pemeriksaan dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul

- 2) Mengikutsertakan sumber daya manusia untuk melaksanakan diklat/bimtek pengawasan baik dilaksanakan oleh kementerian keuangan, BPKP, dsb
- 3) Mengusulkan penambahan sumber daya manusia dalam hal ini auditor pengawas

7. Pemerintahan Umum

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 3) Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah
- 4) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
- 6) Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah
- 7) Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan
- 8) Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah
- 9) Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
- 10) Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- 11) Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan
- 12) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 13) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah

Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah dilaksanakan dengan maksud dan tujuan antara lain adalah untuk memfasilitasi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dalam

penyusunan perikatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan pemerintah daerah lainnya, dengan instansi vertikal serta dengan pihak ketiga. Melalui program ini, Tim TKKSD bersama dengan pihak terkait/pemohon perikatan kerjasama duduk bersama membahas draft perikatan bersama yang ditujukan demi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pembangunan antar pihak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pengembangan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga.

Pagu anggaran Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah pada tahun 2020 sebesar Rp9.947.000,00 atau sebesar 0,91% dari total pagu anggaran pada Bagian Administrasi Pemerintahan (Rp1.095.483.440,00). Realisasi anggaran yang dapat terserap sebesar Rp9.947.000,00 atau sebesar 100,00%.

2) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan Kabupaten Bantul. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan keluaran yang diharapkan dapat tercapai melalui program ini dengan dukungan dana sebesar Rp. 747.526.200,00 atau 55,52% dari total seluruh anggaran pada Bagian Administrasi Pemerintahan . Sepanjang tahun 2020, dukungan dana tersebut digunakan untuk melaksanakan program dalam wujud kegiatan-kegiatan antara lain:

- a) Penyelenggaraan otonomi daerah;
- b) Monitoring penyelenggaraan pemeritahan umum dan daerah.

Pagu anggaran Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 987.913.750,00 atau sebesar 90,18% dari total pagu anggaran pada Bagian Administrasi Pemerintahan (Rp. 1.095.483.440,00). Realisasi anggaran yang dapat terserap sebesar Rp.976.392.550,00 atau sebesar 98,83%. Rincian pagu dan realisasi anggaran pada program ini seperti tersaji pada tabel 3.3.

Kegiatan Penyelenggaraan otonomi daerah di tahun 2020 dilaksanakan dalam wujud beberapa sub kegiatan antara lain meliputi:

- a) Penyusunan LPPD Kabupaten Bantul;
- b) Publikasi i-LPPD melalui surat kabar;
- c) Penyusunan Laporan Penerapan SPM Kabupaten Bantul;

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), publikasi i-LPPD melalui surat kabar dan penerapan SPM merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2019 dan Laporan Penerapan SPM disusun dalam waktu bersamaan. LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2019 telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, sedangkan Laporan Penerapan SPM Tahun 2019 disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (i-LPPD) kepada masyarakat telah dilaksanakan bersamaan dengan pengiriman dokumen LPPD ke Menteri melalui Gubernur. Penyampaian i-LPPD kepada masyarakat disampaikan melalui media harian Kedaulatan Rakyat, dan Radar Jogja.

Proses penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan melibatkan peran serta dari seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Bantul melalui beberapa tahapan pelaksanaan meliputi sosialisasi, koordinasi dan konsolidasi dalam rangka koleksi dan verifikasi data capaian maupun dokumen data pendukung untuk kemudian disusun didalam sebuah dokumen laporan sesuai dengan pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diterbitkan oleh Kemendagri serta untuk penguatan didalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun n-1.

Pencapaian nilai LPPD Kabupaten Bantul tahun 2018 berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemendagri adalah sebesar 3,4463 atau dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian nilai tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun mengalami penurunan secara peringkat di tingkat DIY. Secara nasional, peringkat nilai LPPD Kabupaten Bantul tahun 2018 hingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disusun masih belum diketahui. Sedangkan untuk LPPD tahun 2019 hingga saat ini juga belum diketahui dikarenakan adanya perubahan teknis penilaian dalam EPPD sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terbit bersamaan dengan proses EPPD yang sedang berjalan sehingga masih dilakukan penyesuaian oleh Kemendagri selaku Tim Nasional EPPD.

Kegiatan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah dilaksanakan dalam rangka koordinasi untuk membahas isu-isu strategis dan isu-isu khusus tertentu yang sedang terjadi dan berpotensi akan terjadi di Kabupaten Bantul

dengan tujuan untuk menemukan langkah-langkah penyelesaian maupun langkah-langkah antisipatif. Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada kegiatan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah antara lain:

- a) Forkopimda;
- b) Forkopimcam;
- c) Rapat Koordinasi Rutin Bidang Pemerintahan;
- d) Bimtek Pembakuan Nama Rupabumi.

Bimtek Pembakuan Nama Rupabumi pada tahun 2020 dilaksanakan untuk kedua kalinya memanfaatkan aplikasi Sistem Akuisisi Data Toponim Indonesia (SAKTI) yang dikembangkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Tujuan dari kegiatan pembakuan nama rupabumi antara lain:

- a) Mewujudkan tertib administrasi di bidang pembakuan nama rupabumi di Indonesia;
- b) Menjamin tertib administrasi wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Mewujudkan adanya gasetir nasional sehingga ada kesamaan pengertian nama rupabumi di Indonesia;
- d) Mewujudkan data dan informasi akurat mengenai nama rupabumi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik untuk kepentingan pembangunan nasional maupun Internasional.

Implikasi Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pemerintah Pusat diawal tahun 2020 menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Penetapan bencana ini berimplikasi pada refocusing

anggaran untuk percepatan penanganan pandemic Covid-19.

Pagu anggaran pada Bagian Administrasi Pemerintahan setelah *refocusing* anggaran menjadi Rp1.095.483.440,00 atau berkurang 26,91% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp1.498.847.700,00. Komponen kegiatan di Bagian Administrasi Pemerintahan yang mengalami pengurangan anggaran untuk refocusing penanganan pandemic Covid-19 antara lain belanja ATK, belanja peralatan kantor, penggandaan, jamuan rapat, perjalanan dinas, belanja perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, penentuan batas daerah.

Pandemi Covid-19 selain berimplikasi pada anggaran program dan kegiatan, juga berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang cukup berdampak adalah penyusunan LPPD, SPM dan penyusunan dokumen perikatan kerjasama. Kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi dan konsolidasi. Walaupun bisa dilakukan melalui zoom meeting, namun masih belum cukup efektif.

Berikut ini beberapa permasalahan dan solusi terkait dengan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan (lihat Tabel 3.131).

Tabel 3. 131 Permasalahan dan Solusi Bagian Administrasi Pemerintahan 2020

No	Permasalahan	Solusi
1	Cakupan wilayah yang telah terdata dan terbakukan nama unsur rupabumi masih sedikit dikarenakan keterbatasan jumlah personil dan anggaran	Dilaksanakan bimtek dengan menyasar desa dan kecamatan agar kedepan kegiatan pendataan dan pembakuan rupabumi dapat dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif desa maupun kecamatan dalam hal penganggaran kegiatan dan pelaksanaan teknis.
2	Masih ada beberapa kendala teknis yang dihadapi terkait dengan aplikasi SAKTI	Koordinasi dengan admin aplikasi SAKTI BIG
3	Sulitnya menyamakan jadwal kegiatan pimpinan daerah sehingga terkadang ada tidak dapat menghadiri koordinasi pimpinan secara langsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibentuk tim sekretariat yang akan mempersiapkan rencana materi kegiatan dan penyusunan jadwal 2. Dibuat SOP pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan daerah
4	Penandaan secara Geodetik pada pilar perapatan batas yang telah terpasang belum dapat direalisasikan di tahun 2020 dikarenakan refocusing anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi atau kerjasama dengan OPD terkait seperti Dispertaru yang juga membutuhkan adanya batas administratif Kabupaten Bantul 2. Mengakses sumber anggaran lainnya yang memungkinkan seperti Dana Keistimewaan. 3. Mengalokasikan kembali di tahun 2021
5	Masih ada OPD yang membuat kerjasama tanpa melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bantul	Sosialisasi Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga
6	Fungsi Monev terhadap Perikatan Kerjasama belum dapat dilaksanakan secara efektif sehingga masa berlaku dokumen perikatan kerjasama tidak terpantau.	Penyusunan database perikatan kerjasama melalui aplikasi yang dapat menghubungkan antara pihak-pihak yang terlibat didalam perikatan kerjasama
7	Indikator Kinerja Kunci dalam LPPD tidak menjadi salah satu bagian dari dasar penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Bantul.	Koordinasi dengan Bappeda

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan, Bantul 2020

3) Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah

Maksud dan tujuan Program ini adalah tersedianya dokumen sebagai bahan untuk pengembangan ekonomi daerah. Anggaran program Rp. 368.755.383,- dengan realisasi Rp. 286.635.383,- atau realisasi keuangan 77,73%. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan pada kegiatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah, yaitu tidak dilaksanakannya Seleksi Direktur Aneka Dharma dan seleksi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Projotamansari. Hasil dari monitoring dan evaluasi, dipandang perlu melakukan pembenahan intern dan konsolidasi BUMD terlebih dahulu. Dengan tidak adanya Seleksi Direktur Aneka Dharma, maka jabatan Plt Direktur ditunjuk dari Dewan Pengawas yaitu Sekretaris Daerah. Sedangkan Plt Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Projotamansari ditunjuk Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul

a) Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini Bagian Adm Perekonomian merangkul OPD OPD yang bergerak dan mendukung ekonomi masyarakat agar terwujud sinergi dalam menentukan kebijakan daerah

Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp17.725.000,- realisasi anggaran Rp17.725.000,- (100%) tingkat capaian kegiatan 100%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan Workshop sebanyak 1 (Satu) kali yaitu : Workshop “Pengembangan Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Bantul”. dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2020 bertempat di RM Parangtritis, Jl. Parangtritis Bantul diikuti oleh 50 peserta dengan narasumber Mashuri selaku Lurah Desa Gadingsari dengan judul materi “Peluang Usaha Garam Rakyat di Desa Gadingsari”. Pemateri kedua adalah

Upomo Yunariyanto selaku Ketua BUMDes Gadingsari dengan judul materi “Menjadi Pengolah Garam yang Handal”.

Maksud tujuan diadakannya workshop adalah menambah pengetahuan tentang usaha garam dan memperluas peluang pemasarannya sehingga akan meningkatkan pedapatan dan kesejahteraan masyarakat. Produksi Usaha Garam Rakyat ini, baru dimulai pada akhir tahun 2019, panen pada bulan Pebruari 2020 sebanyak 2 Ton. Bulan Juni sekitar 4 Ton dan akhir tahun 2020 panen 7 Ton. Produksi ini belum ada fasilitas lab, maka baru digunakan sebagai campuran pakan ternak dengan harga Rp. 1.000

b) Kajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kajian yang disusun pada tahun anggaran 2020 ini berjudul “Kajian Pengembangan Lahan Pertanian Melalui Intensifikasi di Kabupaten Bantul”. Kajian Pengembangan Potensi perekonomian Bidang Pertanian dengan maksud dan tujuan :

- (1) Menyusun dokumen Kajian Pengembangan Lahan Pertanian Melalui Intensifikasi Lahan Pekarangan
- (2) Mengidentifikasi lahan pekarangan produktif di Kabupaten Bantul
- (3) Mengidentifikasi pengembangan usaha pertanian pada lahan pekarangan di Kabupaten Bantul
- (4) Menyusun rekomendasi pengembangan lahan pertanian melalui intensifikasi lahan pekarangan di Kabupaten Bantul

Dokumen yang dihasilkan adalah Laporan pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir Hasil Kajian serta CD. Kegiatan ini didukung anggaran Rp. 52.100.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 52.095.000,- prosentase keuangan mencapai 99,9 % tingkat capaian kegiatan 100%.

c) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat merupakan kegiatan mengevaluasi kebijakan pemerintah bidang sarpras terkait 5 sektor yang menjadi fasilitasi dari Bagian Administrasi Perekonomian yaitu Bidang perdagangan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui ketersediaan persediaan kebutuhan pokok dan stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama harga kebutuhan pokok jelang hari besar agama seperti Idhul Fitri, Idhul Qurba, Natal dan Tahun Baru.

Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp. 5.775.000,- realisasi Rp. 5.775.000,- prosentase mencapai 100% tingkat capaian kegiatan 100%.

Untuk monev TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) ini setelah dana terkena refocusing II untuk penanganan covid, kegiatan monev setelah bulan Mei didanai dengan anggaran kegiatan rutin.

- (1) Tanggal 21 Januari 2020, diawali dengan rapat koordinasi TPID membahas tentang perkembangan harga komoditas dan dilanjutkan pemantauan harga dan stok komoditas strategis ke Pasar Pleret dan Pasar Ngipik, sekaligus sosialisasi mengenai gula

rafinasi yang dilarang untuk diperjualbelikan secara umum.

(2) Tanggal 12 Februari 2020, rapat koordinasi TPID membahas tentang perkembangan harga komoditas dan dilanjutkan pemantauan harga dan stok komoditas strategis ke Pasar Niten, khususnya harga bawang putih yang sempat melonjak pada beberapa minggu terkait penghentian impor bawang putih oleh pemerintah pusat dari China karena wabah virus corona.

(3) Tanggal 5 Maret 2020, diawali dengan koordinasi TPID membahas tentang perkembangan harga komoditas dan dilanjutkan pemantauan harga dan stok komoditas strategis ke Pasar Mangiran, khususnya harga bawang putih yang sempat melonjak terkait penghentian impor bawang putih oleh pemerintah pusat dari China karena wabah virus corona.

(4) Tanggal 6 Mei 2020

Tujuan dari Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Bantul kali ini adalah untuk membahas tentang pengendalian inflasi di tengah pandemi covid-19 dan bertepatan dengan Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2020. Permintaan masyarakat untuk bahan pokok biasanya akan mengalami lonjakan kebutuhan saat Ramadhan ini, sehingga rapat kali ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi terkait stok bahan pokok maupun barang penting di pasar, maupun informasi mengenai kejadian luar biasa (penimbunan bahan pokok di masyarakat) dan bagaimana upaya

pencegahannya. Pada saat ini Pemerintah sedang mendistribusikan Kartu Sembako Bansos Tunai, dan diperlukan koordinasi yang lebih intensif agar stok bahan pangan di pasaran mencukupi.

- (5) Tanggal 19 Mei 2020. Koordinasi yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bantul membahas tentang perkembangan harga komoditas dan dilanjutkan pemantauan harga dan stok komoditas strategis ke Pasar Bantul dan Pasar Imogiri pada bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H dalam rangka bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H di tengah pandemi Covid-19
- (6) Tanggal 22 Juni 2020 Koordinasi TPID dilanjutkan Pemantauan Harga dan Stok Komoditas Strategis ke Pasar Sudimoro dan dan Peternak Penghasil Telur di Triwidadi Pajangan.
- (7) Tanggal 8 Juli 2020 Koordinasi TPID dilanjutkan Pemantauan Ketersediaan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1441H ke Kecamatan Sedayu. Lokasi pemantauan ketersediaan hewan kurban di peternakan sapi milik Bapak Rika Daru Efendi yang berlokasi di Karangasem, Argomulyo, Kecamatan Sedayu.
- (8) Tanggal 9 Juli 2020 Koordinasi TPID dilanjutkan Pemantauan Ketersediaan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idhul Adha 1441 H di Kecamatan Pajangan. Lokasi pemantauan ketersediaan hewan kurban di peternakan sapi milik Bapak Sangidun yang berlokasi di Dukuh Rt.05, Guwosari, Kecamatan Pajangan.

(9) Tanggal 21 Juli 2020 Pemantauan Ketersediaan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha, bersama TPID DIY. Tim TPID DIY dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan DIY Drs. Trisaktiyana MSI, sedangkan TPID DIY dipimpin oleh Sekda Bantul Drs. Helmi Jamharis MM. Tujuan dari pemantauan ini untuk mengetahui ketersediaan hewan qurban pada hari besar Idhul Fitri 1421 H.

d) Kajian Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat

Tahun 2020 Tidak Membuat Kajian, Dana Direfocusing untuk Penanganan Covid19

e) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat

Sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Workshop Pengembangan UKM dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas bagi SDM Pembina dan petugas Entri Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:

- (1) Diharapkan dalam kegiatan bimtek ini adalah diperolehnya motivasi dan semangat baru melalui meningkatnya kerjasama tim dinas KUKMP dan Pemda dalam hal ini Bagian Adm Perekonomian, dalam melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan secara maksimal dan sebaik-baiknya.
- (2) Memberikan sosialisasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat tahun 2020
- (3) Membuka peluang permodalan bagi para pelaku usaha kecil

(4) Para pendamping UKM di Kecamatan mengetahui Kebijakan terbaru KUR 2020 serta memberikan pemahaman kepada calon debitur untuk memanfaatkan dana KUR 2020

Bagian Adm Perekonomian merencanakan pelaksanaan penyelenggaraan workshop pada tanggal 17 Maret 2020 dengan pembicara dari Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Jogja, Bank BPD Bantul dan dari Pemda dengan tema “Workshop Pengembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2020”. Workshop ini mengundang calon debitur dan pendamping Ijin Usaha Menengah Kecil dari 17 kecamatan.

Adapun kegiatan Bimbingan Teknis SDM Pembina dan dan petugas Entri Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), sedianya dilaksanakan pada tanggal 24-25 Maret 2020 di Magetan Jawa Timur.

Namun pada bulan Maret tersebut terbit Surat untuk tidak melaksanakan kegiatan keluar kota maupun rapat rapat karena adanya Pandemi Covid19, maka 2 sub kegiatan tersebut batal dilaksanakan.

Anggaran yang tersedia telah digunakan untuk mengadakan rapat persiapan dan rapat pemantapan, serta pembelian sarana prasana kegiatan. Anggaran sebesar Rp10.657.000,- realisasi anggaran Rp10.657.000,- (100%) tingkat capaian kegiatan 100%.

Bagian Adm Perekonomian bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Bantul, melaksanakan Sosialisasi Program Pemberdayaan Ekonomi Daerah bagi Kelompok Usaha. Sosialisasi ini mengundang pelaku usaha binaan dari DKUKMP,

DPPKBPMMD, DPPKP, Dinas Sosial dan P3A, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perdagangan Bantul. Peserta yang diundang 400 orang dan yang hadir sekitar 350 orang. Tujuan dari sosialisasi ini untuk memperkenalkan kredit murah untuk mendukung pembiayaan pelaku usaha yang akan bangkit lagi dimasa pandemi ini. PeDe (Kredit Pemberdayaan Ekonomi Daerah) maksimal Rp. 2.500.000 bunga 3% untuk jangka waktu 12 bulan untuk sektor usaha pertanian, perikanan, industri olahan, perdagangan, penyedia akomodasi makanan dan minuman. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 7, 8, 14, 16 Oktober 2020 di Gedung Mandhala Saba.

f) Monitoring dan Evaluasi kebijakan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat

Kegiatan mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait Kredit usaha Rakyat dan Ekonomi Masyarakat yang menjadi fasilitasi dari Bagian Administrasi Perekonomian.

Maksud dan tujuan kegiatan agar dapat menyiapkan bahan rumusan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian.

Kegiatan dengan mengadakan monev pencapaian KUR dengan mengundang bank-bank penyedia pembiayaan maupun dengan dinas instansi terkait yang mempunyai kelompok usaha. Monev dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2020, tanggal 20 Pebruari 2020, 11 Agustus 2020.

g) Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk BUMD dan BUKP agar kinerjanya meningkat

Penyelenggaraan Workshop/Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali yaitu :

(1) Sosialisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Sosialisasi TPAKD pada kegiatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah tahun 2020 yang bertujuan untuk :

- (a) Penyediaan Informasi
- (b) Akses Pembiayaan Mikro
- (c) Produk Dan Layanan Jasa Keuangan
- (d) Terobosan Pendanaan Pembangunan
- (e) Pembiayaan Produktif (UMKM, *Start Up Business*, Dan Sektor Prioritas)

Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2020 bertempat di Omah Kampung dengan narasumber Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul; Kepala Kantor OJK DIY dengan tema “Akses Pembiayaan Bagi UMKM” dan Direktur Utama PD **BPR Bank Bantul dengan tema “Layanan PD BPR Bank Bantul Bagi UMKM”**

Adapun peserta yang diundang sebanyak 150 UMKM beserta aparat pemerintah. Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 204.572.883,- realisasi anggaran Rp. 122.487.883,- (59,87%) tingkat capaian Kegiatan 85%.

h) Kajian Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah

Kajian yang disusun adalah Kajian “Pengembangan Kelembagaan BUKP dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pelayanan pada Masyarakat” dengan maksud dan tujuan

- (1) Meningkatkan Kapasitas Pelayanan BUKP pada masyarakat khususnya perekonomian perdesaan di Kabupaten Bantul
- (2) Mengetahui kelembagaan dan potensi BUKP sebagai upaya peningkatan kapasitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bantul
- (3) Menyusun rekomendasi strategi kebijakan pengembangan kelembagaan BUKP guna memperjelas prosedur kewenangan di Kabupaten Bantul.

Adapun sasaran yang akan dicapai dari penyusunan kajian ini adalah :

- (1) Teridentifikasinya kelembagaan dan potensi BUKP sebagai upaya peningkatan kapasitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bantul
- (2) Tersusunnya rekomendasi strategi kebijakan pengembangan kelembagaan BUKP sebagai upaya peningkatan kapasitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bantul

Dokumen yang dihasilkan adalah Laporan pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir Hasil Kajian. Kegiatan ini didukung anggaran Rp. 52.100.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 52.095.000,- persentase mencapai 99,99 % tingkat capaian program 100%

i) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Ekonomi Daerah

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah Mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait BUMD dan LKM di Kabupaten Bantul serta mengevaluasi kinerja BUMD dan BUKP. Monev yang dilaksanakan adalah Monev BUMD sebanyak 7 kali, Monev BUKP sebanyak 5

kali dan monev TPKAD dilaksanakan 3x. Dari kegiatan tersebut akan disusun Rencana Bisnis Perumda Aneka Dharma. Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp.20.625.000,- realisasi Rp20.600.000,- persentase mencapai 100% tingkat capaian program 100%.

4) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Maksud dan tujuan dari program inia dalah untuk melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, analisis, pengkajian, penelaahan peraturan perundang-undangan, urusan dokumentasi dan pemberian informasi hukum serta bantuan hukum dan penyuluhan hukum. Anggaran program Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 623.295.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi Rp. 598.210.500,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) atau 95,97%.

Adapun hasil dari berbagai kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

5) Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap perkembangan masyarakat atau membuat keadaan hukum yang seharusnya ada dalam masyarakat, yang didukung dengan legal drafting serta dengan kegiatan penelitian dan pengkajian hukum yang dapat dijadikan sebagai bahan hukum untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang baik.

Kegiatan ini merupakan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Sebelum adanya pandemi Covid-19 rencana penyusunan Raperda Tahun 2020 sebanyak 17 Raperda, namun dengan adanya pandemi Covid-19 target penyusunan Raperda Tahun 2020 sebanyak 10 Raperda yang terdiri atas inisiatif Bupati sebanyak 5 Raperda dan 5 Raperda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul. Selain program pembentukan raperda dalam kegiatan Legislasi ini juga dilakukan kegiatan kajian peraturan perundang-undangan melalui *public hearing*/konsultasi publikasi rancangan peraturan daerah yang akan diterbitkan.

Pagu anggaran kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebelum direcofusing sebesar Rp. 284.560.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh rupiah) dengan adanya Covid-19 direcofusing sebesar Rp. 108.125.000,00 (seratus delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Anggaran kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan setelah direcofusing sebesar Rp. 176.435.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dapat terealisasi sebesar Rp. 173.642.500,00 (seratus tujuh puluh

tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau 98,42% (sembilan puluh delapan koma empat puluh dua persen).

Selama masa pandemi Covid-19, konsultasi publik dilaksanakan hanya 1 (satu) di Bulan Maret 2020 untuk menampung masukan dari masyarakat dari Raperda Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan peserta sebanyak 75 orang yang terdiri dari unsur Desa. Selanjutnya kegiatan konsultasi publik tidak dilaksanakan melalui tatap muka karena untuk mengurangi kerumuman dengan adanya pandemi Covid-19. Konsultasi publik Raperda selanjutnya untuk menampung aspirasi dari masyarakat melalui website yang sudah ada dalam Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum yang merupakan website resmi Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul. Semasa pandemi Covid-19 kegiatan Legislasi tetap berjalan, beberapa yang tidak dilaksanakan karena anggaran *direcofussing* adalah pengadaan pihak ketiga untuk penyusunan Kajian Naskah Akademik dan belanja konsultasi publik yang belum terlaksanakan.

Adapun untuk kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020, Raperda yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah sebagai berikut:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan
 - d) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
 - e) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2020 tentang
 - h) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2020 tentang, dan
 - i) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Daerah yang menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebanyak 5 Perda yang ditetapkan di Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ijin Pembuatan bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di

Kabupaten Bantul, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul

- c) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projo Tamansari
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
- f) Selanjutnya terdapat 1 (satu) raperda dari Program Pembentukan Peraturan Daerah 2020 yang belum selesai pembahasan dengan DPRD yaitu Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Hal ini dikarenakan sesuai hasil konsultasi Gubernur DIY, raperda dimaksud menjadi 2 (dua) Raperda baru sehingga perlu disusun 2 (dua) Naskah Akademik yang memerlukan waktu dan kajian yang lebih mendalam, sehingga belum dapat terselesaikan di Tahun 2020.

a) Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengelola dan menyediakan informasi tentang produk-produk hukum dan pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum Pemerintah Daerah baik secara *offline* maupun secara *online*. Hal ini memudahkan bagi masyarakat, aparatur dan siapa yang membutuhkan suatu aturan secara cepat.

Melalui kegiatan ini dilaksanakan alokasi anggaran sebelum Covid-19 sebesar Rp. 91.365.000,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) mendapat *recofussing* sebesar Rp. 70.750.000,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 20.615.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 20.415.000,00 (dua puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah) atau 99,02 % (sembilan puluh sembilan koma nol dua persen) dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

(1) Penerbitan Lembaran Daerah

Pada tahun 2020 tidak dapat melaksanakan penerbitan buku Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

(2) Pendokumentasian Produk Hukum Daerah

Pendokumentasian Produk Hukum Daerah dilaksanakan melalui pemberian nomor produk hokum dan nomor pengundangan serta penyimpanan naskah asli produk hokum dalam bentuk Himpunan Peraturan Perundang-undangan sebagai dokumentasi hukum. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 14 Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Adapun Peraturan Bupati pada tahun ini telah ditetapkan sebanyak 153 Peraturan Bupati sedangkan

untuk Keputusan Bupati sebanyak 686 yang didokumentasikan.

(3) Publikasi Produk Hukum Daerah Melalui Website

Melalui kegiatan ini dilakukan proses penyusunan ulang produk hukum daerah baik berupa peraturan daerah, Peraturan Bupati maupun SK Bupati dalam format dokumen pdf yang disesuaikan dengan dokumen aslinya untuk diunggah/*diupload* dalam *jdih.bantulkab.go.id*.

Kegiatan ini memiliki resiko yang cukup tinggi mengingat dapat diaksesnya produk hukum dengan mudah oleh pengguna internet. Dengan jumlah produk hukum yang cukup banyak diperlukan kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian dalam penyusunan dokumennya, sementara personil yang menangani terbatas. hal ini mengakibatkan belum semua produk hukum dapat diunggah dalam *website* tepat waktu.

(4) Sosialisasi Produk Hukum Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami produk hukum yang telah diterbitkan maupun yang berlaku sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pada Tahun 2020 kegiatan sosialisasi tidak dapat dilaksanakan karena anggaran direcofusing dan menjaga untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui website JDIH Bantul dengan ditayangkannya produk hukum berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

(5) Legal Expo (Pameran Produk Hukum)

Kegiatan ini diselenggarakan secara rutin setiap tahun sekali dengan tujuan tidak hanya sebagai ajang evaluasi pembentukan produk hukum baik di tingkat pusat maupun daerah oleh Kementerian Hukum dan HAM RI tetapi lebih mendalam yaitu sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku pemakai atau user dari hukum yang telah ada dan telah diterapkan. Tahun 2020 kegiatan Legal Expo dilaksanakan melalui zoom meeting pada tanggal 22 Oktober 2020.

b) Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan fasilitasi berupa pendampingan hukum bagi pemerintah daerah, aparatur pemerintah daerah dan desa serta masyarakat miskin yang memerlukan pendampingan beracara di Pengadilan serta membantu dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Sehingga masyarakat, aparatur pemerintah maupun desa pada saat berhadapan dengan hukum dapat dilakukan pendampingan. Permasalahan yang mendapat pendampingan adalah masalah perdata dan tata usaha negara.

Kegiatan pemberian bantuan hukum dilaksanakan melalui fasilitasi penyelesaian perkara litigasi dan non litigasi. Perkara litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan, sedangkan perkara non litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 208.325.000,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 191.493.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atau 91,92% (sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua persen) dapat ditangani sejumlah permasalahan hukum baik litigasi maupun non litigasi dengan hasil sebagai berikut:

(1) Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Litigasi

(2) Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara non Litigasi

Kegiatan pemberian bantuan hukum dalam perkara non litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan, meliputi: konsultasi, penanganan pengaduan, mediasi dan pendampingan penyelesaian perkara di luar pengadilan yaitu somasi berkaitan dengan proses pengadaan barang jasa pembangunan jembatan Benyo dan somasi terhadap Bupati Bantul terhadap Somasi warga atas pernyataan Bupati Bantul bahwa akan membuldoser rumah warga.

(3) Forum koordinasi RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) dengan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini merupakan sub kegiatan Pemberian Bantuan Hukum yang merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Kegiatan ini mendasarkan pada :

- (a) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.

(b) Surat Edaran Nomor 198/1931/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2017.

Adapun hasil forum koordinasi RANHAM tersebut sebagai berikut:

- (a) Pemerintah Kabupaten Bantul mendapat Predikat sebagai Kabupaten Peduli HAM.
- (b) Pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran HAM dapat ditindaklanjuti.
- (c) Harmonisasi produk hokum daerah terkait dengan HAM.

c) Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Pemerintah Desa

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah pendampingan ke Pemerintah Desa pada saat penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa, sehingga diharapkan produk hukum yang ditetapkan di Desa sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

Kegiatan ini merupakan bentuk dari pelaksanaan salah satu tugas dan fungsi pada Bagian Hukum dalam hal asistensi penyusunan dan pengawasan produk hukum desa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Dalam masa pandemi Covid-19 kegiatan ini tidak dilaksanakan karena anggaran direcofussing dan pendampingan tetap dilaksanakan melalui telepon atau aparatur kalurahan yang aktif ke Bagian Hukum untuk melakukan konsultasi.

d) Kegiatan Penyuluhan Hukum

Maksud dari kegiatan ini adalah merupakan salah bentuk pendampingan Bagian Hukum kepada masyarakat berkaitan dengan pengetahuan hukum di masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan :

- (1) Memberikan ruang/wadah/sarana belajar bagi Pemerintah Kalurahan, Kapanewon dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
- (2) Memberikan tambahan wawasan pengetahuan bagi Pemerintah Kalurahan, Kapanewon dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

Namun dengan adanya pandemi Covid-19 kegiatan ini juga tidak dilaksanakan, Tahun 2020 dari pihak Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Yogyakarta juga meniadakan kegiatan ini, sehingga tahun 2020 tidak dilaksanakan penyuluhan dan pembentukan Kadarkum.

e) Kegiatan Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai salah satu bentuk penyebarluasan produk hukum yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul meliputi Peraturan Dearah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Bentuk penyebarluasan melalui sistem jaringan informasi hukum melalui jdih.bantulkab.go.id/produkhukum dan pembinaan petugas JDIH di Perangkat Daerah. Kegiatan ini pada Tahun 2020, pembinaan petugas JDIH di Perangkat Daerah tidak dilaksanakan karena pandemi Covid-19 yang membatasi kerumunan dan pengumpulan massa.

f) Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini merupakan salah bentuk atau cara dalam upaya harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati antara produk hukum Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat. Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan produk hukum Daerah Kabupaten Bantul berupa Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini awal sebelum recofussing sebesar Rp. 26.030.000,00 (dua puluh enam juta tiga puluh ribu rupiah) setelah di recofussing sebesar Rp. 19.510.000,00 (sembilan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 6.520.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 6.520.000,00 atau 100%. Adapun produk hukum yang telah ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- ❖ Peraturan Bupati : 153 buah
- ❖ Keputusan Bupati : 686 buah
- ❖ Instruksi Bupati : 5 buah

Dari target kinerja sebanyak 115 Peraturan Bupati sampai dengan bulan Desember tahun 2020 telah ditetapkan sebanyak 153 buah Peraturan Bupati, sedangkan untuk penyusunan Keputusan Bupati dari target kinerja sebanyak 600 Keputusan Bupati tersusun sebanyak 686 Keputusan Bupati. Dengan demikian kegiatan penyusunan produk hukum daerah ini melebihi target yang ditetapkan.

Selama pandemi Covid-19 penyusunan produk hukum meningkat disebabkan pelaksanaan penanganan Covid-19 memerlukan landasan pelaksanaan baik berupa Peraturan

Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati maupun Surat Edaran. Landasan hukum pelaksanaan penanganan Covid-19 Tahun 2020 sebagai berikut :

- ❖ Peraturan Bupati sebanyak 30 buah
- ❖ Keputusan Bupati sebanyak 65 buah
- ❖ Instruksi Bupati sebanyak 5 buah
- ❖ Surat Edaran sebanyak 35 buah

g) Pengawasan Rancangan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Desa Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan

Kegiatan Pengawasan Rancangan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Desa Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan dilaksanakan dalam rangka fasilitasi penyusunan produk hukum sebagai tindak lanjut pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di Kabupaten dan Kalurahan. Penyusunan tindak lanjut penugasan urusan keistimewaan di Kabupaten Bantul telah dilaksanakan sejak Tahun 2019 dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah :

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan

Kegiatan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum merupakan bagian dari urusan kelembagaan dengan tolok ukur kegiatan yang ditandatangani dalam Berita Acara Kegiatan. Anggaran yang diampu oleh Bagian Hukum sebelum adanya refofusiing sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah direfofussing menjadi Rp. 211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 205.740.000,00 (dua ratus lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) atau sebesar 97, 50%.

Penggunaan Dana Keistimewaan telah menghasilkan 2 Peraturan Bupati yaitu :

- (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan
- (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan

Selain itu telah dilaksanakan sosialisasi terhadap 2 Peraturan Bupati Bantul tersebut sebanyak 4 angkatan yang dilaksanakan pada Bulan September dan Bulan Oktober 2020 dengan peserta Perangkat Daerah, Desa dan unsur BPD sebanyak 50 orang masing-masing angkatan.

Dengan dilaksanakan sosialisasi tersebut ditindaklanjuti oleh Desa untuk segera menyusun Rancangan Perkal tentang Kewenangan Kalurahan sebagai salah satu prasyarat dalam proses pengukuhan desa menjadi kalurahan yang dilakukan oleh Ngarso Dalem.

5) Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Maksud dan tujuan program ini adalah terlaksananya berbagai perumusan kebijakan yang mendukung ketersediaan regulasi yang dibutuhkan oleh masing-masing OPD teknis pengampu urusan dalam menjalankan tupoksinya.

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 3.253.646.380,- terealisasi sebesar Rp. 2.696.978.855,- atau 82,89%. Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan Perumusan kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah merumuskan kebijakan pemerintah daerah yang terkait masalah kependudukan dan kesehatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp0,-

Anggaran kegiatan perumusan kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan ini difocussing untuk penanganan Covid-19 Dampak adanya refocusing menyebabkan tertundanya produk perumusan kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan.

b) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melaksanakan monev terkait kebijakan pemerintah daerah dalam hal kependudukan dan ketenagakerjaan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 0,-. Anggaran kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan ini difocussing untuk

penanganan Covid-19. Dampak adanya refocusing Tahun Anggaran 2020 tidak bisa menyediakan hasil evaluasi kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan.

c) Kegiatan Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah merumuskan kebijakan pemerintah daerah yang terkait masalah sosial kemasyarakatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 54.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.450.000 atau 11,74%. Hal ini disebabkan adanya kebijakan penghentian kegiatan yang bersifat kontraktual karena Covid-19.

d) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melaksanakan monev terkait kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengembangan sosial kemasyarakatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 9.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.000.000,- atau 100%.

e) Kegiatan Perumusan kebijakan pengembangan pendidikan dan Kesehatan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah merumuskan kebijakan pemerintah daerah yang terkait masalah pendidikan dan kesehatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 66.425.000,-

terrealisasi sebesar Rp. 66.381.000,- atau 99,93%.

f) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melaksanakan monev terkait kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengembangan pendidikan dan kesehatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 0,- Anggaran kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kebijakan pengembangan pendidikan dan kesehatan ini difocussing untuk penanganan Covid-19. Dampak adanya refocusing Tahun Anggaran 2020 tidak bisa menyediakan hasil evaluasi kebijakan pengembangan pendidikan dan kesehatan.

g) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan kepedulian Pemerintah Kabupaten Bantul kepada kelompok warga masyarakat yang kurang beruntung, yakni anak yatim, piatu, dan yatim piatu. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.055.212.000,- terealisasi sebesar Rp. 907.608.480,- atau 96% dengan sasaran 3.600 anak yatim piatu.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Pemberian tali asih yang berupa tas sekolah dan alat tulis.
- (2) Kegiatan dilaksanakan di Aula kantor kalurahan dikumpulkan per kecamatan yang selanjutnya disampaikan materi berupa motivasi dari Bupati yang dilanjutkan dengan penyaluran paket tali asih bagi peserta. Untuk tahun 2020 tidak ada motivasi dari narasumber/pendongeng karena pandemic Covid-19.

h) Kegiatan Pendamping Kegiatan Keagamaan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka wujud nyata menghadirkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk memberikan berbagai macam fasilitasi kegiatan keagamaan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 10 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 846.053.505,- terealisasi sebesar Rp. 570.812.500,- atau 67,47%. Realisasi kegiatan sebesar 67,47% disebabkan hanya beberapa sub kegiatan yang dapat terlaksana secara optimal, beberapa sub kegiatan hanya terlaksana sebagian, dan beberapa sub kegiatan tidak dapat terlaksana akibat dampak pandemi covid-19.

i) Kegiatan Pemberdayaan Kaum Rois

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan kepedulian pemerintah daerah kepada kelompok warga masyarakat yang telah mengabdikan dan berjasa di masyarakat namun masih belum memperoleh penghargaan yang setimpal. Pagu

anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.192.373.875,-
terrealisasi sebesar Rp. 1.107.194.875,- atau
92,86%. Kegiatan ini berlangsung selama kurang
lebih dua minggu dengan mengambil lokasi di salah
satu desa pada masing-masing kecamatan. Peserta
kegiatan ini berasal dari seluruh Kaum Rois di
Kabupaten Bantul sejumlah 2.500 orang. Adapun
data peserta kegiatan pemberdayaan Kaum Rois
sebagai berikut:

(1)	Kecamatan Pandak	: 120
(2)	Kecamatan Jetis	: 162
(3)	Kecamatan Sedayu	: 138
(4)	Kecamatan Dlingo	: 182
(5)	Kecamatan Banguntapan	: 288
(6)	Kecamatan Pleret	: 227
(7)	Kecamatan Pundong	: 97
(8)	Kecamatan Kretek	: 87
(9)	Kecamatan Kasihan	: 126
(10)	Kecamatan Srandakan	: 56
(11)	Kecamatan Bambanglipuro	: 115
(12)	Kecamatan Bantul	: 126
(13)	Kecamatan Sewon	: 166
(14)	Kecamatan Pajangan	: 113
(15)	Kecamatan Imogiri	: 224
(16)	Kecamatan Sanden	: 88
(17)	Kecamatan Piyungan	: <u>185</u>
(18)	Jumlah	2.500

Sedangkan bentuk dan uraian kegiatan yang
dilaksanakan berupa:

- (1) Pemberian tali asih yang berupa kain bahan baju,
sarung, dan peci

- (2) Kegiatan dilaksanakan di Aula kantor kalurahan dikumpulkan per kecamatan yang selanjutnya disampaikan materi berupa motivasi dari Bupati Bantul dan motivasi dari narasumber/pendongeng yang dilanjutkan dengan penyaluran paket tali asih bagi peserta.

j) Kegiatan Kajian Kitab Keislaman

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan semangat belajar agama dari sumber-sumber primer dan sekunder, sehingga masyarakat dapat memiliki keilmuan yang luas dalam beragama. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 29.632.000 terealisasi sebesar Rp. 29.632.000 atau 100%.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Ceramah dan diskusi tentang ilmu Agama Islam
- (2) Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah untuk memperdalam ilmu agama melalui sumber-sumber Al-Qur'an dan Hadits dan juga kitab-kitab klasik (kitab kuning) karya para ulama salaf yang sholih. Sehingga masyarakat memiliki wawasan yang luas dalam beragama dan dapat berkarakter sesuai yang dicitakan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul

Berbagai kegiatan dalam fasilitasi keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan dapat turut mewujudkan visi Kabupaten Bantul yaitu Terwujudnya Masyarakat

Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)" dan sekaligus utusan asal dari Kabupaten Bantul dalam berbagai macam lomba dibidang keagamaan yang diselenggarakan hingga tingkat nasional sudah disiapkan dan terseleksi.

k) Kegiatan BAZDA Kabupaten Bantul

Pada tahun 2020 BAZDA Kabupaten bantul berhasil melakukan penghimpunan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) sebesar Rp. 6.171.778.770,- yang terdiri dari Rp. 5.355.102.025,- zakat dan Rp. 816.676.745,- infak/sedekah. Sedangkan yang disalurkan selama tahun 2020 sebesar Rp. 5.073.069.489,- (zakat) dan Rp. 558.416.251,- (infak/sedekah). Penyaluran ini meliputi lima program yaitu Ekonomi (Bantul Makmur), Pendidikan (Bantul Cerdas), Kesehatan (Bantul Sehat), Dakwah Advokasi (Bantul Taqwa), dan Kemanusiaan (Bantul Peduli) dengan total penerima sejumlah 24.506 orang. Sejak ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan ZIS, pengumpulan ZIS di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 pada tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar 94%. Dampak adanya pengumpulan ZIS ini sangat bermanfaat dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mewujudkan visi sehat, cerdas, dan sejahtera.

Tabel 3. 132 Permasalahan dan Solusi kesejahteraan Rakyat

No	Permasalahan	Solusi
1	Pemberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Bantul tertunda akibat adanya pandemi covid-19	Mengadakan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Bantul agar jemaah haji yang tertunda keberangkatannya tahun 2020 diprioritaskan pemberangkatannya pada tahun 2021

6) Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah

Maksud dan tujuan program ini adalah mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran murni Tahun 2020 sebesar Rp.119.010.000,00 difokuskan menjadi sebesar Rp 68.435.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.940.400,00 atau 99,28%.

Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini:

a) Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan pengkajian dan evaluasi kebijakan yang terkait dengan upaya peningkatan kinerja aparatur negara.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran murni Tahun 2020 sebesar Rp. 53.780.000,00 difokuskan sebesar Rp. 44.655.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.515.400,00 atau 99,69%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunya dokumen draft Peraturan Bupati baru yang mengatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja yang akan digunakan mulai tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

b) Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan evaluasi formasi jabatan pada organisasi perangkat daerah sebagaimana yang sudah tertuang dalam Lampiran I Peraturan Bupati Bantul Nomor 140 Tahun 2019 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul serta menyusun Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah yang baru.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran murni Tahun 2020 sebesar Rp. 26.915.000,00 difokuskan menjadi Rp. 15.440.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.310.000,00 atau 99.16%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Hasil Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan penghitungan jumlah formasi yang dituangkan dalam Lampiran I Draft Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2020 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

c) Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten Bantul

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan evaluasi Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2019 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran murni Tahun 2020 sebesar Rp. 38.315.000,00 difokuskan menjadi Rp. 8.340.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.115.000,00 atau 97.30%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen analisis Jabatan pada setiap Perangkat Daerah yang tertuang pada Draft Rancangan Peraturan Bupati Bantul Tahun 2020 tentang Formasi Jabatan dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dengan adanya refocusing anggaran Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul mengakibatkan perubahan pelaksanaan kegiatan Workshop Penyusunan Analisis Jabatan yang seharusnya dilakukan 2 (dua) kali hanya dilakukan 1 (satu) kali sehingga berdampak pada rendahnya pemahaman penyusun Analisis Jabatan pada masing-masing perangkat daerah. Ditambah pelaksanaan rapat yang seharusnya dilakukan 4 (empat) kali hanya dilakukan 1 (satu) kali berdampak pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi data analisis jabatan hanya terbatas Tim Analisis Jabatan dan ABK Kabupaten dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian sehingga hasil Analisis Jabatan yang disusun kurang matang.

7) Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan

Maksud dan tujuan program ini adalah Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran murni Tahun 2020 sebesar Rp. 434093.000,00 difocusing menjadi sebesar Rp 355.983.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 317.703.400,00 atau 89.24 %.

Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran murni Tahun 2020 sebesar Rp. 58.330.000,00 difocusing menjadi sebesar Rp. 55.205.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 53.040.000,00 atau 96.10%.

Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen Naskah Akademis tentang Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

b) Penyusunan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penyesuaian terhadap perubahan struktur organisasi dan tata laksana perangkat daerah di Kabupaten Bantul. Selain itu juga untuk mengampu perubahan peraturan teknis masing – masing urusan yang mewajibkan penyesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran murni Tahun 2020 sebesar Rp. 25.763.000,00 difocusing menjadi sebesar Rp. 19.088.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.288.000,00 atau 80%.

Hasil dari kegiatan ini berupa dokumen Penyusunan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah :

(1) Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan.

- (2) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid 19 .
- (3) Dokumen Kajian tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (4) Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Daerah.

c) Penataan Bentuk Kelembagaan Asli

Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan urusan keistimewaan yang dilimpahkan kewenangan tersebut kepada Kabupaten.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran murni Tahun 2020 sebesar Rp. 350.000.000,00 difokuskan menjadi sebesar Rp. 281.690.000,00 dengan realisasi sebesar 249.375.400,00 atau 89%.

Hasil dari kegiatan ini berupa dokumen Penataan Bentuk Kelembagaan Asli adalah :

- (1) Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- (2) Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja.
- (3) Dokumen Analisis Jabatan Urusan Keistimewaan.

8) Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah

Maksud dan tujuan program ini adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran murni Tahun 2020 sebesar Rp. 302.558.000,00 difocusing menjadi sebesar Rp 150.438.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 147.178.000,00 atau 98.00 %. Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini;

a) Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat bagi Unit Pelayanan Publik

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah peningkatan kualitas mutu pelayanan publik pemerintah daerah karena salah satu tolok ukur tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pelayanan publik yang berkualitas, yang merupakan fungsi dan tugas pokok aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dan tercermin dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan ini didukung anggaran murni Tahun 2020 sebesar Rp. 24.018.000,00 difocusing menjadi sebesar Rp. 16.468.000,00 terealisasi Rp. 14.968.000,00 atau 91.00 %.

Pada tahun 2020 ini penyusunan Dokumen Janji Perbaikan dilaksanakan melalui fasilitasi dan bimbingan teknis di Kecamatan Pajangan yaitu Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pajangan.

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yaitu melakukan analisis dengan berbasis data kuesioner
- (2) Membuat janji perbaikan pelayanan oleh unit pelayanan publik; dan

(3) Menyusun rekomendasi perbaikan pelayanan kepada SKPD yang terkait.

Melalui kegiatan ini, unit kerja pemberi layanan telah dapat mengetahui faktor apa saja yang menjadi keluhan masyarakat dan strategi yang harus dilaksanakan untuk mengatasi keluhan serta keterlibatan SKPD terkait dalam membantu penanganan keluhan dari masyarakat tersebut.

b) Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran murni Tahun 2020 sebesar Rp.15.840.000,00 difocusing menjadi sebesar Rp. 5.440.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.430.000,00 atau 99.81 %.

Kegiatan penyusunan SKM dilaksanakan dengan melakukan koordinasi penyusunan SKM bagi seluruh SKPD se-Kabupaten Bantul. Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, maka dibuatlah aturan pelaksanaan yang berupa Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ditetapkan nilai persepsi, interval SKM, interval konversi SKM, mutu pelayanan, dan kinerja unit pelayanan.

Hasil dari kegiatan ini seluruh SKPD layanan telah menyusun dokumen SKM dengan nilai rata-rata 88,03, nilai terendah 79,33 dan nilai tertinggi 96,35.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan seluruh unit layanan yang ada di Kabupaten Bantul

berada pada interval 81,26 – 100,00 yaitu memiliki nilai A dengan kinerja unit pelayanan dalam kategori sangat baik.

c) Pedampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik. Kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan monitoring penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di seluruh kecamatan se Kabupaten Bantul dan penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Bantul serta keikutsertaan dalam kompetisi inovasi di tingkat nasional.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran murni Tahun 2020 sebesar Rp. 106.415.000,00 difocusing menjadi sebesar Rp. 33.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 32.900.000,00 atau 99.55%.

Pada penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian PANRB, Pemerintah Kabupaten Bantul mengikuti *GELIMASJIWO* (Gerakan Peduli Masyarakat Sehat Jiwo) di UPT Puskesmas Kasihan II sebagai perwakilan inovasi. Pada kompetisi tersebut *GELIMASJOWO* masuk pada nominasi Top 99, sehingga dua tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten Bantul mendapat penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik.

Pada tahun 2020 ini Pemerintah Kabupaten Bantul tidak melaksanakan penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Kabupaten karena terdapat refocusing anggaran yang dilimpahkan untuk penanganan COVID 19 di Kabupaten Bantul.

d) Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah perubahan mind set dan culture set birokrasi pemerintah daerah Kegiatan ini dilaksanakan dengan memfasilitasi terlaksananya reformasi birokrasi di Kabupaten Bantul serta mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi yang tercantum dalam road map reformasi birokrasi Kabupaten Bantul. Selain itu juga dilakukan evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi dikarenakan periode road map yang ada sudah habis pada tahun ini.

Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya program-program reformasi birokrasi menuju kepada perubahan budaya kerja dan pola pikir aparatur dan birokrasi di Kabupaten Bantul yang lebih baik.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran murni Tahun 2020 sebesar Rp.30.090.000,00 difocusing menjadi sebesar Rp. 10.890.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.890.000,00 atau 100 %.

Output dari kegiatan ini adalah dokumen realisasi pelaksanaan program/roadmap reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul serta draft dokumen road map reformasi birokrasi periode 2020 – 2022.

e) Penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Ketataksanaan.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran murni Tahun 2020 sebesar Rp. 26.195.000,00 difocusing menjadi sebesar Rp. 12.720.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.330.000,00 atau 96.93%.

Hasil dari kegiatan ini adalah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan SOP pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bantul.

f) Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah perubahan pola pikir dan perilaku pada setiap Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan nilai nilai kearifan lokal Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran murni Tahun 2020 sebesar Rp. 100.000.000,00 difocusing menjadi sebesar Rp. 71.870.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 70.660.000,00 atau 98.32%.

Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen laporan kegiatan budaya pemerintahan dan laporan evaluasi budaya pemerintahan.

Tabel 3. 133 Permasalahan dan Solusi kapasitas pemberdayaan

No	Permasalahan	Solusi
1	Perubahan nomenklatur jabatan fungsional sehingga terjadi penyesuaian pada analisis jabatan dan analisis beban kerja yang telah disusun.	Mengganti sesuai perubahan nomenklatur terbaru dan berkonsultasi dengan Biro Organisasi
2	Regulasi tentang penyusunan Proses Bisnis kurang mendetail dan belum ada daerah yang menjadi pilot project / atau contoh Proses Bisnis Daerah sehingga di tahun 2020 dalam penyusunannya kurang maksimal.	Melakukan konsultasi atau mendatangkan narasumber dari Kemenpan RB atau Kemendagri dan menyusun peta proses bisnis seperti yang dicontohkan oleh Kemenpan RB.
	Pada Tahun 2020 Pemerintah Pusat Mengeluarkan regulasi yang Harus	Tetap menyusun regulasi tentang

3	<p>Seegera ditindak Lanjuti Oleh Pemerintah Daerah Seperti PP Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 18 Nomor Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang SOTK Sekretariat Daerah. Disisi lain Pemerintah Pusat juga mengeluarkan kebijakan Penyederhaan Birokrasi, kebijakan tersebut kontra indikatif yang menjadikan kebingungan untuk mengambil keputusan tentang regulasi kelembagaan.</p>	<p>kelembagaan sesuai dengan aturan terbaru serta melakukan pemetaan jabatan dan pengajuan sesuai Surat Edaran tentang Penyederhanaan Birokrasi.</p>
4	<p>Kompetensi Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja baik Tim Kabupaten maupun masing-masing perangkat masih rendah sehingga hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja tidak sempurna.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu pendidikan dan pelatihan (Diklat) khusus Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. ▪ pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi data analisis jabatan dan ABK dilakukan langsung Tim Anjab Kabupaten dengan pejabat struktural eselon IV dan pejabat pelaksana pada masing2 OPD.

Sumber : Bag. Organisasi, 2020

9) Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Maksud dari program ini adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pelaporan kinerja dan pelaksanaannya harus didukung data serta kualitas hasil/ output yang baik. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik

sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Bantul tidak terlepas dari masalah yang timbul dalam pelaksanaannya, diantaranya administrasi kegiatan, waktu kegiatan, maupun realisasi capaian target kegiatan. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka diperlukan pengendalian kegiatan dengan cara monitoring serta pelaporan kegiatan yang dilakukan.

Untuk itu, kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah ini adalah menjamin kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Bantul secara administrasi dan pelaporan terselenggara dengan baik.

Secara garis besar bahwa tujuan dari program ini sebagai berikut :

- a) Memberikan laporan kemajuan progress serta hasil akhir dari kegiatan fisik pembangunan di Kabupaten Bantul
- b) Sebagai gambaran evaluasi dan pemetaan permasalahan pembangunan serta pelaksanaan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul
- c) Hasil dari dokumen pelaporan digunakan untuk pemetaan masalah (dampak negative) serta dampak positif terkait kebijakan pembangunan yang akan ditindak lanjuti dan dievaluasi untuk rencana kegiatan tahun berikutnya.

Pagu anggaran murni 2020 sebesar Rp. 442,900,000,- dan dilakukan refocusing menjadi Rp 276,675,000. Sementara pagu anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp. 254,600,000,-. Realisasi Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah sebesar Rp. 253,530,000 atau 99,58 %.

Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD

Maksud dan tujuan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD ini adalah:

Menyusun Dokumen Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD, serta agenda peresmian hasil kegiatan fisik di kabupaten Bantul oleh Bupati Bantul. Dokumen Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD merupakan dokumen administrasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di Kabupaten Bantul, yang berisikan target dan realisasi kegiatannya dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Bantul. Dari hasil evaluasi target dan realisasinya, maka didapatkan hasil dari kinerja perangkat daerah dan didapatkan pemetaan permasalahan yang timbul dari kegiatan fisik Perangkat Daerah.

Output dari kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD sejumlah 4 dokumen (Laporan Triwulan). Untuk Peresmian hasil kegiatan fisik yang merupakan output dari kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan kondisi pandemic Covid 19. Untuk penyusunan Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD digunakan aplikasi esakip sebagai penunjang data laporan dan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah.

Pagu anggaran murni 2020 sebesar Rp. 91,250,000 dan dilakukan refocusing menjadi Rp 40,000,000. Sementara pagu anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp. 2,625,000,-.

Realisasi Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah sebesar Rp. 2,625,000 atau 100 %, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Belanja Cetak dan Penggandaan, dan
- (2) Belanja Makanan dan Minuman Rapat

b) Analisis Kebijakan Pembangunan

Maksud dan tujuan Kegiatan Analisis Kebijakan Pembangunan ini adalah:

Menganalisis kebijakan pembangunan sesuai dengan kondisi serta permasalahan yang ada, dan berdampak pada pembangunan di Kabupaten Bantul. Sedangkan tujuan secara spesifik kegiatan adalah sebagai berikut :

- (1) Pemetaan masalah yang berdampak langsung pada kegiatan pembangunan di Kabupaten Bantul
- (2) Melakukan forum diskusi public untuk memetakan masalah yang terjadi di Kabupaten Bantul dalam bidang Perencanaan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman, serta Bidang perhubungan.
- (3) Melakukan kajian menyeluruh di 4 bidang tersebut untuk mendapatkan solusi dan pemecahan masalah secara akademis yang akan digunakan sebagai acuan dalam langkah pembangunan tahun berikutnya.
- (4) Melakukan kegiatan FGD untuk mengkaji lebih dalam permasalahan yang ada pada 4 (empat) bidang urusan di Kabupaten Bantul yang selanjutnya hasil kajian tersebut di keluarkan sebagai kebijakan pembangunan di Kabupaten Bantul.

Pagu anggaran murni 2020 sebesar Rp. 86,875,000 dan dilakukan refocusing menjadi Rp 11,250,000. Sementara pagu anggaran setelah perubahan APBD bertambah sebesar Rp. 33,750,000,-. Penambahan anggaran setelah perubahan APBD dilakukan untuk kegiatan FGD terkait dengan urusan perhubungan di Kabupaten Bantul. Realisasi kegiatan ini sebesar Rp. 33,750,000 atau 100 %

c) Pelaporan Pembangunan

Maksud dan tujuan Kegiatan Pelaporan Pembangunan ini adalah: Menyusun dokumen perencanaan program/ kegiatan tahun berikutnya sampai kepada pelaporan realisasi fisik dan keuangan. Tujuan dari kegiatan pelaporan pembangunan adalah :

- (1) Menentukan konsep dan gambaran suatu kondisi yang akan dicapai melalui target,
- (2) Efisiensi langkah yang perlu dilakukan dalam mencapai sesuatu secara efisien, terarah, dan efektif.
- (3) Pelaporan pembangunan sebagai bagian dari pertanggung jawaban, akuntabilitas, serta realisasi dari target perencanaan pembangunan, sehingga dapat digunakan sebagai gambaran untuk penyusunan rencana kedepan (*action plan*).
- (4) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas diantaranya Dokumen Laporan Pembangunan, Laporan Kinerja, Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan

Pagu anggaran murni 2020 sebesar Rp. 47,000,000 dan dilakukan refocusing menjadi Rp 8,500,000,-. Sementara pagu anggaran setelah perubahan APBD tetap yaitu sebesar Rp 8,500,000,-. Realisasi kegiatan ini sebesar 8,500,000,- atau 100 %.

d) Penyusunan Standar Satuan Harga

Dokumen Satuan Harga Barang dan Jasa (SHBJ) merupakan buku yang berisi pedoman standar satuan harga barang dan jasa yang diperlukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan RKA maupun DPA Tahun Anggaran 2021. Untuk data Satuan Harga barang dan Jasa (SHBJ) selanjutnya diinput dalam aplikasi SIPD untuk digunakan sebagai acuan perencanaan Anggaran Tahun 2021.

Penyusunan Dokumen SHBJ dilakukan untuk memberikan kemudahan pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA dan DPA. Kemudahan dimaksud adalah memberikan standar konsistensi pada masing-masing SKPD dalam menentukan pilihan kualitas dan harga satuan barang dan jasa. Penentuan harga dan jenis barang yang sama pada RKA masing-masing SKPD dapat terarah dan terkendali.

Pagu anggaran murni 2020 sebesar Rp. 153,450,000,- dan pada tahap refocusing pagu tetap, Sementara pagu anggaran setelah perubahan APBD bertambah sebesar Rp 186,500,000,-.

Penambahan dilakukan untuk kegiatan sosialisasi hasil dokumen SHBJ kepada Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul. Realisasi kegiatan ini sebesar Rp. 185,430,000,- atau 99,43 %

e) Penyusunan Analisa Standar Belanja

Dokumen Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA-DPA Perangkat Daerah dengan pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja.

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah :

- (1) Penetapan plafon anggaran pada saat PPAS
- (2) Dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan
- (3) Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.
- (4) Penentuan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas
- (5) Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif .
- (6) Memiliki argumen yang kuat jika “dituduh” melakukan pemborosan .
- (7) Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu

Pagu anggaran murni 2020 sebesar Rp. 64,325,000,- dan pada tahap refocusing sebesar Rp. 63,475,000,-. Sementara pagu anggaran setelah perubahan APBD berkurang sebesar Rp 23,225,000,-. Realisasi kegiatan ini sebesar Rp. 23,225,000,- atau 100 %

Tabel 3. 134 Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Administrasi Pemerintahan

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pengumpulan data penyusunan dokumen SHBJ maupun ASB tidak tepat waktu, sehingga menyebabkan keterlambatan input data pada aplikasi SIPD.	Melakukan koordinasi secara intensif dan memperkuat komitmen Perangkat Daerah Kabupaten Bantul untuk pengiriman data tepat waktu sesuai dengan kebutuhan dan rencana penganggaran.

10) Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Maksud dan tujuan kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk kelancaran proses pengadaan Barang dan Jasa secara e-tendering.

Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp751.995.500,- realisasi sebesar Rp723.592.00,- atau 97,41 %. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- a) Reviu permohonan usulan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.
- b) Pendampingan PBJ di Organisasi Perangkat Daerah.

Tabel 3. 135 Permasalahan dan Solusi Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Permasalahan	Solusi	Ket
1.	Belum tercukupinya pejabat fungsional pengadaan barang/jasa	Sudah mengangkat 5 jabatan fungsional dari kebutuhan 15 orang	
2	Kompleksitas regulasi pengadaan B/J belum sepenuhnya dipahami	Bimtek, FGD, Forkom pengadaan barang dan jasa dan konsultasi, kajian bersama dan	
3	Konsekuensi hukum proses PBJ yang berat	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan hokum oleh Bagian Hukum • Mengajukan anggaran untuk kebutuhan penasehat hukum 	
4	Ratio jumlah paket pekerjaan dengan personil pokja pengadaan	Pembuatan jadwal pereodesasi bulanan pengadaan barang/jasa	
5	Belum semua OPD melaksanakan PBJ Pengadaan langsung secara elektronik	Asistensi dan bimtek e pengadaan langsung ke OPD	
6	Aplikasi SPSE sering mengalami gangguan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi ke LKPP Jakarta 	
7	Sistem/aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa dan monitoring belum terjadi sinkronikasi / aplikasi belum terhubung secara online	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan LKPP, Kementerian Dalam Negeri dan OPD terkait 	

Sumber : Bag. LPBJ

11)Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan

Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan dengan rencana anggaran Rp. 355.574.000,- dengan realisasi Rp.310.994.000,-. Program ini menyisakan anggaran sebesar Rp. 44.580.000,- dengan tingkat capaian Program sebesar 87.46%.Program ini melaksanakan kegiatan lima kegiatan berupa :

a) Hari-hari besar Nasional dan Hari jadi.

Kegiatan Hari-hari besar dan Hari jadi dengan rencana anggaran Rp. 101.324.000,- dan teralisasi Rp. 63.824.000,- atau tingkat capaian kinerja kegiatan sebesar 62,99%. kegiatan ini menghasilkan output/keluaran terlaksananya upacara hari besar nasional dan hari jadi kabupaten sebanyak 9 kali dari 11 kali agenda yang ditargetkan, yaitu Hari otonomi Daerah, Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Jadi Bantul, Hari Kemerdekaan RI, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Dimasa pandemic covid 19 upacara hari hari Besar dilaksanakan dengan sederhana atau melalui upacara secara virtual sehingga mengurangi biaya. Namun hal tersebut berpengaruh terhadap serapan anggaran. Disamping kegiatan tersebut yang didukung oleh program ini adalah pelaksanaan open house Bupati dan Syawalan Gubernur yang tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya. Outcome dari kegiatan ini berupa pelaksanaan upacara hari-hari besar dan hari jadi sebanyak dapat terlaksana dengan baik.

b) Penerimaan Kunjungan Kerja

Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja didukung anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi Rp. 24.200.000,- dengan capaian kinerja kegiatan sebesar Rp.96,80%. Kegiatan ini termasuk kegiatan yang mengalami pengurangan akibat dari refocusing anggaran untuk menangani dampak pandemic covid 19. Outcome kegiatan ini adalah terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja sehingga diharapkan hasil yang dicapai Pemerintah Kabupaten Bantul adalah citra atau nama baik Kabupaten Bantul yang semakin tersohor di Provinsi atau Kabupaten / kota lain karena beberapa prestasi Kabupaten Bantul bisa menjadi inspirasi bagi Kabupaten Bantul / Kota lainnya.

c) Pengelolaan Informasi Media Massa.

Kegiatan Informasi Media Massa didukung dengan anggaran Rp. 229.250.000,- dengan realisasi Rp. 222.970.000,- dengan capaian kegiatan sebesar 97.25%. Kegiatan ini menghasilkan output / keluaran ATK, Transportasi wartawan untuk peliputan dan jumpa pers, Cetak, penggandaan dan penjilidan, belanja makan dan minum, pakaian kaos / training untuk workshop wartawan dan narasumber untuk workshop. Untuk Publikasi terdiri memuat artikel kegiatan program pemkab. Bantul.

Tabel 3. 136 Permasalahan dan Solusi Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Bantul

No	Permasalahan	Solusi
1.	Pencitraan pimpinan belum terlaksana dengan baik/ Branding terhadap pimpinan belum terbangun dengan baik	Perlunya koordinasi dan komunikasi dengan dinas kominfo untuk publikasi yang komprehensif sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi tentang capaian pembangunan di Kabupaten Bantul melalui media – media yang sudah ada melalui kegiatan pengelolaan informasi media masa

Sumber : Bag. Humpro

12) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Anggaran program sebesar Rp. 2.575.028.320,00 dengan realisasi Rp. 2.371.075.765,00 atau 92,07%.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah dinas /rumah jabatan serta kantor perwakilan di Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 12 (dua belas) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 441.231.500,00 terealisasi sebesar Rp 434.407.100,00 atau 98,45%.

b) Kegiatan Pengadaan pakaian seragam beserta perlengkapannya;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi keperluan bupati dan wakil bupati atas pakaian dinas dan perlengkapannya serta pakaian batik dan pakaian tradisional bagi Bupati dan wakil Bupati. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 77.475.000,00 terealisasi sebesar Rp 73.092.000,00 atau 94%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH yaitu pakaian dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati berupa pakaian sipil

lengkap, pakaian harian sipil, pakaian harian lepas, PDH lengkap, dan pakaian kemeja biru;

- (2) Belanja pakaian batik tradisional yaitu pakaian batik untuk Bupati dan Wakil Bupati.

c) Kegiatan pemeliharaan rumah dan gedung kantor;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk terpeliharanya rumah dinas dan gedung kantor. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 7 (tujuh) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 1.033.617.420,00. terealisasi sebesar Rp 974.803.260,00 atau 94.30 %.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk lokasi Kantor Perwakilan di Jakarta, Rumah Dinas Bupati dan Rumah Jabatan Wakil Bupati;
- (2) Belanja penggandaan untuk penggandaan dokumen-dokumen;
- (3) Pembayaran sewa rumah jabatan/ rumah dinas berupa sewa rumah jabatan untuk Wakil Bupati
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan untuk pemeliharaan gedung kantor Komplek Parasamyra, Komplek Pemda II Manding, gedung rumah dinas sekda, rumah dinas Manding, rumah dinas bupati, rumah jabatan Wakil Bupati serta kantor perwakilan di Jakarta. Cakupan pemeliharaan meliputi pemeliharaan saluran air, pemeliharaan atap, pemeliharaan lantai, slep mushola, slep pendopo, pemeliharaan pintu dan jendela, pengecatan gedung, pengecatan pagar, pemeliharaan kamar mandi , pekerjaan plituran melamin pintu dan jendela;
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan untuk pengadaan bangunan gedung kantor berupa pengadaan partisi dan

interior di Ruang Rapat Sekda, partisi dan interior di Rumah Dinas Sekda.

d) Kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional bagi kelancaran kegiatan pemerintahan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 6 (enam) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 800.329.400,00 terealisasi sebesar Rp 670.133.405,00 atau 83.73 %.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Belanja jasa service berupa service kendaraan jabatan dan kendaraan dinas operasional termasuk bus;
- (2) Belanja penggantian suku cadang onderdil, accu, ban dan lain-lain untuk kendaraan jabatan dan kendaraan dinas operasional termasuk bus;
- (3) Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas untuk bupati dan wakil bupati, sekda, asisten 1,2,3, staf ahli, operasional kendaraan dinas bagian umum dan pelayanan tamu bupati;
- (4) Belanja pengecatan kendaraan bail kendaraan jabatan maupun kendaraan dinas operasional
- (5) Belanja pengisian freon untuk kendaraan jabatan dan kendaraan dinas operasional;
- (6) Belanja aksesoris kendaraan untuk kendaraan jabatan dan kendaraan dinas operasional.

e) Kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah dinas. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 222.375.000,00. terealisasi sebesar Rp 218.640.000,00 atau 98.32 %.

13) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan cakupan nilai evaluasi kinerja. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyusun dokumen perencanaan, laporan kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.3.500.000,- terealisasi sebesar Rp.3.450.000,- atau 98,57%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan.

b) Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Keuangan Daerah.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyediakan informasi untuk kepentingan publik yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp33.500.000,- terealisasi sebesar Rp33.150.000,- atau 98,96%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa penyebarluasan informasi keuangan daerah melalui media cetak dan media online.

c) Penyaluran Belanja PPKD.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyediakan fasilitas operasional dalam penyaluran belanja PPKD. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp5.250.000,- terealisasi sebesar Rp5.245.000,- atau 99,90%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan

yang dilaksanakan berupa koordinasi dan sosialisasi terkait penyaluran belanja PPKD.

d) Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyediakan dokumen SOP. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.2.487.500,- terealisasi sebesar Rp.1.260.000,- atau 50,65%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi pelaksanaan rapat selama pandemi covid-19. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa koordinasi dan penyusunan dokumen SOP.

e) Pendataan dan Pengelolaan Arsip.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mendata, mengelola dan menata arsip kedinasan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp15.000.000,- terealisasi sebesar Rp.14.994.000,- atau 99,96%. Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan sarana penataan arsip.

D. TINDAK LANJUT CATATAN STRATEGIS DPRD TAHUN 2019

Tabel 3. 137 Tindak Lanjut Catatan Strategis DPRD Tahun 2019

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2020		Diusulkan Tahun 2021	Belum ada Tindaklanjut
				Program	Kegiatan		
1	Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan ESDM	DPTR	Pengawasan dan pengendalian tentang penggunaan lahan/tata ruang yang peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengawasan Pemanfaatan ruang (Bentuk kegiatan fasilitasi pegendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dengan dasar aturan penggunaan lahan yang telah ditetapkan dengan melibatkan 21 desa dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan)	Pengawasan Pemanfaatan ruang	
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPPKBPM	Perlunya sosialisasi yang intens dalam peningkatan peran serta masyarakat dalam menggerakkan BUMDes sebagai pendongkrak perekonomian desa	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pelatihan Ketrampilan Usaha Ekonomi Perdesaan	Diusulkan	Mengadakan pelatihan BUMDes untuk masyarakat, pembentukan BUMDes baru dan bimtek peningkatan kapasitas pengelola BUMDes di 4 desa

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2020		Diusulkan Tahun 2021	Belum ada Tindaklanjut
				Program	Kegiatan		
3	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DPPKBPM	Pengembangan potensi masyarakat agar tetap mendapatkan perhatian dengan pemberian fasilitas yang memadai	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bergulir bagi Kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	Tidak Diusulkan	-
4	Kebijakan Umum dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aset / barang milik daerah sudah dilakukan sensus. Menindaklanjuti hasil sensus aset / barang yang tercatat sebagai kekayaan daerah dan pengelolaannya untuk dilakukan dengan profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah	
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimalisasi pendapatan daerah	Optimalisasi pendapatan daerah	
					Pelayanan pajak daerah	Pelayanan pajak daerah	
					Pendapatan dan penetapan wajib pajak	Pendataan dan penetapan wajib pajak	
					Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	
Pemeliharaan basis data PBB P2	Pemeliharaan Basis Data PBB P2						

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2020		Diusulkan Tahun 2021	Belum ada Tindaklanjut
				Program	Kegiatan		
					Operasional pajak daerah	Operasional pajak daerah	
					Intensifikasi PPH OP (PPH Pasal 21)		
					Pengendalian PAD	Pengendalian PAD	
					Verifikasi piutang pajak daerah	Verifikasi piutang pajak daerah	
					Intensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	
					Sosialisasi ketentuan di bidang cukai	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai	
5	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Perlu optimalisasi sarana dan prasarana serta pelayanan sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan. Dan meningkatkan angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik instansi pemerintah	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Melakukan Pengadaan Alat Kesehatan di Puskesmas	Melakukan Pengadaan Alat Kesehatan di Puskesmas Melakukan Pembangunan Gedung (Rehabilitasi) dan relokasi serta pembangunan IPAL di Puskesmas	

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2020		Diusulkan Tahun 2021	Belum ada Tindaklanjut
				Program	Kegiatan		
			Perlu anggaran yang memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau di Puskesmas (BLUD) se Kabupaten Bantul	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Memberikan bantuan pembiayaan kesehatan bagi : a. Warga Kabupaten Bantul yang belum menjadi peserta JKN; b. Warga Kabupaten Bantul peserta JKN yang memerlukan pelayanan kesehatan dan tidak ditanggung JKN; c. Warga Kabupaten Bantul yang memerlukan pelayanan kesehatan dalam rangka menunjang program Pemerintah Daerah; dan/atau Penerima Manfaat yang mengalami kegawatdaruratan medis di Daerah.	Dukungan anggaran dari PEMDA untuk pemenuhan anggaran operasional BLUD Puskesmas	

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2020		Diusulkan Tahun 2021	Belum ada Tindaklanjut
				Program	Kegiatan		
						Memberikan bantuan pembiayaan kesehatan bagi : a. Warga Kabupaten Bantul yang belum menjadi peserta JKN; b. Warga Kabupaten Bantul peserta JKN yang memerlukan pelayanan kesehatan dan tidak ditanggung JKN; c. Warga Kabupaten Bantul yang memerlukan pelayanan kesehatan dalam rangka menunjang program Pemerintah Daerah; dan/atau Penerima Manfaat yang mengalami kegawatdaruratan medis di Daerah.	

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2020		Diusulkan Tahun 2021	Belum ada Tindaklanjut
				Program	Kegiatan		
			Terjaminnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat peserta program jaminan kesehatan	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Memberikan bantuan pembiayaan kesehatan bagi : a. Warga Kabupaten Bantul yang belum menjadi peserta JKN; b. Warga Kabupaten Bantul peserta JKN yang memerlukan pelayanan kesehatan dan tidak ditanggung JKN; c. Warga Kabupaten Bantul yang memerlukan pelayanan kesehatan dalam rangka menunjang program Pemerintah Daerah; dan/atau Penerima Manfaat yang mengalami kegawatdaruratan medis di Daerah.	Memberikan bantuan iuran jaminan kesehatan melalui kepesertaan JKN kepada Warga Kabupaten Bantul yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah meliputi : Warga Miskin, Warga Rentan Miskin, Warga Kabupaten Bantul yang melaksanakan tugas membantu Pemerintah Daerah di Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2020		Diusulkan Tahun 2021	Belum ada Tindakan lanjut
				Program	Kegiatan		
			Perlunya mencegah berkembangnya penyakit, dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebersihan diri, pola hidup bersih dan sehat dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat	Promosi Kesehatan	Penyebarluasan media promosi kesehatan melalui berbagai saluran komunikasi misalnya lewat siaran radio, leaflet, poster, baliho,, iklan layanan masyarakat, video informasi kesehatan.	Penyebarluasan media promosi kesehatan melalui berbagai saluran komunikasi misalnya lewat siaran radio, leaflet, poster, baliho,, iklan layanan masyarakat, video informasi kesehatan, pameran bantul ekspo,karnaval	
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Meningkatkan pengetahuan tentang HIV dan PMTS melalui Sosialisasi HIV dan PMTS di Masyarakat	Meningkatkan pengetahuan tentang HIV dan PMTS melalui Sosialisasi HIV dan PMTS di Masyarakat	
					Meningkatkan Penemuan kasus TB melalui kegiatan Aktif selektif Case finding	Meningkatkan Penemuan kasus TB melalui kegiatan Aktif selektif Case finding	
					Melaksanakan kegiatan untuk mencegah berkembangnya penyakit demam berdarah di tengah masyarakat dengan kegiatan Gerakan Serentak (Gertak) Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)	Melaksanakan kegiatan untuk mencegah berkembangnya penyakit demam berdarah di tengah masyarakat dengan kegiatan Gerakan Serentak (Gertak) Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)	

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2020		Diusulkan Tahun 2021	Belum ada Tindaklanjut
				Program	Kegiatan		
				Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Meningkatkan pengetahuan tentang Kanker Servik dan payudara melalui sosialisasi deteksi dini kanker serviks dan kanker Payudara kepada masyarakat	Meningkatkan pengetahuan tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) melalui workshop KTR kepada masyarakat	
					Meningkatkan pengetahuan tentang Penyakit tidak menular kepada masyarakat melalui workshop kader PTM (penyakit Tidak Menular)	Meningkatkan pengetahuan tentang Penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa kepada masyarakat melalui workshop kader PTM (Penyakit Tidak Menular)	
6	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Lahan terbuka hijau/ruang terbuka hijau (RTH) agar memperoleh perhatian yang optimal	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	1.175.000.000,00	-
			Perlunya pendidikan dan kesadaran hukum pada masyarakat terkait pengelolaan sampah.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	1.380.830.000,00	-
					Kerjasama Pengelolaan Persampahan	329.170.000,00	-
					Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	35.000.000,00	-

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2020		Diusulkan Tahun 2021	Belum ada Tindaklanjut
				Program	Kegiatan		
7	Koperasi dan UKM	DKUKMP	Perlunya data base pelaku UMKM di Kabupaten Bantul sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan dan inovasi lembaga usahamikro kecil dalam proses produksi dan pemasaran	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pengembangan Kewirausahaan- Pendataan UMKM (Rp137.640.000)	Pengembangan Kewirausahaan- Rapat Koordinasi Updating Data UMKM (Rp10.000.000)	
8	Koperasi UKM dan Perindustrian	DKUKMP	Meningkatkan profesionalitas SDM dan Pengembangan ekonomi lokal dalam menciptakan produk-produk yang memenuhi standar mutu dengan melakukan pendampingan dan pembinaan dalam industri dan kegiatan usahanYa	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pengembangan dan Pemberdayaan IKM -Pelatihan IKM olahan pangan dan produk fungsional (12 kali)	Pengembangan dan Pemberdayaan IKM	
						- Pelatihan PIK 13 Paket (Pelatihan Pangan dan Fungsional) - Pelatihan Pokir 24 paket (Pelatihan Pangan dan Fungsional)	
						Pengembangan Industri Kreatif - Pelatihan produk craft pasar ekspor IKM non sentra	

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2020		Diusulkan Tahun 2021	Belum ada Tindakan Lanjut
				Program	Kegiatan		
						Pengembangan Pemasaran IKM -Fasilitasi Pemasaran Produk IKM melalui E-Commerce -Temu Kemitraan dan Test Pasar	
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pengembangan Kewirausahaan-Pelatihan kewirausahaan 11 kali	Pengembangan Kewirausahaan-Pelatihan PIK 21 paket (Pelatihan Olah Makanan, Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan)-Pelatihan Kewirausahaan	
				Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif	Pengembangan UMKM - Pelatihan Bisnis Online 4 kali	Pengembangan UMKM - Pelatihan PIK 15 paket (Pelatihan Keterampilan bagi UMKM, Pengemasan, Bisnis Online) - Pelatihan UMKM 2 kali - Workshop Kemitraan Bagi UMKM - UKM Award	

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2020		Diusulkan Tahun 2021	Belum ada Tindakan Lanjut
				Program	Kegiatan		
						Kegiatan Peningkatan Promosi UMKM -Pembayaran Pengiriman Jual/Beli Online UKM melalui Grab Express Web Booking -Pameran Test Pasar Produk Unggulan UMKM Bantul	
				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Peningkatan Manajemen Perkoperasian	
						Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA -Tangkas Terampil Perkoperasian -Harkop Tingkat Kabupaten	

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2020		Diusulkan Tahun 2021	Belum ada Tindaklanjut
				Program	Kegiatan		
				Program Penataan Struktur Industri	Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri - Pelatihan IKM 4 Kali	Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri - Temu mitra / Temu Bisnis - Pelatihan PIK 7 paket - Pelatihan Pokir 14 paket (Pelatihan Craft, Bisnis Online)	
				Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial		Pemberdayaan IKM Sentra - Pelatihan produk craft pasar ekspor - Diversifikasi Pelatihan bagi IKM	

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2020		Diusulkan Tahun 2021	Belum ada Tindaklanjut
				Program	Kegiatan		
9	Pertanian	Diperpautkan	Turunnya minat masyarakat terhadap pengelolaan sektor pertanian perlu dukungan dan membangun kerjasama dengan pihak lain (swasta) dengan Petani.				Pada tahun 2020, telah direncanakan kegiatan pembentukan Taruna Tani untuk meningkatkan minat anak muda terhadap pertanian. Tetapi, tidak dapat dilaksanakan karena terkena Rasionalisasi Anggaran untuk penanganan Covid19
10	Pangan	Diperpautkan	Meningkatkan diversifikasi pangan dan pangan lokal dalam mewujudkan kedaulatan pangan, dan mempertahankan swasembada padi di Kabupaten Bantul				Pada tahun 2020, telah direncanakan kegiatan pembentukan Taruna Tani untuk meningkatkan minat anak muda terhadap pertanian. Tetapi, tidak dapat dilaksanakan

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2020		Diusulkan Tahun 2021	Belum ada Tindaklanjut
				Program	Kegiatan		
							karena terkena Rasionalisasi Anggaran untuk penanganan Covid19
11	Pertanian	Diperpautkan	Perlunya pengendalian, pengawasan dan pembatasan alih fungsi lahan menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan sehingga produksi hasil pertanian tetap terjaga				Pada tahun 2020, telah direncanakan kegiatan koordinasi dengan petani dalam rangka pencegahan alih fungsi lahan pertanian. Tetapi, tidak dapat dilaksanakan karena terkena Rasionalisasi Anggaran untuk penanganan Covid19
12	Pertanian	Diperpautkan	Perlunya penataan dan pengelolaan yang optimal aset pertanian (Kebun Buah Mangunan) sehingga dapat menambah daya tarik wisata dan tempat edukasi bidang	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pengembangan Agribisnis Pertanian	Untuk tahun 2021, anggaran hanya cukup untuk belanja pakan ternak yang ada di KBM. Sementara anggaran untuk operasionalisasi dan pemeliharaan tidak ada akibat minimnya pagu yang diberikan	

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2020		Diusulkan Tahun 2021	Belum ada Tindaklanjut
				Program	Kegiatan		
			pertanian				
13	Kelautan dan Perikanan	Diperpautkan	Optimalisasi budidaya perikanan dengan menggunakan dengan sistem bioflok	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Peningkatan Kapasitas Perikanan Budidaya		

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2020		Diusulkan Tahun 2021	Belum ada Tindaklanjut
				Program	Kegiatan		
14	Pertanian	Diperpautkan	Meningkatkan daya saing produk pangan dan pertanian dengan modernisasi peralatan dan bibit unggul			Untuk Tahun 2021, direncanakan pengadaan beberapa Mesin pertanian untuk kelompok tani	Pada tahun 2020, telah direncanakan kegiatan Pelatihan dan Bimtek operasionalisasi alat - alat pertanian. Selain itu, direncanakan juga Sekolah Lapang Perbenihan Sayuran dan Bawang Merah . Tetapi, tidak dapat dilaksanakan karena terkena Rasionalisasi Anggaran untuk penanganan Covid19

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2020		Diusulkan Tahun 2021	Belum ada Tindaklanjut
				Program	Kegiatan		
15	Pertanian	Diperpautkan	Pemeliharaan saluran irigasi untuk mendukung produksi pertanian agar mendapatkan perhatian khususnya daerah-daerah yang kesulitan air			Untuk Tahun 2021, telah direncanakan Pembangunan Jaringan Irigasi, Irigasi Air Tanah Dangkal, dan dam parit	Pada tahun 2020, telah direncanakan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Irigasi Air Tanah Dangkal berlokasi di 13 Kelompok Tani. Tetapi, tidak dapat dilaksanakan karena terkena Rasionalisasi Anggaran untuk penanganan Covid19
16	Perhubungan	DISHUB	Untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas pengguna jalan, Dinas Perhubungan diharapkan mengoptimalkan sejumlah Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta rambu-rambu di beberapa ruas jalan yang dipandang	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rehabilitasi/pemeliharaan APILL Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	Rehabilitasi/pemeliharaan APILL Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	Tindak Lanjut
					Rehabilitasi/pemeliharaan LPJU	Rehabilitasi/pemeliharaan LPJU	Tindak Lanjut

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2020		Diusulkan Tahun 2021	Belum ada Tindak Lanjut
				Program	Kegiatan		
			penting dengan memperhatikan data titik rawan kecelakaan.				
			Dengan meningkatnya pemasangan LPJU, maka perlu sarana dan prasarana, serta anggaran yang memadai untuk pemeliharannya.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Tindak Lanjut
			Kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bantul yang berdampak kemacetan perlu dilakukan pengaturan atau rekayasa lalu lintas terkait.	Pengembangan Kelalu - lintasan	Peningkatan Displin Masyarakat dalam Berlalu - lintas	Peningkatan Displin Masyarakat dalam Berlalu - lintas	Tindak Lanjut
			Pelaksanaan pengelolaan parkir khususnya perlu dilakukan penataan, penertiban dan pengawasan antara dinas pengampu, pengelola parkir dan	Pengembangan Kelalu - lintasan	Peningkatan Displin Masyarakat dalam Berlalu - lintas	Peningkatan Displin Masyarakat dalam Berlalu - lintas	Tindak Lanjut

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2020		Diusulkan Tahun 2021	Belum ada Tindaklanjut
				Program	Kegiatan		
			warga masyarakat sehingga dapat berjalan tertib, lancar, dan tidak mengganggu kepentingan pengguna jalan.				
17	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Formasi dan ketersediaan ASN belum dapat terselesaikan, berkenaan dengan moratorium dan pensiun, maka perlu adanya solusi tepat dan efisien	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN	Pada tahun 2021 diusulkan dalam program dan kegiatan yang sama, yaitu penyusunan formasi dan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS	-
			Perlunya analisis jabatan yang obyektif, transparan dan jauh dari intervensi berbagai pihak yang tidak berkepentingan	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT	Pada tahun 2021 diusulkan dalam program dan kegiatan yang sama, yaitu penataan pegawai yang meliputi pengangkatan jabatan baik struktural maupun fngsional tertentu, mutasi jabatan baik luar daerah maupun dalam daerah serta proses seleksi JPT	-
					Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Uji Kompetensi dan Psikologi	Pada tahun 2021 diusulkan dalam program dan kegiatan yang sama.	-
18	Politik Dalam	Badan	1. Telah dilaksanakan	Pendidikan Politik	Pendidikan Politik	Diusulkan Tahun 2021	Belum ada tindak

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Catatan Strategis	Telah Dilaksanakan Tahun 2020		Diusulkan Tahun 2021	Belum ada Tindaklanjut
				Program	Kegiatan		
	Negeri	Kesbangpol Bantul	Pembinaan Pemilu Tahun anggaran 2019 sebanyak 78 sekolah dari hasil tersebut dapat dicapai peningkatan partisipasi sekolah dari tahun sebelumnya sebanyak 7 sekolah.	Masyarakat	dimasyarakat		Lanjut
			2. Adanya peningkatan partisipasi Pemilu di tahun 2019 sebanyak 91 % dan ini juga didominasi oleh Pemilih Pemula.				

E. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020

Berdasarkan capaian kinerja pembangunan Tahun 2019, isu-isu strategis pembangunan 2020, prioritas pembangunan Nasional dan DIY serta Tema Pembangunan Kabupaten Bantul 2020, Pemerintah Kabupaten Bantul merumuskan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2020 sebagai berikut:

- 1) Pembangunan manusia dan pengentasan Kemiskinan
- 2) Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
- 3) Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah
- 5) Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban
- 6) Pemantapan reformasi birokrasi

Prioritas pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2020 ditetapkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian misi dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021. Untuk mendukung percepatan capaian sasaran pembangunan Kabupaten Bantul 2020 dirumuskan dalam **Quick Win** yang mendukung pada masing-masing prioritas sebagai berikut:

- 1) Pembangunan manusia dan pengentasan Kemiskinan
 - a. Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan BOP dan insentif bagi GTT dan PTT
 - b. Peningkatan kualitas kesehatan melalui bebas tarif pelayanan Puskesmas dan pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat.
 - c. Pengurangan beban warga miskin melalui perbaikan RTLH, dan Boga Sehat.
- 2) Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup

- a. Peningkatan produksi pertanian melalui Sistem Tanam Jajar Legowo Padi
 - b. Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
 - c. Perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan
- 3) Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah
- a. Inkubator bisnis
 - b. Peningkatan akses kawasan industri
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah
- a. Pengembangan jaringan *fiber optic* (FO)
 - b. Peningkatan jalan Cinomati dalam rangka pengembangan kawasan Pleret dan Dlingo
 - c. Perluasan jaringan LPJU
- 5) Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban
- a. Penyiapan keamanan dan ketertiban dalam rangka Pilkada dan Pilurdes
- 6) Pemantapan reformasi birokrasi
- a. Pembangunan Mall Pelayanan Publik
 - b. Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan



BAB IV BANTUAN KEUANGAN KHUSUS



BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Program Program Bantuan Keuangan Khusus

1. Pembangunan Jamban
2. Padat Karya Infrastruktur
3. Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
4. Bantuan Pelaksanaan Pemilukada 2020
5. Pembangunan akses jalan Kawasan Industri
6. Bantuan Penguatan usaha ekonomis produktif program keluarga harapan
7. Bantuan usaha ekonomis produktif program keluarga harapan
8. Bantuan kelompok usaha bersama pengembangan
9. Bantuan Keuangan Kepada Desa

B. Realisasi Program Bantuan Keuangan Khusus

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 untuk 3(tiga) kegiatan yang bisa dilaksanakan sebesar. Rp 5.354.000.000,- terealisasi Rp. 4.827.526.248 setara dengan 90,13% dengan penjelasan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pembangunan Jamban

Pembangunan Jamban (350 penerima) dengan pagu sebesar Rp 1.050.000.000,- sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2020 terealisasi sebesar 213 penerima @ Rp. 3.000.000 total sebesar 639.000.000,-. Selisih antara target dengan realisasi karena saat dilakukan survey ulang sebelum pelaksanaan 137 calon penerima sudah memiliki jamban.

2. Padat Karya Infrastruktur

Bantuan Keuangan padat karya infrastruktur sebesar Rp 4.147.000.000 terealisasi 4.032.291.248 setara 97,23% digunakan untuk 29 kelompok penerima. Kegiatan ini semula difocusing, dan dianggarkan kembali pada Perubahan APBD dan telah selesai 100%.

3. Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

Bantuan Keuangan sebesar Rp. 157.000.000,- terealisasi Rp. 156.235.000,- untuk pembangunan LPJU di Piyungan sebanyak 10 titik sudah selesai dilaksanakan 100%.

4. Bantuan Pelaksanaan Pemilukada 2020

Bantuan keuangan untuk pemilukada tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.000.000.000,- terealisasi fisik dan keuangan 100%

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 yang batal dilaksanakan pelaksanaan sebagai berikut:

5. Pembangunan akses jalan Kawasan Industri

Surat dari Pemda DIY nomor 900/6885 tanggal 23 April 2020 yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembangunan akses jalan Kawasan Industri Piyungan sebesar Rp. 47.000.000.000 dihentikan dan belum dilaksanakan kontrak.

6. Bantuan Penguatan usaha ekonomis produktif program keluarga harapan

Bantuan Keuangan khusus untuk bantuan usaha ekonomis produktif program keluarga harapan tahun 2020 dengan pagu

sebesar Rp. 57.000.000,- kegiatan ini dihentikan dan tidak dilaksanakan.

7. Bantuan usaha ekonomis produktif program keluarga harapan
Bantuan ini dengan sasaran 215 orang dengan pagu sebesar Rp. 645.000.000,- kegiatan ini dihentikan dan tidak dilaksanakan.

8. Bantuan kelompok usaha bersama pengembangan
Bantuan ini dengan sasaran 20 KUBE dengan anggaran Rp. 450.000.000,- kegiatan ini dihentikan dan tidak dilaksanakan.

Surat edaran yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan ini antara lain: Surat Edaran Dinas Sosial DIY nomor 462/05301/IV.1 terkait redesign kegiatan TA 2020. Surat edaran Gubernur DIY nomor 900/1117 yang menyebutkan Bantuan KUBE dan Bantuan Penguatan usaha ekonomis produktif program keluarga harapan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan bahwa calon penerima Bantuan social selama masa pandemic belum menerima Bantuan social selama pandemic baik dari kementerian social, Top up DIY, APBD Kabupaten/kota maupun Dana Desa dan bantuan sejenisnya.

9. Bantuan Keuangan Kepada Desa

- a. Desa Sitimulyo, Kapanewon Piyungan

Bantuan keuangan untuk pembangunan talud berlokasi di dusun ngablak RT. 05 sepanjang 362.6 meter dengan pagu sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar 100% dengan fisik sebesar 100%.

- b. Desa Bawuran, Kapanewon Pleret

Bantuan Keuangan kepada Pemdes bawuran digunakan untuk pengecoran jalan sepanjang 437 m lebar 3 m tebal 10 cm

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- terserap 100% dengan capaian fisik 100%.



Gambar 4. 1 Pengerasan Jalan Desa Bawuran



BAB V PENUTUP



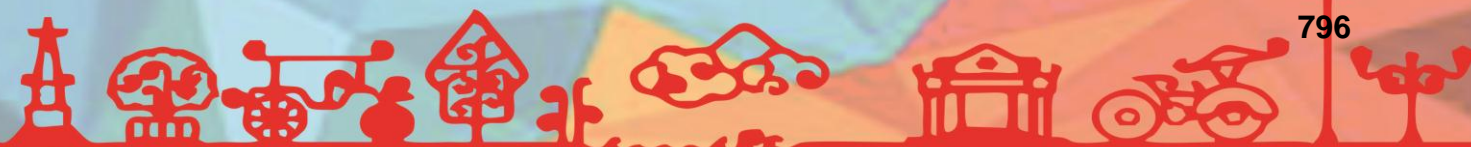
BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bantul Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan sebuah wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 serta sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ Bupati Bantul menjadi bahan evaluasi kinerja pembangunan pada Tahun Anggaran 2020 serta sebagai acuan strategi pembangunan daerah dimasa yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Bantul mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh elemen atas capaian yang diperoleh di Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan indikator kinerja pada setiap urusan pemerintahan yang direncanakan. Indikator kinerja tersebut ditetapkan di dalam RPJMD untuk setiap tahun selama lima tahun. Disebabkan LKPJ juga merupakan evaluasi terhadap RPJMD yang ada, maka capaian indikator kinerja bisa dikatakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah. Capaian kinerja pembangunan Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 tidak lepas dari dukungan DPRD, Jajaran OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul termasuk Pemerintah Desa, seluruh Stakeholder pembangunan, dan seluruh rakyat Kabupaten Bantul yang telah mendukung dan mensukseskan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah dan kemasyarakatan.

Pelaksanaan jalannya Pemerintahan hingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bantul Akhir Tahun Anggaran 2020 tidak luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan, maka dari itu kami haturkan permohonan maaf serta mengharapkan adanya saran, kritik dan rekomendasi konstruktif dari DPRD Kabupaten Bantul, sehingga



dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya perbaikan kinerja pemerintahan dan pembangunan pada tahun berikutnya.

Aamiin YRA.

LAMPIRAN A



LAMPIRAN

Lampiran A Prestasi dan Penghargaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020

No.	Ajang Kejuaraan	Asal Penghargaan	Tingkat	Prestasi
1.	BAHRUL IHSAN ANSHARI	Karate Terbuka Piala BNN	Propinsi	Juara 1
2.	AYRA AZRA MUHAMMAD SEMBIRING	KARATE TERBUKA PIALA BNN Kab. Bantul	PROPINSI	JUARA 2
3.	MUHAMMAD ZIDAN ARZETTO	TAEKWONDO INSTIPER CHAMPIONSHIP	PROPINSI	JUARA 1
4.	MUHAMMAD ZIDAN ARZETTO	WALIKOTA CUP VII	PROPINSI	JUARA 1
5.	Muhammad Iqbal	Musaba cup 5	propinsi	Juara tiga kelas c putra
6.	Aditya Noor Trisnawan	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)DIY	DIY	Juara III Cabang Bulutangkis
7.	Karisma Dewi Pratama	FLSSN Cabang Desain poster	Provinsi DIY	Juara 2
8.	Dzakiyya Akmala Zahwa	FASI XI Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi	Qiro'ah
9.	SHEIVA AJI DIRGATAMA	ATLETIK	PROPINSI	JUARA 1 KEJUARAAN ATELTIK O2SN PROPINSI
10.	Nuzul Asmi Husna Raihanah	Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseuman	Provinsi	Juara 3
11.	Nessa Swastika Larasati	Kejuaraan Daerah Taekwondo Tingkat Pelajar "Kanisius Sengkan Cup 2019"	Propinsi	Juara 3
12.	Aditya Noor Trisnawan	Pekan Olahraga Pelajar Daerah(POPDA) DIY	DIY	Juara 3 cabor bulutangkis
13.	Yusnita Rindi Isnaini	Kompetisi Sains Lite Version (SIRION)	Nasional	Peringkat 11 dari 221 peserta
14.	KHANSA SAFINATUNNAJAH	Badminton POR SD	Kabupaten	Juara 3 tunggal putri
15.	NOVAL AHSANUL INSAN	Juara pencak silat	DIY-JATENG	Juara 2 Pencak Silat
16.	DAFFA ARROWAN RAHMAT ANANDA	PANAHAN	PROPINSI	JUARA 1 TOTAL JARAK BEREGU

No.	Ajang Kejuaraan	Asal Penghargaan	Tingkat	Prestasi
17.	Maylafaiza Tsabita Nareswari	Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseuman	Provinsi	Juara 3
18.	MUHAMMAD ZULHAM, M.Pd	EDUCATION EXCHANGE	INTERNASIONAL	LERNING ACTIVITY BEST ACHIEVMENT RUNNERUP
19.	Nahla Faiza Rahma	KOSN Pencak Silat 2020	Nasional	Juara 3
20.	Nahla Faiza Rahma	KOSN	Propinsi	Juara 1
21.	Nahla Faiza Rahma	POPDA PENCAK SILAT DIY 2020	Propinsi	Juara 1
22.	Thalita Dzakiya Fitri	KOSN PENCAK SILAT 2020	Propinsi	Juara 2
23.	DERMARIA CHELSI	LOMBA BACA PUISI	NASIONAL	JUARA 1
24.	ANNINDYA CITRA PARAMITA	DUTA SENI PELAJAR YOGYAKARTA	NASIONAL	MENARI
25.	Athaillah Rasyid Mappy Wali Yusuf	KOSN PENCAK SILAT SD 2020	Propinsi	Juara 2
26.	Adhelia Arifhesti	Lomba cerdas cermat kebudayaan dan permuseuman	Provinsi	Juara 3
27.	Nahla Faiza Rahma	KOSN PENCAK SILAT SMP 2020	Nasional	Juara 3
28.	TSAQQIFNA FADHLARRAHMAN	Kompetisi Siswa Berprestasi 2020 AIR-LANGGA	SMP/MTs Se-Jawa	Juara 1
29.	Noverinda Afriska Putri	Kabupaten	Tingkat SMP	Pekan olah raga pelajar kabupaten bantul
30.	NOVAL AHSANUL INSAN	Pencak silat	DIY-JATENG	Juara 2 Pencak Silat
31.	Nashwa wibowo	Popnas 2019	Nasional	Juara 1 beregu nasional putri
32.	MUH. RAJIB ALI AKBAR	TAEKWONDO	NASIONAL	JUARA 1
33.	ALI AHMAD NUR RIDWAN	Lomba Musabaqoh Tilawatil Quran	PROVINSI	Juara 2 MTQ
34.	TALITHA AYUDYA RYZA DEWATI	TENIS LAPANGAN	KAB, PROPINSI	JUARA 1 POR PELAJAR SE KAB, JUARA 2 POPDA SE DIY
35.	NATAYA NAYLA ZULFA	Karate	Daerah	Kejuaraan Daerah Institut Karate-Do Indonesia DIY

No.	Ajang Kejuaraan	Asal Penghargaan	Tingkat	Prestasi
36.	STEVEN KUKILO SETO	1. 2nd Instiper Taekwondo Championship, 2. Por pelajar kabupaten Bantul, 3. Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)	1. Daerah, 2. Kabupaten, 3. Daerah	Juara 1, Juara 1, Juara 2
37.	Damar arif setiyanto	Karate	Nasional	Juara 1
38.	TALITHA AYUDYA RYZA DEWATI	TENIS LAPANGAN	NASIONAL	JUARA 1 POR PELAJAR, JUARA 2 POPDA DIY, JUARA 2 KEJURNAS KU 16 TAHUN
39.	KARUNIA AFIFA KHAIRUNNISA	TAEKWONDO	INTERNASIONAL	Juara 1
40.	Zeta Nurlitasari	Basket Putri POR pelajar Kab Bantul 2020	Kabupaten	Juara 3
41.	Ardi himawan	Tinju	POPDA DIY	Juara 1
42.	Rio Rayyan Ghifari	Magelang Open Taekwondo Championship	Nasional	Juara 1 Over 46 Kg Pra-Kadet Putra Kelas Festival
43.	Aninda Selviasari	Lomba alih aksara jawa	provinsi	juara 2 alih aksara jawa tingkat provinsi
44.	RANGGA MORA DWI SAKTI	LOMBA MOCOPAT	Popinsi	JUARA 1
45.	Naura Cantika Salsabila Nasri	ISIF (International Science and Invention Fair)	Internasional	medali emas
46.	REINER RAJA AZHAR	POPDA 2020	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Juara 3
47.	Talita Safa Kirana	KIR	Internasional	Medali perak lomba International Science and Invention Fair 2020
48.	ALAYYA RAHMAH	INTERNATIONAL SCIENCE AND INVENTION FAIR (ISIF) 2020	INTERNASIONAL	SILVER MEDAL/MEDALI PERAK
49.	Nasywa Khairunnisa	KIR	Internasional	Medali perak lomba international science and invention fair 2020

No.	Ajang Kejuaraan	Asal Penghargaan	Tingkat	Prestasi
50.	Vanya Putri Salsabila	Juara 1 Marching Band ,,dan juruwicara media audio pembelajaran	Nasional,,dan DIY	Klasemen junior brass,,dan pengisi suara
51.	Mutia Nur Hanifah	ISIF (International Science and Invention) 2020	Internasional	Medali emas
52.	ASSYA FEBRIANA ARTIKA SUSANTO	INTERNATIONAL SCIENCE AND INVENTION FAIR	INTERNASIONAL	SILVER MEDAL/MEDAL I PERAK
53.	MUHAMMAD KHOTIBUL UMAM	PIALA SOERATIN U 13 ASOSIASI PROVINSI PSSI DIY	DIY	SEPAK BOLA
54.	ERLIN MAYTONIKA PRITAMA	PENCAK SILAT O2SN 2019	NASIONAL	JUARA 1 KLAS D PUTRI KATEGORI TANDING
55.	ERLIN MAYTONIKA PRITAMA	OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL	NASIONAL	JUARA 1 SILAT KELAS C PUTRI O2SN 2019
56.	Gading Larasati	Pencak Silat	Nasioal PH CUP	Juara 1
57.	Mutiara widiawati	Popda	Propinsi	Juara 2 catur cepat beregu putri
58.	Rosa Shaqina	Marching Band	Nasional	Juara 1
59.	Yohanes Karol Roberto	Kejuaraan Marching band	Nasional	Juara 1
60.	Adinda Syahira Pratista	ISIF (International Science and Invention Fair) 2020	Internasional	Medali perak ISIF (International Science and Invention Fair) 2020
61.	Rosa Shaqina	Kejuaraan Aceh Marching Band	Nasional	10 besar
62.	Yohanes Karol Roberto	Kejuaraan Aceh Marching Band	Nasional	10 Besar
63.	Rosa Shaqina	Marching Band	Nasional	Bronze
64.	Christelyke Emmanuela Pomo	Kejuaraan Drum Band Magelang 2020	Nasional	juara 1
65.	Junita Saputri	Marching band	Nasional	10 besar
66.	Ericha salshabela putri nathania	Aceh marching band championship V	Provinsi	10 besar
67.	Adinda Salsa Nabila	Kejuaraan Aceh Marching Band Championship V Tahun 2020 (virtual)	Nasional	Peringkat 10 Besar Section Brass

No.	Ajang Kejuaraan	Asal Penghargaan	Tingkat	Prestasi
68.	Junita Saputri	Marching band	Nasional	Juara 1
69.	Yohanes Karol Roberto	Merah Putih Individual Virtual Marching Competition	Nasional	BRONZE
70.	Adinda Salsa Nabila	Merah Putih Individual Marching Competition 2020	Nasional	BRONZE
71.	Jullieta fauzia askiara fristanto	bina Pratama Dandim cup III	DIY jateng	Juara 2 ganda anak putri
72.	Adinda Salsa Nabila	Kejuaraan Virtual Drum Band Magelang 2020	Nasional	Juara 1
73.	Adinda Salsa Nabila	Merah Putih Individual Virtual Marching Competition 2020	Nasional	BRONZE
74.	Nur Endah Kesumarini	1.INSTITUT PERTANIAN STIPER YOGYAKARTA,2.POR 2020,3.KRAKATAU POMSAE VIRTUAL CHAMPIONSHIP,4.Kejuaraan Daerah VIRTUAL POOMSAE TAEKWONDO,5.The Best Of Indonesia Internasional Changmookwana	1.provinsi,2.daerah,3.nasional,4.provinsi,5.Internasional	TAEKWONDO
75.	ROZAN AHNAF RURYSA	Open turnamen pencak silat YOGYAKARTA CHAMPIONSHIP 1 Tahun 2017	Provinsi	Juara 2 kategori tanding
76.	Nafi'ah Kurnia Hapsari	ISIF 2020 (International Science and Invention)	Internasional	Gold medal
77.	FADHILA AZFA	ISIF 2020	Internasional	Medali perak ISIF 2020 (international science and invention fair 2020)
78.	Rayhan Arkananta	Sepak bola	Provinsi	Juara 3
79.	TAUFIK SRI HIDAYATI	DEMO SAINS	Provinsi	Juara 5 kategori senior lomba sains
80.	Nurina Syahrani Tamimi	Marching Band	Nasional	Bronze
81.	Nashwa wibowo	Kejurnas panahan antar PPLP	Nasional	Juara 2 jarak 30 m individu standar bow putri, juara 2 jarak 40 m individu standar

No.	Ajang Kejuaraan	Asal Penghargaan	Tingkat	Prestasi
				bow putri, juara 2 olympic round individu standar bow putri
82.	George Andrew Prasna	Ansambel tiup logam	Nasional	Juara 1
83.	Farah Aini Ramadhanti	Marching band (Ansambel tiup logam)	Nasional	Kejuaraan Aceh Marching band Championship V tahun 2020 (virtual)
84.	KHANSAN IKRAM MALIQ	FOTOGRAFI	NASIONAL	JUARA II
85.	Farah Aini Ramadhanti	Ansambel tiup logam	Nasional	Kejuaraan Virtual Drum Band Magelang 2020
86.	Ahmad Ichsan Maulana	MTQ	Kecamatan	Juara 2 MTQ
87.	George Andrew Prasna	Marching Band	Nasional	10 besar
88.	AHMAD MUMTAZ MUHSIN	LOMBA FOTOGRAFI MUHACOM 2020	NASIONAL	JUARA II
89.	KHANSAN IKRAM MALIQ	FOTOGRAFI	NASIONAL	JUARA II
90.	George Andrew Prasna	Marching Band	Nasional	10 besar
91.	Muhammad Mirza Aghni Wafa	Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten Bantul 2020	Provinsi	Juara 3
92.	AHMAS FERDIANSYAH	TAEKWONDO	PROVINSI	JUARA 3
93.	Fitto langgeng kusuma	Kejurda pencak silat putra	Provinsi	Juara 2
94.	Peni Larasati, S.Pd.	Wardah Inspiring Teacher 2020	Nasional	Finalis
95.	Nadia Fatha Rosyida	KSN Bidang IPS 2020	Provinsi	Juara 3
96.	Muhammad Nazhif Wiratama	1. Olimpiade Edukasi Robotika Tirtatamansari 2017 2. Olimpiade Edukasi Robotika Tirtatamansari 2018 3. Omnas Sains 8 4. Finalis Omnas Sains	.Nasional	Juara 1
97.	Muhammad Nazhif Wiratama	1. Olimpiade Edukasi Robotika Tirtatamansari 2017 2. Olimpiade Edukasi Robotika Tirtatamansari 2018 3. Omnas Sains 8 4.	.Nasional	Juara 1

No.	Ajang Kejuaraan	Asal Penghargaan	Tingkat	Prestasi
		Finalis Omnas Sains		
98.	AGUNG TRI PRASETYO	pencak silat	provinsi	Juara 1 Tunggal Putra POR PELAJAR 2020
99.	AGUNG TRI PRASETYO	pencak silat	provinsi	Juara 1 Tunggal Putra POR PELAJAR 2020
100.	Fadhel Ahmad Jian Adinata	Nasional	Kejuaraan Renang Antar Sekolah dan Perguruan Tinggi se-Indonesia	Juara 2 100m GY Punggung PA Group 3
101.	Cifa Jati Nur Khasamah	Marching Band	Nasional	Juara 1
102.	Saffana Rinaaz Alesha	kata beregu pra pemula putri	DIY	Juara 1
103.	Cifa Jati Nur Khasamah	Marching Band	Nasional	Peringkat 10 besar
104.	DWI ASTUTININGSIH, S. I. Pust.	PEMILIHAN DUTA BACA DIY	PROVINSI	FINALIS DUTA BACA DIY
105.	Gilang Gumilar	Pencak silat Tapak Suci Musaba Cup V	Propinsi DIY	Juara I Kelas Bebas Putra
106.	Avrira Vivi Fatiha Sari	Pencak Silat Tapak Suci Musaba Cup V	Propinsi DIY	Juara II Kelas B Putri
107.	Lanang Arya Pambudi	Pencak Silat Tapak Suci Musaba Cup V	Propinsi DIY	Juara I Kelas E Putra
108.	Lanang Arya Pambudi	Pencak Silat Tapak Suci Musaba Cup V	Propinsi DIY	Juara I Kelas E Putra
109.	Muhaad Mario Pulana	Pencak Silat Tapak Suci Musaba Cup V	Propinsi DIY	Juara I Kelas H Putra
110.	FARREL YUZZA KENZA RAMADHAN	BOLA VOLI	KABUPATEN	JUARA 3 BOLA VOLI TINGKAT KABUPATEN
111.	Nina Nurlatifah	ISIF	Internasional	Medali Perak
112.	Nurina Syahrani Tamimi	Marching Band	Nasional	Peringkat 10 besar
113.	Nurina Syahrani Tamimi	Marching Band	Nasional	Juara 1
114.	Ikhsan Eleanor Setyawan	Atletik	Provinsi	Juara 1
115.	Raditya Pratama Endrayanto	ATHFAL COMPETITION INDONESIA	Aisyyiah seluruh Indonesia	juara 1 lomba pensi ATHFAL COMPETITION INDONESIA
116.	Nindya Kirana P. R.	KOSN Karate	Provinsi DIY	Juara 2

No.	Ajang Kejuaraan	Asal Penghargaan	Tingkat	Prestasi
117.	MUHAMMAD FABIAN RAKAN KAUTSAR	Kejuaraan Tenis Lapangan	Nasional	Juara Ganda Putra KU 14
118.	Nasywa Gendis Ramadhanisya	Lomba macapat	Propinsi	Juara harapan 1
119.	Muhammad habba olavi	olimpiade matematika	Nasional	silver award

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul,2020

LAMPIRAN B



Lampiran B Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator	Satuan	2020		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	klasifikasi	8	7,70	Angka sementara berdasarkan trend dan kondisi COVID 19
2.	Umur Harapan Hidup	tahun	73,65	73,86	Realis BPS
3.	Angka Harapan Lama sekolah	Tahun	15,38	15,17	Realis BPS
4.	Angka Kemiskinan	Persen	13,94 (9,59)	13,50	Realis BPS
5.	Pertumbuhan Ekonomi	persen	- 0,13 (5,5)	0,49**	Angka Proyeksi Bappeda dan BPS
6.	Pemerataan pendapatan (gini ratio)	angka	0,38	0,381**	Angka Proyeksi Bappeda dan BPS
7.	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	- 67 (23)	-54,55	Angka capaian diperoleh perhitungan Dinas Pariwisata
8.	Cakupan industri kreatif	Persen	47	46,2	Angka capaian diperoleh dari perhitungan oleh Dinas KUKMP
9.	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	persen	0,1025	0,71	Angka sementara dari DPPKP
10.	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	persen	1,10	2,8	Angka sementara dari DPPKP
11.	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	persen	0,3	2,7	Angka sementara dari DPPKP
12.	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	persen	0,9	0,93	Angka sementara dari DPPKP
13.	Pertumbuhan produksi perikanan	persen	1,45	1,5	Angka sementara dari DPPKP
14.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	angka nilai	78	76,77	Angka capaian diperoleh dari survey
15.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	63	63,02	Angka Diperoleh dari survey DLH
16.	Desa Tangguh Bencana	persen	45,33	46,66	Angka capaian diperoleh perhitungan BPBD
17.	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	75	75,01	Angka dihitung oleh DPTR dan Bappeda Kabupaten Bantul
18.	Angka Kriminalitas	Persen	0,065	0,097	Data diperoleh dari Polres Bantul
19.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	70	67,5	Angka sementara diperoleh dari survey

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2020



THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE